

DINAMIKA HINDU DI INDONESIA

DINAMIKA HINDU DI INDONESIA

Editor:
I Ketut Ardhana
Ni Made Frischa Aswarini



UNHI



BP PHDI

Editor

I Ketut Ardhana

Ni Made Frischa Aswarini

ISBN 978-602-5401-54-1



9 786025 401541



Universitas Hindu Indonesia



BP PHDI

DINAMIKA HINDU DI INDONESIA

**Editor
I Ketut Ardhana
Ni Made Frischa Aswarini**

**Pustaka Larasan
2019**

DINAMIKA HINDU DI INDONESIA

Editor

I Ketut Ardhana
Ni Made Frischa Aswarini

Penulis

I Ketut Ardhana
I Wayan Tegel Eddy
I Gusti Ketut Widana
Ni Made Frischa Aswarini
Fransiska Dewi Setiowati Sunaryo
Sulandjari
Ni Putu Suwardani
Arya Suharja
I Dewa Ketut Budiana
Made Adi Widyatmika
I Putu Sastra Wibawa
I Putu Gelgel
I Gusti Agung Paramita
I Putu Gede Suwitha
I Wayan Sukayasa
I Wayan Budi Utama

Pracetak

Slamat Trisila

Penerbit

Pustaka Larasan
(Anggota IKAPI Bali)

Jalan Tunggul Ametung IIIA/11B
Denpasar, Bali 80116
Ponsel: 087353433
Email: pustaka.larasan@gmail.com

bekerja sama dengan

Universitas Hindu Indonesia, Denpasar
dan
Badan Penerbit Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat

Cetakan I: 2019

ISBN 978-602-5401-54-1



DAFTAR ISI

Sambutan Rektor UNHI
Sambutan Ketua Harian PHDI
Kata Pengantar
Pengantar Editor

Pendahuluan
I Ketut Ardhana

Dinamika Hindu di Provinsi Lampung
I Ketut Ardhana

Dinamika Komunitas Hindu di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
I Wayan Tegel Eddy, I Gusti Ketut Widana, Ni Made Frischa Aswarini

Dinamika Hindu di Provinsi DKI Jakarta
I Ketut Ardhana, Fransiska Dewi Setiowati Sunaryo

Dinamika Hindu di Provinsi Jawa Tengah
Sulandjari

Dinamika Pendidikan Hindu di Jawa Timur
Ni Putu Suwardani, Arya Suharja, Sulandjari

Dinamika Pendidikan Hindu di Provinsi Kalimantan Tengah
I Dewa Ketut Budiana, Made Adi Widyatmika, I Putu Sastra Wibawa

Hindu di Manado: Sejarah, Migrasi, Sumber Daya Manusia Umat Hindu dalam Kerangka Masyarakat Multikultur
I Ketut Ardhana, Fransiska Dewi Setiowati Sunaryo

Dinamika Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara
Ni Putu Suwardani, Dewa Ketut Budiana



Dinamika Umat Hindu di Makassar: Peran Umat Hindu dan Lembaga Umat dalam Kehidupan Masyarakat Multikultur

I Ketut Ardhana, Fransiska Dewi Setiowati Sunaryo

Peta Potensi Sosial, Budaya, Agama, Pendidikan, Ekonomi, Politik Umat Hindu di Nusa Tenggara Barat

I Putu Gelgel, I Gusti Agung Paramita

Dinamika Agama Hindu di Bali dalam Konteks Lokal, Nasional, Dan Global

I Putu Gede Suwitha, I Wayan Sukayasa

Universitas Hindu Indonesia dan Balisani

I Wayan Budi Utama

Badan Penyiaran Hindu

Indeks

Tentang Penulis



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S.

Om swastyastu

Sejarah perkembangan Hindu di Indonesia telah memberikan gambaran bagaimana sebuah budaya besar dari India berinteraksi dengan budaya asli Nusantara. Merupakan suatu objek *research* yang sangat menarik bagi para peneliti dan sarjana seantero jagat, terbukti dengan banyaknya publikasi yang membahas perkembangan Hindu di Indonesia dari berbagai kajian bidang ilmu.

Universitas Hindu Indonesia (UNHI), sebagai lembaga universitas Hindu tertua di Indonesia, tentu saja harus menjadi lembaga terdepan dalam pengembangan agama dan budaya Hindu. Suatu hal yang sangat elegan jika hasil-hasil kajian akademisi dan peneliti UNHI menjadi referensi utama bagi para peneliti lembaga lain, baik lokal maupun internasional. Untuk itu UNHI selalu berupaya memotivasi dan memfasilitasi akademisinya untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas yang mendukung pengembangan agama dan budaya Hindu.

Buku *Dinamika Hindu di Indonesia*, yang telah diwujudkan dengan kerja cerdas dan kerja keras Tim Peneliti, merupakan salah satu karya akademik para peneliti UNHI. Buku ini secara ilmiah dan lugas mengungkap perkembangan Hindu, mencakup daerah-daerah terpencil kantong-kantong umat Hindu di Indonesia. Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Hindu di berbagai daerah tersebut telah terpetakan dengan baik dalam buku ini. Pemetaan ini merupakan satu langkah penting dalam upaya mewujudkan gagasan pengembangan *Hindu Center* dalam skala nasional dan internasional.



Apresiasi dan ucapan terima kasih yang setulusnya disampaikan kepadaseluruhanggotaTimPenelitiDinamikaHindudiIndonesia, atas kerja kerasnya dalam mewujudkan buku ini. Harapan tertinggi adalah buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi ilmiah yang utama dalam upaya pengembangan agama dan budaya Hindu, khususnya mewujudkan pengembangan *Hindu Center* di Indonesia.

Om santih, santih, santih, Om

Denpasar, September 2019



PENGANTAR KETUA PHDI PUSAT

Mayjen. (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya

Om swastyastu

Salah satu peradaban besar yang berpengaruh di Indonesia adalah India. Hubungan antara Indonesia dan India sudah sangat lama, bahkan dalam karya sastra terkenal Ramayana telah disebutkan *Yawadvipa*, nama pulau Jawa dalam bahasa Sanskerta. Di sisi lain kerajaan pertama di Jawa, Tarumanegara, telah menganut agama Hindu. Adanya pengaruh India di Indonesia juga dapat dilihat pada sumber-sumber sejarah seperti prasasti berbahasa Sansekerta (abad ke-4 sampai tahun 792, tahun dibuatnya prasasti pertama yang menggunakan bahasa lokal). Keberadaan candi-candi Hindu maupun Budha — terutama di Jawa — menunjukkan bahwa hubungan dengan India tidak hanya menyangkut masalah perdagangan, tapi juga hubungan kebudayaan termasuk dua agama besar Hindu dan Budha.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa agama Hindu sangat cepat menyebar di Nusantara karena adanya persamaan unsur-unsur agama Hindu dengan kepercayaan asli Nusantara. Dari aspek pemujaan, agama Hindu memuja Brahman dan para dewa, sedangkan kepercayaan asli Nusantara memuja roh leluhur. Tempat pemujaan agama Hindu berupa lingga, candi, dan arca, sedangkan tempat pemujaan nenek moyang berupa menhir, punden berundak, tahta batu dan patung. Upacara agama Hindu dipimpin oleh Brahmana, sedangkan upacara nenek moyang dipimpin oleh dukun. Kenyataan ini memberi anggapan bahwa kedatangan agama Hindu tidak memberangus budaya asli, tetapi justru menjiwai sistem budaya yang telah ada, sehingga mencerminkan nilai kebenaran, kebajikan dan keindahan (*sathyam, sivam, sundaram*).

Selanjutnya, pada masa kejayaan kerajaan Hindu di Nusantara, telah berkembang suatu masyarakat *kertagama*, yakni suatu masyarakat majemuk yang berada dalam dinamika harmoni di bawah suatu tertib hukum dan kearifan kepemimpinan yang ber-

sumber pada agama sebagai sandaran utama moralitas masyarakat. Di dalamnya elemen-elemen masyarakat berinteraksi berlandaskan *sasana* (etika) yang berlangsung dalam semangat kesetiaan dan keselarasan. Agama dalam hal ini tidak berarti hanya Hindu, karena dalam lontar Sutasoma telah ditandaskan bahwa, *bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*, betapapun berbedabeda, Tuhan atau kebenaran sejati itu hanya satu hakikatnya.

Konsep *bhinneka tunggal ika* selanjutnya digunakan oleh pendiri bangsa untuk merangkul keberagaman di Nusantara dalam bingkai Pancasila. Nusantara dalam perkembangannya mendapat pengaruh dari dua agama besar, Islam dan Kristen. Masuknya dua kebudayaan tersebut memang membuat agama Hindu seolah terdesak dan menjadi minoritas di Indonesia. Namun, entah bagaimana, perkembangan agama Hindu di Indonesia telah dijadikan barometer perkembangan Hindu di Asia Tenggara.

Pengembangan *Hindu Center* merupakan ide bernas yang sangat relevan bagi Hindu dalam menghadapi berbagai tantangan, yang tidak hanya berhadapan dengan agama besar seperti Islam, tetapi juga dengan agama minoritas lainnya dan bahkan di kalangan internal umat Hindu sendiri. Pemetaan masalah dan tantangan umat Hindu di Indonesia merupakan satu langkah penting dalam menyusun peta jalan pengembangan *Hindu Center*. Tentu saja buku *Dinamika Hindu di Indonesia*, yang memuat perkembangan Hindu di seluruh wilayah Indonesia, dapat digunakan sebagai referensi utama dalam mewujudkan ide mulia pengembangan *Hindu Center* dalam skala nasional dan internasional.

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai lembaga umat Hindu terbesar di Indonesia sangat mendukung upaya-upaya akademik dalam pengembangan agama dan budaya Hindu secara lokal, nasional dan internasional. Semoga buku ini, yang telah disusun dengan kerja keras Tim Peneliti, dapat menginspirasi dan memotivasi semangat memuliakan peradaban Hindu dan seluruh umat manusia. Astu!

Om santih, santih, santih, Om

Jakarta, September 2019



PENGANTAR EDITOR

Hingga kini, referensi tentang dinamika Hindu di Indonesia dapat dikatakan masih sangat terbatas. Padahal Hindu sebagai sebuah kepercayaan telah mulai menyebar dan berpengaruh di Asia dan Indonesia khususnya sejak awal-awal abad Masehi. Bahkan, Hindu sebagai sebuah agama sudah dikenal sejak lama yakni sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi di tanah kelahirannya yang diperkirakan berpusat di sekitar Sungai Sindhu di India. Itulah sebabnya nama “Hindu” ini tampaknya diambil dari nama Sindhu.

Dalam konteks referensi kesejarahan di Nusantara, keberadaan agama atau budaya Hindu mulai dicatat pasca ditemukannya tinggalan sejarah di kawasan Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur, yang berdiri sekitar abad ke-4. Setelah itu, ditemukan pula tinggalan Hindu lainnya di Jawa Barat tepatnya di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Lambat laun, Hindu kemudian menyebar ke wilayah Jawa Tengah dengan bukti ditemukannya candi-candi yang bernafaskan Hindu seperti Candi Gedong Songo yang berdiri sekitar abad ke-7 dan abad ke-8. Pengaruh Hindu kemudian menyebar ke wilayah Jawa Timur ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kediri, Singosari, yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Hindu terbesar di Nusantara pada abad ke-14, yakni Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini dianggap mampu mempersatukan Kepulauan Nusantara. Kini, jejak warisan budaya Majapahit yang berkaitan erat dengan kebudayaan Hindu masih dapat ditemukan di beberapa wilayah di Nusantara, utamanya Bali.

Sejumlah perdebatan kesejarahan di Indonesia mendiskusikan bahwa pengaruh Hindu yang berasal dari India cenderung tidak berpretensi sebagai “alat” untuk mengkolonisasi wilayah-wilayah yang didatanginya. Kehadiran pengaruh



Hindu di Nusantara justru memperkaya kebhinnekaan di negeri kepulauan yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kebudayaan Hindu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah kita di masa lalu dan realita hari ini. Ia adalah salah satu akar dari pelbagai kearifan yang kita kenal sebagai “budaya Indonesia” sekarang dan kiranya tetap dirawat sebagai bagian dari memori kultural bangsa Indonesia di masa mendatang.

Namun demikian, masih muncul pertanyaan (*research questions*) yang berkaitan dengan seberapa jauh Hindu berpengaruh di Kepulauan Nusantara saat ini. Pertanyaan ini dapat dicari rujukannya dengan mengurai sejarah asal mula perkembangan Hindu, baik dalam konteks hubungannya dengan kebudayaan luar Nusantara maupun di dalam negeri. Selain itu, perlu ada upaya menelusuri jejak kebudayaan Hindu baik yang berupa benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*) di berbagai daerah di Indonesia khususnya kantong-kantong populasi umat Hindu. Bersamaan dengan itu, dinamika lembaga-lembaga keagamaan Hindu, kepemimpinan umat Hindu, struktur tradisional yang dilandasi adat dan kearifan lokal juga menarik dan perlu ditunjukkan untuk mendapat gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi dewasa ini. Usaha mencari tahu interaksi umat Hindu di tengah masyarakat yang multibudaya di berbagai daerah berikut peluang dan tantangan yang dihadapi juga penting dilakukan sebagai langkah awal untuk mengungkap dan memetakan fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik hari ini.

Studi yang dilakukan dan dirampungkan dalam bentuk buku ini merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Harapannya, temuan-temuan di lapangan (*research findings*) mampu memperkaya kajian dan dokumentasi tentang kebudayaan Hindu di Indonesia. Selain itu, penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran dan refleksi bersama untuk merawat ke-Indonesia-an dan kebhinnekaan di tengah aneka dinamika global kini.



Secara umum dari penelitian ini diketahui bahwa penyebaran Hindu di Nusantara tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi berabad-abad silam, melainkan juga sebagai dampak nyata dari adanya program transmigrasi dari Bali ke beberapa daerah di Indonesia. Konsekuensi sekaligus tantangan dari perpindahan ini bukan hanya membangun kehidupan ekonomi yang baru tetapi juga merekonstruksi kehidupan spiritual, adat, dan agama. Umat kemudian melakukan aneka upaya peniruan, inovasi sampai penyederhanaan tradisi, ritual, upacara. Selain itu, pendidikan Hindu juga menjadi dasar tumpuan untuk dapat mempertahankan identitas di tengah masyarakat yang multibudaya.

Dinamika umat Hindu di Nusantara juga dipengaruhi oleh perkawinan dengan umat beragama lain atau penduduk lokal, serta perpindahan orang Hindu Bali yang merantau untuk memenuhi tuntutan profesi seperti guru, polisi, dan TNI. Kedua fenomena ini terjadi hampir di seluruh daerah yang dibahas di buku ini.

Kendati menjadi minoritas di Indonesia, masyarakat Hindu yang tinggal di kantong-kantong umat di berbagai pelosok di Indonesia tetap mampu berbaur dengan penduduk dan budaya lokal. Tak jarang budaya Hindu di luar Bali berbeda dengan kebiasaan di Bali, misalnya saja budaya Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Contoh lain yang juga menonjol adalah budaya Hindu Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Umat di sana memiliki kultur unik, terutama karena sebagian di antaranya semula adalah umat kejawan yang kemudian pindah ke agama Hindu karena “tuntutan” di era Orde Baru. Perpindahan ke Hindu ini juga dipengaruhi oleh kedekatan ajaran dengan kejawan dan latar belakang/alasan politik.

Setelah Bali, Lampung adalah wilayah dengan jumlah umat Hindu terbesar kedua di Indonesia. Keberadaan umat yang cukup besar di beberapa daerah mendorong lahirnya infrastruktur pendidikan seperti perguruan tinggi agama dan budaya Hindu yang terdapat antara lain di Lampung, Klaten, Jawa Tengah, dan Bali. Hal ini tentu menjadi potensi tersendiri bagi perkembangan

Hindu di daerah. Selain itu, potensi lainnya tampak dari geliat usaha pariwisata yang melibatkan umat Hindu, seperti di Jawa Tengah, Bali, dan Manado. Diaspora Hindu Bali juga dikenal ulet dan memiliki keahlian di bidang pertanian dan perkebunan. Citra baik ini dikenal luas di masyarakat terutama di kawasan transmigrasi seperti Sumatera Selatan, Kendari, dan Lampung. Berbagai potensi ekonomi, alam, dan SDM lainnya dapat disimak lebih lanjut dalam buku ini.

Dalam perjalanannya, tidak bisa dipungkiri juga terjadi konflik antara umat Hindu dan umat lainnya di sejumlah daerah. Sebagai contoh adalah eksistensi umat Hindu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan interaksinya dengan penduduk lokal. Hubungan antara umat beragama di Lombok saat ini ditengarai tidaklah sebaik dahulu. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang membangun narasi-narasi perbedaan. Akibatnya adalah muncul konflik seperti sulitnya pendirian tempat ibadah dan pembatasan penggunaan gamelan pada waktu-waktu tertentu. Hambatan ini di satu sisi menjadi tantangan, tetapi di sisi lain juga menjadi perekat dan penguat solidaritas antarumat Hindu di Nusa Tenggara Barat.

Persoalan akses pendidikan Hindu juga menjadi masalah serius yang mengemuka di banyak daerah. Mandegnya formasi guru agama PNS dan kurangnya kuantitas dan apresiasi terhadap SDM Hindu yang membina umat di pelbagai pelosok Indonesia harus mendapat perhatian khusus dan diperjuangkan lewat berbagai cara termasuk lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif. Hal ini adalah cita-cita bersama yang dapat terwujud dengan sinergi bersama berbagai pihak. Adapun buku ini turut menguraikan permasalahan tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan umat, termasuk lembaga keagamaan. Jalan tengah seringkali harus diambil untuk berkompromi dengan situasi demi menjaga keberlangsungan kehidupan keagamaan di daerah masing-masing.

Kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari berbagai lintas disiplin keilmuan (*interdisciplinary approaches*) ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan.

Data-data tertulis dikumpulkan dari berbagai pihak, yaitu lembaga PHDI yang ada di beberapa provinsi, kabupaten, kota, berupa data arsip kesejarahan. Berbagai informasi menarik dan penting juga didapat dengan bantuan lembaga parisada pusat di Jakarta, para pengelola atau pengurus pura, kuburan, sekolah tinggi agama Hindu, kantor dinas agama di daerah, dan sebagainya. Pengumpulan data di lapangan juga dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terstruktur (*focus group discussion*), dan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan utuh dilanjutkan dengan mengadakan wawancara mendalam (*in depth interiview*). Walau demikian, tak dapat dipungkiri masih ada kesulitan menemukan data lengkap di beberapa tempat lantaran beberapa lembaga yang dikunjungi masih ada dalam tahap perkembangan awal. Tantangan ini dapat diatasi salah satunya dengan bantuan pihak PHDI Pusat di Jakarta yang memberikan surat izin untuk mengadakan penelitian di daerah-daerah.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Susanto Zuhdi
Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia

Merupakan kehormatan bagi saya untuk memberi pengantar atas penerbitan buku mengenai dinamika Hindu di Indonesia, yang kini berada di tangan pembaca. Dalam kaitan ini pula saya menyambut baik kehadiran buku yang semula merupakan hasil riset dengan tema Dinamika (Pendidikan) Hindu di Tingkat Lokal, Nasional, dan Global. Dengan terlebih dahulu memberi latar dan kerangka pemahaman, kemudian saya membuat uraian dengan harapan dapat menjadi pengantar untuk pembaca.

Dalam perjalanan panjang sejarah, Asia Tenggara telah dikenal dalam dunia agama-agama sebagai wilayah dengan penduduk paling banyak yang taat beragama seperti pada Buddha, Islam, dan Kristen. Dalam konteks kekuatan dan pengaruhnya di dalam masyarakat, agama-agama tersebut terlihat berbeda. Karakteristik “daratan” (*mainland*) dan “kepulauan” (*archipelago*) Asia Tenggara menjadi salah satu faktor perbedaan perkembangan agama dimaksud. Buddha memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar di daratan Asia Tenggara, sedangkan Islam di kepulauan. Kondisi geografis daratan Asia Tenggara memungkinkan mobilitas penyebaran Buddha. Kepulauan di Asia Tenggara sebagai karakter yang lain, menjadi lahan yang subur bagi penyebaran agama Islam yang dibawa pedagang Arab melalui pelayaran. Namun tampak ada kemiripan dalam hal terjadinya “percampuran” agama-agama tersebut dengan kepercayaan, tradisi, atau kebudayaan lokal, yang secara umum dikenal sebagai animisme (Steinberg 1987:37).

Di Asia Tenggara ini pula muncul gejala kuat keberlangsungan interaksi antaragama sehingga menghasilkan perwujudan kehidupan masyarakat yang pada umumnya berjalan harmonis. Meskipun di Indonesia mayoritas adalah Islam tetapi

dalam perkembangan agama lainnya tidak mengalami hambatan berarti. Bahwa terjadi ketegangan dalam masa-masa tertentu perlulah diletakkan dalam proses pendewasaan terutama dalam kerangka pemahaman dan penguatan pembangunan bangsa Indonesia.

Ciri umum gejala yang ditimbulkan dari praktik keagamaan, terlihat pada dua dimensi : hubungan pemeluk agama (makhluk) dengan Sang Pencipta (khalik) dan hubungan antara sesama makhluk penganut agama. Dimensi yang pertama bersifat individual sedangkan yang kedua, sosial. Sifat sosial dari agama memperlihatkan interaksi antarpemeluk agama-agama yang hidup berdampingan. Dengan demikian terlihat hubungan antara agama dan masyarakat. Selain itu, tampak kuat adanya pengaruh agama dalam pembentukan dan perwujudan cita-cita bangsa melalui negara sebagai wadah politik. Thailand merupakan negara dengan landasan nilai-nilai keagamaan Buddha. Sementara itu meskipun Islam berpengaruh besar dalam perjuangan pergerakan dan kemerdekaan Indonesia, tidak menjadikan ajarannya sebagai landasan negara resmi. Di Indonesia inilah berlangsung praktik berbagai agama yang hidup dalam kerukunan. Benih-benih toleransi umat beragama di Indonesia telah lama tersemai dalam kehidupannya.

Salah satu contoh keharmonisan hubungan antarumat beragama dapat dilihat ketika elite bangsa Indonesia menetapkan landasan atau dasar bernegara. Dalam suatu pembahasan mengenai Pembukaan UUD 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Indonesia) atas usul I Gusti Ketut Puja, yang *nota bene* beragama Hindu--, kata Allah SWT (“Subhanallahi Wa Ta’ala’, yang dibaca “Alloh” oleh orang muslim) diganti menjadi “Tuhan Yang Maha Esa”. Selain itu dihapusnya “tujuh kata dalam Pembukaan UUD versi Piagam Jakarta” dalam rangka proses perumusan UUD 1945, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Dalam hal ini jelaslah bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi menjadikan agama sebagai sumber nilai dan norma bagi kehidupan masyarakat dan bangsanya. Begitu kuat perhatian pada agama sebagai hal yang sangat penting, sejak



awal kemerdekaan bangsa, Republik Indonesia telah membentuk kementerian agama. Meskipun Islam merupakan agama dengan pemeluk mayoritas, dan oleh sebab itu menteri agama selalu dari Islam, tetapi mengenai urusan agama-agama lain diakomodasi ke dalam tugas dan fungsi dari nomenklatur jabatan direktur jenderal dalam struktur organisasi kerja kementerian agama.

Tentu terdapat potensi konflik dan bukan tidak pernah terjadi gesekan dan gejolak sosial dalam masyarakat benua agama. Akan tetapi jika ditilik secara mendalam, faktor konflik bukan bersumber pada ajaran agama, tetapi dari praktik pemeluk yang justru tidak mengindahkan nilai-nilai keagamaan. Artinya lebih sering karena kepentingan di luar nilai dan ajaran agama itulah yang menyebabkan konflik terjadi. Oleh karena itu pada umumnya setiap masalah menyangkut keagamaan, akan segera dapat diatasi karena kebudayaan masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi. Keterbukaan masyarakat di kepulauan menjadi suatu keniscayaan karena alasan posisi geografis. Berada di antara dua samudera dan dua benua, masyarakat kepulauan telah terbiasa menerima dan berinteraksi dengan unsur-unsur budaya dan agama yang datang dari luar. Masyarakat di kepulauan memiliki kesadaran historis yang tinggi untuk menerima perbedaan. Dari pengalaman sejarah kebudayaan itu Mpu Tantular dengan bernas merumuskan istilah “bhinneka tunggal ika”, artinya “berbeda tapi satu (itu)”.

Dengan modal sejarah dan kebudayaan yang dirajut dalam konteks waktu yang panjang, masyarakat Indonesia selalu diuji untuk memelihara keharmonisan kehidupan beragama dalam konteks berbangsa dan bernegara serta ikut mewujudkan perdamaian dunia. Upaya untuk memperkuat toleransi keberagaman dengan saling memahami itulah arti penting kehadiran buku ini. Salah satu agama yang diangkat dalam konteks itu adalah agama Hindu, yang tidak cukup banyak dipahami kehadirannya di tanah air. Seperti dikemukakan Prof. Ketut Ardhana dalam pendahuluan buku ini bahwa “tidak banyak masyarakat Indonesia yang memahami praktik agama Hindu sebagai sebuah agama yang dianut di Indonesia, padahal agama yang pertama masuk ke Indonesia adalah agama Hindu,

dan Buddha, Khong Hu Chu yang kemudian diikuti oleh Islam dan agama lainnya.

Dalam catatan sejarahnya, kerajaan Hindu adalah yang pertama berdiri di kepulauan Indonesia. Mungkin karena tidak berada di dalam jaringan pelayaran yang ramai maka keberadaan kerajaan Hindu pada awal abad Masehi di Kutai Kalimantan Timur tidak dicatat musafir Cina. Baru dalam abad ke-5 sudah mulai terungkap lebih jelas berdirinya kerajaan Hindu bernama Tarumana nagara di Jawa Barat. Memang kerajaan-kerajaan Buddha yang besar dicatat oleh beberapa sumber Cina dan Arab misalnya Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-11 sedangkan Mataram Kuna di Jawa antara abad ke-6 sampai ke-10. Perpindahan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dalam abad ke-10 memperlihatkan perkembangan semakin menonjolnya corak Hindu, seperti tampak pada Majapahit. Berakhirnya Majapahit ini pula yang mempertautkan perkembangan Hindu di Bali. Bahkan orang Bali dengan senang akan mengatakan keturunan “ Wong Majapahit”. Namun demikian jika secara lebih dalam diperhatikan maka pernyataan itu perlu didudukkan, ketika terdapat peninggalan yang menunjukkan bahwa sudah berkembang kerajaan dengan identik lokal yang berlangsung di Bali sebelumnya. Dalam masa megalithikum Bali telah mengenal kepercayaan kepada dewa-dewa gunung dan laut, batu-batu besar sebelum agama Hindu dari Jawa masuk (Notosusanto & Marwati, 1984: 338).

Agama Hindu diakui secara resmi oleh negara pada 1958. Konsepsi mengenai agama Hindu itu sendiri masih dibicarakan sampai dalam dekade sesudah pengakuan dari negara. I Gusti Bagus Sugriwa berpendapat bahwa Hindu tidak dapat dipisahkan Bali, dalam arti masyarakat pemeluk utama agama tersebut. Pendapat Sugriwa didasarkan pada fakta bahwa telah ada Agama Bali yang dipraktikkan masyarakat sebelum kehadiran Hindu. Pelaksanaan agama Bali dipimpin oleh para Pendeta Bali seperti: Pemangku, Dukuh, Empu dan sebagainya (Sugriwa dalam Suwitha dan Sukayasa dalam buku ini).

Sedangkan menurut Ida Bagus Mantra, konsep Agama Hindu merupakan pengertian yang lebih luas dan tidak hanya

sebatas masyarakat Bali di Pulau Bali. Dalam perkembangannya Agama Hindu telah melampaui komunitas aslinya dan memperlihatkan lingkup nasional. Itu artinya bahwa Hindu juga dianut oleh etnik lain di Indonesia tidak hanya Bali. Oleh karena itu menurut Ida Bagus Mantra, supaya tidak menimbulkan kerancuan konsepsi maka nama yang paling cocok adalah agama Hindu. Konsep yang terakhir inilah yang kemudian diterima dan telah menjadi umum. Pengertian agama Hindu atau Hindu Dharma mempunyai wawasan atau pengertian yang lebih luas, mencakup agama Hindu seluruh Indonesia, tanpa mengurangi identitas lainnya (Gosa dalam Suwitha dan Sukayasa dalam buku ini).

Di dalam konteks perdebatan kedua konsep di atas itulah saya kira kita kemudian dapat memahami kerangka masalah yang digunakan tim riset Universitas Hindu Indonesia. Bertolak dari pendapat kedua pakar itu lalu mengapa menjadi penting untuk mengkaji Agama Hindu dalam hubungan dengan sejarah kebudayaan di Indonesia. Pertanyaan mendasar berikutnya adalah bagaimana agama Hindu dapat menembus dan diterima di wilayah di luar Pulau Bali. Struktur yang memungkinkan hal itu terjadi karena ada "Indonesia", sebagai fakta sosio-historis dari perjalanan panjang keberagaman masyarakat yang kemudian berhasil membentuk suatu "bangsa baru" bernama Indonesia. Dalam konteks ini pendapat Sugriwa memberikan kejelasan sehingga dapat dimengerti bahwa faktor utama terjadinya perkembangan Hindu adalah karena peran masyarakat Bali, yang *nota bene*, beragama Hindu di kepulauan Indonesia. Penguatan atas pandangan ini karena bukankah menyebarnya agama Hindu di Tanah Air oleh karena diaspora orang Bali dengan terutama karena program transmigrasi. Tujuan utama program nasional sektor transmigrasi dalam masa Orde Baru selain untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan daerah juga dalam rangka penguatan integrasi bangsa.

Dalam diskusi ini, saya melihat pendapat Prof. Ngurah Bagus segaris dan mendukung konsep Sugriwa. Guru Besar Antropologi Universitas Udayana itu mengemukakan bahwa suku-bangsa Bali merupakan kelompok manusia yang terikat

oleh kesatuan kebudayaannya. Gejala itu ditangkap Ngurah Bagus sebagai suatu kesadaran yang diperkuat bahasa yang sama. Pembentuk karakter “ke-Balian” jika boleh disebut identik dengan yang dimaksud Ngurah Bagus dengan “kesatuan kebudayaan” maka agama Hindu yang menjadi unsur utama. Namun demikian unsur Hindu dalam proses “kesatuan kebudayaan” tidak dapat dipisahkan dari komponen orang Bali Aga dan orang Bali Majapahit yang telah lama terintegrasi ke dalam kebudayaan Bali. Orang Bali Aga umumnya mendiami di desa-desa di pegunungan dan Orang Bali Majapahit mendiami dataran rendah merupakan penduduk paling banyak. Menarik diamati adalah diaspora orang Bali misalnya ke Lombok, karena perluasan kerajaan Karang Asem dan karena usaha pemerintah dalam program transmigrasi ke berbagai daerah di kepulauan antara lain ke Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi dan Nusa Tenggara (Bagus, 1983: 279).

Jika analisis Ngurah Bagus melihat tradisi dan akar kebudayaan Bali yang melekat Agama Hindu, dan oleh sebab itu penyebutan Hindu senafas dengan Bali, konsep Bagus Mantra mengenai Hindu merupakan agama tidak hanya yang “melekat” pada orang Bali melainkan juga yang dapat diterima dalam lingkup nasional. Bertolak dari konsepsi inilah tema besar riset yang dilakukan oleh Universitas Hindu Indonesia mengenai dinamika Hindu tidak hanya mencakup lokal dan nasional tetapi juga global, dapat diwujudkan. Untuk itu maka dituntut kemampuan pemeluk dan kaum elite agama Hindu dalam merespon tantangan zaman kini dan masa depan.

Lalu bagaimana membaca komunitas Hindu sebagai minoritas di negeri mayoritas Islam dalam upaya untuk menegaskan eksistensinya di tengah tantangan baik internal maupun eksternal. Dari dalam Agama Hindu sendiri terdapat unsur atau sekte dari India yang berkembang di Indonesia. Persoalan identitas atau karakter agama Hindu menjadi penting dalam konteks lokal, nasional, dan global. Dengan demikian menjadi relevan untuk mengaitkan perdebatan konsep Sugriwa dan Mantra di atas dengan riset di berbagai daerah di Indonesia.

Di sinilah arti penting buku ini bahwa pertama yang perlu

dicatat adalah “ke-Balian” dan “ke-Indonesiaan” dan kedua dalam konteks hubungan antarbangsa antara lain Indonesia dan India, dari mana sumber kehadiran agama Hindu bermula. Peranan Hindu juga turut memberi kontribusi pada proses “menjadi Indonesia”. Kajian di sepuluh daerah, berarti sudah sepertiga dari 34 daerah provinsi di Indonesia sehingga secara representasi atau keterwakilan wilayah Sabang-Merauke merupakan pemetaan awal yang penting.

Dari kesepuluh lokasi kajian dinamika Hindu di Indonesia dapatlah dibuat beberapa pola berdasarkan dari faktor sarana penyebaran agama dan karakteristik masing-masing daerah. Ciri utama penyebaran agama Hindu adalah orang atau masyarakat Bali yang berpindah karena transmigrasi dan karena mutasi tugas kerja seperti dari kalangan pegawai negeri, TNI-Polri atau perusahaan swasta serta profesi lainnya. Transmigrasi merupakan sarana yang paling berarti bagi penyebaran agama Hindu ke daerah di Indonesia. Sebagai contoh dapat dilihat dari karakter umum pada orang Bali yang bertransmigrasi karena akibat letusan gunung Agung pada 1963 di Lampung dan Sumatera Selatan dan kesepakatan antar gubernur Sulawesi Tenggara dan Gubernur Bali pada 1968, di Kabupten Konawe.

Pola transmigrasi di bagian selatan Sumatera –Lampung dan Sumatera Selatan--ini dilatarbelakangi faktor yang sama yakni akibat meletusnya Gunung Agung 1963. Masyarakat transmigrasi asal Bali di Lampung, selain mengembangkan lahan persawahan juga kehidupan dengan latar belakang kebudayaan, adat dan agama Hindu. Dengan keberlangsungan kebudayaan dan agama yang dibawa orang Bali di daerah baru memperlihatkan interaksi yang tidak jarang menyebabkan konflik. Sesungguhnya merupakan hal biasa bahwa di dalam hubungan sosial terjadi berbenturan kepentingan. Sebagai sarana untuk memelihara praktik dan peningkatan kualitas keagamaan, aspek pendidikan merupakan faktor yang menentukan. Kebutuhan akan guru agama Hindu merupakan faktor penting dan strategis bagi tujuan tersebut. Selain itu suatu kebutuhan pendidikan tinggi di Lampung sendiri sudah berdiri Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung pada 2003. Dalam kehidupan

masyarakat majemuk, ternyata masyarakat transmigrasi Bali dan beragama Hindu telah membaur dalam derap pembangunan daerah dan memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi secara berarti. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran orang Bali yang ulet dan kemampuan dalam upaya membuka lahan sawah telah banyak mencetak persawahan dengan hasil panen yang baik. Dapat dikemukakan bahwa identitas transmigran Bali memiliki dua kunci utama untuk mengatasi kesulitannya di lapangan, yaitu organisasi kemasyarakatan yang kuat dan lingkungan alam yang cocok untuk mendukung rencana mereka. Lebih daripada itu orang Bali mempunyai rasa kesetiakawanan yang diwujudkan secara formal di lingkungan kawasan desa yang disebut *banjar* (Levang, 2003 :137)

Kedatangan masyarakat Bali melalui program transmigrasi ke Sumatera Selatan berjalan secara bergelombang yakni tahun 1963, 1980 dan 1990-an. Daerah tujuan transmigrasi itu adalah Musi Banyuasin Sumatera Selatan memperlihatkan ciri masyarakat petani Bali yang ulet sehingga berhasil membangun daerah baru menjadi jauh lebih meningkat di bidang ekonomi dibanding sebelumnya. Di daerah tujuan transmigrasi seperti itu, aspek pertama yang mengemuka berkaitan dengan sikap dan perilaku dan kemampuan orang Bali sebagai petani yang unggul. Jadi kehadirannya dapat dikatakan sebagai “dewa penolong” bagi suatu kehidupan yang lebih baik secara ekonomi. Lahan luas di Lampung dan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dengan ketrampilan, kerja keras dan keuletan orang Bali kemudian mengalami perubahan yang nyata. Persawahan dan perkebunan menjadi gejala umum yang menjadikan daerah menjadi produktif. Dalam konteks itu maka jelas besarnya sumbangan orang Bali yang beragama Hindu dalam proses membangun bangsa.

Berbeda dari pola transmigrasi ke daerahnya yang masih “kosong”, pengenalan agama Hindu di lokasi yang bertetangga dengan masyarakat setempat, memperlihatkan corak pengembangan yang menarik. Hasil kajian di Kalimantan Tengah menunjukkan keterkaitan antara ajaran Hindu dengan kepercayaan lokal, yakni *Kaharingan*. Dalam ajaran agama

tertentu terdapat “orang suci” yang berperan sebagai mediator antara manusia dengan Tuhan. Dalam agama Hindu dijumpai orang yang dimaksud sebagai pemimpin umat Hindu dari Bali yaitu Ida Pedanda atau Ida Rsi, sedangkan di Kalimantan Tengah juga ada rohaniawan dari Dayak Kaharingan. *Basir* atau *Pisor* adalah sebutan rohaniawan umat Hindu Kaharingan, yang memiliki kedudukan tinggi di dalam ritual Hindu Kaharingan.

Pola kehidupan agama Hindu di kota besar seperti Jakarta, Manado, dan Makassar memperlihatkan ciri kosmopolitan setidaknya dapat dilihat dari besarnya peran kalangan elite orang beragama Hindu. Dengan dukungan keuangan yang memadai maka tampak bangunan pura yang megah dan memiliki ruang dan halaman yang luas. Kehidupan Hindu di Jakarta inilah yang dikenal sebagai barometer perkembangan Hindu di Indonesia. Di Jakarta terdapat tiga pura besar Pura Umat Hindu di Rawamangun dengan nama Pura Aditya Jaya di Jakarta Timur, Pura Puseh untuk Dewa Wisnu di Cijantung Jakarta Timur, dan ketiga Pura Dalem untuk Shiwa, di Cilincing Jakarta Utara. Dengan demikian ketiga pura di Jakarta itu dianggap paling lengkap, sebagai pura utama, yang dinilai sebagai Tri Kahyangan atau Pura Kahyangan Tiga yang menjadi pengikat budaya dalam konteks kehidupan masyarakat Hindu dalam hal ini kota Jakarta.

Kehadiran Hindu, sebagai minoritas di Kota Manado tidak menjadikan umat agama yang identik dengan Bali ini terisolasi. Dengan memanfaatkan peristiwa pariwisata Manado Fiesta, seperti dalam agenda yang dipertunjukkan pada 2017, umat Hindu berpartisipasi aktif dengan terlebih dahulu melakukan ritual persembahyangan di Santhi Puja di Taman Berkas (God Bless Park) Kota Manado. Kehadiran Walikota Manado dalam acara tersebut mem[unyai arti tersendiri bagi umat Hindu sebagai bentuk pengakuan terhadap kehadiran mereka di kota Manado. Tahun berikutnya dalam Festival “Ogoh-Ogoh” di lapangan Sparta Tikala Manado, jangan lagi disangsikan betapa kepiawaian orang Bali yang identik dengan pemeluk Agama Hindu, dalam berkreasi membuat “ogoh-ogoh” yang menarik dan mempesona. Dalam hal ini teori Sugriwa lagi-lagi mengejawantah dalam praksis kehidupan kebudayaan Bali yang

dibagikan kepada masyarakat kota Manado.

Kita tinggalkan Manado “Kota Nyiur Melambai”, lalu mari menuju ke kota “Anging Mamiri” di Sulawesi Selatan. Adalah Makassar kota yang juga digelari sebagai “Gerbang Indonesia Timur” pun memperlihatkan geliat kehidupan umat Hindu. Makassar merupakan ibukota Negara Indonesia Timur (NIT) berdiri pada 1946—1950. Terdapat nama penting dari Bali yang menjadi tokoh ketika bangsa Indonesia pernah mempraktikkan negara federal, yakni Cokorda Gde Sukawati sebagai Perdana Menteri NIT. Dengan demikian sudah terjadi jalinan sejarah antara Bali dan Makassar. Di dalam sejarah pula diketahui umum bahwa budak dari Bali yang banyak dicari, oleh karena merupakan pekerja yang ulet. Sudah dapat diduga bahwa Makassar sebagai pusat pemerintahan perusahaan dagang India timur milik orang Belanda (VOC) di kawasan timur, merupakan tempat pengumpulan para budak dari Nusantara. Perkembangan zaman Indonesia merdeka memberi peluang bagi mobilitas etnik dari berbagai wilayah kepulauan nusantara, tidak terkecuali bagi orang Bali. Dalam perspektif historis maka tidak berlebihan jika sumbangan peran Orang Bali memang besar di dalam membentuk ingatan kolektif bangsa.

Bentuk toleransi yang diberikan Makassar kepada umat Hindu dalam rangka perayaan Nyepi tahun 2018 menarik untuk dicatat. Tidak kurang dengan ucapan Hari Nyepi dari Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah menjadi penanda penguat jalinan sejarah kerukunan umat beragama di Indonesia yang muncul dari Makassar. Tidak itu saja gubernur bahkan mohon maaf atas ketidaknyaman kondisi kota Makassar untuk suatu hari besar Nyepi bagi umat Hindu yang belum memadai. Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan sebelumnya, Yasin Limpo telah memberi perhatian yang besar terhadap pengangkatan guru agama Hindu sampai pada penempatan mereka sampai di sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan.

Pola Jawa yang direpresantasikan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, secara umum terdapat hubungan emosional keagamaan dengan Hindu dan lazim pula bersinkretis dengan Buddha. Bahkan dapat dikaitkan dengan bagian barat Jawa,

dari lokasi mana muasal berdirinya kerajaan Hindu yang termasuk paling awal di Indonesia, bernama Tarumanagara. Kerajaan Hindu sering bersinkretis dengan Buddha mewarnai sejarah kerajaan di Jawa. Kisah terakhir Majapahit tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Hindu di Bali. Peristiwa gerakan 30 September 1965 menjadi tonggak yang sangat berarti bagi suatu perubahan keagamaan secara individual atau kelompok masyarakat seperti terjadi di desa Dodol Kecamatan Kesamben Kabupaten Malang. Isu ateis bagi orang yang menjadi anggota atau berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia yang kemudian dilarang, mendorong mereka yang banyak diaosiasikan sebagai “abangan” segera memilih dan menjadi penganut salah satu agama. Dalam kaitan ini, ternyata banyak orang yang memilih agama Hindu. Apakah gejala ini semacam ‘kemunculan kembali’ agama atau kepercayaan nenek moyang bagi masyarakat Malang, daerah di mana dahulu salah satu wilayah utama kerajaan Hindu terbesar terakhir bernama Majapahit.

Dalam konteks ini dapat ditekankan mengenai besarnya peran orang Bali berdiaspora ke berbagai daerah di Kepulauan Indonesia. Artinya di sanalah peran Orang Bali dalam menoreh sejarah merajut keindonesiaan. Di sini saya ingin menambahkan transmigrasi Orang Bali ke Buton 1978, sebagai kesepakatan Bupati Buton dengan Bupati Gianyar seperti mengulang sejarah sepuluh sebelumnya tepatnya 1968 dalam kaitan dengan kedua Gubernur yang telah disebut di atas (Indina 2019). Pemetaan diaspora Bali dalam integrasi bangsa, saya kira merupakan tema besar yang ke depan masih dapat diisi dengan berbagai riset dan penulisan yang lebih komprehensif.

Pola dinamika Hindu di wilayah terdekat secara emosional historis selain dengan Jawa Timur adalah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berbeda dari hubungan ikatan sejarah dengan Jawa Timur, yang menempatkan Bali pada posisi “penerima” (“di bawah”), hubungan Bali dengan Lombok, berada posisi “pemberi” (“di atas”). Dari salah satu versi dalam banyak versi kerajaan Bali Karangasem disebut sebagai pernah melakukan penaklukan terhadap wilayah barat Pulau Lombok. Hubungan pengaruh Bali ke wilayah Nusa Tenggara Barat maupun timur

dalam konteks pemerintahan dapat dijelaskan secara historis, karena Singaraja pernah menjadi ibukota Provinsi Sunda Kecil, yang memiliki wilayah kini berkembang menjadi dua provinsi yang dikenal sekarang: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Barangkali tidak ada daerah yang begitu kompleks dalam kaitan 'beban sejarah' dalam hubungan Bali dengan Lombok samai pada masa kini. Dalam konteks itu maka pembicaraan mengenai seluk beluk agama Hindu khususnya di bagian barat Lombok tidak sepenuhnya dapat dihindarkan dari isu sejarah yang melibatkan perseteruan satu pihak dituduh 'menjajah' oleh pihak lain yang merasa 'dijajah'. Sebagai fakta bahwa bagian dari Lombok ini memang mendapat pengaruh Bali yang kuat hingga sekarang, baik dalam bidang sosial-politik maupun agama dan kebudayaan. Terdapat beberapa versi babad atau narasi sejarah yang membenarkan posisi sejarah dari sudut pandang masing-masing pihak. Narasi yang dominan mengenai Kerajaan Karangasem (Bali) menjajah Selaparang (Lombok). Stigma yang terus terbawa hingga kini dikatakan bahwa orang Bali menjajah Lombok.

Pemeluk agama Hindu paling banyak di Kota Mataram berjumlah 68.752 jiwa. Sebagai kota besar, yang juga pusat ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram sudah tentu membuka pintu bagi kehadiran etnik dari berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat majemuk di Kota Mataram mencerminkan keragaman budaya yang datang dari masyarakat etnik dan agama yang mereka amalkan. Melalui acara kebudayaan baik yang tradisional maupun yang dikemas untuk berbagai tujuan pariwisata pada dasarnya merupakan kebijakan untuk merangkul perbedaan yang ada. Salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan khususnya Lombok-Sasak yang Muslim dan Bali-Hindu Lombok adalah dalam acara "perang topat". Peserta acara yang menunjukkan "saling melempar ketupat" tidak dimaksudkan sebagai saling menyakiti sebagai umumnya dalam situasi perang. Acara itu merupakan perwujudan simbol persahabatan dan lebih jauh sebagai simbol keharmonisan.

Mengakhiri kata pengantar ini saya ingin mengajukan



perspektif historis-kultural untuk memahami dinamika Hindu di Indonesia dari hasil riset yang dilakukan Universitas Hindu Indonesia. Justru menarik untuk mengamati kehadiran agama Hindu dalam perspektif sejarah Indonesia. Identifikasi agama Hindu dengan orang Bali atau “Kebalian” suatu fata yang sulit dibantah. Studi Sejarah Agama dalam format Keindonesiaan, perlu memperhatikan dengan teliti mengenai masyarakat plural dalam keragaman tradisi dan keagamaan/kepercayaan lokal. Dalam konteks ini jika sejarah merupakan pengalaman berharga bagi suatu bangsa di dalam membangun kesadaran historis, maka perjalanan bangsa memperlihatkan dinamika dari berbagai peristiwa sejarah bangsa yang mewarnainya.

Tinjauan sekaligus wawasan yang dimaksud dalam perspektif historis-kultural dapat digunakan untuk memberi kerangka pemahaman terhadap proses pembentukan struktur kehidupan suatu masyarakat yang diberi dasarnya oleh unsur nilai dan norma lama dan baru. Jika perspektif sejarah memberi indikasi kesinambungan “benang merah” maka perspektif kultural memberi makna akan adanya nilai yang berfungsi mengikatnya. Jika sejarawan bermaksud memahami proses “menjadi Indonesia” dalam konteks kebudayaan maka anjuran Sartono Kartodirdjo tentang konsep “*kultuurgebondenheid*” mesti diperhatikan. Dalam proses pembentukan bangsa Indonesia, maka etnik Bali yang *nota bene* identik dengan agama Hindu menjadi faktor penting. Nilai kebangsaan Indonesia yang paling menonjol adalah persatuan. Nilai persatuan yang mewujudkan ke dalam bentuk dan proses itulah Indonesia menjadi eksis. Sumbangan etnik Bali dengan karakteristik kehinduannya dalam proses integrasi bangsa adalah melalui diaspora merajut pulau-pulau menjadi satu, itulah Indonesia. Dalam konteks ini Indonesia pada prinsipnya adalah nilai sekaligus semangat yang jika digerakkan dengan tepat, seperti dalam konsep “lawatan sejarah” akan menjadi sarana strategis untuk mewujudkan integrasi bangsa (Zuhdi 2017).

Dalam paparan di atas ditampakkan adanya pola-pola pembentukan struktur baru masyarakat yang digerakkan diaspora Bali terutama melalui transmigrasi. Dampak internal masyarakat

Bali di perantauan menunjukkan dinamika kehidupan agama Hindu dan dampak eksternal memperlihatkan pengaruh budaya Bali yang enak dinikmati dan menggairahkan—dalam kaitan ini antara lain kesenian, tarian dan karnaval seperti “ogoh-ogoh”—menjadi perekat tali persaudaran bangsa. Kehadiran orang Bali dengan agama dan kebudayaannya di sepuluh lokasi yang dijadikan riset ini sungguh telah memberi kontribusi pada pembentukan narasi keindonesiaan.

Gejala yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa pola kehadiran masyarakat Bali dengan identitas agama Hindu dan kebudayaannya di luar Jawa hampir dikatakan tidak menimbulkan gejolak. Adapun pola Jawa mengingatkan akan adanya hubungan emosional keterkaitan agama Hindu Bali dengan masyarakat Jawa dalam sejarah kuno sampai klasik, seperti pada masa Majapahit. Namun bukan tidak ada masalah justru ketika kajian mengenai dinamika Hindu diletakkan di Lombok. Jika hubungan Hindu-Bali dengan masyarakat beragama Hindu di Jawa Timur dilihat sebagai mempertautkan “benang merah” yang putus, maka hubungan Hindu-Bali berdampingan dengan masyarakat di Lombok seperti mengungkit kembali “dendam sejarah” yang sulit diredam.

Mengutip pendapat Bernard Lewis mengenai sejarah yang “ditemuciptakan” (*invented history*) akan menjadi jalan keluar yang jitu untuk mengakhiri warisan “dendam sejarah”. Di tangan Made Metu Dahana, seorang penulis yang produktif telah dihasilkan tulisan untuk menepis stigma tersebut. Dalam kemasan narasi baru tidak disinggung mengenai siapa yang kalah dan menang atau siapa yang menjajah dan dijajah dalam kaitan Karangasem atau Selaparang. Sejarah dalam kategori yang dikemukakan Lewis, tidak lagi berbicara mengenai apa yang sesungguhnya terjadi tetapi menjadi kewajaran apa yang sebaiknya diterima. Tidak sama sekali lalu kita menghapus fakta yang pernah terjadi tetapi untuk tujuan apa sejarah “yang ditemuciptakan” ditulis lebih menjadi pertimbangan utama agar pada akhirnya kita dapat “berdamai dengan sejarah”.

Variabel pendidikan yang diharapkan menjadi penggerak dinamika Hindu seperti diungkap dalam buku ini hemat saya,

belum merupakan rumusan kesimpulan yang kuat kecuali fakta keterbatasan guru dan masalah peningkatan kompetensi agama Hindu. Padahal pendidikan merupakan sarana penting untuk mengatasi masalah tersebut. Diperlukan suatu studi lanjutan untuk bukan saja memperluas kawasan atau daerah riset, melainkan juga untuk mempertajam konsep dan variabel serta faktor yang memengaruhi perubahan sosial dan dinamika kehidupan bangsa.

Dengan semakin banyak dan cukup luasnya perkembangan agama Hindu di tanah air terutama dalam masa periode kontemporer, maka suatu pemetaan yang lebih komprehensif semakin diperlukan. Perhatian yang lebih mendalam terhadap kajian yang eksploratif dan intensif menjadi suatu kebutuhan. Dalam kaitan itu dianggap penting untuk mendirikan Institut Hindu Bali di Universitas Hindu Indonesia di Denpasar. ***

Depok 10 September 2019

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dinamika umat Hindu di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Di satu pihak ada yang menginginkan kuatnya kebudayaan lokal sebagai *local genius* yang didukung secara kuat oleh penduduk (*indigenous people*) (Lihat, Ramstedt, 1999), dan di pihak yang lain adanya berbagai dinamika dari adanya pengaruh yang berkaitan dengan penguatan-penguatan ajaran yang berkaitan dengan masalah spiritualitas di kalangan umat. Banyak hal yang dapat dibahas berkaitan dengan pemahaman dinamika umat di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya.

Satu hal yang menarik berkaitan dengan bagaimana eksistensi umat Hindu yang berada di Sumatra Utara misalnya. Sebuah wawancara awal yang dilakukan dengan seorang dosen di daerah tersebut bernama Ichwan menjelaskan keadaan umat yang semakin hari semakin memprihatinkan. Pada awalnya di Sumatra Utara terutama di Kota Medan berkembang Hindu yang dikembangkan oleh orang dari India. Sebagaimana halnya dengan kawasan yang mendapat pengaruh transmigrasi banyaklah juag penduduk yang berasal dari Bali, terutama setelah meletusnya Gunung Agung tahun 1963 bertransmigrasi ke wilayah Kota Medan ini. Bahkan, di antara mereka telah berhasil mendirikan pura sebagai tempat suci bagi orang Bali dan non-Bali yang beragama Hindu.

Pada awalnya agama Hindu berkembang dengan baik karena adanya kontak antara umat Hindu yang berasal dari India yang memang jauh sebelumnya telah mendatangi daerah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan datangnya orang Bali yang beragama Hindu sebagai akibat terjadinya bencana alam gunung Agung meletus tahun 1963. Tidak diketahui dengan pasti, bagaimana terjadinya naik turunnya jumlah umat di Kota



Medan. Akan tetapi, lama kelamaan wilayah ini tidak terlalu diminati oleh orang India, maka tampaknya orang Bali yang masih melanjutkan tradisi Hindu di Sumatra Utara. Akan tetapi, tampaknya perkembangan agama Hindu tidaklah sebagaimana yang diharapkan, karena generasi lama dari Bali yang beragama Hindu malahan meninggalkan Sumatra Utara.

Lebih tragis lagi adalah banyak di antara keturunan mereka yang bahkan, mulai memeluk atau pindah ke agama yang lain umumnya agama Islam atau menjadi Muslim. Ini adalah sekilas cerita bagaimana terjadinya penurunan jumlah umat di sebuah wilayah, dan bagaimana umat Hindu yang baik berada di Bali, maupun yang berada di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia menyikapi persoalan ini. Inilah salah satu fenomena yang menjadi pertanyaan sekitar masalah yang dibahas berkaitan dengan dinamika umat Hindu di Indonesia pada umumnya, dan di Bali pada khususnya. Ini adalah sebuah issue yang signifikan yang akan dibahas berkaitan dengan upaya kedepan dalam mengembangkan sebuah pusat atau Hindu Center di Bali.

II. Hindu Center: Dari Perspektif Sosial Budaya ke Politik

Banyak studi tentang pengaruh India atau Indianisasi atau Hinduisasi dan studi tentang Cina atau Sinologi yang menyebutkan bahwa pengaruh-pengaruh mereka berbeda dengan pengaruh Barat yang terjadi di kawasan Asia Tenggara (Ardhana, 2012b). Penduduk yang menganut Hindu di Bali pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya tidak pernah beranggapan bahwa mereka dijajah oleh India. Demikian juga halnya dengan pengaruh peradaban Cina di Vietnam yang berlangsung hampir seribu tahun juga tidak pernah dianggap sebagai sebuah kolonisasi Cina di negeri Vietnam. Meskipun diketahui bahwa kedua kebudayaan negeri Tirai Bambu dan Vietnam itu tidak ada perbedaannya yang mana dengan nuansa merah terasa di semua dekorasi atau ornamen yang terdapat di kebudayaan Vietnam (sebagai referensi lihat: **Ardhana, 2012a**).

Dari deskripsi ini tampak, bahwa ada kesamaan unsur kebudayaan antara kedua kebudayaan yang saling bersentuhan dalam proses yang cukup lama yang disebabkan faktor geografi dan kesejarahan, demikian juga dengan proses migrasi yang



terjadi antara kedua bangsa tersebut. Pengaruh peradaban yang di dalamnya terdapat filosofi kebudayaan seperti nilai-nilai agama Hindu dan Budha misalnya nampaknya memberikan nilai-nilai harmonis. Seperti Gottowik, (2005) dalam karyanya yang berjudul, *Die Erfindung des Barong: Mythos, Ritual und Alterität auf Bali*, menyebutkan tentang adanya filosofi harmonis, hidup damai dan adanya sikap toleransi yang diajarkan, sehingga berbagai pengaruh dari India (*tat twam asi, ahimsa, swadesi, ekam eva adityam Brahman*) dan sebagainya) di Indonesia dan Cina di Vietnam seperti (*yin dan yang*) dianggap tidak sebagai ancaman kebudayaan lokalnya, tetapi justru memperkuat kebudayaan lokalnya.

Dalam catatan sejarah pengaruh India dan Cina di Asia Tenggara dapat diketahui bahwa nilai-nilai peradaban dan kebudayaan itu memang dianggap memperkaya khazanah kebudayaan lokal yang ada pada daerah yang didatanginya. Banyak konsep di bidang ritual dan religi yang dapat memperkaya kebudayaan lokal yang ada yang tampaknya mampu bertahan hingga sekarang ini. Demikian pula halnya dengan konsep kepemimpinan yang disebut dengan ajaran *Asta Brata* tampaknya berpengaruh kuat pada tradisi kepemimpinan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Pengaruh kebudayaan ini tampaknya dapat memperkaya tradisi ritual dan religi yang ada jauh sebelum masuknya agama-agama besar di Asia Tenggara. Misalnya kebudayaan atau peradaban yang berlangsung pada kekunaan, yang dikenal dengan era *Ancient Culture*, tampaknya kesamaan-kesamaan dalam tradisi ritual dan religi yang ada itu diperkuat eksistensinya, seperti pada pemujaan dewa Surya atau Dewa Matahari yang hampir terdapat di berbagai belahan dunia seperti di Venezuela, Mexico atau negeri-negeri Amerika Latin, memiliki kesamaan dengan kepercayaan atau spiritualitas yang ada suku kuna Jepang yaitu suku bangsa Ainu, di India, di Afrika, Eropa dan belahan dunia lainnya.

Tidak hanya dalam hal aspek sosial budaya, tetapi juga dalam aspek politik tampak nilai-nilai budaya seperti yang ada dari India dan Cina, Nampak memperkuat persoalan kenegaraan di negeri-negeri yang didatanginya. Lihat saja misalnya konsep kepemimpinan Hindu yang dikenal dengan ajaran *Asta Brata* yang

merupakan ciri-ciri kepemimpinan yang dianut di negeri-negeri yang terkena pengaruh India tampaknya masih bertahan dan memperkuat pemahaman tentang konsep dewa raja (*devaraja cult*) dari dahulu hingga sekarang (cf. Gust,1994). Kuatnya pengaruh Hindu atau Cina di Asia Tenggara yang secara dominan dilihat dari aspek kebudayaan tampaknya memberikan kesempatan yang tidak seimbang dengan pemahaman-pemahaman tentang tradisi pengelolaan konflik yang hendaknya juga dikembangkan.

III. Hindu Center: Antara *Area Studies* dan *Cultural Studies*

Di masa lalu menjelang berakhirnya masa kolonisasi dan menuju implementasi imperialisme Barat yang modern sebagai akibat perkembangan dari dampak revolusi industri, meningkatnya pengaruh kekuasaan dalam era revolusi yang berkembang di Barat, tampak penguasa-penguasa Barat mulai memikirkan tentang dunia yang berada di luar dunianya. Misalnya saja tentang perkembangan studi Asia Tenggara tidaklah bermula dari sebuah studi tentang kebudayaan semata-mata, namun lebih banyak berkaitan dengan kepentingan Barat untuk memberikan keuntungan pada kepentingan mereka sendiri. Ini dapat dilihat bagaimana pengembangan studi Asia Tenggara di Amerika Serikat dengan memberikan kesempatan kepada berbagai ahli politik, sejarah, antropologi untuk mengkaji Asia Tenggara sebagai sebuah kajian kawasan pada saat itu. Perlu dipahami, bahwa tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang signifikan kepada negara adidaya yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya, ekonomi masyarakat, politik di kawasan tersebut dan memahami potensi ancaman dan dukungan terutama pada saat akan diadakan ekspansi di sebuah kawasan di Asia Tenggara.

Informasi yang dikumpulkan dipergunakan untuk memperoleh informasi serinci mungkin dalam konteks persiapan Perang Dunia II. Inilah awal perkembangan studi kawasan Asia Tenggara yang dimulai di Cornell Amerika Serikat. Perkembangan studi kawasan ini akhirnya menyebar ke berbagai negara termasuk di Eropa seperti *School of Oriental and African Studies* (SOAS) di London Inggris, *Southeast Asia Studies* atau *Sudostasienkunde* (Jerman), ke beberapa universitas di Australia

akhirnya di Asia Tenggara sendiri seperti di *National University of Singapore* di Singapura. Meskipun demikian, tampak bahwa meskipun berdiri berbagai lembaga pendidikan yang memusatkan kajiannya pada Asia Tenggara mereka telah sama-sama bekerja, tetapi tampak kurang bekerja sama dalam memahami kajian Asia Tenggara secara terintegrasi. Memang masing-masing negara tampak memberikan perhatian pada persoalan ekonomi dan politik di Asia Tenggara, namun jarang sekali permasalahan sosial budaya, yang termasuk agama di dalamnya tampak belum dibahas secara komprehensif. Justru persoalan-persoalan ini banyak digerakkan oleh komunitas-komunitas masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap permasalahan sosial budaya yang berkaitan dengan tema keagamaan tersebut.

Namun perlu dicatat, bahwa menurut catatan kesejarahan yang terjadi di Asia Tenggara sendiri tampak, karena tidak semua negara di Asia Tenggara dikolonisasi oleh Barat seperti Thailand misalnya yang tidak pernah dijajah oleh Barat (Falyey, 2015). Di sini dikembangkan juga studi kawasan terutama dalam upaya memperoleh pemahaman atau *lesson learnt* terhadap sebuah kawasan untuk memahami Thailand sendiri. Dalam kaitan ini, bagaimana Thailand mempelajari negerilainnya untuk memahami negerinya yang meskipun tidak pernah dijajah oleh Barat, namun berupaya memperoleh pemahaman tentang dinamika di Asia Tenggara lainnya sehingga Thailand mengadakan perlawanan bukan terhadap Barat, melainkan terhadap kekuasaan absolut yang bersifat tradisional di negerinya yang dikenal sebagai Revolusi Kebudayaan yang terjadi pada tahun 1932.

Dari pembahasan ini tampak bahwa pengembangan sebuah wilayah atau tema seperti di atas tampak dilihat dari konteks perubahan pemikiran dari pengembangan studi kawasan yang sifatnya lebih pada upaya memperoleh kekuasaan politik menuju upaya untuk memahami sebuah kawasan atau topik berkaitan dengan perkembangan sebuah aspek sosial budaya yang sangat dibutuhkan oleh negeri-negeri non-Barat. Dalam konteks inilah hendaknya dipahami apa yang dimaksud dengan Hindu Center sebagai sebuah lembaga yang merupakan *think thank* bagi pengembangan pusat studi Hindu di Indonesia pada khususnya, dan di Asia Tenggara pada umumnya.

IV. Prospek Hindu Center: Lokal, Nasional dan Internasional

Di sini tampak bahwa hampir gambaran yang sama tentang pengaruh kebudayaan dalam hal ini diperankan oleh agama tampaknya menjadi tempat atau media yang bermanfaat yang di satu pihak untuk menyebarkan ajaran-ajaran keseimbangan, kedamaian, dan keharmonisan. Namun di pihak yang lainnya berkaitan dengan ajaran *egaliterism, democracy, human rights, gender*, --yang kebanyakan terlahir dari perkembangan kebudayaan Barat--tampaknya terlepas dari ajaran-ajaran keharmonisan yang diajarkan itu. Meskipun dipahami, bahwa nilai-nilai yang disebut dengan nilai-nilai Barat, *western values* tersebut tampaknya dicari dan ada di dunia timur yang dikenal dengan *Asian values* yang berakar di masyarakat Timur yang berlandaskan keharmonisan dan bukan dengan tradisi kekerasan (*violence*) sebagaimana yang banyak terjadi di dunia Barat. Di sini tidak dibahas secara komprehensif apakah kemudian nilai-nilai tersebut antara *Western values* dan *Asian values* berbeda satu dengan yang lainnya padahal dalam konteks kemanusiaan (*humanities studies*) bersifat universal dan terjadi sama di mana-mana di berbagai belahan dunia ini. Sikap-sikap yang berkembang kemudian adalah adanya sikap *permissive* yang sangat loyal dengan kehendak kekuasaan kerajaan tradisional di masa lalu yang memperkuat posisi penguasa sementara posisi rakyat tampaknya termarginalisasi. Bahkan, jika pun ada sikap-sikap yang berkaitan dengan pemahaman itu, tampaknya dihindari oleh kekuasaan tradisional pada saat itu, sehingga *mindset* atau pola pikir yang berkembang menjadi pembenaran atau *legitimate*, sehingga apa yang disampaikan oleh mereka seringkali dianggap sebagai bentuk perlawanan yang memaikan dinamika yang ada. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara apa yang berkembang di Eropa yang diawali dengan masa Renaissance dan tampaknya tradisi yang berkembang seperti Renaissance dalam pengertian Barat itu, tidak terjadi di Asia.

Tidak mengherankan kemudian, jika Hindu yang banyak dikaitkan dengan *Asian values* memiliki konteks yang berbeda dengan apa yang terjadi di Barat. Tidak hanya dengan pemikiran Barat, tampak berbeda pula dengan pemahaman yang berkaitan



dengan permasalahan studi Islam atau *Islamic studies* seperti yang berkembang dewasa ini. Sejarah mencatat bahwa Hindu sebagai sebuah kerajaan pertama telah berkembang di Kutai Kalimantan Timur pada abad ke-4, kemudian abad ke-7 di Jawa Barat dan di Jawa Tengah abad ke-8 dan di Jawa Timur abad ke-10-11 dalam kaitannya dengan kemunculan kerajaan Hindu pada masa pemerintahan raja Udayana dengan permaisurinya Mahendradatta, seorang putri dari Jawa (Ardhana dan Setiawan, 2014). Sementara Islam sudah diketahui kontak atau sentuhan pertamanya pada abad ke-7 kemudian berkembang pada abad ke-13, sebagaimana diketahui dengan berkembangnya Samudra Pasai di Sumatra Utara. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Hindu tidak ada jejak-jejaknya di Sumatra Utara. Alasannya adalah karena sebagaimana dijelaskan di bagian awal makalah ini, Hindu tampaknya dikembangkan oleh orang India yang mengunjungi Sumatra Utara di masa lalu. Yang menarik untuk diungkapkan di sini adalah bahwa Hindu dan Islam telah memiliki rentang waktu yang cukup panjang antara yang satu dengan yang lainnya. Tampaknya Islam lebih dinamis dan memiliki ide-ide *progressive* dibandingkan dengan penyebaran Hindu di Indonesia. Tidak mengherankan jika mahasiswa Islam yang menikmati pendidikan mereka di luar negeri telah memiliki wadah sebuah gerakan Islam yang terorganisir dengan baik, sementara mahasiswa Bali yang beragama Hindu tampaknya menghadapi kendala dalam persoalan-persoalan lembaga keorganisasian yang bernafaskan agama Hindu. Sebenarnya permasalahan ini tidak dapat digambarkan pada kondisi yang diceritakan ini, namun Hindu memerlukan pemikiran dalam upaya mengembangkannya tidak hanya di tingkat lokal Bali, namun nasional dan internasional. Di berbagai tingkat pertemuan misalnya pelaksanaan kegiatan mahasabha, seminar dan sebagainya masih memerlukan pemikiran untuk dikembangkan secara professional. Ini dapat dimengerti, karena tidak hanya persoalan sumberdaya manusia yang berkaitan dengan masalah manajerial atau membutuhkan seorang manager misalnya, namun lebih memikirkan tentang munculnya tokoh-tokoh atau leadership yang memiliki visi dan misi pengembangan organisasi yang *outstanding* untuk kemajuan lembaga-lembaga

yang bernafaskan agama Hindu.

Ini dapat dimengerti karena persaingan-persaingan yang terjadi di antara berbagai agama yang diakui di Indonesia dan munculnya pengakuan terhadap aliran kepercayaan tampaknya memerlukan pemikiran yang kompetitif dalam melihat ideologi yang dikembangkan oleh setiap agama atau kepercayaan yang diakui eksistensinya di Indonesia. Berbicara tentang ideologi dalam kaitannya dengan politik, dimana politik di sini dimaksudkan sering menyimpang dari harapan atau tujuan karena kekuasaan yang ingin diraih (*politics tends to corrupt*) seperti terjadi di masa lalu. Dalam hal ini Islam sebagai penganut agama terbesar di Indonesia memang lebih memiliki kedekatan dengan persoalan ideologi politik dibandingkan praktek agama Hindu pada percaturan politik di pentas nasional pada masa Indonesia modern.

Memang di masa lalu Hindu juga tampaknya memiliki kedekatan dengan pengertian ideologi politik seperti itu sebagaimana yang tampak pada masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu pada masa lalu, dimana *abuse of power* tampaknya sering terjadi. Namun pada masa modern misalnya kedekatan-kedekatan pada konsep seperti itu menghadapi berbagai tantangan dari berbagai elemen yang dianggap membawa Hindu kepada posisi yang lemah. Sejarah politik Indonesia dalam konteks konflik politik pasca revolusi menunjukkan masalah ini. Gejolak politik ini terus berkembang seperti diketahui di era tahun 1960-an di mana Hindu di Bali mau tidak mau masuk dalam berbagai dinamika politik dalam kaitannya dengan Gerakan komunisme di Indonesia (Bandingkan dengan: Ramstedt, 2004: 15). Saat itu, ketika pimpinan umat di Bali berhadapan dengan persoalan politik tampak bagaimana Bali sangat tergantung dengan pusat. Ini artinya ketika pusat menghadapi masalah dalam dinamika politik nasional, maka Bali mengalami berbagai permasalahan berupa banyaknya jatuh korban yang diperkirakan melebihi seratus ribu orang menjadi korban ketika peristiwa gerakan komunisme berlangsung pada saat itu. Banyak aspek yang menyebabkan hal ini terjadi, terutama dikaitkan dengan persoalan adat, agama dan politik (cf. Staab, 1997). Ini yang menjadi salah satu sebab, mengapa masyarakat Bali tampaknya

menganggap tabu jika mengikuti aktivitas politik masa lalu.

Dalam konteks ini, mau tidak mau mereka harus dididik juga menjadi tenaga politisi yang handal tidak hanya di masa kini, tetapi juga di masa yang akan datang. Apabila pendidikan politik ini dikembangkan, maka mereka akan menjadi tidak mengetahui akan hak-hak dan kewajiban politiknya di era Indonesia modern dan demokratis. Ada beberapa hal yang mendasari masalah ini. Diantaranya adalah adanya kecenderungan yang melihat bahwa akibat pengalaman politik masa lalu seperti ketika terjadinya peristiwa komunisme di tahun 1960-an banyak yang tidak berminat dalam kegiatan politik praktis seperti itu. Inilah yang menyebabkan kemudian dinamika umat Hindu yang hanya menekankan sebagai sebuah gerakan umat yang mencakup aspek sosial budaya dan religi dan jauh dari pemahaman politik.

Di pihak yang lainnya, tampaknya pada organisasi Islam misalnya terdapat kedekatan tidak hanya pada konsep sosial budaya, agama, tetapi juga pada konsep politik. Ini kemudian yang menyebabkan adanya anggapan bahwa berbicara tentang Hindu tampaknya seolah-olah hanya berbicara pada permasalahan agama yang dikaitkan dengan aspek sosial, agama dan budaya saja pada umumnya. Namun pada realitasnya pada masa modern ini tidaklah perlu dianggap demikian, karena tuntutan umat memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana umat Hindu terutama generasi mudanya untuk diberikan pencerahan tidak hanya pada bidang yang mereka tekuni, tetapi memiliki wawasan yang lebih luas tentang dinamika negara bangsa, nasionalisme, hak azasi manusia, kesetaraan atau pemikiran egaliter yang memang sedang dituntut pada masa Indonesia modern sekarang ini. Di sini lah letak permasalahan mengenai bagaimana upaya untuk menempati posisi agama Hindu yang terkadang termarginalisasi di masa lalu dan perlu dikembangkan di masa yang akan datang. Perlu dipahami bagaimana kondisi umat Hindu dibandingkan dengan posisi Islam dalam negara Indonesia yang sebenarnya bukan sebagai sebuah agama, yang berdasarkan syariat Islam atau sebagai sebuah negara Islam seperti apa yang terjadi dengan Malaysia yang mengklaim Malaysia sebagai sebuah negara Islam atau *an Islamic state*? Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa Indonesia

memang bukan negara Islam, tetapi sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, namun tetap memberikan apresiasi pada kehidupan umat lainnya dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Sebagai kelompok minoritas Hindu memang perlu melakukan pembinaan seperti pada organisasi agama besar lainnya. Dibandingkan dengan agama minoritas yang lainnya seperti agama Katolik misalnya, tampak agama ini memiliki poros kuat dari Vatikan dengan diperkuat adanya struktur organisasi keagamaan yang terbesar di dunia. Inilah sebabnya agama ini memiliki sistem organisasi modern yang memiliki kebijakan sangat strategis dalam pembinaan umatnya di seluruh dunia.

Bagaimana Hindu sebagai sebuah agama minoritas di Indonesia hidup di lautan samudra yang mayoritas Islam? Dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah pemikiran tentang signifikasinya Hindu Center menjadi hal penting untuk dibahas. Hindu di Bali pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya tidak hanya berhadapan dengan agama besar seperti Islam, tetapi juga dengan agama minoritas lainnya dan bahkan di kalangan internalumat Hindu sendiri. Kajian kritis tentang adat dan agama tampaknya penting lebih dibahas secara ilmiah, sehingga generasi muda milenial kita dapat memahami dengan baik tentang tekst sastra, kitab suci, dan sebagainya (Eiseman, 2000). Ini menjadi penting dilakukan karena dalam proses dinamika masyarakat di Bali yang multikultur sudah menghadapi berbagai tantangan dalam bentuk adanya aspek-aspek perubahan dan kelanjutan yang perlu dipahami dengan holistik. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dampak perkembangan globalisasi yang mengharuskan Hindu harus dapat hidup kompetitif di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang multikultur.

Persoalan kompetitif yang dihadapi memerlukan sebuah kajian untuk mengetahui berbagai potensi dan kendala yang dihadapi pada masa Indonesia modern bahkan post-modern ini. Untuk itu, pengumpulan data sumberdaya manusia Hindu menurut wilayah, jumlah teknokratnya, profesi, gender, pendidikan, pekerjaan, bahkan afiliasi politik sangatlah perlu diketahui dalam memetakan bagaimana mengembangkan Hindu di masa kini dan masa yang akan datang. Tiap-tiap

wilayah di Indonesia memiliki variasi persoalan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya permasalahan yang sering mengemuka adalah tentang minimnya guru yang dapat mengajarkan agama Hindu. Banyak anak-anak Hindu dinyatakan tidak dapat mengikuti pelajaran agama karena minimnya guru agama Hindu. Di beberapa tempat pada masa lalu, bahkan mereka mengikuti pelajaran agama lain. Mungkin pertimbangannya unuk memperoleh nilai agama daripada tidak memiliki nilai agama. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan masalah keyakinan yang hendaknya diperoleh sebagai pembentukan manusia yang bersifat religius yaitu Hindu? Betapa pentingnya memetakan persoalan ini yang dihadapi oleh beberapa daerah yang memiliki umat Hindu di Indonesia.

Apabila permasalahan ini sudah dapat dipetakan permasalahannya, maka diupayakan untuk membuat peta jalan (*roadmap*) kegiatan pembinaan umat Hindu yang lebih baik di Indonesia. Peta jalan ini menjadi sangat signifikan terutama yang dapat dijadikan panduan dasar dalam melihat potensi dan dinamika umat yang memiliki pola tempat tinggal yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, perlu ditelusuri bagaimana aspek sejarah, pola migrasi yang dilakukan, jumlah dan kegiatan ritus dan situs Hindu di sebuah wilayah, penerapan ajaran Tri Hita Karana yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan keberlanjutan (*sustainability*) (Ardhana, 2016). Bagaimana peran wanita Hindu, pemuda Hindu (*youth*) dalam dinamika umat Hindu di era Millenial ini. Hindu Center diharapkan akan memiliki peran sentral dan strategis, dimana Universitas Hindu Indonesia (UNHI) menjadi tulang punggung (*backbones*) dalam kajian-kajiannya yang berkaitan dengan pembinaan umatnya, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional.

V. Simpulan

Umat Hindu di Indonesia memang mempunyai jumlah penganut lebih sedikit dibandingkan dengan penganut agama lainnya. Namun demikian, Hindu di Indonesia dapat dipandang sebagai minoritas yang kreatif (*creative minority*). Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi sebagai pemeluk

agama yang jumlah penduduk yang beragama Hindu lebih sedikit. Permasalahan yang dihadapi oleh umat Hindu seperti ini juga terjadi dengan agama-agama minoritas lainnya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan memaknai gerakan Hindu di Indonesia sebagai sebuah lembaga keagamaan yang bercirikan kelompok minoritas kreatif (*creative minority*) semestinya dikembangkan. Ini sangat signifikan dalam konteks pemahaman masyarakat Indonesia yang bukan sebagai negara agama, tetapi sebagai sebuah masyarakat multikultur yang mana kelompok mayoritas hendaknya mengapresiasi kelompok minoritas dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Hindu Center menjadi sebuah keniscayaan, karena kontribusi umat Hindu di Indonesia sangat signifikan dari dahulu hingga sekarang. Peningkatan peran Hindu Center sangatlah diperlukan untuk melakukan kajian-kajian tidak hanya yang bersifat akademis, tetapi yang berkaitan dengan hal-hal praktis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat atau umat Hindu di seluruh Indonesia. Kerjasama di kalangan internal umat Hindu perlu ditingkatkan dan berbagai komunikasi lintas agama, etnis, tradisi kepercayaan juga menjadi penting dilakukan untuk penguatan pemahaman kehidupan agama antara yang satu dengan yang lainnya. Edukasi seperti ini sangat penting dilakukan terutama terhadap generasi muda Hindu yang memerlukan tempat atau media komunikasi yang baik dan strategis sehingga berbagai permasalahan keumatan dapat dibahas dan dicarikan solusinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agung. I Gusti Agung. 1968. *Lambang Swastika*. Denpasar.

Ardhana, I Ketut. 2016. "Religious Teachings on Sustainability in the Context of Hinduism in Bali", paper presented at the Asian Conference, A Call to Dialogue on the Sustainability of Life in the Asian Context, held by the JCAP (Jesuit Conference of Asia Pasific) at the University Sanata Dharma Yogyakarta, from August 8 to 10.

Ardhana, I Ketut dan I Ketut Setiawan 2014, *Raja Udayana Warmadewa*. Denpasar: Pemerintah Kabupaten Gianyar and Center for Bali Studies, Pusat Kajian Bali-Universitas Udayana.

Ardhana. I Ketut. 2012a. "Cultural Relationships between India and Indonesia: Viewing from the Collective Memories". Paper presented at the India-ASEAN Academic Seminar on "India and Indonesia-Shared History & Culture and Opportunities for Deepening People to People Contacts held by Indian Embassy in Jakarta, Cultural Consulate of India in Denpasar and University of Udayana, in Denpasar Bali, 30 October.

Prof. Dr. phil. I Ketut Ardhana, M. A., Dra. Sulanjari, M. A., Dra. Anak Agung Rai Wahyuni, M.Si., Dr. I Ketut Setiawan, M. Hum. 2017. *PURA BESAKIH, CANDI SUKUH, DAN CANDI CETHO: Persamaan, Perbedaan Arsitektur, dan Indigenisasi Budaya di Bali dan Jawa Tengah*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Candi Gedong Songo

Ardhana, I Ketut. 2012b, "Indian Influences on the Balinese Culture in the Context of Harmony and Human Securities", dalam *International Seminar on "Cultural Exchange between India and Southeast Asian World"*, held by Udayana University in cooperation with Global Association of Indo-Asean Studies and Hankuk University of Foreign Studies, Korea, Denpasar 8-9 February.

Eiseman, Fred. B. Jr. 2000, *Bali: Skala and Niskala, Essays on Religion, Ritual and Art*. Peripus

Falyey, Lindsay. 2015. *Understanding Southeast Asia: Syncretism and*

- Communalities*. Songkhla: Thailand: TSU Press.
- Gottowik, Volker. 2005. *Die Erfindung des Barong: Mythos, Ritual und Alterität auf Bali*. Berlin-Germany: Dietrich Reimer Verlag GmbH.
- Gust, Heike, 1994. "Der Balinesische Hinduismus in Geschichte und Gegenwart", Master Unpublished Thesis. Passau: Universität Passau.
- Hylland Eriksen, Thomas. 2002. *Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspective*. London: Pluto Press.
- Khrisna, Anand. 2002. *Javanese Wisdom: Butir-butir Kebijakan Kuno Bagi Manusia Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Parisada Hindu Dharma Kabupaten Badung. *Keputusan Pesamuhan Sulinggih dan Walaka Se Kabupaten Badung Tanggal 26 Juli 1986 di Pengasraman Uluwatu*.
- Pudja, G. 1972/ 1982. *Siwa Sasana (Text Terjemahan dan Penjelasan)*. Jakarta: Mayasari.
- Pudja, Gede. 1963. *Sosiologi Hindu Dharma*. Djakarta: Jajasan Pembangunan Pura Pita Maha.
- Pudja, Gede. 1974. *Weda Satu Studi Mengenai Kedudukan Weda sebagai Sumber Hukum dan Ajaran Agama Hindu*. Jakarta:
- Pudja, G. 1981. *Bhagawadgita (Pancama Weda)*. Jakarta: Lembaga Peneliti dan Pengembangan Weda.
- Putra. *Cudamani: Pengertian Upacara Ngaben*.
- Ravindra, Ravi. 2017. *The Bhagavad Gita: A Guide to Navigating The Battle of Life*. Delhi: Jaico Publishing House.
- Rubinstein, Raechelle dan Linda H. Connor. (eds.). 1999. *Staying Local in the Global Village: Bali in The Twentieth Century*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Rudia Adiputra, I Gede, I Wayan Suarjaya dan I Gede Sura. 1984. *Tattwa Darsana*. Jakarta: Proyek Pembinaan Mutu Pendidikan Agama Hindu dan Budha Departemen Agama.
- Sri Margana (ed.). 2017. *Kapita Selekta (Pendidikan) Sejarah Indonesia: Kumpulan Tulisan Seminar Sejarah Nasional*. Yogyakarta: Ombak.
- Sri Margana (ed.). 2017. *Pluralisme dan Identitas: Pengalaman dan*

Pandangan Berkebangsaan. Yogyakarta: Ombak.

- Sugiarto, R. n.d. *Maitri Upanisad*. Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
- Sudiarto, R. 1982. *Sweta Swatara Upanisad*. Jakarta: Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu.
- Sadia, I Ketut, Ida Bagus Darmana dan I Ketut Tika. 1982. *Weda Untuk PGA Hindu*. Jakarta: Proyek Pembinaan Mutu Pendidikan Agama Hindu dan Budha.
- Ramstedt, Martin. 2004. "Introduction: Negotiating Identities-Indonesia Hindus' between Local, National and Global Interest", dalam Martin Ramstedt (ed.), *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority religion between local, national and global interests*. Routledge Curzon, Oxford.
- Ramstedt, Martin. 1999. "Hinduismus und Naturkulte", dalam Bernhard Dahm und Roderich Ptak (eds.). *Sudostasien Handbuch: Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur*. Munchen: C.H. Beck Verlag.
- Sugiarto, R. 1983. *Atharva Weda (Weda Sruti)*. Lembaga Penterjemahan Kitab Suci Weda.
- Sugiarto, R. 1984. *Rg Weda Mandala VIII*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu.
- Staab, Christiane. 1997. *Balinesische Dorfgenerationen und ihre Bewertungen in der Literatur*. Passau: Lherstuhl fur Sudostasienkunde: Universitat Passau.
- Sura, I Gede/ Mei 1991. *Samkhya Yoga*. Denpasar: Kungkungan.
- Surpha, I Wayan. *Eksistensi Desa Adat di Bali Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Tentang Pemerintahan Desa)*. Denpasar: Upada Sastra.
- Surpha, I Wayan. 1970. *Kramaning Muspa*. Badung: Parisada Hindu Dharma Kabupaten Badung.
- Titib, I Made. 1986. *Weda Walaka*. Jakarta: Penerbit PT Dharma Nusantara Bahagia.
- Titib, I Made. 1997. *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Weda*. Surakarta: Paramita.



DINAMIKA HINDU DI PROVINSI LAMPUNG

I Ketut Ardhana

Lampung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra. Provinsi Lampung berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu. Ibukotanya adalah Bandar Lampung. Lampung memiliki pelabuhan udara internasional Pelabuhan Panjang dan pelabuhan lokal adalah Bakauheni yang menghubungkan Sumatra dan Jawa melalui transportasi laut. Terdapat pelabuhan perdagangan ikan laut seperti Pasar Ikan Teluk Betung, Tarahan dan Kalianda di Pelabuhan Lampung.



Peta Provinsi Lampung

Provinsi ini dikenal terutama dikaitkan dengan dampak bencana alam yang pernah terjadi di Selat Sunda pada akhir abad ke-19. Banyak dokumen sejarah dan geografi yang mencatat tentang dampak dari bencana alam seperti letusan

Gunung Krakatau yang terjadi di Selat Sunda itu. Letusan Gunung Krakatau itu diikuti dengan gempa bumi yang sangat dahsyat yang terjadi pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau mengakibatkan dampak sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang serius bagi kehidupan masyarakat baik yang terletak di sekitar Selat Sunda, maupun yang terjadi di Lampung Sumatra Selatan. Dalam kaitannya dengan letusan dan gempa bumi ini, tampak hadirnya masyarakat Bali yang beragama Hindu ke Lampung memiliki sejarah migrasi yang masih dapat dilihat hingga sekarang yang muncul sebagai akibat meletusnya Gunung Agung pada tahun 1963.

Secara demografi, penduduk Lampung dikenal sebagai penduduk yang multikultur yang dapat dipahami dalam konteks sejarah dan migrasi penduduk, dalam kaitannya dengan kebijakan politik kolonial Belanda, yang disebut dengan kolonisasi yang berhubungan dengan masalah perkebunan pada akhir abad ke-19, dan program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan (tentang kolonisasi zaman Kolonial Belanda baca: Bracken, 2015). Kebijakan transmigrasi ini tidak hanya diberlakukan di Lampung, tetapi juga bagi wilayah lainnya seperti di Kalimantan dan Sulawesi.

Lampung dikenal sebagai ibukota provinsi dengan jumlah orang Bali dan umat Hindu terbanyak kedua setelah umat Islam. Meskipun terjadi perbedaan agama di antara masyarakat di Lampung, tetapi kehidupan harmonis dapat tergambarkan dengan baik di antara mereka. Orang Jawa dan orang Bali sebagai pendatang di Lampung sudah menjadi penduduk Lampung karena sebuah proses yang panjang dalam dinamika perkembangan kawasan kota ini (tentang perkembangan sebuah kota, baca: Leushuis, 2014). Orang Jawa misalnya memiliki keterampilan dalam usaha industri, pertukangan, konstruksi bangunan demikian juga orang Bali yang dikenal memiliki keterampilan di sektor perkebunan dan pertanian. Karena kehidupan orang Bali yang sangat dekat dengan masalah ini maka tidak mengherankan jika orang Bali di Lampung memiliki nilai-nilai kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan meningkatkan peran budaya lokal yang diakomodasi dengan berbagai pengaruh budaya daerah yang ada di Lampung.

Potensi dalam pengembangan kebudayaan lokal ini tampaknya menjadi karakter yang signifikan sehingga kehidupan kedua etnis yang saling berdampingan ini dapat berkembang di masa kini dan masa yang akan datang.

A. Migrasi dan Perkembangan Umat Hindu di Lampung

Sebagaimana dipahami dalam sejarah transmigrasi di Indonesia, tampaknya perpindahan penduduk dari sebuah wilayah ke wilayah lain sudah dikenal sejak lama. Program transmigrasi yang diintroduksi oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan bercikal bakal pada politik kolonial Belanda yang sudah ada di wilayah ini pada era kekuasaan kolonial Belanda pada abad ke-19. Kebijakan kolonial ini dikenal dengan program kolonisasi yang berkaitan dengan persoalan perkebunan yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda di pantai timur Pulau Sumatra.

Program kolonisasi yang diperkenalkan ini sangat menguntungkan pihak pemerintah Belanda pada masa kekuasaannya di Indonesia pada umumnya, dan di Sumatra pada khususnya. Namun, ketika rezim kolonial Belanda berakhir karena didesak oleh okupasi Jepang di Indonesia pada khususnya, dan di Asia pada umumnya, maka memungkinkan pemerintah Indonesia mengambil alih kebijakan ekonomi dan politik sebagai pengganti kebijakan pemerintah jajahan di Indonesia. Meskipun Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, tampaknya program Belanda ini masih berlanjut dampaknya dan pemerintah Indonesia berusaha mengubahnya menjadi program transmigrasi yang masih dikenal hingga sekarang.

Indonesia di bawah Orde Lama dengan kepemimpinan Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia mengembangkan program kolonisasi ini menjadi program transmigrasi yang merupakan program perpindahan penduduk dari pulau satu ke pulau lainnya di dalam negeri Indonesia. Pada tahun 1950-an misalnya karena kekurangan tenaga kerja dalam pengelolaan lahan ini, maka dilaksanakan program transmigrasi tersebut yang mendatangkan antara lain tenaga kerja terampil di bidang pertanian tidak hanya dari Bali, tetapi juga dari Jawa. Tenaga terampil dari Jawa kebanyakan memiliki profesi

perdagangan, pertukangan, sementara tenaga kerja dari Bali lebih dikenal sebagai tenaga handal di bidang pertanian. Kedua etnis ini baik etnis Jawa dan Bali mendominasi wilayah yang baru dikembangkan sebagai kawasan transmigrasi. Bahkan, untuk orang Bali misalnya, mereka tidak hanya membawa tradisi dan kebudayaan Bali ke wilayah yang baru itu tetapi juga membawa keterampilan yang sudah mereka miliki secara turun temurun di bidang pertanian. Mereka pun mengelolan lahan pertanian dengan rajin, dan menjadi petani yang tangguh. Bahkan orang Bali memperkenalkan sistem subak sebagai sistem pertanian tradisional Bali yang juga diperkenalkan di daerah transmigrasi yang mereka datang.

Gunung Agung sebagai gunung api tertinggi di Bali meletus di era Orde Lama ini tahun 1963. Ketika terjadi letusan Gunung Agung pada tahun 1963 itu, tampaknya wilayah Lampung ini menjadi salah satu opsi untuk dapat menerima pengungsi yang terkena dampak letusan Gunung Agung itu, khususnya bagi orang Bali yang menghuni di kaki Gunung Agung seperti Tangkas, yang berada di Kabupaten Klungkung.

Kedatangan mereka ke wilayah transmigrasi Lampung yang memiliki tanah yang subur ini, ternyata membawa beberapa persoalan. Pertama, pada masa pemerintahan Orde Lama (1945-1967) ada kebijakan untuk menerima dengan baik kedatangan mereka, Orang Bali diberikan lahan untuk mempertahankan kehidupan mereka di bidang pertanian. Orang Bali yang sebagian besar beragama Hindu ini dikenal ulet bekerja dibandingkan dengan orang lokal yang umumnya menganut agama Islam. Kecemburuan sosial tidak bisa dihindari. Ini disebabkan pengungsi Bali membawa kebudayaan Bali dan mengembangkannya di daerah yang mereka datang. Tidak hanya agama Hindu yang dikembangkan, tetapi juga kebudayaan Bali, sehingga mereka membangun Bali di daerah transmigrasi.

Pada masa Orde Baru (1968-1998) wilayah yang ditempatkan pengungsi Bali di Desa Sidorejo ini mengalami perkembangan yang pesat dimana berbagai aspek kebudayaan Bali berhasil dikembangkan. Beberapa pihak swasta tampaknya melihat perkembangan desa Bali baru ini dan mulai mengancam akan mengembangkan proyek swasta di bidang pertanian dan

peternakan. Ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang Bali dan menimbulkan konflik antara orang Bali dan pengusaha yang diduga berasal dari kroni rezim yang berkuasa. Konflik yang terjadi berlanjut hingga jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 yang berkuasa selama 32 tahun secara authoritarian dan sentralistik.

Jatuhnya rezim Orde Baru digantikan oleh rezim Reformasi dimana transparansi, demokrasi, pemerintahan yang bersih diperkenalkan. Pengungsi Bali pun menggunakan kesempatan ini untuk memperjuangkan hak-hak mereka karena kedatangan mereka ke wilayah transmigrasi adalah sesuai dengan kebijakan negara. Melalui wakil-wakil mereka di parlemen diupayakan untuk menyampaikan keinginan mereka kepada pemerintah era reformasi.

Apa yang diperjuangkan mereka sesuai dengan program Nawacita pemerintahan era Reformasi. Kesempatan ini dipergunakan untuk mempertahankan hak-hak mereka di daerah yang mereka datangi. Namun ini tidak berarti tidak ada gejolak di masa berikutnya. Berbagai kemajuan yang dimiliki telah menimbulkan kecemburuan di kalangan penduduk lokal, namun kerjasama di kalangan pendatang seperti orang Jawa dan Bali tampaknya dilakukan dengan baik. Meski, orang Bali beragama Hindu, mereka adalah penduduk minoritas yang beragama Hindu dan menempati posisi kedua setelah agama Islam. Berbagai persoalan antara pengungsi Bali dan penduduk lokal secara adat dan musyawarah dimana negara hadir dalam berbagai persoalan konflik di antara mereka.

B. Perkembangan Hindu, Perkawinan, dan Kelangsungan Budaya di Lampung

Program transmigrasi di satu sisi telah membuka ruang bagi orang Bali untuk secara langsung maupun tidak langsung memberikan sentuhan budayanya yang khas ke wilayah baru yang didatangi, dalam hal ini Provinsi Lampung. Namun demikian, di pihak lainnya, persoalan menjadi tidak sesederhana itu. Masyarakat Hindu dari Bali datang ke Lampung membawa budayanya, hal mana antara adat dan agama seringkali tidak dapat dipisahkan satu sama lain (tentang desa adat atau desa *pakraman*,

lihat lebih jauh: Surpha, 2002). Kondisi ini kerap memunculkan sejumlah spekulasi. Salah penafsiran sering terjadi antara orang Bali yang beragama Hindu dengan penduduk lokal yang sudah memiliki kekhasan budayanya (sebagai referensi, baca: Ardhana dan Maunati. 2015). Dalam konteks inilah diperlukan sikap bijak untuk dapat memahami secara lebih baik, bagaimana hendaknya kebijakan yang mengatur dinamika etnis yang memiliki latar belakang agama, adat, dan kebiasaan yang berbeda agar dapat hidup saling harmonis dan penuh toleransi dalam konteks masyarakat yang berbhineka tunggal ika berdasarkan ideologi Pancasila.

Untuk mengetahui keberagaman agama di Provinsi Lampung dan perbandingan jumlah umat Hindu dengan umat lainnya di wilayah ini, dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 1: Data daftar jumlah penduduk berdasarkan agama Provinsi Lampung.

No.	Kota/Kabupaten	Hindu	Islam	Kristen	Katolik	Budha	KHC
1	Lampung Barat	1,760	412,683	2,751	532	173	0
2	Tanggamus	772	530,331	1,560	2,492	387	26
3	Lampung Selatan	15,014	873,654	12,829	5,598	1,116	34
4	Lampung Timur	16,513	913,200	13,247	5,909	2,236	49
5	Lampung Tengah	40,379	1,093,801	15,815	14,715	1,818	54
6	Lampung Utara	2,416	570,594	6,160	3,989	662	33
7	Way Kanan	11,784	386,262	4,265	3,169	200	6
8	Tulangbawang	10,686	375,274	7,847	2,724	357	19
9	Pesawaran	359	389,577	3,618	2,183	1,467	8
10	Pringsewu	2,561	350,297	2,875	7,316	599	21
11	Mesuji	4,742	178,733	2,599	658	192	3
12	Tulangbawang Barat	3,015	238,659	6,601	1,969	311	11
13	Kota Bandar Lampung	3,111	816,807	31,345	14,049	13,016	326
14	Kota Metro	400	134,911	3,743	3,711	1,588	6
15	Provinsi Lampung	113,512	7,264,783	115,255	69,014	24,122	596

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk Lampung memeluk agama Islam, dan sebagian kecil dari mereka menganut agama Hindu, walaupun bukan jumlah paling minor di masyarakat. Jumlah umat Hindu hanya berbeda sedikit dari umat Kristen yang menjadi mayoritas kedua umat

terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Data ini tentu perlu diperbaharui dengan kondisi umat terkini, tentunya aneka perubahan telah terjadi, terlebih di masyarakat juga tak terelakkan adanya konversi agama yang disebabkan oleh perkawinan.

Secara etnis, suku Bali di Lampung yang menganut agama Hindu boleh dikata merupakan mayoritas penduduk terbesar kedua setelah etnis Jawa sebagai penganut agama Islam. Pernikahan antara individu etnis Jawa dan Bali, yang umumnya berbeda agama itu, jamak terjadi. Salah satu di antara pasangan tersebut biasanya akan melakukan konversi agama mengikuti pasangannya. Akan tetapi, seringkali terjadi, bahwa meskipun misalnya yang perempuan beragama Islam dan memutuskan mengikuti agama suami yaitu agama Hindu, karena kurangnya perhatian suami serta keluarga dalam membina istri yang baru menjadi Hindu, menyebabkan sang istri pada akhirnya memutuskan kembali ke agama asalnya.

Perlu dipikirkan suatu kebijakan untuk menyikapi kondisi ini. Pembinaan keagamaan pasca perkawinan kiranya bukan semata tugas suami dan keluarga tetapi ke depan bisa dibuat semacam program tertentu yang dibina oleh institusi keagamaan sehingga mereka yang baru memilih Hindu dapat memahami dan mendalami esensi agama ini secara lebih baik. Penyuluhan tentang praktik keagamaan sehari-hari juga penting dilakukan, termasuk pengenalan dengan komunitas adat dan keagamaan serta pura-pura di Provinsi Lampung.

Adapun umat Hindu di Lampung memiliki beberapa pura sebagai tempat persembahyangan antara lain: Pura Kahyangan Jagat Kerti Bhuana, yakni pura yang disungsung oleh seluruh umat Hindu yang ada di Provinsi Lampung. Pura ini mulai dibangun pada tanggal 16 Juni 1973 yang diawali dengan pembelian sebidang tanah seluas 5.000 m² yang terletak di atas bukit dengan ketinggian 55m diatas laut, tepatnya di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang. Peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada hari Anggara Umanis wuku Uye tanggal 7 Mei 1974, oleh Drh. Tjok Gede Dalem Pudak selaku Ketua Panitia Pembangunan Pura dan didampingi oleh Pak Nias dan disaksikan juga oleh seluruh umat Hindu yang ada di Kota Bandar Lampung saat itu. Berdasarkan keputusan Loka Sabha

pertama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung tanggal 30 Juni 1981 diputuskan bahwa Pura Kahyangan Jagat Kerthi Bhuwana berstatus Pura Provinsi yang merupakan Pura Pusat bagi umat Hindu se-Provinsi Lampung. Pelaksanaan piodalan dilaksanakan setiap 210 hari yang jatuh pada hari Saniscara Kliwon wuku Kuningan bertepatan dengan umat Hindu merayakan Hari Raya Kuningan.

Pelaksanaan piodalan dilaksanakan oleh Parisada kabupaten se-Provinsi Lampung secara bergilir dan dibantu oleh Parisada Kota Bandar Lampung selaku *pengempon* pura. Data perihal pura serta rohaniwan yang ada di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2: Data Pura dan Rohaniwan Agama Hindu Se-Provinsi Lampung Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	
		Pura	Rohaniwan
1	Lampung Barat	3	6
2	Tanggamus	10	10
3	Lampung Selatan	253	265
4	Lampung Timur	232	250
5	Lampung Tengah	266	269
6	Lampung Utara	25	28
7	Way Kanan	150	162
8	Tulang Bawang	25	26
9	Pasawaran	5	6
10	Pringsewu	12	15
11	Mesuji	4	5
12	Tulang Bawang Barat	50	58
13	Bandar Lampung	5	8
14	Metro	2	2
15	Pesisir Barat	20	25
	Jumlah	1.062	1.135

Sumber: https://Lampung.kemenag.go.id/files/Lampung/file/file/BimasHindu/Data_Rumah_Ibadah_Umat_Agama_Hindu_dan_Rohaniwan.pdf

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pura yang paling banyak di Provinsi Lampung berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yakni sejumlah 266 buah pura dengan rohaniwan sebanyak 269 orang. Sikap toleransi umat Hindu dan Islam di Lampung sampai saat ini terjaga dengan baik. Contohnya

di Labuhan Dalam, Tanjungseneang, Bandar Lampung. Setiap ada kegiatan seperti Idul Fitri dan Idul Adha umat Hindu selalu ikut membantu begitu pula sebaliknya. Sebagian ada yang membantu menjadi juru parkir dan sebagian lagi anak-anak mudanya untuk berkeliling menjaga rumah warga muslim yang ditinggalkan salat id. Dalam hal ini umat Hindu mengenakan pakaian adat Bali. Bahkan, tempat pemakaman umum pun menjadi satu, ada Islam, Kristen dan Hindu. Namun diberi pembatas sebagai pembeda. Umat Islam juga turut berkontribusi setiap ada kegiatan umat Hindu, seperti Pujawali. Umat Islam menjadi juru parkir dan mengamankan tempat yang digunakan oleh umat Hindu (Andi Apriyadi, Wartawan Jejam.com <http://www.jejamo.com/ini-alasan-umat-hindu-di-labuhan-dalam-bandar-Lampung-mau-bantu-jaga-keamanan-salat-id.html>)

C. Pendidikan Hindu

Dalam perkembangan pendidikan agama Hindu di Lampung, masyarakat di Lampung yang ingin mempelajari pendidikan agama hindu, seni budaya serta ekonomi Hindu dapat bersekolah di Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Lampung. STAH Lampung adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi formal di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdiri sejak tahun 2003 di Bandar Lampung. Pada awal berdirinya STAH Lampung masih menyatu dengan STAH Dharma Nusantara Jakarta sampai dengan angkatan IV. Tahun 2007 STAH Lampung resmi berdiri dan memperoleh izin operasional dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI No DJ.V/PP.00.9/7 10/2007 tanggal 12 April 2007 (<http://www.stahLampung.ac.id/>)

Dalam bidang pendidikan lainnya, mahasiswa Hindu di Lampung yang kuliah di Universitas Lampung tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu. Kegiatan yang mereka lakukan antara lain mengadakan Jnana Dharma se-Lampung yang bertema “Membentuk Generasi Hindu yang SIVAYA (*Smart, Integrated, Valuable, Artistic, Young and full of Achievement*)”. Rangkaian acara yang diikuti oleh siswa TK, SD, SMP, SMA atau sederajat dan Pasraman se-Lampung ini antara lain Dharma Widya (LCT), Dharma Wacana (pidato), Dharma Gita (pembacaan kitab suci),

tari, dan mewarnai. Peserta mencapai 350 orang dari seluruh wilayah Lampung. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan menjadi tolak ukur peningkatan diri, lebih mengerti tentang ajaran agama Hindu, dan lebih terbuka pada sesuatu yang baru. (<http://fkip.unila.ac.id/>)

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama Hindu di sekolah-sekolah, telah disediakan guru agama Hindu yang cukup. Hal ini dapat dilihat pada data tabel Guru PNS di Lampung di di bawah ini :

Tabel 3: Guru Agama Hindu PNS Di Lampung

No.	Nama	NIP	Golongan
1	Sukempi, S.Ag	196507101986032003	III/d
2	Suparmo, S.Ag	197006012003121001	III/c
3	Ni Wayan Suci, S.Pd.H	196011221981012001	IV/a
4	I Wy Sudita, S.Ag	196304271994031002	IV/a
5	I Made Yastono, S.Ag	150305770000000000	IV/a
6	I Komang Mustika, S.Ag	196501171991021002	IV/a
7	Drs. I Gede Parwata	196311291990031002	IV/a
8	Ida Ayu Made Sulasmini, S.Pd.H	-	IV/a
9	Ida Bagus Putu Suteja, S.Ag	196112111987031007	IV/a
10	I Ketut Arsidi, S.Ag		IV/a
11	I Kadek Daria, S.Pd.H	195712311978031017	IV/a
12	I Nyoman Utama, S.Pd.H	195703121979101003	IV/a
13	Ni Nengah Sulastri, S.Ag	195812121988082001	IV/a
14	I Nyoman Sutarta , S.Ag	195808131988081001	IV/a
15	I Ketut Suwitra , S.Ag	-	IV/a
16	I Ketut Widarse, S.Pd.H	195908051988081001	IV/a
17	Komang Dangin, S.Ag	195907071988081001	IV/a
18	I Made Lunas, S.Pd.H	196012311983031748	IV/a
19	I Nyoman Cakra, S.Ag	196006051991031002	IV/a
20	Ni Wayan Yasminiati,S.Pd.H	196103071986032001	IV/a
21	Ni Ketut Murtini, S.Ag	196106131983032006	IV/a
22	I Wayan Sudirka, S.Ag	196210021984031007	IV/a
23	I Gst. Ketut Rusadi, S.Ag	196204271988081000	IV/a
24	Ni Wayan Sandri, S.Pd.H	196302111984032003	IV/a
25	Ni Wayan Sukejati, S.Pd.H	196602151986032005	IV/a
26	Ni Made Sudarmiati, S. Ag	196431121986032090	IV/a
27	Ida Ayu Putu Sukerti, S.Pd.H	196502101988082001	IV/a
28	Nengah Martoyo, S.Pd.H	196901071988081001	IV/a
29	Ni Made Taman Sari, S.Pd.H	196412311988082002	IV/a
30	I Wayan Sunirsa,S.Pd.H	196512051988081001	IV/a
31	Kt. Murtini, S.Pd.H	196605051988082001	IV/a

32	I Made Muliartana, S.Pd.H	196309031988081001	IV/a
33	I Wayan Suladra, S.Ag	197001031990031005	IV/a
34	Ni Ketut Tarmi, S.Pd.H	196412121991032011	IV/a
35	I Made Muliadi, S.Pd.H	196712221992031004	IV/a
36	Nengah Suidiana, S.Ag	196309091993081001	IV/a
37	Ni Ny Sukeniti, S.Ag	196310041993122001	IV/a
38	Ni Wayan Sunari, S.Pd.H	196309091994122001	IV/a
39	Made Ratnawati, S.Ag	196703151996022001	IV/a
40	Ida Bagus Ariaka, S.Ag	196505272000031002	IV/a
41	Dewa Gede Raka Ananta, S.Ag	197603302000031001	IV/a
42	Ni Komang Sutarmini, S.Ag	196809212000032001	III/d
43	Sumini	196912252000032001	III/b
44	I Ketut Subawa, S.Pd.H	196401152000031001	III/d
45	Ni Ketut Sukarti, S.Pd.H	196606062006042029	III/c
46	Ni Wayan Nurtani, S.Ag	198311262006041006	III/c
47	SC. Rryananda Adhi, S.Ag	198212122006041016	III/c
48	I Nyoman Widastra, S.Ag.	198402262009021001	III/c
49	I Ketut Darma Wijaksana, S.Ag	198407112009021004	III/b
50	Endang Setiyawati, S.Ag	198507112011012009	III/c
51	Bawon Susanti, S.Ag	19670804200122002	III/c
52	Ni Ketut Sunarmi, S.Ag	197805022003122004	III/d
53	Mujianto, S.Pd.H	198301132005011002	III/c
54	Gusti Putu Adi, S.Pd.H	196507292005011003	III/c
55	Ni Wayan Ardani, S.Ag	196707222005012002	III/a
56	Ni Komang Arwiani, S.Pd.H	196801242006042003	III/c
57	Dewa Gede Nugraha, S.Pd.H	196303251994031001	III/d
58	Ida Komang Widana, S.Ag	196403102000031002	IV/a
59	Supardiyono, S.Ag	197403062002121002	IV/a
60	Nunung Prasetya, S.Ag	197010012003121001	III/d
61	Wy Warni, S.Pd.H	196510112005012001	III/c
62	Sukismanto, S.Pd.H	196910232005011003	III/d
63	Dewa Putu Alit Swastika, S.Ag, M.Si	196312311984031043	IV/a
64	I Wayan Sutapa, S.Ag	196512301988081001	IV/a
65	Yamini, S.Pd.H		IV/a
66	I Nyoman Dari, S.Pd.H	196412311988081002	IV/a
67	Ni Nyoman Madri, S.Ag		IV/a
68	I Ketut Wirate, S.Pd.H	196201201984031004	IV/a
69	I Ketut Arjana, S.H		IV/a
70	Kustimah, S.Ag	196607061988082001	IV/a
71	Ni Made Supartini, S.Pd.H		IV/a
72	Ida Ayu Artati, S.Ag	195705031979122003	IV/a
73	Ida Bgs Pt. Sudipta, S.Pd.H	196104241988081000	IV/a
74	Supriyono, S.Ag	196304151986031017	IV/a
75	Ni Wayan Sudiastika, S.Ag	196808221996022001	IV/a

76	I Ketut Rati, S.Pd.H	196410241996021000	IV/a
77	I Nengah Pageh, S.Ag	197808102006041011	III/c
78	Ni Ketut Manik Sumarni, S.Pd.H	198005142006042000	III/c
79	Ni Luh Putu Purwati Adiningsih, S.Ag	198206142006042014	III/b
80	Made Eni Marwasih, S.Pd.H	198708152010012002	III/b
81	Gusti Putu Susanto, S.Pd.H	198609152010011005	III/b
82	Eka Puji Susanti, S.Pd.H	198705042010012004	III/b
83	Ni Putu Yuli Wiraningsih, S.Ag	198607122011012006	III/b
84	Ni Nyoman Nistyawati, S.Ag	198408232011012018	III/c
85	Putu Dewi Riani, S.Pd.H	198701082011012019	III/b
86	Agus Sukratnaya, S.Pd.H	197708082009031006	III/b
87	Ketut Susilohadi, S.Pd.H	196605022014072001	II/a
88	I Ketut Sundra, S.Ag	196424122014071001	
89	Ni Made Nangun Kerti, S.Ag	196402182000032001	IV/a
90	Ni Ketut Suastiyari, S.Ag	196805172000032001	IV/a
91	Ni Made Suwiti, S.Ag	196612312000032011	III/d
92	Made Sumite, S.Ag	196404062000031002	IV/a
93	Ni Kadek Sukarni, S.Ag	196707212001122001	III/d
94	I Nyoman Nandra, S.Ag	196211211984031000	IV/a
95	I Gede Sudanta, S.Ag	198111292006041009	III/c
96	Ida Bagus Putu Satike, S.Ag	198102042006041010	III/c
97	Nengah Tuty Setiawaty, S.Ag	198310092009042007	III/c
98	I Wayan Sumaja, S.Ag	198105042010011004	III/c
99	Komang Sinten, S.Pd.H	198305142010011012	III/c
100	Ni Putu Suryaningsih, S.Ag	198507232010012007	III/c
101	Nengah Sumesari, S.Ag	198508052011012002	III/c
102	Made Suasta, S.Ag	198306152011011001	III/b
103	Eka Septiawati, S.Pd.H	198709022011012003	III/b
104	Ketut Sumiartiningsih, S.Ag	198410222011012001	III/b
105	Dra. Ni Wayan Prayawati, M.Si	150307946000000000	IV/a
106	Ni Wayan Titi Rahayu, S.Ag	196901122000032002	III/d
107	Ni Luh Gede Lestari, S.Ag	150330387000000000	III/c
108	Ni Wayan Sutamiasih, S.Ag	196310252000032001	IV/a
109	I Made Swaha, S.Pd.H	196710282000031002	IV/a
110	Dra. Ni Nengah Padma	196810032001122003	IV/a
111	Siluh KadeK Kartini, S.Ag	196701142003122001	III/d
112	Ni Wayan Sudiasih, S.Pd.H	196609172005022003	III/c
113	Harmini, S.Pd.H	197305052005012006	III/d
114	I Wayan Sumatra, S.Pd.H	196407181988081001	IV/a
115	Supomo, S.Pd.H	196601071998031001	III/d
116	I Komang Sudiadnyana, S.Ag	196012311983031196	IV/a
117	Ni Ketut Sunarti, S.Pd.H	196309241993032003	IV/a
118	Siluh Ketut Putri Karina, S.Pd.H	198706212011012015	III/b
119	I Gede Klipz Darmaja, S.Ag	198306142011011007	III/b

120	Ketut Wira Adnyana, S.Pd.H	198412172011011008	III/b
121	Ni Kadek Indra Yanti, S.Ag	198601232011012006	III/b
122	Kadek Sucandra, S.Pd.H	198612032011011006	III/b
123	I Wayan Supardi	196504102014071001	II/a
124	Sugiatun, S.Ag	196909212000122002	III/d
125	Dra. Sayu Nyoman Artini	196504142003122002	III/d
126	I Made Sutarja.S.Ag	196410251992031005	IV/a
127	Bibit Hariyadi, S.Ag	197908122006041024	III/c
128	D. Ngurah Verda Saskara,S.Ag.	198410202009021003	III/c
129	Nyoman Segara, S.Ag	198408162009021004	III/b
130	I Gede Widama Manuaba, S.Ag	197804042010011012	III/b
131	I Nyoman Ardana, S.Ag.	198406082010011011	III/b
132	Made Putra Yasa, S.Pd.H	198509192010011011	III/b
133	I Ketut Sudiana,S.Pd.H	198408252010011011	III/b
134	I Made Putra Susana, S.Ag	198305202010011013	III/b
135	I Komang Suteja, S.Pd.H	198703152011011011	III/b
136	Sista Dewi Wahyuningrum, S.Ag	198502072011012007	III/b
137	Sumaryo, S.Pd.H	198509232011011005	III/b
138	Wayan Wikha Windiastari, S.Pd.H	198605162011012008	III/b
139	I Gede Windia, S.Pd.H, MH	198408062011011007	III/b
140	Dedek Andika Panca Nugraha, S.Pd.H	198405022011011007	III/b
141	Nyoman Purna Wijaya, S.Ag	198103212014071001	III/a
142	Dwi Septiawan, S.Pd.H	199109092015031001	III/a
143	I Ngurah Alit Putra Wijaya,S.Ag	198307202011011005	III/a
144	Ketut Edi Darmawan, S.Ag	197710052009021003	III/c
145	Tina Susanti,S.Ag.M.Pd	198603082009022004	III/c
146	Ni Made Suratmi, S.Pd.H	198710312015022001	III/a
147	I Wayan Geden, S.Pd.H	196306031982031001	IV/a
148	Ketut Agus Adhyanto, S.Ag	198408282010011011	III/b
149	Sumiati, S.Ag	198608262010012001	III/b
150	Bariyati, S.Ag	198410242011012004	III/b
151	I Komang Arthasedana	19780405200501005	III/b
152	Ni Putu Murniasih, S.Ag	198205252011012008	III/b

Sumber : Data Kemenag tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah guru agama Hindu di Lampung sudah cukup banyak yaitu 152 orang guru yang terdiri dari Guru angkatan Kemenag 44 orang, Guru Angkatan Diknas/Pemda 109. Guru yang telah tersertifikasi 93 orang dan yang belum tersertifikasi 60 orang. Guru-guru tersebut terdiri dari Guru Pertama, Muda dan Madya.

Selain itu untuk menunjang pedidikan agama Hindu



di tingkat dasar, menengah dan atas diberikan di pasraman-pasraman yang ada di Lampung. Berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 terutama dalam pasal 12 ayat 4, pasal 30 ayat 5, dan pasal 37 ayat 3, maka Pemerintah RI telah menetapkan PP nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Kemudian kandungan isi PP nomor 55 tahun 2007 pada pasal 1 poin angka 5 dijelaskan bahwa "Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal". Pada Provinsi Lampung terdapat beberapa pasraman antara lain: Pasraman Pemangku Satya Dharma dan Pasraman Gayatri Balai Banjar Krama Loka untuk memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan agama Hindu di Lampung.

PHDI Provinsi Lampung

Bicara mengenai pendidikan dan pembinaan umat Hindu, tentunya tidak terlepas dari peran berbagai lembaga keagamaan yang secara konsisten berdedikasi untuk melayani umat. Ada beberapa macam seperti Parisada Hindu Dharma (PHDI), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Badan Penyiaran Hindu (BPH), LPH, Pinandita, Perhimpunan Pemuda Hindu Dharma (PERADAH) serta Kelompok Kerja Guru (KKG). Keberadaan Lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Lampung selama ini telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilakukan oleh PHDI salah satunya menggelar Lokasabha VIII, di Hotel Sahid, Bandar Lampung pada 5 Mei 2017. Lokasabha merupakan musyawarah daerah yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Lokasabha VIII PHDI Provinsi Lampung dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 19-20 Mei 2017. Peserta Lokasabha VIII PHDI Provinsi Lampung, secara aklamasi memilih I Ketut Pasek sebagai Ketua Pengurus Harian masa bakti 2017-2022. Ketut yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris menggantikan Nengah Maharta, yang dua periode memimpin PHDI dan umat Hindu Lampung. Lokasabha VIII PHDI Provinsi Lampung menghasilkan sejumlah rekomendasi kegiatan. Salah satunya, mendirikan sekolah berbasis agama bagi hampir 1 juta umat Hindu di Lampung. Payung hukum untuk itu telah ada

dan menunggu implementasinya. Targetnya di kepengurusan masa bakti 2017-2022 berdiri sekolah dasar Hindu (*Adi Widya Pastaman*), SMP (*Madyama Widya Paraman*), SMA (*Utama Widya Pasraman*), dan taman kanak-kanak (*Pratama Widya Pasraman*). <http://phdi.or.id/berita/lokasabha-viii-phdi-provinsi-Lampung>. Berikut ini adalah tabel daftar lembaga atau yayasan agama Hindu yang berada di Provinsi Lampung.

Tabel 4. Daftar Lembaga/ Yayasan Keagamaan Provinsi Lampung

No	Nama Lembaga Hindu	Alamat	Ketua
1	PHDI Provinsi Lampung	Jl. Mawar Indah No.2 Labuhan Dalam, Kedaton, Bandar Lampung	Drs. I Nengah Maharta, M.Si
2.	WHDI Provinsi Lampung	Jl. Mawar Indah No.2 Labuhan Dalam, Kedaton, Bandar Lampung	Dra. Ni Nyoman Dresti, M.Si
3.	BPH (Badan Penyiangan Hindu) Provinsi Lampung	Jl. Mawar Indah No.2 Labuhan Dalam, Kedaton, Bandar Lampung	Dr. I Gede Swibawa, MS
4.	LPH (Lembaga Pendidikan Hindu) Provinsi Lampung	Jl. Mawar Indah No.2 Labuhan Dalam, Kedaton, Bandar Lampung	Dr. I Gede Swibawa, MS
5.	Pinandita Sanggraha Nusantara Prov. Lampung	Jl. Mawar Indah No.2 Labuhan Dalam, Kedaton, Bandar Lampung	Pinandita Drs. I Dewa Made Raka, M.Si
6.	PERADAH Provinsi Lampung	Jl. Mawar Indah No.2 Labuhan Dalam, Kedaton, Bandar Lampung	Wayan Eko
7.	PERADAH Kab. Pringsewu	Jl. Kesehatan No.1855, Pringsewu	Dwi Marwanto, S.Pd.H
8.	PHDI Kota Bandar Lampung	Perum Bukit Kencana, Sukarame, Bandar Lampung	Putu Soeartha Adnyana, SH
9.	PHDI Kab. Lampung Selatan	Desa Sidowaluyo, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan	Made Sukintra, S.Pd
10	PHDI Lampung Tengah	Jl. Raya Pentas Tari Bali Seputih Rahman.Lampung Tengah	Ketut Nuryadi
11.	PHDI Kab. Lampung Timur	Jl. Raya Gedung Wani Pos Sukaraja-Metro 34195	Wayan Sutapa, S.Ag
12.	PHDI Kab. Lampung Utara	Jln.Bangau Lima Gg.Anggrek II No.19, Sukung Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan	Nyoman Sumnerthi, S.Pd.SD
13.	PHDI Kab. Lampung Barat	Jl. Raden Intan No.13, Way Mengaku, Liwa	Nengah Pu-trayana
14	PHDI Kab. Pesisir Barat	Jl. Lintas Barat, Marang Kec. Biha, Krui Pss. Barat	I Nyoman Setiawan

15.	PHDI Kab. Way Kanan	Desa Bali Sadhar Tengah, Kec. Banjit, Way Kanan	I Nyoman Krinu, SE
16.	PHDI Kab. Tulang Bawang	Jl. Lintas Timur, Cakat Raya, Menggala, Tulang Bawang	I Nyoman Sutawan, SE, MM
17.	PHDI Kab. Mesuji	Mesuji	I Made Sudarmaya
18.	PHDI Kab. Tulang Bawang Barat	Jl. Jendral Sudirman No. 150, Tirta Kencana RK.01/RT.02, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat	Narsono, S.Ag
19.	PHDI Kab. Pringsewu	Jl. Raya Pura kawitan, Ambarawa Barat, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, 35376	I Nyoman Desten
20.	PHDI Kota Metro	Jl. Palapa II 15A, Metro Kota	Drs. I Wayan Agus Subagyo
21.	PHDI Kab. Pesawaran	Desa Poncokresno, Kec. Negeri Katon, Pesawaran	Munaris
22.	PHDI Kab. Tanggamus	Jln. AMS N0.04 Sidorukun Pekon Kota Agung, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Eko Yuli Supiyanto, S.Pd.H
23.	Yayasan Bhuwana Ashram	Jl. Gatot Subroto Gg. Payakun I No.88, Bandar Lampung 35227	Drs. I Nengah Maharta, M.Si
24.	Yayasan Dharma Kerthi	Jl. Gatot Subroto Gg. Payakun II No.29, Bandar Lampung 35227	I Nengah Karma
25.	Yayasan Saraswati	Jl. Mawar Indah No.2 Labuhan Dalam, Kedaton, Bandar Lampung	Dr. I Gede Swibawa, MS
26.	Yayasan Aditya Dharma	Jl. Saraswati, Rama Gunawan 1, Kec. Seputih Raman, Lampung Tengah 34155	I Wayan Santra
27.	WHDI Prov.lampung	Jl. Cut Meutia No.27, Teluk Betung Bandar Lampung	I Nyoman Sudarsa, S.Ag.M.Si
28.	WHDI Kab. Lampung Tengah	Jl. Rasuna Said No. 2 Bandar Jaya, Lampung Tengah	Ni Wayan Desi Ermawati, SH
29.	WHDI Kec. Bahuga Way Kanan	Kec. Bahuga, Kab. Way Kanan	Ni Wayan Gandawati, S.Pd
30.	WHDI Kab. Way Kanan	Banjit, Kab. Way Kanan	Dra. Ni Nengah Padma, M.Pd.H
31.	KKG. Provinsi Lampung	Jl. Mawar Indah No.2 Labuan Dalam Bandar Lampung	I Wayan Sutapa, S.Ag. M.Pd.H
32.	MGMP Propinsi Lampung	Jl.Plamboyan3Rt08Kelurahan Labuhan Dalam,KecamatanTanjung senang	Komang Mustika, S.Ag.M.Pd.H

Sumber : Data Kemenag Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lembaga atau yayasan keagamaan Hindu di Lampung cukup lengkap dan berada di

hampir seluruh wilayah di Lampung sebagai wadah mendukung kegiatan keagamaan umat Hindu di Lampung.

Selain lembaga agama Hindu di Lampung yang lengkap, untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap umat Hindu juga disediakan tenaga Penyuluh Agama Hindu. Tenaga penyuluh merupakan ujung tombak serta perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan untuk peningkatan *sradha* dan *bhakti* bagi umat Hindu dengan keterbatasan. Untuk mendapatkan tenaga Penyuluh Agama Hindu non PNS, pada tahun 2017 dibuka lowongan sebanyak 65 orang untuk 15 kabupaten se provinsi Lampung. Berikut tabel nama Pembimas dan Penyuluh Agama Hindu yang ada di Lampung.

Tabel

Nama Pembimas dan Penyuluh Agama di Lampung Tahun 2017

1 PEMBIMAS			
	I Nyoman Sudiarsa, S.Ag, M.Si	196012311987031034	Pembimas Hindu
2 JFU			
	Braja Sugandi, S.Pd	196105151982031007	Pengembang Lembaga Keagamaan
	Dra. Ni Wayan Sarti	196412201998032001	Pengembang Program Pemberdayaan Umat
	Suparni, S.Ag	195911171980032005	Pengembang Potensi Umat
	Sulastri, S.Pd.H	198609092009122004	Penyusun Bahan Pembinaan
	Dewa Putu Suandiani, S.Pd.H	198510232009122002	Penyusun Bahan Pembinaan Umat
3 Penyelenggara			
	Eko Sudono, S.Ag	198303272009011006	Penyelenggara Lampung Barat
	Narsono, S.Ag	197609292003121003	Penyelenggara Pesisir Barat
6 Penyuluh			
	Drs. I Dewa Made Raka, M.Si	196212132000031023	Penyuluh Agama Hindu Prov. Lampung
	Mustakim, S.Ag	197506152005011003	Penyuluh Agama Hindu Prov. Lampung
	Eko Sri Wulan, S.Ag	198303272009011006	Penyuluh Agama Hindu Kab. Tulang Bawang
7 Pramubhakti			

	Ida Bagus Putu Mambal, S.Ag		Pramubhakti di Bimas Hindu
	Dwi Marwanto, S.Pd.H		Pramubhakti di Bimas Hindu

Penyuluh agama Hindu merupakan figur sentral dari gerakan Kepenyuluhan. Penyuluh agama Hindu merupakan *agent of change*, juga sebagai leader atau pemimpin, bahkan lebih dari itu, penyuluh agama Hindu adalah ujung tombak dalam memberikan pengertian dan pemahaman melalui pintu dan bahasa agama kepada masyarakat melalui pendekatan agama secara menyeluruh dan merata di masyarakat.

SIMPULAN

Dalam kehidupan umat Hindu di Lampung dapat disimpulkan bahwa umat Hindu asal Bali yang tinggal di Lampung sebagai penduduk pendatang mengalami dinamika dalam perkembangannya. Mereka dapat dikatakan berhasil bertahan dan berkembang di tanah perantauan. Latar belakang sebagai transmigran akibat bencana Gunung Agung yang meletus Tahun 1963 tidak membuat mereka patah semangat untuk bertahan hidup. Pada umumnya mata pencaharian penduduk pendatang bekerja di bidang pertanian, perkebunan, nelayan, buruh jasa, pegawai negeri, karyawan swasta, dengan distribusi pekerjaan yang beragam dan gerak sosialnya relatif dinamis. Kehidupan mereka tergolong berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk umat Hindu yang terus meningkat dari tahun ke tahun, bergitupula jumlah sarana peribadatan seperti pura yang merata diberbagai wilayah di Lampung. Dalam bidang pendidikan dengan didirikannya STAH Lampung sangat bermanfaat untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin belajar Pendidikan Agama Hindu, begitupula dengan jumlah guru PNS juga cukup untuk melayani siswa Hindu di sekolah-sekolah di Lampung. Masyarakat Lampung adalah masyarakat multikultur, sebab dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, umat Hindu di Lampung hidup dengan umat beragama lain serta suku lain yang ada di Lampung. Mereka hidup berdampingan dan berakulturasi dengan budaya setempat tanpa meninggalkan identitas budaya Bali yang mereka miliki sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhana, I Ketut dan Yekti Maunati. 2015. "The Revitalization of Local Culture in Indonesia in Coping with Globalization Process", Paper presented in the 22nd IFSSO (International Federation of Social Sciences Organization) General Conference, "Globalization: Social Scientific Approach towards Social Design for the Creation of a Multicultural Society", Seijo University, Tokyo-Japan, May 30-31.

Bracken, Gregory. ed. 2015. "Asian Cities: Colonial to Global", dalam New IIAS Publications, The Network 51, *the Newsletter*, no. 71, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Leushuis, Emile. 2014. *Panduan Jelajah Kota-kota Pusaka di Indonesia: Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Malang*. Jakarta: Badan Pelestarian Pusaka Indonesia.

Sjoberg, Gideon. 1965. *The Preindustrial City: Past and Present*. New York: The Free Press.

Staab, Christiane. 1997. *Balinesische Dorfgemeinschaften und ihre Bewertungen in der Literatur*. Passau-Jerman: Lehrstuhl für Südostasienkunde-Universität Passau.

Surpha, I Wayan. 2002. *Sekitar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Bali Post.

Sumber Internet

<http://phdi.or.id/berita/lokasabha-viii-phdi-provinsi Lampung>

<http://fkip.unila.ac.id/>

<http://www.stahLampung.ac.id/>

Andi Apriyadi, Wartawan Jejam.com <http://www.jejamo.com/ini-alasan-umat-hindu-di-labuhan-dalam-bandar-Lampung-mau-bantu-jaga-keamanan-salat-id.html>

https://Lampung.kemenag.go.id/files/Lampung/file/file/BimasHindu/Data_Rumah_Ibadah_Umat_Agama_Hindu_dan_Rohaniawan.pdf

LAMPIRAN FOTO
FOTO 1



BALE KULKUL PURA KERTHI BHUANA , BANDAR
LAMPUNG
Dokumen Milik Peneliti

FOTO 2



PURA KERTHI BHUANA
Dokumen Milik Peneliti

FOTO 3



PURA KERTHI BHUANA , BANDAR LAMPUNG
Dokumen Milik Peneliti

FOTO 4



WANTILAN PURA KERTHI BHUANA
DOK. MILIK PENULIS

DINAMIKA KOMUNITAS HINDU DI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

I Wayan Tegel Eddy
I Gusti Ketut Widana
Ni Made Frischa Aswarini

Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di bagian utara, provinsi Lampung di bagian selatan, provinsi Kepulauan Bangka Belitung di sisi timur, dan di bagian barat berbatasan dengan provinsi Bengkulu. Dengan luas wilayah 87.421,4 km², Sumatera Selatan terdiri dari 13 pemerintah kabupaten dan empat kotamadya yakni: Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, Banyuasin, OKU Selatan, OKU Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Musi Rawas, Musi Rawas Utara serta Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang sebagai ibukota provinsi.



Peta Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan adalah provinsi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dengan jumlah penduduk terpadat kedua setelah Lampung. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan tahun 2017, total jumlah penduduk di daerah ini adalah 8,27 juta jiwa (BPS, 2018). Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 mencapai 94,56 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 17 kabupaten/kota cukup bervariasi di mana penduduk terbanyak terdapat di Kota Palembang dengan kepadatan sebesar 4.462,99 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 32,15 jiwa/Km². Data BPS menunjukkan di tahun 2017, penduduk Sumatera Selatan terdiri atas 4.200.735 jiwa penduduk laki-laki dan 4.066.248 jiwa penduduk perempuan (BPS, 2018).

Ditinjau dari segi agama, penduduk Sumatera Selatan secara umum menganut salah satu dari lima agama besar di Indonesia (BPS, 2018). Berdasarkan data Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan yang dihimpun BPS, diketahui agama Buddha memiliki jumlah umat terkecil yakni 34.156 orang, diikuti agama Hindu dengan jumlah pemeluk sebesar 36. 894, umat Katholik sejumlah 62.292, Kristen 184.852 orang, dan sebagai mayoritas adalah umat Islam dengan total pemeluk 8.188.045 orang (Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan, 2017).

Sebagai catatan, khusus jumlah umat Hindu, ditemukan data yang berbeda antara publikasi yang dikeluarkan oleh BPS tersebut di atas dan data yang diperoleh dari Bimas Hindu, Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan. Bila sebelumnya disebutkan jumlah penganut Hindu di tahun 2017 adalah 36.894, data Bimas Hindu menunjukkan jumlah yang lebih tinggi yakni 73.479 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6: Jumlah Umat Agama Hindu Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Hindu	
		Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Palembang	331	1.397
2	Prabumulih	27	72
3	Lubuk Linggau	4	18

4	Pagar Alam	2	8
5	Lahat	10	55
6	Banyuasin	2.559	11.465
7	Musi Banyuasin	1.024	5.124
8	Musi Rawas	289	1.143
9	Musi Rawas Utara	255	755
10	Muara Enim	384	1.551
11	Ogan Ilir	4	17
12	OKI	3.827	17.143
13	OKU	829	3.353
14	OKU Selatan	1.115	4.990
15	OKU Timur	5.887	26.388
16	PALI	0	0
17	Empat Lawang	0	0
	JUMLAH	16.547	73.479

Sumber: Bimas Hindu Kanwil Agama Provinsi Sumatera Selatan

Terlepas dari hal tersebut, keberagaman penduduk Sumatera Selatan tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang wilayah ini yang dulu merupakan bagian dari kerajaan maritim bernama Sriwijaya. Menurut sejumlah peneliti, berabad lalu, daerah ini berada pada posisi strategis karena termasuk dalam jalur lalu lintas pelayaran perdagangan dunia via Selat Malaka. Wilayah Sumatera bagian Selatan kala itu menjadi salah satu tempat persinggahan para pelayar dan pedagang internasional untuk beristirahat dan mengisi ulang persediaan makanan dan minuman serta lokasi penimbunan barang (Abdullah, 1991).

A. Sejarah Kedatangan Hindu di Sumatera Selatan

Mulai abad ke-13 Sriwijaya ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Ekspansi ini hanya berlangsung sampai abad ke-14. Setelah Majapahit, wilayah Sumatera bagian Selatan dikuasai oleh Kesultanan Palembang sejak awal abad ke-15. Kekuasaan kemudian berganti di bawah naungan kolonialisme Barat lalu penjajahan Jepang. Seluruh interaksi tersebut di atas niscaya memunculkan kontak kebudayaan dengan orang-orang lintas bangsa yang secara langsung dan tidak ikut memengaruhi kultur setempat termasuk melalui penetrasi ajaran agama.

Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kerajaan maritim dan mampu

menguasai perdagangan di daerah Selat Malaka. Oddyen mengatakan bahwa setelah jalan pelayaran ke negeri Cina semakin dikenal dan dikembangkan, maka lokasi geografis pantai timur Sumatra dan pulau-pulau lepas pantainya semakin penting. Hal ini menjadi incaran penguasa setempat. Sriwijaya merupakan keatan pertama yang berhasil mendominasi wilayah yang memegang kunci perdagangan dan pelayaran itu. Seiring dengan pentingnya wilayah tersebut, maka penguasaan daerah pantai timur Sumatra telah mendorong Sriwijaya menjadi kekuatan maritime yang cukup disegani dan diperhitungkan dalam kancah penguasaan jalur maritim.

Jejak Sriwijaya merambah berbagai tempat terbukti dari persebaran prasasti-prasasti penanda keberadaan Sriwijaya ditemukan tersebar luas diberbagai wilayah Sumatra Selatan, Bangka, Jambi, Lampung, bahkan Thailand dan India Selatan. Tercatat kurang lebih enam belas prasasti tinggalan Kerajaan Sriwijaya yang tersebar luas di berbagai wilayah. Temuan prasasti terbanyak terdapat di wilayah Sumatra Selatan, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Telaga Batu, Talang Tuwo, Kota Kapur, Boom Baru ,prasasti emas Swarnapattra, Kambang Unglen, prasasti Siddhayatra dan prasasti Bukit Siguntang. Adanya sebaran prasasti tersebut membuktikan betapa luasnya kekuasaan Sriwijaya pada masa lalu.

Kecuali temuan prasasti di wilayah Sumatra Selatan juga ditemukan candi atau kompleks percandian dan benda-benda atribut keagamaan Buddha maupun Hindu yang berupa arca, stupika, tablet, dan manik-manik, serta temuan komoditas dagang berupa keramik. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bahari yang Berjaya hingga ke Asia Tenggara. Situs-situs masa Kerajaan Sriwijaya banyak ditemukan di wilayah Sumatra Selatan, selain juga berbagai bentuk artefak, ekofak dan fitur. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya pada umumnya ditulis dalam huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu Kuno, dan prasasti-prasasti ini berisi tentang peringatan, kutukan, sumpah serta keagamaan.

Sebagian besar tinggalan Kerajaan Sriwijaya bersifat agama Buddha, namun juga terdapat situs yang memiliki latar

keagamaan Hindu. Situs percandian Bumiayu merupakan situs tinggalan Sriwijaya yang bercorak Hindu dan mempunyai luas sekitar 15 ha terdiri atas 11 gundukan tanah. Beberapa di antaranya telah dibuka dan berhasil ditampakkan bangunan yang terbuat dari batu bata. Diantara reruntuhan bangunan candi itu ditemukan beberapa arca seperti Agastya, Siwa Mahadewa, dan arca Stambha. Dari informasi prasasti dan hasil penelitian arkeologis membuktikan bahwa Dapuntahyang sudah memikirkan penataan lingkungan kotanya, dimana rakyat tinggal di tepian sungai pada rumah kolong atau rumah rakit, para pejabat kerajaan tinggal di darat, bangunan suci ditempatkan di daerah yang tinggi, dan taman kota ditempatkan di hulu sungai yang bermuara di kota kerajaan. Semua itu mengambil lokasi di sebelah utara sungai Musi, sedangkan di sebelah selatannya masih merupakan rawa-rawa dangkal.

Pelajaran lain yang dapat dipetik dari Sriwijaya adalah rasa toleransi dalam kehidupan beragama. Sebuah bukti arkeologis dalam bentuk arca batu menggambarkan toleransi tersebut. Arca Bodhisattwa Awalokiteswara yang ditemukan di situs Bingin Jungut pada bagian punggungnya terdapat kata: "Dang Accaryya Syuta". Dang Accaryya adalah gelar seorang pendeta Hindu, Syuta adalah nama sang pendeta, dan Bodhisattwa Awalokiteswara adalah arca yang dipuja oleh penganut ajaran Buddha Mahayana. Ini artinya, seorang pendeta Hindu memberikan persembahan atau hadiah kepada masyarakat pemeluk ajaran Buddha Mahayana.

Dalam kehidupan keagamaan, sebuah surat menyurat antara seorang maharaja Sriwijaya yang tidak disebutkan namanya, menyebutkan pemberian hadiah kepada Khalifah Umar bin Abdul Azis, dan sekaligus mohon dikirim mubaligh untuk mengajarkan agama Islam di Sriwijaya. Ini artinya meskipun di Kerajaan Sriwijaya sebagian besar masyarakatnya memeluk ajaran Buddha Mahayana, namun agama dan ajaran lain diberi kesempatan berkembang. Boleh jadi sekitar abad ke-9-10 agama Islam sudah ada di Kerajaan Sriwijaya sejalan dengan majunya intensitas perdagangan dengan Persia. Berita asing lainnya juga menyebutkan adanya bangunan Gereja Nestorian di

daerah Barus.

Hal lain yang dapat diteladani dari Kerajaan Sriwijaya adalah kedaulatan di laut. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, para saudagar asing yang datang darimanapun, baik dari Tiongkok, India atau Persia, kalau berdagang di wilayah Sriwijaya harus menggunakan kapal Sriwijaya. Barang-barang dagangan yang diperdagangkan di kota Sriwijaya, sebelum dijual kedaerah lain di wilayah kedaulatan Sriwijaya, harus dipindahkan ke kapal Sriwijaya. Ciri dari kapal Sriwijaya adalah dibuat dengan teknik “papan-ikat dan kupingan-pengikat”. Bukti arkeologis ditemukan di dasar perairan Nusantara, sebuah yang dibuat dengan teknik “papan-ikat dan kupingan-pengikat” msarat dengan muatan yang berasal dari berbagai bangsa, seperti keramik Tiongkok, kaca Persia, dan arca India. Ini artinya bahwa kapal-kapal yang berlalu-lalang di perairan sebelah barat Nusantara setidaknya di wilayah kedaulatan Sriwijaya adalah kapal yang berbendera Sriwijaya.

Seiring pesatnya perkambagan agama Buddha di Sriwijaya berkembang juga agama Hindu. Sejak abad ke-6 M agama Hindu sudah muncul dan berkembang di kota Kapur, Bangka yang kemudian menyebar ke Palembang. Agama Hindu menalami kejayaan di daerah pedalaman. Hal ini terbukti dengan ditemukannya kompleks permandian Bumiayu yang berkronologi dari abad ke-9-13 M. Selain di Bumiayu agama Hindu juga menyebar ke Teluk Kijing yang diperkirakan pada abad ke-8 M, Lesung Batu dan Musi Rawas sekitar abad ke-9-10 M.

Dinamika agama Hindu di Sumatera Selatan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan berpusat di Bukit Siguntang (Kota Palembang). Jejak kerajaan ini dibuktikan oleh adanya berbagai temuan berupa artefak, situs, fitur dan ekofak. Selain itu keberadaan kerajaan ini ditunjukkan melalui enam belas prasasti yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara di antaranya Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka, hingga prasasti di negara Thailand dan India bagian Selatan. Secara umum, prasasti paling banyak ditemukan di wilayah Sumatera Selatan, seperti Prasasti Telaga Batu, Kedukan Bukit, Kota Kapur, Boom Baru, Talang Tuwo,

Prasasti Swarnapattra, Kambang Unglen, Bukit Siguntang dan Prasasti Siddhayatra. Seluruh temuan ini umumnya menegaskan luasnya wilayah kekuasaan Sriwijaya berikut budaya yang menyertai keberadaan kerajaan ini. Kultur Sriwijaya cenderung bercorak agama Buddha. Kerajaan maritim ini dipengaruhi oleh peradaban India dan Tiongkok. Pada akhir abad ke-7 ibukota Sriwijaya yakni Bukit Siguntang (Palembang) ditengarai menjadi salah satu tempat utama untuk mempelajari agama Buddha di kawasan Asia Tenggara.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan agama Buddha di Sriwijaya, ajaran agama Hindu perlahan mulai dikenal dan menyebar di wilayah kerajaan. Sebelum muncul di Sriwijaya atau kini kawasan Kota Palembang, agama Hindu berkembang terlebih dahulu di Kota Kapur, Bangka. Beberapa tinggalan kebudayaan Hindu di Sumatera Selatan yang masih ada hingga saat ini adalah kompleks percdandian Bumiayu yang terletak di Kabupaten Muara Enim. Temuan ini menunjukkan agama Hindu pernah mencapai kejayaan khususnya di kawasan pedalaman Sumatera Selatan. Agama Hindu diperkirakan juga menyebar hingga ke wilayah Lesung Batu dan Musi Rawas pada abad 9 hingga 10 Masehi. Sebelumnya, pada abad ke-8 Masehi, kepercayaan ini telah melingkupi daerah Teluk Kijing (Sulistyaningsih, 2017). Jumlah umat Hindu semakin berkurang setelah masuknya agama Islam di Sumatera Selatan.

Berabad setelahnya, umat Hindu di daerah tersebut mulai bertambah pasca dilaksanakannya program transmigrasi yang memberangkatkan sebagian masyarakat dari Pulau Bali ke kabupaten-kabupaten di Sumatera Selatan. Secara umum, program transmigrasi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan daerah terutama mempercepat pembangunan di kawasan tertinggal atau yang masih terisolir serta untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa (Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, 2015). Menurut Patrice Levang, propaganda transmigrasi oleh pemerintah memiliki ambisi mewujudkan kebijakan sosial dengan menolong rakyat miskin di Indonesia; serta mendorong kebijakan pembangunan yakni dengan mengolah lahan-lahan

luas yang belum terjamah. Sementara tujuan sampingannya adalah melakukan integrasi suku di Indonesia sehingga diharapkan dapat merekatkan persatuan dan kesatuan (Levang, 2003).

Transmigrasi dari Bali berlangsung pertama kali sekitar tahun 1958 dengan dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah memberikan lahan kepada transmigran di Desa Nusa Raya, Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Pemerintah mengimbuu agar lahan tersebut dapat diolah menjadi lahan produktif. Namun, kondisi lahan tersebut masih banyak yang ditumbuhi tanaman liar sehingga harus dibersihkan sendiri oleh transmigran. Menghadapi kondisi baru di tanah rantauan, terlebih masih ada beberapa daerah transmigran dengan medan tidak datar (naik-turun), beberapa transmigran tidak sanggup tinggal lebih lama. Mereka yang tidak mampu beradaptasi, memutuskan untuk kembali ke Bali. Sebagian lainnya tetap di daerah tersebut, ada juga yang pindah ke daerah lain dengan permukaan tanah yang lebih datar sehingga lebih mudah untuk membuka lahan persawahan.

Setelah itu transmigrasi bergulir kembali pada tahun 1963. Transmigrasi Nusa Bali ini dilatarbelakangi oleh bencana Gunung Agung di Bali. Masyarakat pergi ke Sumatera Selatan dengan harapan dapat memulai kehidupan baru dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Tahun 1980, transmigrasi kembali diadakan dengan membuka lahan di Kabupaten Banyuasin dan Desa Bangun Sari di Kabupaten Musi Rawas. Kemudian tahun 1990-an pemerintah mengadakan transmigrasi dari Bali ke Jiwa Baru, Kabupaten Muara Enim. Keseluruhan transmigrasi ini membawa gelombang baru perpindahan masyarakat beragama Hindu ke Sumatera Selatan yang kemudian terus berkembang hingga saat ini. Selain transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat Bali juga banyak yang merantau ke Sumatera Selatan secara mandiri maupun karena pindah tugas atau utusan dinas

B. Keberadaan Umat dan Budaya Hindu Kini

Selama tahun-tahun awal para transmigran asal Bali

menetap di Sumatera Selatan, mereka tetap berupaya melakukan persembahyangan sebagaimana kebiasaan di kampung halaman. Namun, karena kondisi ekonomi yang belum stabil, umat umumnya mendirikan sanggah Turus Lumbang yang terbuat dari kayu atau bambu. Sanggah sederhana ini bersifat sementara. Setelah beberapa tahun, kondisi finansial warga semakin membaik, sanggah ini perlahan digantikan dengan bangunan yang permanen yakni menggunakan beton. Demikian pula di wilayah desa secara bertahap mulai dibangun Pura Kahyangan Tunggal maupun Pura Kahyangan Tiga. Umumnya bersamaan dengan itu atau setelah itu, umat juga menentukan area sebagai *setra* atau kuburan.

Sebagai contoh, kita dapat bercermin dari kehidupan di salah satu daerah tujuan transmigrasi di Sumatera Selatan, yakni Desa Sumber Jaya. Pada masa-masa awal menempati desa ini, umat Hindu asal Bali yang bermukim di Sumber Jaya baru memiliki Turus Lumbang. Menurut penuturan Gusti Putu Armawan (43), Ketua PHDI Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur periode 2015-2020, penggunaan Turus Lumbang ini berlangsung sejak 1958 sampai 1966. Setelah kondisi keuangan umat cukup stabil, umat perlahan-lahan membangun Pura Kahyangan Tiga di mana Pura Desa dan Pura Puseh digabung menjadi satu sementara Pura Dalem dipisah dan dibangun dekat *setra*. Setelah itu, warga mulai mendirikan *bale banjar*. Pembangunan dan renovasi dilakukan setiap Purnama Kapat. Sumber Jaya kemudian memiliki gong yang merupakan bantuan dari luar. Gong ini diperuntukkan bagi desa Sumber Jaya dan Belitang II. Menurut Gusti, wilayah ini cenderung “Bali sentris”. Artinya, semua hal yang ada di Bali diterapkan juga di Sumber Jaya. Di sini ada desa adat, pura, dan *awig-awig* sebagai pemersatu umat atau *krama*. Masyarakat kemudian berkembang dan akhirnya terbentuk banjar-banjar baru antara lain Banjar Kelod, Banjar Tengah dan Banjar Kaja.

Uniknya, di kecamatan Belitang II terdapat beberapa desa adat antara lain tujuh desa adat Hindu, enam desa adat Hindu Bali, dan satu desa adat Hindu Jawa. Setiap menjelang Nyepi, warga melaksanakan *melasti* bersama. Umat juga membuat

pawai *ogoh-ogoh* di kecamatan dengan anggota kepanitiaan yang digilir. Pawai biasanya terkonsentrasi di satu titik dan mengundang camat, kepala desa, ketua adat, bupati dan polsek untuk menyaksikan arak-arakan *ogoh-ogoh*. Gusti menekankan pawai ini adalah cerminan budaya dan ritual yang tetap terjaga. Kegiatan ini untuk menunjukkan bahwa mereka ada, eksistensi umat Hindu dan perayaannya diakui, bahwa mereka adalah satu kesatuan umat yang solid. Setelah pawai di satu titik, *ogoh-ogoh* kemudian diarak ke desa masing-masing lalu dibakar.

Gusti mengaku di wilayahnya tidak pernah terjadi gesekan atau konflik antar warga. Setiap dua minggu sekali diadakan pesantian, seminggu sekali persembahyangan bersama yang diadakan di rumah-rumah warga. Tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu agama sekaligus menjaga kebersamaan. Kunjungan ini juga dilakukan ke desa adat Hindu Jawa. Mereka biasanya mengumandangkan mantra Tri Sandhya dan Pitra Puja namun dengan langgam gending Jawa. Umat Hindu Jawa juga memiliki ritual persembahan alam (*isin gumi*), mempunyai Pura Kahyangan Tunggal dengan ukiran Jawa.

Sebagai perbandingan untuk mengetahui upaya umat Hindu memulai kehidupan sosial dan beragama di tanah rantauan, dapat pula dicermati kisah umat Hindu transmigran asal Bali yang datang ke Kabupaten Banyuasin berpuluh tahun lalu. Catatan berikut ini diperoleh dari wawancara dengan Putu Sirpa, Ketua PHDI Kabupaten Banyuasin. Pada bulan Oktober 1980, Putu Sirpa dan keluarganya bersama sekitar 50 KK dari Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali mengikuti transmigrasi ke Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. November tahun itu, mereka tiba di daerah tujuan yang telah ditentukan pemerintah, yakni Unit Pemukiman Transmigrasi Jalur 17 Telang II, Kecamatan Banyuasin II. Wilayah itu kini berganti nama menjadi Kecamatan Tanjung Agung karena adanya pemekaran kecamatan.

Dua tahun setelahnya, pada 1982, sekitar 10 KK memutuskan pindah. Ada yang pulang ke Bali ada pula yang pergi ke Lampung dan daerah lainnya karena tidak tahan oleh banyaknya nyamuk dan penyakit muntaber. Kala itu, tersisa sekitar 40 KK. Namun,

lambat laun, dari tahun 1985 sampai 1990an, bertambah hingga 80 KK. Pertambahan penduduk ini disebabkan oleh adanya transmigrasi swakarsa. Mereka datang untuk mencari lahan untuk menanam padi. Jumlah penduduk kemudian meningkat signifikan di tahun 1996.

Dalam perjalanan hidupnya, Putu sempat pulang ke Bali untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, tepatnya di IKIP PGRI Denpasar tahun 1994. Setelah lulus, ia bekerja, namun tidak mendapat penghasilan yang cukup. Karenanya ia mengikuti program transmigrasi dan kembali lagi ke Sumatera Selatan. Kali itu, ia ditempatkan di Kabupaten OKI. Tahun 1997, ia diangkat menjadi guru honorer di SMP 2 di daerah Tanjung Agung. Ia memutuskan untuk pindah dan menghibahkan tanah jatah transmigrasinya di OKI untuk seorang anak yatim piatu. Tahun 2006 Putu diangkat menjadi guru PNS. Selain sebagai pendidik, Putu juga pengusaha dan mengelola perkebunan karet seluas 4 hektar, kebun sawit 4 hektar dan sawah yang ditanami padi seluas 2 hektar.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi masyarakat transmigran, bertumbuh pula perhatian terhadap keagamaan beserta ritualnya secara lebih serius. Awalnya tahun 1982, sudah didirikan *Padmasana* yang diperuntukkan sebagai *Kahyangan Tiga*. Secara bertahap dilakukan renovasi hingga akhirnya *Kahyangan Tiga* selesai tahun 2015. Selain itu, warga juga sudah memiliki *Bale Banjar*. Hanya *Bale Kulkul* yang belum didirikan. Dari keterangan Putu, infrastruktur Hindu di desanya sudah dirasa lengkap pada tahun 2015. Masyarakat desa Bangun Sari juga memiliki *laba pura* yang terdiri dari kebun kelapa sawit 2 hektar, kebun karet 2 hektar, sawah 2 hektar. Desa juga menyediakan 2 hektar lahan yang diperuntukkan bagi dua orang *pamangku* desa. Ke depan, warga berencana melakukan beberapa renovasi minor untuk bangunan pura maupun *bale banjar* yang mulai rapuh.

Secara sosial, warga masih kerap melakukan gotongroyong. Misalnya saja untuk *ngayah* setiap minggu membersihkan pura, ketika odalan, maupun jika ada warga yang sedang mendirikan rumah dan memerlukan bantuan tenaga. Tidak sulit untuk mengumpulkan warga. Setiap bulan mereka bertemu untuk

mengadakan rapat, tepatnya saat Manis Tumpek. Mereka membahas tentang odalan, *ngayah*, dan sebagainya. Umat Hindu di Desa Bangun Sari hidup dalam satu kompleks pemukiman yang homogen. Menurut Putu, hal ini menyebabkan hampir tidak pernah terjadi gesekan antara umat Hindu dengan umat lainnya.

Ayah Putu (almarhum), Wayan Suarna, termasuk orang yang dituakan atau dihormati oleh masyarakat. Ia adalah kepala rombongan transmigran kala itu. Ada sekian perubahan atau kompromi yang diajukan oleh ayahnya, kemudian dilanjutkan oleh Putu, untuk membantu umat Hindu di wilayah Banyu Sari. Misalnya saja, mengubah odalan yang biasanya (kalau di Bali) diadakan enam bulan sekali, menjadi hanya satu kali dalam setahun, karena masyarakat merasa kewalahan secara finansial, tenaga dan waktu. Upacara sedapat mungkin diadakan secara sederhana. Bahkan odalan selesai hanya dalam satu hari. Umat pun tidak pernah mengeluarkan banyak uang untuk iuran. Mereka *meyadnya* mulai dari Rp 10.000 sampai maksimal Rp 25.000 untuk setiap odalan.

Putu dan istrinya mencoba memberi teladan bagi umat lainnya. Sebagai contoh, dulu para ibu terbiasa membuat *pajegan* atau *gebogan* yang tinggi dengan beraneka kue dan buah. Putu menyayangkan hal ini karena menurut amatannya, banyak makanan tersebut yang akhirnya tidak dimakan, namun proses pembuatannya sendiri memakan banyak waktu dan uang. Istri Putu kemudian mencoba memberi contoh dengan hanya membawa banten dan persembahan seadanya dalam wadah *sok asi*. Hal ini kemudian diikuti oleh para Ibu lainnya.

Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri masih ada warga yang memegang prinsip "*mula keto*" yang ingin mempertahankan misalnya saja penggunaan upakara yang dipandang "lebih pantas" namun bagi Putu pilihan tersebut masih bisa disederhanakan tanpa menghilangkan maknanya. Ia khawatir, segala macam upakara ini justru berpotensi menyusahkan generasi mendatang. Lambat laun setelah berkomunikasi dengan warga tersebut, kini sudah ada kompromi terkait upakara, walau usulan penyederhanaan belum diterima secara menyeluruh. Bagi

Putu, dinamika ini adalah hal wajar karena mengubah persepsi tentulah membutuhkan proses yang tidak instan.

Upacara Keagamaan

Pada tahun 2017, tepatnya Selasa, 11 April 2017, Purnama Kadasa Anggara Umanis Wuku Kuningan, umat Hindu di Sumatera Selatan menggelar upacara Panca Wali Krama pertama di daerahnya. Upacara yang diselenggarakan di Pura Agung Sriwijaya, Palembang, ini bertujuan untuk menyucikan bumi dan alam, menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar sesama manusia. Sejak beberapa bulan sebelumnya, tepatnya mulai Januari 2017, umat dari seluruh kabupaten di Sumatera Selatan datang untuk *ngayah* mempersiapkan berbagai sarana upacara. Selain itu, krama Hindu di seluruh Sumatera Selatan dikenakan papeson atau iuran sebesar Rp 100.000 untuk mendukung persiapan dan penyelenggaraan karya besar ini.

Karya tersebut dipuput oleh setidaknya sepuluh sulinggih termasuk mendatangkan sulinggih dari Tabanan, Bali. Ketua PHDI Provinsi Sumatera Selatan, I Gusti Bagus Surya Negara, menyampaikan bahwa umat Hindu di seluruh Indonesia diundang untuk datang dan bersembahyang bersama. Prosesi upacara dihadiri oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. I Ketut Widnya dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ishak Mekki.

Upacara ini menurut sejumlah media ditengarai sebagai tawur Panca Wali Krama terbesar yang diadakan di luar Pulau Bali. Kendati menyandang gelar demikian dan memiliki tujuan mulia, penyelenggara Panca Wali Krama ini tidak terlepas dari kritik yang berasal dari umat Hindu di Sumatera Selatan. Salah satu yang cukup vokal menyuarakan kritik adalah Ketua PHDI Kabupaten OKI, I Gusti Agung Santosa. Ia menilai bahwa upacara ini tidak terlalu mendesak untuk diadakan dan menghabiskan banyak biaya. Bagi Agung, upacara ini tidak menjadi contoh bagi umat di tanah rantauan yang selama ini berupaya menyederhanakan upacara dan upacara. Bagi Agung dan sebagian umat lain, seberapa kompleks dan mewah banten

dan ritual tidak mengubah esensi dan makna dari upacara tersebut. Kesederhanaan dengan demikian ditonjolkan sehingga umat yang merantau tidak perlu takut jika tidak bisa mengadakan upacara besar karena keterbatasan biaya.

Walau demikian, Agung mengaku tetap menjalankan kesepakatan bersama bahwa ia sebagai Ketua PHDI OKI tetap bertugas mengumpulkan iuran dari umat di wilayahnya. Dalam prosesnya, Agung menyatakan tidak sulit untuk meminta sumbangan dari umat. Uang senilai Rp 100.000 dengan cepat terkumpul. Namun, di sisi lain, ia mengkritik, bila iuran ditujukan untuk kegiatan sosial atau iuran organisasi, umat di wilayahnya kebanyakan menunda-nunda untuk memberikan sumbangan dan bahkan tidak semua membayar kendati jumlahnya jauh di bawah seratus ribu rupiah. Dengan kata lain, masih banyak umat yang sangat mudah mengeluarkan uang untuk keperluan upacara, tetapi susah menyumbang untuk *menyama braya* atau kegiatan sosial.

Tata cara pernikahan umat Hindu di Sumatera Selatan secara umum tidak berbeda dengan pelaksanaan *pawiwahan* di Bali. Walau demikian, dalam pemilihan pasangan tidak selalu mengutamakan "*wangsa*" atau "*kasta*". Pernikahan beda agama sering terjadi di kalangan umat Hindu. Beberapa diantaranya menikahi istri non Hindu yang kemudian beralih agamanya menjadi Hindu. Terdapat pula sebagian umat yang melakukan *paid bangkung*. Ungkapan ini menyiratkan umat Hindu laki-laki yang memutuskan mengikuti agama istrinya yang bukan Hindu. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pihak, seringkali muncul respon yang menunjukkan keprihatinan akan fenomena *paid bangkung* tersebut. Mereka berharap agar umat dapat tetap menjaga dan meneruskan agama Hindu di rantauan walaupun tergolong minoritas. Menurut narasumber, salah satu alasan konversi agama ini ialah adanya perspektif bahwa dengan menjadi bagian dari agama mayoritas dapat mempermudah akses terhadap berbagai hal termasuk membuka kesempatan karir atau pekerjaan tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan Pembimas Hindu Kanwil Agama Provinsi Sumatera Selatan, Drs. Ketut Gede Riasa Astawa,

diperoleh informasi bahwa masyarakat Sumatera Selatan sudah mandiri dalam hal pelaksanaan Pitra Yadnya. Upacara *pengabenan* atau kremasi dapat dilakukan tanpa harus kembali ke Bali sebagaimana dulu sempat marak terjadi. Riasa menjelaskan, dulu masih banyak warga yang ketika harus menyelenggarakan Pitra Yadnya harus pulang ke Bali karena kurangnya sarana dan prasarana di daerahnya. Saat ini, di berbagai desa di kabupaten/kota di Sumatera Selatan telah memiliki *setra* atau kuburan dan fasilitas krematorium. Sebelum ada *setra*, tidak jarang jenazah umat Hindu dikuburkan di pemakaman umat Islam.

Kahyangan/Pura di Sumatera Selatan

Guna terus menjaga sekaligus menguatkan *sradha bhaktinya*, meskipun berada di luar daerah, tepatnya di daerah Sumatera Selatan, masyarakat transmigrasi Bali tetap menghadirkan identitas keagamaannya dengan mendirikan tempat suci atau Pura/Kahyangan dengan berbagai status dan fungsinya, mulai dari Sanggah/Merajan, Kawitan hingga kahyangan umum. Hal yang menarik sebagai bentuk dinamika perkembangan kehidupan keagamaan masyarakat Bali di daerah transmigrasi, sekaligus sebagai respon terhadap situasi dan kondisi yang dirasakan semakin “memberatkan” adalah munculnya fenomena pendirian Kahyangan Tunggal, tidak lagi Kahyangan Tiga.

Keberadaan Pura/Kahyangan ini, selain sebagai tempat suci pemujaan atau persembahyangan untuk mendekatkan diri terhadap Ida Sanghyang Widhi, dan atau Ida Bhatara-Bhatari Kawitan juga sekaligus sebagai media bertemunya umat dengan latar belakang berbeda (asal, soroh, wangsa, pendidikan, pekerjaan dll) agar tetap terjaga dan terjalin rasa pesukadukan (*menyama brayal/pasemetonan*) sebagai sesama orang Bali di daerah perantauan yang wajib hukumnya untuk selalu bersatu, sekaligus menjaga identitas etnik Bali yang terkenal hidup rukun dan cinta damai.

Selain keberadaan Pura/Kahyangan, guna memberikan pelayanan kepada umat dalam kaitan dengan penyelenggaraan upacara/upakara yadnya, di masyarakat Hindu Provinsi Sumatera Selatan juga telah memiliki Pandita, Pinandita serta

Serati, sebagaimana tertera pada tabel 7 berikut :

Tabel 7: Jumlah Pura/Kahyangan di Provinsi Sumatera Selatan
Bimas Hindu Kanwil Agama Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kab/ Kota	Jenis Kahyangan/Pura				Rohaniawan & Serati		
		K. Tiga	K. Tung-gal	Praja-pati	Kawi-tan	Pan-dita	Pina-dita	Serati
1	Palembang	-	1	1	-	-	3	2
2	Prabumulih	-	1	1	-	-	2	3
3	Lubuk Linggau	-	-	-	-	-	-	-
4	Pagar Alam	-	-	-	-	-	-	-
5	Lahat	-	1	1	-	-	-	-
6	Banyuasin	16	6	6	4	-	30	18
7	Musi Banyuasin	6	12	12	11	-	22	19
8	Musi Rawas	-	11	11	5	-	22	14
9	Musi Rawas Utara	-	3	3	1	-	8	10
10	Muara Enim	3	3	3	1	-	8	15
11	Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-
12	OKI	43	15	15	10	-	71	61
13	OKU	15	3	3	13	1	20	22
14	OKU Selatan	-	11	11	-	-	13	12
15	OKU Timur	56	11	11	152	2	110	118
16	PALI	-	-	-	-	-	-	-
17	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	139	78	78	197	3	309	294

Dari data di atas, diketahui bahwa untuk provinsi seluas Sumatera Selatan hanya memiliki tiga orang sulinggih yang bisa memberikan pelayanan kepada umat dalam penyelenggaraan upacara/upakara yadnya di tingkat madya atau utama. Untuk itu, ke depan peningkatan jumlah dan pengangkatan sulinggih masih sangat diperlukan.

C. Pendidikan Hindu

Ketersediaan guru agama Hindu menjadi suatu masalah serius di Sumatera Selatan karena setelah bertahun-tahun Bupati di sejumlah kabupaten tidak mengumumkan formasi guru agama Hindu. Pembimas berupaya mencari jalan tengah atas situasi ini dengan mengadakan seleksi penyuluh agama Hindu yang kemudian berperan sebagai guru di sekolah maupun di pasraman. Berdasarkan data tahun 2018 yang diperoleh dari

Bimas Hindu Kementerian Agama Sumatera Selatan, diketahui bahwa kota Palembang dan sebagian besar kabupaten di provinsi ini tidak memiliki guru PNS dan non PNS di semua jenjang pendidikan. Kabupaten Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Lahat, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, OKU Selatan, Pali, Empat Lawang, dan Kota Palembang tercatat tidak mempunyai guru PNS maupun non PNS baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas.

Sementara itu, Kabupaten Banyuasin tercatat hanya memiliki 1 orang guru PNS dan 1 orang guru non PNS masing-masing di tingkat SD dan keduanya belum tersertifikasi. Terdapat 3 orang guru SD PNS tersertifikasi dan 1 orang guru SMA non PNS belum tersertifikasi di Kabupaten Musi Rawas. Sementara itu, Musi Rawas Utara hanya memiliki 1 orang guru SD PNS tersertifikasi. Muara Enim tercatat mempunyai 3 guru PNS untuk SMP, SMA dan khusus SD belum tersertifikasi serta 3 orang guru SD non PNS belum tersertifikasi. Untuk Kabupaten OKI, OKU, OKU Timur, terdata paling banyak memiliki guru agama Hindu. Jumlah paling besar ada di Kabupaten OKU Timur yakni 10 guru SD dan 2 guru SMP, masing-masing berstatus PNS dan memiliki sertifikat kompetensi. Sementara untuk guru PNS tidak bersertifikat, terdapat 1 guru SMP dan 2 guru SMA. Jumlah guru non PNS belum tersertifikasi di kabupaten OKU Timur juga cukup banyak dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Selatan, yakni 9 guru SD dan 4 guru SMP.

Total jumlah guru agama Hindu menurut data tersebut adalah 59 orang. Angka yang sangat kecil untuk pulau sebesar Sumatera Selatan dengan 17 kabupaten/kota. Sebagian besar guru-guru tersebut harus mengajar lebih dari 50 murid, tak sedikit di antaranya yang bertanggungjawab atas ratusan murid. Perlu menjadi catatan, sebagian dari guru tersebut akan segera pensiun dari tugasnya. Selain yang tercatat, memang ada penyuluh agama Hindu yang menjadi tenaga pendidik di sekolah maupun pasraman namun secara profesional mereka belum berprestasi layak.

Tabel 8: Sebaran Guru Agama Hindu Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kab/ Kota	Guru PNS						Guru Non PNS					
		Sertifikasi			Belum			Sertifikasi			Belum		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1	Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Prabumulih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lubuk Linggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pagar Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lahat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Banyuasin	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
7	Musi Banyuasin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Musi Rawas	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Musi Rawas Utara	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Muara Enim	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-
11	Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	OKI	5	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
13	OKU	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
14	OKU Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	OKU Timur	10	2	-	-	1	2	-	-	-	9	4	-
16	PALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		20	4	1	5	1	2	-	-	-	17	5	4

Sumber : Bimas Hindu Kanwil Agama Provinsi Sumatera Selatan

Pasraman dan TK/PAUD

Menyadari terbatasnya akses pendidikan agama Hindu di sekolah formal, umat Hindu di Sumatera Selatan serta PHDI berinisiatif untuk mendirikan pasraman di daerahnya masing-masing. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Keagamaan Hindu Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan pasraman adalah

“menanamkan kepada Brahmacari untuk memiliki Sradha dan Bhakti kepada Brahman (Tuhan Yang Maha Esa); mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan Brahmacari untuk menjadi ahli ilmu agama Hindu dan memiliki ilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab terhadap pemahaman Weda.”

Dalam prakteknya, pasraman juga berfungsi sebagai alternatif terhadap kondisi absennya pelajaran agama Hindu dan guru agama Hindu di sekolah. Sekolah dapat bekerjasama

dengan pasraman untuk mengajar murid-murid beragama Hindu sekaligus memberikan penilaian yang akan diakumulasikan untuk nilai rapor setiap peserta didik. Dengan demikian siswa Hindu tidak harus mengikuti pelajaran agama lain demi mendapat nilai mata pelajaran agama yang diwajibkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Pasraman umumnya didirikan secara swadaya baik oleh kelompok maupun individu. Tak sedikit di antaranya yang tidak memungut biaya untuk siswa.

Dari data tahun 2018 terdapat setidaknya 109 pasraman yang dibina oleh Bimas Hindu dan tersebar di berbagai kabupaten di Sumatera Selatan. Pasraman ini membina murid paling sedikit 15 orang yakni di Pasraman Loka Gita Santi berlokasi di Desa Sumber Ringin, Kec. Buay Pemaca, Kab. OKU Selatan dan paling banyak 236 orang yakni di Pasraman Dharma Saraswati bertempat di Desa Air Enau, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim. Walaupun jumlah siswa bervariasi untuk setiap pasraman, namun sedikit banyaknya jumlah murid tidak berbanding lurus dengan jumlah guru. Misalnya saja baik di Pasraman Loka Gita Santi maupun Pasraman Dharma Saraswati jumlah guru yang mengajar masing-masing dua orang saja, padahal jumlah murid terpaut sangat signifikan.

Dari total 109 pasraman, baru 60 pasraman yang terdaftar. Artinya, 49 lainnya belum bisa menerima bantuan dari Bimas Hindu. Bantuan ini berupa renovasi bangunan, sarana prasarana pendidikan, biaya operasional pasraman, ongkos tukang dan sebagainya. Menghadapi ini, Bimas Hindu Kanwil Kemenag Sumatera Selatan bekerjasama dengan PHDI untuk mendata dan mendaftarkan pasraman tersebut sehingga berikutnya berpeluang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Selain pasraman, juga terdapat lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK yang dikelola oleh Bimas. TK/PAUD ini bertujuan untuk memberikan dasar pendidikan Hindu sejak usia dini yang mana diharapkan berperan dalam pembentukan karakter sebagai pengenalan awal dengan agamanya.

Tabel 9: Sekolah dan Lembaga Pendidikan yang Dikelola oleh Bimas Hindu

No.	Nama Sekolah dan Lembaga Pendidikan	Alamat	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai
1	Pasraman Dwi Jendra	Kab. OKU Timur	124	5	
2	Pasraman Merta Semadi	Kab. OKU Timur	115	3	
3	Pasraman Dharma Kerti	Kab. OKU Timur	50	2	
4	Pasraman Sanathana Dharma	Kab. OKU Timur	64	3	
5	Pasraman Setiya Dharma	Kab. OKU Timur	66	1	
6	Pasraman Dharma Bhakti	Kab. OKU Timur	30	1	
7	Pasraman Tatwa Buana	Kab. OKU Timur	38	2	1
8	Pasraman Santhy Yoga	Kab. OKU Timur	56	2	1
9	Pasraman Tirta Yoga	Kab. OKU Timur	36	3	1
10	Pasraman Candra Kirana	Kab. OKU Timur	62	1	1
11	Pasraman Semadhi Sila Dharma	Kab. OKU Timur			
12	Parraman Silo Dharma	Kab. OKU Timur	75	1	1
13	Pasraman Gema Genitri	Kab. OKU Timur	66	1	1
14	Pasraman Saraswati	Kab. OKU Timur	56	2	
15	Pasraman Tri Dharma	Kab. OKU Timur	81	1	
16	Pasraman Satya Dharma	Kab. OKU Timur	72	1	1
17	Pasraman Dharma Gita	Kab. OKU Timur	117	1	1
18	Pasraman Dharma Punia	Kab. OKU Timur	74	3	
19	Pasraman Saraswati	Kab. OKU Timur	64	1	1
20	Pasraman Widya Candra	Kab. OKU Timur	69	1	
21	Pasraman Widya Santi	Kab. OKU Timur	105	1	1
22	Pasraman Dharma Bakti	Kab. OKU Timur	66	1	1
23	Pasraman Nangun Kerti	Kab. OKU Timur	90	2	1
24	Pasraman Budi Luhur	Kab. OKU Timur	71	1	
25	Pasraman Widya Satra	Kab. OKU Timur	39	1	
26	Pasraman Widya Loka	Kab. OKU Timur	58	3	1
27	Pasraman Dharma Gita	Kab. OKU Timur	93	2	1
28	Pasraman Adi Widya Bina Shanti	Kab. OKU Timur	67	2	
29	Pasraman Loka Sari	Kab. OKU Timur	54	1	1
30	Pasraman Saraswati	Kab. OKU Timur	66	1	
31	Pasraman Satya Dharma	Kab. OKU Timur	76	2	
32	Pasraman Satya Kerthi	Kab. OKU Timur	54	1	
33	Pasraman Jaya Semara	Kab. OKU Timur	98	1	
34	TK IT Istana Dharma	Kab. OKU Timur	45	1	
35	Pasraman Widya Buana	Kab. OKU	89	1	1
36	Pasraman Widya Gayatri	Kab. OKU	71	1	1
37	Pasraman Widya Sapitri	Kab. OKU	129	1	1
38	Pasraman Dharma Santi	Kab. OKU	64	1	1
39	Pasraman Widya Yowana	Kab. OKU	80	2	

40	Pasraman Wana Sari	Kab. OKU	43	2	1
41	Pasraman Yowana Kerti	Kab. OKU	65	2	1
42	Pasraman Sanathana Dharma	Kab. OKU	36	1	1
43	Pasraman Dharma Kerti	Kab. OKU	30	1	
44	Pasraman Widya Saraswati	Kab. OKU	57	3	1
45	Pasraman Widya Sawitri	Kab. OKU	64	2	
46	Pasraman Wana Sawitri	Kab. OKU	78	2	
47	Pasraman Wira Wiguna	Kab. OKU Selatan	26	1	
48	Pasraman Bhisma	Kab. OKU Selatan	17	3	
49	Pasraman Kerti Yasa	Kab. OKU Selatan	29	2	
50	Pasraman Puncak Sari	Kab. OKU Selatan	19	3	
51	Pasraman Loka Gita Santi	Kab. OKU Selatan	15	2	
52	Pasraman Tri Dharma	Kab. OKU Selatan	17	2	
53	Pasraman Widya Dharma	Kab. OKU Selatan	22	1	
54	Pasraman Dharma Gita	Kab. OKU Selatan	20	1	
55	Pasraman Dharma Santi	Kab. OKU Selatan	22	1	
56	Pasraman Saraswati	Kab. OKU Selatan	30	1	
57	Pasraman Widnya Mandala Giri	Kab. OKU Selatan	56	1	
58	Pasraman Saraswati	Kab. OKI	56	1	
59	Pasraman Sanathana Dharma	Kab. OKI	80	2	1
60	Pasraman Satya Dharma	Kab. OKI	94	4	1
61	Pasraman Dharma Santi	Kab. OKI	70	2	
62	Pasraman Saraswati	Kab. OKI	58	2	
63	Pasraman Tri Murti	Kab. OKI	118	3	
64	Pasraman Wahana Santhi	Kab. OKI	107	2	
65	Pasraman Saraswati	Kab. OKI	126	5	1
66	Pasraman Gayatri	Kab. OKI	57	3	
67	Pasraman Giri Mandiri	Kab. OKI	43	3	
68	Pasraman Widya Prajaniti	Kab. OKI	118	3	
69	Pasraman Saraswati	Kab. OKI	136	4	
70	Pasraman Dharma Winangun	Kab. OKI	44	3	
71	Pasraman Widhya Murthi	Kab. OKI	65	2	
72	Pasraman Dharma Yoga	Kab. OKI	66	2	
73	Pasraman Bina Dharma	Kab. OKI	40	1	1
74	Pasraman Saraswati	Kab. OKI	67	2	
75	Pasraman Giri Mandara	Kab. OKI	66	2	
76	Paraman Ganesha Widya Dharma	Kab. OKI	78	2	
77	Pasraman Dharma Genitri	Kota Palembang	125	1	1
78	Pasraman Widya Dharma	Kab. Musi Banyuasin	23	1	1
79	Pasraman Saraswati	Kab. Musi Banyuasin	35	1	1

80	Pasraman Wana Loka Dharma Acarya	Kab. Musi Banyuasin	22	2	1
81	Pasraman Eka Laksmi	Kab. Musi Banyuasin	20	1	1
82	Pasraman Satyam	Kab. Musi Banyuasin	23	1	1
83	Pasraman Eka Dharma Santi	Kab. Musi Banyuasin	71	1	1
84	Pasraman Lingga Purusa	Kab. Musi Banyuasin	27	3	1
85	Pasraman Dharma Bhakti	Kab. Musi Banyuasin	34	1	
86	Pasraman Upekerti	Kab. Musi Banyuasin	33	1	
87	Pasraman Dharma Saraswati	Kab. Prabumulih	30	3	1
88	Pasraman Saraswati	Kab. Banyuasin	76	1	1
89	Pasraman Widya Loka	Kab. Banyuasin	57	3	
90	Pasraman Kumara Dharma Bhakti	Kab. Banyuasin	38	3	1
91	Pasraman Sumber Sastra	Kab. Banyuasin	49	1	
92	Pasraman Satya Saraswati	Kab. Banyuasin	77	3	
93	Pasraman Widya Gayatri	Kab. Banyuasin	70	2	
94	Pasraman Lila Gayatri	Kab. Banyuasin	87	1	
95	Pasraman Saraswati	Kab. Banyuasin	47	2	
96	Pasraman Dharma Mulya/ Eka Dharma Santi	Kab. Banyuasin	46	2	
97	Pasraman Gita Sartra	Kab. Banyuasin	55	2	
98	Pasraman Dharma Kerti	Kab. Banyuasin	47	1	
99	Pasraman Tirta Shanti	Kab. Banyuasin	46	1	
100	Pasraman Werdi Sentana	Kab. Banyuasin	65	3	1
101	Pasraman Widya Dharma	Kab. Banyuasin	136	3	
102	Pasraman Saraswati Makarti Jaya	Kab. Banyuasin	88	1	
103	Pasraman Dharma Bhakti	Kab. Banyuasin	67	1	
104	Pasraman Widya Karya Bhakti	Kab. Banyuasin	55	1	
105	Pasraman Dharma Saraswati	Kab. Muara Enim	65	1	
106	Pasraman Dharma Saraswati	Kab. Muara Enim	236	2	1
107	Pasraman Dharma Saraswati	Kab. Muara Enim	168	1	1
108	Pasraman Giri Gangga	Kab. Musi Rawas Utara	56	1	
109	Pasraman Widya Sastra	Kab. Musi Rawas	107	3	
110	Pasraman Govinda Asram	Kab. Musi Rawas	20	1	
111	TK Saraswati	Kab. Oku Timur	29	1	
112	TK Eka Yasa	Kab. OKI	22	4	
113	TK Dharma Kumara	Kab. Muara Enim	24	3	
114	PAUD Dharma Yoga	Kab. OKI	24	1	
115	PAUD Widya Kumara	Kab. Banyuasin	26	4	1
116	PAUD Tunas Mekar	Kab. Banyuasin	30	3	

117	PAUD Ganesha	Kab. OKU Timur	21	2	
118	PAUD Widya Loka	Kab. OKU Timur	20	2	
119	TK Sari Dahrma Murti	Kab. OKU Timur	23	3	
120	TK Satya Dharma	Kab. OKI	22	4	
JUMLAH			7307	223	42

Jumlah Pasraman yang terdaftar : 60

Jumlah TK/PAUD yang terdaftar : 5

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2018



Foto 5. Proses Belajar Mengajar di TK Satya Dharma, Desa Lubuk Seberuk, Kabupaten OKI

Keberadaan TK/PAUD dan pasraman ini tentu patut disyukuri. Kehadiran institusi ini memudahkan akses generasi muda Hindu untuk mempelajari agamanya. Kondisi yang kontras dialami oleh generasi terdahulu, terutama oleh anak-anak yang hidup di masa-masa awal era transmigrasi. Putu Kartini (45), Ketua WHDI Kabupaten OKI, memberikan gambaran tentang kondisi pendidikan saat ia masih kanak. Kartini tinggal di Desa Tugumulyo, Kampung 5 RT 5 Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI. Ia lahir dan besar di Sumatera Selatan. Kedua orangtuanya adalah transmigran asal Bali. Tahun 1973, ayah dan ibunya tiba di daerah Belitang, di Kabupaten OKU Timur. Tahun 1975, mereka pindah ke Tugumulyo bersama sanak saudara. Sampai tahun 1990, hanya mereka orang Bali yang tinggal di Tugumulyo. Setelah itu, transmigran dari Nusa Penida mulai berdatangan

dan menetap di Tugumulyo.

Sejak kecil, Putu Kartini dan anak-anak segenerasinya tidak pernah mengecap pendidikan formal agama Hindu. Tidak ada pelajaran agama Hindu di sekolah mereka. Mereka terpaksa belajar agama lain. Putu sendiri dulu mengikuti kelas agama Islam di sekolah. Ia belajar mengaji dan membaca Al Quran. Baru saat menginjak Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kayu Agung, Putu dan siswa Hindu lainnya mendapatkan pengajaran agama Hindu dari seorang pegawai dinas peternakan bernama Ir. I Gusti Subagia. Subagia mengajarkan Tri Sandhya kepada 10 hingga 15 orang anak termasuk Putu. Ia juga memperkenalkan perihal upacara dan pedoman-pedoman dalam melakukan persembahyangan.

Putu Kartini menerangkan, pendidikan agama Hindu di Kabupaten OKI semakin membaik pasca adanya Pasraman Dharma Yoga yang didirikan oleh warga tahun 2005. Pendirian pasraman ini terinspirasi dari umat lain yang memiliki ruang khusus untuk mempelajari ajaran agamanya. Putu pernah mendedikasikan dirinya menjadi pengajar di pasraman itu. Walau awalnya kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di *bale banjar* karena belum memiliki gedung, pasraman ini sangat diandalkan untuk memberikan pendidikan agama Hindu kepada anak-anak sampai remaja.

Inisiatif pendirian pasraman juga dilakukan oleh masyarakat Hindu lainnya, salah satunya adalah Putu Sirpa, Ketua PHDI Kabupaten Banyuasin. Putu merintis pasraman yang beralamat di Desa Bangun Sari nomor 48. Pasraman tersebut memegang SK resmi baru sekitar tahun 2012 dengan menyandang nama Pasraman Satya Saraswati. Awalnya pasraman tersebut diberi nama Sekolah Minggu karena dibuka setiap hari Minggu. Sempat pula diberi nama Saraswati Ashram namun kemudian tidak diperbolehkan karena Ashram identik dengan “budaya India.” Tujuan pendiriannya adalah sebagai tempat mengajarkan agama Hindu untuk anak-anak serta sebagai solusi atas tidak adanya pendidikan agama Hindu di sekolah-sekolah.

Dengan adanya pasraman ini, murid-murid beragama Hindu dapat memiliki nilai agama berdasarkan pelajaran agamanya sendiri. Selain itu, pendirian pasraman juga

dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa saat itu jumlah guru agama sangat terbatas. Baru ada satu orang guru SD yang berstatus PNS di Kelurahan Makarti, Kecamatan Makarti Jaya yang berlokasi jauh dari Tanjung Agung. Tidak ada guru agama Hindu di SMP dan SMA saat itu. Untuk memudahkan warga memperoleh akses pendidikan yang dekat dengan tempat kediaman, maka didirikanlah Pasraman Satya Saraswati dengan niat untuk membantu umat tanpa mencari keuntungan. Kini telah berdiri PAUD untuk anak-anak usia dini. Mereka diperkenalkan dengan nilai-nilai agama melalui lagu dan pelajaran yang sesuai dengan umur peserta didik. Putu dan istrinya mengelola PAUD ini dengan harapan generasi muda Hindu paham dan mencintai agamanya. Saat ini jumlah siswa PAUD adalah 12 orang, siswa SD 25 orang, SMP 5 orang dan SMA 6 orang.

D. POTENSI, TANTANGAN, JALAN TENGAH, REKOMENDASI

Percandian Bumiayu

Salah satuinggalan bercorak Hindu di Sumatera Selatan adalah kompleks percandian Bumiayu di kabupaten Muara Enim. Situs ini pertama kali berdiri sekitar abad ke-9 di kawasan kerajaan Sriwijaya. Pada Bumiayu ditemukan setidaknya sebelas gundukan tanah yang memuat bangunan-bangunan bersejarah yang terbuat dari batu bata (Utomo, 2010). Bangunan ini sebagian ditengarai tergolong merupakan bangunan sakral, sebagian lagi termasuk bangunan profan. Selain menjadi tempat berlangsungnya kegiatan keagamaan, kompleks Bumiayu juga merupakan wilayah permukiman bagi penduduk lokal.

Dari keseluruhan bangunan yang ada, baru empat buah yang selesai direhabilitasi. Pada puing-puing candi dapat dijumpai sejumlah arca di antaranya berwujud Siwa Mahaguru, Agastya, arca Stambha, serta arca-arca yang mengilustrasikan sosok dewata, raksasa dan bhairawi (Sulistyaningsih, 2017). Secara khusus, Bambang Budi Utomo menjelaskan bahwa setelah dilakukan eskavasi tahun 1992, pada Candi 1 (penamaan untuk salah satu bagian candi di kompleks Bumiayu) ditemukan arca Siwa dan lingga. Selain itu sebelumnya ditemukan juga enam

buah arca, tiga diantaranya yang dapat dikenali melambangkan wujud Siwa Mahadewa, Agastya dan Nandi. Pada Candi 3 terdapat reruntuhan yang diduga merupakan hiasan relief yang berbentuk kepala ular dan kera. Di antara puing-puing tersebut juga terdapat arca perempuan, arca singa, kepala-kepala kecil dengan wajah menyerupai topeng, kepala dari arca-arca binatang, arca berbentuk torso perempuan, dan fragmen kepala arca dengan ekspresi murka dan mata membelalak (Utomo, 2010). Di samping tinggalan-tinggalan tersebut di atas, masih terdapat temuan-temuan lain yang telah dikaji oleh sejumlah peneliti.

Situs Bumiayu telah menarik perhatian berbagai periset dari beragam latar belakang keilmuan baik dari Indonesia maupun mancanegara, sejak era kolonial hingga saat ini. Penelitian kolaborasi untuk menguak sejarah Bumiayu juga dilakukan oleh institusi dalam negeri seperti Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerjasama dengan lembaga internasional di antaranya Universitas Pennsylvania dan Ecole Francaise d'Extreme Orient (Siregar, 2018). Keberadaan kompleks percandian Bumiayu ini dipandang penting karena berkontribusi terhadap pengayaan khasanah ilmu pengetahuan terutama seputar sejarah kebudayaan klasik di Nusantara, dan di Sumatera Selatan secara khusus. Lebih spesifik lagi, mempelajari Bumiayu juga memungkinkan generasi saat ini untuk melacak jejak peradaban Hindu di masa lalu.

Kompleks percandian Bumiayu adalah aset berharga yang harus dijaga oleh semua pihak tak terkecuali umat Hindu di sekitar situs, di Sumatera Selatan, dan Indonesia. Sebuah situs sejarah akan semakin terjaga keberadaannya bila berfungsi sebagai museum hidup karena pelestarian dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Situs Bumiayu berpotensi menjadi museum hidup karena masih memiliki umat yang dapat terus menjaga dan menghidupi situs dengan berbagai upacara atau ritual keagamaan. Selain oleh masyarakat sekitar, Bumiayu juga dapat menjadi tempat napak tilas dan *tirta yatra* bagi umat Hindu di Indonesia maupun dunia. Upaya ini membutuhkan perencanaan matang agar kelestarian situs dan kesakralannya tetap terjaga ketika nanti menjadi destinasi perjalanan religius umat se-Dharma.

Kerjasama dengan Pemerintah dan Masyarakat di Pulau Bali

Hubungan antara umat Hindu di Sumatera Selatan dan masyarakat di Bali selama ini terjalin dengan baik diantaranya tecermin dari solidaritas ketika salah satu mengalami musibah atau bencana. Ketika terjadi erupsi di Gunung Agung, Bali, umat Hindu di Sumatera Selatan mengumppulkan sumbangan dan membawa langsung bantuan ke Pulau Bali. Demikian juga ketika masyarakat di Sumatera Selatan membutuhkan asupan pengetahuan keagamaan, beberapa kali mengundang pakar dari Bali untuk berbagi ilmu. Ke depan diharapkan semakin sering masyarakat Bali maupun pemerintah Bali menjalin kerjasama dengan umat di Sumatera Selatan baik dalam bidang keilmuan, terkait keagamaan, beasiswa, pariwisata, usaha maupun aspek-aspek lainnya.

Pendidikan Agama Hindu di Sekolah, Pengangkatan Guru Agama, Buku Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 secara jelas menyebutkan pendidikan agama adalah :

“pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.”

Dari kutipan Pasal 1 Bab I tersebut di atas diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah pada seluruh jenjang dilindungi oleh undang-undang. Untuk lebih jelasnya, termakhtub dalam pasal 3 bahwa “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.” Hal ini didukung pula dengan UU nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V tentang Peserta Didik Pasal 12 yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak “mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Walau memberikan mata pelajaran agama adalah hak siswa, faktanya tidak semua sekolah melakukan hal tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti selama berada di provinsi Sumatera Selatan, diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan agama Hindu di sekolah tidak otomatis ada, tetapi seringkali harus dibarengi dengan usaha umat untuk memperjuangkannya. Salah satu alasan yang menyebabkan sulitnya pengadaan pelajaran agama di sekolah ialah tidak adanya guru agama Hindu di sekolah terkait. Merujuk kepada PP Nomor 5 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dijelaskan bahwa untuk setiap sekolah negeri, penyediaan guru agama dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sementara untuk sekolah swasta (yang diselenggarakan oleh masyarakat) guru agama disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jika sekolah swasta tidak bisa mengangkat guru agama tertentu, maka pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan setingkat SD/SMP berada pada pemerintah daerah (kabupaten/kota, sementara pemerintah provinsi bertanggungjawab terhadap pendidikan setingkat SMA/SMK. Peraturan ini juga menyatakan wewenang pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah dan siswa. Demikian halnya dengan penentuan kebutuhan (formasi) guru juga menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Dari hasil wawancara sejumlah pihak, tercatat bahwa tidak semua pemimpin daerah baik bupati, walikota maupun gubernur menyikapi wewenang ini secara maksimal. Tidak semua memiliki kesadaran dan terdorong melakukan tindakan nyata untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pendidikan agama Hindu di daerahnya. Pengangkatan guru sudah seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, namun apa yang tercantum dalam regulasi tidak selalu sama dengan realita. Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Hindu Kanwil Agama Provinsi Sumatera Selatan, Drs. Ketut Gede Ri-asa Astawa, menyatakan, pengangkatan guru agama Hindu di

Sumatera Selatan dibuka untuk satu orang per sepuluh tahun. Terakhir pengangkatan guru agama ialah tahun 2010. Kondisi ini mengakibatkan banyak murid Hindu tidak mendapatkan pelajaran agama Hindu di sekolah melainkan terpaksa harus mempelajari ilmu agama lain yang menyebabkan murid bersangkutan tidak dapat memperoleh nilai maksimal dalam pelajaran. PHDI se-provinsi Sumatera Selatan telah mencoba berkomunikasi dengan setiap pimpinan daerah guna memperjuangkan dibukanya formasi baru untuk guru agama Hindu, namun upaya ini tidak mendapat tanggapan serius. Hal ini seyogyanya diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena banyak guru-guru agama PNS akan segera pensiun. Jika pengangkatan guru agama Hindu tidak segera dilakukan, maka berpotensi terjadi kekosongan guru agama di sejumlah sekolah atau wilayah.

Sebagai solusi alternatif atas situasi ini, PHDI membuat surat resmi ditujukan ke dinas pendidikan agar nilai agama Hindu untuk siswa sekolah dapat diambil dari pasraman. Langkah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Keagamaan Hindu yang menyebutkan di Bab I Pasal 1 Ayat 1 bahwa “Pendidikan Keagamaan Hindu adalah jalur pendidikan formal dan nonformal dalam wadah Pasraman.” Dengan kata lain, jika suatu sekolah tidak memiliki guru agama, maka murid-murid bisa belajar pendidikan agama Hindu, mengikuti ujian dan mendapatkan nilai rapor dari pasraman. Pembimas Hindu Sumatera Selatan mengadakan seleksi penyuluh agama Hindu yang bertugas untuk mengajar siswa di pasraman maupun memberikan Dharma Wacana atau ceramah keagamaan di pura-pura maupun tempat tertentu pada momen tertentu bagi masyarakat umum yang beragama Hindu. Para penyuluh agama Hindu ini bekerja dengan sistem kontrak. Adapun untuk penempatan penyuluh didasarkan atas permintaan PHDI kabupaten/kota. Banyak pihak, termasuk PHDI setempat, berharap agar para penyuluh agama Hindu ini kelak dapat diangkat menjadi guru karena selama ini mereka belum mendapatkan penghasilan yang layak dan tidak jarang melakukan pekerjaannya tanpa imbalan tetapi hanya demi pengabdian bagi agama dan umat.

Permasalahan lain yang muncul adalah ketersediaan buku agama yang layak. Perwakilan PHDI Kota Palembang mengeluhkan terbatasnya jumlah buku agama Hindu yang menggunakan kurikulum baru dan sulitnya mendapatkan buku tersebut. Ditengarai salah satu penyebab kelangkaan buku bermutu karena distribusi buku tidak lagi dilakukan oleh Bimas. Sebagai solusi menghadapi ini, umat terpaksa harus mem-*fotocopy* buku untuk kemudian diedarkan ke pendidik agama di sekolah. Pembicaraan ini muncul pada saat rapat internal PHDI se-Sumatera Selatan di Pura Agung Sriwijaya. Sebagai alternatif solusi, sempat tercetus ide untuk mengunduh buku di internet. Hal ini tentu sebenarnya tidak layak dilakukan karena menyalahi aturan *copyright*. Walau demikian, untuk sementara ini adalah cara terbaik bagi mereka sebagai alternatif solusi atas permasalahan di lapangan.

Pertanian dan Perkebunan

Para transmigran asal Bali yang datang karena program pemerintah ketika tiba di Sumatera Selatan masing-masing Kepala Keluarga (KK) mendapatkan jatah tanah seluas dua hektar untuk digarap menjadi lahan produktif. Saat itu masih banyak lahan tidur atau lahan yang tidak dimanfaatkan karena dianggap gersang oleh transmigran. Dalam perjalanannya, sebagian transmigran menggunakan lahan tersebut untuk persawahan. Pada saat bersamaan, mereka bekerja di perkebunan karet sebagai penyadap dan atau sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit. Dari pengalaman tersebut dan menimbang prospek perkebunan karet maupun kelapa sawit, tak sedikit transmigran yang kemudian secara bertahap berusaha memperluas lahannya untuk ditanami salah satu atau dua jenis tanaman tersebut disamping padi. Dari keuntungan yang ada mereka terus berinvestasi untuk menambah luas tanah.

Sekitar tahun 2005 hingga 2007, jerih payah tersebut membuahkan hasil. Warga yang membuka perkebunan karet merasakan dampak signifikan dari melesatnya harga karet kala itu mencapai Rp 18.000 sampai Rp 25.000 per kilogram. Sebagai gambaran, lahan per hektar biasanya dapat menghasilkan 150

sampai 300 kilogram per bulan. Menurut beberapa narasumber, tidak sedikit orang Bali di Sumatera Selatan yang memiliki lahan karet seluas 100 sampai 300 hektar. Dapat dibayangkan, jika dikalkulasikan, mereka memperoleh keuntungan fantastis pada masa itu. Karet biasanya dijual kepada pengepul untuk selanjutnya diekspor ke luar negeri. Mencermati kecenderungan tren ini, sejumlah transmigran memutuskan menutup lahan persawahannya dan mengubahnya menjadi perkebunan karet.

Khusus untuk perkebunan kelapa sawit, dari keterangan beberapa narasumber, sebagian transmigran pada awalnya bekerjasama dengan PT Plasma. Masyarakat bisa membeli langsung lahan yang sudah ditanami kelapa sawit ke PT Plasma. Lahan yang dibeli minimal satu kapling (2 hektar). Ini adalah cara paling praktis, karena tinggal menerima gaji saja tanpa harus mengurus kebun. Pilihan ini banyak ditempuh karena tidak mudah mengelola perkebunan kelapa sawit. Walau demikian, ada juga masyarakat yang memilih membangun sendiri lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas pada umumnya minimal sepuluh hektar. Dari mulai menanam sampai masa panen membutuhkan waktu sekitar lima tahun. Setelah itu, pemilik bisa langsung menikmati hasil perkebunan.

Perubahan signifikan baru terjadi beberapa tahun kemudian ketika harga karet menurun drastis karena muncul persaingan dengan negara lain antara lain, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Harga karet anjlok menjadi hanya Rp 6.000 sampai Rp 8.000 per kilogram. Meski begitu, para transmigran asal Bali yang menjadi pemilik kebun tetap mendulang keuntungan walau tidak sefantastis sebelumnya. Beberapa di antara mereka menutup lahan karet dan kembali mengolah sawah karena padi dianggap lebih menjanjikan.

Dalam prosesnya hingga saat ini, baik pengelolaan lahan sawah maupun kebun oleh transmigran Bali, terbukti memberikan kesejahteraan bagi masyarakat transmigran Bali dan membawa dampak positif yakni membuka lapangan pekerjaan bagi transmigran lain, biasanya berasal dari Pulau Jawa. Sebagian transmigran Jawa memang ada yang mengelola lahan sendiri dan sukses, namun ada juga yang memilih menjadi penyadap

atau bekerja di lahan orang lain.

Walau demikian, permasalahan pendudukan lahan juga pernah terjadi. Sekitar tahun 2018, beberapa oknum dari Suku Komerling menduduki lahan milik orang Bali dan memasang kayu di sekeliling kebun untuk menandai bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Mereka menyatakan bahwa tanah ini adalah tanah warisan nenek moyang yang seharusnya tidak direbut begitu saja oleh pendatang. Konflik ini berlangsung cukup lama. Pemilik kebun berusaha menyelesaikan permasalahan namun tidak kunjung menemukan titik temu. Ia menghubungi Ketua PHDI OKI, Agung Santosa, dan bersama-sama melapor ke polisi, namun permasalahan tetap terjadi. Teror terus diluncurkan oleh oknum dengan meneror ke rumah pemilik kebun. Demi rasa aman, pemilik kebun memutuskan keluar dari rumah dan berlindung serta tinggal untuk sementara waktu di Pura setempat.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Ketua PHDI Provinsi Sumatera Selatan, I Gusti Bagus Surya Negara. Setelah itu, Ketua PHDI Sumatera Selatan bersama Ketua PHDI OKI dan pihak lainnya menghadap Gubernur Provinsi Sumatera Selatan saat itu yakni Alex Noerdin. Dengan komunikasi dan lobi yang baik, terutama menekankan juga bahwa kasus ini bisa mencoreng nama Palembang sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games yang sebentar lagi akan terselenggara, maka keputusan penting terjadi. Gubernur membantu proses penyelesaian kasus tersebut. Menurut keterangan Ketua PHDI OKI, beberapa hari kemudian oknum-oknum sudah meninggalkan lahan dan mencabut kayu-kayu yang dipasang sebelumnya.

Agung Santosa menjelaskan banyak orang Bali pemilik kebun yang terus memperluas tanah untuk lahan perkebunan dengan membeli dari penduduk lokal. Akibatnya, semakin lama penduduk lokal menyadari tanah mereka sudah habis dan memunculkan konflik sosial. Kasus ini dapat dicegah salah satunya dengan cara tidak membeli semua tanah milik penduduk lokal.

Penyederhanaan Upakara

Dalam kultur Hindu, upakara adalah komponen penting yang tidak terpisahkan dari kegiatan upacara yang dilaksanakan

oleh umat. Bagi sebagian masyarakat Hindu di Sumatera Selatan, keberadaan upakara menjadi suatu wacana penting karena di satu sisi, umat ingin tetap menjalankan tradisi upakara yang berasal dari kampung halamannya di Bali, di sisi lain, muncul pemikiran kritis dari masyarakat tentang tingginya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan upakara. Terlebih, menurut mereka, masih ada umat yang terjebak dengan pandangan bahwa semakin kompleks atau mewah suatu upakara, maka akan semakin baik. Tidak adanya standar yang pasti mengenai pembuatan upakara dan penjelasan perihal makna setiap komponennya ditengarai dapat menimbulkan kebingungan di kalangan generasi muda ke depan.

Mencermati hal tersebut, umat Hindu di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan berinisiatif untuk merumuskan pakem upakara untuk pelaksanaan upacara Catur Yadnya. Tahun 2017, PHDI OKI menerbitkan buku *Pedoman Praktis Catur Yadnya*. Buku ini disusun oleh PHDI OKI bersama Yayasan Widya Dharma, Peradah Kabupaten OKI, Wanita Hindu Dharma Indonesia dan Pokja Penyuluh OKI.

Buku ini memuat standar-standar suatu upakara berikut variasi atau modifikasi yang dilakukan dengan tujuan menyatukan persepsi dan menyederhanakan upakara tanpa menghilangkan makna esensinya. Hal ini dilakukan karena masyarakat di kabupaten OKI berupaya meninggalkan *sima chara* yang berasal dari daerah masing-masing di Bali sehingga menyesuaikan dengan tatanan baru di tanah rantauan. Keterbatasan sarana dan prasarana di Sumatera Selatan menyebabkan umat membutuhkan cara baru dalam menjalankan ritual.

Upaya ini mengemuka setelah munculnya kesadaran baru dalam memandang konsep tingkatan Yadnya yang terdiri dari Nista, Madya dan Utama. Sebagian umat Hindu di Sumatera Selatan memperoleh kesimpulan bahwa esensi atau makna Yadnya tidak dipengaruhi oleh ketiga tingkatan tersebut. Suatu upacara yang dilangsungkan dengan cara-cara *utama* tidak berarti lebih baik daripada yang memilih *nista* atau *madya*. Hal ini menjadi landasan dalam merumuskan kembali jenis upakara

untuk pelaksanaan Catur Yadnya di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan.

Melalui pedoman ini, umat memperoleh penjelasan umum tentang tujuan, makna atau filosofi, jenis-jenis dan tata cara pelaksanaan upacara Bhuta Yadnya, Manusa Yadnya, Pitra Yadnya, serta Dewa Yadnya. Selain itu, diuraikan pula berbagai macam upacara berikut fungsinya, alat-alat perlengkapan dan penjelasan unsur-unsur dasar upacara tersebut. Buku ini juga memuat mantra-mantra yang diucapkan selama berlangsungnya prosesi upacara terkait. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) diketahui bahwa kondisi ini merupakan hal umum yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera Selatan.

Keberadaan Pura Kahyangan Swarna Dwipa

Indonesia adalah tuan rumah penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 tepatnya di kota Jakarta dan Palembang. Kedua kota ini membenahi sarana dan prasarana penunjang kegiatan olahraga terbesar di Asia tersebut salah satunya dengan memperbaiki *venue* pertandingan dan perlombaan, salah satunya Jakabaring Sport City yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu syarat *venue* untuk Asian Games adalah tersedianya tempat beribadah lengkap untuk seluruh agama. Oleh karena itu, didirikan beberapa tempat persembahyangan di kawasan Jakabaring Sport City, termasuk di antaranya adalah Pura Kahyangan Swarna Dipa. Peletakan batu pertama pembangunan ini dilakukan pada Minggu, 9 Juli 2017 oleh Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama (Kemenag), I Ketut Widnya, dengan disaksikan langsung Ketua Umum PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua PHDI Sumsel I Gusti Bagus Surya Negara dan perwakilan pemerintah provinsi Sumatera Selatan kala itu.

Pura Kahyangan Swarnadwipa ini dibangun di atas lahan seluas 30 meter x 25 meter pemberian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dibandingkan tempat ibadah lainnya di Jakabaring Sport City, hanya pura ini yang pembangunannya dilakukan secara swakelola oleh umat langsung karena dibutuhkan pengetahuan dan keahlian spesifik untuk mendirikannya. Hal ini sesuai

dengan usulan dari PHDI Sumatera Selatan. Pura ini didirikan menggunakan anggaran terbatas dari pemerintah melalui Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI sebesar lima ratus juta rupiah. Untuk menutupi kekurangan pembiayaan, PHDI setempat menggalang sumbangan dari umat Hindu di Sumatera Selatan dan *Corporate Social Responsibility* sejumlah perusahaan termasuk bantuan 2000 sak semen Baturaja—usaha yang dikelola oleh koperasi PHDI Sumatera Selatan. Total dana yang digelontorkan untuk membangun pura ini sekitar 2,4 miliar rupiah. Biaya ini digunakan untuk membangun tempat persembahyangan yang layak. Pura ini unik karena sepenuhnya beratap demi menjaga keamanan dan kenyamanan umat terutama ketika hujan. Keberadaan Pura Kahyangan Swarnadwipa di Jakabaring Sport City telah menambah jumlah tempat suci bagi umat Hindu di Kota Palembang.



Foto 6. Pura Kahyangan Swarnadwipa (flickr.com)

Setelah hajatan Asian Games 2018 selesai, keberadaan pura mulai dipertanyakan oleh umat Hindu terutama ketua PHDI dari sejumlah kabupaten di Sumatera Selatan. Hal ini diungkapkan dalam rapat internal PHDI seluruh kabupaten Sumatera Selatan dan juga pada sesi *Focus Group Discussion*. Salah satu yang dipermasalahkan adalah status pura. Hal mana terkait dengan pihak mana yang berkewajiban menjadi pengurus atau *pengempon*

pura terlebih ketika ada hari raya atau odalan perlu ada kepastian siapa yang akan bertanggungjawab merawat dan mengelola pura. Sampai saat penelitian ini dilakukan, pura masih dikelola di bawah PHDI Provinsi Sumatera Selatan. Sejauh ini sudah dilakukan *macaru* kecil dan *ngulapin* di Pura Kahyangan Swarna Dipa. Ketika *melaspas gede* sudah diadakan kelak, pimpinan PHDI seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan diharapkan berkumpul kembali untuk membicarakan perihal pengelolaan pura agar tidak hanya mengandalkan PHDI Provinsi Sumatera Selatan karena merupakan milik bersama.

Terlepas dari wacana ini, Pura Kahyangan Swarna Dipa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat non Hindu karena desainnya yang unik. Dari penelusuran peneliti via situs berita online, sejumlah pihak memproyeksikan pura ini sebagai salah satu destinasi wisata religi di Sumatera Selatan. Namun demikian, ide ini harus dikaji terlebih dahulu oleh PHDI dan umat Hindu di Sumatera Selatan serta stakeholder terkait.

Kurangnya Organisasi Keumatan

Dalam rangka menunjukkan identitas dan eksistensi masyarakat Bali (Hindu) di Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya organisasi atau institusi keumatan yang berperan dalam memperjuangkan berbagai kepentingan umat Hindu sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dalam wadah NKRI yang be-bhinneka tunggal ika. Data di bawah ini menunjukkan keberadaan lembaga keagamaan Hindu di Sumatera Selatan secara kuantitas :

Tabel 10: Jumlah Lembaga Hindu di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kab/ Kota	Nama Lembaga Hindu				
		PHDI	WHDI	PERADAH	KMHDI	YAYASAN
1	Palembang	1	1	1	1	1
2	Prabumulih	1	1	-	1	-
3	Lubuk Linggau	-	-	-	-	-
4	Pagar Alam	-	-	-	-	-
5	Lahat	-	-	-	-	-
6	Banyuasin	1	1	-	-	-
7	Musi Banyuasin	1	1	1	-	-

8	Musi Rawas	1	1	1	-	-
9	Musi Rawas Utara	1	1	1	-	-
10	Muara Enim	1	1	1	-	-
11	Ogan Ilir	-	-	-	-	-
12	OKI	1	1	1	-	1
13	OKU	1	-	-	1	-
14	OKU Selatan	1	1	-	-	-
15	OKU Timur	1	1	1	-	1
16	PALI	-	-	-	-	-
17	Empat Lawang	-	-	-	-	-
	JUMLAH	11	10	7	3	3

Sumber : Bimas Hindu Kanwil Agama Provinsi Sumatera Selatan

Melalui observasi dan wawancara di lapangan ternyata masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum memiliki organisasi keumatan Hindu PHDI. Hal ini tentunya menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti, oleh karena keberadaan PHDI wajib hadir di setiap Kabupaten Kota di wilayah Indonesia ini. Kehadiran PHDI, dan organisasi keumatan Hindu lainnya tentunya untuk memberikan pengayoman, pembinaan dan pelayanan kepada seluruh umat Hindu dengan segala dinamika dan problematikanya ada di setiap daerah.

Kerancuan Data Umat dan Pura

Menurut data jumlah penduduk dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014, tercatat bahwa jumlah umat Hindu tahun 2009 hingga 2011 terdata tetap yakni 71.951 orang. Pada tahun 2012 angka ini hanya bertambah 1 orang menjadi 71.952 sementara pada tahun 2014 terdata 73.932 orang (Kanwil Dept. Agama Provinsi Sumatera Selatan, 2014). Sementara itu, berdasarkan data Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015, angka ini menurun menjadi 73.479. Tahun 2016 jumlah umat Hindu berkurang drastis menjadi 28044, kemudian naik mencapai 36.894 jiwa pada tahun 2017(Kanwil Dept. Agama Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2017). Namun demikian, jika mengacu pada data dari Bimas Hindu Sumatera Selatan, terjadi perbedaan data yang signifikan. Tahun 2017 saja jumlah umat Hindu terdata 73.479 orang (Bimas Hindu Kanwil Dept. Agama Provinsi Sumatera Selatan, 2017). Selain itu, sebagaimana disinggung di awal laporan ini, juga

terdapat perbedaan data jumlah umat Hindu antara data Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan yang diterbitkan BPS dan data yang peneliti peroleh dari Bimas Hindu. Data Bimas Hindu menunjukkan jumlah umat hampir dua kali lipat lebih banyak dibanding yang tercantum dalam buku terbitan BPS tersebut di atas.

Perbedaan mencolok juga tampak pada data tempat peribadatan yang disusun oleh Kanwil Dept. Agama Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan jumlah total pura se-Sumatera Selatan adalah 187 pada tahun 2017. Jumlah ini memperlihatkan penurunan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 208 pura dan tahun 2015 sebesar 219. Bila merujuk pada data Bimas Hindu tahun 2017, jumlah rumah ibadah jauh melampaui 187 yakni mencapai 295 buah terdiri dari 139 Pura Kahyangan Tiga, 78 Pura Kahyangan Tunggal, dan 78 buah Pura Prajapati (Bimas Hindu Kanwil Dept. Agama Provinsi Sumatera Selatan, 2017). Adanya kerancuan data sebagaimana telah dijelaskan menjadi catatan penting yang harus diperbaiki ke depan mengingat data kependudukan sangat krusial karena menyangkut aspek-aspek lain seperti penentuan kebijakan, bantuan, kebutuhan penelitian dan sebagainya. Permasalahan ini juga sempat mengemuka dalam FGD yang berlangsung di Pura Agung Sriwijaya.

Selain itu, masih ada umat yang tidak memiliki KTP dan KK terutama mereka yang tinggal di daerah pelosok. Akibatnya, mereka tidak dapat mengikuti Pemilu dan tidak memperoleh fasilitas seperti asuransi kesehatan BPJS dan sebagainya. Beberapa penyebabnya, menurut narasumber, lantaran warga tersebut kurang memiliki kesadaran atas pentingnya KK dan KTP. Selain itu, ada yang sudah mengurus pembuatannya, namun selama bertahun-tahun KTP dan KK tidak kunjung selesai di kecamatan. Perihal ini tentu memerlukan kajian dan pengecekan ke pihak-pihak terkait.

Penyejuk Rohani

Dari hasil wawancara dengan beberapa ketua PHDI Kabupaten/kota, terungkap adanya kegelisahan dan kebutuhan akan pendidikan non formal seperti Dharma Wacana yang lebih

menekankan kepada isi, makna, esensi, filosofi dari ajaran Hindu dibanding Dharma Wacana seputar upacara atau upacara. Sebagai alternatif, selama ini umat berlangganan majalah keagamaan seperti Media Hindu dan menonton kanal Bali TV untuk mengetahui informasi dari Bali. Selain itu, sejumlah Ketua PHDI juga berinisiatif untuk mengundang narasumber dari Bali untuk melakukan seminar atau Dharma Wacana di daerahnya.

Pendidikan Hindu untuk Umat yang Konversi Agama

Pernikahan beda agama sering terjadi di Sumatera Selatan. Tak sedikit di antaranya laki-laki Hindu menikah dengan perempuan non Hindu yang kemudian melakukan konversi agama mengikuti suaminya. Setelah menjadi Hindu, mereka membutuhkan bimbingan untuk mengetahui apa esensi dari Hindu, bukan hanya belajar mengenai upacara dan upacara tetapi juga nilai-nilai dan filosofi ajaran Hindu. Menurut beberapa narasumber, seringkali mereka yang telah konversi agama kembali lagi ke agamanya karena tidak ada yang membimbing untuk menyelami agama Hindu. Hal ini mungkin dapat menjadi suatu catatan sehingga menjadi perhatian.

Motivasi Melanjutkan Studi, Beasiswa

Berdasarkan keterangan dari perwakilan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDHI) Sumatera Selatan selama FGD berlangsung, serta hasil wawancara dengan beberapa umat, diperoleh informasi bahwa masih banyak anak-anak muda Hindu di daerah yang memiliki motivasi rendah untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau bahkan ke jenjang SMA. Permasalahan utamanya bukan pada keterbatasan biaya untuk bersekolah melainkan karena pola pikir orangtua atau keluarga. Banyak diantaranya yang berasal dari keluarga pengelola perkebunan yang sukses, dan oleh karenanya menganggap pendidikan tidak terlalu penting. Lebih baik selepas SMP atau setamat SMA langsung mengurus kebun. Ketika ada anak yang menyatakan ingin kuliah, masih ada beberapa orangtua yang meminta anaknya untuk memilih antara dibelikan mobil atau lanjut sekolah? Pilihan ini dilakukan agar anak tidak menepuh studi dan melanjutkan usaha orangtua



untuk mengurus kebun yang sudah jelas menghasilkan cukup uang.

Pilihan ini bagaimanapun adalah hak dari setiap individu. Bukan berarti bila tamat SMA lebih buruk daripada tamat kuliah. Namun, persoalannya adalah sudut pandang tersebut di atas dapat menghalangi kemungkinan anak mengembangkan potensinya. Pendidikan yang tinggi sedikit banyak juga akan memengaruhi pola pikir seseorang. Harta kekayaan dan tanah bisa habis, namun ilmu pengetahuan akan terus bertambah.

Di sisi lain, KMHDI juga menyampaikan masih ada anak-anak muda Hindu yang memerlukan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Kebutuhan beasiswa ini dapat dipenuhi dengan kerjasama ke perguruan tinggi di Bali sebagai contoh UNHI di Denpasar yang sedang membuka program beasiswa.

Peran Pemerintah

Sebagai negara dengan penduduk yang majemuk, Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban melindungi seluruh masyarakat Indonesia termasuk umat Hindu yang termasuk minoritas di Indonesia. Tak hanya melindungi, pemerintah sudah sewajibnya mendukung berbagai kegiatan sebagai bagian dari ekspresi keagamaan yang tentunya tidak melanggar prinsip Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dukungan ini salah satunya disalurkan melalui Bimas Hindu di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki kantor wilayah di berbagai daerah di Nusantara. Adapun Bimas Hindu di provinsi Sumatera Selatan terbilang aktif membina umat Hindu bersama PHDI se-Sumatera Selatan.

Bimas Hindu salah satunya berperan melakukan pembinaan terhadap umat Hindu di wilayahnya dan pengelolaan data serta informasi terkait umat dan kegiatan keagamaan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan peran Bimas Hindu Sumatera Selatan memastikan kebutuhan umat terpenuhi diantaranya dalam bidang pendidikan dengan menyediakan penyuluh agama Hindu. Bimas juga telah memperjuangkan agar penyuluh agama Hindu mendapatkan kenaikan penghasilan dan perpanjangan kontrak. Terbukti, penyuluh agama Hindu sebelumnya hanya dikontrak satu tahun, dan sejak 2018 akhir

dikontrak menjadi 3 tahun. Bimas Hindu Sumatera Selatan juga memperjuangkan bantuan untuk umat melalui anggaran yang disediakan oleh pemerintah yang harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Bimas meminta PHDI kabupaten/kota agar merancang sendiri apa saja kebutuhan umat di wilayahnya karena mereka yang paling memahami kondisi di sana untuk kemudian diajukan ke Bimas.

Hingga tulisan ini dibuat, Bimas Hindu Sumatera Selatan telah memberikan bantuan berupa renovasi bangunan pasraman dan pura, melengkapi sarana prasarana di pura dan pasraman, biaya operasional pasraman, serta pembiayaan program-program edukatif seperti jambore dan festival. Pembimas aktif mengadakan pertemuan dengan Ketua PHDI Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi dua arah. Pada rapat-rapat tersebut masing-masing PHDI menyampaikan permasalahan di daerah yang akan ditanggapi langsung oleh Pembimas. Bersama PHDI juga, Bimas secara kontinyu melakukan pendataan umat Hindu, pasraman dan TK/Paud serta pura yang ada di seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, salah satu kegiatan cukup besar yang diadakan Bimas Hindu Sumatera Selatan adalah ajang Utsawa Dharma Gita (UDG) tingkat nasional XIII tahun 2017 di kompleks Jakabaring Sport City Kota Palembang. Sebelumnya Utsawa Dharmagita telah digelar di sejumlah daerah lain di Indonesia, dan pada tahun 2017 Palembang menjadi tuan rumah. Sebelum melaju ke ajang nasional, para peserta terlebih dahulu dibina dan mengikuti lomba serupa di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Adapun Utsawa berarti festival atau lomba, sedangkan Dharma Gita adalah nyanyian suci keagamaan. Utsawa Dharmagita (UDG) merupakan ajang lomba nyanyian suci keagamaan Hindu se-Indonesia bertujuan meningkatkan pengamalan kitab suci Weda, membudayakan kitab suci Weda bagi umat hindu serta sebagai bentuk toleransi antar umat beragama.

Acara ini mengambil tema “Wahana Penguatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Ajaran Hindu sebagai Wujud Revolusi Mental” Secara resmi dibuka pada 7 Juli 2017 oleh Menteri Agama H Lukman Hakim Saifuddin di Dinning Hall Jakabaring. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Pengurus Harian

PHDI Pusat MayJen TNI (Purnawirawan) Wisnu Bawetanaya dan Ketua PHDI Provinsi Sumsel I Gusti Bagus Surya Negara. Kegiatan ini berlangsung sukses dihadiri oleh ribuan perwakilan umat Hindu dari 33 provinsi se-Indonesia. Terdapat 18 cabang Llmba yang akan dipertandingkan diantaranya Utsawa Dharma Widya SD, Utsawa Dharma Widya SMP dan Utsawa Dharma Widya SMA.

Tujuan umum acara ini ialah meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran kitab suci Weda beserta susastra Hindu dalam upaya memperkokoh karakter bangsa. Selain itu, perhelatan ini juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang dharmagita. Melestarikan dan mengembangkan dharmagita sebagai kearifan budaya lokal juga ditekankan dalam kegiatan 3 tahun sekali ini. Tujuan lainnya, meningkatkan keterampilan membaca kitab suci Weda dan susastra Hindu atau nyanyian-nyanyian keagamaan Hindu.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga turut berperan dalam membantu umat Hindu di Sumatera Selatan. Pemerintah provinsi khususnya berperan tidak saja mendukung kegiatan umat Hindu tetapi juga memberi rasa aman kepada sebagai minoritas di Sumatera Selatan.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam upaya mempersiapkan suatu perubahan di masyarakat, dibutuhkan adanya representasi umat Hindu di lembaga legislatif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun Indonesia. Perwakilan umat Hindu di DPRD tingkat I dan II serta DPR RI memiliki peran strategis dalam menciptakan Undang-Undang maupun bantuan yang berpihak kepada umat Hindu. Berdasarkan keterangan dari Pembimas Hindu Sumatera Selatan, diketahui hingga tahun 2018, tidak ada representasi umat yang menduduki kursi DPR di provinsi Sumatera Selatan. Walau demikian, di sejumlah kabupaten seperti OKI dan OKU Timur ada beberapa umat yang berhasil terpilih bahkan beberapa kali menduduki kepemimpinan sebagai legislator.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua WHDI Kabupaten OKI, diketahui bahwa terdapat tiga orang perwakilan umat di DPRD Kabupaten OKI yakni Made Indrawan (belakangan

mengundurkan diri karena maju pada Pilkada 2018), Nyoman Warsa Yasa, dan Wayan Sude Dewa Eka. Menurut narasumber, melalui anggota DPRD ini, umat Hindu di OKI bisa mendapatkan dana bantuan dari pemerintah daerahnya untuk mendukung pembangunan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tahun 2014, PAUD Dharma Yoga di OKI mendapatkan bantuan gedung baru.

Masih terkait dengan peran DPR, Prof. Dr. Ida Bagus Yudha Triguna, M.S. menjelaskan dalam workshop “Penelitian Dinamika Pendidikan Hindu di Tingkat Lokal, Nasional, dan Global” di UNHI 12 Februari 2019 lalu, bahwa lembaga legislatif memiliki peran penting dan strategis untuk memperjuangkan regulasi terkait dengan pendidikan agama Hindu. Sebagai contoh, perihal ketentuan pasraman formal dan non formal telah diulas dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Keagamaan Hindu. Diantaranya menyebutkan bahwa pasraman formal adalah “jalur pendidikan pasraman yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi” sementara pasraman non formal adalah “jalur pendidikan di luar pasraman formal yang dilaksanakan secara terstruktur.”

Aturan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui keberadaan pasraman sebagai sebuah institusi pendidikan agama Hindu yang sah secara hukum. Namun demikian, peraturan tersebut tidak memuat pasal-pasal yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban mendukung penyelenggaraan anggaran pasraman formal. Secara fungsi, pasraman formal dapat memiliki kedudukan sejajar dengan madrasah bagi umat Islam. Bedanya, penganggaran untuk madrasah memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Artinya, penyelenggaraan pendidikan termasuk pengangkatan guru madrasah menjadi tanggungjawab negara.

Pasraman pada dasarnya berpotensi untuk memperoleh posisi yang serupa dengan madrasah dengan catatan harus memiliki dasar hukum yang adekuat. Hal ini seyogyanya menjadi perjuangan para anggota DPR RI untuk bisa mewujudkan misi penting untuk mendukung pendidikan agama Hindu bagi umat di seluruh daerah di Indonesia.

Peran Lembaga Keagamaan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Sumatera Selatan

PHDI secara umum berperan untuk mengayomi umat Hindu di wilayahnya baik secara agama maupun sosial. PHDI membantu memecahkan permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat. Secara sosial, organisasi ini berperan melindungi dan memperjuangkan kepentingan umat ke berbagai pihak terkait. Oleh karenanya, PHDI juga berupaya membina hubungan baik dengan berbagai lembaga, organisasi, jajaran pemerintahan, legislatif dan intitusi lainnya baik di tingkat lokal, nasional dan internasional. PHDI juga bertugas untuk mengembangkan dan merawat keharmonisan internal dan antar umat beragama.

Kegiatan PHDI di suatu daerah dapat ditentukan dari kebutuhan umat di daerah tersebut. Saat ini PHDI di Sumatera Selatan masih memperjuangkan pengangkatan guru agama Hindu di sekolah-sekolah jenjang SD sampai SMA. Dalam hal pendidikan, PHDI juga ikut membangun dan mengelola pasraman dan bekerjasama dengan para penyuluh agama Hindu untuk memberikan pelayanan bagi umat Hindu di wilayahnya. Secara khusus, PHDI di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang berusaha mendata dan mendaftarkan seluruh tempat ibadah dan pasraman di wilayahnya. Data ini diminta oleh Bimas Hindu Kanwil Agama Provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah jika hendak mengajukan proposal bantuan untuk pembangunan, renovasi atau penyediaan sarana prasarana pura dan pasraman.

Untuk mempersiapkan umat mengikuti Utsawa Dharma Gita tingkat nasional serta guna memperdalam pemahaman agama serta memperkuat kebersamaan, beberapa PHDI di Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan seni budaya dan olahraga di kabupatennya. Kabupaten OKI aktif mengadakan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) setiap tahun. Porseni tersebut terdiri dari beberapa perlombaan seperti kompetisi membuat jejaitan (dan menjelaskan maknanya) bagi WHDI di OKI, lomba palawakya, sloka, makekawin dan makidung, pertandingan bola voli antar warga dan sebagainya. Selain itu, di tingkat kecamatan juga digelar acara hampir serupa selama dua kali dalam setahun.

Kegiatan ini sekaligus untuk menyeleksi perwakilan terbaik Kabupaten OKI untuk berlaga di ajang Utsawa Dharma Gita. Hasilnya, pada UDG tingkat Nasional XIII Tahun 2017, perwakilan Sumatera Selatan menduduki peringkat ke-12 secara umum dan mereka mayoritas berasal dari Kabupaten OKI. Selain kompetisi, PHDI Kabupaten OKI juga berinisiatif menyelenggarakan kegiatan diskusi tingkat nasional yang merefleksikan agama Hindu dan memproyeksikan agama dan umat Hindu di masa depan.

PHDI Kabupaten OKI bercita-cita mendirikan koperasi simpan pinjam yang dikelola secara mandiri oleh umat. Koperasi ini diniatkan dapat membantu kebutuhan umat seperti mencukupi dana untuk menjalankan upacara *ngaben* yang selama ini menjadi momok sebagian umat. Selain itu, bila sewaktu-waktu dibutuhkan dana untuk kegiatan sosial seperti mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam, dapat diambil dari koperasi simpan pinjam atas kesepakatan seluruh anggota koperasi. Dengan adanya koperasi, diharapkan dapat menyediakan dana beasiswa yang bisa diperuntukkan bagi anak-anak kurang mampu.

PHDI di daerah juga dapat berperan penting dalam penyelesaian masalah rumah tangga dan perceraian. Hal tersebut diakui oleh Ketua PHDI Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur, Gusti Putu Armawan. Biasanya permasalahan tersebut coba dipecahkan secara adat terlebih dahulu, jika tidak bisa, dibawa ke desa dinas. Dan bila masih belum terselesaikan, pihak terkait akan meminta pandangan kepada PHDI.

PHDI memiliki sejumlah organisasi yang bernaung di bawahnya, seperti Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Prajaniti Hindu Indonesia. Dari wawancara dengan Ketua WHDI Kabupaten OKI, diperoleh informasi bahwa WHDI umumnya sudah dibentuk hingga ke desa-desa di Sumatera Selatan. Kegiatannya secara umum berkutat di seputar *ngayah*, penyelenggaraan pesantian dan persiapan serta latihan untuk mengikuti Utsawa Dharma Gita.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Utomo, Bambang. 2005. *Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya*
- Menuju Palembang Modern*. Palembang: Dinas Pariwisata Budaya Pemkot Palembang.
- “Data Keagamaan Hindu tahun 2017” Bimas Hindu Kanwil Dept. Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- “Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut (orang), 2014.” Kanwil Dept. Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- “Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/ Kota dan Agama yang Dianut (orang), 2015-2017.” Kanwil Dept. Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
- Abdullah, Ma'moen. 1991/1992. *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Propinsi Sumatera Selatan.
- Levang, Patrice. 2003. *Ayo Ke Tanah Sabrang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rapanie, Ahmad, et al., 2010. *Kerajaan Sriwijaya Beberapa Situs dan Artefaknya*. Palembang: Museum Negeri Sumsel.
- Siregar, Sondang Martini. 2018. “The Statues, Plants and Animals in The Region of Bumiayu Temple Tanah Abang Sub District, Penulak Abal Ilir Regency.” *Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability*. 2 (2018)
- Sulistyaningsih, Cahyo. 2017. *Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya*. Palembang : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya.
- Transmigrasi: Masa Doeloe, Kini dan Harapan ke Depan*. 2015. Jakarta: Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
- Utomo, Bambang Budi. 2010. *Atlas Sejarah Indonesia Masa Klasik (Hindu-Buddha)*. Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

DINAMIKA HINDU DI PROVINSI DKI JAKARTA

I Ketut Ardhana
Fransiska Dewi Setiowati Sunaryo

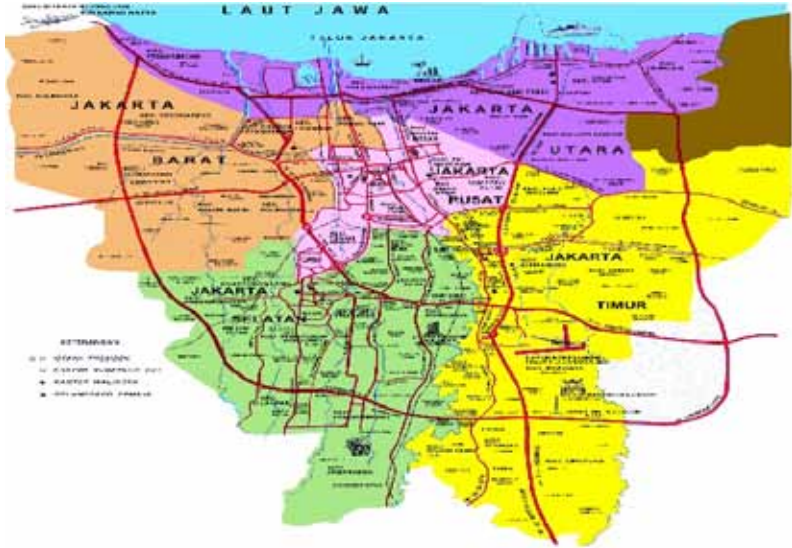
Hindu di Jakarta boleh dikata telah berkembang selama periode yang cukup panjang sebagaimana agama-agama lainnya. Proses sejarah dan migrasi yang lintas agama dan etnis di Jakarta telah membentuk kehidupan masyarakat yang multibudaya. Kehidupan masyarakat multibudaya seperti ini merupakan potensi sosial dan budaya yang sangat dibutuhkan dalam merawat kehidupan masyarakat Indonesia yang bhinneka. Oleh karenanya amat menarik menelusuri lebih jauh perihal dinamika Hindu di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Jakarta yang berjarak sekitar 1000 km dari Bali memiliki komunitas umat Hindu yang sebagian besar berasal dari Pulau Seribu Pura ini. Umat Hindu di Jakarta memiliki praktek ritual dan keagamaan dengan tradisi adat mereka sendiri yang sudah berlangsung secara turun temurun sepanjang sejarahnya. Walau demikian, tak berarti mereka hidup secara eksklusif, melainkan tetap berbaur dengan etnis lainnya seperti etnis Jawa, Tengger, Badui, dan sebagainya yang juga telah menjalankan praktek ritual dan keagamaan mereka secara turun temurun. Walau demikian, umat Hindu di Jakarta dapat hidup harmonis dan memiliki toleransi tinggi, meskipun Jakarta memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Di samping itu terdapat pemeluk umat lainnya yang menganut agama Kristen (tentang Kristen, baca: Steenbrink, 2004: 109), Katholik, Budha, Konghucu dan sebagainya.

Secara administrasi pemerintahan, Jakarta yang merupakan daerah khusus ibukota dikelompokkan menjadi lima wilayah kota

administrasi yang terdiri atas: Kota Administratif Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km², Jakarta Utara dengan luas 142,20 km², Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km², dan Kota Administratif Jakarta Timur dengan luas 187,73 km², serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km². Sepanjang 35 km pantai membentang di sebelah utara Jakarta yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal, sementara di sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah Barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah Utara dengan Laut Jawa (Sumber: Perda No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012© 1995 - 2018 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta).

Sebagai sebuah ibu kota negara, Jakarta tentu menjadi salah satu barometer perkembangan Hindu di Indonesia. Tidak mengherankan jika berbicara tentang Hindu di Indonesia tentu tidak terlepas dari kantong-kantong umat Hindu yang terdapat di daerah sekitarnya. Dapat dimengerti, jika di beberapa daerah di Jakarta dibangun tempat suci umat Hindu seperti pura di Jakarta Timur, Jakarta Utara dan di tempat lainnya. Misalnya saja di provinsi lainnya seperti di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor telah dibangun sebuah pura atau Parahyangan Jagatkarta sebagai tempat yang mempunyai arti signifikan dalam pembinaan umat Hindu di Jawa Barat pada khususnya yang memiliki hubungan dengan umat Hindu yang ada di Jakarta dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pembangunan pura atau tempat suci umat Hindu ini sebagai sebuah wahana agar umat dapat melaksanakan dharma agamanya dengan baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi geografis yang sangat mendukung di samping aspek mobilitas sosial penduduk yang tinggi sangat berpengaruh terhadap dinamika umat Hindu di Jakarta pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.



Peta Provinsi DKI Jakarta

Persoalan-persoalan sosial budaya masyarakat Kota Jakarta memang tidak dapat dilepaskan dari keadaan atau struktur demografinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk Kota Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 11: Jumlah Penduduk Kota Jakarta Berdasarkan Agama

Kota/Kabupaten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	KCH	Jumlah
Kepulauan Seribu	21,009	24	3	6	0	0	21,082
Kodya Jakarta Selatan	1,896,152	97,872	44,549	4,736	11,970	443	2,062,232
Kodya Jakarta Timur	2,416,360	190,137	57,330	4,511	12,312	603	2,693,896
Kodya Jakarta Pusat	752,465	76,784	30,195	3,481	29,035	538	902,973
Kodya Jakarta Barat	1,803,612	205,112	103,681	2,792	160,291	2,458	2,281,945
Kodya Jakarta Utara	1,311,198	154,303	67,537	4,838	103,919	1,292	1,645,659
Provinsi DKI Jakarta	8,200,796	724,232	303,295	20,364	317,527	5,334	9,607,787

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010-Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa penduduk Jakarta yang menganut agama Hindu terbanyak adalah pertama Propinsi DKI Jakarta, Kodya Jakarta Selatan, Kodya Jakarta Timur, dan diikuti dengan Kodya Jakarta Utara, Kodya Jakarta Pusat dan Kodya Jakarta Barat. Ini tentu jumlah yang sangat kecil, jika dibandingkan dengan jumlah penganut agama Islam sebagai agama dominan yang dianut penduduk Jakarta. Akan

tetapi yang terpenting dari keadaan ini adalah bahwa bukan masalah mayoritas dan minoritas, tapi yang dikedepankan adalah bagaimana sesama warga Jakarta yang terdiri atas berbagai agama, etnisitas, tradisi, bahasa dan perbedaan yang lainnya dapat hidup secara damai, terintegrasi dalam konteks masyarakat multibudaya dan bukan masyarakat monobudaya.

Tambahan pula, dari tabel di atas, terdapat beberapa alasan mengapa penduduk Jakarta yang memeluk agama Hindu terbanyak terdapat di DKI Jakarta yaitu adanya beberapa mereka yang memiliki pekerjaan dinas yang tugasnya berada di DKI Jakarta. Di antara mereka kebanyakan terdiri atas dinas militer atau tentara yang sudah mendapat tugas di ibukota negara. Namun demikian, perlu dicatat untuk wilayah-wilayah yang letaknya terpinggirkan misalnya di Kepulauan Seribu jumlah umat Hindu tidak sebanyak yang ada di Jakarta yaitu sebesar 6 (enam) orang dan untuk umat Budha memang tidak terdapat di wilayah Kepulauan Seribu itu.

Kehidupan umat Islam sebagai mayoritas penduduk di wilayah itu sangat memainkan peranan penting di samping penduduk yang menganut agama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan sebagainya. Ini dapat dimengerti dimana propinsi yang berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta seperti Provinsi Banten merupakan provinsi yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dengan kata lain, selain Islam, terdapat umat Kristen dan Katolik yang bertempat tinggal sebagian besar di kawasan pantai utara Jakarta seperti di wilayah Tanjung Priok. Didaerah Jakarta, terdapat tiga pura besar yang memainkan peran penting sebagai identitas budaya bagi umat Hindu dalam kaitannya dengan terbentuknya masyarakat multibudaya di ibu kota negara itu. Pertama, yaitu Pura Aditya Jaya Rawamangun di Jakarta Timur (Lihat: Suka Duka Hindu Dharma Banjar Jakarta Timur, *Sekilas tentang Pura Aditya Jaya Rawamangun*, 2009), yang diinterpretasikan sebagai Pura Desa untuk Dewa Brahma. Kedua Pura di Cijantung di Jakarta Timur sebagai Pura Puseh untuk Dewa Wisnu, dan ketiga Pura Cilincing di Jakarta Utara sebagai Pura Dalem untuk Shiwa. Dari deskripsi ini lengkaplah keberadaan pura-pura utama di Jakarta yang dipertimbangkan sebagai Tri Kahyangan atau Pura Kahyangan Tiga yang menjadi

pengikat budaya dalam konteks kehidupan masyarakat Hindu di sebuah wilayah dalam hal ini di Jakarta. Perlu dijelaskan, bahwa konsep Kahyangan Tiga merupakan konsep sosial budaya, dan bukan dalam konteks konsep politik. Oleh karena itu, konsep ini dipahami sebagai indikator budaya yang melekat dalam konteks kehinduan.

Dapat dipahami, bahwa orang Bali, orang Jawa dan etnis yang lainnya yang beragama Hindu tentu dapat mengapresiasi konsep budaya ini, yang dipahami sebagai sebuah pedoman umat Hindu yang ada di wilayah di luar Bali. Dalam praktiknya ritual dan upacara keagamaan Hindu dilaksanakan di pura-pura ini, dimana disebutnya banyaknya umat Hindu yang mengadakan persembahyangan di tiga pura itu. Misalnya saja pada perayaan hari raya Hindu yang datang setiap enam bulan sekali seperti Hari Raya Galungan dan Kuningan mereka pergi ke pura-pura tersebut untuk melakukan persembahyangan bersama-sama.

Dalam buku *Mengenal Pura Mustika Dharma Katha (Sejarah Dharma Mandira Katha)* disebutkan sebagai berikut:

“Terutama hari raya Galungan kali ini bagi kita adalah sangat penting artinya karena dibarengi oleh Peletakan Batu Pertama dari Pura Mustika Dharma, tempat ibadah kita umat Hindu yang ada di Jakarta khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, dengan tidak ada perbedaan apakah dari Anggota ABRI, orang Sipil, Pegawai, Buruh, Pedagang, Pelajar serta Mahasiswa dan lain-lainnya. Pendeknya pura ini adalah untuk seluruh umat Hindu adanya tanpa kecuali dan tidak terbatas hanya untuk ABRI saja, sekalipun ini akan dibangun dan diwujudkan atau diprakarsai oleh saudara-saudar kita dari umat Hindu yang berada di bawah naungan Puspassus, atas perkenan dan ijin komandan Puspassus yang sangat kami hargai dan muliakan. Dengan adanya Peletakan Batu Pertama ini mudah-mudahan Hari Raya Galungan ini merupakan tonggak sejarah pertama dari rentetan sejarah kebahagiaan-kebahagian dan kedamaian rohani kita semua dan mudah-mudahan pula tempat ini atau Pura Mustika Dharma kita ini akan merupakan tonggak pertama juga dari rentetan tempat-tempat Ibadah Agama Hindu di wilaya Jakarta ini.”

Dapat dikatakan bahwa dengan berdirinya pura-pura yang dianggap Kahyangan Tiga itu, maka seluruh umat Hindu yang ada di Jakarta memiliki sebuah tempat sembah yang harus dirawat, dipelihara dan dipertahankan demi keberlangsungan

Hindu di Jakarta pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Parahyangan Agung Jagatkarta, di Bogor

Tidak hanya di Jakarta, di Kabupaten Bogor dibangun pula sebuah pura yang bernama Parahyangan Agung Jagatkarta, yang terletak di bukit atau Gunung Salak. Menurut catatan sejarah, Pakuan Pajajaran (sekarang Bogor) adalah ibukota kerajaan Sunda yang merupakan satu kerajaan Hindu terakhir di Jawa bersamaan dengan Kerajaan Majapahit-yang mengalami masa kejayaannya pada masa kekuasaan Raja Siliwangi. Ini terjadi sebelum Kerajaan ini diserang oleh kelompok Muslim Jawa pada abad ke-16 (Tentang pergumulan ini di era modern, baca: Ramstedt, 2004: 1-34, lihat juga: Hefner, 2004: 93). Pura yang dibangun di dataran tinggi Gunung Salak ini sebagai Pura Kahyangan Jagat yang dibangun pada tahun 1995 oleh komunitas Hindu Nusantara untuk mengupayakan berdirinya Pura Kahyangan Jagat untuk komunitas Hindu Bali yang bertempat tinggal di Jakarta. Dapat disebutkan bahwa di dalam Pura Parahyangan Jagat ini terdapat mandala utama seperti Padmasana, Balai Pesamuan Agung, pintu gerbang utama atau paduraksa di mana kemudian dilakukan pelebaran akses jalan menuju ke pura ini. Sebelum memasuki pura parahyangan jagat ini terdapat Pura Melanting dan Pura Pasar yang digunakan secara khusus untuk persembahyangan Agung (https://en.wikipedia.org/wiki/Pura_Parahyangan_Agung_Jagatkarta).

Pura terbesar di Provinsi Jawa Barat, dan pura terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Besakih ini memiliki luas lahan lebih dari tiga hektar. Pura Jagatkarta ini adalah Pura Hindu Nusantara yang terletak di Desa Ciapus, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Indonesia. Keistimewaan dari Parahyangan Jagatkarta ini karena dapat menghimpun relasi umat Hindu yang ada di tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten. Ada tradisi atau kepercayaan lokal yang diyakini pernah terjadi di wilayah Gunung Salak dimana Parahyangan Jagatkarta didirikan. Misalnya saja dipercaya akan adanya getaran-getaran magis yang dipercaya sebagai sesuatu yang melindungi umat Hindu

yang bersembahyang ke Parahyangan Jagatkarta ini. Tambahan pula, bahwa di wilayah pura atau Parahyangan Jagatkarta ini dipercaya sebagai tempat suci untuk mengenang Prabu atau Raja Siliwangi dari Pakuan Pajajaran--pada masa Kerajaan Hindu Klasik di daerah Parahyangan—dimana ia dipercaya sebagai *Hyang* yang didewakan sebagai simbol spirit nenek moyang. Ricklefs, M.C. (1991), dalam bukunya yang berjudul, *A History of Modern Indonesia since c.1300, 2nd Edition*. London: MacMillan. ISBN 0-333-57689-6, mencatat bahwa Prabu Siliwangi mencapai mokshanya di tempat ini.

Pura Aditya Jaya di Rawamangun, Jakarta Timur

Pada saat kekuasaan di bawah Presiden Soekarno tampak menyanggupi untuk menyediakan sebidang lahan untuk dibangun sebuah pura. Menurut ingatan beberapa narasumber bahwa sebidang lahan diberikan di Lapangan Banteng yang berada di Jakarta Pusat. Perencanaan saat itu disebutkan bahwa Soekarno mempunyai sebuah pemikiran untuk membangun masjid, gereja dan kemudian pura umat Hindu di Jakarta. Tampaknya saat itu, selain masjid dan gereja, pembangunan pura belum dapat dilaksanakan, karena alasan keterbatasan pendanaan untuk pembangunannya. Karena lama tidak dibangun, maka tanah tersebut digunakan oleh Departemen Keuangan. Selanjutnya ada rencana lagi untuk memberikan sebidang tanah di wilayah Ancol. Akan tetapi, umat Hindu tampak menolaknya, karena kawasan tersebut masih berupa rawa-rawa. Selanjutnya sempat ditawarkan untuk dikaji berkaitan dengan penyediaan sebidang tanah di kawasan Senayan, tetapi menemui jalan buntu. Berikutnya dikatakan bahwa karena tanah yang di Ancol lama tidak dibangun, kemudian kawasan itu dijadikan Taman Ria Ancol, maka hingga saat itu umat Hindu belum berhasil memiliki sebuah tempat suci sebagai sebuah wadah untuk mengayomi Umat Hindu yang ada di Jakarta.

Menurut catatan sejarah salah satu tahapan dalam perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi adalah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Ini dimaksudkan untuk memastikan apakah penduduk Irian Barat ingin merdeka berdiri sendiri sebagai satu negara, tetap merdeka dalam Kerajaan

Belanda atau merdeka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, kerja keras Pemerintah Indonesia, akhirnya Irian Barat dapat bersatu dengan Republik Indonesia dengan menjadi sebuah provinsi. Terdapat sebuah kisah tentang umat Hindu menurut catatan cerita lisan yang diperoleh, dijelaskan bahwa pada tahun 1969 bermula dari datangnya Kompi Brimob dari Denpasar yang kebanyakan terdiri atas orang-orang Bali. Kompi Brimob yang dimaksud adalah yang berasal dari Kereneng Bali pindah ke Jakarta yang ditempatkan pada satu tempat.

Pada saat perayaan Galungan yang dihadiri Presiden Soekarno saat itu lalu umat meminta kepada presiden agar mereka dibuatkan sebuah pura sebagai tempat persembahyangan umat Hindu di Jakarta dan sekitarnya. Dengan kata lain, penting untuk dicatat, bahwa sebagaimana disebutkan di sini yaitu pada saat Operasi Pepera inilah terdapat satu batalyon dari Kodam Udayana yang bertugas melaksanakan operasi keamanan. Saat itu, anggotanya sebagian besar terdiri dari putra-putra yang berasal dari Bali. Pada awalnya Kodam Udayana ini bermarkas di Pulau Lombok, namun pada saat penugasan di Irian, mereka membangun *Home Base* di Pulau Biak Papua. Dapat dikatakan, bahwa penduduk memberikan tanah yang dipercaya bahwa tanah itu memiliki kekuatan magis atau keramat. Akan tetapi, mereka tidak berani menempatnya, karena banyak anggotanya yang beragama Hindu, maka di atas bagian tanah yang dianggap keramat itu kemudian dibangun pura.

Disebutkan bahwa pada saat itu terdapat beberapa prajurit dari Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat yang mengikuti operasi keamanan, yang dikenal dengan Operasi Wibawa. Mereka berjumlah 150 orang, yang terdiri atas perwira, bintara, dan tamtama yang dipimpin oleh Kapten Infantri Faisal Tanjung dalam Operasi Wibawa. Mereka diberangkatkan dari Jakarta pada 18 Februari 1969. Adapun tugas pokok yang dilaksanakan adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif, agar kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia dapat dirasakan oleh seluruh rakyat di Irian Barat. Berbagai upaya dilakukan agar Pepera berhasil dengan baik, sehingga Irian Barat tetap menjadi wilayah Republik Indonesia. Dalam Pasukan Sandi Yudha ini terdapat

beberapa perwira di antaranya Lettu Inf Sintong Panjaitan, Lettu Inf. Wismoyo Arismunandar, Lettu Inf. Susyadi, Lettu Inf. Sarmono, Lettu Inf. Hadiritma, Lettu Inf. Lutfi Banser, Lettu Com Bondan Hariono, Lettu Inf. Kuntara, dan Lettu Inf. Saparwadi. Pasukan yang dikenal dengan nama Sandhi Yudha ini bertugas selama delapan bulan. Ketika tugas mereka diselesaikan dengan baik, maka mereka berkumpul di Biak sebelum dipulangkan ke markas di Jakarta.

Kemudian barulah diberikan sebidang tanah yang berada di wilayah Rawamangun. Kisahnya diawali dengan adanya seorang pemborong yaitu Ngurah Mandra seorang pegawai di DKI Jakarta dan mempunyai sebuah PT yang diberikan tugas membangun jalan tol Jakarta Cirebon. Setelah jalan negara itu selesai dibangun diberi nama Jalan Tol I Gusti Ngurah Rai seorang pahlawan revolusi dari Bali pada tahun 1972. Hingga pada tahun 1972, tampaknya umat mulai membangun sebuah tempat persembahyangan misalnya di Taman Ria Ancol sempat dibangun sebuah bale wantilan, walau dengan keadaan yang serba terbatas. Sekarang menjadi Pizza kemudian dijadikan restoran Jepang (Nippon). Jumlah angkatan Brimob pada saat itu berjumlah sekitar 500 orang yang terdiri atas prajurit Brimob dan perawat. Karena ada keinginan membangun sebuah pura, maka dibuat sebuah yayasan yaitu Yayasan Pita Maha yang mengajukan permohonan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jakarta untuk dijadikan lahan di Rawamangun menjadi sebuah pura. Pada saat itu tampaknya disetujui karena yang menyetujui tidak hanya pengurus yang terdiri atas orang Bali, tetapi juga non Bali seperti Suhartin dari Dinas PU Jakarta.

Pemberi nama pura di Rawamangun adalah Ida Pedanda Sidemen, seorang yang bekerja di Angkatan Darat. Konsep pura yang dibangun di Rawamangun merupakan konsep yang dianalogikan sebagai Pura Desa sebagai bagian dari Kahyangan Tiga sebagaimana yang terdapat di Bali. Pura Aditya Jaya selesai dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Prayogo Atmodarminto. Pada saat itu yang dibangun adalah padmasana, riya pedanda, pelinggih anglurah, *wantilan jaba tengah*. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 1976 baru dilanjutkan dengan pembangunan Kori

Agung. Ida Pedanda Sidemen yang memberi nama pura ini juga sering bersemadi di pura ini. Pembangunan tahap ketiga ketika dibangunnya *bale wantilan* di *jaba sisi* pada tahun 1986 dan Bale Kulkul dibangun tahun 1988. Setelah Pura di Rawamangun selesai dibangun, kemudian diikuti dengan pendirian beberapa pura di Cijantung dan di Cilincing.

Pada tahun 1991 sampai dengan 1995 renovasi dan pembangunan bale wantilan yang kemudian dilanjutkan dengan membuat pasraman. Kegiatan ini sesuai dengan kegiatan umat Hindu di Jakarta pada khususnya yang melaksanakan kegiatan pasraman di sekitar pura yang umumnya dikenal sebagai sekolah minggu. Pada umumnya di Indonesia fungsi pura memiliki tiga aspek yaitu ritual, kegiatan sosial dan pendidikan. Pada umumnya di sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP dan SMU di Jakarta murid yang beragama Hindu tidak mendapatkan pendidikan agama Hindu. Oleh karena itu, pura menyediakan pelayanan pendidikan sekolah minggu yang memberikan pelajaran agama Hindu. Tidak mengherankan terdapat pendirian yayasan untuk penyelenggaraan pendidikan agama Hindu tersebut. Pada penyelenggaraan sekolah-sekolah minggu ini, nilai agama Hindunya diakui oleh sekolah negeri. Dengan adanya kerjasama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional dikeluarkan Surat Keputusan tentang pasraman Agama.

Disebutkan adanya pengakuan untuk membolehkan penyelenggaraan pendidikan agama yang diakui oleh pemerintah. Ini artinya bahwa penilaian yang dilakukan terhadap murid-murid SD, SMP, SMA yang menempuh pelajaran agama Hindu diakui oleh pemerintah. Keberhasilan membuat pasraman agama ini kemudian dilanjutkan dengan pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara yang perkuliahannya dilaksanakan di Jatiwaringin. Murid yang berasal dari berbagai daerah dibolehkan mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Sementara itu animo masyarakat untuk menyekolahkan pendidikan agamanya juga dilakukan di Bali seperti adanya Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN). Ini dapat dilihat ketika diadakan kegiatan di UNJ para mahasiswa meminjam tempat parkir di luar pura Rawamangun yang bernama Pura Aditya Jaya. Namun ini bukan berarti tidak ada masalah dengan masalah

parkir. Tampaknya terjadi tahun 2017, dimana ada seorang oknum yang mau mengganggu antara umat Hindu dengan umat Islam dengan mengatakan bahwa di lingkungan pura tidak diizinkan untuk menempatkan atau parkir kendaraan. Dengan secara cepat pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Jakarta (tentang PHDI, baca: Bagus, 2004: 86-90) menangkap oknum yang dimaksud dengan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi gangguan hubungan antara umat Hindu dan Islam di Jakarta. Di pura Rawamangun diselenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Forum Komunikasi antar Umat Beragama yang diadakan secara berpindah-pindah mulai di pura, masjid, gereja dan sebagainya. Waktu puasa umat Hindu juga menyajikan konsumsi. Umat Hindu dan Islam se-Jabodetabek sering mengadakan kegiatan bersama. Kegiatan bersama diadakan dengan umat Hindu dan Islam dalam kaitannya dengan tempat penyelenggaraan atau peminjaman tempat parkir di sekolah yang berdekatan dengan pura Rawamangun yaitu dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Pada saat pujawali sering datang lebih dari 10 bus yang dari datang dari berbagai daerah di Jakarta. Pengempon pura di Jakarta masing-masing lebih dari 50 KK atau bahkan lebih dari 100 KK. Apabila berita duka, biasanya pengurus pura menanyakan kepada keluarga yang memiliki kedukaan berkaitan dengan bagaimana penanganan ritual kematian dan setelah itu pengurus pura akan menanyakan ke pemangku pura berkaitan dengan tata cara upacara ngaben yang akan dilaksanakan di Jakarta atau kremasi atau dibawa ke Bali. Biasanya jika tidak ada hari baik lalu menggunakan pejati satu saja. Di Jakarta bagi umat Hindu tidak diperkenankan menginapkan mayat lebih dari 1x24 jam karena dianggap dapat mengganggu hubungan dengan umat lainnya di Jakarta. Kemudian dicarikan hari baik dengan menanyakan ke pemangku. Biaya ngaben diperlukan sebesar Rp20 juta, biaya ngeligia Rp16 juta rupiah, dan ngelanus Rp35 juta, atau ada yang melaksanakan ke Nyekah dengan melaksanakan bersama dengan keluarga mereka di Bali. Di Jakarta, biaya bantuan yang diberikan dari yayasan sebesar Rp7,5 juta per KK/ tahun, bantuan dari tempek sebesar Rp5 juta dan diberikan konsumsi. Bagi

kelompok Waisnawa biaya ngaben diperlukan hanya Rp14 juta.

Situasi yang membedakan dengan di Bali adalah bahwa di Jakarta tidaklah memiliki kuburan sebagaimana yang ada di Bali, karena kuburan yang ada di Jakarta hanya diperuntukkan bagi bayi yang meninggal dunia. Apabila ada yang meninggal dunia, pada umumnya jenazah/ mayat itu dibawa untuk dikremasi ke tempat kremasi yang dimiliki umat Budha atau Cina atau mereka membawa jenazah yang meninggal ke Bali sesuai dengan daerah asal mereka. Alasannya adalah bahwa akan menjadi sempurna menurut keyakinan mereka jika proses ritual dan keagamaan dilakukan di Bali yang mana relasi sosial dan budaya memiliki kedekatan dengan kearifan lokal yang mereka miliki, yaitu berkaitan dengan *Sanggah Kemulan*. *Sanggah Kemulan* terdiri atas tiga kompartmen yang di sebelah kanan sebagai simbul laki, di kiri wanita dan yang di tengah adalah sebagai kompartmen untuk Dewa Shiwa. Berdasarkan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa Shiwa sebagai dewa tertinggi yang dianut di Bali. Ini adalah konsep yang dikembangkan oleh Mpu Kuturan yang dianggap sebagai representasi Pura Besakih sebagai pura yang memiliki tafsiran Shiwa sebagai dewa tertinggi. Adanya gambaran ini melukiskan bagaimana terjadinya hubungan agama Hindu di India dengan Bali.

Dari gambaran ini dapat dikatakan bahwa paham Hindu di Indonesia meskipun dipercaya sebagai satu agama, namun praktik-praktik ritual dan keagamaan yang bersifat lokal tampaknya memperkaya khazanah kehinduan di Indonesia. Tidaklah mungkin menerapkan praktik ritual dan keagamaan yang sama seperti di India. Namun demikian, tentu ada beberapa tantangan dalam menerapkan bagaimana mengaplikasikan agama Hindu di Kepulauan Nusantara.

Pura Mustika Dharma di Cijantung, Jakarta Timur

Kisah dimulai ketika pasukan setelah sampai di Irian Barat. Pada saat menunggu di Biak, anggota Sandhi Yudha yang beragama Hindu melaksanakan persembayangan bersama. Saat itu, Komandan Prayudha 1 menginstruksikan kepada Prajurit I Ketut Darmi dan Prajurit Ida Bagus Made Oka Suidiana untuk membahas beberapa hal berkaitan dengan keberadaan anggota

yang menganut agama Hindu untuk dapat melaksanakan persembahyangan bersama. Pada saat itu, komandan mengatakan bahwa yang bertugas saja sempat membangun pura. Bagaimana halnya dengan pasukan ini juga memiliki markas di Cijantung dan memiliki tanah yang luas, semestinya mampu membangun sebuah pura yang sangat diharapkan oleh umat Hindu di Jakarta dan daerah sekitarnya.

Prajurit yang hadir itu menjawab, bahwa mereka hanya bawahan, tentu tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk membangun pura. Kemudian komandan menyampaikan bahwa ia akan mendorong dengan membantu setelah sampai di Jakarta. Kisah ini menjadi awal pemikiran untuk membangun sebuah pura di Cijantung. Pura yang dibangun di Cijantung ini nantinya sebagai Pura Puseh untuk Dewa Wisnu. Setelah kembali ke Jakarta, semua Prajurit RPKAD kembali ketempat masing-masing di Kesatrian A. Yani Cijantung. Selanjutnya, Lettu Inf Wismoyo Arismunandar menghadap Komandan Group 4 yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf. Suryo Hanjono. Ia memohon ijin untuk membangun pura di kompleks RPKAD Cijantung. Ini disebabkan karena banyak anggotanya yang beragama Hindu. Letkol Inf. Suryo Hanjono bersama-sama Lettu Inf. Wismoyo Arismunandar dan beberapa prajurit yang beragama Hindu menghadap komandan RPKAD yang pada waktu itu dijabat oleh Brigjen TNI Witarmin. Tampaknya setelah menghadap maka permohonan mereka dikabulkan. Selanjutnya komandan RPKAD menugaskan Asisten Personil menunjukkan tempat lokasi tanah yang diizinkan seluas 50x50 meter untuk pendirian sebuah pura. Oleh karena itu, Komandan mengeluarkan Surat Keputusan No-001/7/1970 tentang Pembangunan Pura Kesatrian A. Yani dengan menetapkan Panitia Pelaksana Pembangunan.

Tokoh-tokoh umat Hindu yang berperan penting sebagai Panitia Pembangunan Pura:

Kolonel Inf. A Kodim	: Pelindung
Mayor Inf. Sunyo Hanjono	: Penasehat Umum
Lettu Inf. Budihanjo	: Penasehat Kelompok Kerja
Serma Ida Bagus Wayan Oka	: Ketua
Serda I Dewa Gde Patra	: Wakil Ketua

Kopda I Wayan Ridja	: Penulis
Pelda Ida Bagus Nyoman Pandji	: Bendahara
Serma I Ketut Darmi	: Seksi Usaha I
Koptu Ida Bagus Nyoman Wedha	: Seksi Usaha II
Koptu I Ketut Sukaraja	: Seksi Usaha III
Sertu Ida Bagus Made Oka	: Seksi Bangunan I
Serda I Ketut Sweden	: Seksi Bangunan II
Koptu I Gusti Gde Pawana	: Seksi Perhubungan I
Pratu I Gusti Ketut Persina	: Seksi Perhubungan II

Dari nama-nama tersebut tampak bahwa yang menjadi pelindungnya adalah Kolonel Inf. A. Kodim, yang menunjukkan dari namanya ia bukanlah dari etnis Bali, melainkan dari etnis Jawa. Demikian dengan penasehat umum yaitu Mayor Inf. Sunyo Hanjono dan penasehat kelompok kerjanya, yaitu Lettu Inf. Budihanjo. Hanya posisi Ketua yang dijabat oleh orang Bali yaitu Serma Ida Bagus Wayan Oka dan ini menunjukkan ada kerjasama yang baik antara orang Bali dengan pejabat-pejabat di atasnya yang bukan orang Bali dalam upaya merealisasikan pembangunan sebuah pura di Jakarta. Saat itu, Kepala Dinas Rohani Hindu TNI-AD dijabat oleh Letkol Ida Padanda Gde Wayan Sidemen. Panitia Pembangunan melaporkan dengan pembangunan Pura di Komplek RPKAD itu kepada Kepala Dinas Rohani Hindu untuk mohon petunjuk dan tuntunannya dalam pelaksanaan Pembangunan. Kepala Dinas Rohani Hindu Angkatan Darat bersedia membantu. Beliau beberapa kali bertemu dengan Panitia Pelaksana di kediaman Ida Bagus Wayan Oka untuk lebih memantapkan perencanaan. Dalam suatu pertemuan tidak formal dengan beberapa orang anggota panitia terdetuslah nama pura yang akan dibangun. Mula-mula nama yang muncul sebagai usulan adalah Pura Mustika, namun kemudian dari usulan yang muncul diputuskan nama Pura Mustika Dharma. Tentang nama pura yang dibangun tentu tidak terlepas dari makna keberadaan dari nilai-nilai dalam Pedoman Hidup Prajurit yaitu Sapta Marga. Ini terkait terutama dengan Marga ketiga yang intinya adalah mengutamakan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dari Pura Mustika Dharma diharapkan pancaran nilai-nilai kebenaran akan menerangi Kehidupan insani *Mengenal Pura Mustika Dharma Mustika Dharma Mandira Katha* (Sejarah Pura

Mustika Dharma, Naskah belum diterbitkan).

Sebelum peletakan batu pertama, terlebih dahulu ada acara yang sering disebut “Ngruwak Karang” yaitu mengukur dan menentukan tempat bangunan-bangunan apa saja yang akan dibangun. Upacara Peletakan Batu Pertama dilaksanakan pada Hari Raya Galungan pada 9 September 1970. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan upacara Peletakan Batu Pertama untuk bangunan utama di pura, yaitu untuk kedudukan Padmasana. Upacara dipimpin oleh Ida Padanda Gde Wayan Sidemen, Kepala Dinas Rohani Hindu Angkatan Darat, dibantu dan dilayani oleh seluruh personilnya. Hadir pula tokoh-tokoh umat Hindu yang ada di Jakarta, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat diwakili oleh Tjokorda Rai Sudharta MA, sedangkan dari Puspasus dihadiri langsung oleh Komandan yaitu Brigjen Witarmin beserta jajarannya. Setelah upacara Peletakan Batu Pertama dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Kepala Dinas Rohani Hindu Angkatan Darat memberikan sambutannya sebagai berikut.

Dengan telah dilaksanakan Pecetakan Batu Pertama, maka dimulailah pembangunan pura. Pada tahap awal Panitia Pembangunan mulai menggalang dari kalangan umat Hindu sendiri dan juga dari kalangan non Hindu yang bersimpati. Bakat kegigihan dan keuletan Panitia yang terdiri dari para prajurit komando ini dapatlah didatangkan bahan bangunan berupa batu bara dan paras dari Bali beserta tukang bangunan sekalian. Hampir setiap hari diluar jam kantor, mereka bekerjabakti membantu tukang mengajarkan pekerjaan yang dapat mereka kerjakan. Pada pembangunanan tahap pertama ini berhasil diwujudkan Palinggih Padmasana, Pangrurah, dan Bale Pawedaan(Bale Pemujaan). Padmasana tingginya kira-kira tujuh setengah meter. Seluruhnya diukir demikian juga Pangrurah kira-kira dua meter juga diukir seluruhnya. Selain itu selesai juga Candi Bentar dengan bahan batu bata kombinasi paras ukir dan Tembok Penyengker Keliling masih polos dengan tinggi kira-kira seratus dua puluh sentimeter, belum pakai dekorasi. Untuk masuk ke pura harus lewat penjaga, tidak ada Jalan lain. Dengan selesainya bangunan-bangunan pokok, maka dilanjutkan dengan Upacara Pemlaspas dan Ngenteg Linggih. Dipilih saat Hari yang baik yaitu pada hari Raya Galungan Tanggal 3 Nopember 1971. Upacara mulai pagi hari dipimpin oleh Ida Padanda Gde Wayan Sidemen Kepada Dinas Rohani Hindu Angkatan Darat didukung Ida Padanda Istri Wayan Sidemen beserta seluruh personil Dis Roh Hindu AD. Upacara dihadiri oleh tokoh-tokoh umat Hindu Jakarta, Suku Duka Hindu

Dharma DKI Jakarta di wakili oleh I Gusti Ngurah Mandra, dari Parisada Hindu Pusat Tjokorda Rai Sudartha MA, beserta ratusan umat Hindu DKI Jakarta. Sedangkan dari Puspasus RPKAD hadir Brigjen TNI Wirtamin beserta jajarannya. Setelah upacara protokoler dilanjutkan dengan upacara keagamaan yaitu Upacara Pamplaspas dan Ngenteg Linggih :

- 1. Upacara Mamarisudha Karang, mensucikan seluruh Palemahan Pura dengan sarana pokok Pecaruan di natar pura dan persembahan sesaji pada setiap sudut pekarangan pura.*
- 2. Upacara Sakralisasi (mensucikan) setiap bangunan, dimulai dari Bangunan Utama Padmasana, dengan mapulang Padagingan pada dasar bangunan, di tengah-tengah, dan pada Ulon (puncak) bangunan berupa pripih yang terdiri dari Panca Datu (lima logam mulia), demikian pula padingingan pada bangunan Pangrurah dan Candi Benter.*
- 3. Upacara Nyambut Siwi, dilakukan oleh sulinggih upacara khusus mohon Perkenan kehadiran Yang Maha Kuasa (Sang Hyang Widhi) dalam manifestasinya sebagai penguasa alam semesta untuk berkenan melinggih di Padmasana untuk menjadi pujaan umat. Demikian pula kehadiran Ratu Angrurah Sakti melinggih di Pangrurah sebagai ameng-ameng Pura.*
- 4. Mempersembahkan Sesaji Persembahan, juga persembahan dari umat yang hadir pada semua palinggih.*
- 5. Persembahyangan Bersama, dipimpin langsung oleh Ida Padanda yang dibantu oleh beberapa Pemangku (Pinandita).*

Ketika diselenggarakan piodalan perdana di Pura Mustika Dharma, banyak umat Hindu menghadiri acara ritual keagamaan itu. Umat Hindu se-Jakarta menghadiri secara beramai-ramai acara ritual keagamaan di Pura Mustika Dharma. Tampak kehadiran umat Hindu dari Tanjung Priok Jakarta Utara yang ngiring Pakuluh Ida Bhatara Pura Dalam Purnajati. Adapun acara prosesi berjalan kaki dilaksanakan dari depan pos penjaga yang pada waktu itu berada pada pertigaan jalan sebelah Taman Bundar di samping Hutan Kalimantan. Diiringi oleh ratusan orang yang bersama-sama ke pura melalui gerbang utama Pos Piket Ksatrian menuju ke pura menempuh jalan kurang lebih satu kilometer. Peristiwa ini dapat dianggap sebagai kehadiran berbentuk umat Hindu se-Jakarta. Pada sore hari bertepatan dengan Hari Raya Galungan dilaksanakan pemujaan bersama (persembahyangan) sebagai tanda Piodalan Pura Mustika Dharma.

Dapat dikatakan bahwa sejak hari itu setiap hari ada saja umat yang melakukan persembahyangan secara perorangan atau berkelompok ke Pura Mustika Dharma. Ada beberapa hambatan yang berkaitan dengan tidak adanya pendidikan agama bagi siswa-siswi Hindu baik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun pada Sekolah Menengah Atas. Untuk itu dibentuklah Sekolah Agama Hindu yang dikenal dengan nama Pasraman di Pura Mustika Dharma. Selain itu, ada juga yang diselenggarakan pada rumah warga. Untuk itu, dibangunlah ruang kelas semi permanen di belakang Balai Pemujaan, sebanyak tiga kelas. Bertahun-tahun pembelajaran dilaksanakan di sana, bahkan pernah ada beberapa siswa dari Karawang yang datang ikut belajar pada Pasraman Pura Mustika Dharma yang diadakan pada hari Minggu. Guru pertama yang mengajar pada Pasraman ini adalah Ida Bagus Wedha yang juga anggota RPKAD. Dapat dikatakan bahwa karena seringnya dilaksanakan persembahyangan perorangan maupun kelompok terjalinlah komunikasi yang baik antar warga. Acara diskusi keagamaan pun dilakukan dalam kaitannya dengan peningkatan kegiatan kelompok. Ida Padanda Gde Wayan Sidemen memberikan arahan untuk Upacara Piodalan tidak usah membuat Upacara Besar, cukup Upacara Madya atau sederhana saja. Untuk itu, karena didorong oleh situasi seperti itu dan sesuai petunjuk Padanda ditetapkanlah setiap Upacara Piodalan selalu upacara sederhana. Lambat laun, maka untuk mendukung pelaksanaannya dibentuklah Organisasi Suka Duka Hindu Dharma dengan menunjuk Nyoman Suweca sebagai ketuanya. Organisasi sangat sederhana seperti banjar di Bali pada umumnya, tidak ada program kerja, dan tugas utamanya adalah mempersiapkan Upacara Piodalan. Saat itu ditetapkan, bahwa Ida Bagus Made Oka sebagai Pemangku, yang kemudian diberikan tugas oleh Ida Bagus Oka Pin (Pinandita). Istrinya adalah seorang tukang banten di Cijantung. Akan tetapi saat ini, mereka sekeluarga sudah pindah ke Bali.

Bulan September 1979, Kapten Ketut Bantas BA pindah dari Kobangdiklat AD Bandung ke Jakarta. Saat itu, ia menjabat Staf Dinas Rohani Hindu Angkatan Darat. Ia bertemu dengan Nyoman Saweca untuk menyampaikan agar mau menjadi

Ketua Suka Duka. Suka Duka Hindu Dharma Cijantung tampak memulai aktivitasnya. Anggota semakin bertambah seperti dari Bek Ang, Pusdikkes, sehingga mencapai lebih kurang 70 (tujuh puluh) orang. Berkembanglah pemikiran membuat jalan sendiri ke pura. Ini disebabkan, merasa tidak enak masuk melalui Penjagaan apalagi waktunya kalau bersamaan dengan Upacara Pergantian Petugas Jaga. Selama itu memang nama pura dikenal sebagai Pura Kopassus RPKAD. Kemudian diajukanlah permohonan agar umat Hindu Cijantung diizinkan mengelola pemanfaatan Pura Cijantung dan sekaligus membangun sarana dan prasarana jalan menuju ke pura. Tampaknya permohonan itu diizinkan, karena Kopassus mempunyai *Master Plan* (Rencana Induk).

Sebelum berdirinya Yayasan Mandiri Widayaka, berbagai kelompok umat Hindu mengajukan dana pembangunan kepada Pemda DKI Jakarta karena tidak adanya kesatuan umat. Gubernur DKI Jakarta yang pada waktu itu dijabat Ali Sadikin bukannya membantu malah memberi disposisi, orang Bali bersatu dulu baru minta bantuan. Gara-gara disposisi itulah baru kemudian berdirilah Yayasan Mandiri Widayaka yang semula tujuan utamanya adalah mengkoordinasi pembangunan pura. Berulang kali ketua Tempek Cijantung meminta bantuan selalu ditolak dengan alasan Pura Mustika Dharma adalah Pura Kopassus.

Setelah berulang kali diadakan pendekatan akhirnya permintaan biaya disetujui namun Suka Duka Cijantung harus mengajukan sendiri ke Pemerintah Daerah. Aturan yang berlaku pada waktu itu permohonan bantuan dana pembangunan ke Pemda harus melalui Walikota. Made Sudiarta yang berasal dari Jakarta Barat dan juga sebagai seorang pensiunan polisi berpangkat Inspektur Jenderal Made Sudiarta dan Walikota Effendi waktu itu pernah tugas bersama-sama di Pasar Baru saat sama-sama berpangkat kapten. Effendi sebagai Danramil sedangkan Made Sudiarta sebagai Kapolsek. Benar saja hanya selang sebulan jawaban sudah turun dari Pemda DKI. Terlebih dahulu Pemda DKI akan mengadakan peninjauan ke Pura Mustika Dharma untuk mengecek dokumen-dokumen yang mendukung keberadaan pura. Setelah ditunjukkan dokumen yang menyatakan Komando mengizinkan umat Hindu Jakarta

dan umat Hindu Cijantung khususnya untuk menggunakan tanah dan mengelola Pura Mustika Dharma serta surat keterangan dari kantor Kelurahan Cijantung yang menyatakan Pura Mustika Dharma satu-satunya pura umat Hindu di Cijantung, barulah Pemda DKI menyetujui bantuan dana. Sebelum dana turun, Pemda DKI melalui Biro Kesra dan Kantor Agama DKI juga meninjau bangunan pura dan meneliti dokumen yang ada. Bantuan dana disetujui sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Disebutkan bahwa suatu saat ada keinginan untuk memindahkan pura, karena perluasan Kesatrian mengarah pada pembangunan untuk Heli Pad. Akan tetapi rencana itu ditolak, karena umat Hindu tidak punya biaya untuk itu. Perwira Rohani Hindu Kopassus adalah Kapten I Wayan Sumadi. Beberapa bulan kemudian Perwira Rohani Hindu dipanggil komandan diberi tahu bahwa pura tidak jadi dipindahkan. Tidak lama kemudian Danjend Kopassus pindah ke Irian Barat, digantikan oleh Mayor Jendral Prabowo Subianto. Pada waktu itu pohon Beringin di pura sudah tumbuh besar, cabang dan daunnya rimbun melebar. Pada saat musim kemarau daunnya yang kering-kering rontok diterbangkan angin sampai ada yang masuk kedalam Kesatrian. Komandan marah sambil mengancam minta agar pohon beringin ditebang saja. Lagi-lagi Pura mau dipindahkan. Kali ini mau dipindahkan sekalian dengan mesjid dan gereja. Tempat yang ditunjuk adalah tanah miring di samping sekolah dasar Fadillah. Tidak berselang lama malah tanpa alasan yang jelas Danjend Kopassus Mayor Jendral Prabowo Subianto dicopot bahkan dihadapkan kepada Dewan Kehormatan. Keinginan memindahkan pura gagal total.

Waktu Mayjen Wisnu Bawa Tenaya menjabat Danjen Kopassus, Utama Mandala diperlebar 4 meter lagi arah keluar sepanjang tembok penyengker. Selain itu papan nama pura yang sudah ada dekat tembok penyengker pura ditambah lagi dengan yang lebih luas dan lebih lebar, dimajukan kedepan tepat pada awal jalan menanjak ke pura. Perlu pula ditambahkan kedatangan Gede Wetra memastikan bahwa fasilitas umum seperti pasar, tempat ibadah, dan lain-lain harus menyediakan tempat parkir. Untuk keperluan itu ia menganjurkan supaya membangun

tempat parkir. Kemudian dibangunlah tempat parkir di samping jalan raya seluas 100x50 meter. Karena keterbatasan dana semula dibangun dengan aspal kasar dan tipis, sehingga gampang berlubang-lubang. Sesuai dengan anjuran Gede Wetra, maka lengkaplah fasilitas-fasilitas Pura Mustika Dharma. Mengingat tanah-tanah di sekitar pura masih luas, tentu akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya

Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan wantilan dengan ukuran 12x10 meter, sejajar dengan tembok sepanjang Candi Bentar. Dengan demikian pembangunan wantilan selesai seluruhnya. Pada waktu itu Suka Duka Hindu Dharma Tempek Cijantung jumlahnya sudah mencapai kira-kira 70 Kepala Keluarga. Karena warga Perbekalan Udara (Perbekud) sudah bergabung demikian juga warga Perbekalan Angkutan (Bekang). Mereka semua dengan ikhlas masih ikut menjadi penyungsum pura. Selain dilaksanakan pembangunan wantilan, juga dilakukan pembangunan untuk renovasi Padmasana. Atas petunjuk dari Ida Pidanda Istri Pidada Kemiten, pembangunan dilanjutkan untuk merenovasi Padmasana. Ida Padanda Istri memberi arahan bahwa Padmasana lama tidak perlu dibongkar, jadikan Inti dari Padmasana hasil renovasi, agar "Pedagingan" tetap terjaga. Padmasana dibangun setinggi kira-kira sebelas meter, berdiri tegak di tengah-tengah kolam yang mengelilingi dasar bangunan. Badawangnala dibelit dua ekor naga yakni Naga Amanta Bhoga dan Naga Basuki, yang sesungguhnya adalah Naga Kayangan.

Demikian pula dengan pembangunan gedung pasraman, dengan alasan bahwa siswa-siswa Hindu tidak di semua sekolahnya ada guru Agama Hindu, maka suka duka berinisiatif membangun gedung pasraman dan Bale Kulkul. Pasraman adalah tempat di mana anak-anak dapat belajar menekuni pendidikan agama Hindu yang dianggap penting sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan. Bale Kulkul dibangun dengan maksud sebagai sarana komunikasi dan informasi dari para warga penyungsum pura. Bangunan Bale Kukul ini dibuat menjulang tinggi agar suara kentongan terdengar dari jauh. Bale Kulkul ini juga dibangun dengan sarana semen pasir. Hanya saja pasir halus (*bias melela*) didapat dari Selat Sunda, dikirim oleh Ngakan

Sugiarta WaDan Yon Kopassus yang bermakas di Tarakan. Pada waktu itu tempat pasir yang biasanya diambil dari Pondok Bali sudah tidak ada lagi akibat dari pembangunan dermaga pendaratan para nelayan pantai Utara. Dalam mitosnya kulkul atau kentongan adalah Bangunan Bale Kulkul bersambungan dengan bangunan tembok penyengker batas Kanista Mandala dengan Madya Mandala. Bangunan ini dibuat dari batu bata merah dan dikombinasi dengan paras Bali yang berwarna abu-abu. Bangunan ini juga dilengkapi dengan Candi Bentar, segaris dengan Candi Bentar bangunan lama.

Dengan selesainya bangunan ini lengkaplah pura menjadi Tri Mandala: *Kanista Mandala*, *Madya Mandala*, dan *Utama Mandala*. Berdekatan dengan Bale Kulkul terdapat pohon beringin yang sudah tumbuh besar. Dipercaya pula bahwa bibit pohon beringin ini dibawa dari Bali. Adalah Mayor Jendral Sang Nyoman Suwisma yang waktu itu menjabat Wakil Komando Kopassus menyambung pagar untuk merapikan batas Ksatrian, menyebabkan tanah lowong sekitar lebar 9 (sembilan) meter dan panjang 50 meter. Karena diizinkan memanfaatkan tanah tersebut, maka Suka Duka membangun 4 (empat) ruang kelas untuk siswa-siswi Hindu, dan rumah untuk penjaga pura yang semula di tempati oleh Pinandita Made Putra Yadnya, dan membangun kamar mandi sebanyak 6 (enam) unit.

Pendidikan Hindu di Kota Jakarta.

Jumlah guru agama Hindu di sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2019 masih minim. Selama ini pendidikan agama Hindu, khususnya di sekolah umum, tidak terpenuhi dengan guru-guru yang ada. Lantaran tidak semua sekolah umum memiliki tenaga pengajar agama Hindu, kebanyakan siswa menerima ajaran agama Hindu di Pura di 12 Pura di DKI Jakarta sekali per minggu. Pengajarnya berasal dari perguruan tinggi atau praktisi. Penilaian pelajaran agamanya dilakukan dengan sistem laporan dari pengajar di pura ke sekolah terkait agar bisa menjadi bagian penilaian dalam rapor. Berikut ini daftar nama guru Agama Hindu SD PNS di DKI Jakarta.

Tabel 12: Daftar Nama Guru Agama Hindu PNS Tingkat SD
2018 DKI Jakarta

No.	Nama	NIP	TTL	Pangkat/Gol.	Tempat Tugas	Kota/ Kabupaten	Tahun Lulus Sertifikasi	NRG
1	I Nengah Sutirka,S.Ag	196309291986031015	Tabanan, 29 September 1963	IV/a	SDN Kabilata 01 pagi Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	2009	090901370003
2	Ni Wayan Sridani,S. Ag.M.Pd	196806061988042001	Klungkung, 6 Juni 1968	IV/b	SDN Bintaro 14	Jakarta Selatan	2009	090901370004
3	Ni Ketut Rastini,S.Pd.	196206011988042001	Bali, 1 Juni 1962	IV/a	SDN Cijantung 03 pagi Jakarta Timur	Jakarta Timur	2010	101535377037
4	I Made Karyawan,S. Ag	196610121988041002	Bali, 12 Oktober 1966	IV/a	SDN Pondok Kelapa 12 Petang Jakarta Timur	Jakarta Timur	2010	101740897027
5	Sunarno,A. Ma.	196206111982011001	Blitar, 11 Juni 1962	IV/a	SDN Susukan 07 Pagi Jakarta Timur	Jakarta Timur	2012	121372667002
6	Giyarta,S. Pd.H.	196606102006041001	Gunung Kidul, 19 Agustus 1971	III/b	SD Putra 1 Jakarta Timur	Jakarta Timur	2013	131372614009
7	I Nyoman Weja,S.Pd.	1966032170000031001	Ngidah, 21 maret 1966	III/a	SDN Semper Timur 01 pagi Jakarta Utara	Jakarta Utara	2012	12137662012
8	Triyana,S.Pd.	196610202000031002	Klaten, 20 oktober 1966	III/a	SDN Slipi 01 pagi Jakarta Barat	Jakarta Barat	2012	121372691008
9	Duwijo,S. Pd.H.	196512272005011002	Sragen, 27 Oktober 1965	III/b	SDS Angkasa 09 pagi/petang Jakarta	Jakarta Timur	2012	121372698011
10	Dra. Ni Nyoman Sukiartini,M. Pd.	196503132000032001	Kamasan Klungkung, 13 Maret 1965	IV/a	SDN Kembang Selatan 01 pagi Jakarta Barat	Jakarta Barat	2012	121372668008

Sumber : Bimas Hindu DKI Jakarta Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah guru Agama Hindu di tingkat SD hanya ada 10 orang itu melayani seluruh siswa Hindu di Jakarta. Sistem pendidikan sudah diatur dalam Undang-undang. Akan diatur apakah itu akan diselenggarakan hari Sabtu atau Minggu. DKI Jakarta tercatat memiliki penduduk beragama Hindu sebanyak 105 ribu jiwa. Sementara, hanya ada 12 pura yang ada di lima wilayah Ibukota. Diketahui, pelajaran agama telah diatur dalam Pasal 12 (1) butir A UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan sebuah pengabdian warga negara terhadap bangsa dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Salah satu Pendidikan Agama Hindu yang ada di Jakarta didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Mandira Widhayaka. Yayasan ini mendapat dukungan penuh dari para orang tua siswa serta masyarakat yang peduli dengan pendidikan keagamaan Hindu di DKI Jakarta. Yayasan Mandira Widhayaka (YMW) sebagai penyelenggara pendidikan yang peduli dengan pengembangan SDM generasi muda Hindu mendidik anak-anak sejak dini agar mempunyai dasar sruada dan bhakti yang kuat.

Yayasan menyadari bahwa secara demografi siswa-siswa yang beragama Hindu kedudukannya tidak merata ataupun terkumpul dalam lokasi sekolah tertentu di DKI Jakarta, sehingga jumlah siswa-siswi yang beragama Hindu di sekolah-sekolah umum DKI Jakarta tidak banyak. Oleh karena itu Yayasan Mandira memanggil dan mengajak siswa-siswa tersebut berkumpul belajar agama Hindu pada Pasraman/ Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Mandira yang tersebar di JABODETABEK. Yayasan Mandira Widhayaka (YMW) didirikan sejak tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 1.3.033.KEP.76, tanggal 1 Juli 1976 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Agama Hindu bagi pelajar-pelajar yang beragama Hindu pada Sekolah/ Kursus Negeri dan Swasta di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menunjuk Yayasan Mandira Widhayaka sebagai penyelenggaranya, telah membuka pasraman sebagai berikut:

- a. Jakarta Utara : Pasraman Purna Jati Tanjung Priok
- b. Jakarta Timur : Pasraman Aditya Jaya Rawamangun, Pasraman Mustika, Dharma Cijantung, Pasraman Cibubur, Pasraman Tamansari Halim Perdana Kesuma
- c. Jakarta Barat : Pasraman Candra Praba Jelambar
- d. Jakarta Pusat : Pasraman Satya Dharma Tanah Abang (Dalam persiapan)
- e. Jakarta Selatan : Pasraman Amrta Jati Cinere, Pasraman Kestria Loka POMAD Kalibata, Pasraman Pondok Karya Marinir Cilandak, Pasraman Santi Wahana Lenteng Agung, Pasraman Purna Widya Kelapa Dua Brimob

- f. Bekasi : Pasraman Tirta Bhuwana Bekasi
- g. Tangerang : Pasraman Pamulang (<http://mandirawidhayaka.mysch.id/>)

Selain Yayasan Mandira Widhayaka, ada pula sekolah Hindu yang didirikan di Jakarta bernama Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara, sekolah ini didirikan pada 19 Maret 1998 Nomor SK : Kep. Dirjen Bimas Hindu dan Budha No.H/3, jumlah dosen 13 orang dengan jumlah mahasiswa 135 orang. Ada dua Jurusan di Sekolah Tinggi ini yaitu Pendidikan Agama Hindu dan Penerangan Agama Hindu.

Keberadaan Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta mendapat tempat yang semakin penting. Dimana pengembangan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan menjadi prioritas. Diharapkan melalui penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Hindu, kualitas mental dan spiritual umat Hindu akan semakin meningkat. Secara historis, pemikiran tentang pentingnya Pendidikan Agama Hindu diawali dengan adanya himbauan dari Ida Pedanda Gede Sebali Tianyar Arimbawa kepada tokoh masyarakat di Jakarta. Himbauan tersebut disambut oleh para cendekiawan yang tergabung dalam Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI), diwujudkan dalam seminar yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 1995 bertempat di Plaza Kertawijaya Denpasar. Para Tokoh Hindu merespon amanat yang telah diseminarkan dengan mendirikan Yayasan Dharma Nusantara yang bergerak di bidang pendidikan, mendirikan Sekolah Tinggi Theologi Hindu (STTH). Kuliah perdana dilaksanakan pada bulan September 1995, diikuti oleh 24 mahasiswa dan memilih lokasi di kompleks Pura Aditya Jaya Rawamangun Jakarta Timur. Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan saran sesepuh yakni I Ketut Pasek, B.A maka nama Perguruan Tinggi diganti dari Sekolah Tinggi Theologi Hindu (STTH) menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH). Proses pengurusan status Perguruan Tinggi di bawah Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta terdaftar dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: H/3A/SK/1998 tertanggal 19 Maret 1998. (https://stahdnj.ac.id/?page_id=2)

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, I Gusti Ngurah. 2004 "The Parisada Hindu Dharma Indonesia in a Society in Transformation: The Emergence of Conflicts amidst differences and demands", dalam Martin Ramstedt (ed.). *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National, and Global Interests*. London dan New York: Routledge Curzon.
- Hefner. Robert F. "Hindu Reform in an Islamizing Java: Pluralism and Peril", dalam Martin Ramstedt (ed.). *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National, and Global Interests*. London dan New York: Routledge Curzon.
- _____. *Mengenal Pura Mustika Dharma Mustika Dharma Mandira Katha* (Sejarah Pura Mustika Dharma, Naskah belum diterbitkan).
- Ricklefs, M.C. (1991). *A History of Modern Indonesia since c.1300, 2nd Edition*. London: MacMillan.
- Ramstedt, Martin. 2004. "Introduction, Negotiating Identities- Indonesian Hindus between Local, National and Global Interests", dalam Martin Ramstedt (ed). *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National, and Global Interests*. London dan New York: Routledge Curzon.
- Steenbrink, Karel. 2004. "Ethnic, National and International Loyalties of Indonesian Christians", dalam Martin Ramstedt (ed). *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National, and Global Interests*. London dan New York: Routledge Curzon.
- Suka Duka Hindu Dharma Banjar Jakarta Timur. 2009. *Sekilas Tentang Pura Aditya Rawamangun*. Jakarta.

Sumber Internet :

(https://stahdnj.ac.id/?page_id=2)

(<http://mandirawidhayaka.mysch.id/>)

Daftar Informan

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan
1	I Gusti Ngurah Udiana	1955	Pegawai Departemen Agama
2	Nyoman Sucaya	Badung, 17 Mei 1956	Ketua Pengurus Pura Rawamangun
3	I Gusti Made Mudana	Badung, 16 Agustus 1964	Pembimas Hindu DKI Jakarta

LAMPIRAN FOTO



**Foto 7. PURA ADITYA JAYA RAWAMANGUN
DOK. MILIK PENULIS**



**Foto 8. UMAT HINDU SEDANG SEMBAHYANG
DI PURA ADITYA JAYA RAWAMANGUN
DOK. MILIK PENULIS**



Foto 9. PRASASTI NGENTEG LINGGIH DI PURA ADITYA
JAYA RAWAMANGUN
DOK. MILIK PENULIS



FOTO 10 PEDANDA SEDANG MELAKUKAN UPACARA TIGA
BULANAN
DOK. MILIK PENULIS



Foto 11. PURA DALEM PURNAJATI, CILINCING JAKARTA
UTARA
DOK. MILIK PENULIS



Foto 12. WANTILAN PURA DALEM PURNAJATI TANJUNG
PURI, CILINCING,
JAKARTA UTARA



Foto 13. PURA MUSTIKA DHARMA CIJANTUNG JAKARTA
TIMUR
DOK. MILIK PENULIS

DINAMIKA HINDU DI JAWA TENGAH

Sulandjari

Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai jantungnya Pulau Jawa beribukota di Semarang, dan memiliki Hari Jadi pada 15 Agustus 1950. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Secara geografis dan budaya, Jawa Tengah seringkali meliputi juga Daerah Istimewa Yogyakarta.



Peta Provinsi Jawa Tengah

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, provinsi ini dibagi menjadi 5 wilayah/ *gewesten*, yakni Semarang, Kedu, Banyumas, Pati dan Pekalongan. Sementara Surakarta masih dimasukkan

sebagai daerah khusus wilayah kerajaan (*vorstenlanden*). Pada tahun 1930 provinsi ini ditetapkan sebagai wilayah otonom, yang terbagi menjadi beberapa karesidenan dan kabupaten serta kawedanan (sekarang kecamatan). Setelah kemerdekaan pada tahun 1945 pemerintah menjadikan wilayah Surakarta yang semula terdiri atas dua pusat pemerintahan, seperti Keraton Mangkunegaran dan Kasunanan sebagai wilayah karesidenan. Tahun 1959 kemudian ditetapkan bahwa secara administratif Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Ditetapkannya peraturan itu dalam bentuk Undang-Undang tahun 1950, kemudian diperingati sebagai hari jadi Provinsi Jawa Tengah yakni 15 Agustus 1950(Wikipedia :[http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah)).

Sebagai wilayah karesidenan, Surakarta pada 16 Juni 1946 terdiri atas satu kotapraja (sekarang disebut sebagai kotamadya), dan enam wilayah kabupaten. Wilayah karesidenan ini terbagi menjadi satu Kotamadya Surakarta serta kabupaten-kabupaten: Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukaharja, Klaten dan Boyolali. Kota Surakarta yang sekarang juga masih disebut sebagai wilayah eks Karesidenan Surakarta sering pula disebut sebagai Solo Raya, yang memiliki pengertian sebagai suatu wilayah geografis di Jawa Tengah yang meliputi Solo/ Surakarta sebagai pusat yang dikelilingi oleh wilayah beberapa satelit (Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen). Sebutan ini sebenarnya terkait dengan wilayah penyebaran atau kantong pemukiman umat Hindu yang berada di Jawa Tengah, yakni Boyolali, Karanganyar, dan Klaten yang menjadi studi penelitian ini.

Secara umum wilayah Jawa Tengah merupakan daerah pertanian, perkebunan dan peternakan (sapi potong/perah dan kerbau) perikanan dan kehutanan. Jadi, dapat dimengerti bahwa terutama umat yang ada di daerah satelit itu mayoritas bermatapencarian sebagai petani, kemudian ada pedagang atau pengusaha terkait dengan hasil perkebunan, dan perikanan. Sementara itu di Kodya/Kota Surakarta sendiri banyak umat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru dan dosen, serta pegawai swasta (Neiji Gamers: <http://tawondast.blogspot.com/2017/03/sumber-daya-alam-provinsi-jawa-tengah.html>).

Secara demografis, dari keseluruhan jumlah penduduk

Jawa Tengah, etnis Jawa memiliki persentase jumlah terbesar yakni sekitar 86 %, sisanya (14%) terbagi untuk etnis lainnya (seperti Tionghoa, Sunda), sementara Agama Islam memiliki persentase jumlah tertinggi yakni sekitar 96,28 %. Sisanya terbagi untuk Kristen Protestan sejumlah 1,91%, Katolik 1,42%, Hindu 0,20%, Budha 0,18%, dan lainnya 0,01%. Jumlah umat Hindu di Jawa Tengah yang secara presentase menunjukkan 0,20% berarti mencapai angka sekitar 8.969 jiwa, yang tersebar di berbagai kabupaten: Klaten (2575 jiwa), Karanganyar (1456), Boyolali (998), Sragen (507), Kota Surakarta (189) dan Semarang(843).

A. SEJARAH HINDU DI JAWA TENGAH

Data historis menunjukkan bahwa Hindu sudah ada di wilayah Jawa Tengah sejak abad ke-6, yakni dengan berdirinya Kerajaan Kalingga yang lokasinya berada di pesisir utara Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, bersama dengan Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kerajaan ini (Kalingga) yang dipimpin Ratu Shima, merupakan pendahulu dari Kerajaan Mataram Kuna. Diduga kerajaan ini berpusat di wilayah di pesisir Laut Jawa di sekitar Pekalongan. Peninggalan Kerajaan Kalingga adalah Prasasti Sojomerto dan Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas bercerita tentang sebuah mata air di lereng Gunung Merapi, menyerupai Sungai Gangga di India. Sedangkan Prasasti Sojomerto bercerita tentang seorang tokoh bernama Dapunta Sailendra. Terdapat juga prasasti lain berbahasa Sangsekerta yang berada di Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Kadiluwih, Distrik Salam, Kedu Selatan. Isi prasasti itu antara lain menyebutkan tentang pendirian *lingga* di Pulau Jawa, oleh Raja Sanjaya (Sartono Kartodirdjo, et.al: 78-79).

Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan perjalanan waktu berabad-abad lamanya, penguasaan raja-raja Hindu di Jawa Tengah ternyata berpengaruh dalam praktik keagamaan masyarakat di Jawa Tengah. Pada gilirannya terjadi semacam akulturasi antara nilai-nilai spiritual agama Hindu dengan pandangan hidup masyarakat Jawa, yang pada akhirnya membentuk apa yang disebut sebagai kejawen. Eksistensi spiritualitas dan mistisisme Jawa yang masih eksis hingga saat ini sangat dipengaruhi oleh spiritual Hindu/Budha yang datang

sebelum Islam. Kejawen merupakan agama dan pandangan hidup orang Jawa, yang mengacu pada seperangkat tatanan hidup yang diyakini oleh masyarakat Jawa baik sebagai agama maupun sebatas nilai-nilai pandangan hidup dalam bingkai tradisi. Kejawen merupakan agama lokal yang diyakini dianut oleh leluhur orang Jawa, jauh sebelum kedatangan agama-agama Hindu, Budha, Kristen dan Islam. Sebagai tradisi kejawen merupakan pandangan hidup yang berpengaruh dalam praktik keagamaan orang-orang Jawa dalam agama-agama di atas. Kejawen merupakan salah satu pandangan dan praktik spiritual, yang pada umumnya memiliki persamaan yakni menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantarnya. Selain itu simbol-simbol yang berhubungan dengan tradisi Jawa seperti keris, wayang, gamelan, mantra menjadi sarana yang penting dalam praktik spiritual kejawen. Tuhan Yang Esa serta nilai-nilai keseimbangan hidup dan keluhuran budi menjadi dasar dari ajaran kejawen. Dua bentuk ritual yang biasanya dilakukan adalah: bertapa dan puasa (wawancara dengan Michel Indrawati 48 tahun, Ketua Yayasan Budilaksanapada 12 November 2018 di Pura Sahasra Adipura).

Perkembangan umat Hindu di Jawa Tengah pada mulanya lebih terkonsentrasi di wilayah di sekitar Candi Prambanan. Pada masa kini, perkembangan agama Hindu Jawa berlangsung secara berbeda-beda di setiap wilayah. Pada wilayah sekitar candi, seperti Yogyakarta, perkembangan agama Hindu lebih bersifat sporadis. Sementara di wilayah Klaten perkembangan Hindu Jawa mengalami persentase tertinggi. Cukup sering terjadi bahwa keberadaan candi atau situs Hindu di suatu daerah akan berpengaruh bagi masyarakat lokal untuk menghubungkan diri kembali dengan agama Hindu.

Tahun 1967 tersebar informasi di masyarakat bahwa mengikuti salah satu agama yang dianggap sah sesuai Undang Undang merupakan solusi terbaik bagi mereka yang belum masuk agama tertentu yang ada di Indonesia. Informasi ini muncul sebagai dampak dari kekhawatiran masyarakat saat itu, khususnya pasca Gerakan 30 September 1965. Sebagian masyarakat menduga, bila ada di antaranya yang belum menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia, kemungkinan akan

“dicap” sebagai komunis. Kondisi itu kemudian direspon oleh pemerintah waktu itu dengan memfasilitasi usaha penyuluhan dari tokoh-tokoh berbagai agama kepada masyarakat—yang sering disebut sebagai—*kejawen*, agar dapat segera menentukan pilihan agamanya. Pilihan itu selanjutnya akan segera disahkan melalui sistem administrasi kependudukan, yakni pembuatan identitas diri dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebagian dari kalangan masyarakat *kejawen* menyatakan bahwa esensi ajaran agama Hindu tampaknya lebih banyak memiliki kesesuaian dengan dasar ajaran *kejawen* (hasil wawancara dengan Anak Agung Darmaja 54 tahun, TNI AD Kodam Diponegoro pada tanggal 10 November 2018, di Pura Giri Natha Semarang).

Tanggal 29 Maret 1967 menjadi tonggak perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah, yakni ketika penganut *kejawen* yang dipimpin oleh seorang tokoh spiritual *kejawen* yang berasal dari keluarga lingkungan keraton Baluwarti Surakarta, R.Hardjanta Pradjapangarsa, melakukan upacara *sudhiwadani* atau melaksanakan konversi ke agama Hindu yang diadakan oleh Parisadha Hindu Dharma Yogyakarta (Dra. Nukning Sri Rahayu, M.SI: 31-32). Upacara ini merupakan upacara yang wajib dilakukan bagi umat non Hindu yang ingin memeluk agama Hindu. Upacara ini tidak saja berfungsi sebagai pencatatan administratif bagi yang menjalankannya, tetapi juga bermakna sebagai bentuk penyucian diri dan pernyataan spiritual bahwa yang bersangkutan siap melaksanakan seluruh ajaran agama Hindu. Dalam pidato sambutan acara itu dikatakan bahwa Bali menjadi benteng terakhir dari kebudayaan Hindu Majapahit, yang khususnya dipancarkan dari daya magis Pura Besakih, Pura Silayukti, Gunung Agung dan Gunung Rinjani. Perkembangan umat Hindu di Jawa Tengah ini juga didorong oleh adanya migrasi orang-orang Bali terutama dari wilayah Kabupaten Karangasem di Bali Timur ke luar Bali setelah Gunung Agung meletus pada tahun 1963.

Selanjutnya R. Hardjanta Pradjapangarsa giat melakukan perjalanan ke wilayah Surakarta dan sekitarnya yaitu Karanganyar, Boyolali, dan Klaten untuk memberi motivasi bagi penganut *kejawen*/ kebatinan untuk melakukan upacara

sudiwardani yang menetapkan Hindu sebagai pilihan agama yang dianutnya. Mayoritas dari mereka memilih untuk memeluk agama Hindu, karena menurut mereka ada kedekatan prinsip dalam pemahaman dan kebiasaan dalam implementasi kepercayaan mereka dengan Agama Hindu (hasil wawancara dengan Atmo Sentono 60 tahun, Pemangku Pura Tunggal Ika Desa Kemuning, pada 12 November 2018, di Desa Kemuning). Sekitar 12.000 orang di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, dan 10.000 orang di Candi Prambanan mengikuti upacara *sudiwardani* secara massal sebagai tanda bahwa mereka memutuskan untuk konversi memeluk agama Hindu. Suatu jumlah yang sangat besar, sehingga sempat terjadi kekurangan surat formulir pernyataan. Muncullah kemudian kantong-kantong wilayah pemukiman masyarakat Hindu (Jawa) yang lebih besar, dan terutama menyebar di empat kabupaten tersebut di atas.

Untuk memperdalam pengetahuan agama Hindu sejumlah pemuda antara lain bernama Sri Djangkung Djaka Sularsa dan Sutarta dikirim ke Bali. Siswa-siswa ini kemudian berhasil kembali ke daerahnya sebagai pinandita. Aktivitas dan keberhasilan tokoh spiritual kejawaan dari keraton Surakarta ini dalam memotivasi umatnya melakukan konversi agama Hindu, pada gilirannya telah menempatkannya sebagai wakil ketua PHDI Provinsi Jawa Tengah (Hasil wawancara dengan Cleo 55 tahun, staf pengurus Yayasan Budhilaksana pada 12 November 2018, di Pura Sahasra Adipura).

Sebagai bentukantisipasi terhadap Penetapan Presiden I Tahun 1965 tentang agama yang diakui adalah Islam, Kristen, Budha dan Hindu Dharma, R. Hardjanta membentuk Yayasan Sanatana Dharma Majapahit Pancasila (Sadharmapan). Yayasan ini memiliki dasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bertujuan untuk mengantarkan warganya mencapai kebahagiaan lahir batin dalam masyarakat Pancasila. Sebagai titik tolak dari perkembangan umat Hindu di Jawa Tengah, bisa dikatakan bermula dari daerah di Surakarta dan sekitarnya. Konversi agama Hindu secara massal yang diikuti oleh pengiriman siswa ke Bali, dan berhasil lulus sebagai pinandita, serta penyelenggaraan pendidikan spiritual Hindu yang dikelola oleh Sadharmapan, menjadi elemen-elemen penting yang mendorong gerak dinamika

perkembangan sejarah Hindu di wilayah Jawa Tengah. Dari tempat ini terjadi mobilitas umat ke berbagai wilayah lainnya, seperti Klaten, Boyolali dan ibukota Jawa Tengah, Semarang. Hal ini terjadi karena latar belakang antara lain pekerjaan, melanjutkan pendidikan, bahkan perkawinan.

Kabupaten Klaten yang dianggap sebagai salah satu kantong umat terbesar di Jawa Tengah, sebagian besar umatnya berasal dari pengikut kejawen atau yang sering disebut sebagai kaum Islam Abangan. Melalui bimbingan dan pengajaran lewat siaran RRI dari tokoh-tokoh Kejawen/Hindu, S.H. Soebardjo, Supanggih dan Rama Hardjanta, kaum kejawen melakukan konversi ke agama Hindu. Dengan demikian opsi bagi mereka untuk segera menentukan pilihan kepada agama - agama yang diakui pemerintah pasca tahun 1965, menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkembangan jumlah umat Hindu di Jawa Tengah, terutama di Klaten. Di sisi lain peristiwa ini juga mengungkapkan adanya kesesuaian unsur falsafah ajaran kejawen dengan ajaran agama Hindu (R.W. Hardjanta, 1955: 8-10).

Sementara itu di ibukota Semarang dinamika perkembangan Hindu boleh dikatakan terjadi pada tahun 1979. Umat Hindu di daerah ini merupakan migran dari daerah lain (Boyolali, Klaten) karena alasan pekerjaan, dan pendidikan. Kebanyakan di antara mereka berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, wiraswasta dan mahasiswa.



Dlm. suatu peringatan yg. diadakan dicandi Prambanan Bp. Dirjen. Bimngs. Hindu & Buddha berkenan hadir bersama Bp. SH. Soebardjo dan Ketua PHD. DI. Yogyakarta.

Foto 14. Upacara persembahyangan menjelang *Sudhiwadani* di Candi Prambanan (Koleksi Pribadi)



Foto 16. Umat Hindu Jawa Tengah menjelang upacara

persembahyangan di Candi Prambanan (Sumber: Koleksi Pribadi)



Foto 17. Seorang tokoh spiritual Kejawen R.W Harjanta Prajapangarsa, yang mengarahkan umatnya melaksanakan konversi Agama Hindu (Sumber: Koleksi Pribadi)

B.KEBERADAAN UMAT DAN BUDAYA HINDU KINI

Pemukiman umat Hindu di Jawa Tengah terkonsentrasi di tiga kabupaten (Boyolali, Karanganyar, Klaten) dan satu kota (Semarang) dengan pola hunian dan pola hidup yang memperlihatkan kemiripan. Pola hunian dan potensi wilayah Hindu di Kabupaten Karanganyar, cenderung terkonsentrasi di wilayah pegunungan atau lereng Gunung Lawu, yakni di (1). Kecamatan Ngargoyoso terutama memusat di Desa Berjo dan Kemuning, (2) Kecamatan Jenawi khususnya memusat

di desa Sidomukti. Meskipun terkonsentrasi di desa-desa itu, mereka tinggal bersama dengan masyarakat agama lain, seperti Islam dan Kristen. Secara umum masyarakat di wilayah ini masih melakukan tradisi Jawa yang sejak lama menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan mereka. Upacara tradisi yang menunjukkan siklus hidup manusia, selalu diikuti dengan taat, karena ini menyangkut tentang hubungan mereka sebagai manusia dengan leluhur dan Tuhannya. Upacara-upacara itu wajib dilakukan, mengingat bahwa manusia telah mendapat berkah dan perlindungan-Nya, disamping itu upacara itu juga merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur atau nenek moyang yang telah memelihara mereka dari segala sifat dan perbuatan jahat di dunia ini (wawancara dengan Wasi Atmo, di Pura Tunggal Ika, pada 15 November 2018).

Mereka tinggal di lingkungan masyarakat yang memiliki agama yang berbeda. Menariknya mereka lebih suka disebut sebagai masyarakat kejawaan yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan pengepul (hasil wawancara dengan Cipto Wiyono, Penarik Restribusi Candi Sukuh, pada 12 November 2018). Sementara itu, pada beberapa wilayah Jawa Tengah lainnya seperti Kabupaten Jepara, Sragen dan Sukaharja hanya terdapat sedikit jumlah umat dengan pola hunian berbaur di tengah umat lain. Pada umumnya kehidupan umat yang beragama dengan pola hunian yang membaur ini berlangsung dengan toleransi yang tinggi.

Tabel 13: Umat Hindu Provinsi Jawa Tengah 2017
Hasil Sinkronisasi

No.	Kab/ Kota	Jumlah Umat
1.	Kabupaten Cilacap	1.278
2.	Kabupaten Banyumas	1.250
3.	Kabupaten Purbalingga	92
4.	Kabupaten Banjarnegara	142
5.	Kabupaten Kebumen	352
6.	Kabupaten Purworejo	121
7.	Kabupaten Wonosobo	1.278
8.	Kabupaten Magelang	230
9.	Kabupaten Boyolali	4.702
10.	Kabupaten Klaten	17.740

11.	Kabupaten Sukaharja	621
12.	Kabupaten Wonogiri	145
13.	Kabupaten Karanganyar	4.713
14.	Kabupaten Sragen	2.775
15.	Kabupaten Grobogan	394
16.	Kabupaten Blora	166
17.	Kabupaten Rembang	193
18.	Kabupaten Pati	123
19.	Kabupaten Kudus	73
20.	Kabupaten Jepara	657
21.	Kabupaten Demak	469
22.	Kabupaten Semarang	762
23.	Kabupaten Temanggung	515
24.	Kabupaten Kendal	470
25.	Kabupaten Batang	75
26.	Kabupaten Pekalongan	721
27.	Kabupaten Pemalang	271
28.	Kabupaten Tegal	787
29.	Kabupaten Brebes	147
30.	Kabupaten Magelang	175
31.	Kota Surakarta	1.042
32.	Kota Salatiga	762
33.	Kota Semarang	17.258
34.	Kota Pekalongan	220
35.	Kota Tegal	178
Jumlah		60.896

Sumber: Data Dalam Angka, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa diaspora umat Hindu yang terjadi di seluruh wilayah Jawa Tengah, dan khususnya berpusat di empat bagian wilayah Jawa Tengah sebagaimana telah disebutkan di awal. Kondisi tersebut berimplikasi pada terjadinya saling memengaruhi antara perilaku budaya Jawa dan Bali, atau lebih tepatnya terutama di kota-kota besar, seperti Semarang dan Surakarta terjadi interaksi dan percampuran antara Hindu Kejawaen dan Hindu Bali. Beberapa dosen dan mahasiswa di kampus lembaga pendidikan negeri/swasta di wilayah perkotaan (Universitas Diponegoro dan Universitas Sebelas Maret) menjadi awal dari terjadinya interaksi budaya Jawa dan Bali atau lebih tepatnya Hindu Jawa dan Hindu Bali.

Mengenai profil umat di Jawa Tengah, secara garis besar terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), polisi, TNI, pengusaha, dan petani. Profesi sebagai politisi, misalnya selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang aktif dalam kegiatan partai politik, hingga saat ini masih kurang. Adapun dalam kegiatan organisasi, pengembangan peran wanita cukup signifikan. Pada wilayah Kota Semarang, Kabupaten Klaten, dan Surakarta, aktivitas mereka cukup menonjol terutama di bidang pembinaan pemuda dan wanita. Pada umumnya mereka lebih banyak terlibat dalam pemberdayaan umat di bidang seni dan budaya yang dilakukan lewat media TVRI dan RRI (wawancara dalam FGD Pada 10 November 2018 di Pura Girinatha Semarang). Terkait dengan itu adalah kegiatan umat dalam melaksanakan atau memaknai konsep budaya (Jawa), melalui pelaksanaan tradisi budaya seperti selamatan, *nyekar* (bersembahyang dan menabur bunga) di makam keluarga/leluhur pada bulan *Suromenurut* kalender Jawa. Meskipun demikian, umat di kota seperti Semarang tidak begitu mengenal cerita rakyat yang sebenarnya mengandung ajaran moral dibanding umat di daerah lain atau di kota yang lebih dekat dengan budaya keraton, seperti Surakarta dan daerah sekitarnya. Dengan kata lain, tradisi lokal Jawa tampak lebih melekat pada praktik hidup umat Hindu di daerah, daripada di ibukota/Semarang. Napas modernisasi misalnya lebih terasa dalam gaya hidup umat di perkotaan, sebagai contoh adalah gaya berbusana umat ketika mulai memasuki areal pura. Mereka tampak membedakan gaya berbusana sesuai dengan tujuan mereka ke pura. Pakaian nasional menjadi pilihan ketika mereka hanya memasuki areal pura di bagian *wantilan*. Sedikit berbeda dengan umat yang ingin memasuki areal Pura Mandiri Seta di Baluwarti Surakarta misalnya, umat biasa menggunakan busana adat Jawa. Akan tetapi ketika upacara persembahyangan di pura, pada umumnya pengaruh Bali lebih tampak. Ini terlihat dari busana adat yang dikenakan umat yang menunjukkan gaya berpakaian seperti kebiasaan umat Hindu di Bali.

Upacara Keagamaan

Pada umumnya tradisi setempat akan berpengaruh lebih mendalam terhadap hakekat dari perilaku beragama umat.

Apalagi di tengah derasnya pengaruh budaya global yang identik dengan modernisasi, yang salah satu subnya adalah pemikiran tentang efisiensi dan rasionalisasi. Pada gilirannya, bagi umat setempat perilaku Hindu akan lebih dimaknai sebagai pelaksanaan tradisi dan agama yang lebih efisien, baik dari aspek waktu, kepentingan dan biaya. Di sisi lain bagi umat pendatang, hal itu akan menciptakan pemikiran dan perilaku beragama secara lebih terbuka dan toleran, paling tidak selama mereka tinggal dan melangsungkan hidupnya di tempat mereka bekerja (wawancara dengan Drs. I Nyoman Suludi, M.Pd, M.Si, dosen UNS Surakarta, pada tanggal 16 Februari 1952). Pada wilayah pedesaan, yakni di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, upacara keagamaan dilakukan dengan cara tradisi setempat.

Upacara yang dipimpin oleh seorang pemangku di Candi Cetho, Kabupaten Karanganyar, misalnya adalah *odalan* yang berlangsung pada hari Selasa Kliwon atau Malam Rabu Manis. Adapun di Candi Sukuh, masih di Kabupaten Karanganyar, pada saat bulan Suro masyarakat setempat melakukan *makemit* (sembahyang yang dilakukan semalam suntuk) dengan menyampaikan sesaji. Menurut konsep Jawa sesuai yang mereka yakini, sesaji dalam wujud apapun itu tidak masalah, yang penting isinya terdiri dari: palawija, kelapa, dan benang putih yang ditempatkan pada tempat berbentuk *cething* (tempat nasi) yang terbuat dari bambu/plastik. Bahan sesaji lain yang diperlukan adalah *jenang liman* (bubur berwarna 5 (lima) macam), yang memiliki makna filosofis sebagai 5 kiblat dan 4 *pancer*, yakni warna kuning, merah, putih, hitam mengitari warna coklat di tengah-tengah.

Upacara agama Hindu yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Candi Sukuh dan Cetho ini adalah Hari Raya Nyepi. Bantennya berupa *daksina* yang ditempatkan di *cething* dengan jajan (kue) pasar, serta nasi beserta lauk pauknya. Banten ini adalah merupakan persembahan kepada leluhur. Komponen wajib yang harus ada dalam setiap sesaji adalah buah-buahan, seperti pisang. Menurut konsep falsafah Jawa, buah itu harus dimakan yang paling terakhir karena pisang ini berfungsi untuk menghindari hal-hal yang buruk yang setiap saat mengancam

manusia. Para penganut Hindu Jawa (kejawen) meyakini konsep ini dan tidak berani untuk melanggarnya (wawancara dengan Kasmin, Pengelola di Candi Sukuh pada 12 November 2018).

Tradisi budaya lain yang hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat Hindu Jawa adalah seperti *tingkeban* yakni upacara yang dilakukan ketika kehamilan wanita sudah mencapai umur 8 bulan, dengan tujuan agar proses melahirkan nanti berlangsung dengan lancar dan selamat. Biasanya tetangga akan diundang untuk ikut menyaksikan jalannya upacara sambil diberi *bancaan* (berupa nasi gubahan/ sayur-sayuran dan dawet). Ini semua melambangkan kesuburan dan kebahagiaan menyambut calon bayi lahir ke dunia. Setelah bayi lahir dengan selamatada proses upacara lagi yang harus dilakukan disebut sebagai upacara *selapanan*. Upacara ini dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada bayi. Selain upacara untuk memaknai kelahiran, umat juga menjalankan ritual terkait dengan kematian. Menariknya, pada setiap upacara kematian, masyarakat Hindu Jawa menghendaki upacara dipimpin oleh seorang pemangku (hasil wawancara dengan Priyanta Ketua Parisadha Kecamatan Ngargoyoso pada 12 November 2018 di Pura Tunggal Ika).

Pusat aktivitas ritual lain umat Hindu ialah di sekitar lereng Gunung Lawu, Dusun Jlono, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, tepatnya pada setiap pergantian Tahun Saka, mulaidari upacara Tawur Kesanga hingga pelaksanaan Catur Brata. Dusun kecil yang terletak di lereng Gunung Lawu ini dihuni oleh sekitar 60 keluarga, dan sekitar setengahnya adalah penganut Hindu, sisanya pemeluk Islam dan Kristen. Karena banyak pemeluk Hindu yang sudah lama bermukim di sini, maka wilayah di lereng utara Gunung Lawu itu disebut sebagai Bali Kecil. Mayoritas dari mereka percaya bahwa mereka adalah keturunan para pengikut setia raja Majapahit terakhir yang diyakinimengasingkan diri menjelang kejatuhan Majapahit. Terkait dengan hal itu adalah ramalan Joyoboyo atau sumpah Sabdo Palon dan Naya Genggong yang meramalkan bahwa setelah runtuhnya kekuasaan Hindu, akan tiba waktunya ketikakekuatan Hindu akan kembali berjaya di Nusantara.

Adapun hubungan internal antarwarga yang diwarnai

dengan rasa toleransi juga memengaruhi pandangan umat Hindu Jawa di Karanganyar terhadap budaya/tradisi Hindu dari Bali. Dalam pelaksanaan upacara keagamaan, *pemangku* bebas menggunakan ikat kepala/*udeng* Bali atau Jawa. Dalam setiap upacara salah satu sarana sesaji yang harus ada adalah *daksina*, kemudian pada setiap hari raya Nyepi umat dengan khusuk akan mengikuti seperti umat di Bali mengikutinya, walau mereka lebih suka disebut sebagai umat Hindu Jawa, daripada Hindu Bali. (Wawancara dengan Kasimin, Penarik Restribusi Candi, pada 12 November 2018).

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam praktik upacara keagamaan di wilayah Jawa Tengah terjadi semacam kolaborasi antara budaya Hindu Bali dan Hindu Jawa. Komponen yang kolaboratif tersebut dapat dilihat dari gaya busana upacara dan beberapa hari raya pelaksanaan ritual agama, seperti *Melasti* dan *Tawur kesanga* menjelang Hari Raya Nyepi yang diwarnai pesta arakan *ogoh-ogoh* seperti di Bali. Masyarakat Hindu Jawa di Kabupaten Boyolali dan Klaten melaksanakan praktik prosesi keagamaan ini dengan meriah tetapi khusuk. Sering terjadi bahwa dalam upacara ini melibatkan anggota masyarakat umat lain, baik yang menjalankan fungsinya sebagai anggota arakan *ogoh-ogoh* maupun ikut menjaga ketertiban dan keamanan jalannya prosesi ritual keagamaan ini. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa terjadi harmonisasi kehidupan beragama di wilayah ini. Terkait dengan hal tersebut, dalam aspek tujuan sesaji atau *banten* dalam praktik keagamaan sama dengan Hindu Bali, yakni untuk Tuhan, leluhur dan roh yang ada di sekitar manusia (wawancara dalam FGD, 10 November 2018 di Pura Girinatha Semarang).

Khusus di Klaten, kabupaten yang terdiri dari 26 kecamatan dan 400 desa ini memiliki total 47 pura. Oleh karenanya tradisi Bersih Desa menjadi wajib untuk diselenggarakan melalui upacara dengan doa dan sesajen. Doa pengiring biasanya yang diakhiri dengan ucapan Om Santhi, Santhi, Santhi, Om (Bali), tetapi setelah itu ditutup dengan ucapan bahasa Jawa "*matur nuwun*." Hal ini kiranya menjadi contoh lain betapa kentalnya budaya lokal Jawa di samping pengaruh dari Hindu Bali (hasil wawancara dalam FGD pada tanggal 13 November 2018, di kampus STHD Klaten). Dominasi budaya Jawa dalam praktik

hidup masyarakat Hindu Jawa juga terasa dari pernyataan bahwa “...orang Hindu Bali meninggal dikremasi, tetapi orang Hindu Jawa meninggal dikubur...”

Adat Setempat

Mirip seperti di Bali, praktik ritual Hindu di Jawa Tengah cukup sulit dipisahkan dengan adat. Sebagai gambarnya adalah ritual *Mendak Tirta* yang merupakan tradisi umat Hindu Boyolali menjelang Nyepi. Menjelang Nyepi umat Hindu melakukan tradisi Mendak Tirta atau Melasti (di Bali). Mendak Tirta adalah tradisi umat Hindu Boyolali untuk mengambil air suci di sumber mata air Siraman Dalem Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Prosesi ritual ini diawali dengan kirab dari Pura Suci Saraswati Desa Ngaru-Aru, Pengging Banyudono. Kirab diawali dengan doa dan menabuh kendang serta gamelan. Upacara ini biasanya diikuti selain oleh umat Hindu di Boyolali, juga dari Surakarta dan Sukaharja. Dalam *kirab* yang menempuh perjalanan sekitar 1 km itu, umat bersama-sama *mengarak* (membawa dengan cara ditempatkan di kendaraan yang berjalan) *gunungan* beragam hasil bumi (yang disusun seperti gunung), sebagai wujud syukur atas berkah kesejahteraan dan kedamaian seluruh umat. Sesaji dan dua *gunungan* yang disebut *gunungan lanang* dan *gunungan wadon* itu kemudian dibawa menuju Umbul Ngabean di Desa Pengging. Air siraman Dalem Pengging ini merupakan satu dari tujuh mata air yang akan digunakan dalam ritual *tawur kesanga*. Enam sumber lainnya diambil dari Salatiga, Semarang, Klaten dan Sragen. Air dari ketujuh mata air tersebut dimanfaatkan sebagai sarana penyucian diri umat Hindu dengan alam semesta (hasil wawancara dalam FGD di STHD Klaten pada 13 November 2018). Ritual kemudian berlangsung dengan doa bersama di tengah asap harum dari kemenyan yang dibakar, setelah itu diakhiri dengan *rayahan* (berebut secara ramai-ramai) *gunungan* yang terbuat dari berbagai jenis makanan tradisional.

Termasuk sebagai minoritas, umat Hindu di Boyolali tetap dapat menjalankan kegiatan kepercayaannya dengan baik. Toleransi keagamaan masyarakat di Boyolali sangat tinggi. Umat Hindu di kabupaten ini tinggal lebih terkonsentrasi di Kecamatan

Banyudono, dan berada di empat desa, yakni Desa Ngaru-aru, Desa Jembungan, Desa Benda, dan Desa Kataon, sejumlah sekitar 400 orang. Salah satu wujud toleransi tinggi tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan ritual *mendak tirta* yang menjadi agenda tahunan di Kecamatan Banyudono, dan dipusatkan di Pura Buana Suci Saraswati, Desa Ngaru-aru. Pura yang dibangun pada tahun 1970-an ini termasuk salah satu pura terbesar dalam melaksanakan acara keagamaan umat Hindu.

Ritual *mendak tirtadi* Klaten biasa disebut sebagai *melasti*. Pada wilayah ini acara ritual *melasti* uniknya juga dimaknai sebagai simbol terjaganyaloyalitas kepada negara. Melalui *melasti*, umat Hindu menjunjung solidaritas kebersamaan dan keutuhan NKRI. Jadi, manusia tidak saja menjaga hubungannya dengan alam semesta, tetapi juga dengan Tuhan dan sesamanya. Sebagai bangsa Indonesia, kiranya ikut menjaga persatuan, kebersamaan, dan keutuhan NKRI. Rangkaian upacara itu diadakan di Umbul Geneng, Desa Ngerundul, Kecamatan Kebonarum Klaten. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Klaten Wisnu Hendrata memaknai upacara *melasti* menjelang Hari Raya Nyepi sebagai upacara pembersihan alam semesta termasuk bumi pertiwi dan seisinya.

Salah satu wujud kepedulian dari pimpinan PHDI Provinsi Jawa Tengah terhadap kepentingan umat dalam menjalankan prosesi adat dan agama adalah diteruskannya bantuan seperangkat gamelan oleh Pembimas Hindu Jawa Tengah kepada PHDI Kabupaten Karanganyar. Gamelan merupakan produk budaya untuk memenuhi kebutuhan seni bagi manusia. Gamelan Jawa menyuarakan irama musik yang lembut dan mencerminkan keselarasan hidup, sebagaimana falsafah hidup yang menuntun praktik hidup masyarakat Jawa. Dalam ritual Hindu di Jawa, gamelan Jawa memegang peran penting dalam pelaksanaan upacara keagamaan, mengingat gamelan Jawa merupakan pengiring tembang yang mengandung filosofis kehidupan seperti: *maskumambang*, *mijil*, *gambuh*, *kinanthi* dan *asmarandana*. Masing-masing gending ini menggambarkan tahap kehidupan manusia sejak lahir sampai saatnya menghadap ke hadirat-Nya. Secara umum, fungsi gamelan antara lain sebagai iring-iringan tari, iring-iringan upacara adat dan agama, pertunjukan way-

ang, dan upacara pernikahan. Intinya gamelan berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan tradisi budaya warisan leluhur (<http://phdi.or.id/beritapembimas-hindu-jateng-serahkan-bantuan-gamelan-pada-phdi-kab-karanganyar>).

Adat yang menjadi bagian dari budaya, seringkali menjadi aset penting yang menarik bagi wisata budaya karena masih dipelihara dan dijaga keberadaannya. Beberapa adat di wilayah Boyolali ini terdiri dari bentuk ritual dan permainan anak di antaranya :

a. Sedekah Gunung

Upacara ini diselenggarakan di Desa Lencoh Kecamatan Selo setiap malam 1 Suro. Acara ini merupakan prosesi persembahan kepala kerbau dan sesaji ke kawah gunung Merapi sebagai tanda syukur masyarakat Surakarta dan sekitarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara ini dimeriahkan dengan tarian dan atraksi oleh masyarakat setempat pada pukul 22.00-24.00, dan diakhiri dengan kirab potongan kepala kerbau serta gunungan nasi jagung sebagai sesaji yang diletakkan di pasar. Ada tiga acara utama dalam upacara ini, yakni kirab kepala kerbau; kirab sesaji Gunung Merapi, serta kirab ratusan obor. Tradisi ini bermula dari ritual tolak bala yang dilakukan Pakubuwana X dari Kasunanan Surakarta, dengan menumbalkan seekor kerbau ke Gunung Merapi. Kini masyarakat hanya menumbalkan bagian kepalanya saja.

b. Kirab Budaya

Tradisi ini berada di Desa Samiran Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, dan dilaksanakan setiap tanggal 2 Suro dan dimulai dari pelataran gua raja, yang diyakini dulu sebagai tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro. Kirab ini dimulai dengan pengambilan air suci di tempat itu kemudian diarak beserta iring-iringan nasi tumpeng dan hasil bumi dari kawasan sekitar Selo. Ribuan warga ikut serta mengiringi arak-arakan tumpeng dan air tersebut, dengan berpakaian adat, menuju ke pesanggrahan Kebo Kanigara untuk menyatukan air yang diambil dari Gua Raja dengan air dari pesanggrahan Kebo Kanigoro.

c.Sadranan

Sadranan merupakan tradisi masyarakat untuk membersihkan makam leluhur, serta ziarah ke kubur dengan menyampaikan doa yang diiringi kenduri yang berupa berbagai kue atau jajanan pasar dan nasi tumpeng. Tradisi ini dilakukan setiap tahun pada setiap pertengahan bulan Ruwah (penanggalan Jawa) menjelang datangnya bulan Ramadhan. Selain berdoa kepada leluhur, dan keluarga yang telah meninggal, sadranan bertujuan pula untuk melestarikan budaya peninggalan nenek moyang yang sudah berlangsung turun temurun. Acara dimulai dengan membersihkan makam, kemudian dilanjutkan dengan *nyekar* (menabur bunga di atas makam) sambil berdoa bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama. Sadranan diikuti tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

d.Ngalap Berkah Paringan Apem Kukus Keong Emas

Upacara ini dilakukan di kawasan wisata Pengging di lingkungan makam Astana luhur R.Ng.Yosodipuro pada hari Jumat pertengahan Bulan Sapar. Beliau adalah seorang pujangga Kasunanan keraton Surakarta. Masyarakat Pengging sering memohon petunjuk atas segala masalah yang terjadi, di samping itu para petani memohon bantuannya untuk mengatasi serangan hama keong mas. Petani kemudian mengambil keong mas, dan kemudian dikukus. Sebelumnya keong tersebut dibalut dengan janur yang dibentuk seperti keong mas. Setiap panen, janur bekas balutan keong mas itu digunakan untuk membuat apem kukus. Apem kukus itu kemudian dibagi-bagikan kepada petani sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang diberikan, serta berkurangnya hama keong. Tradisi bagi-bagi apem hingga kini masih tetap dijalankan. Bagi masyarakat yang berhasil mendapatkan apem, yakin bahwa hidupnya akan dipenuhi dengan berkah.

e.Ritual Kungkum di Pemandian Tirta Marto

Pemandian ini terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono. Pemandian ini dahulu digunakan oleh raja Kasunanan Surakarta dan keluarganya. Di dalam pemandian ini terdapat tiga buah umbul, yakni umbul penganten, umbul ngabean, dan umbul

duda. Kini di pemandian ini sering digunakan oleh peziarah untuk mengadakan ritual *kungkum*, yakni ritual merendam diri peziarah di dalam air sebatas leher yang dimulai pukul 24.00-03.00 pada setiap malam Jumat.

f. Legenda Bandung Bondowoso

Masyarakat percaya bahwa dulu Kerajaan Pengging—bersamaan waktunya dengan Kerajaan Boko di Prambanan—dipimpin oleh seorang raja yang arif bernama Prabu Damar Moyo dan memiliki anak bernama Bandung Bondowoso. Pria inilah yang terkait dengan legenda Roro Jonggrang dan Candi Prambanan.

g. Pengging Fair

Untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI, di Desa Pengging Kecamatan Banyudono diselenggarakan pasar malam dan festival seni budaya yang berlangsung setahun sekali, selama satu minggu pada bulan Agustus. Pasar malam dimeriahkan oleh pedagang setempat maupun dari luar daerah. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi dan kreativitas ekonominya.

h. Makam Ki Ageng Kebo Kenanga

Makam terletak di di Dukuh Pengging, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono. Tokoh ini juga dikenal sebagai Ki Ageng Pengging. Puteranya bernama Joko Tingkir, kemudian menjadi Sultan Hadiwijaya, merupakan pendiri Kesultanan Pajang. Banyak orang mengunjungi tempat ini untuk bersemedi dengan berbagai tujuan. Menurut Babad Tanah Jawi, Kebo Kenanga bersahabat dengan Syech Siti Jenar yang kemudian terlibat konflik dengan Kesultanan Demak.

i. Candi Lawang

Candi Lawang merupakan candi Hindu abad ke-9. Asal katanya adalah *lawang* yang berarti pintu, karena bentuk pintunya yang cukup unik. Seperti candi Hindu pada umumnya, Candi Lawang juga menghadap ke barat. Pada ruang utamanya terdapat *yoni*, tetapi tidak ada *lingga*. *Yoni* ini memiliki saluran berlubang sebagai tempat keluarnya air. Pada sekeliling candi tidak ditemukan

arca maupun relief, kecuali batu berornamen. Namun, di sekitar candi terdapat batu-batu yang belum disusun kembali. Artefak peninggalan masa Hindu ini, tampaknya belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah untuk direnovasi sebagai warisan budaya leluhur yang bernilai tinggi.

j. Dakon dan Gobak Sodor

Ini merupakan jenis permainan tradisional anak-anak di Jawa Tengah pada umumnya yang hingga kini masih dikenal di wilayah Kabupaten Boyolali. Alat permainan dakon berupa kayu berbentuk memanjang oval yang berlubang-lubang. Seorang anak akan mengisi setiap lubang itu dengan batu kecil atau apa saja yang penting bisa digunakan untuk mengisi lubang-lubang permainan. Sekitar tahun 1970an, anak-anak akan menggunakan biji sawo manila untuk bermain dakon. Sementara permainan *gobak sodor* baik di desa maupun di kota, khususnya di lingkungan siswa SD permainan yang di Bali disebut sebagai *gala-gala* itu hingga kini masih sering dimainkan. Ini merupakan bagian dari warisan leluhur dan budaya Nusantara yang harus dijaga keberadaannya.

Disamping berbagai adat atau tradisi yang ada, masalah praktik keagamaan sangat intens dilakukan oleh masyarakat di daerah ini. Hal ini bisa dilihat dari adanya sejumlah pura di daerah berikut ini :

1. Pura Puja Buana. Desa Tagung Gede, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.
Pura ini berada di lereng timur Gunung Merapi.
2. Pura Satya Dharma. Dukuh Gedung, Desa Sangup Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali
3. Pura Giri Wangi terletak di desa Pandean, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali
4. Pura Eyang WCQ terletak di Dukuh Kedung Randu, RT20RW05, Desa Kalimati, Kecamatan Juwangi.
5. Pura Dharma Sakti. Dukuh Banyu Urip, Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kab. Boyolali
6. Pura Bhuana Suci Saraswati terletak di Desa Ngaru-ngaru Kecamatan Banyudana Kabupaten Boyolali
7. Pura Ditya Dharma terletak di Ketaon, Kecamatan Banyudana Kabupaten Boyolali
8. Pura Widya Loka Sakti di Randusari, Kecamatan Teras

- Kabupaten Boyolali
9. Pura Agung Dharma Bhuana di Urutsewu, Ampel Kabupaten Boyolali
 10. Pura Dharma Santosa, terletak di Kateguhan Sawit, Kabupaten Boyolali
 11. Pura Widya Loka Sakti di Randusari, Teras Randusari, Kabupaten Boyolali
 12. Pura Satya Dharma di Gedung Sangup Musuk, Kabupaten Boyolali.

Data di atas dapat menunjukkan bahwa secara teoritis banyaknya tempat ibadah di satu wilayah kabupaten mencerminkan adanya aktivitas ibadah atau ritual yang tinggi dari umat. Meskipun termasuk minoritas, tetapi tidak menyurutkan langkah umat di Kecamatan Banyudono itu untuk tetap aktif dalam menjalankan ritual keagamaannya. Hal ini sekaligus membuktikan tingginya rasa toleransi keagamaan masyarakat di wilayah ini. Tampaknya tradisi Hindu Bali tidak begitu banyak berpengaruh di sini. Secara intristik, aspek budaya Jawa sangat dominan dalam membentuk ritual agama Hindu, tetapi dari aspek fisiknya, seperti cara berpakaian, dan wujud sesaji dalam upacara keagamaan, lebih mirip dengan cara di Bali.

Suatu hal unik, yang terkait dengan pengaruh Hindu Bali, terdapat di wilayah Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Kecamatan Karangpandan. Pada tempat ini berdiri bangunan Pura Pasekan seperti di Bali. Pura ini menjadi pusat kegiatan ritual keagamaan umat Hindu yang berada di sekitar Kecamatan Karangpandan. Mengunjungi areal tempat ibadah ini terasa nuansa budaya Bali berpadu dengan pemandangan Gunung Lawu yang indah. (<http://www.panorlens.com2017/pura-pasek-karanganyar.html>).

Pura, Pinandita, Pandita

Gambaran mengenai kegiatan ritual keagamaan umat Hindu dapat dikaitkan dengan jumlah tempat ibadah atau pura yang ada, karena besarsecilnya jumlah tempat ibadah akan mencerminkan intensitas kegiatan keagamaan umat. Untuk itu data mengenai tempat ibadah Hindu atau Pura dapat diperlihatkan sebagai berikut :

Tabel 14: Daftar Tempat Ibadah Hindu/ Pura di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab/ Kota	Jumlah
1	Kabupaten Banyumas	2
2	Kabupaten Boyolali	24
3	Kabupaten Cilacap	1
4	Kabupaten Grobogan	4
5	Kabupaten Jepara	4
6	Kabupaten Karanganyar	28
7	Kabupaten Kebumen	1
8	Kabupaten Kendal	6
9	Kabupaten Klaten	46
10	Kabupaten Magelang	1
11	Kabupaten Pati	2
12	Kabupaten Pekalongan	3
13	Kabupaten Pemalang	1
14	Kabupaten Semarang	3
15	Kabupaten Sragen	10
16	Kabupaten Sukoharjo	11
17	Kabupaten Tegal	4
18	Kabupaten Wonogiri	2
19	Kabupaten Wonosobo	1
20	Kabupaten Pekalongan	2
21	Kota Salatiga	1
22	Kota Semarang	5
23	Kota Surakarta	3
24	Kota Tegal	1
Jumlah		162

Sumber: Data Dalam Angka Parisadha Hindu Darma Indonesia Provinsi Jawa Tengah, *Ibid.,*)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pura yang terbanyak adalah di tiga wilayah kabupaten yang menjadi kantong umat, yakni Kabupaten Klaten, Karanganyar, dan Boyolali. Sebagai implikasi dari hal ini, jumlah pinandita dan pandita yang bertugas memimpin upacara keagamaan terbanyak juga berada ditiga wilayah ini. Selengkapnya dapat disimak dalam dua tabel berikut:

Tabel 15: Daftar Pinandita Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab/ Kota	Jumlah
1	Kabupaten Banjarnegara	0
2	Kabupaten Banyumas	1
3	Kabupaten Batang	0
4	Kabupaten Blora	0
5	Kabupaten Boyolali	45
6	Kabupaten Cilacap	2
7	Kabupaten Demak	0
8	Kabupaten Grobogan	4
9	Kabupaten Jepara	8
10	Kabupaten Karanganyar	57
11	Kabupaten Kebumen	1
12	Kabupaten Kendal	6
13	Kabupaten Klaten	163
14	Kota Surakarta	6
15	Kota Magelang	1
16	Kota Pekalongan	1
17	Kota Salatiga	1
18	Kota Semarang	3
19	Kota Tegal	1
20	Kabupaten Kudus	0
21	Kabupaten Magelang	4
22	Kabupaten Pati	1
23	Kabupaten Pekalongan	6
24	Kabupaten Pemalang	1
25	Kabupaten Purwareja	0
26	Kabupaten Rembang	2
27	Kabupaten Semarang	3
28	Kabupaten Sragen	25
29	Kabupaten Sukaharja	5
30	Kabupaten Tegal	1
31	Kabupaten Temanggung	1
32	Kabupaten Wonogiri	1
33	Kabupaten Wonosobo	5
Jumlah		355

Tabel 16: Daftar Pandita Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1	Kabupaten Klaten	1
2	Kota Salatiga	1
3	Kota Tegal	1
4	Kabupaten Wonosobo	1
5	Kabupaten Semarang	1
Jumlah		5

Dapat dicermati bahwa keberadaan pinandita tidak merata di seluruh kabupaten/kota. Sebagian besar daerah memiliki pinandita kurang dari lima orang bahkan beberapa daerah tidak mempunyai sama sekali. Walau demikian, sebagai kontras, jumlah pinandita di Boyolali, Karanganyar, dan Klaten tercatat berjumlah jauh melampaui kabupaten lainnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kegiatan upacara agama yang dilakukan umat Hindu terbilang cukup intens khususnya di tiga kantong pusat populasi umat Hindu di Jawa Tengah.

C. PENDIDIKAN HINDU

Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk meliputi 36.825.566 jiwa, dengan komposisi sebagai berikut: penduduk beragama Hindu 60.896 jiwa (0,17 %). Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat sebagian besar dilakukan oleh tokoh dan penyuluh agama. Hingga tahun 2017 penyuluh Agama Hindu yang berstatus PNS sebanyak 3 (tiga) orang dan tenaga penyuluh non PNS Agama Hindu berjumlah 73 orang. Meskipun demikian peran bimbingan dan penyuluhan agama tidak hanya dilaksanakan oleh penyuluh PNS dan non PNS, tetapi juga dilaksanakan oleh tokoh masyarakat lain dalam berbagai profesi.

Dalam bidang pendidikan, sejauh ini banyak guru Agama Hindu di Jawa Tengah yang telah purna tugas. Pada tahun 2018 ketersediaan tenaga guru hanya sebanyak 112 orang, yang tersebar di 14 kabupaten/ kota dan didukung dengan tenaga guru Agama Hindu non PNS sejumlah 21 orang yang diangkat oleh kepala sekolah dan dikontrak oleh kepala daerah. Siswa beragama Hindu yang berada di 35 kabupaten/ kota ini diberikan pembelajaran pendidikan Hindu oleh pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia yang berada di bawah pengawasan 3 (tiga) orang pengawas, yang masing-masing berada di kabupaten kantong wilayah umat: Karanganyar, Klaten dan Boyolali. Kegiatan pendidikan Agama Hindu di Jawa Tengah didukung oleh tenaga guru agama Hindu PNS dan non PNS atau guru yang berstatus tidak tetap.

Tabel 17: Daftar Guru Agama Hindu PNS
Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab/ Kota	Jumlah
1	Kabupaten Banyumas	2
2	Kabupaten Boyolali	24
3	Kabupaten Jepara	3
4	Kabupaten Karanganyar	18
5	Kabupaten Kendal	1
6	Kabupaten Klaten	40
7	Kota Semarang	5
8	Kota Surakarta	4
9	Kota Tegal	1
10	Kabupaten Pekalongan	1
11	Kabupaten Semarang	1
12	Kabupaten Sragen	7
13	Kabupaten Sukaharja	3
14	Tegal	1
15	Kabupaten Kota Malang	1
Jumlah		112

Tabel 18: Daftar Guru Agama Hindu Non PNS
Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah
1	Kabupaten Banyumas	1
2	Kabupaten Boyolali	8
3	Kabupaten Jepara	2
4	Kabupaten Karanganyar	1
5	Kabupaten Klaten	6
6	Kabupaten Semarang	1
7	Kabupaten Sragen	1
8	Kota Magelang	1
Jumlah		21

Selain data tentang tenaga pendidik, kegiatan pendidikan Hindu di Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari adanya lembaga pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan untuk kepentingan umat. Lembaga pendidikan Hindu untuk umat terdiri atas yang formal, maupun nonformal. Jenis lembaga pendidikan formal terdiri atas sekolah dan pasraman. Sementara pasraman juga bisa dikategorikan sebagai pasraman yang formal maupun yang nonformal. Lembaga Pendidikan Hindu

formal di Jawa Tengah hanya terdapat di Kabupaten Jepara dan Pekalongan. Ini agak mengherankan mengingat bahwa di dua tempat tersebut jumlah siswa Hindu tidak begitu banyak dibanding misalnya di Kabupaten Klaten. Pembimas Hindu pasti memiliki alasan tersendiri mengapa membuka pasraman di kedua wilayah kabupaten tersebut. Mungkin kedua kabupaten tersebut mengalami kesulitan memperoleh tenaga pengajar di sekolah, sehingga pembimas provinsi memandang perlu untuk membuka pasraman sebagai antisipasi kurangnya pendidikan agama Hindu di kedua wilayah tersebut. Berikut adalah data terkini jumlah pasraman sebagai Lembaga Pendidikan Hindu nonformal di Jawa Tengah:

Tabel 19: Daftar Hindu/ Pasraman
Non Formal Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab/ Kota	Jumlah
1	Kabupaten Banyumas	1
2	Kabupaten Boyolali	9
3	Kabupaten Cilacap	1
4	Kabupaten Grobogan	1
5	Kabupaten Jepara	1
6	Kabupaten Karanganyar	12
7	Kabupaten Kendal	3
8	Kabupaten Klaten	15
9	Kabupaten Magelang	1
10	Kabupaten Pekalongan	1
11	Kabupaten Purwareja	1
12	Kabupaten Semarang	1
13	Kota Semarang	2
14	Kabupaten Sragen	4
15	Kota Surakarta	1
16	Kabupaten Tegal	1
17	Kota Tegal	1
18	Kota Magelang	1
19	Kabupaten Wanasaba	1
Jumlah		58

Data pasraman ini dapat dibandingkan dengan jumlah siswa Hindu di masing-masing kabupaten yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 20: Data Siswa Agama Hindu
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No.	Kab/ Kota	SD	SMP	SMA	JUMLAH
1	Kota Semarang	63	48	70	181
2	Kota Surakarta	28	14	24	66
3	Kota Magelang	11	9	8	28
4	Kota Tegal	6	2	4	12
5	Kabupaten Klaten	199	96	82	377
6	Kabupaten Boyolali	144	52	30	226
7	Kabupaten Karanganyar	194	103	61	358
8	Kabupaten Jepara	42	20	14	76
9	Kabupaten Tegal	18	12	8	38
10	Kabupaten Banyumas	26	12	10	48
11	Kabupaten Magelang	4	1	33	38
12	Kabupaten Sragen	25	25	41	91
13	Kabupaten Sukaharja	14	6	4	24
14	Kabupaten Wonogiri	6	3	4	13
15	Kabupaten Banjarnegara	5	0	5	10
16	Kabupaten Purwareja	0	0	3	3
17	Kabupaten Temanggung	0	3	0	3
18	Kabupaten Semarang	7	3	5	15
19	Kabupaten Kendal	19	8	19	46
20	Kabupaten Pekalongan	33	18	25	76
21	Kabupaten Wanasaba	8	3	2	13
22	Kabupaten Pati	3	5	5	13
23	Kabupaten Cilacap	0	3	0	3
24	Kabupaten Rembang	5	4	6	15
25	Kabupaten Grobogan	4	5	19	28
Jumlah		864	455	482	1801

Bandingkan pula dengan data jumlah penyuluh agama Hindu berikut ini :

Tabel 21: Data Penyuluh Agama Hindu Non PNS
Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab/ Kota	Jumlah
1	Kabupaten Banjarnegara	1
2	Kabupaten Wanasaba	1
3	Kabupaten Banyumas	2
4	Kabupaten Blora	1
5	Kabupaten Boyolali	12
6	Kabupaten Cilacap	1
7	Kabupaten Grobogan	1

8	Kabupaten Jepara	8
9	Kabupaten Karanganyar	7
10	Kabupaten Klaten	22
11	Kota Pekalongan	1
12	Kota Semarang	1
13	Kota Surakarta	2
14	Kota Tegal	1
15	Kudus	1
16	Kabupaten Pekalongan	3
17	Kabupaten Semarang	2
18	Kabupaten Sragen	4
19	Kabupaten Sukaharja	2
20	Kabupaten Tegal	1
21	Kabupaten Temanggung	1
Jumlah		75

Keseluruhan tabel tersebut di atas menjelaskan bahwa sejumlah wilayah yang secara kuantitas memiliki banyak siswa Hindusecara otomatis juga banyak mendirikan pasraman dan cukup banyak mempunyai penyuluh agama Hindu guna mengantisipasi siswa yang kekurangan pendidikan agama akibat minimnya tenaga pengajar agama di sekolah. Walau demikian, untuk provinsi seluas Jawa Timur, jumlah tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan. Selengkapnya perihal ini akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD)

Sebagai daerah dengan jumlah umat Hindu tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Klaten berdiri Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Widya Aksara Dharma. Adapun saat ini yayasan tersebut diketuai oleh Sugeng Sapta Waryasa yang juga berdinasi di Kementerian Agama di Solo. STHD diresmikan pada tahun 1984, berawal dari sekolah Pendidikan Agama Hindu (PGA) yang berdiri pada tahun 1974. Sejak awal berdirinya, STHD kemudian menjadi pusat pendidikan sekolah tinggi di Jawa Tengah, dengan moto: Mencerdaskan Masyarakat Klaten. Berbagai siswa yang berasal dari luar Klaten seperti Pekalongan, Tegal, Semarang dan Surakarta menjadi anak didik sekolah tinggi ini. STHD memiliki jenjang pendidikan D2 (2 tahun), dan S1 (Sarjana). Tahun 1996,

berhasil meluluskan sarjana sebanyak 22 mahasiswa. Untuk Tahun Anggaran 2018/2019, memiliki sejumlah SDM meliputi tenaga dosen dan administratif sejumlah 34 orang.

Kendati menjadi lembaga pendidikan yang berdiri di wilayah yang memilikipopulasi umatHindu yang cukup tinggi, kenyataannya STHD Klaten juga mengalami kesulitan untuk mengembangkan diri karena sulit mendapatkan formasi tenaga guru yang memadai. Pada saat bersamaan, kondisi pendidikan Hindu di Klaten sekarang ini ditandai dengan minimnya tenaga guru agama. Hal ini terjadi karena pemerintah jarang mengalokasikan kebutuhan akan guru agama Hindu, padahal tahun 2000 guru di tingkat SD misalnya sudah banyak yang pensiun. Sebagai gambaran, pengajar agama Hindu di Sekolah Dasar di Klaten tinggal 26 orang.; SMP mencapai sejumlah 12 orang, dan SMA yang bertugas tinggal 2 orang, sementara formasi tenaga pendidik guru agama tidak ada. Masalah ini terjadi bukan hanya di Klaten tetapi juga di daerah lain di Jawa Tengah. Kalaupun ada formasi yang ditetapkan oleh pemerintah, persebarannya tidaklah merata. Tahun 2003 baru ada penambahan tenaga pengajar, tetapi guru yang diangkatditugaskan di Papua dan Sulawesi (hasil wawancara dalam FGD di STHD Klaten, pada tanggal 13 November 2018). Oleh karena itu, untuk sementara jalan keluarnya adalah dengan mengadakan pesantian. Selain itu, pada tahun 2018, STHD Klaten mengajukan proposal untuk beralih status menjadi sekolah tinggi negeri. Diharapkan tahun 2019 sudah ada izin untuk itu (hasil wawancara dalam FGD di STHD Klaten, pada 13 November 2018).

Meskipun begitu, lulusan sekolah tinggi di wilayah Klaten ini mampu menjadi tokoh baik profesional maupun tokoh seni, juga ada yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten. Alumni/lulusan sekolah tinggi ini menjadi tenaga pendidikan yang potensial di Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Salah seorang anggota PHDI Kabupaten Klaten menyatakan bahwa terjun dalam kancah politik itu penting untuk mempermudah memperjuangkan umat. Hal ini seolah menunjukkan sikap kritisnya terhadap fenomena yang ada sekarang ini yang menyiratkan seolah warga Hindu “pantang” untuk berpolitik praktis, karena terkadang

kurang sesuai dengan etika kehidupan'. Prestasi lain dari sekolah tinggi ini pada tahun 2008 berhasil mencapai akreditasi nilai B. Institusi ini memiliki komitmen untuk menjadi penyelenggara di segala kegiatan agamayang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kepentingan masyarakat Hindu.

Klaten juga memiliki komunitas anak-anak mudayang aktifmengembangkan pendidikan Hindu melalui berbagai cara kreatif. Salah satu usahayang mendapat apresiasi khalayak luas adalah festival budaya nasional yang berhasil menarik jumlah pengunjung hingga 2.000 orang. Mereka juga menggelar kegiatan pesantian yang berhasil dikontrak untuk mengadakan pertunjukan seni di Candi Prambanan dan di Candi Boko tiap dua minggu sekali. Kelompok pesantian ini bahkan punya SK dari PHDI. Para pemuda Hindu di Klaten juga kerap mengadakan kegiatan keagamaan sebulan sekali, seperti membahas bersama Kitab Suci Bhagawad Gita, Dharmawacana, Tirtayatra dan dialog interaktif. Kegiatan edukatif ini juga diwarnai dengan program bidang kesenian. Mereka menyelenggarakan pelatihan seni pewayangan pedalangan jantilan/kuda lumping, bahkan pelatihan seni modern Pujakustik untuk lagu-lagu keagamaan.



Foto 18. Peneliti dalam FGD dengan PHDI Kab. Klaten tanggal 13 November 2018, di STHD Klaten Koleksi Pribadi.

D.POTENSI, TANTANGAN, REKOMENDASI

Potensi Ekonomi

Kantong pemukiman dan perkembangan umat Hindu di Jawa Tengah, yakni Boyolali, Karanganyar, dan Klaten, adalah tiga wilayah pertanian dan perkebunan teh yang subur, serta memiliki peternakan sapi perah. Potensi ekonomi umat Hindu khususnya di Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Jenawi (Kabupaten Karanganyar) hampir sama yakni perkebunan teh dan hasil pertanian. Kecamatan Ngargoyoso dikenal dengan keindahan alam pegunungan yang berhawa sejuk, deretan perkebunan teh yang menambah keunikan panorama indah yang juga difungsikan sebagai daya tarik wisata yang sangat potensial. Keindahan alam ini berpadu dengan beberapa peninggalan arkeologis berupa candi-candi jejak peradaban Hindu abad ke-15 yang eksotis, seperti Candi Cetho, Suku dan Kethek.

Candi Cetho hingga kini masih difungsikan sebagai tempat upacara umat Hindu, disamping sebagai andalan pendukung industri pariwisata budaya di wilayah ini. Kecamatan Jenawi selain memiliki hasil pertanian, juga mempunyai potensi wisata yang bersifat religius, karena sekitar 5 pura besar berdiri di wilayah ini. Potensi ekonominya berpangkal pada Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti dupa, sangkar burung, krupuk bayam, kripik singkong, hingga warung bakso dan siomay. Untuk menampung kreasi atau ide usaha ekonomi masyarakat, maka pemerintah daerah kabupaten setempat membuka Balai Pusat Industri Kreatif (wawancara dengan Priyanto, pemilik perkebunan teh di Desa Kemuning, pada 15 November 2018).

Terdapat beberapa peninggalan arkeologis di wilayah Kabupaten Karanganyar salah satunya berupa candi yang merefleksikan sejarah dan budaya di sekitar abad 15 (masa akhir kekuasaan Majapahit), yakni Candi Suku yang terletak di lereng sebelah barat Gunung Lawu, dan Candi Cetho (berjarak sekitar 4,6 km dari Candi Suku), serta Candi Kethek sebagai obyek wisata alam dan religi andalan Kabupaten Karanganyar, dan menjadi salah satu destinasi wisata nasional di Jawa Tengah. Candi Suku yang dibangun tahun 1359 Caka atau 1437 M, berdiri menghadap ke barat, dengan susunan halaman terdiri dari tiga tingkatan teras, yang melambangkan tingkatan

menuju kesempurnaan. Ketiga teras itu menunjukkan tahapan yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai surga. Dari aspek arsitektur, struktur halaman candi yang disusun berteras, menyerupai punden berundak dari masa pra Hindu. Konsep ini diyakini sebagai areal yang paling sakral yang menuju ke arah puncak Gunung Lawu. Puncak gunung dalam tradisi masa pra Hindu menjadi tempat bersemayam roh nenek moyang. Dalam konteks ini ada persesuaian dengan tradisi Hindu yang menganggap bahwa gunung adalah sebagai tempat tinggal para dewa. Gaya arsitektur candi sebenarnya kelihatan sederhana, berbentuk segitiga trapesium dengan tahapan 3 teras, tetapi sebenarnya tersembunyi keindahan budaya yang mempesona, sehingga ini berbeda dengan candi lainnya di Indonesia. Teras ketiga (paling atas) merupakan pelataran besar tempat berdiri candi induk. Orang dari berbagai daerah sering datang ke lokasi candi ini untuk melakukan meditasi.

Keunikan candi ini adalah memiliki banyak relief dan patung yang berwujud *lingga yoni* yang melambangkan alat kelamin laki-laki dan perempuan serta merefleksikan simbol kehidupan. Ini menandai bahwa candi itu adalah candi masa Hindu, karena *lingga yoni* mewujudkan nilai-nilai filosofis dalam kehidupan manusia sesuai dengan ajaran agama Hindu. Satu keunikan tersendiri dari bangunan candi ini adalah terdapat relief yang menggambarkan rahim wanita yang terletak di pintu masuk di teras paling bawah. Terkait dengan relief *lingga yoni* ini, muncullah berbagai mitos untuk menguji kesetiaan pasangan lewat uji keperawanan serta uji keperjakaan. Seseorang yang sedang diuji harus berjalan melewati *lingga yoni*. Apabila seseorang setelah selesai melewati *lingga yoni* itu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan tertentu di tubuhnya, maka berarti orang itu sudah lulus dari pengujian. Mitos yang sangat diyakini pengaruhnya oleh masyarakat dan pengunjung candi ini, pada gilirannya menyebar dari mulut ke mulut, sehingga berkembang menjadi bentuk tradisi lisan yang beredar di masyarakat, khususnya di kalangan kaum muda. Ini merupakan daya tarik tersendiri bagi mereka untuk mengunjungi situs ini dan mengetahui secara lebih dekat tentang sumber mitos itu.

Keunikan arsitektur bangunan, cara penyampaian pesan

melalui penggambaran bentuk arca dan relief yang unik (seperti bentuk rahim wanita), suasana magis yang melingkupi lingkungan candi, ditambah lagi dengan indahnya pemandangan alam serta udara pegunungan yang sejuk menjadikan situs Hindu ini berkembang menjadi destinasi wisata. Khusus pada hari Sabtu dan Minggu, banyak wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Pada bulan-bulan liburan (Juni, Juli dan Agustus) kunjungan wisatawan mengalami peningkatan sekitar 100 orang /bulan.

Sesuai dengan tujuannya, kunjungan wisatawan ke Candi Suku, adalah : berwisata, yakni untuk menikmati keindahan alam sekitar dan keunikan budaya leluhur ;penelitian baik dilakukan oleh peneliti lokal maupun asing;ritual, untuk melaksanakan upacara persembahyangan atau meditasi yang biasa dilakukan oleh masyarakat kejawaen dan Hindu dari Bali. Jika dibandingkan dengan Candi Cetho, intensitas fungsi dan peran Suku sebagai tempat beribadah (Hindu) terbilang berkurang. Perannya sebagai tujuan wisata tampak lebih berkembang. Dalam upaya memberdayakan peran serta warga setempat untuk mengembangkan pariwisata Candi Suku, Pemerintah Daerah Jawa Tengah melalui Dinas Pariwisata, dan kemudian diaplikasikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, mengadakan pelatihan *guiding*serta cara membuat dan menjual suvenir yang terkait dengan pariwisata setempat. Dalam hal ini, fungsi religius candi sedikit banyak telah mengalami pergeseran makna (wawancara dengan Cipto Wiyono, sama dengan di atas).

Alasan mengapa Kecamatan Jenawi dikatakan sebagai daerah wisata religi, salah satunya adalah adanya Candi Cetho yang hingga kini masih berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Hindu, baik dari Jawa maupun Bali. Aspek spiritual yang menjadi dasar pengembangan candi inilah yang menjadikan alasan mengapa Candi Cetho hingga kini masih menyimpan nilai tradisi lokal budaya Hindu Jawa, sehingga fungsi dan peran candi ini sebagai daya tarik wisata religi masih sangat kuat, disamping sebagai wisata sejarah, budaya, dan lingkungan alam. Masyarakat di sekitar Cetho sekitar 80% memeluk Agama Hindu, dan mereka menjadi pendukung dan pelaku ritual agama di tempat ini. Dengan sendirinya hal itu telah mempertahankan

dan mengembangkan fungsi dan peran candi ini sebagai pusat peradaban Hindu. Mengembangkan tradisi dan budaya warisan leluhur untuk kegiatan pariwisata di daerahnya, menjadikan Candi Cetho sebagai daya tarik wisata yang secara fisik bernilai budaya tinggi, dan secara spiritual sebagai tempat beribadah yang suci dan bernuansa mistis. Jadi, tradisi budaya spiritual Hindu mampu berperan dalam mengembangkan warisan budaya ini sebagai pusat peribadatan mereka. Situs Hindu ini pun telah menyumbangkan keuntungan ekonomikepada masyarakat termasuk pendapatan daerah.

Dalam menjalankan tradisi keagamaan, umat Hindu di wilayah Candi Cetho tidak memiliki dan melakukan pemujaan di pura keluarga/*sangghah*(Bali). Mereka melaksanakan ibadah/pemujaan hanya kepada Tuhan sebagai Tri Murti. Sementara tradisi budaya yang selalu diadakan di wilayah ini adalah *modosionan*, yakni upacara yang diselenggarakan berdasar perhitungan kalender Jawa dan wuku. Upacara ini biasanya jatuh setiap hari Selasa Kliwon. Selain itu juga dilaksanakan tradisi Jawa yang disebut bersih desa, yakni upacara yang dilakukan sebagai wujud terimakasih kepada leluhur, juga syukur kepada Tuhan, karena telah diberkati keberhasilan dalam usaha pertaniannya.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Nargoyoso, masyarakat Hindu setempat disibukkan pula dengan usaha seperti menjadi pengusaha kuliner, *home stay*, vila,sertapengelolaan UKM pembuatan kripik, dan sebagainya selain menjadi peternak dan petani sayur yang juga semakin berkembang saat ini.Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah untuk memberdayakan potensi daerah dan masyarakat, makaKecamatan Nargoyoso yang menjadi salah satu pusat umat Hindu di Kabupaten Karanganyar, turut berpartisipasi aktif mengikuti program pemerintah PHBS. PBHS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Pasraman/Sekolah adalah merupakan program kerjasamaKementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di pasaraman/ sekolah dan pura. Pasraman Tunggal Ika di Kecamatan Nargoyoso di Pura Tunggal Ika Desa Kemuning Kecamatan Nargoyoso ditunjuk menjadi *Project Pilot* untuk

mengimplementasikan PHBS yang disebut sebagai Advokasi dan Sosialisasi PHBS oleh Parisadha Provinsi Jawa Tengah melalui Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Karanganyar dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Acara akbar itu dihadiri oleh Ketua PHDI Kabupaten Karanganyar, Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, didampingi oleh Puskesmas Kecamatan Ngargoyoso. Sebanyak 69 siswa Pasraman Tunggal Ika yang berasal dari siswa SD, SMP dan SMA berpartisipasi penuh dalam acara ini. Dari kegiatan pasraman di Pura Tunggal Ika ini, menyiratkan bahwa lembaga Hindu ini mampu bekerjasama dan berkontribusi dalam program-program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Ngargoyoso. Sekaligus hal ini membuktikan adanya pengakuan atas legalitas peran umat Hindu sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, maupun pusat untuk merealisasikan program-programnya di daerah.

Kegiatan lain yang dilakukan di Pura Tunggal Ika adalah upacara Agni Hotra dan Dharmatula, yang diselenggarakan oleh Forum Remaja Hindu Kecamatan Ngargoyoso dan Peradah Kecamatan Jenawi. Acara ini diselenggarakan dalam rangka temu kangen para remaja Hindu wilayah eks Karesidenan Surakarta (pembagian administratif pemerintahan untuk daerah pemerintahan di Surakarta pada masa Kolonial), yang dihadiri oleh seluruh anggota Peradah Kecamatan Jenawi dan anggota Forhin di Kecamatan Ngargoyoso, serta undangan dari Klaten, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar. Pertemuan ini didasari pada semangat satu hati, satu rasa dan satu jiwa, yang mengarah pada konsep persatuan dan kesatuan para generasi Hindu.

Pendidikan Hindu

Dinamika kehidupan umat di Jawa Tengah, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu yang paling dominan adalah masalah pendidikan. Kurang memadainya jumlah tenaga pengajar atau guru agama Hindu di sekolah-sekolah tingkat SD maupun SMP dan SMA, mengakibatkan siswa sekolah, khususnya SD tidak mendapatkan jatah jam pelajaran secara optimal. Di sisi lain kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, khususnya tentang pengangkatan tenaga

guru agama (Hindu) yang sangat terbatas, membawa dampak negatif dalam proses belajar mengajar siswa dalam memperoleh pelajaran agama Hindu di sekolah. Hal ini masih ditambah lagi dengan kenyataan bahwa tenaga Penyuluh Agama Hindu di wilayah provinsi ini hanya terdiri atas 3 (tiga) orang, yang berada di ketiga kantong umat yakni di Kabupaten-kabupaten Karanganyar, Klaten dan Boyolali. Keadaan ini memungkinkan terjadinya beban yang berat bagi ketiga tenaga penyuluh karena selain harus melayani umat yang cukup banyak di wilayahnya, juga tidak tertutup kemungkinan harus berkeliling membantu melakukan tugasnya ke kabupaten lain. Alternatif lain adalah bahwa mereka dibantu oleh tenaga penyuluh non PNS (Data Dalam Angka Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Tengah, September 2018). Hingga sekarang upaya untuk mencari solusi dalam mengatasi kekurangan tenaga pengajar masih terus dilakukan, terutama oleh Pembimas Hindu provinsi. Hal ini sebenarnya merupakan masalah yang juga dihadapi baik di Jawa Tengah secara umum maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hambatan yang terjadi pada bidang pendidikan formal ini, pada gilirannya telah mendorong umat untuk mencari alternatif lain, antara lain melalui lembaga pendidikan informal *pasraman* agar kekurangan pengajaran yang terjadi di beberapa tempat bisa diatasi.

Menimbang seluruh kondisi ini, PHDI Jawa Tengah mengusulkan diadakannya formasi guru agama Hindu dengan ketentuan pendidikan S1 di Provinsi Jawa Tengah Tahun meliputi:

1. Alokasi formasi 5 orang untuk Kankemenag Kabupaten Tegal
2. Alokasi formasi 12 orang untuk Kankemenag Kabupaten Pekalongan
3. Alokasi formasi 1 orang untuk Kankemenag Kota Pekalongan
4. Alokasi formasi 2 orang untuk Kankemenag Kabupaten Kendal
5. Alokasi formasi 4 orang untuk Kankemenag Kota Semarang
6. Alokasi formasi 1 orang untuk Kankemenag Kabupaten Semarang
7. Alokasi formasi 1 orang untuk Kankemenag Kabupaten Grobogan
8. Alokasi formasi 12 orang untuk Kankemenag Kabupaten Boyolali
9. Alokasi formasi 17 orang untuk Kankemenag Kabupaten Klaten
10. Alokasi formasi 2 orang untuk Kankemenag Kabupaten Sukaharja
11. Alokasi formasi 7 orang untuk Kankemenag Kabupaten /Kota

Surakarta

12. Alokasi formasi 9 orang untuk Kankemenag Kabupaten Sragen
13. Alokasi formasi 10 orang untuk Kankemenag Kabupaten Karanganyar
14. Alokasi formasi 1 orang untuk Kankemenag Kabupaten Pati
15. Alokasi formasi 8 orang untuk Kankemenag Kabupaten Jepara
16. . Alokasi formasi 2 orang untuk Kankemenag Kabupaten Banyumas
17. Alokasi formasi 1 orang untuk Kankemenag Kabupaten Rembang
18. Alokasi formasi 1 orang untuk Kankemenag Kabupaten Cilacap
19. Alokasi formasi 1 orang untuk Kankemenag Kabupaten Banjarnegara
20. Alokasi formasi 1 orang untuk Kankemenag Kabupaten Temanggung
21. Alokasi formasi 1 orang untuk Kankemenag Kabupaten Wanasaba
22. Alokasi formasi 1 orang untuk Kankemenag Kabupaten Magelang
23. Alokasi formasi 2 orang untuk Kankemenag Kabupaten/Kota Magelang

Jadi, kebutuhan terbesar bagi tenaga guru agama yang terbesar adalah masing-masing Kab. Klaten, Karanganyar, Boyolali , Pekalongan

Konversi Agama

Sekitar tahun 1967, Kabupaten Karanganyar ini menjadi kantong Hindu, tepatnya sejak diselenggarakannya upacara *sudiwadaniyng* menjadikan sekitar 10.000 orang memeluk agama Hindu. Pada tahun yang sama, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten. Upacara *sudiwadani* di Prambanan berhasil menarik sekitar 10.000 orang untuk memeluk agama Hindu. Fenomena ini cukup menarik, karena masyarakat kejawaen mayoritas menyatakan diri memeluk Hindu. Beberapa persamaan persepsi dalam menjalankan tata cara ritual keagamaan menjadi salah satu faktor masyarakat kejawaen waktu itu lebih memilih Hindu.

Tahun 1969 diadakan kursus-kursus agama Hindu di Pura Sedaleman Kecamatan Mojogedang, dan kemudian terbentuklah Paguyuban Ngesti Tunggal. Sekitar tahun 1978, dianggap sebagai masa puncak umat Hindu di wilayah ini. Jumlah umat mencapai 200.000 orang. Waktu itulah banyak orang yakin bahwaramalan

Joyoboyo atau sumpah Sabdo Palon dan Naya Genggong menjadi nyata. Seperti telah diungkap sebelumnya, ramalan tersebut mengatakan bahwa setelah runtuhnya kekuasaan Hindu, akan tiba waktunya ketika kekuatan Hindu akan kembali berjaya di Nusantara.

Namun, jumlah itu sudah merosot jauh, hanya tinggal sekitar 65%. Kurang lebih tersisa 2.000 umat yang tersebar di Kecamatan Ngargoyoso (sekitar 600 jiwa di Desa Kemuning), sekitar 1.500 jiwa terdapat di Kecamatan Jenawi, dan selebihnya tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar lainnya. Menurunnya jumlah umat ini ditengarai terjadi sebagai akibat dari fenomena sosial budaya seperti perkawinan dan kelahiran (waktu itu cukup rumit mencari akta kelahiran Hindu bagi seorang anak). Penyebab lainnya adalah terkait dengan pengurusan akta perkawinan di tingkat kabupaten yang menurut pengakuan umat sangat jarang menyediakan tenaga Petugas Pembantu Pada Pencatatan Perkawinan. Hal ini menyebabkan calon mempelai dan keluarganya harus menunggu dalam waktu lama. Sebagai solusi dari masalah ini, agar upacara perkawinan bisa segera dilaksanakan, maka perkawinan itu dilaksanakan dengan tata cara agama salah satu pasangan calon pengantin (bukan agama Hindu). Namun demikian, sebagian pasangan itu justru tidak kembali ke agama Hindu, melainkan lanjut menjalankan agama yang mereka "anut" ketika melangsungkan upacara perkawinan.

Tahun 1998 terjadi beberapa kebijakan dari pemerintah yang menyatakan bahwa upacara perkawinan Hindu sudah bisa disahkan sampai pada tingkat Petugas Pembantu Pada Pencatatan Perkawinan, yang disebut sebagai Pinandita Lokapalasaraya. Melalui SK Tahun 1980, pada tahun 2013 Dirjen membantu mendanai sebesar 5 juta, kemudian pada tahun 2012-2013, Petugas Pembantu Pada Pencatatan Perkawinan mendapat insentif sebesar Rp.75.000,00/bulan, tapi diterima 3 (tiga) bulan sekali, menjadi sebesar Rp.225.000,00 potong pajak sehingga menjadi Rp.180.000,00. Walau jumlahnya tidak besar, namun tetap tidak menyurutkan niat umat untuk menjalankan tugasnya.

Masalah kurangnya tenaga pengajar atau guru Agama Hindu di sekolah-sekolah juga mengakibatkan siswa Hindu terpaksa mengikuti pelajaran agama lain agar nilai rapornya tidak

kosong, dan pada gilirannya sebagian siswa tersebut melakukan konversi agama. Seorang gadis Hindu yang kawin dengan seorang pemuda beda agama seringkali harus mengikuti agama suaminya. Sebaliknya, tak jarang pula terjadi seorang pemuda agama lain justru memilih mengikuti agama istrinya yang Hindu (hasil wawancara dalam FGD di Pura Agung Girinatha Semarang, pada 10 November 2018). Selain itu, penurunan jumlah umat Hindu juga disebabkan antara lain oleh usaha mencari pekerjaan yang lebih baik (wawancara dengan Priyanto, Ketua Parisadha Kecamatan, pada 12 November 2018).

Walau demikian, sikap-sikap toleransi secara simbolis tetap ditunjukkan oleh pemimpin masyarakat, yakni para pejabat pemerintahan. Bupati Klaten dalam rangka perayaan hari Raya Keagamaan Hindu yakni Dharma Santi Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940/ 2018 yang dilaksanakan di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan tema “Kita Wujudkan Nilai Ajaran Tri Hita Karana dalam Memperkokoh dan Mempertahankan NKRI.” Dalam acara ini Bupati Klaten memberikan sambutan pembukaan (<https://klatenkab.go.id/umat-hindu-klaten-gelar-perayaan-dharma-santi/>). Secara individual ada harmonisasi, tetapi secara legal formal, beberapa aturan pemerintah setempat ada kalanya masih menghambat umat untuk mengembangkan diri baik secara kualitas maupun kuantitas. Di sisi lain, penerimaan masyarakat lokal terhadap pendatang serta harmonisasi di antara mereka dapat dilihat antara lain dari jumlah pura atau tempat ibadah umat Hindu di Klaten. Izin yang diberikan bagi pembangunan pura dan keamanan yang diberikan oleh lingkungan, menjadikan sejumlah pura tetap aman dan aktif menjalankan kegiatan keagamaannya bagi umat.

SDM Hindu

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/ kota, yakni 30 kabupaten, dan 5 kota. Administrasi kota pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8490 desa/kelurahan. Tiga kabupaten yang merupakan kantong umat Hindu adalah Boyolali, Karanganyar, dan Klaten. Luas wilayah di ketiga kabupaten itu masing-masing adalah: Kabupaten Boyolali, terdiri atas 19 kecamatan, meliputi

1.008,45 km² dengan jumlah penduduk 989,776 jiwa; Kabupaten Klaten, terdiri dari 28 kecamatan meliputi 658,22 km² dengan jumlah penduduk 1.304.519; Kabupaten Karanganyar, terdiri dari 17 kecamatan, meliputi 775,44 km² dengan jumlah penduduk 896,991 jiwa.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada umat sejumlah lembaga keagamaan dibentuk di Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan mengabdikan bagi kepentingan umat se-Dharma, menjaga kerukunan dan solidaritas, membimbing, dan mendorong perkembangan budaya Hindu di tengah masyarakat yang heterogen. Berikut adalah daftar lembaga keagamaan Hindu di Provinsi Jawa Tengah selengkapnya :

Tabel 22: Daftar Lembaga Keagamaan Hindu
Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama Lembaga	Jumlah
1	Parisada Hindu Dharma Indonesia	34
2	WHDI	16
3	Yayasan	14
4	Pemuda	16
5	Pesantian	23
6	Pemberdayaan	25
7	Paruman Wasi	7
8	Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh)	5
9	LPDG	3
10	Serati Banten	3
	Jumlah	146

Tentunya dalam mendukung berjalannya institusi tersebut di atas diperlukan peran serta individu-individu yang berkomitmen untuk mengelola lembaganya. Beberapa di antara para tokoh yang mendukung terlaksananya berbagai kegiatan adat dan agama di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 23: Tokoh yang Mendukung Kegiatan Adat di Jawa Tengah

No.	Nama	Jabatan
1	Putu Adhi Sutrisna	PHDI Kota Semarang
2	I Nengah Warta Darmayana	PHDI Kota Semarang/ Ketua
3	I Made Sudira	PHDI Kota Semarang

4	Yatmi Nengah WD	PHDI Kota Semarang
5	A.A.A Ragendawati	PHDI Kota Semarang
6	Made Sutapa	PHDI Semarang Selatan
7	I Nyoman Surahatta	PHDI Jawa Tengah
8	Jaka Suyitna	Bimas Hindu Jawa Tengah
9	Suejaelanto	PHG Jawa Tengah
10	Anang Ngakan	WHDI Jawa Tengah/ Ketua
11	I Nyoman Selamat	PHDM Kota Semarang
12	Wisnu Hendrata	PHDI Kab.Klaten/ Ketua
13	Suparman	PHDI Kab.Klaten/ Sekretaris
14	Sugeng Sapta Waryasa	Yayasan Widya Aksara Dharma
15	I Wayan Szhapiartha	PHDI Kab. Klaten
16	Lagiya Pratono	Pengurus Pura
17	Cening Ratmawati	WHDI Kab. Klaten
18	Nukning Sri Rahayu	Dosen STHD Klaten
19	Sugiman	Dosen STHD Klaten
20	Dwi Hantoro	PGHD Klaten
21	Rudi Doso Cahyono	PGHD Klaten
22	Sudjiman	STHD Klaten
23	Tukijan	STHD Klaten
24	Atmo Sentono	Pemangku Pura Tunggal Ika Kec. Nargoyoso,Kab.Karanganyar
25	Pujianto	Ketua Parisadha Kec.Nargoyoso
26	Pinandita Lokapalasaraya	PetugasPembantu Pada Pencatatan Sipil,Kec. Nargoyoso Kab.Karanganyar
27	Cipto Wiyono	Petugas Restribusi Candi Sukuh
28	Pinandita Jayapranata	Kec. Jenawi Kab. Karanganyar
29	Pinandita Subarta	Kec.Jenawi Kab. Karanganyar
30	Pinandita Jatmika Widodo	Kec. Nargoyoso, Kab.Karanganyar
31	Dwi Hartono	Ketua Pemuda Hindu Klaten
32	Suwaldi	Ketua PHDI Boyolali
33	Dwi Setyawan	Sekretaris PHDI Boyolali

Selain nama-nama di atas, tentu masih ada lagi deretan nama-nama tokoh yang selama bertahun-tahun mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya bagi umat Hindu di Provinsi Jawa Tengah. Walaupun sudah mengabdikan pengabdian mereka dan eksistensi institusi yang mereka kelola, kenyataannya lembaga keagamaan di Jawa Tengah, termasuk PHDI sendiri belum mampu memenuhi sumber daya manusia yang memadai untuk melayani umat, sehingga perlu bantuan Bimas Hindu Jawa Tengah sebagai mitra kerjanya. Namun demikian perlu juga dicermati data pegawai struktural Bimas Hindu Jawa Tengah

berikut ini:

Tabel 24: Data Pegawai Struktural Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1	Pembimas	1
2	Penyelenggara	1
3	Penyusun Program dan Anggaran	1
4	Penyusun Laporan Keuangan	1
5	Pengelola Data Pendidikan	1
6	Pengelola Data Penyelenggara Hindu	1
Jumlah		6

Data di atas memperlihatkan bahwa kondisi kepegawaian Bimas Hindu di Kantor Wilayah Kementerian Agama yang mengurus umat di Provinsi Jawa Tengah terbilang kurang memadai dalam mengurus umat yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Masing-masing pejabat yang duduk dalam struktur kepegawaian perlu mendapat bantuan tenaga, terutama pada bagian pengelola Data Pendidikan dan Pengelola Data Penyelenggara Hindu. Untuk itu ke depan perlu adanya pengembangan struktur, usulan tenaga penyelenggara, penambahan tenaga lewat formasi pengangkatan tenaga baik struktural maupun fungsional.

Secara khusus, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, mengenai SDM Hindu, PHDI Jawa Tengah juga mengusulkan agar diadakan perekrutan Guru Agama Hindu PNS di kabupaten/kota; peningkatan status tenaga honorer dan pramubakti menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; pengembangan struktur penyelenggara Bimas Hindu di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Sragen dan Kota Semarang. Usulan untuk kebutuhan PNS Jabatan Penyuluh Agama, meliputi berbagai wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 76 orang. Untuk usulan kebutuhan PNS Jabatan Struktural Bimas Hindu Kementerian Agama, Kantor Wilayah Jawa Tengah meliputi jabatan-jabatan: Pengelola Urusan Agama; Pengadministrasi; Penyusun Bahan Pembinaan Urusan dan Penyusun Bahan Pembinaan Pendidikan masing-masing 1 orang.

DAFTAR PUSTAKA

Data Dalam Angka Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Tengah, September 2018

Hardjanta, R.W . 1955 . *Hyang Kalengki Watara Melaksana Djanka Buana*. Surakarta

Rahayu, Nukning Sri . 2016. "Pura Mandiri Seta Baluwarti Kraton Surakarta Pendidikan Karakter Melalui Realisasi Tri Hita Karana Dan Nilai Pancasila", dalam *Ensiklopedi Hindu Nusantara*////b[[[b

Sumber Internet :

<http://damihantara.blogspot.com/2010/08/perkembangan-umat-Hindu-karanganyar-html>

<http://www.google.com/gambar+peta+provinsi+jawa+tengah>

<http://phdi.or.id/beritapembimas.hindu.Jateng-serahkan-bantuan-gamelan-pada-phdi-kab-karanganyar>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah)

<http://tawondast.blogspot.com/2017/03sumber-daya-alam-provinsi-jawa-tengah.html>

<https://teamtouring-net/pura-di-karanganyar.html>

Daftar Wawancara

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan
1.	Cleo (55 th)	Pura Sahasra Adipura Surakarta	Staf Pengurus Yys Budhilaksana
2.	Darmaja,A.A (53 th)	Pura Girinatha Semarang	Pengurus PHDI Kota Semarang
3.	Danayana, Made (60 th)	Pura Girinatha Semarang	Ketua PHDI Kota Semarang
4.	FGD	Pura Girinatha Semarang	Pengurus PHDI Kota Smg/Jateng
5.	FGD	STHD Klaten	Pengurus PHDI Klaten,dan Aktivis Organisasi Hindu
6.	Indrawati, Michael (48 th)	Sahasra Adhipura Surakarta	Ketua Yayasan Budhilaksana
7.	Priyanta (48 th)	Pura Tunggal Ika Kecamatan Ngarayasa	Ketua Parisadha Kecamatan Ngarayasa
8.	Ratnawati, Cening (45 th)	Pura Girinatha Semarang	Ketua Bidang Sosial PHDI Jateng
9.	Sentana, Atma (60 th)	Pura Tunggal Ika	Pemangku Pura Tunggal Ika
10.	Sukardi (60 tahun)	STHD Klaten	Ketua Komunitas Guru Agama Hindu Kab. Klaten
11.	Suludi, I Nyoman (66 th)	Pura Mandiriseta, Baluwarti Surakarta	Dosen UNS dan KOKAR Surakarta
12.	Suyita, Joko (48 th)	Pura Girinatha Semarang	Anggota PHDI Kab. Semarang
13.	Wahyasa, Sugeng Sapta (53 th)	STHD Klaten	Ketua Yayasan Widya Aksara Dharma, STHD Klaten.
14.	Sentana, Atma (60 th)	Pura Tunggal Ika Kecamatan Ngarayasa	Pemangku Pura.

DINAMIKA PENDIDIKAN HINDU DI JAWA TIMUR

Ni Putu Suwardani
Arya Suharja
Sulandjari

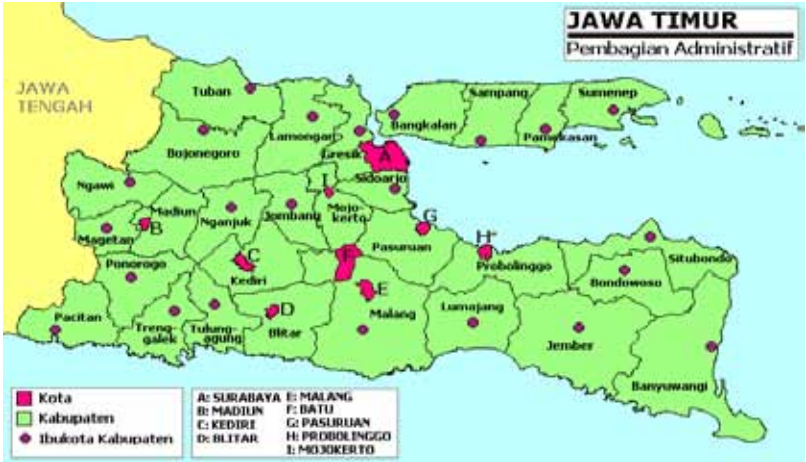
Jawa Timur adalah provinsi dengan luas 48.039,14 km², berbatasan dengan Pulau Kalimantan di sebelah utara, dengan Pulau Bali di sebelah timur, bersisian dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah baratnya. Secara astronomis terletak pada 111,0⁰ hingga 114,4⁰ Bujur Timur dan 7,12⁰ hingga 8,48⁰ Lintang Selatan. Lokasi Provinsi Jawa Timur berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti provinsi lainnya di Indonesia, wilayah ini mempunyai perubahan musim sebanyak dua jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura.

Sekitar 60% wilayah Jawa Timur (28.833km) merupakan dataran rendah, dan hanya kurang lebih 40% (17.597km) yang merupakan dataran tinggi. Wilayah yang termasuk dataran rendah seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan lain-lain. Pada wilayah kota/kabupaten ini tidak ada atau jarang dijumpai gunung atau perbukitan. Berbeda dengan kawasan seperti Malang, Batu, Kediri dan Lumajang banyak dijumpai gunung dan pegunungan. Tanah-tanah yang ada di Jawa Timur termasuk golongan tanah yang subur. Tingkat kesuburan tanah sangat dipengaruhi oleh banyaknya gunung berapi yang masih aktif. Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa gunung berapi yang masih aktif yang tersebar mulai dari perbatasan barat ke timur meliputi Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, dan Gunung Ijen dengan gunung tertinggi yaitu Gunung Semeru.

Jawa Timur memiliki beberapa sungai yang di antaranya mengalir melewati Jawa Timur yaitu Sungai Brantas, Sungai

Bengawan Solo, Sungai Konto, dan Sungai Mas. Keberadaan sungai-sungai ini pada zaman dahulu sangat membantu masyarakat sebagai sarana transportasi yang cepat dibandingkan melalui darat. Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004).

Kawasan pesisir dan laut Jawa Timur secara umum dapat dikelompokkan menjadi kawasan pesisir utara, pesisir timur dan pesisir selatan. Kawasan pesisir utara dan timur umumnya dimanfaatkan untuk transportasi laut, pelestarian alam, budidaya laut, pariwisata dan pemukiman nelayan. Kawasan pesisir selatan, umumnya merupakan pantai terjal dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang kondisi gelombang dan ombaknya besar. Wilayah yang termasuk zona pesisir utara Jawa Timur adalah Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Kota Pasuruan, Probolinggo. Wilayah yang masuk dalam zona pesisir timur adalah kabupaten Banyuwangi. Sedangkan wilayah yang masuk dalam zona pesisir selatan adalah Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, dan Jember.



Peta Provinsi Jawa Timur

Secara administratif, berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah Jawa Timur maupun dalam buku Provinsi Jawa Timur Dalam Angka (2018:4), wilayah Jawa Timur terdiri dari: 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 2.827 Kelurahan dan 5.674 Desa.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak dan paling majemuk di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Timur dari hasil proyeksi yaitu sebesar 42.030.633 jiwa pada tahun 2017 atau naik sebesar 0,53 % dibandingkan tahun 2016 sebesar 39.075.152 jiwa dengan kepadatan 884 jiwa/km². Tahun 2017 Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 3.195.487 jiwa, diikuti Kabupaten Malang 3.046.218 jiwa dan Kabupaten Jember 2.430.185 jiwa (BPS Provinsi Jawa Timur 2018).

Penduduk Jawa Timur terbagi menjadi dua menurut tempat tinggalnya yaitu di pedesaan dan perkotaan. Penduduk yang hidup di pedesaan biasanya lebih banyak, jika dibandingkan yang hidup di kota. Selain itu penduduk yang hidup di kota biasanya bukanlah penduduk asli, melainkan warga perantauan yang datang luar Jawa Timur atau negeri. Sedangkan penduduk yang asli warga Jawa Timur mayoritas hidup di pedesaan. Penduduk yang hidup di kota biasanya bermata pencaharian sebagai karyawan kantor, karyawan pabrik, PNS, serta beberapa profesi lain. Sedangkan penduduk yang hidup di pedesaan biasanya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, guru, dan sedikit dari mereka berprofesi sebagai karyawan pabrik atau kantor.

Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah Suku Jawa, namun secara etnis Jawa Timur terdiri atas komunitas yang heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura mendiami Pulau Madura, dan daerah Tapal Kuda (Jawa Timur bagian timur), terutama di daerah pesisir utara, dan selatan. Pada sejumlah wilayah di Tapal Kuda, Suku Madura bahkan merupakan mayoritas. Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat minoritas Suku Madura, umumnya mereka bekerja di sektor informal. Suku Bawean

mendiami Pulau Bawean di bagian utara Kabupaten Gresik. Suku Tengger, konon adalah keturunan pelarian Kerajaan Majapahit, tersebar di Pegunungan Tengger dan sekitarnya, yaitu meliputi wilayah pegunungan empat kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Suku Osing tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Orang Samin tinggal di sebagian pedalaman Kabupaten Bojonegoro. Selain penduduk asli, Jawa Timur juga merupakan tempat tinggal bagi para pendatang. Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup signifikan, dan mayoritas di beberapa tempat, diikuti dengan Arab dan India; mereka umumnya tinggal di daerah perkotaan. Suku Bali juga tinggal di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Dewasa ini banyak ekspatriat tinggal di Jawa Timur, terutama di Surabaya, dan sejumlah kawasan industri lainnya.

Keberagaman di Jawa Timur juga tampak dari segi penganut agama yang menjadi penduduk di wilayah ini. Sebagai mayoritas adalah Islam (40.720.467), kemudian disusul dengan Kristen Protestan (1.271.343), Katholik (453.620), Hindu (392.890), Budha (205.735), serta Konghucu (6.166). Secara khusus di tahun 2018, Pembimas Hindu Jawa Timur melakukan pendataan ulang jumlah umat Hindu di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur dan berikut adalah hasil selengkapnya :

Tabel 25: Jumlah Umat Hindu di Jawa Timur Tahun 2018

No.	Kab/ Kota	Kumlah Pemeluk Agama Hindu		
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Kab. Pacitan	58	74	132
2	Kab. Ponorogo	870	816	1.686
3	Kab. Trenggalek	154	139	293
4	Kab. Tulungagung	345	335	680
5	Kab. Blitar	26.182	28.183	54.365
6	Kab. Kediri	14.913	16.914	31.827
7	Kab. Malang	11.602	11.770	23.372
8	Kab. Lumajang	6.824	6.363	13.187
9	Kab. Jember	3.747	3.746	7.493
10	Kab. Banyuwangi	28.626	27.800	56.426
11	Kab. Bondowoso	121	112	233
12	Kab. Situbondo	95	91	186
13	Kab. Probolinggo	19.784	20.091	39.875

14	Kab. Pasuruan	13.572	12.992	26.564
15	Kab. Sidoarjo	2.420	2.449	4.869
16	Kab. Mojokerto	1.169	1.237	2.406
17	Kab. Jombang	1.782	2.023	3.805
18	Kab. Nganjuk	314	328	642
19	Kab. Madiun	750	942	1.692
20	Kab. Magetan	65	92	157
21	Kab. Ngawi	114	131	245
22	Kab. Bojonegoro	1.102	1.192	2.294
23	Kab. Tuban	260	283	543
24	Kab. Lamongan	1.432	1.709	3.141
25	Kab. Gresik	4.580	5.058	9.638
26	Kab. Bangkalan	-	-	-
27	Kab. Sampang	20	14	34
28	Kab. Pamekasan	18	25	43
29	Kab. Sumenep	66	79	145
30	Kota Kediri	1.298	1.359	2.657
31	Kota Blitar	1.134	934	2.608
32	Kota Malang	9.602	9.849	19.451
33	Kota Probolinggo	801	808	1.609
34	Kota Pasuruan	13.109	13.455	26.564
35	Kota Mojokerto	707	752	1.459
36	Kota Madiun	1.780	1.758	3.538
37	Kota Surabaya	21.324	23.747	45.071
38	Kota Batu	1.769	2.163	3.932
Jumlah		192.947	199.843	392.890

Sumber: Pembimas Hindu Kemenang Provinsi Jawa Timur.

A. KEBERADAAN UMAT DAN BUDAYA HINDU DI JAWA TIMUR

Eksistensi umat Hindu di Provinsi Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari sejarah kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Timur, terutama periode setelah kepindahan pusat kerajaan Mataram Kuna dari Karaton Ratu Boko di Yogyakarta ke hulu Sungai Brantas sampai surutnya Kerajaan Majapahit. Ingatan kolektif tentang latar belakang sejarah dan identitas kultural sebagai “keturunan pelarian Majapahit” merupakan jawaban yang umum atas pertanyaan: Siapakah umat Hindu di Jawa Timur?.

Jika dilihat dari proses masuknya agama Hindu di Jawa Timur, terdapat berbagai variasi pendapat. Demikian juga dengan sejarah masuknya agama Hindu di berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Pengaruh agama Hindu dapat dilihat dari

peninggalan berupa candi-candi, bentuk pemerintahan kerajaan, susunan masyarakat yang mulai mengenal raja, nenek moyang mulai percaya kepada dewa-dewa, serta mengantarkan bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah (Soekmono, 1973:7).

Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, terdapat lima agama yang berkembang di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Buddha. Kemudian pengakuan resmi dari negara Indonesia terhadap agama Kong Hu Cu baru datang pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di tahun 2000. Sehingga saat ini ada enam agama yang mendapat pengakuan di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Jika dilihat dari persebarannya, pulau Bali dan pulau Lombok bagian barat merupakan pulau dengan konsentrasi penduduk beragama Hindu terbesar di Indonesia.

Umat Hindu di Jawa Timur sangat heterogen, dari segi latar belakang etnik komunitas umat Hindu di Jawa Timur sebagian besar adalah suku Jawa, suku Tengger dan suku Bali, dan sebagian kecil berlatar belakang suku Madura, etnik Tionghoa, etnik India (terutama India bagian Selatan), dan suku-suku bangsa dari seluruh Indonesia. Untuk tiga suku bangsa yang merupakan latar belakang sebagian besar umat Hindu Jawa Timur: suku Jawa, suku Tengger dan suku Bali, seluruhnya terkait dengan “sejarah” atau ingatan kolektif, bahwa mereka adalah keturunan warga kerajaan Majapahit yang melakukan eksodus besar-besaran pasca-jatuhnya Majapahit. Sebagian besar informan penelitian ini menyatakan alasan yang melatar-belakangi eksodus itu adalah karena alasan prinsip, bahwa leluhur mereka tidak bersedia konversi menjadi penganut agama Islam, kemudian melakukan perjalanan panjang dengan dua pola besar: *Pertama*, eksodus ke arah hutan dan lereng-lereng gunung, seperti lereng Gunung Bromo dan Gunung Semeru, lereng Gunung Arjuno dan perbukitan sekitarnya, Alas Purwo dan Semenanjung Blambangan, bahkan sampai ke lereng Gunung Lawu (Jawa Tengah), Gunung Merapi (Jawa Tengah dan DIY) dan perbukitan Gunung Kidul (DIY); *Kedua*, menyeberang ke Pulau Bali.

Penemuan kembali identitas ke-Hindu-an setelah selama 500 tahun bertahan sebagai penganut Kejawen, penganut

agama Tengger dan penganut berbagai aliran Kebathinan Jawa, distimulasi perjumpaan (*encounter*) di era modern dengan umat Hindu dari suku Bali yang merantau di berbagai kota besar di pulau Jawa. Proses konfirmasi nilai dan asimilasi ini berlangsung alamiah, terutama atas dasar “perasaan senasib-seperjuangan” dalam mempertahankan warisan nilai-nilai kerohanian dan kebudayaan Hindu. Terdapat 44 kelompok komunitas Aliran Kebathinan/Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di provinsi Jawa Timur. Kelompok yang berintegrasi menjadi penganut Hindu Dharma kebanyakan berasal dari kelompok Budha Jawi Wisnu, dan Sanatana Dharma Majapahit Pancasila (Sadhar Mapan).

Peranan diaspora Bali dalam proses konfirmasi nilai, asimilasi dan pembentukan kantong-kantong (*enclaves*) komunitas Hindu di Jawa Timur dibenarkan oleh hampir seluruh informan penelitian ini. Sebagian kecil informan menyetujui faktor pendidikan modern, ketahanan budaya dan kemandirian masyarakat umat Hindu Jawa Timur sebagai faktor dominan terjadinya konfirmasi nilai dan integrasi umat Hindu Jawa Timur. Sosialisasi dan pelayanan pada periode awal antara lain dilakukan oleh Sidra dan Ketut Sudira, dan diteruskan oleh beberapa dosen senior IKIP Malang, seperti Hoykas, Drs. Suru Kertawangi, sampai angkatan Drs. Nyoman Sumertika dan Sumber Artha yang lebih muda (Wawancara dengan Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, MH. 25 November 2018 dan. Dr. Ketut Sudiarta, MSi., 29 November 2018).

Kehadiran diaspora Bali di berbagai daerah di Indonesia memperlihatkan bahwa etnis Bali juga berada di luar tanah kelahirannya. Secara historis, menurut Dwipayana (2004), kemunculan diaspora Bali didasarkan pada beberapa konteks dan tujuan-tujuan tertentu (*modus*). Ketika memasuki era negara nasional, perpindahan penduduk Bali didasarkan atas beberapa *modus* antara lain merantau secara swakarsa, merantau karena keinginan untuk pergi dari daerah asalnya secara sukarela. Ada beberapa alasan etnis Bali keluar Bali yaitu mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Pada era awal kemerdekaan, orang Bali mulai masuk ke beberapa kota besar di Jawa yang memiliki institusi pendidikan yang terkemuka

seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Yogyakarta dan Bandung. Dengan berbagai alasan, para perantau terpelajar ini selanjutnya ada yang menetap di rantau, ada yang sebagian pulang ke Bali.

Keberadaan diaspora Bali di Jawa Timur menyebar di seluruh kabupaten dan kota. Kota-kota yang ditempati diaspora Bali dengan jumlah yang cukup besar adalah Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Gresik. Para diaspora orang Bali telah membentuk diaspora dengan mendirikan perkumpulan dari tingkat paling rendah yaitu *tempek* (sektor) sampai pada tingkat *banjar* yang ada pada setiap kabupaten seperti *Banjar* Surabaya dan *Banjar* Sidoarjo. Beberapa perkembangan yang terjadi pada saat etnis Bali membentuk diaspora Bali di Jawa Timur antara lain penerapan model-model perkumpulan yang sama dengan di Bali seperti yang telah disebutkan di atas, akulturasi budaya Bali dengan budaya setempat sehingga menghasilkan kultur baru, dan bahkan melebur dengan identitas lokal. Organisasi sosial dan keagamaan serta lembaga-lembaga pendidikan juga telah terbentuk dan secara rutin mengadakan pertemuan atau rapat-rapat baik yang bersifat formal maupun nonformal. Dalam kaitan ini, para anggota masyarakat berinteraksi secara intens agar terus terjadi ikatan di antara sesama orang Bali.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki banyak penduduk beragama Hindu adalah Dusun Dodol, Desa Wonoagung, Kabupaten Malang. Dusun Dodol merupakan wilayah Kabupaten Malang bagian Barat, yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kediri. Dusun Dodol, Desa Wonoagung masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Wilayahnya meliputi Desa Sukosari, Bayem, Pondok Agung, Wonoagung, Pait dan Kasembon. Dari enam Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kasembon, pemeluk agama Hindu hanya berada di Desa Wonoagung.

Pada tahun 2013 jumlah penduduk di Desa Wonoagung sebanyak 4.268 jiwa. Jumlah tersebut merupakan gabungan penduduk dari Dusun Wungurejo, Wonerejo, Dodol, Temurejo, Tempuran, Sepukul, Toyomerto, Sempukidul, Sempulor dan Jabongarut (PNPM, 2013b:4). (PNPM. 2013b. Rekapitulasi Hasil Pemetaan Sosial Tingkat Kecamatan. Malang: Kantor PNPM Kasembon.)

Warga Desa Wonoagung pada tahun 2013 terbagi dalam tiga golongan agama, 3.780 jiwa beragama Islam, 97 jiwa beragama Kristen dan 681 jiwa beragama Hindu (Anonim, 2013b). Dari 681 jiwa yang beragama Hindu, 544 jiwa terdapat di Dusun Dodol, sisanya 137 jiwa terdapat di Dusun Wonorejo dan Tempuran. Namun seiring berjalannya waktu, berdasarkan wawancara tanggal 28 November 2018 dengan kepala dusun, Misdi (42 tahun) dan warga setempat, Krimiasih (40 tahun), diketahui hasil pendataan umat pada tahun 2018 menunjukkan justru jumlah umat Hindu jauh lebih banyak dibandingkan dengan umat Islam dan umat Kristen.

Dusun Dodol, Desa Wonoagung

Pada awalnya sebelum tahun 1967, di Dusun Dodol sudah berkembang agama Islam, Hindu dan Kristen. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk ketika itu, sedangkan penduduk yang beragama Hindu dan Kristen jumlahnya sangat sedikit. Agama Islam yang ada di Dusun Dodol merupakan warisan agama yang diperoleh turun temurun dari para leluhur, sebelum tahun 1967 terdapat langgar kecil yang terbuat dari “gedek” atau bambu. Penduduk yang beragama Islam menjalankan ajaran agama Islam seperti ngaji dan melakukan khitan atau sunat bagi anak laki-laki yang sudah akil balik (Wawancara dengan Adi Sucipto, tanggal 27 November 2018)

Pada tahun 1965, bangsa Indonesia menghadapi peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya perpindahan keyakinan secara besar-besaran yang dilakukan oleh penduduk di Dusun Dodol. Pada tahun 1965, pemerintah menetapkan PKI sebagai partai terlarang, yang kemudian terjadi aksi “pembersihan” terhadap anggota PKI yang dilakukan oleh aparat negara dan aktivis Islam. Penumpasan terhadap orang-orang PKI terjadi di daerah Bali, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peran para aktivis Islam dalam pembersihan dan pembunuhan massal tahun 1965-1966 menimbulkan isu agama yang menghebohkan.

Para aktivis Islam sangat gencar menyerukan kepada kaum muslimin untuk memperkokoh dan menyempurnakan dasar-dasar akidah agama Islam. Melihat antusias para aktivis Islam

dalam menyerukan kesadaran beragama mendapat tanggapan yang positif bagi umat muslim lainnya, namun bagi sebagian masyarakat lainnya, yang dilakukan oleh aktivis Islam cenderung tidak menarik. Dampak dari peristiwa G30S menyebabkan perpindahan agama secara besar-besaran di beberapa wilayah Indonesia, terlebih didaerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tahun 1965 banyak masyarakat Indonesia yang tidak ingin menyebut diri mereka orang muslim dan lebih senang menyebut diri mereka orang Kristen, lebih-lebih di wilayah bekas daerah PKI (Ricklefs, 2001:576).

Akibat peristiwa G30S tahun 1965 menyebabkan beberapa penduduk di Dusun Dodol yang beragama Islam mengadakan musyawarah desa. Penduduk di Dusun Dodol merasa takut, cemas dan tertekan melihat peristiwa pembunuhan yang terus menerus terjadi. Terlebih sebelum membunuh korbannya orang-orang Islam mengucapkan kata “Allahhuakbar” kemudian menumpas korbannya satu persatu yang mereka anggap sebagai orang PKI. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Islam membuat masyarakat di Dusun Dodol berpikir mengenai agama Islam yang mereka anut.

Pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap orang-orang PKI membuat penduduk di Dusun Dodol yang beragama Islam akhirnya bersama-sama melakukan musyawarah desa. Hasil dari musyawarah tersebut memutuskan agama Islam tidak lagi sesuai dengan hati nurani penduduk, sehingga penduduk di Dusun Dodol sepakat untuk keluar dari agama Islam dan mencari agama baru yaitu agama Hindu. Jumlah penduduk yang melakukan perpindahan keyakinan secara besar-besaran tahun 1967 dari agama Islam menjadi agama Hindu sampai saat ini tidak diketahui secara pasti (Wawancara dengan Yateaman, tanggal 27 November 2018).

Dipilihnya agama Hindu atas pertimbangan, orang Islam mengenal adanya tradisi selamatan bagi ibu hamil 3bulanan, 9 bulanan, *mendem* ari-ari, selamatan bagi orang meninggal dan lain sebagainya. Hal serupa juga dilakukan oleh orang Hindu, sehingga dengan pertimbangan tersebut pada tahun 1967 penduduk di Dusun Dodol memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi umat beragama Hindu (Wawancara dengan

Yateman, tanggal 27 November 2018). Maka sejak tahun 1967 eksistensi agama Hindu di Dusun Dodol perlahan mulai terlihat dan masih bertahan sampai saat ini (Wawancara dengan Adi Sucipto, tanggal 27 November 2018).

Perkembangan agama Hindu di Dusun Dodol awalnya diwarnai dengan konflik-konflik, seperti adu mulut, kurangnya toleransi antar masing-masing penduduk dan lain-lain. Penduduk yang sudah keluar dari agama Islam kemudian masuk agama Hindu, banyak diracuni dan dicemooh oleh orang-orang Islam. Pada saat umat Hindu beribadah, orang-orang Islam yang tidak suka mencemooh dengan berkata “nyembah patung, nyembah arca, nyembah berhala” dan lain sebagainya sehingga perkembangan agama Hindu berjalan sangat lambat.

Perkembangan sarana prasarana umat Hindu diawali dari pembangunan sanggar kecil di Dusun Dodol pada tahun 1967, kemudian disusul pembangunan sanggar di Dusun Wonorejo dan di Dusun Tempuran. Eksistensi agama Hindu terus berkembang terbukti pada tahun 1984 dibangun Pura Giri Mukti Cakti di Dusun Dodol, yang merupakan pura terbesar se-Kecamatan Kasembon (Wawancara dengan Rukman, tanggal 27 November 2018). Pada tahun 2013, Desa Wonoagung memiliki satu sanggar di Dusun Dodol dan memiliki tiga Pura yaitu Pura Darma Jati Agung di Dusun Wonorejo, Pura Widya Darma di Dusun Tempuran dan Pura Giri Mukti Cakti di Dusun Dodol.

Mata Pencaharian Umat di Dusun Dodol

Mayoritas penduduk pemeluk agama Hindu di Dusun Dodol bekerja sebagai peternak sapi perah (penghasil susu), petani lading atau kebun, “ngerumpit” atau mencari rumput gajah untuk ternak sapi. Hampir 80% dari jumlah pemeluk agama Hindu di Dusun Dodol bekerja sebagai peternak sapi perah yang merupakan mata pencaharian utama penduduk setempat. Tiap KK rata-rata memiliki sapi perah 5-20 ekor. Satu ekor sapi menghasilkan rata-rata 15 liter susu (wawancara dengan Sugeng, 27 November 2018).

Meskipun sapi “dimanfaatkan” oleh umat Hindu Dusun Dodol Desa Wono Agung Kecamatan Kasembon untuk penghidupan mereka, namun umat Hindu Kasembon

memandang sapi adalah binatang yang disucikan yang merupakan tunggangan Dewa Krisna yang diberi nama lembu Andini. Cara yang dilakukan oleh umat Hindu di Dusun Dodol sebagai bentuk “penyucian” terhadap sapi dengan cara tidak boleh menyakiti, menyiksa, membunuh dan lain-lain yang dapat melukai sapi tersebut. Sapi perah memberikan manfaat serta kemakmuran terhadap umat Hindu yang tinggal di Dusun Dodol. Penduduk memutuskan untuk tetap memelihara sapi perah sebagai sumber mata pencaharian penduduk, dengan catatan merawat sapi tersebut dengan baik dan tidak menyakiti (Wawancara dengan Mas Kus, tanggal 27 November 2018).

Penduduk di Dusun Dodol juga memiliki mata pencaharian sebagai petani di kebun buah. Petani yang bekerja di kebun buah, rata-rata menanam durian, manggis, rambutan, jagung, mangga, tembakau, pete, coklat dan lain-lain (Rukman, 27 November 2018). Dari beberapa tanaman buah yang tumbuh di Dusun Dodol, buah durian merupakan hasil tanaman terbaik yang terkenal kelezatannya sampai ke luar kota.

Penghasilan masing-masing kepala keluarga baik yang beragama Hindu, Islam dan Kristen yang bekerja dibidang peternakan sapi perah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pendapatan masing-masing kepala keluarga rata-rata mencapai Rp. 6.000.000,-/bulan, namun ada juga beberapa penduduk yang penghasilannya mencapai Rp. 20.000.000,-/bulan. Penghasilan tersebut tergantung dari banyaknya sapi perah yang dimiliki oleh masing-masing penduduk di Dusun Dodol. Pendapatan penduduk dibidang pertanian baru bisa dihitung enam bulan atau satu tahun setelah panen tiba. Pendapatan masing-masing kepala keluarga dari hasil panen buah durian, rambutan, mangga dan lain-lain rata-rata mencapai Rp. 10.000.000,-/lahan pertanian (Wawancara dengan Misdi, tanggal 27 November 2018).

Kehidupan Beragama

Kehidupan sehari-hari masyarakat Hindu di Dusun Dodol secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan kehidupan umat beragama lainnya. Umat Hindu pada umumnya selain melakukan persembahyangan, juga menghaturkan sesajen

di rumah masing-masing. Oleh karena masyarakat di dusun Dodol pada umumnya tidak memiliki *merajan* maupun *palinggih* di pekarangan, mereka membuat plangkiran di dalam rumah masing-masing. Pada saat upacara-upacara besar, umat Hindu bersembahyang di Pura, yaitu Pura Giri Murti Sakti yang sudah dimiliki oleh masyarakat Hindu Kasembon. Sebelum pura ini ada, umat Hindu memanfaatkan sanggar sebagai tempat persembahyangan. Setelah pura didirikan, sanggar dimanfaatkan sebagai balai pertemuan oleh umat Hindu (wawancara dengan Mangku Warsioto/Romo Pandita dan Ketua PHDI Kecamatan Kasembon Rukman, tgl. 27 November 2018).

Dalam kesehariannya, umat Hindu tetap melakukan persembahyangan dengan tekun sebanyak tiga kali yaitu saat matahari terbit, matahari di atas kepala dan saat matahari tenggelam. Umat Hindu juga melakukan sembahyang *sunah* lainnya seperti *puja khirtanam* yang dilakukan pada saat tengah malam. Umat Hindu sembahyang kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan menggunakan sarana seperti bunga atau canang, dupa yang melambangkan api, tirta yang berarti air, nasi dan buah untuk haturan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas berkah yang sudah dilimpahkan kepada umatnya. Kepercayaan tersebut dilakukan oleh seluruh umat Hindu yang ada Dodol sebagai kebiasaan sehari-hari sebelum beraktivitas (Wawancara dengan Rukman dan Sriani, tanggal 27 November 2018). Eksistensi Agama Hindu di Dusun Dodol Desa Wonoagung Kabupaten Malang juga dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh penduduk beragama Hindu. Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat Hindu di Dusun Dodol yaitu Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati dan upacara Piodalan di Pura.

Interaksi Sosial

Adapun kehidupan sosial budaya masyarakat di Dusun Dodol dapat dilihat dari adanya kebersamaan yang kuat, hal ini terwujud dalam sikap gotong royong dan kehidupan yang tradisional yang dijalankan oleh penduduk. Sikap gotong royong yang ditunjukkan oleh penduduk di Dusun Dodol yaitu bersih desa pada saat akan menjelang peringatan Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat bersama-sama membersihkan selokan, merapikan rumput-rumput dipinggir jalan, menutup jalan berlubang, mempersiapkan kegiatan hiburan bagi anak-anak, dan sebagainya.

Budaya gotong royong di Dusun Dodol juga dapat dilihat apabila ada salah satu penduduk umat Hindu yang meninggal dunia, maka masyarakat bersama-sama datang ke rumah duka, mengantarkan ke pemakaman, saling mendoakan, dan lain-lain. Jenazah tidak lagi digotong seperti dahulu oleh warga ke kuburan yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman. Mengingat jarak pemukiman warga dengan kuburan cukup jauh, maka ada warga dari umat Islam, Suarji, yang secara ekonomi cukup mapan (sebagai juragan susu) menyediakan sebuah mobil jenazah yang dapat digunakan oleh semua warga (Hindu, Islam, Kristen) secara gratis. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Desa Wono Agung khususnya di Dusun Dodol sangat baik.

Apabila ada umat Hindu di Dusun Dodol yang meninggal dunia, jenazahnya dikubur, tidak dikremasi atau di-*aben* seperti di Bali. Dalam kaitannya dengan *pengabenan* ini, masyarakat Hindu Kasembon belum memiliki Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem) termasuk Pura Prajapati. Jika ada warga Hindu yang meninggal, mereka membuat semacam “Sanggah Agung/Sanggah Surya” di kuburan, dan jika penguburan telah usai, sanggah agung *dilebar*.

Kehidupan sosial budaya yang harmonis juga dapat dilihat dari beberapa tradisi yang dilakukan oleh penduduk di Dusun Dodol seperti selamatan sebagai bentuk rasa hormat kepada para leluhur. Selamatan yang dilakukan oleh penduduk seperti selamatan kelahiran, tumpengan, kematian, syukuran dan lain sebagainya yang menyangkut beberapa aspek kehidupan masyarakat mengingat penduduk di Dusun Dodol beretnis Jawa. Bagi umat Hindu tradisi Jawa merupakan sebuah tradisi yang tidak asing bagi mereka, kesamaan-kesamaan antara kebudayaan Hindu-Jawa yang membentuk alkiturusi yang sangat harmonis bagi penduduk di Dusun Dodol Desa Wonoagung Kabupaten Malang. Salah satu upacara yang dilakukan bersama adalah upacara “Sedekah Bumi” semacam upacara Butha Yadnya untuk penyeimbangan alam. Upacara ini dipimpin oleh sesepun Desa,

baik dari umat Hindu, Islam, maupun Kristen.

Hubungan sosial antarumat Hindu di Dusun Dodol Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang secara internal, dapat dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penduduk di Dusun Dodol, seperti kegiatan Anjangsana, Malam Legi, upacara Piodalan, Organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) dan lain-lain yang bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat Hindu di Dusun Dodol (Wawancara dengan Suhadiyo dan Rukman, tanggal 27 November 2018). Sedangkan secara eksternal, penduduk di Dusun Dodol hidup secara berdampingan dengan umat beragama lainnya (Wawancara dengan Sarmi, tanggal 27 November 2018). Hubungan sosial antar ketiga pemeluk agama yang berada di Dusun Dodol berjalan sangat baik, tidak membedakan pemeluk satu dengan pemeluk lainnya yang memiliki perbedaan keyakinan.

Dusun Dodol memiliki tradisi unik, dalam satu tahun seluruh penduduk di Dusun Dodol merayakan hari raya sebanyak tiga kali yaitu Nyepi, Idul Fitri dan Natal (Wawancara dengan Suhadiyo dan Suwarni, tanggal 27 November 2018). Adanya tradisi tersebut membuktikan hubungan sosial antar pemeluk agama yang memiliki perbedaan keyakinan terjalin dengan baik, saling menghormati dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi antar penduduk (Wawancara dengan Miseno, tanggal 27 November 2018).

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh di lapangan, bahwa sekitar tahun 1967-1995 hubungan sosial antara masing-masing penduduk di Dusun Dodol berjalan kurang baik dan terkesan sangat individualis. Keadaan tersebut terjadi karena belum adanya rasa toleransi, antar pemeluk umat beragama yang berbeda keyakinan. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Natal penduduk merayakan hari raya mereka sendiri-sendiri, sehingga muncul anggapan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari penduduk hidup secara berkelompok sesuai dengan agama mereka masing-masing.

Melihat hubungan sosial yang kurang baik di antara pemeluk agama, maka pada tahun 1995 para pemuda dan masing-masing tokoh pemuka agama lainnya mengadakan sebuah musyawarah

desa di Dusun Dodol. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah hubungan sosial yang terjadi. Musyawarah dilakukan agar mampu menciptakan kerukunan sesama umat beragama dan mampu menciptakan rasa toleransi, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Musyawarah yang dilakukan para pemuda dan masing-masing tokoh agama pada tahun 1995, menghasilkan sebuah keputusan dalam satu tahun seluruh penduduk di Dusun Dodol merayakan hari raya sebanyak tiga kali. Penduduk bersama-sama merayakan hari raya umat Islam, Hindu dan Kristen dengan cara berkunjung ke rumah-rumah, sehingga sejak tahun 1995 hubungan sosial masyarakat di Dusun Dodol perlahan mulai membaik sampai saat ini (Wawancara dengan Rohman, tanggal 27 November 2018).

Adapun pembinaan keagamaan kepada umat Hindu selain dilakukan dengan penyuluhan atau ceramah-ceramah agama, juga dilakukan lewat lomba Utsawa Dharma Gita (UDG) sekali dalam setahun dengan jenis lomba baca sloka, lafal/hafal mantra, baca mantra, bagi para pemuda dan pemudi (remaja) (Dody Yuswantoro, 27 November 2018). Sedangkan bagi para ibu diadakan lomba Panembromo (nembang) yang dilakukan oleh WHDI Kecamatan.

B. PENDIDIKAN HINDU

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan merupakan kunci utama untuk mencapai suatu cita-cita. Melalui pendidikan formal peserta didik akan mendapatkan ilmu pengetahuan, pembinaan kepribadian dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk menghadapi masa depan. Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, meskipun wilayahnya hanya terdiri dari enam desa, memiliki lembaga pendidikan formal yang sangat memadai, terbukti mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai tingkat SMA/SMK sudah banyak berdiri.

Khusus di Desa Wonoagung, pendidikan agama Hindu dapat diperoleh dari lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan nonformal. Pemerintah desa mengizinkan penggunaan sanggar dan pasraman sebagai lembaga pendidikan

nonformal yang digunakan sebagai tempat pembelajaran agama Hindu. Setiap hari Jumat pukul 08.00 WIB, sanggar yang berada di Dusun Dodol digunakan guru sebagai tempat pembinaan khusus bagi anak-anak TK untuk belajar agama Hindu.

Secara umum di provinsi Jawa Timur, jumlah guru agama terbanyak terdapat di Kabupaten Banyuwangi dan Blitar dengan jumlah masing-masing 98 dan 56 orang. Adapun jumlah guru paling sedikit, yakni hanya berkisar satu sampai tiga orang, terdapat di beberapa kabupaten seperti Jombang, Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, serta Kota Blitar dan Kota Batu. Selengkapnya data persebaran guru agama Hindu di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 26. Sebaran Jumlah Guru Agama Hindu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

No.	Kab/ Kota	PNS	Non-PNS
1	Kab. Pacitan	-	-
2	Kab. Ponorogo	-	-
3	Kab. Trenggalek	-	-
4	Kab. Tulungagung	-	-
5	Kab. Blitar	37	19
6	Kab. Kediri	23	6
7	Kab. Malang	16	15
8	Kab. Lumajang	9	13
9	Kab. Jember	6	4
10	Kab. Banyuwangi	35	63
11	Kab. Bondowoso	-	-
12	Kab. Situbondo	-	-
13	Kab. Probolinggo	12	9
14	Kab. Pasuruan	11	19
15	Kab. Sidoarjo	2	5
16	Kab. Mojokerto	-	-
17	Kab. Jombang	1	-
18	Kab. Nganjuk	-	2
19	Kab. Madiun	3	-
20	Kab. Magetan	1	1
21	Kab. Ngawi	-	-
22	Kab. Bojonegoro	-	-
23	Kab. Tuban	-	-
24	Kab. Lamongan	1	-
25	Kab. Gresik	2	-
26	Kab. Bangkalan	-	-

27	Kab. Sampang	-	-
28	Kab. Pamekasan	-	-
29	Kab. Sumenep	-	-
30	Kota Kediri	5	-
31	Kota Blitar	1	-
32	Kota Malang	1	17
33	Kota Probolinggo	-	-
34	Kota Pasuruan	-	-
35	Kota Mojokerto	-	-
36	Kota Madiun	-	-
37	Kota Surabaya	3	8
38	Kota Batu	1	2
Jumlah		170	182

Sumber: Pembimas Hindu Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, secara khusus sebaran jumlah guru Pendidikan Agama Hindu di Jawa Timur untuk SD (PNS dan Non PNS), SMP (PNS dan Non-PNS), SMA/SMK (PNS dan Non-PNS), dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 27: Jumlah Guru Agama Hindu SD, SMP, SMA/SMK di Jawa Timur Tahun 2018.

No.	Provinsi	Guru Agama Jenjang SD		Guru Agama Jenjang SMP		Guru Agama Jenjang SMA/SMK	
		PNS (Orang)	Non-PNS (Orang)	PNS (Orang)	Non-PNS (Orang)	PNS (Orang)	Non-PNS (Orang)
1	Jawa Timur	176	7	22	14	10	5
	Jumlah	176	7	21	14	10	5

Jumlah sebaran guru tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah siswa di daerah terkait. Misalnya saja, di Kabupaten Pasuruan terdapat total 2.016 siswa Hindu, namun jumlah gurunya 31 orang, jauh di bawah Kabupaten Blitar yang memiliki 1.314 siswa namun tercatat jumlah guru agama Hindu di sana mencapai 56 orang. Informasi selengkapnya perihal data kuantitas siswa Hindu tahun 2018 di provinsi Jawa Timur dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 28: Sebaran Jumlah Siswa Hindu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

No.	Provinsi	Siswa			Jumlah
		SD	SMP	SMA/K	
1	Kab. Banyuwangi	1.543	1.101	733	3.377
2	Kab. Jember	68	64	37	169
3	Kab. Lumajang	453	190	67	710
4	Kab. Probolinggo	895	231	100	1.226
5	Kab. Pasuruan	1.351	490	175	2.016
6	Kab. Malang	754	261	57	1.072
7	Kab. Blitar	785	357	172	1.314
8	Kab. Kediri	747	244	140	858
9	Kab. Sidoarjo	204	107	98	409
10	Kab. Magetan	24	6	6	36
11	Kab. Nganjuk	13	6	2	21
12	Kab. Tulungagung	16	4	3	23
13	Kab. Gresik	53	12	7	72
14	Kab. Lamongan	15	7	3	25
15	Kab. Jombang	53	16	16	85
16	Kab. Madiun	16	8	6	30
17	Kab. Mojokerto	23	9	5	37
18	Kota Surabaya	783	235	116	1.134
19	Kota Malang	29	49	84	162
20	Kota Batu	26	16	12	54
21	Kota Kediri	25	18	25	68
Jumlah		7.603	3.431	1.864	12.898

Sumber: Pembimas Hindu Kemenang Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana daerah lainnya, pendidikan agama Hindu di Jawa Timur juga didukung dengan keberadaan penyuluh agama Hindu baik yang telah maupun belum berstatus Pegawai Negeri Sipil namun sudah menunjukkan dedikasinya bagi pendidikan dan agama. Berdasarkan data tahun 2018, setidaknya terdapat 68 penyuluh agama Hindu se-provinsi Jawa Timur. Berikut adalah dua tabel yang menunjukkan nama, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, jabatan fungsional serta alamat tugas para penyuluh tersebut.

Tabel 29: Data Nama Penyuluh PNS Agama Hindu Se- Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

No.	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan Fungsional	Alamat Tugas
1	Drs. Suhadiyo.	L	S1	III/d	Kab. Malang
2	Drs. Yuliana.	L	S1	IV/a	Kab. Kediri
3	Edy Sumianto, S.Ag.	L	S1	IV/a	Kab. Lumajang
4	Ida Ketut Diksa, S.Ag.	L	S1	III/d	Kab. Probolinggo
5	I Made Budiastika, S.Ag.	L	S2	III/c	Kab. Sidoarjo
6	Retno Sri Widhiati, S.Ag.	P	S1	III/b	Kab. Blitar
7	Sinah, S.Ag.	P	S1	III/b	Kab. Banyuwangi
8	Drs. Marjuki.	L	S2	III/c	Kab. Jember.

Sumber: Pembimas Hindu Kemenang Provinsi Jawa Timur.

Tabel 30: Data Nama Penyuluh Non-PNS Agama Hindu Se- Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

No.	Nama	Pendidikan	Tempat Tugas
1	Wisoko Mokanjoyo, S.Sos.H., M.Pd.H.	S2 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Malang.
2	Yuliati, S.Sos.H.	S1 Sosial Agama Hindu	Kab. Malang.
3	Yeni Susanti, S.Sos.	S1 Penerangan Agama Hindu	Kab. Malang
4	Wicaksono.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Malang
5	Ratna, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Malang
6	Ekam Heru Setiawan, S.Pd.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Malang
7	Sumarmi, S.Ag.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Malang
8	Dewi Prajna Paramita, S.Ag.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Sidoarjo.
9	Priyoko, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Blitar.
10	Astiko Widiatmo, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Blitar.
11	Murni Lilik Megawati, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Blitar.
12	Irawan, S.Sos.	S1 Penerangan Agama Hindu	Kab. Blitar.
13	Heru Susato, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Blitar.
14	Uvi Sulastri, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Blitar.
15	Dyah Pujining Tyastuti, S.Sos.H.	S1 Sosial Agama Hindu	Kab. Blitar.
16	Adhityana Windu Siwi, S.Sos.H.	S1 Penerangan Agama Hindu	Kab. Blitar.
17	Dharmawan Bayu Kusuma, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Blitar.
18	Sri Wahyuningtyas, S.Ag.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Madiun.
19	Sumilah, S.Ag.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Jember.
20	Ices Trihandini, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Jember.
21	Raha Winarko, S.Ag.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Pasuruan.
22	Sistiawati, S.Sos.H.	S1 Sosial Agama Hindu	Kab. Pasuruan.

23	Anton, S.Sos.H.	S1 Sosial Agama Hindu	Kab. Pasuruan.
24	Komang Ayu Widanti, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Pasuruan.
25	Priska Daniati, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Pasuruan.
26	Puja Wasisita, S.Sos.H.	S1 Penerangan Agama Hindu	Kab. Pasuruan.
27	Rista Noviandari Putri, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Pasuruan.
28	Eky Ariesma Tanjung, S.Si.	S1 Sains	Kab. Pasuruan.
29	Kayan Widiyasa, S.Ag.	S1 Teologi Hindu	Kab. Banyuwangi.
30	Wayan Wasiyanto, S.Pd.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Banyuwangi.
31	Miswanto, S.Pd.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Banyuwangi.
32	Nita Dwi Gati, S.Pd.	S1 PPKn	Kab. Banyuwangi.
33	Sri Andayani, S.Ag.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Banyuwangi.
34	Mahendra Dito Laksono, S.Pd.	S1 Pendd Olga & Kesehatan	Kab. Banyuwangi.
35	Riyani, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Banyuwangi.
36	Andik Purnomo, S.Pd.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Banyuwangi.
37	Edi Suwito, S.Pd.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Banyuwangi.
38	Agus Setiyawan, S.Pd.	S1 Pendd. Matematika	Kab. Banyuwangi.
39	Dian Sapta Susanti, S.Pd.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Banyuwangi.
40	Dewi Mayang Anggraeni, S.Pd.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Banyuwangi.
41	Roni Han Wasisto, M.Pd.H.	S2 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Banyuwangi.
42	Drs. Wakimin.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Kediri.
43	Damayanti, S.Pd.H.	S1 Keguruan & Ilmu Pendd.	Kab. Kediri.
44	Endang Susanti, S.Pd.	S1 Pendidikan	Kab. Kediri.
45	Ayu Wedayanti, S.Pd.	S1 Psikologi	Kab. Kediri.
46	Dami Rahayu, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Nganjuk.
47	Teguh Widodo, S.Sos.H.	S1 Sosial Agama Hindu	Kab. Lumajang.
48	Astono, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Lumajang.
49	Dedik Krismawanto, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Lumajang.
50	Setiyawati, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Lumajang.
51	Ni Made Rasmini Dewi, SE.	S1 Ekonomi	Kab. Lumajang.
52	Usnul Farida, S.Ag.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Mojokerto.
53	Dra. Ni Wayan Sukerai.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Mojokerto.
54	Sujarwo, S.Pd.H.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Probolinggo.
55	Astika Widya Antenggeraeni, S.Ag.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Probolinggo.
56	Agus Adi Purnomo, S.Pd.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Probolinggo.
57	Slamet Susandi, S.Pd.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kab. Probolinggo.
58	I Wayan Suraba, M.Pd.H.	S2 Pendidikan Agama Hindu	Kota Surabaya.
59	Ni Luh Indrawati, S.Farm.,Apt.	S1 Farmasi	Kota Surabaya.
60	Erwin Teguh Wahyudi, S.Pd.	S1 Pendidikan Agama Hindu	Kota Batu.

Sumber: Pembimas Hindu Kemenang Provinsi Jawa Timur.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 68 orang penyuluh Agama Hindu di Jawa Timur terdapat enam orang yang latar belakang pendidikannya non-kependidikan atau

tidak dari Pendidikan Agama Hindu. Latar belakang mereka adalah Farmasi, Ekonomi, Sains, Psikologi, PKn, dan Olahraga Kesehatan. Untuk menunjang kinerja, para penyuluh Agama Hindu ada baiknya memiliki latar belakang Pendidikan atau Pendidikan Agama Hindu. Kendati demikian, setiap upaya dan kesungguhan untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan mengabdikan bagi kepentingan umat harus tetap diapresiasi bersama.

PAUD/TK Hindu

Umat Hindu di Jawa Timur telah memiliki lembaga pendidikan formal PAUD/TK yang terdaftar di Kementerian Agama Jawa Timur sebanyak 25 buah PAUD/TK yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur. Selain PAUD/TK, juga terdapat 2 SMP yakni SMP Tri Murti 1 di Desa Pakisaji, dan SMP Tri Murti 2 di Desa Wagir, serta sebuah SMA (SMA Tri Murti) yang berlokasi satu tempat (halaman) dengan SMP Tri Murti 1 yaitu di Desa Pakisaji. Baik SMP maupun SMA Tri Murti dibina oleh sebuah Yayasan yaitu Yayasan Tri Murti yang ketua oleh Prof. Dr. Nyoman Nurjaya. Berikut adalah nama dan alamat PAUD/TK yang terdaftar di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2017 :

Tabel 31: Daftar Nama PAUD/TK tahun 2017 di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

No.	Nama PAUD/TK	Alamat Sekolah
1.	Warsedi Putera	Ds. Kayukebek, Kb. Pasuruan.
2.	Dharma Wanita Kalipang	Ds. Kalipang, Kab. Kediri.
3.	Pasraman Saraswati I	Kota Surabaya.
4.	Giri Saraswati	Ds Tampurejo, Kab. Banyuangi.
5.	Gayatri	DsWatukeyo, Kab. Banyuangi.
6.	Ganesa Parwati (Pratama Widya Pasraman)	Dsn. Ngadimulyo, Kab. Banyuangi.
7.	Giri Saraswati 2	Dsn. Krajan, Kab, Banyuangi
8.	Giri Saraswati 3	Dsn. Karangmulyo, Kab. Banyuangi.
9.	Pelita Bangsa	Ds. Laban, Kab. Gresik.
10	Widya Santi	Kab. Lumajang.
11	Suputra	Kab. Sidoarjo.
12	Mpu Bharadah	Kab. Sidoarjo.
13	Bhakti Persada 2	Karang Tengah, Kab. Malang.
14	Bhakti Persada 3	Karang Tengah, Kab. Malang.

15	Bhakti Persada 5	Dsn. Jamuran, Kab. Malang.
16	Bhakti Persada 6	Dsn. Banaran, Kab. Malang.
17	Bhakti Persada 4	Karangpandan, Kab. Malang.
18	Saraswati	Dsn. Barurejo, Kab Blitar.
19	Saraswati 2	Kota Surabaya.
20	Hindu Tunas Pertiwi	Dsn. Jatisari , Kab. Blitar.
21	Widya Saraswati	Ds. Sekaran, Kab. Kediri.
22	Bunga Bangsa	Ds. Baledono, Kab. Pasuruan.
23	Tunas Pertiwi	Ds. Kalitejo, Kab. Pasuruan.
24	Saraswati	Dsn. Krajan, Kab. Banyuangi.
25	Saraswati	Dsn. Palurejo, Kab. Banyuangi.

C. TANTANGAN, POTENSI, DAN REKOMENDASI

Melalui refleksi terhadap sejarah, diketahui bahwa umat Hindu selama ini tidak pernah hidup dalam suatu vakum. Konteks sosial, ekonomi dan politik sangat memengaruhi perkembangannya sebagai sebuah masyarakat. Sebagai minoritas, umat Hindu mengalami gaya sentrifugal (tarikan ke luar) yang besar, sementara gaya sentripetal-nya, yaitu kohesi sosial sebagai satu kesatuan kemasyarakatan belum mantap. Terlebih akibat kebutuhan generasi muda untuk meraih pendidikan dan peran sosial baru, cukup banyak generasi muda Hindu yang beralih agama oleh karena perkawinan, pekerjaan, iming-iming mobilitas vertikal di tempat kerja, dan terutama oleh lemahnya *sraddha* (keimanan) dan lemahnya ikatan sosial dengan komunitas Hindu sekitar.

Tantangan lain yang muncul terkait dengan proses integrasi umat yang berlatar belakang suku Bali dengan umat lokal yang diwarnai ketegangan dalam merumuskan tradisi-tradisi baru dalam praktek upacara, kesenian dan kebudayaan pada umumnya. Dua masalah mendasar yang dihadapi umat Hindu, terutama umat Hindu di Jawa Timur, adalah masalah pendidikan dan kesejahteraan. Dalam persepsi umum, masalah tersebut dirumuskan sebagai masalah “pembinaan umat”, yang pada tahap awal dipersepsi sempit sebagai masalah pembangunan pura, penyelenggaraan upacara dan tradisi keagamaan, pendidikan agama dan sosialisasi nilai Hindu dalam kehidupan sosial. Tantangan ini harus dipikirkan bersama sehingga dapat menemukan solusi yang tidak hanya menyentuh isu permukaan.

Permasalahan lain yang dihadapi sebagian besar generasi muda umat Hindu di Jawa Timur adalah keterbatasan sumberdaya untuk meneruskan pendidikan dan bekal untuk memasuki peran sosial bermutu di tengah masyarakat karena umumnya tingkat pendidikan generasi muda Hindu adalah setaraf SMA/SMK. Peranan Negara, dalam hal ini Pemerintah, baik melalui Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Sosial dalam penanganan masalah-masalah pembinaan *Sraddha* dan *Bhakti* umat Hindu, masalah sosial, pendidikan dan pengembangan kebudayaan sangat penting; Kelembagaan umat, baik Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) maupun organisasi/lembaga lainnya patut dikembangkan agar dapat meningkatkan otoritas dan kapasitas kelembagaannya, mampu berfungsi membangun, mengembangkan dan melengkapi suprastruktur dan infrastruktur kehidupan masyarakat umat Hindu di seluruh pelosok wilayah Jawa Timur.

Ke depan diharapkan PHDI dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama (Ditjen Bimas Hindu Kemenag) bersama-sama dapat mempertajam, memperluas dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap umat beragama Hindu di daerah, agar umat Hindu berkembang sebagai masyarakat yang utuh, mandiri dan memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan budaya, sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi perubahan sosial dan menanggapi kebutuhan baru menuju masyarakat yang maju.

Pada saat yang bersamaan, Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama perlu segera mengembangkan kapasitas kelembagaan agar dapat meningkatkan pelayanan menjangkau seluruh umat Hindu, antara lain dengan sesegera mungkin membentuk "Pelaksana Tugas Pembimbing Masyarakat Hindu" di seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk beragama Hindu cukup banyak. Demikian pula dengan pemenuhan kebutuhan guru agama dan penyuluh agama Hindu yang justru menurun jumlahnya akibat jumlah kumulatif tenaga guru dan penyuluh yang purna bhakti (pensiun) jauh melebihi jumlah pengangkatan tenaga guru dan penyuluh (PNS maupun Non-PNS) yang diangkat secara periodik. Permasalahan tidak dipenuhinya *passing grade* dalam penerimaan tenaga guru dan

penyuluh agama Hindu mesti segera diatasi agar kondisi tersebut tidak berlarut-larut, yang dapat berakibat buruk pada kondisi makro umat Hindu di daerah.

PHDI, Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama dan berbagai organisasi/lembaga dan kekuatan masyarakat patut memahami dan melaksanakan *Grand Design* Hindu Nasional (GDHN), agar masyarakat umat Hindu dapat tumbuh makin utuh, mandiri dan maju. Untuk itu GDHN mesti dijabarkan di daerah agar dapat dilaksanakan selaras dengan tumbuhnya prakarsa, swadaya dan kemandirian umat dalam menyelenggarakan kehidupannya sebagai sebuah tatanan masyarakat yang dewasa. Adapun daftar lembaga keagamaan Hindu di Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel di bawah .

Tabel 32: Data Lembaga Keagamaan Hindu Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No.	Nama Organisasi	Nama Ketua	Alamat Sekretariat
1	Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG)	I Putu Sudira, ST.	Jl. Raya Juanda, Gedangan Sidoarjo.
2	PHDI Provinsi Jawa Timur	Made Anom	Jl. Raya Juanda, Gedangan Sidoarjo.
3	Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Timur	Prof. I Nyoman Sutantra.	Jl. Raya Juanda, Gedangan Sidoarjo.
4	DPD Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Jawa Timur	JM Agus Wijaya	Jl. Raya Juanda, Gedangan Sidoarjo.
5	DPP Peradah Indonesia Provinsi Jawa Timur	I Nyoman Baintara Prayudi	Perum Taman Aloha B5/11 Desa Suko Kec. Sukodono, Sidoarjo.
6	KMHDI Provinsi Jawa Timur	Putu Agung Martin Sabudi	Jl. Karang Menjangan VI/30, Surabaya.
7	WHDI Provinsi Jawa Timur	Ngr. Citra Rasmi Pudja	Jl. Ikan Lumba-lumba No. 1 Surabaya.
8	Paguyuban Pemangku Provinsi Jawa Timur.	Dr. I Wayan Subagiarta	Jl. Rambutan 1/8 Jember 618111 Jatim.

Terlepas dari sekian tantangan, terdapat sejumlah pencapaian dan potensi umat Hindu di Provinsi Jawa Timur yang dapat ditingkatkan bahkan dijadikan contoh atau diduplikasi di berbagai daerah lain, antara lain :

- a. Perumusan dan pelembagaan tradisi upacara *Jalanidhi Puja (Melasti)* di Pantai Bale Kambang, Kabupaten Malang,

- merupakan contoh adopsi dan adaptasi pelaksanaan upacara yajna yang mengacu pada idiom-idiom lokal dan sifat historis sebuah masyarakat;
- b. Sinergi dan penyelarasan antara kebutuhan umat Hindu dengan program Pemerintah, misalnya dalam bidang pariwisata; PHDI dan Umat Hindu Malang Raya telah berhasil memperoleh hak pemanfaatan dua dari tiga pulau di lepas pantai Bale Kambang, Malang Selatan untuk membangun pura yang sekaligus menjadi landmark dan destinasi pariwisata Kabupaten Malang; Acara Jalanidhi Puja di pantai Bale Kambang masuk dalam *calendar of events* Pariwisata Kabupaten Malang. Bertemunya kepentingan umat Hindu dengan program pengembangan pariwisata daerah dapat kita temukan juga di Banyuwangi (Melasti di Pantai Merah dan Pura Alas Purwo), di Lumajang (Pura Mandara Giri Semeru Agung), di Kota Batu (Pura Luhur Giri Arjuno di puncak bukit perkebunan apel), dan tentu saja di Bromo, yang berpotensi berkembang dengan wisata alam dan wisata budaya (Yadnya Kasodo, Adventure, Homestay, Agrowisata, dll.). Modal sosial-budaya dan momentum sinergis ini perlu dikembangkan dengan taat asas agar selalu berjalan sesuai dengan kepentingan luhur dan berkelanjutan.
 - c. Swadaya dalam pelayanan pendidikan umum, misalnya penyelenggaraan TK, SMP dan SMA (dan Asrama Siswa) Yayasan Trimurti Malang, serta STAH Shantika Dharma (Yayasan Shantika Dharma) yang berhasil membangun dan mengembangkan sekolah-sekolah umum dan perguruan tinggi berbasis nilai Hindu Dharma;
 - d. Krematorium di Kabupaten Malang dan Kota Batu sebagai infrastruktur yang niscaya diperlukan dalam *rites de passage* (rangkaian upacara dalam kehidupan) umat Hindu; Pola dan keswadayaannya perlu dijadikan contoh untuk dapat dikembangkan di berbagai daerah;
 - e. Kehidupan berkoperasi di daerah Kasembon (Kabupaten Malang), Wonokitri (Tosari, Kab. Pasuruan) dan Petani Apel Kota Batu patut dijadikan model pengembangan basis ekonomi umat Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

- anonymous*, 1970: *Pokok-pokok Sedjarah Perkembangan Parisada Hindu Dharma*. Denpasar: Sekretariat Parisada Hindu Dharma Pusat.
- Arya Suharja, 2004: *20 Tahun Peradaha Indonesia, Meretas Jalan Menetaskan Peran*, Jakarta: LKPP Peradaha Indonesia
- Arya Suharja, 1992: *Generasi Muda Hindu Kelana atau Tawanan Sejarah*, dalam Putu Setia, *Cendekiawan Hindu Bicara*; Den[asar: Dharma Naradha.
- David Stuart Fox, 1992: *Bibliography of Bali: Publications from 1920 to 1990*; Leiden: KITLV Press.
- Dwipayana, A.A. 2004. *Kelas dan Kasta*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Frans Magniz – Soeseno, 1981. *Etika Jawa* ; Jakarta: Gramedia
- Hardjanta W. Pradjapangarsa, 1970; *Pedoman Dasar Dewan Pembinaan Sadharmapan*; Surakarta: DPP Sadharmapan
- H.E. Samson, 1941. *Bhagawad-Gita Djinarwa*; Solo – Tjitjoeroeg: Swastika
- I.B. Oka Punia Atmaja MP: 1992. *The Hindu Ethics of Holy Veda as Found in Bali*, Denpasar: World Hindu Federation
- I Gde Jayakumara, *Pencarian Identitas Budaya Hindu (Studi Komunitas Hindu di Kelurahan Banguntapan, Bantul, Yogya)* 2007 (Thesis S2 pada Program Center for Religion and Cross-Cultural Studies - Sekolah Pasca Sarjana UGM, tidak diterbitkan)
- Martin Ramstedt, 2004. *Hinduism in Modern Indonesia, A Minority between local, national, and Global Interests*; London and New York: RoutledgeCurzon – IIAS Asian Studies Series
- Ni Ketut Sartini, 1983: *Perkembangan Agama Hindu di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta 1967-1983* (Skripsi di Jurusan Sejarah FIB UGM, tidak diterbitkan)
- Neil Mulder *Kebathinan dan Kehidupan Sehari-hari Orang Jawa*
- Nukning Sri Rahayu, 2006: *Kajian Struktur Pura Sahasra Adhi Pura di Sonosewu, Kabupaten Sukoharjo*; (Thesis S2 pada Program Pasca Sarjana UNHI, tidak diterbitkan)
- Nukning Sri Rahayu, 2016: *Pura Mandira Seta Baluwarti Kraton*

Surakarta, Pendidikan Karakter Melalui Realisasi Tri Hita Karana dan Nilai Pancasila; Surakarta: The Hindu Centre of Central Java.

R. Soepanggih, 2004; *Ojo Dumeh*, dalam Arya Suharja, 2004: *20 Tahun Peradah Indonesia, Meretas Jalan Menetaskan Peran*, Jakarta: LKPP Peradah Indonesia

S.H. Soebardjo Sosorodiningrat, 1992; *Nilai Religius Hindu dalam Pola Pikir Nasional*, dalam Putu Setia, *Cendekiawan Hindu Bicara*, Dharma Naradha. Denpasar: 1992

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sudiartha, I Ketut, 2017. *Upacara Mulunen Tradisi Masyarakat Hindu Suku Tengger (Studi Etnografi di Desa Ngadiwono Kec. Tosari Kabupaten Pasuruan)*, Desertasi Program Studi Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, Tidak Diterbitkan,

Putu Setia, 1992. *Cendekiawan Hindu Bicara*; Denpasar: Dharma Naradha.

Slamet Muliana, 1979; *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara

Zoetmulder, P.J., 1985, *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta: Penerbit Djambatan

Lampiran 1: Nama Aliran Kebathinan/Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Provinsi Jawa Timur

1. Aliran Kebathinan Tak Bernama
2. Aliran Seni dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Babagan Kasampurnan
4. Badan Kebathinan Rila
5. Budi Rahayu
6. Cakramanggilingan
7. Dasa Sila
8. Himpunan Murid dan WakilMurid Ilmu Sejati R. Rawiro Utomo (Himuwis Rapra)
9. Induk Wargo Kawruh Utomo
10. Budha Jawi Wisnu, Jawi Wisnu
11. Jendra Hayuningrat Widada Tunggal (Pandhawa)
12. Kahuripan
13. Kapitayan
14. Kapribaden Upasana
15. Kasampurnan Ketuhanan Awal dan Akhir
16. Kepercayaan Sapta Dharma Indonesia
17. Ketuhanan Kasampurnan
18. Kodratullah Manembah Ghoibing Pangeran
19. Margo Suci Rahayu
20. Paguyuban Dharma Bhakti
21. Paguyuban Ilmu Sangkan Paraning Dumadi Sanggar Kencono
22. Paguyuban Kawruh Bathin "101"
23. Paguyuban Kawruh Bathin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan
24. Paguyuban Kawruh bathin Jiwo Lugu
25. Paguyuban Kawruh Murti Utomo Wasito Tunggal
26. Paguyuban Kawruh Sangkan Paran Kasampurnan
27. Paguyuban Kawruh Sasongko
28. Paguyuban Laebdho Guno Gumelar
29. Paguyuban Manunggaling Karso
30. Paguyuban Ngesti Budi Sejati
31. Paguyuban Pangudi Katentreman (Patrem)

32. Paguyuban Satriyo Mangun mardiko Dununge Urip
33. Paham Jiwa Diri Pribadi
34. Panembah Jati
35. Pangrukti Memetri Kasucian Sejati (Pamekas)
36. Pelajar Kawruh Jiwo
37. Perguruan Ilmu Sejati
38. Perhimpunan Kamanungsan
39. Perhimpunan Kepribadian Indonesia
40. Purwaning Dumadi kautaman
41. Rasa Manunggal
42. Sujud Manambah Bhekti
43. Tri Murti Naluri Majapahit
44. Urip Sejati

DINAMIKA HINDU DI KALIMANTAN

I Dewa Ketut Budiana
Made Adi Widyatmika
I Putu Sastra Wibawa

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di pulau Kalimantan selain Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.. Kalimantan Tengah yang terletak antara 0°45'LU, 111°BT hingga 3°30'LS, 116°BT merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km².



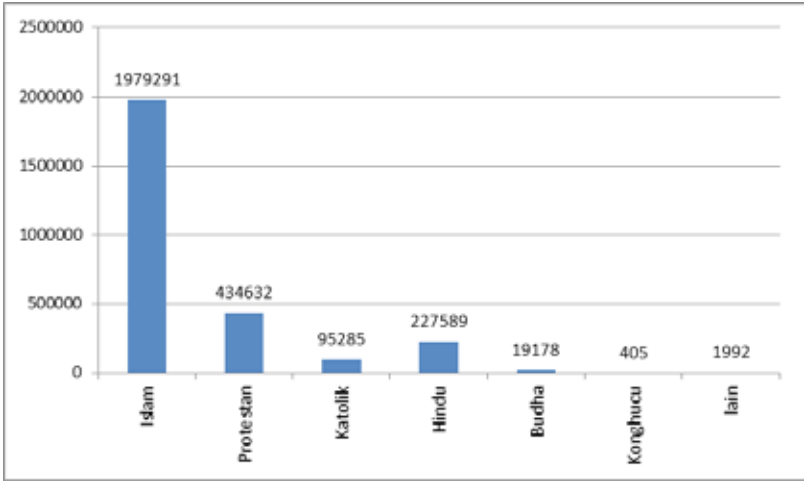
Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 adalah 2.550.192 jiwa tersebar di 14 kabupaten dan kota. Jumlah penduduk tertinggi adalah di Kabupaten Waringin Timur sebesar 436.276 jiwa (17,11%) sedangkan daerah terpadat adalah ibukota Palangka Raya dengan jumlah penduduk 267.757 jiwa dan luas wilayah 2.400 km² (kepadatan 112 jiwa/km²) (BPS

Kalimantan Tengah, 2018).

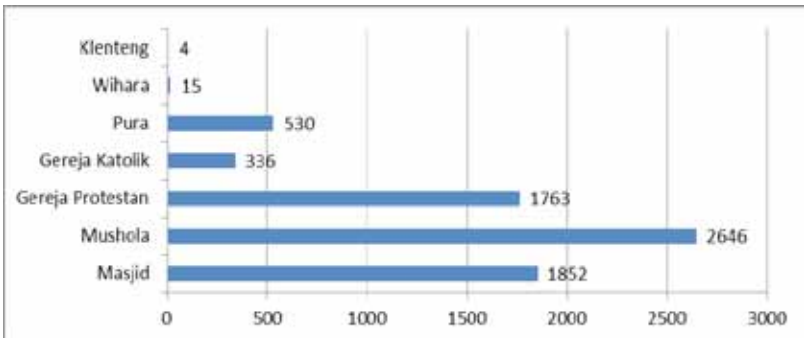
Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah tujuan transmigrasi di Indonesia. Adapun program pemerataan penduduk ini sudah dilakukan sejak zaman kolonialisme Belanda sampai dengan akhir masa Orde Baru (pada bulan Agustus 2000 setelah krisis keuangan Asia dan berakhirnya pemerintahan Soeharto, pemerintah Indonesia mulai mengurangi skala program transmigrasi karena sedikitnya anggaran). Menurut data yang dihimpun oleh *Independent Evaluation Group* (IEG) di bawah *World Bank Group*, sebanyak 3.6 juta orang telah dimukimkan di daerah transmigrasi di Nusantara dengan biaya dari pemerintah Indonesia selama tahun 1903 sampai dengan 1990. Sebagian besar dari transmigran tersebut berasal dari Pulau Jawa dan Bali.

Sebagai daerah transmigrasi, Pulau Kalimantan secara umum telah menjadi tempat bertemunya berbagai suku dari berbagai daerah asal transmigran, termasuk Bali. Transmigran asal Bali berkontribusi besar dalam keberagaman budaya di Kalimantan. Interaksi budaya, khususnya antara suku Dayak Kaharingan sebagai penduduk lokal dengan etnis Bali sebagai pendatang berlangsung harmonis. Suku Dayak Kaharingan adalah penganut agama Kaharingan yang memiliki kekhasan dalam mengimplementasikan ajaran agamanya. Demikian halnya transmigran penganut Hindu asal Bali masih tetap mempertahankan tradisi mereka dalam beragama. Hubungan antara Hindu Kaharingan dengan Hindu Bali semakin sinergis setelah integrasi Hindu Kaharingan ke dalam agama Hindu yang diakui oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1980.

Perkembangan umat Hindu di Kalimantan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah dari kuantitasnya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Menurut BPS Kalimantan Tengah, jumlah penganut Agama Hindu di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2010 adalah 191.232 jiwa. Berdasarkan komposisi umat beragama di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016, jumlah umat Islam 1.979.291 jiwa, umat Protestan 434.632 jiwa, umat Katolik 95.285 jiwa, umat Hindu 227.589 jiwa, umat Budha 19.178 jiwa, pemeluk Konghucu 405 jiwa, umat lain 1.992 jiwa.



Grafik 1. Grafik Komposisi Penduduk Kalimantan Tengah berdasarkan Agama tahun 2016 (BPS Kalimantan Tengah, 2018)

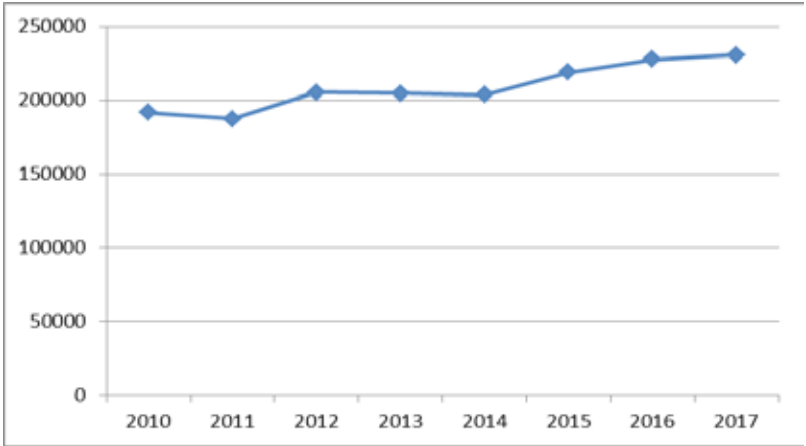


Grafik 2. Grafik jumlah tempat ibadah di Prov. Kalimantan Tengah tahun 2016 (BPS Kalimantan Tengah, 2018)

Dari komposisi penduduk Kalimantan Tengah sebagaimana tampak pada Gambar 2, dapat dilihat bahwa jumlah pemeluk agama Hindu di Provinsi Kalimantan Tengah menduduki posisi ke 3 setelah umat Islam dan umat Protestan. Demikian pula ketersediaan tempat beribadah pura merupakan tempat ibadah terbanyak ke-3 setelah tempat ibadah umat Islam dan umat Protestan. Jumlah penduduk beragama Hindu di Kalimantan Tengah tidak mustahil sebenarnya lebih besar dari jumlah tersebut, mengingat masih banyak penduduk lokal etnis Dayak

yang belum terhitung sebagai pemeluk Hindu (hasil wawancara dengan Bapak Bajik R. Simpei, tokoh Dayak di Palangka Raya).

Menurut data dari Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah jumlah umat Hindu pada tahun 2017 adalah 230.404 jiwa. Jika dielaborasi dengan data dalam buku Kalimantan Tengah Dalam Angka 2017 maka dapat dilihat grafik perkembangan jumlah pemeluk agama Hindu di Kalimantan Tengah pada Gambar 4.



Grafik 3. Grafik Dinamika Jumlah Pemeluk Agama Hindu di Kalimantan Tengah dari tahun 2010 - 2017. (data diolah dari sumber BPS Kalimantan Tengah, 2018 dan Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Tengah)

Pada tahun 2018, menurut data yang dikeluarkan oleh Bimas Hindu Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah umat Hindu di Kalimantan Tengah 230.404 jiwa. Perkembangan jumlah umat Hindu di Kalimantan Tengah pasca program transmigrasi, selain karena penambahan penduduk secara alami, juga disebabkan adanya pendatang dari Bali karena alasan pekerjaan. Cukup banyak orang Bali (umat Hindu) baik dari instansi pemerintah, TNI/Polri maupun perusahaan swasta yang ditugaskan di wilayah Kalimantan Tengah. Pada masa penugasannya tersebut mereka turut aktif bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Kalimantan Tengah untuk pengembangan dan pembinaan umat Hindu di Kalimantan Tengah. Menurut ketua PHDI Provinsi Kalimantan Tengah, Prof. Dr. I Nyoman Sudiana,

M.Sc., cukup banyak umat Hindu dari berbagai instansi yang ditugaskan di Kalimantan Tengah. Mereka inilah yang berperan aktif turut serta membina umat baik lokal maupun pendatang dari Bali atau Jawa. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh tersebut menetap di Kalimantan Tengah setelah pensiun dari tugasnya.

A. KEBERADAAN UMAT HINDU KINI

Komunitas umat Hindu etnis Bali diprovinsi Kalimantan Tengah saat ini tersebar di empat belas kota/kabupaten yakni: Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara.

Tatanan kehidupan beragama Hindu dibentuk dalam tatanan masyarakat yang menyatu dalam komunitas heterogen dari berbagai kehidupan beragama di Provinsi Kalimantan Tengah di antaranya berasal dari suku Jawa, Banjar, dan Dayak. Secara khusus, berdasarkan pengamatan dan wawancara, antara umat Hindu Kaharingan yang merupakan penduduk asli suku Dayak dan komunitas Hindu etnis Bali yang umumnya adalah pendatang memiliki tatanan kehidupan bermasyarakat yang saling hormat-menghormati, harmonis, rukun, damai, tentram, dan saling bertoleransi. Dalam prosesnya, keberadaan tatanan ini diharapkan terus berjalan secara harmonis dengan tujuan untuk mencapai masyarakat Hindu yang mencapai bahagia lahir dan batin sesuai tujuan dalam ajaran agama Hindu yakni *Moksartham jagad hita ya ca iti dharmam*.

Perkembangan umat Hindu etnis Bali di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pemanfaatan aneka simbol keagamaan yang merupakan wujud dari bentuk pemahaman dan penerapan ajaran agama Hindu serta wujud bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemanfaatan simbol-simbol keagamaan ini dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, kehidupan beragama antara sesama komunitas Hindu, hingga kehidupan bermasyarakat secara luas. Sebagai contoh adalah pemanfaatan simbol arca Ganesha dan *pelangkiran* di rumah, pemanfaatan *meru* di tempat suci,

pemanfaatan *wantilan* sebagai tempat pertemuan, Pura sebagai tempat persembahyangan, keberadaan *penjor* di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas pada saat Hari Raya Galungan, serta penggunaan ornamen atau simbol Hindu di seputar tempat umum di Provinsi Kalimantan Tengah yang menandakan keberadaan umat Hindu etnis Bali dan sekaligus bentuk dari penampilan umat Hindu etnis Bali yang turut berkontribusi secara positif dengan penuh kebersamaan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Upaya pelestarian terhadap simbol keagamaan Hindu tersebut merupakan wujud dari *sraddha* dan pengabdian atau *bhakti* umat Hindu etnis Bali terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama Hindu. Keberadaan simbol keagamaan Hindu memiliki nilai-nilai kesucian, nilai kemuliaan, nilai keutamaan, dan nilai kesakralan. Keberadaan simbol-simbol keagamaan Hindu sesungguhnya wujud kebesaran agama Hindu dan sekaligus sebagai wujud kecintaan umat Hindu terhadap ajaran agama Hindu. Keberadaan simbol keagamaan Hindu sangat penting dijaga keberlangsungan dan kelestariannya, oleh karena keberadaan simbol keagamaan Hindu juga mengandung makna peningkatan spiritual, mental, moral, dan etika dalam beragama Hindu. Begitu banyak jenis, bentuk, ragam, wujud, dan manfaat dari keberadaan ritual umat Hindu etnis Bali yang wajib untuk dipelihara, diselamatkan, dan untuk dilestarikan keberadaannya oleh umat Hindu secara bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh ketulusan hati. Dengan terwujudnya upaya memelihara dan melestarikan simbol keagamaan Hindu, berarti pula umat Hindu telah memahami dan menerapkan atau mengimplementasikan ajaran agama Hindu dengan baik dan benar walaupun berada di daerah rantauan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Keberadaan umat Hindu etnis Bali di Provinsi Kalimantan Tengah sungguh kaya makna, nilai, manfaat, dan beragam bentuknya dalam hal ritual keagamaannya. Ada perpaduan antara keberadaan simbol keagamaan Hindu Kaharingan secara *local wisdom* (sesuai kearifan setempat di Provinsi Kalimantan Tengah) dengan keberadaan simbol keagamaan Hindu etnis Bali yang merupakan eksistensi dari umat Hindu dari para

pendatang, yang nampak adanya sinergisitas atau perpaduan yang sangat asri, harmonis, indah, estetis, sertasaling melengkapi satu sama yang lainnya. Adanya kebhinekaan dalam wujud, bentuk, manfaat, dan bahan material untuk mewujudkan simbol keagamaan Hindu juga sebagai bagian dari keberadaan simbol keagamaan Hindu yang bernilai luhur, luhung, mulia, agung, dan utama bagi eksistensi kehidupan keberagaman Hindu di Provinsi Kalimantan Tengah. Suasana kehidupan beragama Hindu yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah Raya nampak serasi dan ada kombinasi antara eksistensi simbol keagamaan Hindu secara *local wisdom* dari segenap umat Hindu Kaharingan dan eksistensi simbol-simbol keagamaan Hindu etnis Bali. Hal tersebut memberikan warna-warni tata kehidupan beragama Hindu yang berbhineka dan saling melengkapi. Eksistensi budaya lokal simbol Hindu dalam kehidupan beragama Hindu secara *local wisdom* (budaya lokal) memberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama eksis tanpa memunculkan degradasi nilai antara satu dengan lainnya. Secara umum data umat Hindu di Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 33: Sebaran Umat Hindu di Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah berdasarkan Data 2017

Kabupaten	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Umat Hindu (orang)
Kotawaringin Barat	10.759	1.342
Kotawaringin Timur	16.796	28.141
Kapuas	14.999	35.989
Barito Selatan	8.830	6.308
Barito Utara	8.300	34.193
Sukamara	3.827	5.969
Lamandau	6.414	11.591
Seruyan	16.404	8.653
Katingan	17.500	36.292
Pulang Pisau	8.997	1.857
Gunung Mas	10.804	23.080
Barito Timur	3.834	12.437
Murung Raya	23.700	16.595
Palangka Raya	2.399	7.957
Jumlah	153.564	230.404

Sumber: Data diolah dari BPS Kalimantan Tengah, 2018 dan Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Tengah

Dari tabel 33 dapat dilihat bahwa konsentrasi tertinggi umat Hindu di Kalimantan Tengah adalah di Kabupaten Barito Utara, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Barito Timur. Sedangkan Kabupaten Kotawaringin Barat konsentrasi umat Hindupaling rendah.

Tempat Ibadah

Mengenai tata kehidupan beragama di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat fasilitas tempat ibadah untuk melaksanakan tata kehidupan beragama bagi umat Hindu berupa kuil/sanggar/pura/balai patahu bahwa fasilitas tempat ibadah bagi umat Hindu yang berupa Pura/balai pada Tahun 2017 ada sebanyak 530 buah (Data Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah). Seperti ada Pura Pitamaha, ada Pura Dalem Prajapati, dan ada Pura Sali Paseban Batu Bukit Tangkiling. Mengenai jumlah fasilitas tempat ibadah bagi umat Hindu berupa pura keluarga yang dinamai *sanggah* dan sejenisnya ada juga di masing-masing tempat tinggal keluarga Hindu yang bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambaran umum rumah ibadah umat Hindu di Kalimantan Tengah seperti tabel sebagai berikut.

Tabel 34: Jumlah tempat ibadah Hindu/Pura/Balai di Kalimantan Tengah

Kabupaten	Tahun 2016	Tahun 2017
Kotawaringin Barat	9	9
Kotawaringin Timur	54	54
Kapuas	60	126
Barito Selatan	27	27
Barito Utara	97	170
Sukamara	3	4
Lamandau	13	13
Seruyan	4	9
Katingan	86	86
Pulang Pisau	12	14
Gunung Mas	89	89
Barito Timur	43	43
Murung Raya	19	41
Palangka Raya	14	13
Jumlah	530	698

Sumber: Data diolah dari BPS Kalimantan Tengah, 2018 dan Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Tengah

Dari tabel 34 terlihat bahwa peningkatan jumlah pura paling tinggi di Kabupaten Barito Utara sebanyak 73 pura, selanjutnya di Kabupaten Kapuas terdapat penambahan pura sebanyak 66 pura. Sedangkan di Palangkaraya terjadi pengurangan jumlah tempat ibadah dari 14 menjadi 13 pura/balai. Hal ini dikarenakan sejak 2017 Pura Sali Paseban Batu dan Balai Batu Banama di Kecamatan Tangkiling, Palangkaraya dihitung sebagai satu tempat ibadah umat Hindu. Di lokasi ini memang terdapat sebuah pura dan beberapa *balai keramat*¹ Dayak Kaharingan.

Orang Suci/Rohaniawan/Pemimpin Agama Hindu

Orang suci adalah orang-orang yang diberikan kemampuan lebih atau bakat alami sebagai penerima ajaran-ajaran suci Tuhan (ajaran agama) sekaligus kemudian menjadi mediator antara manusia dengan Tuhan beserta para malaikatnya. Selain pemimpin umat Hindu dari Bali (Ida Pedanda/Ida Rsi), umat Hindu di Kalimantan Tengah juga memiliki orang suci/rohaniawan dari Dayak Kaharingan. *Basir/Pisor* adalah sebutan rohaniawan umat Hindu Kaharingan yang memiliki kedudukan terhormat karena tugas dalam melaksanakan upacara ritual keagamaan Hindu Kaharingan. Istilah *Basir* digunakan oleh umat Hindu Kaharingan di daerah Kapuas dan Kahayan sedangkan untuk istilah *Pisor* adalah untuk daerah Katingan. Sementara untuk daerah Kobar, Sukamara dan Lamandau disebut dengan Dukun, sedangkan untuk daerah Barito disebut dengan *Basi*, *Kandong*, dan lainnya.

Selama upacara Tiwah berlangsung, ulama atau dalam bahasa agama Hindu Kaharingan disebut *Basir/Pisor/Basi*, memainkan peran sentral. Pada saat puncak upacara misalnya, *Basir* berperan membacakan mantra-mantra. Bukan sembarang *Basir* yang memimpin, melainkan *Basir* utama atau yang disebut dengan *Basir Duhung Handepang Telun* yang memiliki kemampuan lebih dan dipercayalah yang akan memimpin jalannya upacara. Selain mengantarkan para arwah yang di-Tiwah-kan dengan mantra-mantranya menuju *Lewu Tatau* (alam keabadian) para *Basir* juga akan menceritakan proses awal kehidupan manusia.

1 *Balai Keramat* adalah tempat pemujaan terhadap Tuhan bagi umat Hindu Kaharingan (Riwut, 2003)

Tidak semua orang bisa menjadi *Basir* ataupun *Pisor* karena memiliki syarat-syarat tertentu dan mengikuti garis keturunan. *Basir* atau *Pisor* melaksanakan tugas maupun fungsinya sesuai dengan ajaran yang telah mereka pelajari atau pada saat mereka berguru, sehingga pelaksanaan upacara ritual kelihatannya berbeda-beda, namun tujuannya sama. Seorang *Basir* wajib bisa bahasa *Sangiang* karena semua mantra-mantra yang diucapkan oleh seorang *Basir* pada saat upacara menggunakan bahasa *Sangiang*. *Basir* mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ritual agama Hindu Kaharingan sesuai dengan kelompok tugasnya masing-masing, misalnya pada saat Balian yang bertugas adalah *BasirUpu*, *BasirPendamping* dan *Basir Pengapit*. Saat *Pahanteran Liau* yang memimpin upacara tersebut adalah *BasirDuhung Handepang Telun* atau *Pisor* sebagai *Tukang Hanteran*.

Basir dipercaya sebagai mediator dan komunikator manusia dengan Yang Maha Kuasa dan makhluk lain yang keberadaannya tidak terlihat oleh mata jasmani. Pada zaman dahulu *Basir* adalah perempuan namun karena perkembangan, maka pada masa sekarang *Basir* kebanyakan laki-laki. Pada awalnya *Basir* laki-laki ini seorang yang bersifat dan bertingkah laku seperti perempuan, namun pada masa sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dalam dunia spiritual *Basir* memiliki kemampuan lebih, dalam hal pengobatan, khususnya penyembuhan penyakit yang berkaitan dengan hal-hal yang dipandang bersifat mistik. *Basir* berkaitan erat dengan Hindu Kaharingan karena *Basir* merupakan rohaniawan yang berperan penting dalam berbagai upacara keagamaan.

Basir memiliki beberapa tingkat kemampuan, yang pertama adalah *Basir Pengapit* atau masih *Basir* pemula yang bertugas mengiringi *Basir Upu* dalam melaksanakan Balian, kemudian *Basir Pendamping* satu tingkat di atas *Basir Pengapit* juga bertugas dalam mendampingi dan mengiringi *Basir Upu* dalam melaksanakan upacara Balian. Tingkat selanjutnya adalah *Basir Upu* yang bertugas memimpin upacara Balian, termasuk dalam upacara *Tiwah* terkecuali dalam hal upacara *Kanjan Pahi* (tarian pelepasan bagi para janda dan duda) dan *Pahanteran Liau* (mengantarkan roh yang di *Tiwahkan* ke sorga)

Basir/Pisor memiliki peranan yang sangat penting dalam

kehidupan keberagaman masyarakat Hindu Kaharingan, khususnya dalam pelaksanaan berbagai ritual keagamaan yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan. *Basir* berfungsi sesuai dengan tingkat kemampuannya, misalnya untuk pelaksanaan upacara Balian maka yang berperan adalah para *Basir* Upu, Pendamping Dan Pengapit, sedangkan untuk upacara Pahanteran Liau pada saat upacara Tiwah yang berwenang melaksanakannya adalah *Basir* Duhung Handepang Telun atau *Pisor* sebagai Tukang Hanteran.

Basir Duhung Handepang Telun atau *Pisor* berperan dalam melaksanakan suatu tugas ketika memimpin upacara *Tiwah* sebagai Tukang Hanteran Liau Balawang Panjang dan Liau Karahang Tulang. *Basir* Duhung Handepang Telun ini memiliki pengetahuan yang sudah mahir dalam pelaksanaan semua ritual agama Hindu Kaharingan dan melebihi dari *Basir* Upu, *Basir* Pengapit dan *Basir* Pendamping.

Duhung Handepang Telun/*Pisor* adalah rohaniawan yang melaksanakan upacara Tiwah bersama dengan *Basir* Upu, *Basir* Pengapit dan Pendamping. *Basir* Handepang Telun berperan sebagai Tukang Hanteran yang menggunakan pakaian kebesaran seperti Raja Pampulau Hawun, Randin Talampe Batanduk Tunggal pada saat melaksanakan Tiwah Suntu di Batu Nindan Tarung Kereng Angkar Bantilung Nyaring. Tugas seseorang *Basir* Duhung Handepang Telun secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut: Berperan memberikan tuntunan dan bimbingan kepada umat serta bertugas melayani umat dalam melaksanakan upacara ritual.

Adapun tingkatan-tingkatan *Basir* terdiri atas:

- 1) *Basir* Upu, bertugas sebagai pemandu upacara (pengucapan mantra-manta suci dalam upacara). *Basir* Upu adalah *Basir* yang memimpin pelaksanaan upacara Balian, *Basir* yang dapat memberikan petunjuk dalam persiapan dan pelaksanaan upacara baik kepada anggota upacara, maupun *Basir-Basir* lainnya yang berada dibawah *Basir* Upu yang ikut serta dalam pelaksanaan upacara tersebut;
- 2) *Basir* Pengapit, adalah *Basir* yang membantu *Basir* Upu. *Basir* Pengapit ini terbagi menjadi dua, yaitu sisi kanan dan di sisi kiri dari *Basir* Upu. *Basir* Pengapit berperan jika *Basir* Upu

berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka *Basir* Pengapit dapat menggantikan *Basir* Upu sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh *Basir* Upu tersebut. *Basir* Pengapit bersama dengan *Basir* Pendamping bersama-sama mengiringi *Basir* Upu dalam merapalkan mantra-mantra dalam upacara Balian yang dilaksanakan selama upacara;

- 3) *Basir* Pendamping, adalah *Basir* yang membantu *Basir* Upu. *Basir* Pendamping ini juga berfungsi sama dengan *Basir* Pengapit, namun posisinya berada di bagian *paling* ujung;
- 4) *Basir* Duhung Handepang Telun (Pahanteran), adalah *Basir* yang bertugas mengantarkan arwah orang yang meninggal menggunakan Lanting Samben atau Mariaran Lanting Samben menuju Lewu Tatau. Pada saat melaksanakan Pahanteran Liau (mengantarkan arwah yang meninggal) *Basir* Duhung Handepang Telun menggunakan *Sangiang* Rawing Tempun Telun (Malaikat Ranying Hatala/Tuhan).

Jumlah rohaniawan Hindu di Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel 35.berikut.

Tabel 35: Jumlah Rohaniawan Hindu di Kalimantan Tengah

Kabupaten	Tahun 2016	Tahun 2017
Kotawaringin Barat	12	13
Kotawaringin Timur	23	23
Kapuas	25	25
Barito Selatan	18	18
Barito Utara	56	87
Sukamara	8	10
Lamandau	67	67
Seruyan	7	9
Katingan	35	38
Pulang Pisau	21	25
Gunung Mas	185	185
Barito Timur	49	49
Murung Raya	64	126
Palangka Raya	31	53
Jumlah	601	728

Sumber: Data diolah dari data Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Tengah

Dari tabel terlihat bahwa peningkatan jumlah rohaniawan yang tinggi adalah di Murung Raya, Barito Utara dan Palangkaraya. Selama tahun 2016 sampai dengan 2017 terdapat penambahan jumlah rohaniawan Hindu sebanyak 127 orang.

B. PENDIDIKAN HINDU

Berbicara mengenai pendidikan tidak terlepas dari peran pendidik atau guru. Daoed Yoesoef (1980) menyatakan bahwa seorang guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan (*civic mission*). Tugas-tugas profesional dari seorang guru yaitu meneruskan atau transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. Tugas manusiawi adalah tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas-tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas manusiawi itu adalah transformasi diri, identifikasi diri sendiri dan pengertian tentang diri sendiri.

Baik tidaknya mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh rasio guru dan murid. Rasio yang tepat akan meningkatkan efektivitas proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswanya. Tentu saja sumber daya manusia dan finansial juga sangat mempengaruhi mutu pendidikan saat ini. Jumlah tenaga pendidik agama Hindu di Kalimantan Tengah sejatinya tidak menjadi suatu masalah yang berarti saat ini dari aspek jumlah siswa. Namun karena kondisi geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas jumlah tenaga pendidik agama Hindu mejadi suatu isu yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Terutama bagi umat Hindu yang berada jauh di pelosok akan sulit mendapatkan pengajaran dari seorang guru agama Hindu. Kondisi ini menyebabkan seorang guru di Kalimantan Tengah bisa saja ditugaskan di beberapa sekolah di daerahnya.

Kondisi tenaga pendidik/guru agama Hindu di Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel 36.

Tabel 36: Keadaan Tenaga Pendidik/Guru Agama Hindu di Kalimantan Tengah

Kabupaten/ Kota	Luas (km ²)	Penempatan			Pendidikan				Jumlah
Kotawaringin Barat	10.759	7	1	0	1	7	0	0	8
Kotawaringin Timur	16.796	7	7	2	0	16	0	0	16
Kapuas	14.999	47	12	9	4	64	0	0	68
Barito Selatan	8.830	19	5	3	4	23	0	0	27
Barito Utara	8.300	27	7	10	4	40	0	0	44
Sukamara	3.827	10	3	2	2	13	0	0	15
Lamandau	6.414	8	1	3	3	9	0	0	12
Seruyan	16.404	1	0	1	0	2	0	0	2
Katingan	17.500	54	14	9	17	60	0	0	77
Pulang Pisau	8.997	40	16	10	13	53	0	0	66
Gunung Mas	10.804	31	6	9	9	37	0	0	46
Barito Timur	3.834	22	2	2	8	18	0	0	26
Murung Raya	23.700	10	7	3	4	16	0	0	20
Palangka Raya	2.399	30	21	11	4	57	1	0	62
Jumlah	153.564	313	102	74	73	415	1	0	489

Sumber: Data diolah dari data Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Tengah

Dari tabel 36 dapat dilihat bahwa penugasan guru Agama Hindu di kabupaten/kota di Kalimantan tengah belum merata dilihat dari luas wilayah. Sedangkan dari jenjang pendidikan tenaga pendidik/guru sudah baik yaitu sebagian besar sudah berpendidikan S1.

C. POTENSI

Budaya lokal (*local wisdom*) masyarakat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah menarik dikaji secara ilmiah karena belum banyak mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi. Kearifan lokal di Kalimantan Tengah sangat kental dengan tata kehidupan masyarakat Hindu Kaharingan, hal mana sangat aplikatif untuk kehidupan sehari-haridan secara turun temurun diterapkan oleh umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah.

Masyarakat setempat memiliki potensi budaya yang kaya yang akan dijabarkan berikut ini.

Potensi Tanaman Obat

Pulau Kalimantan sebagai pulau terluas ketiga di dunia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Berbagai jenis fauna endemik memiliki habitat di hutan-hutan tropis Kalimantan. Sebut saja orang utan, bekantan dan berbagai jenis burung khas hidup di Pulau Kalimantan. Demikian pula berbagai jenis tumbuhan mulai dari tanaman kayu sampai perdu yang memiliki manfaat khas tumbuh di Kalimantan. Kekayaan flora dan fauna tersebut secara tradisional telah dimanfaatkan oleh suku Dayak untuk kehidupan mereka. Berbagai jenis ramuan herbal Dayak telah terkenal sebagai obat yang mujarab. Beberapa jenis tanaman yang sering digunakan sebagai obat herbal antar lain:

- a. *Sungkai (Peronema canescens)* adalah tanaman kayu hutan yang tumbuh di hutan-hutan tropis. Selain memiliki nilai ekonomis dari hasil kayunya, *sungkai* dapat dimanfaatkan akarnya untuk obat diabetes (hasil wawancara dengan Bajik E. Sempai, 17 Januari 2019);
- b. *Bajakah Bahenda* (akar kuning) adalah tanaman khas Kalimantan yang tumbuh di daerah aliran sungai Kapuas. Akar *bajakah bahenda* dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit kuning;
- c. *Karamunting* adalah kayu-kayuan yang tumbuh di sebagian besar hutan Kalimantan. Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai obat luka;
- d. *Bawang lembu* adalah tanaman sejenis bawang yang umbinya dapat dimanfaatkan untuk mengobati hipertensi dan asam urat;
- e. *Saluang belum* adalah tanaman kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai obat penambah stamina dan kekuatan tubuh.

Masih banyak lagi tanaman khas hutan Kalimantan yang bermanfaat secara ekonomis baik sebagai material bangunan atau sebagai obat herbal. Kayu Kalimantan yang terkenal kekuatannya sebagai material bangunan adalah Kayu Uling dan Bengkarai.

Potensi Budaya Lokal Dalam Bentuk Nilai

Potensi budaya lokal (*local wisdom*) yang memiliki keterkaitan dengan tata kehidupan masyarakat Hindu Kaharingan memiliki ragam bentuk atau wujud yang mengandung makna atau nilai luhur. Buhol, tokoh agama Hindu Kaharingan, menyatakan falsafah *huma betang* yang secara harfiah berarti rumah panjang atau rumah besar yang dihuni oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah (wawancara tanggal 17 Januari 2019). *Huma betang* atau rumah betang yang wujudnya berupa rumah panjang atau rumah yang dirancang berukuran besar, yang mampu menampung warga atau anggota keluarga dalam jumlah yang banyak. Filosofi yang bisa dimaknai dari budaya lokal *huma betang* adalah hidup dalam kebersamaan dalam suasana yang rukun, damai, tenteram, bersatu, harmonis antara satu dengan lainnya dalam tatanan kehidupan masyarakat Dayak, yang termasuk juga di dalamnya sebagai umat Hindu Kaharingan sebagai komunitas dari masyarakat Kalimantan Tengah.

Selanjutnya ia menyatakan terdapat semboyan "*penyang hinje simpei puturung humba tamburak*" yang artinya semangat dalam persatuan dengan tekad yang kuat (wawancara tanggal 17 Januari 2019). Budaya lokal lainnya menurut Buhol dinamai *belom bahadat* artinya hidup yang patuh dengan aturan, norma, serta adat-istiadat (wawancara tanggal 17 Januari 2019). Selanjutnya Buhol menyatakan ada budaya lokal yang dinamai *isen mulang* atau pantang mundur, *habaring hurung* artinya gotong royong, *handephapakat* artinya persatuan kesatuan semua komponen masyarakat, serta ada nilai budaya lokal *bahaum bakubayang* artinya musyawarah mufakat (wawancara tanggal 6 Agustus 2017).

Ada nilai budaya lokal yang terkait dengan kelestarian hutan disebut *Pukung Pahewan*, yang menyiratkan kawasan hutan yang tidak boleh diganggu atau dirusak oleh siapapun" (Tim Penyusun, 2003: 51). Nilai tersebut bermakna penting khususnya demi pelestarian hutan oleh setiap masyarakat guna menjamin keberlangsungan hutan yang hijau, menyejukkan, tidak menimbulkan bencana, dan hutan yang memberikan kehidupan bagi aneka satwa, tumbuhan, dan manusia. Kemudian ada nilai budaya lokal dalam kaitannya hidup berumah tangga

yakni *butang* artinya berutang (Tim Penyusun, 2003: 51). Nilai budaya lokal berupa Butang dimaksudkan jika dalam kehidupan berumah tangga bilamana si suami berlaku ringan tangan yang melakukan kekerasan dalam berbuat, maka nilai butang tersebut dijadikan penuntun menuju kesadaran sang suami agar tidak berlaku keras, kasar, atau menyiksa istri.

Dalam kaitannya dengan penerimaan tamu terhormat, maka ada budaya lokal bernama acara *Tetek Pantan*. Dalam bahasa Dayak Ngaju kata *Tetek* artinya potong dan *Pantan* berarti penghalang. Meskipun tidak semua Acara *Tetek Pantan* tersebut adalah memotong penghalang, namun istilah ini populer di masyarakat. Dapat dimaknai bahwa acara *Tetek Pantan* bertujuan untuk menghormati tamu terhormat lewat prosesi simbolisyakni melewati rintangan yang ada pada gerbang masuk. Ada banyak ragam *pantan* atau halangan, antara lain berupa pantan kayu artinya halangan terbuat dari jenis kayu, *pantan tewu* artinya halangan terbuat dari bahan tebu, *pantan garantung* artinya halangan dengan menggunakan beberapa buah gong, *pantan balanga* artinya halangan yang berupa guci yang ditutup dengan kain batik panjang atau bahalai, *pantangarantung* dan *pantan balanga* artinya halangan yang menggunakan beberapa buah gong dan beberapa buah guci, *pantang timpung* artinya halangan dengan menggunakan kain yang dipasang di depan pintu masuk, dan ada juga jenis pantan atau halangan yang dinamai *pantan bulan* yang memakai penghalang sejumlah gadis-gadis berjejer di depan pintu gerbang masuk menuju tempat yang dituju. Nilai budaya lokal di daerah Kalimantan Tengah sangat unik dan sakral, budaya lokal dalam bentuk nilai yang dijunjung masyarakat Hindu Kaharingan merupakan potensi atau modal sosial dalam mencapai toleransi umat beragama di Kalimantan Tengah.

Potensi Budaya Lokaldalam Bentuk Ritual

Potensi budaya lokal (*local wisdom*) yang berkenaan dengan pelaksanaan ritual atau upacara keagamaan Hindu Kaharingan, antara lain: upacara tiga bulanan (*palenteng kalangkang sawang*), ritual *nyaki ehet* (upacara tujuh bulanan), ritual *mangkang kahang badak* (upacara sembilan bulanan), ritual *palas bidan*, ritual

nahunan, ritual manyaki penganten, ritual pakaja manantu, ritual pakanan dahiang, ritual patahu, ritual pakanan sahur, ritual manajah antang, ritual manenung, ritual mamapas lewu, ritual nyadiri, ritual laku untung, ritual tiwah.

Makna upacara *manyanggar lewu* juga dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan di wilayah Kalimantan Tengah. Upacara ini merupakan ritual menolak atau menjauhkan roh-roh jahat yang diyakini dapat mengganggu dan menyebarkan marabahaya seperti penyakit (Salendra, 2014: 13-14). Upacara *manyanggar lewu* diniatkan untuk menghilangkan segala jenis kekotoran, penyakit, maupun hal bersifat negatif di wilayah desa atau kota (*lewu*). Upacara *manyanggar lewu* tergolong ke dalam upacara *Bhuta Yadnya*. Lazimnya juga dikenal sebagai upacara tolak bala, untuk menghindari segala hal yang bersifat tidak baik dan bersifat membahayakan kehidupan yang ada di wilayah desa atau kota dimana umat Hindu Kaharingan tinggal.

Selain itu, umat juga melaksanakan upacara *Wara Mindah Tulang*, terutama di wilayah Barito Utara. Ada kepercayaan yang sangat dilestarikan sampai saat ini oleh umat Hindu Kaharingan yang berkaitan dengan upacara kematian atau lazim juga dikenal dengan nama upacara *Tiwah* yang tergolong upacara *Pitra Yadnya*. Pada daerah Barito Utara istilah *waramengacu* kepada upacara kematian atau upacara penghormatan terakhir kepada leluhur. “*Wara Mindah Tulang* merupakan pengangkatan, pembersihan tulang mereka yang telah tiada agar kiranya mendapatkan tempat yang lebih baik lagi (Hatha, 2015: 15). Upacara *Wara Mindah Tulang* dilakukan dengan menggali kuburan (*ngadi ogang*) untuk mengambil tulang bagi si mati yang selanjutnya dibersihkan ke sungai dengan ritual tertentu dan ditempatkan pada Tabala atau tempat suci untuk menyimpan tulang orang yang telah meninggal.

Umat setempat juga menjalankan upacara *manggantung sahut* sebagai salah satu jenis ritual suci atau upacara keagamaan bagi umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. *Manggantung sahut* adalah sebuah upacara yang dilakukan baik oleh seseorang dalam sebuah keluarga maupun masyarakat dalam suatu desa dengan cara menggantung turus janji sebagai simbol kesungguhan hati (pikiran, perkataan, dan perbuatan)

terhadap kuasa *Ranying Hatalla Hatalla*" (Nali Eka, 2013: 12-13). Wilayah desa dijaga oleh kekuatan Tuhan yang Maha Esa yang dinamai *Sahut Lewu*, yang diwujudkan berupa Antang Patahu. Penjaga desa juga dikenal dengan nama Kamantuhu (Pamantuhu) atau Buhai, yang memiliki kekuatan untuk melindungi, menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan wilayah desa sehingga mencapai hidup damai.

Pelaksanaan ritual *palas bidan*, atau lazimnya juga disebut upacara *balian palas bidan* juga dilakukan oleh umat. *Upacara Balian Palas Bidan* dilaksanakan untuk membersihkan dan menyucikan bayi dari noda dan para, roh halus yang ikut serta pada saat kelahiran. Upacara ini dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya (Tardi Edung, 2010: 7-8). Bayi yang lahir dibersihkan dari hal-hal yang bersifat kotor atau papa. Segala kekotoran yang ada pada bayi saat lahir diupacarai dengan upaya suci atau palas. Harapannya agar si bayi menjadi penerus keluarga yang sehat, kuat, serta memiliki jati diri yang berkualitas mulia terawat dengan selamat. Bayi merupakan harapan bagi keluarga yang merupakan penerus keluarga, untuk menjadi pelanjut keturunan dalam keluarga. Dengan demikian upacara *Balian Palas Bidan* juga merupakan wujud rasa syukur kepada bidan yang telah menolong proses kelahiran dengan baik dan lancar.

Uraian mengenai ritual *manyaki panganten*, bahwa upacara ini merupakan salah satu ritual yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. "*Manyaki Panganten* adalah pengukuhan perkawinan bagi masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Ngaju. Adapun istilah *Manyaki Panganten* berarti kedua mempelai telah disucikan dengan menggunakan sarana darah ayam atau babi" (Iwi, 2014: 22). Pada saat penganten diupacarai yang dipimpin oleh basir (orang suci Hindu Kaharingan), bahwa kedua mempelai posisinya berada di atas gong (*garantung*) dengan memegang batang sawang (*batang andong*), sebagai pertanda untuk bersaksi dihadapan Tuhan Yang Maha Esa (*Ranying Hatalla Langit* atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa).

Makna ritual "*pakaja manantu* ini merupakan upacara menerima menantu oleh kedua orang tua suaminya" (Titing, 2016: 11). Pihak orang tua suami menerima menantu adalah

simbol dari rasa bahagia dan bersyukur karena telah memiliki menantu. Pelaksanaan upacara *Pakaja Manantu* dilaksanakan di rumah orang tua si laki-laki atau di rumah si suami. Penyerahan Batu Kaja merupakan suatu jalan hadat atau cara adat-istiadat sesuai tradisi yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Upacara *pakaja manantu* sebagai rangkaian terakhir dari pelaksanaan upacara perkawinan, yang harapannya agar ikatan perkawinan mencapai ikatan yang langgeng, mencapai ikatan yang rukun, dan memiliki keturunan suputra.

Makna ritual *pakanan dahiang*, atau juga dikenal dengan upacara *mampakanan dahiang*. “Upacara *mampakanan dahiang* dilihat dari pengertiannya adalah *mampakanan* berarti memberikan makan/makanan sedangkan *dahiang* pertanda yang tidak baik/petaka. Jadi, *mampakanan dahiang* adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara memberikan persembahan kepada Ganan Dahiang yang telah memberikan pertanda yang tidak baik dalam kehidupan manusia, agar setelah melaksanakan upacara tersebut kita tidak lagi terganggu oleh hal-hal yang tidak baik” (Nuri Susantie, 2015: 15—16). Ritual *mampakanan dahiang* yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan berkaitan dengan ritual Tiwah atau upacara kematian bagi umat Hindu Kaharingan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan demikian bahwa upacara *mampakanan dahiang* merupakan ritual suci untuk menetralkan segala hal kekuatan negatif untuk mencapai kekuatan positif, kekuatan baik, dan kekuatan mulia.

Pelaksanaan ritual *patahu*, atau lazimnya dinamai upacara *pakanan patahu* merupakan ritual keagamaan Hindu Kaharingan yang ditujukan kepada roh leluhur (manifestasi) *Ranying Hatalla Langit*. Ritual ini dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada roh leluhur yang telah memberikan perlindungan kepada umat Hindu Kaharingan (Yupiana, 2015: 11). Upacara ini diadakan di area desa, tepatnya di tengah-tengah desa, lazimnya di suatu tempat yang sangat dikeramatkan atau disucikan oleh umat Hindu Kaharingan di wilayah tersebut. *Patahu* diartikan sebagai leluhur umat Hindu Kaharingan yang telah memberikan anugerah rahayu, selamat, bahagia, serta telah melindungi kehidupan masyarakat yang ada di desanya.

Masyarakat juga menggelar upacara *pakanan sahur parapah*,

suatubentuk persembahan kepada Sangiang atau Dewa yang menurut kepercayaan umat Hindu Kaharingan memberikan perlindungan kepada para umat (Tariana, 2017: 17). Makna *pakanan* merupakan wujud persembahan berupa makanan atau sesajen yang dipersembahkan dengan ketulusan hati dan kesucian hati. Keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi-Nya sebagai *Sahur Parapah* atau kekuatan Dewa wajib dihormati dan dimuliakan sesuai keyakinan dan kepercayaan dalam agama Hindu Kaharingan di wilayah Kalimantan Tengah, yang tujuannya untuk memohon keselamatan dan kerahayuan.

Ritual berikutnya adalah *manajah antang*. Upacara ini dipandang sebagai jalan terakhir yang akan ditempuh umat ketika menghadapi suatu persoalan genting, seperti bencana, orang hilang dan sakit keras, perang, dan sebagainya (Tamiyang, 2015: 16).Inti makna dari upacara *manajah antang* adalah suatu upaya untuk mengantisipasi adanya hal-hal negatif atau hal yang menjadi kendala dalam hidup dan kehidupan manusia, terutama yang dihadapi oleh pihak keluarga dalam masyarakat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Upacara *manajah antang* dipimpin oleh *pisor* atau *basir* yang mempunyai tugas untuk mengantarkan upacara.

Selain itu, ada ritual *manenung* yang dilakukan umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah untuk meramal atau mencari sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat (Handoko, 2010: 6).Upacara ini tergolong suci dan keramat. Dengan dilakukan upacara *manenung*, umat Hindu Kaharingan memohon tuntunan yang bersifat niskala ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa (*Ranying Hatalla Langit*).

Adapun upacara lainnya, yakni bernama *tiwah*, dijalankan sebagai upacara kematian.Upacara *tiwah*diniatkan sebagai penghormatan terhadap leluhur yang diyakini oleh umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah.*Tiwah* dipercaya sebagai salah satu ritual keagamaan tertinggi. Melalui upacara ini, umat mengantarkan arwah orang-orang yang meninggal dunia menuju ke tempat yang kekal abadi (Mariatie, 2017: 14). *Tiwah*dengan demikian tergolong sebagai upacara Pitra Yadnya yang mendoakan roh leluhur dalam perjalanan kembali ke alam

tidak nyata atau alam *niskala*, yang lazim dinamai *lewu tatau* untuk menyatu dengan Ranying Hatalla Langit atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Pada paparan ini juga diuraikan mengenai upacara *Noka Daja*, yakni ritual memandikan bayi ke sungai (Sigai, 2005: 17). Bayi yang telah berumur sekitar empat puluh hari dapat menjalani upacara ini, dan telah dibolehkan untuk dimandikan di air sungai. Upacara yang sakral ini dimaksudkan demi kesehatan dan keselamatan bayi. Bayi diupacarai dengan doa-doa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau *Mahotara* agar menjadi anak baik, yang hormat kepada orang tua, serta menjadi anak *suputra*. Pada saat pelaksanaan upacara *Noka Daja* tersebut juga dilakukan pemberian nama terhadap si bayi sehingga memiliki identitas yang jelas dan jati diri sebagai anak dengan nama yang baik.

Keberadaan upacara bagi umat Hindu Kaharingan sangat beraneka dalam tatanan masyarakat Hindu Kaharingan. Ada juga yang dinamai upacara *nahur hajat* yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. *Nahur hajat* berasal dari bahasa Dusun Ma'lang yang artinya ritual untuk membayar hajat seseorang yang mempunyai hajat (Endri, 2016: 29). Upacara ini tergolong sakral dan diselenggarakan di tempat yang disakralkan bernama *warah*. Upacara *nahur hajat* dilaksanakan secara turun temurun dan memiliki nilai yang sangat magis. Bilamana umat Hindu Kaharingan memiliki hajat, maka ada kewajiban untuk membayarnya atau *nahur* secara tulus dan hati suci.

Selain itu ada juga upacara *balian bakawat* yang dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Upacara ini dilaksanakan untuk mengobati suatu penyakit yang diderita oleh umat Hindu Kaharingan di Desa Teluk Malewai Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara (Suparni, 2015: 15). Petugas khusus yang melaksanakan upacara ini dinamai *balian basir* yakni orang suci Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Istilah *bakawat* merupakan bahasa setempat di daerah Barito Utara yang maknanya adalah menolong untuk mengobati mereka yang sakit agar diberikan kesembuhan.

Selanjutnya terdapat pula ritual *wara nyalimbat* yang dilaksanakan di daerah Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa

Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara. Pelaksanaan upacara *wara nyalimbat* secara tradisi dan turun temurun dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan di wilayah DAS Barito, tepatnya di kabupaten Barito Utara. Upacara ini memiliki persamaan makna dengan upacara *tiwah*. Pada beberapa daerah di Kalimantan Tengah juga ada menyebutnya dengan istilah *bukas*, ada juga dengan istilah *dallo* maupun istilah *marabia*. Namun karena luasnya wilayah provinsi Kalimantan Tengah dan banyaknya daerah aliran sungai (DAS) maka ada pula yang menyebutnya dengan istilah *Ijambe* dan berbagai istilah lain.

Wara Nyalimbat dapat dipahami sebagai sebuah upacara: (1) menyucikan roh leluhur atau roh anggota keluarga yang meninggal dunia agar terbebas dari kesengsaraan (ikatan reinkarnasi) untuk mencapai kebahagiaan yang abadi menyatu dengan Ju'us Tuhaallahtala (Tuhan) di alam Kolong Bulau (dunia keabadian). (2) menyucikan keluarga yang ditinggal dari sial-marabahaya atau ketidaksucian (cuntaka) akibat dari suatu peristiwa kematian, dan sebagai upaya mohon doa dan restu dari roh leluhur atau roh anggota keluarga yang telah dilaksanakan ritualnya (disucikan) agar keluarga yang ditinggalkan mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani" (Etika, 2014: 13).

Inti upacara ini adalah sebagai wujud *sraddha* dan *bhakti* umat Hindu Kaharingan untuk melakukan penghormatan kepada roh leluhur yang meninggal dunia untuk upaya penyucian, guna mencapai alam *niskala* atau mencapai alam *Kolong Bulau* sesuai kepercayaan bagi umat Hindu Kaharingan di DAS Barito.

Potensi Budaya Lokal dalam Bentuk Perintah atau Larangan

Potensi budaya lokal yang wujudnya dalam bentuk perintah atau larangan di antaranya adalah *damang*, *hadat*, *jipen*, *singer*, *hinting pali*, dan sebagainya. Semua potensi budaya lokal yang berwujud atau berbentuk perintah ataupun larangan merupakan potensi yang bermakna untuk terwujudnya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah bagi umat Hindu Kaharingan.

Istilah *damang* sangat dikenal baik di kalangan masyarakat Hindu Kaharingan di wilayah Kalimantan Tengah. *Damang* memiliki peran besar dalam kaitannya dengan kehidupan

bersama dalam masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. *Damang* memiliki tugas untuk adanya sinergi tugas dalam tatanan masyarakat dalam konteks adat-istiadat yang berlaku di Kalimantan Tengah. Menurut Tjilik Riwut (dalam Hidayat, 2016: 14), *damang* adalah

“suatu jabatan kepala adat di masa lampau yang diakui oleh masyarakat Dayak sebagai pengakuan terhadap adat-istiadat leluhur mereka. *Damang* merupakan pimpinan informal yang berperan sebagai pemegang adat, yang berkewajiban untuk menjaga kehidupan hukum dalam masyarakat adat Dayak”.

Dapat ditegaskan bahwa *damang* sebagai pimpinan dalam hal adat-istiadat memiliki tugas dan kewenangan secara khusus dalam membina kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan secara adat. Adapun tugas *damang*, seperti diatur pada Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018, yang salah satunya adalah “menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa adat *kedamangan*” (dalam Hidayat, 2016: 14). Jadi, *damang* kepala adat merupakan pimpinan dalam lembaga adat bagi masyarakat di suku Dayak, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat mulia dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada segenap masyarakat adat di Kalimantan Tengah. Selain itu, *damang* kepala adat juga berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat (dalam Hidayat, 2016: 15).

Adapun *hadat* atau adat memiliki makna tradisi setempat. Sebagaimana diketahui, adat merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat dan selalu diyakini oleh masyarakat terkait (Maryana, 2016: 11). Inti dari makna *hadat* adalah adat atau kebiasaan setempat untuk melestarikan kebiasaan tata hidup masyarakat setempat di Kalimantan Tengah.

Sementara itu, *singer* bermakna denda adat yang harus dibayar oleh pelaku baik dalam bentuk uang maupun berwujud benda yang senilai atas perbuatannya terhadap seorang atau beberapa korban (Agustin, 2016: 14). *Singer* juga dapat diartikan sebagai sanksi atau denda bagi orang telah melakukan pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam

kehidupan bersama, yang telah diatur sedemikian rupa sebagai suatu ketentuan yang bersifat mengatur untuk sesuatu hal, agar tidak dilanggar. *Singer* tidak bisa diabaikan begitu saja oleh si pelaku. *Singer* wajib dibayar atau wajib ditaati oleh si pelaku sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Bagi masyarakat yang melanggar tentu mendapatkan sanksi atau denda (*singer*), yang diwujudkan dalam bentuk sanksi tertentu yang lazim dinamai *jipen*. *Jipen* adalah sanksi adat yang diterapkan oleh lembaga adat dengan membayar sejumlah uang (Agustin, 2016: 14). Dalam hal ini bahwa bagi yang melanggar harus bersiap menerima sanksi atau *singer* dan wujud sanksi yang diterima atau *jipen*, dapat berupa uang ataupun berupa benda atau material sesuai keputusan dalam penerapan *singer* oleh pihak lembaga adat di Kalimantan Tengah. Pihak yang memutuskan sanksi (*singer*) yang berupa uang atau material diputuskan oleh petugas khusus di lembaga adat yang lazim dinamai *damang* atau *damang* kepala adat.

Hinting pali berasal dari bahasa *Sangiang* (bahasa yang dipakai dalam kitab suci umat Hindu Kaharingan). *Hinting* berarti tali pembatas, dan *pali* berarti larangan. Jadi *hintingpali* memiliki pengertian yaitu tali pembatas larangan, atau dengan pengertian lain, yakni pemasangan rambu-rambu atau tanda larangan yang terbuat dari tai rotan berisikan gantungan daun andong/daun sawang, bertuliskan simbol tanda tambah atau tapak dara dengan menggunakan kapur sirih (Slawatie, 2016: 10). Makna dari *hinting pali* bagi umat Hindu Kaharingan adalah sebagai tanda larangan yang mesti dipatuhi dan ditaati dalam kehidupan beragama sesuai kepercayaan dalam Hindu Kaharingan. Apabila larangan tersebut tidak dipatuhi, maka berdampak pada resiko bagi yang melanggarnya, yakni menemui bahaya ataupun bencana bagi yang bersangkutan. *Hintingpali* dipasang pada tempat yang keramat, tempat suci, tempat berbahaya, ataupun tempat yang telah ditentukan oleh pihak yang memasanginya, agar larangan tersebut tidak dilanggar.

Ada makna *Pali* yang penting disajikan pada paparan ini oleh karena kata *Pali* berarti tabu. Dalam masyarakat suku Dayak Ngaju penyampaian kata *Pali* atau Tabu mempunyai maksud ganda. *Pali* yang maksudnya benar-benar Tabu, *Pali* yang benar-

benar Tabu terkait dengan sesuatu yang bersifat Sakral atau berdampak buruk bagi orang yang melanggarnya, misalnya: *pali* dilarang membakar ikan Saluang terutama di wilayah hutan atau tempat yang dianggap angker; *pali* memakan sejenis ikan atau binatang tertentu oleh karena akan berakibat bagi keselamatan jiwa yang bersangkutan dan keluarganya (*paliBakamatei*). *Pali* yang sifatnya untuk memberi pengajaran, misalnya, bagi seorang gadis, *pali* memilih antah beras dipintu depan rumah. Maksud tersiratnya bahwa tidak baik apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara demikian, sebaiknya dikerjakan diteras belakang. Selain itu ada *pali* menyapu sampah rumah pada saat hari menjelang malam hari. Maksudnya bahwa sebenarnya pekerjaan tersebut harus sudah dikerjakan sebelum hari menjelang malam. Apabila menyapu pada malam hari barangkali ada barang berharga yang terjatuh dilantai dan ikut tersapu. Ada pulapali membunuh binatang yang sedang mengandung, atau ikan yang sedang bertelur atau ikan yang masih kecil. Maksudnya mengajarkan bahwa kontinuitas populasi binatang atau ikan harus tetap terjaga (Tim Penyusun, 2003: 61). Begitu mulianya makna *pali* meski di masyarakat dianggap tabu atau hal yang dilarang. *Pali* secara tersirat memiliki arti yang mendidik, memberikan teladan, memberikan perilaku untuk contoh yang benar, serta sikap lainnya yang mesti dipahami dan ditindaklanjuti untuk tata laku yang bersifat menyelamatkan diri ataupun pihak lainnya.

Dalam hal perkawinan, masyarakat juga mengenal larangan. Misalnya saja perkawinan *tutur sumang* yang sangat dilarang dalam hukum adat atau kebiasaan masyarakat Dayak Ma'anyan, seperti ayah mengawini anaknya. Sebagaimana norma umum, masyarakat Dayak Ma'anyan juga mengecam hal tersebut karena menyalahi aturan agama maupun hukum kebiasaan yang ada di masyarakat Dayak Ma'anyan" (Hartono, 2016: 12). Bagi umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah, terutama di wilayah Barito Timur, perkawinan incest ini juga dilarang karena masih memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah yang sangat dekat. Umat juga melarang perkawinan di bawah umur atau perkawinan yang tidak mendapat restu dari orang tua yang dinamai perkawinan *hatamput*. Perkawinan (Rusnani, 2016: 21). Sedapat mungkin perkawinan ini dihindari karena dapat

berdampak tidak baik bagi keturunan, selain itu dengan umur yang masih muda umumnya belum siap membina keluarga.

Potensi Budaya lokal Dalam Bentuk Organisasi

Potensi budaya lokal yang dimiliki oleh umat Hindu Kaharingan di wilayah provinsi Kalimantan Tengah sebagai wadah atau institusi untuk membina, melayani, memfasilitasi, menuntun, mengembangkan, memotivasi, menginovasi, mempersatukan, maupun untuk tujuan memantapkan kehidupan bagi umat Hindu Kaharingan sungguh banyak ragamnya. Potensi budaya lokal berupa organisasi keagamaan, antara lain: a) Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat di Palangka Raya yang sering dinamai MBAHK; b) Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan yang dinamai MDAHK yang berkedudukan di wilayah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; c) Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan yang dinamai MRAHK yang berkedudukan di wilayah kecamatan di wilayah provinsi Kalimantan Tengah; d) Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan yang dinamai MKAHK yang berkedudukan di wilayah desa di wilayah provinsi Kalimantan Tengah; e) Majelis Pemuda dan Mahasiswa Agama Hindu Kaharingan yang dinamai MPMAHK yang ada di Kota Palangka Raya dan di kabupaten yang ada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya ada juga lembaga atau organisasi keagamaan bagi masyarakat Hindu Kaharingan yang dinamai Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan Umat Hindu Kaharingan yang lazim dinamai LPTIKUHK yang memiliki sinergi dengan organisasi Lembaga Pengembangan Dharma Gita atau LPDG, yang berkaitan dengan upaya untuk pengembangan seni nyanyian keagamaan Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Demikian juga halnya bahwa umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah ada memiliki lembaga atau organisasi untuk memberikan pelayanan dan pembinaan bagi para ibu-ibu atau wanita umat Hindu Kaharingan sekaligus bagi wanita umat Hindu pada umumnya, yang dinamai Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI. Melalui wadah atau organisasi WHDI ini, maka para wanita melakukan kegiatan, aktivitas, program untuk memberikan pelayanan yang bersifat sosial, keagamaan,

dan pembinaan moralitas secara spiritual dan kerohanian Hindu Kaharingan.

Dalam hal untuk melakukan pembinaan dan pelayanan keagamaan bagi umat Hindu Kaharingan, maka MBAHK, MDAHK, MRAHK, MKAHK melakukan sinergi kinerja bersama organisasi keagamaan Hindu pada umumnya yang dinamai Parisadha Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Provinsi Kalimantan Tengah maupun PHDI Kabupaten/ Kota, PHDI Kecamatan, dan PHDI Desa yang ada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Kerja secara kebersamaan dalam memberikan pelayanan kepada umat Hindu Kaharingan dan umat Hindu secara umum merupakan upaya terpadu yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Hindu secara menyeluruh yang bahagia dan sejahtera secara lahir dan batin (*bhagyahita wahyādhyatmika*).

Peran organisasi keagamaan Hindu ada juga yang dinamai Perhimpunan Pemuda Hindu Dharma Indonesia (Peradah) pada wilayah kota dan kabupaten serta di tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya yang mewadahi para mahasiswa Hindu di wilayah provinsi Kalimantan Tengah adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia yang disebut KMHDI, yang memberikan kontribusi untuk turut memberikan pelayanan, pembinaan, dan peningkatan kualitas *sraddha* dan *bhakti* para pemuda Hindu di wilayah Kalimantan Tengah. Seluruh organisasi ini aktif bekerjasama untuk kepentingan umat dan masyarakat umumnya dengan didasari ajaran Dharma.

Potensi Budaya Lokal dalam Bentuk Karya Seni

Masyarakat Hindu Kaharingan memiliki khasanah kesenian yang kaya. Potensi budaya lokal dalam wujud karya seni sungguh banyak dan sangat kental dalam implementasinya di tengah-tengah masyarakat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Kesenian tersebut umumnya bersifat komunal religius. Beberapa potensi budaya lokal dalam kesenian bagi umat Hindu Kaharingan, antara lain: seni tari, seni lukis, seni suara atau nyanyian, seni bangunan, seni ukir, dan lain-lain yang bernilai luhur dan mulia.

Berkenaan dengan seni tari yang merupakan budaya lokal

di Kalimantan Tengah, sesuai sumber tertulis pada buku Selayang Pandang Kota Palangka Raya tahun 2016, pada halaman 75-77 ada diuraikan mengenai seni tari, antara lain:Tari Nasai, Tari Gginyah/kinyah/kenyah, Tari Bukas, Tari Banting Raun, Tari Ngajan, Tari Giring-giring,Tari Deder (karang dede), Tari Dedeo (karang dedeo), Tari Balian, Tari Kerangkau/Gumbeuk, Tari Halu/antan/kanjau halu, Tari Kambang Pandan, Tari Dandang Tingana, Tari Nyandun Nyambah, Tari Hatuah Buah, Tari Mangkules, Tari Mangetam, Tari Kinjak Karing, Tari Kanjan Pahi, Tari Tugal, Tari Galang Bawo, Tari Ganggereng, Tari Galang Dadas/Balian Dadas, Tari Bawi Kameloh, Tari Rantak Kipas Gempita.

Tarian lokal di Kalimantan Tengah secara umum dibawakan oleh penari laki-laki dan penari perempuan.Ada penari yang khusus dari kalangan pemuda dan juga para tetua.Kekhasan seni tari di Kalimantan Tengah sungguh menarik untuk dikaji karena secara turun temurun jenis seni tari masih lestari hingga kini. Tarian yang lazim ditarikan tatkala ritual bagi umat Hindu Kaharingan yakni pada ritual *tiwah* adalah tarian *ngajanyang* secara umum ditarikan oleh para tetua baik laki-laki maupun perempuan yang bertempat di lokasi ritual *tiwah* bagi umat Hindu Kaharingan.

Potensi seni lukis merupakan budaya lokal yang sangat menarik.Lukisan khas suku Dayak dapat dilihat pada tutang/cacah/tato.Selain itu ditemukan pada peti mati yang disebut*runi*, *kakurung*, dan *sandung* (Selayang Pandang Kota Palangka Raya, 2016: 75).Bagi umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah tatkala ada keluarga yang meninggal dunia, maka dibuatkan peti mati berupa *runi* yang dihiasi dengan lukisan penuh makna spiritual. Demikian juga pada saat upacara *tiwah* bagi umat Hindu Kaharingan, bahwa ada lukisan khas yang bermakna filosofis bagi umat Hindu Kaharingan pada sebuah tempat suci untuk mensthanakan *atma* atau *tatau* si mati bertempat di *sandung*, yang pada umumnya juga dihiasi dengan lukisan.

Seni suara atau nyanyian khas Kalimantan Tengah yang merupakan budaya lokal dalam bentuk olah vokal atau olah suara, ada beragam jumlahnya, seperti:nyanyian kandan, nyanyian salengot, nyanyian dadeo dan ngaloak, nyanyian setangis, nyanyian riwut andau, nyanyian manawur, nyanyian mansana

kayau, nyanyian mansana kayau pulang, nyanyian ngendau, nyanyian kelalai-lalai, nyanyian mohing asang, nyanyian natum, nyanyian natum pangpanggal, nyanyian dongdong, nyanyian dodot, nyanyian marung, nyanyian ngandan, nyanyian karunya, nyanyian balian, nyanyian jaya, nyanyian baratabe (Selayang Pandang Kota Palangka Raya, 2016: 75). Ada juga nyanyian khas atau nyayian suci bagi umat Hindu Kaharingan yang dinamai *kandayu*. Nyanyian suci *kandayu* merupakan lagu suci untuk mengiringi ritual suci bagi umat Hindu Kaharingan.

Dalam hal seni bangunan yang merupakan budaya lokal di daerah Kalimantan Tengah, antara lain: berupa jembatan yakni jembatan Kahayan, jembatan Katingan, jembatan Kalahien, jembatan Pulang Pisau, jembatan Kapuas, jembatan Mentaya, dan sebagainya. Ada juga berupa monument, museum, rumah panjang (*huma betang*), istana isen mulang, bangunan patung, gapura, sandung, karamat, balai, dan sebagainya. Jenis seni bangunan ada dimanfaatkan untuk keperluan rekreasi, tempat tinggal, fasilitas umum, tempat suci bagi umat Hindu Kaharingan berupa Balai Basarah, Karamat, Sandung, dan sebagainya.

Potensi Budaya Lokal dalam Bentuk Cerita Rakyat

Berdasarkan riset di lapangan, potensi budaya lokal yang berkaitan dengan cerita rakyat umumnya bersumber dari pustaka suci atau susastra lokal yang dinamai pustaka suci Panaturan. Dalam sumber suci pustaka Panaturan diajarkan cerita rakyat yang bernilai spiritual, seperti: cerita Bawi Ayah, cerita Raja Bunu, dan sebagainya. Ada juga cerita rakyat yang bernama manusia ular. Dalam cerita tersebut dikisahkan seorang pemuda bernama Sangi yang memiliki aktivitas sebagai pemburu babi hutan ataupun rusa yang ada di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah tepatnya di aliran sungai Kahayan. Sangi sangat pintar memburu babi hutan dan rusa menggunakan senjata sumpit. Suatu ketika diceritakan bahwa Sangi tak mendapatkan hasil buruan. Namun Sangi menemukan ular raksasa yang sedang memangsa babi hutan. Ketika itu Sangi mengintipnya dari semak-semak. Ketika itu ular atau naga raksasa lalu berubah rupa menjadi pemuda tampan untuk menghampiri si Sangi lalu menyuruhnya untuk menelan babi hutan. Sangi sanggup menelannya babi hutan

dan Sangi dianugerahi umur panjang asalkan rahasia kejadian tersebut tidak diberitahukan kepada siapapun. Aneh rupanya si Sangi sampai menjadi kakek nampak masih muda, ketika itu cucunya bertanya terus kenapa kakek masih tetap awet muda. Saat itu Sangi membuka rahasia yang mestinya tidak boleh dikatakan kepada orang lain. Saat itulah Sangi akhirnya meninggal dan berubah menjadi naga raksasa yang menghuni sungai Kahayan, Sangi lalu mengutuk penghuni dan keturunannya agar tak mendulang emas di wilayah sungai Kahayan. Makna yang dapat dipetik adalah seseorang tidak perlu mengetahui rahasia orang lain karena dapat menimbulkan bencana bagi orang tersebut dan bencana juga bagi yang bertanya. Secara etika bahwa rahasia itu tak pantas diketahui oleh orang lain, demi keselamatan bersama.

Kemudian ada juga cerita rakyat yang bernama Tambun dan Bungai. Kedua bersaudara ini menjadi ikon provinsi Kalimantan Tengah. Dikisahkan empat lelaki perkasa yang bersaudara bernama Rambang, Ringkai, Bungai, dan Tambun. Keempat anak bersaudara ini sangat cerdas sejak kecil. Tambun dan Bungai melakukan pertapaan untuk memperoleh kesaktian seperti saudara sepupunya si Rambang dan Ringkai. Pada sebuah desa bernama Tumbang Pajangei terdapat batu mengeluarkan cahaya yang bernama Batu Bulan. Ketika bertapa, Tambun dan Bungai menutup sinar batu dengan getah kayu (lepu) agar tak diketahui orang lain. Ketikaitu si Tambun dan Bungai melihat sebuah tangga menuju langit ketujuh untuk bertemu Raja Intan Tunggal Sahawung yang telah mengetahui tujuan Tambun dan Bungai untuk memperoleh kesaktian. Mereka berdua pun dianugerahi kesaktian berupa senjata Mandau/Duhung. Tambun dan Bungai kembali ke bumi, lalu dihadang oleh hantu (dedemit) yang sakti, namun Tambun dan Bungai dapat membunuh hantu yang bernama Tamalui Lahar itu. Saat dewasa, Tambun dan Bungai menikah, demikian juga saudara sepupunya juga menikah, tetapi Rambang mengembara ke saudara ayahnya yang tinggal di daerah hulu sungai Mahakam di Kalimantan Timur bernama Kalangkang, yang kondisinya mendapat serangan dari musuh bernama Kandang Motong Anak Towong. Pertempuran terjadi dan dimenangkan oleh Rambang dan Ringkai bersama saudaranya si Tambun dan Bungai. Namun dalam perjalanan kembali ke

kampung halamannya mereka lagi-lagi mendapat serangan dari Kandang Tumbang Kutai Bulan, yang juga dimenangkan oleh Rambang, Rangkai bersama saudaranya, Tambun dan Bungai. Setibanya di kampung halaman, mereka disambut dengan ritual *tahasung taharang* atau upacara penyambutan pahlawan. Intinya bahwa keberanian dalam menghadapi musuh (asang) mencerminkan jiwa pahlawan sejati yang ditandai dengan ritual suci berupa upacara *tahasung taharang*. Sampai saat ini daerah provinsi Kalimantan Tengah dinamai Bumi Tambun Bungai.

Tabel 37: Bentuk-bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah

Nilai	Ritual	Perintah dan Larangan	Organisasi/ Lembaga Sosial	Karya Seni	Cerita Rakyat
1. <i>huma betang</i> artinya rumah panjang atau rumah besar	1. <i>manyanggar lewu</i> untuk menghilangkan segala jenis penyakit, bersifat negatif di wilayah	1. <i>Damang</i> merupakan pimpinan informal yang berperan sebagai pemegang ada	1. Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MBAHK).	1. <i>Ngajan</i> tarian saat upacara <i>tiwah</i>	Pada pustaka <i>Panaturan</i> terdapat cerita rakyat yang bernilai spiritual,
2. Selogan <i>penyang hinje simpei puturung humba tamburak</i> yang artinya semangat dalam persatuan dengan tekad yang kuat	2. <i>Tiwah</i> upacara kematian	2. <i>hadat</i> adalah adat atau kebiasaan setempat untuk melestarikan kebiasaan	2. Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MDAHK)	2. <i>Manasai</i> tarian keber-samaan	seperti : cerita <i>Bawi Ayah</i> , cerita <i>Raja Bunu</i> , dan sebagainya.
3. <i>belum bahadat</i> artinya hidup yang patuh dengan aturan, norma serta adat-istiadat	3. <i>pakanan sahur parapah</i> adalah persembahan ditujukan kepada <i>Sangiang</i> atau Dewa	3. <i>Singer</i> adalah denda adat	3. Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan (MRAHK)	3. Ukiran <i>batang garing</i> sebagai lambang kehidupan	Dalam kajian sederhana ini dapat diuraikan secara singkat mengenai cerita rakyat bagi umat Hindu
4. <i>isen mulang</i> atau pantang mundur		4. <i>Jipen</i> yaitu sanksi adat yang diterapkan	4. Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan (MKAHK)	4. <i>Patung Luwing-Munduk</i> me-lambang-kan keber-samaan	<i>Kaharingan</i> yang sarat nilai spiritual, nilai religious, nilai kerohanian, nilai moralitas, nilai etika, nilai ritual, nilai filosofi, nilai estetika, nilai persatuan, maupun nilai sosial
5. <i>habaring hurung</i> artinya gotong royong			5. Majelis Pemuda dan Mahasiswa Agama Hindu Kaharingan (MPMAHK).		
6. <i>handep hapakat</i> artinya persatuan kesatuan semua komponen masyarakat					
7. <i>bahaum bakuba</i> yang artinya musyawarah mufakat					

Sumber: hasil olah data lapangan

D. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini antara lain :

- Agar Pemerintah memberikan porsi yang sama melalui Dirjen Bimas Hindu serta Pembimas Hindu di tingkat Kantor



Wilayah Agama termasuk pula Pemerintah Daerah terhadap masyarakat baik dari Hindu Kaharingan maupun Hindu Bali sehingga kecurigaan dan perasaan didiskriminasi bisa dihilangkan.

- b. Agar masyarakat Hindu Kaharingan maupun Hindu Bali tidak mempermasalahkan perbedaan identitas budaya yang melekat pada diri mereka baik itu budaya Kaharingan maupun budaya Bali sehingga integrasi dan toleransi tetap terjaga.
- c. Agar masyarakat Hindu Bali yang berada di Kalimantan Tengah harus tetap memegang teguh desa, kala, patradalam kehidupan sehari-harinya sehingga toleransi tetap dapat terjaga. Serta bagi masyarakat Hindu Kaharingan jangan terlalu mementingkan pengakuan formal negara, melainkan lebih pada implementasi kegiatan keagamaannya.
- d. Agar dikaji lagi rasio tenaga penyuluh dan tenaga pendidik agama Hindu dengan mempertimbangkan luasan wilayah yang dilayani.
- e. Agar mempersiapkan SDM dengan skema ikatan dinas sehingga peningkatan SDM tenaga penyuluh dan pendidik agama Hindu secara kualitas dan kuantitas lebih terjamin dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum*. (Bahan Pelatihan Metodologi Penelitian). Jakarta: Dikti.
- _____. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustin, Fransiska. 2016. *Penerapan Singer Oleh Damang Kepala Adat Di Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas*. Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN-TP Palangka Raya.
- Anonim. 2016. *Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2016*. Bappeda Kota Palangka Raya.
- _____. 2014. *Sinopsi Pagelaran Sendratari Tambun dan Bungai*. Digandakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.
- Atmadja, Nengah Bawa. 2008. *Kearifan Lokal: Mendekatkan Kesenjangan Antara Teks Ideal dan Teks Sosial Melalui Pikiran Menyintesis dan Multitipeperspektifisme* (Peper dibawakan dalam seminar nasional Kearifan Sastra dalam Pelestarian Lingkungan). Denpasar: Fakultas Sastra Unud.
- Dharmika, Ida Bagus. 2007. *Kearifan Lokal Masyarakat Desa Adat Tradisional Dalam Pengelolaan Hutan* (Laporan penelitian hibah bersaing). Denpasar: Fakultas Ilmu Agama Unhi.
- _____. 2005. *Kerukunan Hidup Umat Beragama (Studi Kasus Di Subak Medewi, Jembrana Bali)*, dalam *Direktori Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham).
- Edung, Tardi. 2010. *Upacara Balian Palas Bidan Menurut Agama Hindu Kaharingan di Ampah Kabupaten Barito Timur* (Kajian Bentuk, Fungsi dan Makna). UP3M STAHN-TP Palangka Raya.
- Eka, Nali. 2013. *Upacara Manggantung Sahut Menurut Hindu Kaharingan di Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas*. P3M STAHN-TP Palangka Raya.
- Endri. 2016. *Upacara Nahur Hajat Umat Hindu Kaharingan Di Desa Teluk Malewai Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara* (Kajian Fungsi dan Makna). Prodi Filsafat Agama Hindu Jurusan Brahma Widya STAHN-TP Palangka Raya.

- Etika, Tiwi. 2014. *Ritual Wara Nyalimat di Desa Paringlahung Kecamatan Montallat* (Sebuah Kajian Teologi Hindu Kaharingan). P3M STAHN-TP Palangka Raya.
- Falianto, Bayu. 1999. *Dinamika Terbentuknya Trust* (Suatu Studi pada Nasabah BCA Cabang Depok), Skripsi Sarjana Strata 1, FISIP-UI.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Sosial Virtues and The Creation of Prosperity*. Free Press.
- Gaya. 2016. *Integrasi Kepercayaan Kaharingan Ke Dalam Agama Hindu Di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah*. PPs IHDN Denpasar.
- George Ritzer & Douglas J. Goodman. 2012. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir, Teori Sosial Post Modern*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Golose. Petrus Reinhard. 2009. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK.
- Handoko. 2010. *Studi Tentang Upacara Manenung Umat Hindu Kaharingan di Kabupaten Pulang Pisau*. UP3M STAHN-TP Palangka Raya.
- Hartono, Pri. 2016. *Penyelesaian Perkawinan Tuter Sumang Masyarakat Hindu Kaharingan Di Desa Lebo Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur (Perspektif Hukum Hindu)*. Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN-TP Palangka Raya.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital* (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia), Jakarta: MR. United Press.
- Hatha. 2015. *Upacara Wara Mindah Tulang Menurut Umat Hindu Kaharingan di Desa Malawaken III Kecamatan Tewah Baru Kabupaten Barito Utara*. P3M STAHN-TP Palangka Raya.
- Hayat, Bahrul, Ph.D., 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: PT. Saadah Cipta Mandiri.
- Hidayat, Firma. 2016. *Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Damang Kepala Adat Di Kedamaian Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan (Perspektif Hukum Adat)*. Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN-TP Palangka Raya.

- Ishomuddin. 2005. *Sosiologi Perspektif Islam*. Malang: UMM Press..
- Iwi.2014. *Makna Teologis Manyaki Panganten Dalam Upacara Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas*.Jurusan Filsafat Hindu STAHN-TP Palangka Raya.
- J. S., Coleman. 1988. *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Jones, Pip. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial, Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme* (Alih bahasa: Ahmad Fedyani Saifuddin). Jakarta: Yayasan Obor.
- Koentjaraningrat.2002. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta. P.T Gramedia,
- _____, dkk. 2003. *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Progres bekerjasama dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Mantra, I B. 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*, Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Mariatie. 2017. *Upacara Tiwah Pada Masyarakat Hindu Kaharingan di Kabupaten Katingan*. P3M STAHN-TP Palangka Raya.
- Maryana.2016. *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Kasus Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas*.Jurusan Dharma Sastra STAHN-TP Palangka Raya.
- M. Mawardi J. 2007. *Peranan Sosial Capital dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Lampung: Fakultas IAIN Raden Intan.
- Narwoko, J.Dwi,. 2010. *Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Suatu Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Niken, Handayani. 2007. *Modal Sosial Dan Keberlangsungan Usaha* (Studi Deskriptif Tentang Keterkaitan Hubungan Modal Sosial Dengan Keberlangsungan Usaha Pengusaha Batik Di Kampong Kauman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta). Surakarta: Fakultas ISIPOL, Universitas Sebelas Maret.
- Nopri.2016. *Kekuatan Hukum Perkawinan Kicak Kacang Masyarakat Hindu Kaharingan Di Desa Tewang Baringin Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan* (Perspektif Hukum Hindu).Prodi Hukum Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN-TP Palangka Raya.

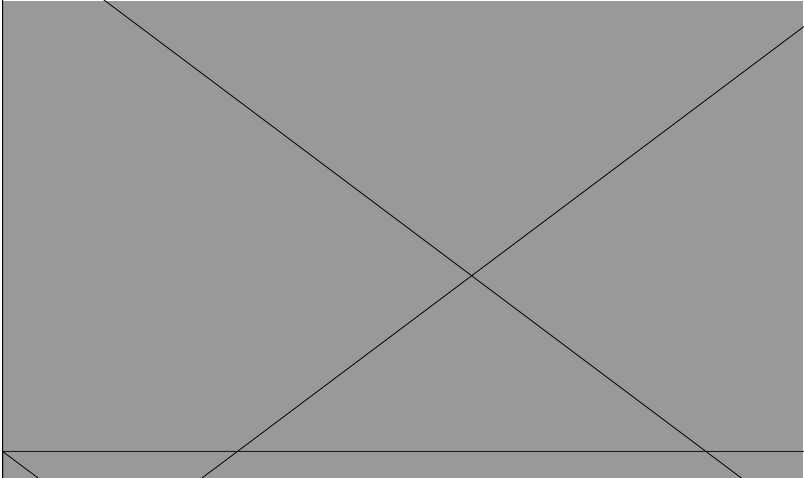
- Pitana (ed): 2005. *Revitali Subak dalam Menghadapi Globalisasi*, Yogyakarta: Andi.
- Putnam, Robert D. 1995. Bowling alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*.
- Rahimsyah, MB, AR. 2004. *Cerita, Legenda, Dongeng Rakyat Nusantara*. Jakarta : Bintang Indonesia.
- Raho, Bernard. 2012. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta; Prestasi Pustaka.
- Riwut, Tjilik. 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur. Palangka Raya* : Pusaka Lima.
- _____. 2007. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta : NR Publishing.
- Rusnani, Salina. 2016. *Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perkawinan Hatamput Di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (Perspektif Hukum Adat)*. Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN-TP Palangka Raya.
- Salendra, I Wayan. 2014. *Makna Filosofis Upacara Manyanggar Lewu Masyarakat Hindu Kaharingan Kabupaten Seruyan*. P3M STAHN-TP Palangka Raya.
- _____. 2016. *Nilai-Nilai Filosofis Upacara Manyanggar Lewu di Desa Dadahup Kabupaten Kapuas*. P3M STAHN-TP Palangka Raya.
- Sliwatie. 2016. *Hinting Pali Pada Upacara Tiwah Masyarakat Hindu Kaharingan Di Desa Sei Riang Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas (Perspektif Hukum Hindu)*. Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN-TP Palangka Raya,
- Subagiasta, I Ketut. 2015. *Filosofi Simbol Hindu*. Surabaya : Paramita.
- Sidi Astawa, I Nyoman. 2006. Politik Identitas: Studi Kasus Masyarakat Hindu Kaharingan di Palangkaraya Kalimantan Tengah. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Sigai, Ervantia L. dkk. 2005. *Studi Tentang Upacara Ritual Kelahiran Anak Noka Daja Menurut Agama Hindu Kaharingan di Kabupaten Murung Raya*. UP3M STAHN-TP Palangka Raya.
- Suarsa. 2004. *Fungsi Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Denpasar*: Balai Kajian Sejarah dan

Nilai Tradisional Denpasar.

- Suparni, Monica. 2015. *Filosofi dan Makna Panduduk Dalam Upacara Balian Bakawat Pada Umat Hindu Kaharingan di Desa Teluk Malewai Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara*. Prodi Filsafat Hindu Jurusan Brahma Widya STAHN-TP Palangka Raya.
- Susantie, Neri. 2015. *Makna Filosofis Upacara Mampakanan Dahiang Dalam Upacara Tiwah Umat Hindu Kaharingan di Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sangalang garing Kabupaten Katingan*. Prodi Filsafat Hindu Jurusan Brahma Widya STAHN-TP Palangka Raya.
- Syamsir,S, 1998. *Agama Kaharingan Dalam Kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah*, Jakarta: *Disertasi* Doktor Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah.
- Tamiyang. 2015. *Upacara Manajah Antang Pada Umat Hindu Kaharingan di Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur (Kajian Bentuk, Fungsi dan Makna)*. Prodi Filsafat Hindu Jurusan Brahma Widya STAHN-TP Palngka Raya.
- Tariana.2017. *Filosofi Upacara Pakanan sahur Mampendeng Sangkai Kambang di Desa Takaras Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas*.P3M STAHN-TP Palangka Raya.
- Tim Penulis. 2006. *Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia Belajar dari Tjilik Riwut*.Yogyakarta : Galang Press.
- Tim Penyusun, 2003. *Adat Istiadat Dayak Ngaj*. Palangka Raya : LSM Pusat Budaya Betang Kalimantan engah (LSM PBBKT).
- Titing. 2016. *Upacara Pakaja Manantu Bagi Umat Hindu Kaharingan di Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas (kajian Makna dan Prosesi)*. P3M STAHN-TP Palangka Raya.
- Varshney, Ashutosh, 2009. *Konflik Etnis dan Peran Masyarakat Sipil Pengalaman India*, (ptj.Siti Aisah dkk.). Jakarta: Balai Litbang Agama, Departemen Agama.
- Wirawan, 2012.*Teori-Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Yupiana. 2015. *Upacara Pakanan Patahu Bagi Umat Hindu Kaharingan di Desa Pilang Kecamatan jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau (Kajian Pelaksanaan dan Makna Filosofis)*. Prodi Filsafat Hindu Jurusan Brahma Widya STAHN-TP Palangka Raya.

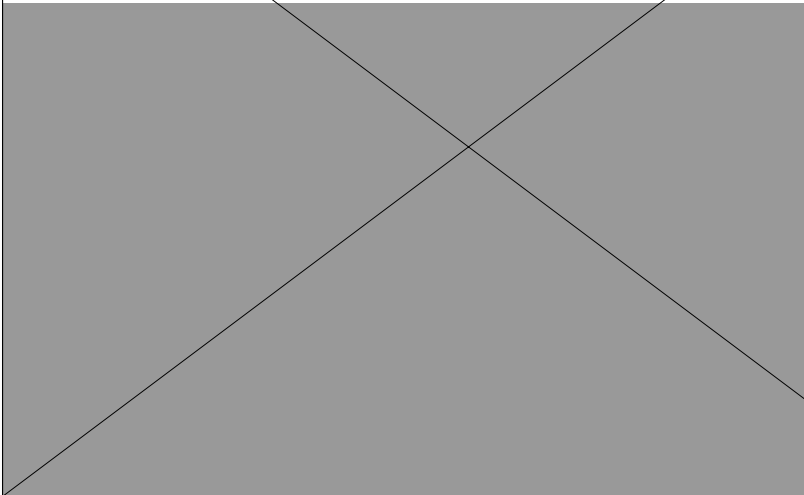
LAMPIRAN

Foto 1



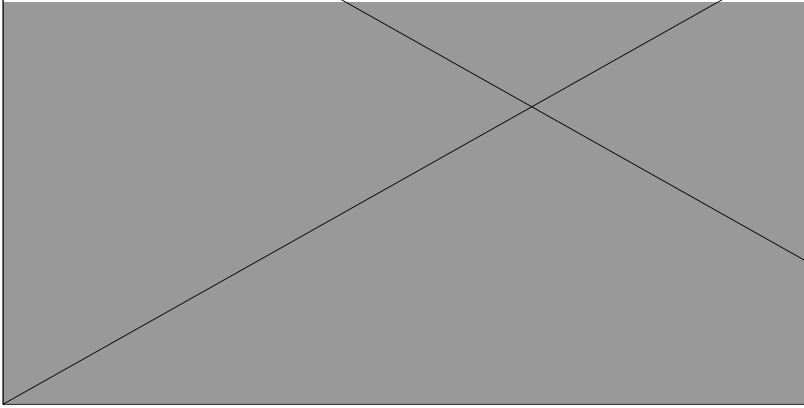
Dalam FGD di Kantor Bimas Hindu Kanwil Kemenag Prov.
Kalimantan Tengah

Foto 2



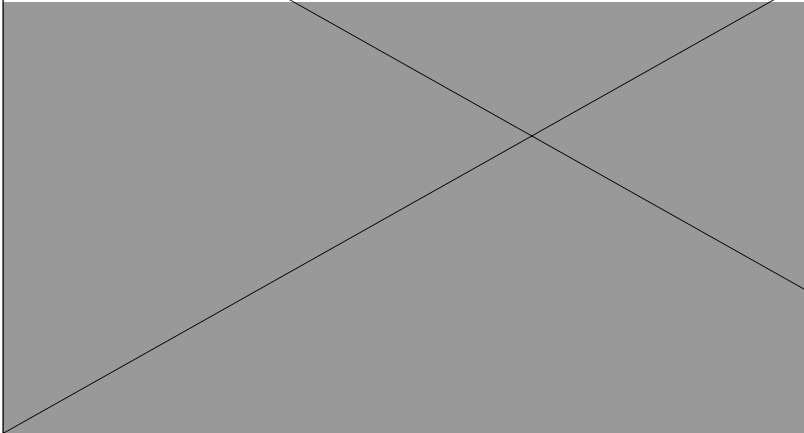
Wawancara dengan Tokoh Dayak Bapak Bajik E. Simpai di
Palangkaraya

Foto 3



Balai Keramat Dayak Kaharingan di Bukit Tangkiling, sebagai simbol integrasi Kaharingan ke dalam Agama Hindu

Foto 4



Pura Sali Paseban Batu di Bukit Tangkiling, simbol integrasi Kaharingan ke dalam Agama Hindu

HINDU DI MANADO :
Sejarah, Migrasi, Sumber Daya Manusia
Umat Hindu dalam Kerangka
Masyarakat Multikultur

I Ketut Ardhana
Fransiska Dewi Setiowati Sunaryo

Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, Kota Manado berada di ujung sebelah utara Pulau Sulawesi, tepatnya terletak pada posisi 124°40' – 124°50' BT dan 1°30' – 1°40' LU. Manado berbatasan dengan Kecamatan Wori dan Teluk Manado di sebelah utara, dengan Kecamatan Dimembe dan Kecamatan Tombulu di sebelah timur, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pineleng, dan di sebelah barat bersisian dengan Teluk Manado/Laut Sulawesi. Manado memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 24°–27° C, curah hujan berada pada rata-rata 3.187 mm/tahun. Iklim terkering berada di sekitar bulan Agustus dan terbasah pada bulan Januari. Penyinaran matahari rata-rata 53% dan kelembaban nisbi ±84 % Luas wilayah daratan Kota Manado adalah 15.726 hektare dengan garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Manado dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan yang mana wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Adapun ketinggian dataran antara 0-40% dengan puncak tertinggi di Gunung Tumpa.

Kota Manado meliputi wilayah Pulau Bunaken, Pulau Siladen, dan Pulau Manado Tua. Pulau Bunaken dan Siladen memiliki topografi yang bergelombang dengan puncak setinggi 200 meter, sementara pulau Manado Tua adalah pulau gunung dengan ketinggian ± 750 meter. Perairan Teluk Manado memiliki kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sampai 2.000 meter pada



Peta Provinsi Sulawesi Utara

garis batas pertemuan pesisir dasar lereng benua. Selanjutnya kedalaman ini menjadi semacam penghalang sehingga sampai saat ini intensitas kerusakan Taman Nasional Bunaken relatif rendah. Kota Manado adalah kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Arah utara, timur dan selatan Manado dikelilingi bukit landai, bergelombang, dan barisan pegunungan yang hijau. Sebelah barat dihiasi dengan pemandangan laut biru, yang dilengkapi dengan tiga pulau eksotik: Bunaken, Manado Tua dan Siladen, yang terkenal dengan pesona wisata bawah lautnya. Keindahan alam, lingkungan sosial, dan budayanya menyimpan banyak cerita, namun hanya sebagian yang tercatat dan terekam dalam sejarah, termasuk asal usul nama Manado tidak memiliki catatan dokumentasi yang lengkap, kecuali yang dimiliki oleh bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda) yang datang menjajah karena terpesona oleh keindahan kekayaannya.

Akibat terjadinya kolonisasi yang dilakukan oleh bangsa Barat, maka menimbulkan berbagai perubahan dan kelanjutan budaya di Kota Manado. Sebelum terjadinya peningkatan jumlah migrasi penduduk dari luar, Manado tampaknya masih merupakan hutan belantara dan berawa-rawa yang selain itu juga diselengi dengan dataran rendah dan deretan bukit. Deretan bukit banyak terdapat di sebelah utara Kota Manado di seberang Sungai Tondano. Di antaranya terdapat Bukit Teling yang

memanjang dari Selatan ke Utara. Bukit Teling ini searah dengan garis pantai yang tampaknya membelah dua dataran rendah, dimana dataran rendah sebelah kirinya sempit mengikuti garis pantai, sedangkan di sebelah kanannya merupakan lempengan seperti membulat yang berakhir di tepi selatan aliran Sungai Tondano.

Terdapat tiga sungai yaitu Sungai Tondano, Sungai Serio, dan Sungai Melalayang. Sungai Serio dan Sungai Melalayang berhulu di lereng Gunung Lokon. Dapat dikatakan bahwa dari ketiga sungai itu hanya Sungai Tondano yang dapat dilayari dengan perahu agak ke pedalaman dikarenakan airnya cukup dalam (Parengkuan, et al., 1982/1983: 16). Dapat ditambahkan bahwa di tengah lokasi kota, terletak sebuah bukit yang berada di tengah sebuah dataran rendah yang dahulunya merupakan rawa-rawa. Bukit itu dikenal dengan Gunung Wenang yang diambil dari nama sejenis kayu (*Macaranga Hispida*) yang dikelompokkan sebagai sebuah pohon-pohon besar. Tampaknya jenis pohon ini sudah mulai mengalami kepunahan karena yang kulit dan batangnya dipergunakan untuk mengawetkan jalan penangkap ikan. Selain itu, Sungai Tondano tampaknya berdelta dan berlumpur. Pada saat tertentu wilayah ini ditumbuhi oleh tanaman bakau yang tampaknya melindungi wilayah ini. J. Boereram (1941) menyebutkan bahwa curah hujan di Kota Manado mencapai 2.669 mm pertahunnya. Data tahun 1972 menyebutkan bahwa curah hujan di Kota Manado mencapai rata-rata 2751,25 mm (Parengkuan et al., 1982/1983: 18)

Tepat di tengah laut, di perairan Teluk Manado, terdapat pulau kecil yang disebut Pulau Babontehu yang disebut juga sebagai Pulau Manado Tua. Bentuknya dianggap unik karena satu-satunya pulau di teluk ini yang menyerupai gunung, sehingga disebut sebagai Gunung Babontheu atau Gunung Manado Tua. Sebagaimana disebutkan beberapa pengalaman dari berita-berita tertua, bahwa kota Manado merupakan wilayah yang sangat kuat memiliki hubungan dengan laut sehingga serangan ombak yang besar tidak dapat dihindari, terutama ketika terjadi hembusan angin besar yang terjadi sekitar bulan Oktober sampai dengan April setiap tahunnya. Namun Teluk Manado merupakan tempat yang aman bagi pelaut dan pelayar

jika diserang oleh angin laut dalam waktu-waktu tertentu. Gejala alam ini tampaknya berpengaruh terhadap berbagai peristiwa kesejarahan dan migrasi manusia yang terjadi di Manado. Dengan demikian, tidak dapat dihindari adanya kontak antara orang Minahasa dengan penduduk yang berasal dari luar.

A. SEJARAH MANADO, KEBERADAAN UMAT DAN BUDAYA HINDU

Sejarah

Saat ini, bukti fisik asal nama Manado masih diperdebatkan. Para akademisi dan tua-tua masyarakat masih berbeda pendapat perihal ini. Banyak versi yang mencoba memberikan interpretasi. Terdapat berbagai versi berbeda, akan tetapi kata Manado dipercaya berasal dari bahasa lokal di Sulawesi Utara yang hampir punah. Nama Manado yang dikenal saat ini berasal dari kata *Manarow* atau *Manadou* (bahasa daerah Minahasa), yang artinya “dijauh”; suatu sebutan yang hampir sama dengan Bahasa Sangihe, yaitu Manaro, yang artinya juga dijauh atau negeri yang jauh. Disebutkan seorang pendeta Kristen yang bertugas di Minahasa menyebutkan bahwa nama *Manaro* atau Manado (diambil dari Bahasa Tombulu tua yaitu *menaror*, *maerur* atau *maherur*. Kata *maherur* ini mengandung makna berkumpul bersama untuk berunding. Selain itu, nama ini juga dikenal dengan *pahawinaroran ni Tasikela* yang berarti tempat berkumpulnya orang Spanyol. Ini terutama dimaksudkan, karena adanya tempat berkumpul antara orang Minahasa dan Spanyol untuk mengadakan perundingan pada masa penjajahan dahulu.

Hingga saat ini nama Wenang adalah nama pertama sebelum berubah menjadi Manado. Pergantian nama Wenang menjadi Manado dilakukan oleh Spanyol pada tahun 1682 dan kata Manado diambil dari nama pulau di sebelah Bunaken, yaitu pulau Manado (kini Manado Tua). Perubahan nama Wenang menjadi Manado bukan dilakukan oleh Spanyol, akan tetapi oleh Belanda. Tahun 1682 yang berkuasa dan menjajah Sulawesi Utara bukan lagi bangsa Spanyol, tetapi VOC Belanda. Ini disebabkan karena pada tahun 1677 sampai 31 Agustus 1682, gubernur jenderal Hindia Belanda di Ternate, Dr. Robertus Padtbrugge datang di Manado mencatat sisa-sisa penduduk

kerajaan Bowontehu (kini Manado Tua) termasuk yang ada di Sindulang. Alasan perubahan dari kata Wenang menjadi Manado disebabkan di dalam dokumen dan surat-surat penting bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda, nama Manado banyak tercantum dan lebih dikenal dibanding Wenang. Pada tahun 1623, nama Manado mulai dikenal dan digunakan di dalam surat-surat resmi, sehingga Wenang diganti menjadi Manado. Untuk menjaga nilai sejarahnya, di belakang kata Manado ditambahkan kata tua, sehingga menjadi Manado Tua hingga saat ini.

Manado sebuah tempat yang tampaknya bukti-bukti kedatangan Hindu masih terbatas, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti Sumatra, Jawa dan Bali. Sebagaimana halnya dengan ketiga wilayah ini, adanya bukti-bukti kerajaan masa lalu tampaknya masih tersisa. Misalnya adanya dugaan bahwa di Gunung Babontehu ini merupakan pusat kerajaan Babontehu. Tidak berarti pula, bahwa wilayah ini tidak mendapat pengaruh dari luar seperti dari Asia dan Eropa misalnya.

Dapat dikatakan, tidak banyak berita-berita sejarah klasik Kota Manado yang masih dapat diingat oleh penduduknya. Namun demikian, terutama dalam kaitannya dengan sejarah kolonial Kota Manado dapat dikatakan, bahwa di sebelah selatannya terdapat berita-berita yang menyebutkan tentang adanya sebuah banteng kayu yang dibangun oleh seorang Spanyol yang tampaknya kemudian dibongkar dan dibangun kembali oleh Belanda di Sungai Tondano. Sebelum kedatangan bangsa Barat di wilayah ini memang telah terdapat sebuah kerajaan kuna sebagaimana yang disebut dengan Kerajaan Babontehu. Bangsa Portugis dan Belanda yang datang kemudian mengenal kerajaan ini dengan Kerajaan Manado yang terdiri dari Kerajaan Manado seperti Pulau Bunaken, Siladen, Mantehage, Nain Besar, Nain Kecil, Bangka dan yang lainnya yang tampaknya terletak berdekatan dari selatan ke utara yang jika dilihat dari Pulau Manado Tua. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan agama asli penduduk setempat tampaknya tidak banyak diberitakan. Paling tidak, bahwa migrasi orang Bali misalnya ke Kota Manado lebih banyak disebabkan oleh adanya pekerjaan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah terutama setelah diraihnya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perlu

dicatat, bahwa sebelum berkembang, Manado adalah bagian dari wilayah Minahasa. Dengan kata lain, sampai tahun 1947, Manado masih merupakan wilayah Minahasa.

Dahulu Manado merupakan ibukota Minahasa selain sebagai ibukota Karesidenan Manado yang meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Oleh karena itu tidak mengherankan jika membahas demografi Manado tidaklah dapat dilepaskan dari keadaan demografi Minahasa dimana banyak penduduk Manado berasal dari Minahasa. Pada pertengahan abad ke-19 (1821) jumlah penduduk diperkirakan berjumlah 63.704 (Parengkuan et al., 1983/ 1984: 56). Mayoritas penduduk pada saat itu adalah etnis Minahasa berjumlah 51.164 kemudian diikuti orang Borgo beragama Kristen sebanyak 11.516 sementara sisanya adalah orang yang dikenal sebagai *Vreemde Oosterlingen* terdiri dari etnis Cina, Belanda dan sebagainya. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada Sensus 2010, menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Jumlah penduduk di Manado diperkirakan (berdasarkan Januari 2014) adalah 430.790.

Tabel 38: Luas Kecamatan Di Kota Manado

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persen (%)
Malalayang	Malalayang Satu	17,12	10,9
Sario	Sario	1,75	1,1
Wanea	Wanea	7,85	5
Wenang	Tikala Kumaraka	3,64	2,3
Tikala	Tikala Baru	7,1	4,5
Paal Dua	Ranomuut	8,02	5,1
Mapanget	Paniki Bawah	49,75	31,6
Singkil	Singkil	4,68	3
Tuminting	Bitung Karang Ria	4,31	2,7
Bunaken	Molas	36,19	23
Bunaken Kep	Bunaken	16,85	10,7
Manado	Manado	157,26	100

Sumber : BPS Pusat Manado

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas Kota Manado seluas 157,26 Km² dengan Kota kecamatan terluas adalah Mapanget yang beribukota di Paniki Bawah seluas 49,75 Km² atau 31,6 % dari luas wilayah Manado.

Mayoritas penduduk Provinsi Sulawesi Utara menganut agama Kristen Protestan. Menurut Badan Pusat Statistik tahun

2010, persentase pemeluk agama Nasrani di Sulawesi Utara berada di posisi kedua terbesar di antara provinsi lainnya di Indonesia. Persentasi penduduk Kristen terbanyak terdapat di Papua sebesar 65, 48 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 63,60 persen.

Saat ini, dilihat dari komposisi etnisnya dapat dikatakan bahwa kebanyakan penduduk kota Manado berasal dari suku Minahasa. Ini disebabkan karena Manado berada di daerah Minahasa. Penduduk lokal Manado adalah sub suku Tombulu. Ini terlihat dari beberapa nama kelurahan di Manado yang berasal dari bahasa Tombulu, misalnya: Wenang (Pohon Wenang/ Mahawenang–bahan pembuat kolintang), Tumumpa (turun), Mahakeret (Berteriak), Tikala Ares (Walak Ares Tombulu, di mana kata ‘ares’ berarti dihukum), Ranotana (Air Tanah), Winangun (Dibangun), Wawonasa (wawoinasa – di atas yang diasah), Pinaesaan (tempat persatuan), Pakowa (Pohon Pakewa), Teling (Bulu/bambu untuk dibuat peralatan), Titiwungen (yang digali), Tuminting (dari kata Ting-Ting: Lonceng, kata sisipan -um- berarti menunjukkan kata kerja, jadi Tuminting: Membunyikan Lonceng), Pondol (Ujung), Wanea (dari kata Wanua: artinya negeri). Sementara di daerah Malalayang hidup Suku Bantik. Suku bangsa lainnya yang ada di Manado saat ini yaitu Suku Sangir, Suku Gorontalo, Suku Mongondow, Suku Arab, Suku Babontehu, Suku Talaud, Suku Tionghoa, Suku Siau dan kaum Borgo. Karena banyaknya komunitas peranakan Arab, maka keberadaan Kampung Arab yang berada dalam radius dekat Pasar ‘45 masih bertahan sampai sekarang dan menjadi salah satu tujuan wisata agama. Selain itu terdapat pula penduduk Suku Jawa, Suku Batak, Suku Makassar dan Suku Minangkabau, Suku Aceh, dan Bali.

Tabel 39: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di Kota Manado Tahun 2010

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
Malalayang	9.042	41.648	3.403	177	147	54
Sario	5.495	15.659	1.683	22	122	48
Wanea	8.667	45.248	2.655	155	133	17
Wenang	10.203	18.353	2.188	35	722	136
Tikala	23.574	40.642	4.389	156	477	138
Mapanget	11.59	36.732	4.386	84	166	43

Singkil	26.12	19.619	572	17	261	28
Tuminting	26.981	23.152	1.176	46	211	33
Bunaken	6.811	13.859	151	-	5	2
Manado	128.483	254.912	20.603	692	2.244	499

Sumber : Badan Pusat Statistik 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah umat Hindu terbanyak berada di wilayah Malalayang dengan jumlah penduduknya sebanyak 177 jiwa, sedangkan di wilayah Bunaken sampai tahun 2010 belum tercatat ada yang memeluk agama Hindu.

Mengenai jumlah umat agama di Sulawesi Utara yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara misalnya pada tahun 2015, disebutkan bahwa jumlah penganut agama Protestan di Kota Nyiur Melambai ini sebanyak 1, 7 juta, Islam sebanyak 797.000, Katholik berjumlah 167.000, Hindu sejumlah 26.000, Buddha sejumlah 24.000 dan Konghucu sejumlah 718 orang (Sumber: BPS Sulawesi Utara). Sementara itu, persentase Protestan sebanyak 61.4 persen, Islam sebanyak 31,6 persen, Katholik sebanyak 5,81 persen, Hindu sebanyak 0,93 persen, Buddha sebanyak 0,11 persen dan Khonghucu sebanyak 0,05 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Jumlah Pemeluk Agama di Sulut di bawah ini :

Tabel 40: Jumlah Pemeluk Agama di Sulut Tahun 2015

No.	Kab/ Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
1	Bolmong	176.668	49.783	3.597	21.144	513	12
2	Minahasa	23.163	249.510	53.245	623	298	8
3	Sangihe	31.648	110.071	1.721	28	253	7
4	Talaud	2.774	75.725	4.483	9	194	4
5	Minahasa Selatan	23.111	168.531	7.191	42	1.462	58
6	Minahasa Utara	35.827	193.846	20.157	52	347	22
7	Balmong Utara	62.045	15.427	164	25	-	7
8	Sitaro	2.290	67.755	1.020	5	10	6
9	Minahasa Tenggara	19.056	89.177	1.426	6	3	-
10	Bolmong Selatan	59.090	2.573	120	36	3	-
11	Bolmong Timur	47.605	18.949	3.597	19	5	-
12	Manado	130.517	289.530	36.816	2.309	14.327	535
13	Bitung	87.076	169.575	8.275	703	3.739	28
14	Tomohon	4.040	65.542	23.482	119	1.828	17
15	Kotamobagu	92.324	18.949	2.040	1.132	1.735	14
16	Sulut	797.234	1.734.783	167.334	26.252	24.717	718

Sumber : Kantor Wilayah Kemetrian Agama Sulawesi Utara,2015

Untuk wilayah yang penduduknya sebagai penganut Kristen terbanyak terdapat di Kota Manado berjumlah 289.000 dan Minahasa sebanyak 249.000. Untuk penganut Muslim terbanyak terdapat di Bolmong sebanyak 176.000, Manado sebanyak 130.000, Kotamobagu sebanyak 92.000, dan Bitung 87.000. Dilihat dari jumlah pemeluk Kristen Protestan terbanyak, maka Sumatra berada di posisi pertama dengan jumlah 3,5 juta jiwa. Kemudian Papua sebanyak 1,8 juta pemeluk Kristen diikuti Nusa Tenggara Timur, 1,6 juta dan keempat Sulawesi Utara sebanyak 1,4 juta jiwa. Jumlah keseluruhan penganut Kristen di Indonesia sebesar 16,5 juta jiwa atau 6,96 persen.

Tabel 41: Persentase Pemeluk Agama di Sulut Tahun 2016

No.	Kab/ Kota	Islam	Protes- tan	Katolik	Hindu	Budha	Khong- hucu
1	Bolmong	62.99	28.08	1.28	7.64	0.00	0.00
2	Minahasa	6.65	77.87	15.28	0.18	0.02	0.01
3	Sangihe	16.45	82.63	0.89	0.01	0.00	0.00
4	Talaud	3.29	91.55	5.15	0.01	0.00	0.00
5	Minahasa Se- latan	10.41	86.37	3.07	0.02	0.02	0.12
6	Minahasa Utara	14.11	77.98	7.85	0.02	0.02	0.01
7	Balmong Utara	85.02	14.72	0.21	0.03	0.00	0.00
8	Sitaro	3.26	95.27	1.45	0.01	0.01	0.00
9	Minahasa Teng- gara	15.02	83.95	1.02	0.00	0.00	0.00
10	Bolmong Se- latan	93.12	6.61	0.18	0.08	0.00	0.00
11	Bolmong Timur	74.13	23.88	1.97	0.02	0.01	0.00
12	Manado	37.78	54.31	6.91	0.43	0.42	0.15
13	Bitung	32.59	63.86	3.11	0.27	0.14	0.03
14	Tomohon	3.31	69.79	26.61	0.13	0.13	0.04
15	Kotamobagu	84.41	12.89	1.63	0.92	0.13	0.02
16	Sulut	31.65	61.45	5.81	0.93	0.11	0.05

Sumber : Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pemeluk agama Hindu tertinggi ada di Balmong sebanyak 7,64 persen, sedangkan Islam merupakan agama terbanyak yang dipeluk oleh masyarakat di Balmong. Umat Hindu banyak tinggal di Balmong tepatnya di Desa Werdhi Agung karena merupakan daerah transmigrasi orang Bali akibat Gunung Agung yang meletus

tahun 1963. Masyarakat di Sulawesi Utara termasuk masyarakat multikultur karena terdiri dari berbagai macam etnis. Untuk jumlah penduduk berdasarkan etnis di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 42: Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Entitas Etnis, Hasil Sensus Penduduk 2000 dan Sensus Penduduk 2010

No.	Kelompok Etnis	Tahun 2000	Persen (%)	Tahun 2010	Persen (%)
1	Minahasa	654,720	33,19	1.022.221	45.16
2	Sangir	390,811	19,81	458.780	20.27
3	Mongondow	223,546	11,33	293.482	12.97
4	Gorontalo	146,694	7,44	187.173	8.27
5	Tontemboan	134,543	6,82	-	-
6	Talaud	79,818	4,05	88.650	3.92
7	Jawa	44,192	2,24	70.908	3.13
8	Tongsawang	30,941	1,57	-	-
9	Bugis	11,666	0,59	22.039	0.97
10	Bali	-	-	14.310	0.63
11	Sunda	1.494	0,08	-	-
12	Ambon	-	-	11.550	0.51
13	Makassar	-	-	10.247	0.45
14	Minangkabau	697	0,04	-	-
15	Madura	472	0,02	-	-
16	Betawi	350	0,02	-	-
17	Banten	133	0,01	-	-
18	Lainnya	252,143	12,78	84.103	3.72
Jumlah		1.972.738	100.00	2.263.463	100.

Sumber : Ananta dkk, 2015

Keberadaan etnis Bali yang beragama Hindu tampak tidak terlepas dari program transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama setelah terjadinya letusan Gunung Agung pada tahun 1963. Keberadaan orang Bali yang menganut agama Hindu tentu juga menghadapi persoalan dalam membangun pura sebagai tempat persembahyangan. Untuk mencari pura di Kota Manado, Sulawesi Utara misalnya, tentu tidak gampang. Ini dapat dimengerti karena mayoritas warga ibukota Sulawesi Utara menganut agama Kristen dan Islam. Untungnya, di kota yang berjarak ratusan kilometer dari pusat Hindu di Bali itu, terdapat sebuah pura agung yaitu Pura Jagadhita. Tempat pura Jagadhita ini masih berada di salah satu

kecamatan Kota Manado, tepatnya berada di Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, di Jalan Siswa Delapan, No 103.

Awal Migrasi Umat Hindu ke Sulawesi Utara

Tidak banyak data mengenai awal penyebaran pengaruh Hindu di Sulawesi Utara dan Kota Manado pada khususnya. Kedatangan orang India yang beragama Hindu dan orang Bali beragama Hindu pada masa awal perkembangan agama ini di Sulawesi Utara belum tercatat dalam arsip atau kajian yang adekuat. Namun dari hasil wawancara yang dilaksanakan terhadap tokoh Hindu di Kota Manado, salah satunya I Dewa Ketut Sumatra pada tanggal 14 November 2018 di Pura Jagatdita, diketahui bahwa penduduk Manado yang menganut agama Hindu umumnya berasal dari Bali. Ini disebabkan karena adanya tugas-tugas kantor atau karena karirnya di pemerintahan yang menuntut mereka harus pindah. Tak dapat dipungkiri, transmigrasi menjadi suatu tantangan tersendiri yang tidak mudah dihadapi. Namun hal ini juga berdampak positif secara finansial, karena para transmigran rata-rata telah memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan saat di Bali dulu.

Penyebaran umat Hindu di Manado tidak terlepas dari letusan Gunung Agung pada tahun 1963 yang berdampak pada transmigrasi orang Bali ke sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Utara. Program transmigrasi ke provinsi ini dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru. Etnis Bali yang datang di wilayah transmigrasi ini antara lain menuju desa-desa yang dikenal dengan nama Desa Kembang Mertha, Desa Werdhi Agung dan sebagainya yang dibentuk pada tahun 1964.

Kedatangan orang Bali secara bersama-sama berawal dari wilayah Bolaang Mongondow pada tahun 1963. Desa-desa yang berada disekitar Gunung Agung, Karangasem Bali diungsikan. Saat itu Bupati Bolaang Mongondow, Kapten Danolii mengambil inisiatif menghadap Gubernur Bali untuk menawarkan agar penduduk desa di sekitar Gunung Agung yang terkena dampak erupsi ditransmigrasi ke wilayahnya. Inisiatif yang baik ini diterima dan disetujui oleh masyarakat desa. Gelombang pertama transmigran kemudian ditempatkan di tanah kosong yang dikenal dengan nama Desa Werdhi Agung. Selain itu

para transmigran dari Bali juga ditempatkan di Desa Kembang Mertha. Sepuluh tahun kemudian pada 1974, gelombang transmigran yang jumlahnya relatif lebih banyak menempati lahan yang kemudian dikenal dengan nama Desa Mopuya dan Desa Mopugad. Penduduk dari desa inilah yang kemudian menyebar ke Kota Manado. (<http://docplayer.info/44791136-Pelayanan-kementerian-agama-terhadap-penganut-agama-hindu-di-kota-manado-sulawesi-utara.html>)

Kebanyakan etnis yang menempati wilayah desa ini adalah etnis Bali yang beragama Hindu. Mereka memanfaatkan tanah yang diberikan oleh pemerintah untuk membangun tempat tinggal dan fasilitas persembahyangan. Unikny—sebagaimana kerap dilakukan di daerah transmigrasi lainnya di Indonesia—rumah-rumah dan pura yang dibangun masih menggunakan corak arsitektur Bali. Tempat persembahyangan pun tetap mengikuti aturan dan pola pembangunan tempat suci atau pura sesuai dengan daerah asal mereka di Bali yang terkena imbas dari letusan Gunung Agung.

Tampaknya dalam kaitannya dengan relasi sosial budaya yang terjadi antara penduduk Bali sebagai penduduk pendatang dengan penduduk lokal mengalami pasang surut. Misalnya pada tahun 1970-an pernah terjadi riak-riak sosial antara etnis Bali dengan penduduk lokal di Manado. Hal ini kiranya dapat menjadi refleksi bersama untuk mencegah konflik serupa ke depan dengan masyarakat lokal. Orang lokal yang disebut dengan orang Bolaang Mangondow atau Bolmo sering mendapatkan stigma sebagai penduduk yang kurang giat. Kebanyakan kebun-kebun yang dimiliki orang lokal ini tidak terawat dengan baik, sementara kebun-kebun yang dimiliki oleh orang Jawa dan Bali tampak lebih terpelihara dengan baik.

Orang Bali umumnya memiliki keterampilan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Pada masa lalu terdapat sistem subak yang diterapkan di wilayah ini, namun demikian, sejak masa reformasi tampak sistem subak ini tidak dikembangkan lagi di Sulawesi Utara. Mereka memiliki kehidupan yang sangat tergantung dengan air dalam pengelolaan tanahnya sebagaimana yang dikembangkan juga di Bali. Tidak semua orang Bali di Manado menganut agama Hindu. Terdapat juga orang Bali

yang menganut agama Kristen yang berhasil dalam karirnya di Manado seperti Profesor Suweca. Ada pula orang Minahasa yang menganut agama Hindu.

Umat Hindu di Kota Manado: Pembangunan Keagamaan yang Berkelanjutan

Sebaran penduduk yang beragama Hindu dilakukan tidak hanya oleh orang Bali yang berasal dari perantauan, tetapi juga oleh penduduk setempat yang walau jumlahnya sangat terbatas. Misalnya saja di Kabupaten Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara. Terdapat beberapa desa yang penting yang berkaitan dengan penyebaran agama Hindu di provinsi ini. Beberapa di antaranya adalah Desa Kembang Mertha yang memiliki 650 kepala keluarga, di Desa Werdi Agung sebanyak 1000 kepala keluarga, Desa Mopuya terdapat 400 kepala keluarga dan Desa Mopugat terdapat 1200 kepala keluarga. Baik di Mopuya dan Mopugad terdapat beberapa etnis Jawa. Desa Mopuya misalnya memiliki gereja, pura, dan masjid yang dibangun bersama-sama di sebuah tempat pada masa Orde Baru tahun 1971.

Terdapat sekitar 2000 kepala keluarga di Kota Manado yang terdiri atas pegawai negeri, dan swasta. Ada tokoh penting dan dikenal masyarakat, yakni Putu Anom yang menjadi manager Hotel Penninsula di Kota Manado. Selain itu, terdapat juga I Gusti Ayu Tirtawati yang menjadi seorang dokter di Politeknik Kesehatan Manado. Tokoh Hindu yang lainnya misalnya Dewa Made Sukawan yang berasal dari Desa Nongan Karangaem yang memiliki kemajuan di bidang usaha proyek bangunan rumah atau pemborong proyek dan konstruksi pembangunan jalan. Selain itu, terdapat juga orang Bali yang beragama Hindu yang bekerja di Sekolah Olah Raga. Pak Dewa misalnya mengenyam pendidikan tinggi kemudian diikuti oleh Bapak Alit yang mengenyam pendidikannya di Universitas Manado (UNIMA).

Sementara tokoh-tokoh Hindu yang memiliki afiliasi dengan ideologi politik tertentu seperti Pak Sarwa dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sukardi dari Partai Golkar dan dan Pak Sukarma dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sementara dari utusan golongan yaitu I Made Alit Purwa. Keberhasilan tokoh Bali yang beragama Hindu misalnya Pak

Purwayana yang berhasil memiliki sebuah rumah sakit di Kota Manado dan bahkan anak-anaknya sudah menjadi dokter. Tambahan pula banyaknya tokoh Hindu yang memiliki reputasi di bidang pendidikan tinggi seperti Profesor Doktor Dewa Ketut Anom sebagai pengajar di Universitas Manado, Doktor Dewa Gede Katja di Universitas Sam Ratulangi, Dewa Ketut Gianyar yang memiliki keahlian di bidang Bahasa atau linguistik dan Doktor Wayan Damai yang bergelut dengan keilmuan di Program Pascasarjana. Untuk melihat jumlah umat Hindu berdasarkan jenis kelamin di Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 43: Jumlah Umat Agama Hindu Tahun 2017

No.	Kab/Kota	Jumlah Umat Hindu		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kota Manado	1364	952	2316
2	Kota Tomohon	64	49	113
3	Kota Kotamobagu	503	652	1155
4	Kota Bitung	332	378	710
5	Kab. Minahasa Utara	29	23	52
6	Kab. Minahasa	377	246	623
7	Kab. Minahasa Selatan	31	11	42
8	Kab. Minahasa Tenggara	2	4	6
9	Kab. B.Mongondow Timur	11	8	19
10	Kab. Bolaang Mongondow	1115	1025	2141
11	Kab. B.Mongondow Utara	9	16	25
12	Kab.B Mongondow Selatan	33	23	56
13	Kab. Kepulauan Sangihe	18	10	28
14	Kab. Kepulauan Talaud	4	5	9
15	(SITARO)	4	1	5

Dari tabel di atas tampak jumlah penduduk umat Hindu terbanyak berada di Bolaang Mongondow. Untuk di Kota Manado, umat Hindu bekerja di berbagai kantor pemerintahan seperti Kantor Dinas Bimas Hindu Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara, di mana terdapat beberapa pegawai yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Hindu antara lain I Nengah Kogog sebagai pembimnas, Ni Wayan Asri sebagai penyuluh agama dan Ni Luh Sekarini. Tokoh Wanita Hindu Dharma Indonesia di Kota Manado antara lain Gusti Ayu Tirtawati.

Namun keberadaan tokoh-tokoh Hindu yang militan dalam berpolitik praktis tampaknya belum banyak, bila dibandingkan dengan kondisi di Bali. Beberapa tenaga muda dipekerjakan di Dinas Bimbingan Hindu di Kota Manado seperti Ni Wayan Trimahayuni sebagai tenaga kontrak yang diperbantukan dalam aktivitas penyuluhan agama Hindu. Selain tenaga penyuluh agama tersebut terdapat juga Cokorda Istri Mayun seorang guru agama yang merupakan lulusan dari Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar dan Wayan Asri yang mengajar pelajaran agama di perguruan tinggi. Sementara untuk guru agama di jenjang pendidikan Sekolah Dasar misalnya Made Sumiati, pada Sekolah Menengah Pertama ada Putu Murdiati dan Nurendah sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ialah Wayan Mudarma.

Tabel 44: Jumlah Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan Hindu (P4H) Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah P4H
1	Kota Manado	1
2	Kota Tomohon	1
3	Kota Kotamobagu	1
4	Kota Bitung	1
5	Kabupaten Minahasa Utara	
6	Kabupaten Minahasa	
7	Kabupaten Minahasa Selatan	
8	Kabupaten Minahasa Tenggara	
9	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
10	Kabupaten Bolaang Mongondow	4
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
13	Kabupaten Kepulauan Sangihe	
14	Kabupaten Kepulauan Talaud	
15	Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (SITARO)	

Banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Agama khususnya yang menangani umat Hindu di Kota Manado antara lain: menggelar kegiatan pasraman kilat, kegiatan *dharma sadhana*, pembinaan guru agama Hindu, dialog antarumat Hindu,

pembinaan pemangku, pembinaan *serati banten*, pembinaan penyuluh agama Hindu non PNS, pembinaan lembaga keagamaan Hindu, pembinaan WHDI, pelaksanaan Mimbar Agama Hindu di RRI Manado dan TVRI Sulawesi Utara.

Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman maupun tuntunan bagi umat Hindu di Kota Manado khususnya, dan Provinsi Sulawesi Utara umumnya. Usaha ini boleh dikatakan hendak memberi ruang bagi umat dalam menyalurkan ekspresi keagamaan yang sebelumnya hanya dilakukan di rumah-rumah perorangan. Seiring dengan upaya tersebut, pembangunan tempat persembahyangan pun dilakukan, termasuk di lingkungan kampus seperti di Universitas Sam Ratulangi, Manado. Adapun pembangunan pura-pura di Manado kerap mendapat bantuan dari pemerintah daerah dan sumbangan lainnya yang datang dari Bali.

Kehadiran Pura Jagatditha yang didirikan oleh I Made Mawa dan I Dewa Ketut Sumatra pada tahun 1983 memiliki peran yang sangat penting. Pura ini mendorong lahirnya pasraman sebagai tempat murid-murid SD, SMP dan SMA mengenyam pendidikan agama Hindu. Setiap tahun terdapat sekitar 30 sampai 35 murid yang datang untuk mempelajari ajaran agama di pura tersebut. Tempat persembahyangan Hindu juga dibangun di Sekolah Polisi Negara yang disebut Pura Ganesha, dan di Rumah Sakit yaitu Pura Segara Bhuwana.

Dalam pelaksanaan upacara ritual dan keagamaan tampaknya tidak jauh berbeda dengan praktek yang dilakukan di Bali. Terdapat upaya-upaya penyederhanaan yang dilakukan tanpa mengurangi makna dasarnya sesuai dengan ajaran agama Hindu pada umumnya. Beberapa upacara penting yang dilakukan di Desa Werdhi Agung antara lain upacara Ngenteg Linggih dan upacara *Melasti* yang bertujuan untuk *nganyudang malaning gumi ngamet tirta amerta* atau menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan.

Pada saat itu suasana perkembangan agama Hindu di Manado belum berkembang dengan pesat. Saat itu diperkirakan terdapat antara 13 sampai dengan 20 kepala keluarga di daerah transmigran. Setelah dilaksanakannya Lokasabha Parisada Provinsi Sulawesi Utara sekitar tahun 1987, terbentuk susunan

kepanitiaan pembangunan Pura Jagadhita yang diketuai oleh Ida Bagus Suweda Manuaba. Ida Bagus Suweda Manuaba saat itu bekerja sebagai pegawai Kantor Kehutanan di Sulawesi Utara. Bertugas sebagai inspeksi pembangunan pura adalah Suryono yang di masanya menjabat sebagai dosen di Universitas Sam Ratulangi. Pura Jagadhita mulai dibangun pada tahun 1987 sampai dengan 1989. Pura Jagadhita yang memiliki makna bumi bahagia ini dipergunakan sebagai pura Kahyangan Jagat namun demikian tidak ada pengempon yang tetap karena dinamika perpindahan umat yang cukup tinggi. Pembangunan Pura Jagadhita mendapat bantuan sosial (bansos) sebesar 50 juta rupiah yang dipergunakan untuk membangun *bale kulkul*. Selain itu, terdapat juga bantuan dari Gubernur Sulawesi Utara dan Parisada Hindu Dharma Pusat.

Tabel 45: Tempat Peribadatan di Sulawesi Utara Tahun 2015

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Wihara
Malalayang	14	-	71	2	1	2
Sario	7	2	16	-	-	3
Wanea	15	1	74	2	1	-
Wenang	14	2	38	1	-	8
Tikala	17	-	85	6	1	5
Mapanget	25	-	73	9	-	1
Singkil	24	-	40	-	-	1
Tuminting	29	-	62	1	-	-
Bunaken	19	-	70	-	-	-
Bunaken Kepulauan	-	-	-	-	-	-
Paal Dua	28	-	-	-	-	-
Manado	192	5	529	21	3	20

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rumah ibadah terbanyak adalah gereja protestan sebanyak 529 buah sedangkan pura yang ada di Sulawesi utara khususnya Manado sebanyak 3 buah. Meskipun jumlah pura sangat sedikit dibandingkan rumah ibadah lainnya, namun toleransi serta kerukunan umat beragama di Manado tetap terjaga dengan baik. Umat Hindu yang ada di Kota Manado pun dapat leluasa dan aman beribadah setiap purnama ke Pura Jagadhita di Taas serta dalam perayaan hari raya seperti rangkaian Hari Raya Nyepi.

Tabel 46: Jumlah Rumah Ibadah Hindu Berdasarkan Jenisnya

Kab/ Kota	Rumah Ibadah Hindu					Jumlah
	Kahyan-gan	Dang Kahyan-gan	Sad Kahy-angan	Kahyan-gan Tiga	Panti/Dadia	
Manado	4	-	-	-	-	4
Kotamobagu	1	-	-	-	-	1
Kota Bitung	1	-	-	-	-	1
Minahasa	3	-	-	-	-	3
Bolaang Mon-gondow	2	-	-	15	5	62

Sumber: Kanwil Hindu Kota Manado 2017

Dari tabel di atas menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah pura dari tahun 2015 sebanyak 3 pura kemudian meningkat menjadi 4 pura pada tahun 2017. Namun demikian, tidak disebutkan pura mana yang dibangun setelah tahun 2015, akan tetapi ada dugaan bahwa pura yang ada di Universitas Samratulangi tidak dihitung pada pendataan di tahun 2015. Jadi, empat tempat persembahyangan atau pura di Kota Manado adalah: Pura Taruna, Pura Jagadhita Manado, Pura Usada Bhuwana dan Pura Ganesha. Sebuah Pura Prajapati juga dibangun di Sulawesi Utara, tepatnya di Desa Kokal, Kabupaten Minahasa Induk.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh umat Hindu di Manado. Sejak lama tokoh-tokoh Hindu di Kota Manado menginginkan upaya penyederhanaan pelaksanaan ritual dan upacara keagamaan Hindu tanpa mengurangi makna atau esensi yang mendasarinya. Selain itu, sama seperti banyak kantong umat Hindu di Indonesia, minimnya penyediaan tenaga guru agama Hindu juga menjadi problem tersendiri di Sulawesi Utara. Sebagai salah satu solusi, Bimas Hindu Kota Manado kerap menyelenggarakan Jambore Pasraman yang diikuti oleh anak-anak muda Hindu. Kegiatan ini diadakan sekitar bulan Juli sampai dengan Agustus setiap tahunnya. Untuk tahun 2018 diadakan Jambore Pasraman yang kelima di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

Permasalahan lain yang dihadapi umat adalah berkaitan dengan minimnya tenaga pengkhotbah yang diharapkan dapat menyebarluaskan dan memberikan penerangan tentang

permasalahan seputar Hindu di Indonesia, khususnya di Kota Manado. Hal ini tentunya juga menjadi perhatian dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, inisiatif dari masyarakat juga kerap bermunculan dalam usaha untuk membantu kegiatan keagamaan di Manado. Misalnya saja sumbangan gong Bali dari Wayan Astra yang berasal dari Gunaksa, Klungkung, Bali.

Kegiatan Keagamaan

Selain melaksanakan upacara keagamaan, umat Hindu Kota Manado juga ikut meramaikan *event* pariwisata *Manado Fiesta 2017*, khususnya di *Faith Festival*. Sebagai wujud syukur atas bulan purnama ketiga dan mendoakan suksesnya Manado Festival, umat Hindu di Kota Manadi mengadakan upacara persembahyangan Santhi Puja di Taman Berkat atau God Bless Park Manado, Jalan Piere Tendean Boulevard. Upacara ini diikuti ratusan umat Hindu se-Kota Manado dan dihadiri Walikota Manado G.S Vicky Lumentut. Persembahyangan ini dipimpin tiga rohaniawan Agama Hindu yakni Pinandita I Ketut Dirtha S.Ag, Pinandita I Dewa Gede Sumatra S.Ag dan Pinandita I Nyoman Sukra.

Kehadiran walikota dan keikutsertaan umat Hindu dalam kegiatan tersebut merupakan simbolis penghormatan dan pengakuan atas keberagaman agama serta budaya di Kota Manado. Dalam kesempatan itu, walikota juga menegaskan bahwa ruang publik di Manado, yakni Taman Berkat, adalah wahana milik semua umat di kota tersebut dan dapat dimanfaatkan untuk acara apapun termasuk oleh umat Hindu (<http://manadokota.go.id/Berita/detail/umat-hindu-putihkan-taman-berkat-walikota-manado-kota-manado-milik-kita-bersama>). Mengapresiasi hal ini, umat Hindu kerap melakukan kerja bakti untuk membersihkan Taman Berkat misalnya saja pada momen menjelang hari raya Nyepi.

Umat Hindu di Kota Manado yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dalam perayaan hari raya Nyepi juga melaksanakan upacara Tawur Kesanga yang dirangkai dengan Festival Ogoh-Ogoh 2018 pada 16 Maret 2018 di Lapangan Sparta Tikala Manado. Dalam upacara yang

dilaksanakan sehari sebelum perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1940 itu, berbagai sarana upacara persembahyangan serta persembahan disiapkan dan ditata di atas bale bambu dengan ornamen khas Bali. Acara festival diiringi musik gamelan khas Bali dan menampilkan tarian tradisional. Usai upacara dilanjutkan dengan Festival Ogoh-Ogoh 2018. Iring-iringan peserta pawai Ogoh-Ogoh bernuansa toleran, selain dua Ogoh-Ogoh yang dipikul, barisan lainnya terdapat tarian Kabasaran dan Barongsai dan diiringi Drum Band Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado (presidentpost.id) Tahun 2019, umat Hindu juga melaksanakan upacara keagamaan Melasti di Taman Berkat yang dipimpin oleh Pinandita I Ketut Dirtha S.Ag dan dihadiri oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan PHDI Kota Manado.

Dengan adanya toleransi beragama yang tinggi di Manado sebagaimana tecermin dari dukungan terhadap kegiatan keagamaan Hindu di Manado sebagai komunitas minoritas, menjadi modal besar untuk menjaga keharmonisan secara berkelanjutan sebagai masyarakat multibudaya yang saling menghargai kultur masing-masing, identitas dan jati diri agama maupun etnis, dan di saat bersamaan juga tetap menjunjung persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta nilai-nilai kebaikan universal.

PHDI Kota Manado

Keberadaan umat Hindu di Kota Manado dan di berbagai daerah lainnya di Indonesia tentu membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pelayanan terkait dengan keagamaan maupun dalam usaha menjaga solidaritas bersama. Hal inilah yang menyebabkan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sangat penting dan strategis. Untuk menjaga keberlangsungan institusi ini, diperlukan adanya regenerasi SDM. Oleh karena itu, tanggal 26-27 November 2016 lalu, PHDI Provinsi Sulawesi Utara menggelar Lokasabha VI di Kota Manado. Lokasabha ini merupakan musyawarah daerah untuk memilih pengurus PHDI yang baru masa bhakti 2016-2021. Lokasabha VI dilaksanakan di Balai Pelatihan Kesehatan Kota Manado dengan tema *"Memberdayakan Umat Dalam Semangat Dharma Untuk Kejayaan*

Sulawesi Utara”.

Kegiatan lima tahunan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Harian, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya; Sekretaris Umum, Ir. Ketut Parwata dan Ketua Bidang Organisasi, I Wayan Suyasa. Loksabha VI dihadiri oleh seluruh PHDI Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara dengan jumlah peserta kurang lebih 66 orang. Dalam Lokasabha VI PHDI Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Umum terpilih periode 2016-2021 yaitu Ir. Suryono, MT menggantikan Dr. I Dewa Ketut Anom, M.Si. Berikut Susunan dan Personalia Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sulawesi Utara masa bhakti 2016-2021:

**Susunan Dan Personalia Pengurus
Parisada Hindu Dharma Indonesia
Provinsi Sulawesi Utara
Masa Bhakti 2016-2021**

Paruman Sulinggih: -

Paruman Walaka:

Tabel 47: Paruman Walaka

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. IBP. Wedha Manuaba	Ketua
2	Dr. I Dewa Ketut Anom, M.Si	Wakil Ketua
3	Kompol I Nyoman Yasa	Sekretaris
4	Pndt. I Ketut Dirtha, S.Ag	Anggota
5	I Nyoman Marayasa, S.Ag	Anggota
6	I Ketut Warti, BA	Anggota
7	Ir. I Wayan Gede	Anggota
8	Rianta Budi Ismani, S.Ag.,M.Pd	Anggota
9	I Dewa Gede Ngurah B.Sc	Anggota
10	Pndt. Drs.IB Nyoman Soeandhi	Anggota
11	Drs. I Nengah Pugeg	Anggota
12	Pndt. I Nyoman Sukra	Anggota
13	I Nyoman Nuartha, S.Pd.,M.Pd	Anggota

Pengurus Harian		
14	Ir. Suryono, MT.	Ketua
15	Drs. Ida Ketut Alit	Wakil Ketua I
16	I Wayan Sudiarta, S.Sos	Wakil Ketua II
17	I Nyoman Lingga Arsa	Wakil Ketua III
18	Drs. I Ketut Gunawan Adiwisna, MM	Wakil Ketua IV
19	I Nengah Puji, S.Ag.,M.Si	Wakil Ketua V
20	I Wayan Wenten, S.Pd.,M.Pd	Wakil Ketua VI
21	Ir. I Nyoman Sukra, M.Si	Wakil Ketua VII
22	Ni Nyoman Adri	Wakil Ketua VIII
23	Dr. I Wayan Damai, M.Pd.,M.Sc.,M.Si	Wakil Ketua IX
24	I Wayan Sumertha, M.Pd	Wakil Ketua X
25	I Dewa Gede Rai Sastrawan, S.Pd.,M.Si	Wakil Ketua XI
26	Drs. I Komang Arya Prawijaya	Wakil Ketua XII
27	Dr. I Dewa Gede Katja, M.Si	Wakil Ketua XIII
28	I Ketut Birit	Sekretaris
29	I Gede Anom Parta, SH.	Wakil Sekretaris I
30	I Ketut Kelodan	Wakil Sekretaris II
31	I Gusti Made Subagia Giri	Bendahara
32	I Kadek Suhartana, SE	Wakil Bendahara I

Sumber : <http://phdi.or.id/berita/lokasabha-vi-phdi-provinsi-sulawesi-utara>

Kehadiran PHDI diharapkan dalam semakin memperkuat fondasi kehidupan beragama di daerah manapun juga tak terkecuali Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara secara umum. PHDI memberi arah jalan kepada umat yang menghadapi sekian pertanyaan maupun kebingungan tentang agamanya. PHDI tak jarang juga memberi masukan di luar urusan agama dengan niatan ingin membantu umat se-Dharma. Selain itu, lembaga ini juga menjadi tulang punggung bila ada pengaduan terkait diskriminasi agama atau kasus lainnya. PHDI akan berupaya untuk melindungi siapa pun.

Adapun berikut data lengkap perihal jumlah lembaga PHDI di Sulawesi Utara serta lembaga sosial keagamaan Hindu lainnya yang ada di provinsi ini.

Tabel 48: Jumlah Lembaga Sosial Agama Hindu di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017

Kab/Kota	Jumlah lembaga sosial keagamaan				
	PHDI	LPDG	Lembaga Keagamaan Pemuda	Lembaga Pandita/ Pinandita	WHDI
Kota Manado	1	1	1	-	1
Kota Kotamobagu	1	-	1	-	1
Kota Bitung	1	-	1	-	1
Kab. Minahasa	1	-	1	-	1
Kab. Bolaang Mongondow	1	-	1	1	1
Kab. B. Mongondow Selatan	1	-	-	-	1

Sumber : LPDG Lembaga Pengembangan Dharma Gita; BPH: Badan Penyiaran Hindu

Dari tabel di atas dapat dilihat lembaga sosial agama yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Manado yang belum ada hanya lembaga panindita. Lembaga Panindita hanya ada di Kabupaten Bolaang Mongondow. Ke depan diharapkan institusi ini dapat terbentuk sehingga dapat semakin memajukan umat dan agama Hindu di Sulawesi Utara

B. POTENSI KOTA MANADO

Manado adalah salah satu kota yang indah di Indonesia, pemandangan alam di kota ini diwarnai dengan menghijanya pepohonan yang tumbuh subur disekitar pinggiran kota. Meskipun Manado memiliki potensi alam yang sangat indah, pertumbuhan ekonomi di Manado khususnya dan Sulawesi Utara (Sulut) pada umumnya belum mencapai potensinya karena produk olahan Sulut masih berupa bahan mentah dan barang setengah jadi. Komoditas unggulan seperti kelapa, ikan, pala, dan cengkeh. Keempat komoditas ini masih bahan baku dan barang setengah jadi, tidak sampai ke hilir, struktur ekspor Sulut

masih berbasis sektor ekstraktif atau bahan mentah dan setengah jadi. Komoditas ekspor Sulut masih didominasi olahan minyak kelapa dan sawit (73%), relatif tidak berubah dari 10 tahun lalu. Jadi perekonomian dan industri di Sulut masih tertinggal. Realisasi pembangunan di Sulut juga belum maksimal. Hal ini karena pembebasan lahan masih menjadi masalah dalam mendukung percepatan pembangunan infra struktur (*wartaekonomi.co.id*).

Manado memiliki potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sebenarnya sangat besar, dari sektor kelautan, dari pertanian, industri kreatif dan terutama juga pariwisata. Manado memiliki potensi seperti pohon kelapa dengan segala kegunaannya mulai dari buah, batang, serabut, batok, daun dan lain-lainnya sangat perlu dikembangkan di daerah ini. Pohon-pohon kelapa yang sudah tua juga sangat perlu diremajakan dengan menanam secara besar-besaran pohon-pohon kelapa yang baru untuk kebutuhan masa yang akan datang. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya menjual bahan mentah saja dengan harga murah tetapi menciptakan industri kreatif dari bahan baku yang sangat melimpah di daerah ini. Terkait ini, Sulawesi Utara sangat berpotensi memegang peran penting.

Makanan Manado juga sangat berpotensi menjadi oleh-oleh khas setempat dengan kemasan yang modern. Misalnya saja, cakalang fufu, dan kue-kue khas Manado seperti *klappetaart*. Perkembangan pariwisata akan mendukung perkembangan industri kreatif sebagai industri pendukung yang juga memiliki peluang besar saat ini. Oleh karena itu, pemberdayaan UKM Manado untuk memproduksi oleh-oleh ciri khas Sulut yang semakin berkualitas perlu terus dilakukan secara intensif, terlebih saat ini wisatawan mancanegara masih mengalami kesulitan memperoleh suvenir ikonik Manado (*banten.bisnis.com*).

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara pun melonjak tiga kali lipat. Pemerintah provinsi berupaya mempersiapkan sarana dan prasarana menyambut lonjakan wisatawan asing tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuka rute perintis transportasi darat serta sejumlah rute baru transportasi laut. Untuk mendorong kelestarian lingkungan dan meningkatkan industri pariwisata perlu didukung oleh fasilitas, keramahan, dan kesiapan warga guna menerima tamu

dari lokal maupun mancanegara.

Sumber peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 2017 terutama didorong oleh meningkatnya kinerja sektor utama Sulawesi Utara yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Salah satu alasan antusiasnya para pengembang dan investor berinvestasi di Manado dikarenakan pertumbuhan ekonomi Manado di atas rata-rata nasional dan keamanannya relatif stabil. Apalagi harga lahan di Manado juga lebih murah dibandingkan di Jawa. Kota Manado ke depannya juga akan semakin prospektif seiring rencana pembangunan proyek-proyek besar yang tersebar di berbagai kawasan, antara lain pengembangan pelabuhan Bitung dan perpanjangan landasan pacu Bandara Internasional Sam Ratulangi .

Dalam bidang pariwisata, data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara pada 2017 tembus 79.377 orang. Angka ini tumbuh 95,39% dibandingkan 2016 yang hanya mencatatkan wisatawan mancanegara sejumlah 40.624 orang. Bahkan jika dibandingkan dengan 2015, pencapaian pada tahun lalu itu melesat 307,79%. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara tersebut tak lepas dari peran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menambah rute baru penerbangan internasional langsung dari Manado ke delapan kota di China. Sebut saja mulai dari Makau, Guangzhou, Changsa, Hong Kong, Wuhan, Chengdu, Nanchang, hingga Hangzhou, yang dilayani oleh maskapai penerbangan Lion Air, Citilink dan Sriwijaya Air. Alhasil, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bumi Nyiur Melambai didominasi wisatawan asal Negeri Tirai Bambu. Pada Desember 2017, jumlah wisatawan terbanyak berasal dari China yakni mencapai 83,94% atau sebanyak 7.208 orang, diikuti oleh wisatawan asal Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Jerman.

Sebagai upaya mendukung penambahan rute penerbangan internasional tersebut, pengoperasian Bandara Sam Ratulangi Manado diubah menjadi 1x24 jam untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Upaya tersebut membuahkan hasil. Pada Desember 2017, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu Bandara Sam Ratulangi tercatat 8.587 orang atau meningkat 33,48% daripada November 2017. Bahkan,

jika ditengok secara tahunan, pencapaian pada Desember 2017 tersebut tumbuh 124,79% daripada Desember 2016 yang hanya mencatatkan 3.820 orang.

Peningkatan sarana transportasi untuk menunjang pariwisata salah satunya yakni pengoperasian sembilan trayek Bus Damri Perintis untuk melayani aksesibilitas dari Manado menuju daerah perbatasan Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan. Selain itu, ada pula trayek Manado menuju Minahasa Utara hingga Bitung.

Penambahan trayek transportasi umum ini tentu saja diharapkan bisa mendorong distribusi wisatawan untuk menuju berbagai destinasi wisata di daerah, khususnya untuk melayani wisatawan dengan dana yang terbatas. Untuk membuka seluruh potensi wisata di wilayah kepulauan, Pemprov Sulut juga telah mengoperasikan kapal-kapal perintis untuk melayani daerah pulau perbatasan. Dengan beroperasinya kapal-kapal perintis ini, Pemprov Sulut juga mengoperasikan 12 pelabuhan laut yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu pelabuhan Tahuna, Petta, Buhide, Kalama, Lipang, Kahakitang, Kawaluso, Matutuang, Kawio, Sawang, Buhias dan Amurang (*banten.bisnis.com*).

C. PENDIDIKAN

Penyuluh Agama di Kota Manado

Penyuluh agama memiliki fungsi informatif dan edukatif yang memposisikan dirinya sebagai penyampai kebenaran, pendidik dan pelatih, serta turut dalam usaha memberi pendampingan kepada umat Hindu. Seorang penyuluh agama seharusnya terus memberikan penguatan keyakinan kepada masyarakat sehingga dapat semakin memahami dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Penyuluh agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kemenag, karena penyuluh sebagai garda terdepan di dalam mewujudkan harmonisasi serta membina kerukunan antar umat beragama (*manadopostonline.com*)

Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh agama Hindu di Kota Manado, Kemenag mengadakan kegiatan pembinaan

Penyuluh Agama Hindu Non PNS. Penyuluh memegang peranan yang amat penting dalam proses pembinaan dan pencerahan spiritual umat Hindu. Penyuluh Non PNS punya tugas dan fungsi yang sama dalam mengemban tugasnya sebagai juru penerang. Apalagi dengan jumlah penyuluh PNS di Sulut yang hanya dua orang, maka sangat membutuhkan peran dari penyuluh Non PNS. Pada tahun 2018, jumlah umat Hindu 20.960 jiwa sedangkan rasio ideal jumlah penyuluh per jumlah umat = 1/100. Artinya setiap satu penyuluh harusnya mengampu tidak lebih dari 100 umat. Jadi, jumlah penyuluh agama Hindu sampai saat ini masih sangat kurang. Terakhir, Sulut mendapat jatah penyuluh Non PNS hanya sebanyak 76 orang.

Tabel 49: Jumlah Penyuluh Agama di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017

No.	Kab/Kota	Penyuluh Agama Hindu PNS Pertama		Jumlah Penyuluh Non PNS	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Kota Manado	-	-	1	4
2	Kota Tomohon	-	-	-	1
3	Kota Kotamobagu	-	-	1	5
4	Kota Bitung	-	-	4	3
5	Kab. Minahasa	-	-	1	-
6	Kab. Bolaang Mongondow	1	-	18	12
Jumlah		1	-	25	25

Adapun penyuluh Agama Hindu adalah Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama, dalam hal ini bahasa Agama Hindu. (http://sulut.kemenag.go.id/detail_berita.php?id=99964/ Kokog--:Penyuluh-Agama-Hindu-di-Sulut-Masih-Sangat-Kurang)

E-Pasraman

Keberadaan pemeluk agama Hindu pada tahun 2019 semakin terfasilitasi dengan baik. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Hindu telah meluncurkan Layanan Sistem Informasi Hindu yang disingkat dengan nama SINDU dan juga E-Pasraman. Dalam SINDU nantinya akan terangkum data pegawai Bimas Hindu baik di pusat dan daerah, data rumah ibadah, data umat, data lembaga keagamaan, penyuluh, dharmagita, rohaniwan, PAUD, pendidikan keagamaan, siswa hingga perguruan tinggi.

Munculnya SINDU ini merupakan langkah awal menuju tata kelola data Direktorat Jenderal Bimas Hindu yang terintegrasi dengan baik. Layanan ini sangat diperlukan karena data di lapangan terus dinamis. Selain SINDU, diluncurkan pula layanan E-Pasraman yang merupakan aplikasi hasil karya anak-anak komunitas Kemangkes Yayasan Nitisastra bekerja sama dengan Ditjen Bimas Hindu. Nantinya, semua data tentang jumlah Pasraman, jumlah dan keberadaan tokoh agama Hindu, jumlah umat Hindu, pura yang dimiliki, dan sebagainya harus selalu diperbarui untuk kemudian diintegrasikan. Peluncuran layanan ini dilakukan dalam rapat kerja yang mengusung tema “Soliditas dan Sinergitas untuk Kebersamaan” yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bimas Hindu I Ketut Widnya. Dengan diluncurkannya SINDU dan E-Pasraman, Menteri Agama ingin agar umat Hindu di Indonesia menjadi *role model* bagi umat Hindu di dunia (*goodnewsfromindonesia.id*).

DAFTAR PUSTAKA

Ramstedt, Martin. 2004. "From Grooter Toradja to 'Toraja Raya': Emergence Ethnic Identity, expansionism and political struggle in Tana Toraja and Luwu', South Sulawesi", dalam Martin Ramstedt, *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority religious between Local, National and Global Interest*. London and New York: Routledge Curzon.

Roth, Dick. 2004. "The Hinduization of Local Traditions in South Sulawesi", dalam Martin Ramstedt, *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority religious between Local, National and Global Interest*. London and New York: Routledge Curzon.

Sumber Internet :

"Umat Hindu Siapkan Upacara Melasti di Pantai Losari Lolak", dalam *Tribun Manado*, Rabu, 14 Maret 2018 08:11

<https://manadokota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/34/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-manado-2010.html>.

Aldi Ponge, "Usai Sembahyang, Umat Hindu Menuju ke God Bless Park, Ini Rute yang Dilalui dalam Tribun Manado

Aldi Ponge, "Umat Hindu Siapkan Upacara Melasti di Pantai Losari Lolak", dalam *Tribun Manado*

<https://manadopostonline.com/read/2018/04/18/Penyuluh-Agama-Garda-Terdepan-Membina-Umat-Beragama/33069> Manado.

<https://presidentpost.id/2018/03/22/walikota-ingatkan-umat-hindu-perkuat-kerukunan-beragama-di-upacara-tawur-kesanga/>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/03/07/indonesia-punya-sistem-informasi-hindu-dan-e-pasraman-apa-itu>

http://sulut.kemenag.go.id/detail_berita.php?id=99964/Kokog:-Penyuluh-Agama-Hindu-di-Sulut-Masih-Sangat-Kurang

<http://docplayer.info/44791136-Pelayanan-kementerian-agama-terhadap-penganut-agama-hindu-di-kota-manado-sulawesi-utara.html>

<https://banten.bisnis.com/read/20180214/436/738561/potensi-ekonomi-baru-mendorong-pariwisata-sulawesi-utara>

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	ALAMAT
1	Alex	Manado
2	Ida Bagus Ketut Alit	Manado 082187085960
3	Suryono	Manado 089603580463
4	Nyoman Rumadi	Manado 085256438645
5	I Dewa Sumatra	Manado 081356118159
6	Ni Wayan Asri	Manado 085240223385

DAFTAR NAMA TOKOH HINDU DI KOTA MANADO

NO	NAMA	PEKERJAAN/ ALAMAT
1	I Ketut Dirtha, S.Ag	Pemangku
2	I Nyoman Sukra	Pemangku
3	I Dewa Gede Sumantra, S.Ag	Pemangku
4	Tjok Istri Mayun Trisnawati, S.Ag.M.Si	Tenaga Pendidik
5	Dr. I Dewa Ketut Gianyar, M.Pd.	Tenaga Pendidik
6	Ni Made Sumiati, S.Pd.H	Tenaga Pendidik
7	Ni Wayan Tri Mahayuni, S.Pd.H	Tenaga Pendidik
8	Ni Luh Sekarini, S.Pd.,M.Pd.H	Tenaga Pendidik
9	Ni Wayan Asryaningsih,S.Ag.,M.A.P	Tenaga Pendidik
10	I Wayan Mudarma, M.Pd	Tenaga Pendidik
11	Nur Endah Sari, S.Pd	Tenaga Pendidik
12	Ni Putu Mudiwati, S.H.H	Tenaga Pendidik
13	Gusti Ayu Tirtawati, S.Sit.,M.Kes.	Tokoh Perempuan
14	Dayu Kade Suseni	Tokoh Perempuan
15	Dewa Gede Purnadiputra, S.Pd	Tokoh Pemuda
176	I Gede Anom Partha	Tokoh Pemuda

LAMPIRAN FOTO



Foto 19. PURA JAGADHITA , KELURAHAN TAAS, MANADO
Dok. Milik Penulis



Foto 20. Gapura Pura Jagadhita di Manado
Dok. Milik Penulis



Foto 21. TK-PAUD WIDYA KUMARA MANADO
Dok. Milik Penulis



Foto 23. WANTILAN PURA JAGADHITA MANADO
Dok. Milik Penulis



Foto 24. YAYASAN PASRAMAN PURA JAGADHITA
MANADO
Dok. Milik Penulis

DINAMIKA HINDU DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Ni Putu Suwardani
Dewa Ketut Budiana

Sulawesi Tenggara adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang ber-ibukota Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara $02^{\circ}45'$ - $06^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara $120^{\circ}45'$ - $124^{\circ}45'$ Bujur Timur.

Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi NTT di Laut Flores, sebelah Timur dengan Provinsi Maluku di Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar peta wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah ini :



Peta Provinsi Sulawesi Tenggara

Sebagian besar (74,25%) wilayah Sulawesi Tenggara merupakan perairan (laut) seluas 110.000 km² (11.000.000 ha), sedangkan 25,75% merupakan wilayah daratan dan beberapa pulau kecil seluas 38.140 km² (3.814.000 ha). Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasar Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No. 13 Tahun 1964. Provinsi Sulawesi Tenggara pada awalnya terdiri atas 4 (empat) kabupaten, yaitu: Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton dengan Bau-bau sebagai ibukota provinsi. Namun, karena suatu hal, ibukota provinsi berganti menjadi di Kendari. Setelah pemekaran, Sulawesi Tenggara mempunyai 10 kabupaten dan dua kota. Beberapa etnis di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain suku Buton, Muna, Bugis, Kalisoso, Toraja, Moronene, Tolaki, Wolio dan suku Wowonii.

Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan Bau-bau sebagai ibukota kabupaten. Sejak awal terbentuknya, Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalami beberapa kali pemekaran. Pada tahun 2017 Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi ke dalam 15 wilayah/kabupaten dan dua kota, yaitu: Kabupaten Buton, Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, Bombana, Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna Barat, dan dua wilayah kota, yaitu: Kota Kendari dan Kota Bau-bau. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 50 di bawah.

Tabel 50 Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Luas Wilayah

No.	Kabupaten	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1.	Buton	1.212,19	3,19
2.	Muna	1.922,16	5,05
3.	Konawe	4.435,28	11,65
4.	Kolaka	3.283,59	8,63
5.	Konawe Selatan	5.779,47	15,18
6.	Bombana	3.001,00	7,88
7.	Wakatobi	559,54	1,47
8.	Kolaka Utara	3.391,67	8,91
9.	Buton Utara	1.864,91	4,90
10.	Konawe Utara	5.101,76	13,40

11.	Kolaka Timur	3.634,74	9,55
12.	Konawe Kepulauan	867,58	2,28
13.	Muna Barat	1.022,89	2,69
14.	Buton Tengah	958,31	2,52
15.	Buton Selatan	509,92	1,34
	Kota		
1.	Kendari	300,89	0,79
2.	Bau-bau	221,00	0,58
	Provinsi Sulawesi Tenggara	38.067,70	100,00

Sumber: Ditjen PUM Kemendagri, Permendagri No. 56 Thn 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi.

Tabel 50 di atas menggambarkan bahwa kabupaten Konawe Selatan merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Tenggara, sedangkan Kota Bau-bau saat ini memiliki luas wilayah terkecil. Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan dan Muna Barat merupakan tiga kabupaten/daerah (Daerah Otonomi Baru/DOB) termuda di Sulawesi Tenggara. Sampai saat ini, Kabupaten Buton menjadi kabupaten yang paling sering memekarkan daerah otonomi baru, berjumlah 4 kabupaten dan 1 kota. Selama tiga tahun terakhir, jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan tercatat berulang kali mengalami peningkatan akibat pemekaran wilayah. Sampai saat ini, Kabupaten Konawe tercatat memiliki kecamatan terbanyak yaitu 28 kecamatan.

Berdasarkan proyeksi penduduk, penduduk Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2017 sebanyak 2.602.389 jiwa, yang terdiri atas 1.308.543 penduduk laki-laki, dan 1.293.846 penduduk perempuan (Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2018). Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk 2016, penduduk Sultra mengalami pertumbuhan sebesar 2,01%. Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran *sex ratio* sebesar 101,14.

Jika dilihat dari data transmigran di Sulawesi Tenggara, pada tahun 2017, telah ditempatkan sebesar 175 keluarga atau sebanyak 649 jiwa transmigran umum, dan tidak ada transmigran swakarsa. Berdasarkan daerah asal, transmigran terbesar berasal dari Jawa Tengah terdiri dari 17 keluarga atau 72 jiwa. Sedangkan transmigran Bali tahun 2017 sebesar 8 keluarga atau

28 jiwa. Daerah penempatan transmigrasi terbesar di Kabupaten Konawe, yaitu sebesar 100 keluarga atau 379 jiwa (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, 2017).

A. UMAT DAN BUDAYA HINDU DI SULAWESI TENGGARA

Menelusuri sejarah keberadaan umat Hindu di Sulawesi Tenggara (Sultra), sebagian besar melalui program transmigrasi, dan sebagian kecil lagi merupakan tugas dinas dari pemerintah, baik sebagai PNS (guru), tenaga kesehatan, TNI dan Polri maupun sebagai pegawai BUMN. Berdasarkan data statistik, umat Hindu merupakan penganut agama terbesar kedua setelah Islam, yang menempati ± 200 desa/kelurahan yang ada di Sulawesi Tenggara, dengan jumlah jiwa ± 250 ribu jiwa.

Berdasarkan penuturan Ida Pandita Empu Sidi Prateka (sebelum menjadi pandita bernama I Nyoman Nirtha, 81 th) wawancara pada hari Sabtu, 10-1-2018 di Geriya Desa Jati Bali, bahwa transmigran Bali pertama (transmigrasi perintis) yang datang ke Sulawesi Tenggara pada tahun 1968, tepatnya tanggal 21-11-1968 dengan jumlah KK 150 KK = 723 jiwa, dan Ida Pandita Empu salah seorang diantaranya. Bukti tertulis transmigrasi perintis diabadikan dalam sebuah tugu seperti foto di bawah ini.



Foto 25. Tugu di Pertigaan Desa Jati Bali yang Bertuliskan Jati Bali dan Awal Kedatangan Umat Hindu di Jati Bali.

Informasi ini juga diperkuat oleh Ketua PHDI Provinsi Sultra (I Nyoman Suidiana) dan I Nengah Suliarta (Ketua STAH Batara Guru) ketika bersama-sama mengadakan dialog dengan Ida Pandita dan para tokoh umat Hindu yang ada di Desa Jati Bali (Desa pertama yang peneliti kunjungi). Kedatangan orang-orang (transmigran Bali) ke Sultra didasari oleh perjanjian antara Gubernur Bali ketika itu (kemungkinan Gubernur Sukarmen) dengan Gubernur Sultra Bapak Muhamad Edy Sabara pada tahun 1968. Isi perjanjian tersebut adalah: Gubernur Bali menyiapkan para transmigran, angkutan, dan sarana pertanian bagi para transmigran, sedangkan Gubernur Sultra menyiapkan lahan, kebutuhan hidup. Transmigran pertama hidup bertani sawah dan bercocok tanam (berkebun) yang digeluti hingga kini.

Umat Hindu yang datang pertama kali khususnya di Desa Jati Bali berjumlah 150 KK berasal dari Negara (Jembrana), Tabanan, Badung (Mengwi dan Munggu), serta Klungkung (Nusa Penida). Mereka menempati posisi di wilayah desa Jati Bali dengan cara dilotre. Berdasarkan asal desa mereka di Bali, mereka juga mendirikan pura-pura di Desa Jati Bali selain pura Kawitan, seperti Pura Rambut Siwi pengemponnya adalah transmigran Hindu dari Negara (Jembrana), Pura Sakenan pengemponnya adalah transmigran Hindu yang berasal dari Munggu dan Mengwi, Pura Mertasari pengemponnya adalah transmigran Hindu dari Tabanan, dan Pura Dalem Peed pengemponnya adalah transmigran Hindu yang berasal dari Klungkung (Nusa Penida). Selain pura-pura tersebut, mereka (umat Hindu Jati Bali) juga memiliki pura Kahyangan Tiga yang diempon oleh seluruh umat Hindu di Jati Bali. Salah satu pura yang didirikan oleh umat Hindu Jati Bali yang berasal dari Badung, adalah Pura Sakenan. Di Kabupaten Kolaka Selatan Kecamatan Tohari, menurut penuturan Wayan Danu (47 th) yang kebetulan hadir di Geriya dalam rangka “nunas tirtha” ketika wawancara dilakukan, juga terdapat Pura Taman Sari yang semula di tahun 1982 di-empon oleh 48 KK kini di tahun 2018 sudah berjumlah ± 2000 KK umat Hindu.

Dalam perkembangannya, setelah setahun berjalan, masyarakat Hindu di Jati Bali sudah mampu hidup mandiri. Artinya, kebutuhan hidup mereka tidak lagi bergantung pada

pemerintah. Namun memasuki tahun 1971-1972, banyak masyarakat yang tidak berhasil dalam hidupnya karena dilanda kekeringan. Karena itulah banyak masyarakat Jati Bali yang akhirnya pindah ke Bau-bau, Landono, Punggaluku, Karing-Karing, dan lain-lain. Keadaan inilah yang mengawali umat Hindu menempati berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara dan terus terjadi pemekaran (bertambahnya umat Hindu) hingga saat ini dari 17 Kabupaten/Kota, hanya empat Kabupaten yang tidak ada umat Hindunya seperti terlihat pada tabel 51 dan tabel 52.

Selain keadaan di atas, juga ditemukan dua KK Muslim yang ada di tengah-tengah pemukiman umat Hindu di Jati Bali yang berpenduduk lebih dari 2000 jiwa. Dua KK tersebut adalah KK Pak Taufik yang beristrikan Ni Wayan Ernayanti (yang semula pemeluk Hindu) dengan dua orang anak. Wayan Ernayanti memilih jadi mualaf setelah menikah tahun 2008 dan kini berhijab. Meskipun mereka beragama Islam, namun mereka tetap tinggal bersama orang tua Ni Wayan Ernayanti yang beragama Hindu. Buat mereka tidak menjadi masalah termasuk ketika mereka merayakan hari raya agama yang berlainan. Mereka tetap saling menghormati agama masing-masing meskipun beradan dalam satu rumah. Di Desa itu memang tidak ada masjid, namun tidak menyurutkan keluarga Taufik untuk beribadah di rumah.

KK berikutnya adalah keluarga Pak Aspar yang tinggal di bagian utara Desa Jati Bali. Kehidupan Aspar kurang lebih hampir sama yang dirasakan oleh keluarga Taufik. Hanya bedanya, bapak satu anak ini tinggal bersama istri dan anaknya di rumah yang terpisah dari mertuanya. Istrinyapun terdahulu beragama Hindu dan mengikuti mualaf ketika menikah.

Meskipun kehidupan masyarakatnya heterogen, mereka hidup sangat rukun dan damai, saling menghormati satu sama lain meskipun beda kepercayaan. Sampai saat ini belum pernah ada kejadian di Sultra menyangkut agama, etnis, ras, dan sebagainya. Umat Hindu di Sultra sangat ulet, rajin, sehingga tidak mengherankan kehidupan mereka secara ekonomi sebagian besar lebih dari cukup bahkan banyak di antaranya sudah mapan sebagai pengusaha/pebisnis, birokrat (anggota Dewan/DPD), dan akademisi.

Sebaran penduduk pada masing-masing kabupaten/kota di

Sulawesi Tenggara berdasarkan penganut agama, dapat dilihat pada tabel 51 berikut.

Tabel 51. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Islam (%)	Protestan (%)	Katolik (%)	Hindu (%)	Budha (%)	Jumlah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kabupaten						
1.	Buton	98,02	0,08	0,42	0,92	0,57	100,00
2.	Muna	93,84	0,91	4,93	0,32	-	100,00
3.	Konawe	79,66	5,67	1,57	10,85	2,25	100,00
4.	Kolaka	93,95	2,75	1,57	1,42	0,31	100,00
5.	Konawe Selatan	81,55	4,11	1,48	10,43	2,42	100,00
6.	Bombana	96,12	1,78	0,10	1,76	0,24	100,00
7.	Wakatobi	99,98	0,01	0,01	-	-	100,00
8.	Kolaka Utara	99,32	0,44	0,02	-	0,22	100,00
9.	Buton Utara	98,04	0,13	0,15	1,68	-	100,00
10.	Konawe Utara	92,29	1,78	1,33	4,02	0,58	100,00
11.	Kolaka Timur	95,22	1,29	0,39	3,10	-	100,00
12.	K o n a w e Kepulauan	99,47	0,07	0,39	0,07	-	100,00
13.	Muna Barat	96,86	0,09	0,09	1,83	1,14	100,00
14.	Buton Tengah	96,88	0,11	3,01	-	-	100,00
15.	Buton Selatan	99,99	0,01	-	-	-	100,00
	Kota						100,00
1.	Kendari	93,42	3,49		0,44	0,89	100,00
2	Baubau	96,19	0,82		1,24	0,69	100,00
	Provinsi Sultra	95,12	1,50	0,94	1,90	0,54	100,00

Sumber: Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

Jika diperhatikan tabel 51 di atas, nampak bahwa umat Hindu merupakan pemeluk agama kedua terbesar setelah pemeluk Islam di Sulawesi Tenggara. Umat Hindu bermukim pada 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu di Kabupaten Buton, Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Buton Utara, Konawe Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Kota Kendari dan Kota Baubau. Daerah yang paling banyak umat Hindunya adalah di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan. Bila diperhatikan secara defakto, bahwa potensi umat Hindu di Sulawesi Tenggara sangat besar.

Pada tahun 2018 dilakukan koreksi data tentang jumlah umat Hindu yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara oleh

Pembimas Hindu Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara (Laporan Ngakan Made Sudiana, S.Pd., M.M.), berdasarkan jumlah jiwa di masing-masing Kabupaten/Kota, seperti pada tabel 52 berikut.

Tabel 52. Data Umat Hindu Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

N0.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH UMAT (Jiwa)
(1)	(2)	(3)
1.	Buton	1.287
2.	Muna	388
3.	Konawe	14.504
4.	Kolaka	4.501
5.	Konawe Selatan	15.144
6.	Bombana	1.682
7.	Wakatobi	-
8.	Kolaka Utara	-
9.	Buton Utara	949
10.	Konawe Utara	1.452
11.	Kolaka Timur	7.195
12.	Konawe Kepulauan	57
13.	Muna Barat	3.156
14.	Buton Tengah	-
15.	Buton Selatan	-
16.	Kota Kendari	1.353
17.	Kota Bau-Bau.	2.284
	JUMLAH	53.952

Dari tabel 52 di atas, nampak bahwa umat Hindu terbanyak ada di Kabupaten Konawe, yakni 14.504 orang (jiwa), dan umat Hindu yang jumlahnya paling sedikit ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Sedangkan di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan, tidak ada umat Hindunya.

Jika dilihat dari perekonomian masyarakat (umat Hindu), keberadaan umat Hindu di Sulawesi Tenggara saat ini secara ekonomi semakin membaik, bahkan ada yang sudah mapan secara ekonomi. Dari hitungan waktu tinggal, mereka telah tinggal puluhan tahun menjadi warga transmigran, dan tetap menjaga kerukunan secara harmonis dengan umat beragama lainnya.

Selanjutnya dari penelusuran data berikutnya, diperoleh informasi tambahan tentang data umat Hindu setelah terjadi

pemekaran khususnya umat Hindu se-Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 berjumlah 7195 orang (Penyelenggara Bimas Hindu Kemenang Kabupaten Kolaka Timur, Wayan Karyata, S.Ag), seperti tersaji pada tabel 53 berikut.

Tabel 53. Rekapitulasi Data Umat Hindu Se-Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018.

No.	Kecamatan	No.	Desa/ Kelurahan	KK	Jiwa			Ket.
					L	P	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tirawuta	1.	Roko-Roko	69	149	130	279	1012
		2.	Tasahea	135	251	244	495	
		3.	Tirawuta	43	91	77	168	
		4.	Poni-Poniiki	14	36	34	70	
			Jumlah	261	527	485	1012	
2.	Loea	5.	Lamoare	113	211	217	428	2197
		6.	Teposua	204	381	366	747	
		7.	Mataiwoi	217	408	368	776	
		8.	Tinomu	72	123	123	246	
			Jumlah	606	1123	1074	2197	
3.	Ladongi	9.	Putemata	190	351	316	664	2187
		10.	Lalowusula	35	74	79	153	
		11.	Ladongi Jaya	21	47	44	91	
		12.	Atula	250	524	520	1044	
		13.	Welala	54	110	124	235	
	Jumlah	550	1106	1083	2187			
4.	Dangia	14.	Mekar Jaya	89	169	164	334	334
			Jumlah	89	169	164	334	
5.	Poli-Polia	15.	Wia-Wia	252	710	715	1425	1425
			Jumlah	252	710	715	1425	
6.	Lambandia	16.	Penanggo Jaya	13	20	20	40	40
			Jumlah	13	20	20	40	
			Jumlah KK	1771	Jumlah Jiwa			7195

Tempat Peribadatan

Sesuai dengan jumlah agama yang diakui di Indonesia, maka setiap agama tentu memiliki rumah peribadatan yang masing-

masing. Demikian juga halnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, semua agama yang ada di Sultra memiliki tempat peribadatan masing-masing. Adapun jumlah tempat peribadatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sultra seperti disajikan pada tabel 54 berikut.

Tabel 54. Jumlah Tempat Peribadatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Kabupaten/ Kota	Masjid	Mush- ola	Gereja Protes- tan	Gereja Katolik	Pura	Vi- hara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kabupaten						
1.	Buton	137	24	4	3	16	-
2.	Muna	208	38	8	8	2	1
3.	Konawe	391	24	57	11	33	3
4.	Kolaka	305	40	40	9	24	1
5.	Konawe Selatan	459	158	55	12	94	4
6.	Bombana	258	76	9	1	11	-
7.	Wakatobi	145	326	-	-	-	-
8.	Kolaka Utara	215	76	21	-	-	-
9.	Buton Utara	93	19	5	1	8	-
10.	Konawe Utara	149	10	9	3	15	1
11.	Kolaka Timur	228	15	15	3	24	-
12.	Konawe Kepu- lauan	72	2	-	1	1	-
13.	Muna Barat	87	25	6	1	15	1
14.	Buton Tengah	103	7	-	3	-	-
15.	Buton Selatan	94	14	-	-	-	-
	Kota						
1.	Kendari	359	40	42	3	1	3
2.	Baubau	121	38	12	1	8	1
	Provinsi Sultra	3.424	911	294	60	252	15

Sumber: Pembimas Hindu 2018 (Ngakan Made Sudiana, S.Pd., M.M),
Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan data pada tabel 54 di atas, dapat dicermati khususnya untuk kalangan umat Hindu, tempat peribadatan (Pura) paling banyak terdapat di Konawe Selatan lalu menyusul di Kabupaten Konawe. Jumlah terbesar pura yang ada di kedua Kabupaten ini selaras dengan jumlah penduduk/umat Hindu yang ada di kedua kabupaten tersebut. Sedangkan di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan belum/tidak ada tempat peribadatan

umat Hindu (Pura) karena di keempat Kabupaten tersebut tidak ada umat Hindunya.

Pinandita/Pemangku

Dengan berkembangnya jumlah umat Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara yang bermukim di beberapa Kabupaten dan Kota, yang dibarengi dengan bertambahnya jumlah tempat-tempat pemujaan umat Hindu (Pura), maka dibutuhkan Pinandita/Pemangku yang memiliki tugas melayani umat pada masing-masing Pura yang ada di Provinsi Sultra. Adapun gambaran tentang keadaan Pinandita/Pemangku dengan identitas dan kedudukannya, berdasarkan laporan Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Korwil

Tabel 55. Gambaran tentang Pinandita/Pemangku di Provinsi Sultra

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Pemangku Pura	Alamat	Keterangan
1	2	5	7	8	9	10
Kota Kendari						
	Dewa Made Suta	Bali, 17 Agustus 1945	SMP	Jagadhita kota	Jl. Mekar Komplek Pura	Lanang
	Dewa ayu Nyoman sariani	Bali, 5 mei 1952	SMP	kendari	Jagadhita kota kendari	Istri
	I Made Karyawan	Munggu, 20 Juni 1953	SPG	Jagadhita kota	Jl.Cempaka Putih No. 8 kdi	Lanang
	Ni Nyoman Suparni	Cemangi, 00 00 1958	SMP	kendari	Jl.Cempaka Putih No. 8 kdi	Istri
Kab. Konawe						
	I Dewa Ketut Gunung	Bali, 00 00 1956	SMP	Pura Desa	Desa Langgomea	Lanang
	Ni Desak Ketut Darmi	Bali, 00 00 1958	SMP	Pura Desa	Desa Langgomea	Istri
	I Wayan Nerken	Bali,01 Juli 1962	SD	Pura Puseh	Desa Ulu Meraka	Lanang
	Ni Made Swani	Bali,01 Juli 1964	SD	Pura Puseh	Desa Ulu Meraka	Istri
	I Made Pugra	Bali, 11 November 1951	SMP	Pura Dalem	Desa Ulu Meraka	Lanang
	Ni Wayan Rinta	Bali 01 Maret 1959	SD	Pura Dalem	Desa Ulu Meraka	Istri
	I Wayan Rungko	Bali, 24 Mei 1953	SMP	Pura Desa	Desa Tawamelewe	Lanang
	Ketut Lembo	Bangli,03 Februari 1960	SD	Pura Desa	Desa Tawamelewe	Istri
	I Nyoman Mustiana	Bangli, 05 Januari 1965	SMA	Pura Puseh	Desa Kasaeda	Lanang
	Nengah Gebir	Bangli, 15 Februari 1961	SD	Pura Puseh	Desa Kasaeda	Istri
	Nyoman Brasta	Karangasem, 01 Mei 1943	SMP	Pura Puseh	Desa Tawamelewe	Lanang
	Nengah Rani	Bali, 00 00 1950	SD	Pura Puseh	Desa Tawamelewe	Istri
	Sang Putu Sompe	Bali, 16 Mei 1952	SMP	Pura Dalem	Desa Tawamelewe	Lanang

	Jero Wayan Murti	Bangli, 00 00 1957	SD	Pura Dalem	Desa Tawamelewe	Istri
	Jrm. Ketut Yasa	Jembrana, 14 April 1974	SMP	Pura Dalem	Desa Kasaeda	Lanang
	Jrm. Ketut Sumiati	Tawamelewe, 14 Juli 1978	SMP	Pura Dalem	Desa Kasaeda	Istri
	I Nengah Karya	LomBar, 00 00 1950	SMP	Pura Puseh	Desa Anahinunu	Lanang
	Ni Nengah Rawit	Lombok Barat, 00 00 1965	SMP	Pura Puseh	Desa Anahinunu	Istri
	I Wayan Sudana	Bali, 21 Juli 1961	SMP	Pura Desa	Desa Ambopi	Lanang
	Ni Wayan Suriatih	Bali, 15 September 1964	SMP	Pura Desa	Desa Ambopi	Istri
	Made Latra	Bali, 02 Mei 1975	SMP	Khayangan tiga	Desa Sambaosu	Lanang
	Putu Swerni	Bali, 00 00 1978	SMP	Khayangan tiga	Desa Sambaosu	Istri
	I Made Guna	Gianyar, 31 Desember 1955	SMP	Pura Desa	Desa Ulubenua	Lanang
	Ni Nyoman Rusni	Gianyar, 25 Desember 1959	SMP	Pura Desa	Desa Ulubenua	Istri
	I Gusti Putu Tinggal	Bali, 00 00 1955	SMP	Pura Desa	Desa Puasana	Lanang
	Ni Gusti Putu Kompyang	Bali, 00 00 1954	SMP	Pura Desa	Desa Puasana	Istri
	I Nyoman Merta	Bali, 16 maret 1973	SMP	Pura Puseh	Desa Linonggasai	Lanang
	Ni Luh Sujati	Bali, 1972	SMP	Pura Puseh	Desa Linonggasai	Istri
	Wayan Sukarsa	Bali, 15 September 1971	SMP	Pura Dalem	Desa Linonggasai	Lanang
	Ni Wayan Sukarmi	Bali, 01 Juli 1973	SMP	Pura Dalem	Desa Linonggasai	Istri
	Wayan Kamarena	Bali, 22 Januari 1949	SD	Pura Dalem	Desa Anahinunu	Lanang
	Made Suni	Bali, 1952	SD	Pura Dalem	Desa Anahinunu	Istri
	Wayan Sarya	Sindu, 10-12- 1976	SMP	Pura Puseh Desa	Desa Anahinunu	Lanang
	Ni Ketut reni	Gianyar,01 Juli 1979	SMP	Pura Puseh Desa	Desa Anahinunu	Istri
	I Made Rai sulasa	Andnyasari, 31-12-1953	PGA	Pura Puseh Desa	Desa Sendang Mulyasari	Lanang
	Ni Nyoman Sari	Karang Sari, 01 juli 1956	SD	Pura Puseh Desa	Desa Sendang Mulyasari	Istri
	Pan Wardana	Bali, 31-12- 1951	SMP	Pura Dalem	Desa Sendang Mulyasari	Lanang
	Nyoman Karti	Bali, 17 Juni 1957	SMP	Pura Dalem	Desa Sendang Mulyasari	Istri
	I Made Sadi	Bali, 1932	SMP	Pura Puseh	Desa Puasana	Lanang
	Nyoman Rimpem	Bali, 1932	SD	Pura Puseh	Desa Puasana	Istri
	Ni Ketut mebet	Bali, 31-12- 1946	SD	Pura Desa	Desa Ulubenua	Istri
	I Made Guna	Gianyar, 31-12-1955	SMP	Pura Puseh	Desa Ulubenua	Lanang
Kab. Konawe Selatan						
	Wayan Kayun	Bali, 1 Juni 1964	SMP	Pura Puseh	Desa Lapoa	Lanang
	Ketut Suryani	Bali, 7 Juni 1971	SMP	Pura Puseh	Desa Lapoa	Istri
	I Made Sutawan	Bali, 23 Maret 1970	SMP	Pura Dalem	Desa Bomba-Bomba	Lanang
	Ni Wayan Sari Murni	Bali, 24 Oktober 1973	SD	Pura Dalem	Desa Bomba-Bomba	Istri
	Gusti Budiadnya	Bali, 15 Februari 1925	SR	Pura Ulun Sui	Desa Bomba-Bomba	Lanang
	Gusti Biang Budiadnya	Bali,00 00 1931	SR	Pura Ulun Sui	Desa Bomba-Bomba	Istri
	Wayan Setiawan	Bali, 5 Februari 1979	SMA	Pura Puseh	Desa Asingi	Lanang
	Made Suartini	Lapoa, 5 Oktober 1981	SMA	Pura Puseh	Desa Asingi	Istri
	I Made Tabug	Bali, 00 00 1939		Pura Puseh	Desa Landono II	Lanang

	Wayan Renden	Bali, 9 Agustus 1936		Pura Puseh	Desa Landonon II	Istri
	I Nyoman Sutama	Bali, 7 Juni 1978		Pura Dalem	Desa Landonon II	Lanang
	Putu Andini	SP Enam, 6 - 11- 1984		Pura Dalem	Desa Landonon II	Istri
	Ketut Ribin	Bali, 00 00 1938		Pura Dalem	Desa Edanga	Duda/lanang
	I Ketut Gatra	Bali, 00 00 1944		Pura Puseh	Desa Edanga	Lanang
	Ni Nyoman Kurip	Bali, 12 Oktober 1951		Pura Puseh	Desa Edanga	Istri
	Made Meres	Bangli, 02 Februari 1968		Pura Puseh	Desa Talumbinga	Lanang
	Ni Wayan Seneng	Bali, 03 Maret 1972		Pura Puseh	Desa Talumbinga	Istri
	Gede Wenten	Bali, 25 Maret 1960		Pura Dalem	Desa Talumbinga	Lanang
	Ni Luh Sipi	Bali, 11 Oktober 1964		Pura Dalem	Desa Talumbinga	Istri
	Wayan Subagia	Karangasem, 8 Januari 1963		Pura Mrajapati	Desa Talumbinga	Lanang
	Wayan Sujani	Karangasem, 20 Maret 1964		Pura Mrajapati	Desa Talumbinga	Istri
	I Gusti Ngurah Bija	Bali, 17 November 1972		Pura Desa	Desa Morinimulya	Lanang
	Sayu Putu Sriadi	Bali, 14 Maret 1973		Pura Desa	Desa Morinimulya	Istri
	I Made Neding	Bali, 11 November 1947		Pura Dalem	Desa Morinimulya	Lanang
	Wayan Rengkok	Bali, 00 00 1942		Pura Dalem	Desa Morinimulya	Istri
	Nyoman Sedia	Bali, 00 00 1942		Pura Puseh	Desa Lalonggapu	Lanang
	Ni Ketut Sondri	Bali, 00 00 1943		Pura Puseh	Desa Lalonggapu	Istri
	I Ketut Tingen	Bali, 00 00 1938		Pura Dalem	Desa Monapa	Lanang
	Ni Ketut Dana	Bali, 00 00 1940		Pura Dalem	Desa Monapa	Istri
	Nyoman Mudio	Bali, 25 Juli 1947		Pura Mrajapati	Desa Monapa	Lanang
	Nyoman Ginarti	Bali, 00 00 1949		Pura Mrajapati	Desa Monapa	Istri
	Niluh Mare	Bali, 00 00 1936		Pura Desa	Desa Monapa	Janda/Istri
	Nyoman Astawan	Bali, 00 00 1965	SD	Pura Puseh	Desa AleggeAgung	Lanang
	Nyoman Budiawati	Bali, 00 00 1969	SD	Pura Puseh	Desa AleggeAgung	Istri
	Putu Sunaka	Bali, 1 Januari 1964	SMP	Pura Dalem	Desa AleggeAgung	Lanang
	Putu Ayu	Bali, 1 Juli 1953	SMP	Pura Dalem	Desa AleggeAgung	Istri
	Gusti Putu Dharmayasa	Bali, 20 Mei 1971	SD	Pura Desa	Desa AleggeAgung	Lanang
	Gusti Nyoman Sulasih	Bali, 00 00 1973	SD	Pura Desa	Desa AleggeAgung	Istri
	Ketut Juliawan	Pangyanan, 31 juli 1983	SMP	Pura Puseh	Desa Lapoa Indah	Lanang/Bujang
	Putu Sutrayasa	Rumbia, 14 November 1989	SMP	Pura Desa	Desa Lapoa indah	Lanang
	Komang Antrinasih	Kendari, 18 Agustus 1993	SMP	Pura Dalem	Desa Lapoa indah	Istri
	Dewa Made Sindu	Jati Bali, 19 September 1972	SMA	Pura Puseh	Desa Jati Bali	Lanang
	Desak Ketut Mendri	Jati Bali, 07 Mei 1975	SMP	Pura Puseh	Desa Jatio Bali	Istri
	Dewa Made Jenget	Bali, 01 Juli 1947	SMP	Pura Mrajapati	Desa Watu Mokala	Lanang
	Jero Nyoman Merta	Bali, 00 00 1955	SMP	Pura Mrajapati	Desa watu Mokala	Istri
	Jero Mangku	Singaraja, 19 Januari 1970	SMP	Pura Puseh	Desa Puunggara	Lanang

	Mangku Nyoman Suartini	Singaraja, 00 00 1972	SMP	Pura Puseh	Desa Puunggara	Istri
	Ida Bagus Budiassa	Bali, 05 Agustus 1968	SMP	Pura Dalem	Desa Lapulu	Lanang
	Ni Nyoman Kariyani	Bali, 00 00 1960	SMP	Pura Dalem	Desa Lapulu	Istri
	I Nyoman Arca	Bali, 21 Januari 1939	SMP	Pura Dalem	Desa Summersari	Lanang
	Ni Luh Suci	Bali, 05 Februari 1954	SMP	Pura Dalem	Desa Summersari	Istri
	Komang Ladra	Bali, 10 Desember 1943	SMP	Pura Mrajapati	Desa Summersari	Lanang
	Ni Nengah Perning	Bali, 17 November 1965	SMP	Pura Mrajapati	Desa Summersari	Istri
	I Nyoman Arsama	Buleleng, 15 Juli 1948	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Summersari	Lanang
	Ni Made Arnawi	Buleleng, 00 00 1955	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Summersari	Istri
	Putu Pastika	Bali, 09 Agustus 1962	SMP	Pura Dalem	Desa Pudaria Jaya	Lanang
	Luh juniari	Bali, 06 Juni 1965	SMP	Pura Dalem	Desa Pudaria Jaya	Istri
	I Ketut Suta	Bali, 01 Juli 1950	SMP	Pura Desa	Desa Bisikori	Lanang
	Ni Wayan Kerti	Bali, 08 Mei 1948	SMP	Pura Desa	Desa Bisikori	Istri
	Putu Astika	Bali, 00 00 1955	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Sumber Jaya	Lanang
	Kadek Dresning	Bali, 00 00 1975	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Sumber Jaya	Istri
	Jm. Puspa manik	Singaraja, 19 januari 1970	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Puunggawu kawu	Lanang
	Mangku Nyoman Suartini	Singaraja, 1972	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Puunggawu kawu	Istri
	I Ketut Pastika, S.Ag	Ringdikit, 1967	SI	Pura Dalem	Desa Sumber Jaya	Lanang
	Ni Komang Dewi Karuniawati	Rangdu, 1971	SMP	Pura Dalem	Desa Sumber Jaya	Istri
	I Wayan Doneng	Bali, 1953	SD	Pura Puseh	Desa Eka Sari	Lanang
	Ni Ketut Soli	Bali, 1966	SD	Pura Puseh	Desa Eka Sari	Istri
Kab. Kolaka						
	Dewa Kompyang Puri	Bali, 15 Januari 1950	SMP	Pura Dalem	Desa Tandebura	Lanang
	Dewo Biang	Bali, 00 00 00 1956	SD	Pura Dalem	Desa Tandebura	Istri
	Wayan Rasmawan	Bali, 31 Desember 1965	SMP	Pura Desa	Desa Tandebura	Lanang
	Ni Nyoman Lestari	Bali, 00 00 1970	SMP	Pura Desa	Desa Tandebura	Istri
	I Made Gelgel	Bali, 28 Oktober 1951	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Tandebura	Lanang
	Nyoman Suarti	Bali, 28 Agustus 1954	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Tandebura	Istri
	Nyoman Sarasniyasa	Bali, 23 September 1952	SMA	Pura Desa	Desa Peoho	Lanang
	Nyoman Mingil	Bali, 14 Februari 1956		Pura Desa	Desa Peoho	Istri
	Wayan Rimpin	Bali, 00 00 1933	SR	Pura Puseh	Desa Peoho	Lanang
	Ni Wayan Merni	Bali, 00 00 1945	SR	Pura Puseh	Desa Peoho	Istri
	Ketut Sandul	Bali, 13 Juni 1960	SD	Pura Ulunsui	Desa Peoho	Lanang
	Ni Ketut Penteng	Bali, 00 00 1960	-	Pura Ulunsui	Desa Peoho	Istri
	Dewa Made Marsa	Bali, 17 Agustus 1935	SR	Pura Mrajapati	Desa Peoho	Lanang

	Desak Putu Pepet	Bali, 18 November 1945	SR	Pura Mrajapati	Desa Peoho	Istri
	Ketut Konoh	Bali, 08 Juli 1943	SR	Pura Dalem	Desa Peoho	Lanang
	Nengah Suaning	Bali, 00 00 1954	-	Pura Dalem	Desa Peoho	Istri
	Made Sukra	Gianyar, 20 Juli 1970	SMK	Pura Puseh/ desa	Desa Tandebura	Lanang
	Ni Made Lotri	Gianyar, 17 Maret 1972	SD	Pura Puseh/ desa	Desa Tandebura	Istri
	Gusti Ngurah Ketut Raka	Tabanan, 04 September 1957	SD	Pura Desa	Desa Kukutio	Lanang
	Sagung Ketut Sipta	Tabanan, 01 Februari 1956	SD	Pura Desa	Desa Kukutio	Istri
	Putu Arka	Jembrana, 26 Desember 1961	SD	Pura Puseh	Desa Kukutio	Lanang
	Made Weri	Bali, 04 Mei 1945	SD	Pura Puseh	Desa Kukutio	Istri
	Anak Agung Putu Kartika	Tabanan, 17 Agustus 1948	SR	Pura Dalem	Desa Kukutio	Lanang
	Sayu Nyoman Rai	Tabanan, 00 00 1951	SD	Pura Dalem	Desa Kukutio	Istri
	Ketut Mundra	Tabanan, 20 Oktober 1955	SD	Pura Ulunsui	Desa Kukutio	Lanang
	Wayan Suwaki	Bali, 06 Oktober 1963	SD	Pura Ulunsui	Desa Kukutio	Istri
	Made Mariana	Bali, 08 Oktober 1962	SD	Pura Puseh	Desa Puudongi	Lanang
	Wayan Mastiki	Bali, 21 November 1962	SD	Pura Puseh	Desa Puudongi	Istri
	Wayan Kenyung	Bali, 00 00 1951	SR	Pura Dalem	Desa Puudongi	Lanang
	Nyoman Rinek	Bali, 00 00 1961	SD	Pura Dalem	Desa Puudongi	Istri
	Wayan Subrata	Bali, 19 november 1972	SMP	Pura Desa	Desa Puudongi	Lanang
	I Nengah Diarnga	Kedis, 31 Desember 1957	SD	Pura Dalem	Desa Rahanggada	Lanang
	Ni Ketut Herlina	Kedis, 31 Desember 1965	SD	Pura Dalem	Desa Rahanggada	Istri
	I Wayan Sukra	Jembrana, 31 Desember 1952	SD	Pura Puseh/ desa	Desa Rahanggada	Lanang/duda
	Ida Made Budaya	Lombok, 00 00 1962	SD	Pura Puseh/ desa	Desa Wowoli	Lanang
	Jero Sri	Lombok, 00 00 1965	SD	Pura Puseh/ desa	Desa Wowoli	Istri
	Suharni mandala Putra	Banyuwangi, 03 maret 1976	SD	Pura Puseh/ desa	Desa Ranomentaa	Lanang
	Wayan Susup	Selanbawak, 12 Des 1935	SD	Pura Puseh/ desa	Desa Rahanggada	Lanang
	I Wayan Rasmawan	Tabanan, 04 Januari 1965	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Gunung Sari	Lanang
	Ni Nyoman Lestari	Bali, 00 00 1970	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Gunung Sari	Istri
	Guru Putu Dana	Bali, 25 Juni 1957	SMP	Pura Mrajapati	Desa Putemata	Lanang
	Ni Ketut Lantri	Bali, 15 Desember 1963	SMP	Pura Mrajapati	Desa Putemata	Istri
	Pinandita Gurun Putu Anom	Sembung, 22 Agustus 1953	SMA	Pura Desa	Desa Wia-Wia	Lanang
	Biyang Putu Anom	Bali, 19 Juni 1967	SMP	Pura Desa	Desa Wia-Wia	Istri
	I Made Mardika	Tabanan, 12 Maret 1969	SMA	Pura Ulunsui	Kelurahan Atula	Lanang
	Ni Made Sariasih	Cepik, 05 Juni 1969	SMP	Pura Ulunsui	Kelurahan Atula	Istri
	I Ketut Nata	Bali, 31 Desember 1958	SMA	Pura Ulunsui	Desa Tirawuta	Lanang
	Ni Ketut Suparmi	Bali, 30 Desember 1959	SMP	Pura Ulunsui	Desa Tirawuta	Istri
	Made Merka	Bali, 20 Maret 1954	SMP	Pura Ulunsui	Desa Loea	Lanang
	Ketut Winter	Bali, 25 Mei 1960	SMP	Pura Ulunsui	Desa Loea	Istri

	I Wayan Jana	Badung, 31 Desember 1962	SMP	Pura Desa	Desa Teposua	Lanang
	Ni Nyoman Nyani	Badung, 31 Desember 1965	SMP	Pura Desa	Desa Teposua	Istri
	I Made Rampun	Bali 31 Desember 1957	SD	Pura Desa	Desa Tasahea	Lanang
	Ni Wayan Suwinten	Bali 29 desember 1959	SD	Pura Desa	Desa Tasahea	Istri
	I Made Gatra	Bali, 01 Mei 1942	SD	Pura Puseh	Desa Tasahea	Lanang
	Ni Wayan Sriwati	Bali, 02 April 1949	SD	Pura Puseh	Desa Tasahea	Istri
	I Wayan Ripin	Bali, 01 Januari 1955	SD	Pura Dalem	Desa Tasahea	Lanang
	Ni Wayan Rapa	Bali, 30 desember 1960	SD	Pura Dalem	Desa Tasahea	Istri
	Drs. I Made Suardana	Cau, Tua, 03 april 1952	S1	Pura Aneka Tambang	Desa Pomalaa	Lanang
	Ni Wayan Ramba Wati	Pengeragoan, 16 Juni 1957	SMA	Pura Aneka Tambang	Desa Pomalaa	Istri
	I Dewa Putu Sayang	Gianyar, 11 Maret 1935	SMP	Pura Penataran panca amerta	Desa Atula	Lanang
	Desak Made Raka	Gianyar, 1935	SD	Pura Penataran panca amerta	Desa Atula	Istri
	I Nengah Sudi	Tabanan, 1953	SMP	Pura dalem	Kel. welala	Lanang
	Wayan Srima	Tabanan, 1955	SMP	Pura dalem	Kel. welala	Istri
Kab. Bombana						
	I Ketut Warka, S.Ip	Perean, 15 April 1964	S.1	Pura Desa	Desa Tampabulu	Lanang
	Ni Wayan Kunci	Perean, 1 Juni 1967	SD	Pura Desa	Desa Tampabulu	Istri
	I Made Marit	Bali, 6 April 1970	SMP	Pura dalem	Desa Tampabulu	Lanang
	Ni Made Sukarmini	Bali, 6 Juli 1975	SD	Pura dalem	Desa Tampabulu	Istri
	Nyoman Sukama	Bali, 14 juni 1978	SMP	Pura Puseh	Desa Tampabulu	Lanang
	Kadek Elly	Bali, 4 Oktober 1983	SD	Pura Puseh	Desa Tampabulu	Istri
	Ketut lastra	Bali, 00 00 1953	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Langkwala	Lanang
	Wayan Ridin	Bali, 15 September 1946	SD	Pura Puseh/ desa	Desa Langkwala	Istri
	Ketut Wirjana	Bali, 21 September 1943	SD	Pura dalem	Desa Langkwala	Lanang
	Ketut Sitarsi	Bali, 12 Januari 1946	SD	Pura dalem	Desa Langkwala	Istri
	I Nengah Remben	Bali, 5 Juli 1953	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Lombakasih	Lanang
	Ni Made Sari	Bali, 9 Agustus 1953	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Lombakasih	Istri
Kab. Muna						
	Ketut Gina	Bali, 20 September 1952		Pura Puseh	Desa Wapae	Lanang
				Pura Puseh	Desa Wapae	Istri
	Putu Diarti	Bali, 31 Desember 1940		Pura Desa	Desa Wapae	Lanang
				Pura Desa	Desa Wapae	Istri
	Ketut Srijaya	Bali, 00 00 1945		Pura dalem	Desa Wapae	Lanang
				Pura dalem	Desa Wapae	Istri
	Wayan Renpi	Jinang Dalem, 00 00 1957		Pura Puseh/ desa	Desa Suka Damai	Lanang
				Pura Puseh/ desa	Desa Suka Damai	Istri
	Gede Deresta	Singaraja, 00 00 1977		Pura dalem	Desa Suka Damai	Lanang
				Pura dalem	Desa Suka Damai	Istri

	Ketut Sudita	Bali, 7 Mei 1981		Pura Puseh/ desa	Desa Labokolo	Lanang
				Pura Puseh/ desa	Desa Labokolo	Istri
	Putu Negara	Buleleng, 00 00 1944		Pura Puseh	Desa Wulanga Jaya	Lanang
				Pura Puseh	Desa Wulanga Jaya	Istri
	Putu Dapet	Bali, 17 Agustus 1961		Pura Desa	Desa Wulanga Jaya	Lanang
				Pura Desa	Desa Wulanga Jaya	Istri
	Putu Suwarta	Bali, 17 Agustus 1968		Pura dalem	Desa Wulanga Jaya	Lanang
				Pura dalem	Desa Wulanga Jaya	Istri
	Ketut Nandra	Buleleng, 1 Juli 1957		Pura Puseh/ desa	Desa Sido Makmur	Lanang
				Pura Puseh/ desa	Desa Sido Makmur	Istri
	Wayan Kantor	Bangli, 10 Maret 1947		Pura Puseh/ desa	Desa Purura Jaya	Lanang
				Pura Puseh/ desa	Desa Purura Jaya	Istri
Kab. Buton						
	Made Kasa	Bali, 20 April 1977	SMP	Pura Desa	Desa Siontapina	Lanang
	Ni Ketut Sumani	Bali, 02 Mei 1980	SMP	Pura Desa	Desa Siontapina	Istri
	I Gusti Putu Wena	Bali, 07 Juli 1957	SMP	Pura dalem	Desa Ngkari- Ngkari	Lanang
	Ni Gusti Ketut Niti	Bali, 00 00 1959	SMP	Pura dalem	Desa Ngkari- Ngkari	Istri
	Wayan Subrata	Bali, 00 00 1964	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Wana Jati	Lanang
	Nyoman Bukti	Bali, 00 00 1967	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Wana Jati	Istri
	I Gede Wirayoga	Bali, 00 00 1962	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Ambuau	Lanang
	Ni Putu Nordi	Bali, 00 00 1965	SMP	Pura Puseh/ desa	Desa Ambuau	Istri
Kab. Konawe Utara					DATA MENYUSUL	

Sumber: Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data pada tabel 55 di atas, rata-rata pendidikan Pinandita/ Pemangku di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah SD-SMP dan hanya beberapa orang saja yang berpendidikan SMA dan S1. Mereka bertempat tinggal tersebar pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sultra.

Khusus untuk Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh informasi dari catatan Penyuluh Non-PNS (Komang Aris Sutrisna) tentang data nama Pura, Lembaga Adat dan Pemangku tahun 2018, seperti tersaji pada tabel 56 berikut.

Tabel 56. Data Nama Pura, Lembaga Adat dan Pemangku Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Utara

No.	Nama Desa/ Kec.	Nama Pura	Prajuru Adat (Ketua, Sekretaris, Bendahara)	Nama Pemangku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mekarjaya/ Langgi-kima	Pura Swastirat (Kahyangan Tiga)	1. Nyoman Madra 2. Gede Sumiasa 3. Wayan Yasih	1. Nyoman Tarka. 2. Nyoman Subrata.
2.	Tinondo Indah/ Oheo	Pura Dharmakerti (Eka Kahyangan)	1. Ketut Suwandika 2. Putu Yudit Arsila 3. Wayan Agus Ekariawan	I Nengah Nita
3.	Todoloiyo/ Oheo	Pura Giri Wana (Eka Kahyangan)	1. Gede Utama 2. I Wayan Mudana 3. I Wayan Yasa	Wayan Sukarata
4.	Puupi Jaya/ Sawa	Pura Puncak Sari	1. Ketut Nuada 2. Komang Sumoyana 3. I Komang Sudarma Yasa	1. Wayan Simba 2. I Nyoman Sukarmayasa
5.	Pariama/ Langgi-kima	Pura Jati Tunggal (Kahyangan Tiga)	1. Nyoman Suartana 2. Wayan Sukadana 3. Made Sukarta	1. Putu Suadnyana 2. Wayan Ita.
6.	Hialu Kompleks/ Landawe	Pura Gunung Sari (Kahyangan Tiga)	1. I Nyoman Danu 2. Komang Menga 3. I Wayan Edi Parwita	1. I Gusti Ngurah Wijaya. 2. Gusti Made Suarta 3. Wayan Metrawan
7.	Tambakua/ Landa-we	Pura Puncak Sari (Eka Kahyangan)	1. Guru Piter 2. Kadek Dwi Saputra 3. 3. Putu Edi Suryanto	1. Gede Sentana 2. Wayan Retis.
8.	Lamparinga/ Wiwi-rano	Pura Agung Giri Marta	1. Wayan Naseh 2. Ketut Edi Karo 3. Kadek Mawan Arjana	Ketut Warka
9.	Wawaheo/ Wiwi-rano	Pura Jagad Giri Sari	1. Komang Pasek Tangkas K. 2. Ketut Putra B. 3. Komang Adi	1. Ketut Tanggal 2. Komang Jati.
10.	Wacumulewe/ Wiwirano	Pura Saraswati	1. Komang Adi 2. Gede Kertiassa 3. Made Alit	Wayan Rede
11.	Culambatu/ Wiwirano	Pura Amertasari	1. Wayan Murta 2. Kadek Suweta 3. Komang Sudarsana	Wayan Sudana.

Selanjutnya nama desa dan kecamatan, nama pura, ketua adat dan pemangku yang ada se-Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018, diperoleh data berdasarkan laporan Ida Bagus Dermadhara, S.Ag. sebagai seorang Penyuluh

Agama Hindu di Kabupaten Kolaka ke Bimas Hindu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti tersaji pada tabel 57 berikut.

Tabel 57. Data Tentang Desa/Kecamatan, Pura, Ketua Adat dan Pemangku Kabupaten Kolaka

N0.	NAMA DESA/ KECAMATAN	NAMA PURA	NAMA KETUA ADAT	NAMA PEMANGKU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rahanggada/Tanggetada Kolaka	Pura Amerta Sari (Kahyangan Tiga)	Made Turun	1. Nengah Diarna 2. I Wayan Sukra.
2.	Desa Puudongi/ Polinggona Kolaka	Pura Gunung Sari Mertha (Kahyangan Tiga)	Nengah Retu	1. Wayan Subrata 2. Made Mariana 3. Wayan Kenyung.
3.	Tandebura/ Watubangga Kolaka	Pura Sidhi Natha (Kahyangan Tiga)	Nyoman Narka	1. Wayan Gelgel 2. Wayan Sukra
4.	Gunungsari/ Watubangga Kolaka	Pura Pancasari (Kahyangan Tiga)	I Ketut Ismanto	1. I Wayan Rusmawan 2. Sang Kompiang
5.	Peoho/Watubangga Kolaka	Pura Siwi Krama (Kahyangan Tiga)	Nengah Darna	1. Mangku Rimpem 2. Pande Konoh
6.	Ranoteta/ Watubangga Kolaka	Pura Tri Lingga Bhuana	Ketut Sundul	1. Dewa Aji Marsa 2. Kadek Suparta
7.	Kukutio/Watu-bangga Kolaka	Pura Pancasari (Kahyangan Tiga)	Ketut Supartika	1. Gusti Ketut Raka 2. Ketut Mudra 3. Putu Arka.
8.	Kasturo/Watu-bangga Kolaka	Pura Jagad Sari (Eka Kahyangan)	Komang Mudiasa	1. Ketut Sudirman 2. Kadek Adi Suardana.
9.	Wowoli/Toari Kolaka	Pura Rajani (Eka Kahyangan)	Made Japa	1. Ida Made Budaya
10.	Ranojaya/Toari Kolaka	Pura Dwi Yadnya (Eka Kahyangan)	Suwito	1. Mangku Harni Mandala Putra.
11.	Adat Pomala/ Pomala Kolaka	Pura Pomala (Eka Kahyangan)	Nyoman D.J.	1. Made Suardana.
12.	Adat Kolaka/ Kolaka	Tidak ada Pura, yang ada hanya Mes.	Wayan Gama	-

Selanjutnya berdasarkan data dari Kanwil Kemenag (Pembimas Hindu Kanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Utara, pendataan jumlah Rohaniwan (Pandita dan Pinandita) Agama Hindu tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 58 berikut.

Tabel 58. Jumlah Pandita dan Pinandita Agama Hindu se-Provinsi Sulawesi Selatan pendataan tahun 2016

No.	KABUPATEN/KOTA	ROHANIWAN		JUMLAH
		PANDITA	PINANDITA	
1.	Buton	-	32	32
2.	Muna	-	22	22
3.	Konawe	-	42	42
4.	Kolaka	-	34	34
5.	Konawe Selatan	5	67	72
6.	Bombana	1	22	23
7.	Wakatobi	-	-	0
8.	Kolaka Utara	-	-	0
9.	Buton Utara	-	16	16
10.	Konawe Utara	-	30	30
11.	Kolaka Timur	2	30	32
12.	Konawe Kepulauan	-	2	2
13.	Muna Barat	-	-	-
14.	Buton Tengah	-	-	-
15.	Buton Selatan	-	-	-
16.	Kota Kendari	1	4	5
17.	Kota Baubau	-	16	16
	JUMLAH	9	317	326

Dari data pada tabel 58 di atas, jumlah Pandita paling banyak ada di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Timur hanya memiliki dua Pandita, sementara Bombana dan Kota Kendari masing-masing memiliki satu orang Pandita. Sedangkan jumlah Pinandita paling banyak ada di Kabupaten Konawe Selatan (67 orang), kemudian disusul Konawe (42 orang), Kolaka (34 orang), Buton (32 orang), Konawe Utara dan Kolaka Timur masing-masing memiliki 30 orang Pinandita, di Kabupaten Muna dan Bombana terdapat masing-masing 22 Pinandita, Buton Utara dan Kota Bau-bau memiliki masing-masing 16 orang Pinandita, Kota Kendari hanya memiliki 4 orang Pinandita dan Kabupaten Konawe Kepulauan hanya memiliki 2 orang Pinandita.

Dari data tersebut nampak beberapa daerah belum memiliki Pandita maupun Pinandita. Padahal umat Hindu jumlahnya semakin berkembang. Dari jumlah tersebut, masyarakat Hindu menganggap Pandita dan Pinandita di Provinsi Sulawesi Tenggara jumlahnya sangat minim terutama jumlah Pandita dibandingkan dengan jumlah umat Hindu yang ada di Provinsi

Sultra. Keluhan ini sempat disampaikan oleh beberapa tokoh di Konawe Selatan (Wayan Mustika, Gusti Kadek Sumertadana, I Nyoman Sukanada, dan Wayan Mustika) ketika penelitian ini dilakukan (wawancara tgl. 13-1-2019). Mereka mengusulkan agar Pandita ditambah jumlahnya terutama di Konawe Selatan karena umat Hindu semakin banyak jumlahnya, apalagi terjadi pemekaran wilayah. Hal serupa juga disampaikan oleh I Nyoman Suharda Ketua PHDI Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Landono (tgl. 11-1-2019) ketika peneliti berkunjung ke lokasi tersebut. Dikatakan oleh I Nyoman Suharda, bahwa umat Hindu yang bermukim di Desa Adat Tri Danu Mulya Konawe Selatan (Konsel) cukup banyak dan tersebar di lima Desa Dinas, yaitu (1) Desa Morini Mulya, (2) Desa Tri Danu Mulya, (3) Desa Wata Benua, (4) Desa Lalong Gapu, dan (5) Desa Amotowo.

Dari tabel tersebut juga nampak bahwa ada beberapa wilayah yang jumlah Pinandita/Pemangku belum didata, sehingga tidak dapat dilaporkan secara lengkap dalam penelitian ini. Menurut staf Kanwil Kemenag Provinsi Sultra Pande Kadek Juliana yang juga menjabat Sekretaris PHDI Provinsi Sultra menyatakan bahwa data tentang jumlah Pinandita/Pemangku sedang didata karena jumlahnya terus bertambah seiring dengan perkembangan jumlah umat Hindu dan jumlah pura yang ada di masing-masing kabupaten/kota (wawancara, tgl 11-1-2019).

Selain sejumlah Pinandita/Pemangku yang dimiliki umat Hindu di Sultra, umat Hindu khususnya di Desa Jati Bali Konawe Selatan, juga memiliki seorang Pandita sejak tahun 2002 bernama Ida Pandita Empu Sidi Prateka yang berdomisili di Desa Jati Bali. Ketika Welaka beliau bernama I Nyoman Nirtha, Lahir di Negara pada tanggal 31 Desember 1938. Beliau sudah ada (transmigrasi) ke Sultra tahun 1968. Selain sebagai Pandita, beliau juga sebagai Ketua PHDI Desa Jati Bali (wawancara dengan Pandita Empu, dan Ketua PHDI Provinsi Sultra, 10-1-2019).

Sulinggih

Dalam menjalankan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Sulawesi Tenggara, baik dalam bentuk upacara Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya, maupun Butha Yadnya, kehadiran Sulinggih sangatlah penting sesuai dengan

tingkatan upacara yang dilaksanakan umat Hindu. Karena salah satu fungsi Sulinggih adalah perannya sebagai “Guru Loka”, yaitu memimpin warga dalam upaya mencapai kebahagiaan rohani. Selain itu, fungsi Sulinggih adalah “Ngelokaparasraya”, yaitu menjadi sandaran (tempat) bertanya tentang kerohanian, pelindung (penuntun) dan pengayom masyarakat di bidang agama Hindu, memberi petunjuk dan bimbingan dibidang Tatwa, Susila, dan Upacara, “muput” upacara ritual atas permintaan warga.

Sulinggih dalam tradisi Hindu merupakan orang yang sangat dihormati, karena telah mengikuti prosesi Dwijati (lahir untuk yang kedua kalinya melalui rahim Weda). Kata sulinggih sendiri berarti tempat duduk yang baik dan terhormat. Mereka yang bisa menjadi Sulinggih tentu telah memenuhi pedoman yang diatur dalam Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-aspek Agama Hindu ke-14 tahun 1986/1987, seperti: (1) Laki-laki yang sudah kawin dan yang *nyuklabrahmacari*, (2) Wanita yang sudah kawin dan yang tidak kawin (kania), (3) Pasangan suami/istri, (4) Umur minimal 40 tahun, (5) Paham Bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, memiliki pengetahuan umum, pendalaman intisari ajaran-ajaran agama, (6) Sehat lahir bathin dan berbudi luhur sesuai dengan sesana, (7) Berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut perkara pidana, (8) Mendapat tanda kesediaan dari pendeta calon Nabe-nya yang akan menyucikan, dan (9) Sebaiknya tidak terikat akan pekerjaan sebagai pegawai negeri ataupun swasta kecuali bertugas untuk hal keagamaan.

Memperhatikan syarat-syarat dan fungsi Sulinggih di atas, untuk sampai menjadi seorang Sulinggih dan ditetapkan sebagai Sulinggih oleh para “Nabe”, tentulah tidak mudah, apalagi di daerah luar Bali seperti di Sulawesi Tenggara. Sementara jumlah umat Hindu di Sulawesi Tenggara menduduki posisi kedua setelah Islam dengan sebaran penduduk yang cukup luas.

Dari jumlah wilayah dan sebaran umat Hindu pada tiap wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan data dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017, terdapat sembilan orang Sulinggih yang melayani umat Hindu yang cukup banyak di Sulawesi Tenggara. Dengan jumlah Sulinggih yang hanya 9 orang ini dinilai sangat

kurang oleh umat Hindu terutama yang ada di Konawe Selatan, dimana umat Hindu paling banyak bermukim di Konawe Selatan. Sampai dengan tahun 2019 ini belum ada lagi penambahan Sulinggih di Sulawesi Tenggara.

Kekurangan Sulinggih ini disampaikan oleh pemuka masyarakat di Konawe Selatan, yaitu Wayan Mustika (Ketua Parisada Desa Andoolo Utama), dan tokoh masyarakat I Wayan Gesar ketika peneliti bersama Ketua PHDI Provinsi Sulawesi Tenggara ketika peneliti mengadakan pertemuan dengan umat Hindu, para tokoh, para pengurus, dan Pemangku yang ada di Konawe Selatan (Minggu, 11-1-2019) bertempat di Wantilan Pura Puseh Wana Sari Desa Andoolo Utama (DU) Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan bersama-sama dengan Ketua PHDI Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun keberadaan para Sulinggih (Pandita) yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti disajikan pada tabel 59 berikut.

Tabel 59. Data dan Alamat Sulinggih (Pandita) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017.

No.	NAMA	TAHUN ME-DIKSA	ALAMAT RUMAH (GRIYA)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ida Pandita Mpu Nabe Sidhi Prateka		Griya Tua Taman Sari, Desa Jatibali, Kc. Rano-meeto Barat, Kab. Konawe Selatan.	-
2.	Ida Rsi Bhagawan Guna Raksa		Desa Tampabulu, Kc. Poleang Utara, Kab. Bombana.	-
3.	Ida Pandita Nabe Agni Ananda Dwijaksara Se-bali	03/SK/PHDI-Sultra/II/2013	Desa Sumber Jaya, Kc. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan..	-
4.	Ida Pandita Agni-jaya Shree Shree Yogiswara Se-bali	03/SK/PHDI-Sultra/II/2013	Griya Ananda Prasanty Weda Poshana, BTN. Pus-kopkar Blok A23, No. 43 Desa Lalowiu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konsel.	-
5.	Sire Mpu Pandya Dwijananda Putra	03/SK/PHDI-Sultra/II/2013	Grya Maetri Giri Wanua, Desa Wia-Wia Blok D, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur.	-

6.	Ida Pedanda Putu Oka Anom Kawi	2016	Desa Mowila II, Kecamatan Mowila, Kab. Konawe Selatan	-
7.	Ida Pandita Mpu Purusa Daksa Manuaba	05/SK/PHDI-Sultra/V/2016	Griya Tua Siwa Sri Narayana Manuaba, Desa Lalonggapu, Kecamatan Landonu, Kabupaten Konsele.	-
8.	Ida Pandita Mpu Sri Rastra Prabu Dharmika	0 6 / S K / PHDI-Sultra/XI/2016	Griya Anom Jati Kusuma, Desa Jatibali, Kc. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan.	-
9.	Ida Pandita Mpu Dharmananda	08/SK/PHDI-Sultra/I/2017	Griya Wana Amertha Ashram, Desa Teposua, Kec. Loeya, Kab. Kolaka Timur.	-

Berikut adalah informasi lebih jelas tentang Sulinggih yang ada di Sulawesi Tenggara, diperoleh dari <http://bimashindusultra.blogspot.com/2017/02/sulinggih>, diunduh tanggal 9 Januari 2019, beserta alamat lengkap Sulinggih seperti di bawah :

1. Ida Pandita Mpu Nabe Sidhi Prateka.
Alamat, Griya Tua Taman Sari, Desa Jati Bali, Kec. Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan.
2. Ida Rsi Bhagawan Guna Raksa.
Alamat, Griya Bombana, Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana.
3. Ida Pandita Nabe Agni Ananda Dwijaksara Sebali
Alamat, Griya Lalembuu, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan. Ngelinggihang Weda, 9 Pebruari 2013 di Desa Sumber Jaya. Nabe beliau, Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa
4. Ida Pandita Agnijaya Shree Shree Yogiswara Sebali.
Alamat, Griya Ananda Prasanty Weda Poshana, BTN Puskopkar Blok A23, No. 43, Desa Lalowiu, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan. Ngelinggihang Weda 9-2-2013 di Desa Sumber Jaya. Nabe: Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa.
5. Sire Empu Pandya Dvijananda Putra.
Alamat, Griya Maetri Giri Wanua, Desa Wia-Wia Blok D, Kec. Poli-Polia, Kab. Kolaka Timur. Ngelinggihang Weda, tgl. 6 April 2013 di Desa Wia-Wia. Mpu Nabe dari Griya Maetri Budeng Putih Jembrana Bali.

6. Ida Pedanda Putu Oka Anom Kawi.
Alamat, Griya Pamaron Anom Manuaba, Desa Punggulahi, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Didiksa di Mowila tgl 8 April 2015.
7. Ida Pandita Mpu Purusa Daksa Manuaba.
Alamat, Griya Tua Siwa Sri Narayana Manuaba, Desa Lalonggapu, Kec. Landonu, Kab. Konawe Selatan. Didwijati tgl. 25-12-2015. Sudha Bumi Griya oleh Ida Pandita Mpu Nabe Manuaba di Desa Lalonggapu, tgl. 1 Mei 2016.
8. Ida Pandita Mpu Sri Rastra Prabhu Dharmika.
Alamat, Griya Anom Jati Kusuma, Dusun II, Rt.6, Desa Jati Bali, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan. Diksa di Desa Jati Bali oleh guru Nabe Ida Pandita Mpu Nabe Sidhi Prateka, tgl. 2 Nopember 2016.
9. Ida Pandita Mpu Dharmananda.
Alamat, Griya Wana Amerta Asram, Desa Teposua, Kec. Loea, Kab. Kolaka Timur. Didiksa di Bali, 12 Januari 2017 dan Sudha Bumi Griya Wana Amerta Asram, tgl. 26 Januari 2017 oleh guru Nabe, Ida Pandita Mpu Nabe Sattwikananda Gria Gaga, Desa Tamanbali, Bangli, Bali.

Khusus untuk Kabupaten Konawe Selatan yang umat Hindunya paling banyak di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa Rohaniawan (Pemangku, Pinandita, dan Pandita) yang dapat melayani umat Hindu dalam upacara-upacara adat dan keagamaan.

Informasi tentang keberadaan Rohaniawan di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh dari Staf Kantor Bimas Hindu Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara per-tahun 2014 ketika I Komang Sukeyasa, S.E. menjabat sebagai Plh. Kasi Bimas Hindu. Adapun keberadaan Rohaniawan di Kabupaten Konawe Selatan seperti disajikan pada tabel 60 di bawah.

Tabel 60. Data tentang Rohaniawan se-Kabupaten Konawe Selatan Sultra.

No.	Kecamatan	Desa (Desa Adat)		Pura dan Pemangku		Pinandita	Pandita	
				Pura	Pemangku			
(1)	(2)	(3)		(4)		(6)	(7)	
		No	No					
1.	Ando- olo.	1.	Alengge Agung.	1.	Tri Warga Jnana Suci.	Komang Astawan	Putu Sunaka.	Ida Pan- dita Sri Empu Dukuh Siddi Preteka (Griya Jati Bali).
				2.	Dalem dan Prajapati Alengge Agung.	Putu Sunaka.		
				3.	Ulun Suwi.	Gst. Putu Darma- yasa.		
		2.	Lapoa Indah.	4.	Kerta Buana.	IB. Karyawan		
				5.	Prajapati Desa Lapoa Indah.	Putu Sutrayasa.		
		3.	Wawo- bende.	6.	Pura Desa, Desa Wawo- bende.	Wayan Nata.		
				7.	Prajapati Desa Wawo- bende.	I Wayan Parna		
		4.	Mateupe-Bi- ma. Maroa.	8.	Dharma Marga.	IB. Komang Mantra.		
				9.	Prajapati Desa Mateupe.			
		5.	Watu Mo- laka.	10.	Penataran Eka Buana	I Made Mudana		
				11.	Prajapati Desa Watu- mokala	Dewa Made Jenget.		
2.	Buke.	6.	Andoolo Utama- Sileya Jaya.	12.	Wana Sari	Ketut Merti.		
				13.	Dalem dan Prajapati Desa A.Utama.	I Wayan Sena.		
		7.	Adayu Indah.	14.	Amertasari Desa Adayu Indah.	Ketut Wistra.		
				15.	Prajapati Desa Adayu Indah.	Nengah Suradnya		
		8.	Buke	16.	Bukit Sari desa Buke.	Ketut Purca		
				17.	Dalem dan Prjapati desa Buke.			
		9.	Dsn III Punggu-ria (Buke).	18.	Penataran Sari, Dsn. III Punguria Buke.	Tagel Sukada.		
				19.	Prajapati Punguria Buke.			
		10.	Raha Men- dea.	20.	Gunung Sari.	I Kadek Switer.		
				21.	Dalem dan Prajapati Rahamendaa			
		11.	Puuduria Jaya.	22.	Jagat Wana Sari desa Puuduria.	Wayan Suharta.		
				23.	Prajapati desa Puuduria.	Nyoman Putra.		
12.	Rahanoa Lestari.	24.	Pr. Wana Merta	I Wayan Sutama.				
3.	Laeya.	13.	Aepodu (Ds Adat Kerta Buana.	25.	Tri Warga Sembah Se- bakti.	I Nyoman Sumita.		
				26.	Dalem/Prajapati desa Aepodu.			
				27.	Ulun Suwi desa Aepodu	I Made Pada.		
4.	Ran- Bar.	14.	Jati Bali.	28.	Agung Purwa Bumi.	Dewa Made Sindu.		
				29.	Dalem desa Jati Bali.	Gusti Aji Wirga.		
				30.	Puseh, desa Jati Bali.	Wayan Togog.		
				31.	Prajapati desa Jati Bali.	Made Suweta.		

		15	Amokuni	32	Puncak Sari Dwipa.	Nyoman Sudarma.				
				33	Dalem dan Prajapati Ds. Amokuni.	Pan Lastra.				
5.	Mora-mo.	16	Pudaria Jaya- Marga Cinta.	34	Puseh dan Desa Agrahita.	Gusti Putu Alit.				
				35	Dalem dan Prajapati desa Pudaria Jaya.	Putu Pastika.				
		17	Sumber Sari Bisikori.	36	Asta Kumada.	I Nyoman Arsana.				
				37	Dalem Desa Sumber Sari.					
				38	Prajapati Ds. Sumber Sari.	Nyoman Arca.				
		18	Puuduria UPT Amohola	39	Desa Puncak Wana Giri.	I Made Weda.				
40	Dalem dan Prajapati Ds. Puuduria.			Dewa Nyoman Ngurah.						
6.	Lando-no.	19	Amoto-wo Endanga (Adat Endanga)	41	Wana Giri Pati.	Made Dada.				
				42	Dalem Wisesa.	Ketut Ribin.				
				43	Pura Prajapati.	Ketut Gatra.				
		20	Lalonggapu Tridana Mulya Morini Mulya (Adat Tridana Mulya.	44	Tri Tunggal Wana Giri/ Desa.	Gst. Ngurah Bija.				
				45	Dalem Buana dan Prajapati Lalonggapu.	I Made Neding.				
				46	Puseh/Ulun Sri.	Nyoman Sedia.				
		21	Arongo	47	Desa dan Puseh Ds. Arongo.	I Wayan Suba.				
				48	Dalem dan Prajapati Ds. Arongo.	I Nengah Arya Wibowo.				
		22	Landonno II (Adat Landonno II)	49	Dharma Semadi	Made Tabung.				
				50	Dalem Landonno II	Nyoman Sutama.				
				51	Prajapati Landonno II					
		23	Watu-Watu (Adat Temu Sari)	52	Puseh dan Desa Ds. Watu-Watu	Dewa Made Ngurah.				
				53	Dalem dan Prajapati Ds. Watu-Watu	Made Sariawan.				
		24	Talumbinga (Adat Tegal Sari)	54	Pura Desa, Ds. Talumbinga	Made Meres.				
				55	Dalem dan Prajapati Talumbinga	Gede Wenten.				
		25	Sabulah-koa	56	Pura Desa Sabulahkoa					
				57	Dalem dan Prajapati Ds. Sabulahkoa					
		7.	Mowila	26	Mulya Sari (Adat Taman Giri)	58	Penataran Taman Giri	Nyoman Berati.		
						59	Dalem Mulya Sari	Pan Berata.		
						60	Prajapati Mulya Sari	Nyoman Wastra.		
				27	Monapa (Adat Taman Bali)	61	Taman Bali	Ni Luh Mara.		
62	Dalem Monapa					Nyoman Gelebug.				
63	Prajapati Monapa					Mangku Rijam.				
28	Ranom-bayasa Puunggu-lahi Ranoopa Wuura (Adat Eka Sari)			64	Puseh Jagad Bali	Wayan Doneng.				
				65	Dalem Semerti Punggulahi	I Made Sara.				
				66	Desa Jagad Bali	Made Darsa.				
29	Lamolori			67	Prajapati Punggulahi	I Ketut Karang.				
				68	Desa Kerta Buana Ds. Lamolori	Mangku Gading.				
30	Kondo-ano (Adat Eka Budaya)			69	Dalem dan Prajapati Ds. Lamolori	Ketut Sumendra.				
				70	Desa Buana Sari	I Wayan Balik.				
				71	Puseh Kerta Buana	Made Murka.				
				72	Prajapati Jagat Sari	I Nyoman Kedri.				
		73	Beji Tirta Ening	Made Murka.						
74	Dalem Merta Sari	Made Mentik.								
8.	Angata	31	Landa Baro-Puunggoni (Adat Mekar Sari)	75	Mekar Sari Ds. Puunggoni.	Made Suarnaysa.				
				76	Prajapati Ds. Puunggoni.	Dewa Putu Disna.				
		32	Puuroe-Teteasa (Adat Jagat Kerta).	77	Pura Desa Eka Buana.	Putu Astika..				
				78	Dalem Puurue.	I Wayan Dasarana.				
				79	Dalem dan Prajapati Puuroe.	Kadek Restika.				

1. I Wayan Dasarana.
2. I Wayan Renda.

9.	Benua	33	Puunggawu-kawu.	80	Wana Dirgayu Sarwa Werdi.	Madre Puspa Manik.			
				81	Dalem Buana Merta.	Nyoman Budiana.			
				82	Prajapati Ds. Puunggawu-kawu.	Putu Sidanayasa.			
10	Lelembuu	34	Lambodi Jaya.	83	Pura Giri Merta.	I Wayan Renda.			
				84	Dalem Buana Sari.	I Wayan Tama.			
				85	Prajapati Ds. Lambodi Jaya.	Wayan Suparta.			
		35	Sumber Jaya.	86	Pura Jagadhita.	Putu Astika.			
				87	Dalem dan Prajapati Ds. Sumber Jaya	Ketut Pastika.			
11	Tinanggea	36	Lapoa-Asing-Bomba-Bomba Telutu Jaya.	88	Wusana Bumi.	Wayan Setiawan.		1. Ida Pandita..... (Griya Sumber Jaya). 2. Ida Pandita..... (Griya Sumber Jaya).	
					89	Dalem Ds. Lapua.			Kadek Sutawan.
					90	Prajapati Ds. Lapua.			Wayan Kayun.
		91	Ulus Suwi Ds. Lapua.		Gusti Aji Budi-yadnya.				
		37	Lapulu-Lasuae.	92	Madya Bumi.	IB. Putu Budiasa.	1. Nyoman Sukanta.		
				93	Dalem LudraBuana.	Made Mudastra.	2. I Wayan Suyarka.		
				94	Prajapati Ds. Lapulu-Lasua.		Nyoman Natra.		
	Giri Mandara UPT Tolihe.					Nyoman Wijana.			
12	Palangga	38	UPT Tolihe (Adat Karya Mukti).	95					

Ritual Adat dan Upacara Keagamaan

Dalam hubungannya dengan upacara adat (agama) tataranya sama dengan di Bali, hanya saja lebih sederhana baik dalam upacara Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Rsi Yadnya, Manusa Yadnya, maupun Butha Yadnya. Masyarakat Hindu Jati Bali maupun yang ada di wilayah-wilayah lainnya seperti di Konawe Selatan ketika peneliti mengadakan FGD di wantilan Pura Puseh Wana Sari Desa Andoolo Utama (DU) Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan juga diperoleh informasi bahwa upacara Panca Yadnya tetap dilaksanakan seperti halnya di Bali, hanya saja lebih sederhana dan tingkatan upacaranya pun belum pernah sampai pada tingkatan utama apalagi *utamaning utama* terutama pada upacara Dewa Yadnya dan Pitra Yadnya. Yang lainnya pelaksanaannya masih pada tingkatan sederhana.

Khusus yang terkait dengan upacara Pitra Yadnya (ngaben), masyarakat Hindu di Sulawesi Tenggara memiliki *awig-awig* bahwa mereka tidak boleh melaksanakan *ngaben* sendiri-sendiri (kecuali Pandita dan Pinandita), artinya pengabenan harus dilakukan dengan cara ngaben masal dan umat Hindu dari desa-desa lain juga boleh ikut bergabung. Jika belum saatnya *ngaben* massal dilakukan, jenazah bisa dikubur sampai waktu pengabenan masal diikuti. Masyarakat Hindu Sulawesi Tenggara tidak mengenal ngaben dengan cara kremasi seperti di Bali, akan

tetapi ngaben dengan cara dibakar di kuburan.

Menurut penuturan Ketua Adat Desa Jati Bali Ida Bagus Komang Karwita (wawancara, tgl 10-1-2019) di Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara, upacara ngaben terakhir yang dilakukan oleh umat Hindu di Sultra adalah pada hari Kamis, tgl 10-8-2017. Sedikitnya ada 150 jenazah umat Hindu yang diupacarai yang berasal dari beberapa kabupaten/kota di Sultra, di antaranya Kabupaten Konsel 132 sawo, Konut 7 sawo, Konawe 5 sawo, Kolaka 2 sawo, Buton 2 sawo, dan Kabupaten Muna berjumlah 2 sawo (IB. Karwita, 10-1-2019).

Upacara ngaben tahun 2017 ini agak istimewa karena dihadiri oleh Bupati Konsel H. Surunudin Dangga, ST.MM. bersama wakilnya Dr. H. Arsalim Arifin, dan Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo. Upacara ngaben oleh umat Hindu di Sultra merupakan prosesi upacara 5 (lima) tahun sekali mulai tahun 1997 hingga kini, yang bertujuan mengembalikan segala unsur Panca Maha Bhuta (5 unsur pembangunan badan kasar manusia) kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke Sunia Loka untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Upacara ngaben merupakan bentuk penghormatan dari orang yang ditinggalkan. Setelah upacara pembakaran, abu jenazah selanjutnya dilarung di Pantai Nambo Kendari. Upacara pengabenan ini biasanya dipuput oleh Sulinggih (Pedanda, Sire Empu, dan Sri Empu) yang ada di Sultra.

Dalam kesehariannya, masyarakat Hindu di Sultra tidak mengenal mitos. Hanya saja masyarakat yang berprofesi sebagai Dukun cukup banyak. Baik Dukun "Nedunang/meluasang/nunas baos di baas" maupun dukun pengobat. Para dukun ini banyak dimanfaatkan oleh umat Hindu sehingga keberadaannya tetap eksis. Apalagi jumlah umat Hindu di Sultra semakin bertambah tidak hanya karena beranak pinak antar umat Hindu saja, akan tetapi karena banyak umat lain terutama umat Islam masuk ke Hindu karena perkawinan, meskipun umat Hindu juga ada yang kawin dengan umat Islam tetapi tidak sebanyak umat Islam ke Hindu.

Tentang aliran kepercayaan, ditemukan bahwa terdapat aliran kepercayaan Saibaba dan Hari Krisna. Khusus di Desa Jati

Bali ditemukan terdapat pada beberapa KK yang keluarganya ikut aliran kepercayaan Saibaba dan yang lainnya tetap menganut Hindu. Demikian juga ditemukan empat KK di Jati Bali yang mengikuti aliran Hari Krisna.

B. PENDIDIKAN HINDU

Keberadaan Siswa Hindu

Sebaran siswa Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti sebaran dan jumlah umat Hindu yang ada pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk jelasnya, sebaran siswa beragama Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara seperti dilaporkan Pembimas Hindu Kanwil Kemenang Provinsi Sulawesi Tenggara (Ngakan Made Sudiana, S.Pd., M.M) tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 61 berikut.

Tabel 61. Sebaran Siswa Beragama Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018

NO.	KABUPATEN/ KOTA	SISWA BERAGAMA HINDUAGA			JMH	KET.
		SD	SMP	SMA		
1.	Buton	142	57	70	269	
2.	Muna	35	15	18	68	
3.	Konawe	1.124	640	561	2.325	
4.	Kolaka	647	318	298	1.263	
5.	Konawe Selatan	1.890	768	630	3.288	
6.	Bombana	182	86	77	345	
7.	Wakatobi					Tidak ada siswa Hindu
8.	Kolaka Utara					Tidak ada siswa Hindu
9.	Buton Utara	93	66	44	203	
10.	Konawe Utara	149	86	64	299	
11.	Kolaka Timur	824	435	351	1.610	
12.	Konawe Kepulauan	3	3	1	7	
13.	Muna Barat	214	106	88	408	
14.	Buton Tengah					Tidak ada siswa Hindu
15.	Buton Selatan					Tidak ada siswa Hindu
16.	Kota Kendari	104	82	72	258	
17.	Kota Bau-Bau	285	134	116	535	
TOTAL					10.878	

Dari tabel 61 di atas nampak bahwa terdapat empat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak ada siswa Hindunya. Berdasarkan sebaran penduduk bahwa pada keempat Kabupaten tersebut tidak ada umat Hindunya.

Keadaan Guru Agama Hindu

Selanjutnya keadaan Guru Agama Hindu Non-PNS (GTT) Tingkat SD Tahun 2018, di Provinsi Sulawesi Tenggara ditampilkan di bawah ini.

Tabel 62. Sebaran Guru Pendidikan Agama Hindu Non-PNS (GTT) Pada Tingkat SD di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

NO	NAMA	TEMPAT MENGAJAR	KABUPATEN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Putu Arya Darma, S.Pd.H.	SDN 5 Mowila	Konawe Selatan	Semua guru belum impasing dan belum tersertifikasi.
2.	Adi Mulyono, S.Ag.	SDN 11 Buke	Konawe Selatan	
3.	Sayu Budayani, S.Ag.	SDN 1 Tababu	Kolaka Timur	
4.	Ni Made Rahayu, S.Ag.	SDN 1 Atula	Kolaka Timur	
5.	Agus Putra Gunawan, S.Pd.H.	SDN 1 Gunung Jaya	Kolaka Timur	
6.	Luh Made Purnamawati, S.Fil.H.	SDN 1 Roko-Roko	Kolaka Timur	
7.	I Made Kertadana	SDN 1 Peoho	Kolaka	
8.	Desak Ayu Ruasti, S.Ag.	SDN Amertasari	Konawe	
9.	Ni Wayan Astiti, S.Sos.	SDN Tawamelele	Konawe	
10.	I Ketut Mudiana, S.Ag.	SDN Langgomea	Konawe	
11.	Ketut Anggra Jaya Kesuma, S.Pd.	SDN 1 Alosika	Konawe	
12.	I Putu Suastika.	SDN 1 Wakangka	Buton	
13.	Gede Suardinata, S.Pd.H.	SDN 1 Bumi Lapero	Buton Utara	
14.	I Putu Karya Arsawan, S.Pd.H.	SDN Karing-Karing	Bau-Bau	

Sumber: Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun sebaran guru Agama Hindu PNS pada tingkat SD tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara, disajikan pada tabel 63 berikut.

Tabel 63. Data Guru Pendidikan Agama Hindu PNS pada Tingkat SD di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018

N0.	NAMA	GOL.	TEMPAT MENGAJAR	KABUPATEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gusti Ketut Widana, S.Ag.	III/c	SDN 4 Ranomeeto Barat	Konawe Selatan
2.	Ni Made Sunarti, S.Ag.	III/c	SDN 15 Landono	Konawe Selatan
3.	Made Suprpta, S.Ag.	III/c	SDN 2 Mowila	Konawe Selatan
4.	I Wayan Gawena, S.Ag.	III/c	SDN 16 Andoolo	Konawe Selatan
5.	I Ketut Danayasa, S.Ag.	III/b	SDN 7 Mowila	Konawe Selatan
6.	Wayan Ardana, S.Ag.	III/c	SDN 9 Laeya	Konawe Selatan
7.	I Nyoman Mekik, A.Ma.	IV/a	SDN 6 Buke	Konawe Selatan
8.	Sujono, S.Ag.	IV/a	SDN 3 Landono	Konawe Selatan
9.	I Wayan SaptonoAdi Nuarka, S.Ag.	III/c	SDN 3 Ranomeeto Barat	Konawe Selatan
10.	I Ketut Deni Mariawan, S.Ag.	III/c	SDN 1 Buke	Konawe Selatan
11.	Nyoman Indriana, S.Ag.	III/a	SDN Mulyasari	Konawe Selatan
12.	Ketut Pasek Suwarniti, S.Ag.	III/a	SDN 11 Andoolo	Konawe Selatan
13.	I Made Merta, S.Ag.	IV/a	SDN 3 Lalembuu	Konawe Selatan
14.	I Ketut Pastika, S.Ag.	IV/a	SDN 3 Tinanggae	Konawe Selatan
15.	Gede Suastika, S.Pd.H.	III/a	SDN 8 Ranomeeto Barat	Konawe Selatan
16.	Komang Suwarsini, S.Ag.	III/a	SDN 4 Landono	Konawe Selatan
17.	Kadek Yogiarta, S.Pd.H.	III/a	SDN 17 Baruga	Konawe Selatan
18.	Kadek Ardani, S.Ag.	III/c	SDN 4 Baruga	Konawe Selatan
19.	Wayan Sulatra, S.Ag.	III/b	SDN 1 Gunung Sari, Peoho	Kota Kendari
20.	Ni Wayan Metri, S.Ag.	IV/a	SDN 1 Gunung Sari Peoho	Kota Kendari
21.	I Wayan Karim, S.Ag.	III/a	SDN 1 Kastura	Kolaka
22.	Wayan Arsana, S.Ag.	III/a	SDN 2 Kukutio Watubangga	Kolaka
23.	Ni Komang Gantini, S.Ag.	III/c	SDN 2 Poho	Kolaka
24.	Ni Putu Sartiasih.	III/c	SDN 1 Rahanggada	Kolaka
25.	I Made Sukarta, S.Pd.	III/d	SDN Wonco	Kolaka
26.	Gede Septa Ariawan, S.Ag.	III/a	SDN Karing-Karing	Kota Bau-Bau
27.	Sugiyanto, S.Ag.	III/c	SDN 6 Tiworo Tengah	Kota Bau-Bau
28.	Ni Made Tirtawati, S.Ag.	III/d	SDN 6 Tiworo Kepulauan	Muna Barat
29.	Suwarno, S.Ag.	IV/a	SDN 3 Tiworo Tengah	Muna Barat
30.	I Ketut Salin, S.Ag.	III/d	SDN 4 Tiworo Tengah	Muna Barat
31.	Ni Wayan Asriati, S.Ag.	III/c	SDN 3 Tiworo Selatan	Muna Barat

32.	Ni Wayan Melini, S.Ag.	III/c	SDN 2 Wakalambe	Muna Barat
33.	I Nengah Suciptyarya, S.Ag.	III/c	SDN 2 Ambuau Indah	Buton
34.	Wayan Muna Adnyana, S.Ag.	III/a	SDN 1 Bukit Asri	Buton
35.	I Dewa Ayu Satriawati, S.Ag.	III/c	SDN 1 Gunung Sari, Bonegur	Buton
36.	Ni Wayan Karmi, S.Ag.	III/c	SDN 1 Mataiwoi	Buton Utara
37.	Kadek Ernawati, S.Ag.	III/c	SDN 2 Ladongi Jaya	Kolaka Timur
38.	Desak Nyoman Suciati, S.Ag.	III/c	SDN 1 Wia-Wia	Kolaka Timur
39.	Ni Made Nuriati, S.Ag.	III/d	SDN 1 Atula	Kolaka Timur
40.	I Made Ariasa, S.Pd.H.	III/a	SDN 1 Putemata	Kolaka Timur
41.	Bambang Wisnawa, S.Ag.	III/b	SDN 1 Lamoare	Kolaka Timur
42.	Ni Putu Suwati, S.Ag.	III/a	SDN 2 Raraa	Kolaka Timur
43.	Ni Wayan Supatmiati, S.Ag.	III/a	SDN 2 Atula	Kolaka Timur
44.	I Wayan Warga, S.Ag.	IV/a	SDN 1 Waworoda	Konawe
45.	I Wayan Sumatra, S.Ag.	III/c	SDN 3 Sendang Mulyasari	Konawe
46.	Ni Ketut Lilis Suryani, S.Ag.	III/c	SDN 1 Sendang Mulya Sari	Konawe
47.	I Wayan Sukadana Hartayasa, S.Ag.	III/c	SDN 7 Landawe	Konawe Utara

Sumber: Pembimas Hindu Kemenang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Berdasarkan tabel 63 di atas, terlihat rata-rata tingkat pendidikan guru Agama Hindu adalah S1, dengan golongan Gol/III. Dari 47 orang guru, terdapat 14 orang guru yang belum tersertifikasi sampai dengan tahun 2018.

Selanjutnya ditampilkan keadaan guru Agama Hindu tingkat SMP di Provinsi Sulawesi Tenggara seperti tersaji pada tabel 64 berikut.

Tabel 64. Sebaran Data Guru Agama Hindu PNS Tingkat SMP di Provinsi Tenggara Tahun 2018

N0.	NAMA	GOL.	TEMPAT MENGAJAR	KABUPATEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Komang Rosmawati, S.Ag.	IV/a	SMPN 8 Konawe Selatan	Konawe Selatan
2.	Nyoman Suprianto, S.Pd.H..	III/c	SMPN 22 Konawe Selatan	Konawe Selatan
3.	Ni Made Juliartini, S.Pd.	III/b	SMPN 1 Landono	Konawe Selatan
4.	Made Tresnayasa, S.Pd.	III/a	SMPN 40 Konawe Selatan	Konawe Selatan

5.	Ni Made Sudharyati, S.Pd.	III/c	SMPN 48 Konawe Selatan	Konawe Selatan
6.	Made Kardiani, S.Ag.	III/d	SMPN 3 Watubangga	Kolaka
7.	Ni Wayan Wariastini, S.Ag.	III/b	SMPN 1 Watubangga	Kolaka
8.	Ni Kadek Muliati, S.Ag.	III/d	SMPN 11 Bau-Bau	Bau-Bau
9.	I Ketut Ariana, S.Ag.	III/c	SMPN 9 Bau-Bau	Bau-Bau
10.	Ni Gusti Ayu Putu Yuniasih, S.Ag.	III/c	SMPN 9 Bau-Bau	Bau-Bau
11.	Sang Putu Wahyudi, S.Ag.	III/d	SMPN 1 Landogi	Kolaka Timur
12.	Ketut Supratna, S.Ag.	III/c	SMPN 2 Dangia	Kolaka Timur
13.	Ketut Yagi, S.Ag.	III/b	SMPN 2 Abuki	Konawe
14.	Putu Mediati, S.Ag.	III/c	SMPN 3 Tongauna	Konawe
15.	Ni Made Dami Arini, S.Pd.H.	III/a	SMPN 1 Uepai	Konawe
16.	Ni Ketut Kertiasih, S.Ag.	III/c	SMPN SATAP 2 Langgikima	Konawe Utara
17.	Komang Ariasi, S.Pd.H.	III/b	SMPN 2 Kapontori.	Buton.

Sumber: Pembimas Hindu Kemenang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Berdasarkan tabel 64 di atas, hanya satu orang guru yang telah memiliki golongan IV, selebihnya (16 orang) masih golongan III, dan yang belum memiliki sertifikat pendidik sebanyak 9 orang guru. Padahal seorang guru akan diakui profesinya dan layak mendapat upah seharusnya sudah bersertifikat pendidik atau telah memiliki sertifikat pendidik.

Selanjutnya pada tabel 65 berikut ditampilkan keadaan guru Agama Hindu PNS tingkat SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 65. Data Guru Agama Hindu PNS Tingkat SMA/SMK di Provinsi Tenggara Tahun 2018

N0.	NAMA	GOL.	TEMPAT MENGAJAR	KABU-PATEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I Putu Sudiarta, S.Ag.	IV/a	SMKN 9 Konawe Selatan	Konawe Selatan
2.	Made Dwinanto, S.Ag., M.Fil.H.	III/d	SMAN 2 Konawe Selatan	Konawe Selatan
3.	I Made Juliarto, S.Pd.H., M.Hum.	III/c	SMAN 11 Konawe Selatan	Konawe Selatan
4.	I Putu Sudarmika, S.Pd.	IV/a	SMKN 2 Kendari	Kota Kendari

5.	I Nengah Sumendra, S.Ag., M.Fil.H.	III/b	SMKN 2 Unaaha	Konawe
6.	I Ketut Lusmianta, S.Ag.	III/c	SMKN 6 Bau-Bau	Bau-Bau
7.	Pande Ketut Jusmantra Geni, S.Ag., M.Fil.H.	III/b	SMKN 1 Dangia	K o l a k a Timur
8.	I Made Andika, S.Ag.	III/b	SMAN 1 Tirawuta	K o l a k a Timur
9.	Ketut Artana, S.Ag.	III/c	SMAN 1 Ladongi	K o l a k a Timur
10.	Dewa Ayu Setiawati, S.Pd.	III/c	SMAN 1 Tanggetada	K o l a k a Timur
11.	I Gede Eka Putra Widya Prama- na, S.Ag.	III/c	SMAN 5 Bau-Bau	Bau-Bau
12.	Ni Luh Sutini, S.Ag.	III/b	SMAN 2 Kapontori	Buton
13.	K. Darma Parsue, S.Ag.	III/c	SMAN 1 Bonegunu.	Buton Utara

Sumber: Pembimas Hindu Kemenang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Berdasarkan tabel 65 di atas, dari 13 orang guru Agama Hindu di Sulawesi Tenggara hanya satu orang yang telah memiliki golongan IV dan 12 orang lainnya dengan golongan III. Sedangkan yang belum memiliki sertifikat pendidik ada 3 orang guru.

Pasraman Non Formal

Guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, maka didirikanlah pasraman-pasraman Hindu mengingat jumlah sekolah yang berbasis Hindu sangat kurang (bahkan belum ada) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang baru ada hanya Taman Kanak-Kanak (TK), yaitu TK Dewi Srikandi (TK berbasis Hindu) dengan jumlah siswa hanya 9 orang (7 orang Hindu dan 2 orang Muslim) dan dibimbing oleh 3 orang guru. Selain TK, di Provinsi Sulawesi Tenggara juga terdapat Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Batara Guru yang berstatus swasta di bawah binaan Kementerian Agama RI. Sementara, sekolah-sekolah lainnya yang berbasis Hindu tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK belum ada.



Foto 26. Papan Nama Sekolah Paud TK Dewi Srikandi



Foto 27. Papan Nama dan Alamat STAH Batara Guru

Dengan didirikannya pasraman-pasraman yang merupakan lembaga khusus bidang agama Hindu di beberapa Desa/ Kabupaten/Kota, diharapkan pendidikan keagamaan Hindu dapat dilakukan pada umat Hindu di Sulawesi Tenggara. Lembaga ini merupakan alternatif, karena pendidikan agama Hindu yang diajarkan di sekolah-sekolah formal hanya sebatas sebagai ilmu pengetahuan. Sedangkan di pasraman selain sebagai ilmu pengetahuan, yang juga ditekankan adalah pada

keterampilan, pembentukan disiplin diri, pengembangan akhlak mulia, spiritualitas, sifat-sifat rajin, pengekangan hawa nafsu, dan gemar membantu orang lain. Dengan kata lain, bahwa pendidikan di pasraman adalah pendidikan agama dan keagamaan.

Pendidikan keagamaan memegang andil yang tidak kecil dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa ada empat komponen tujuan pendidikan yang pencapaiannya menjadi beban pendidikan agama, yaitu: (1) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, (2) pengendalian diri, (3) kepribadian dan (4) akhlak mulia. Keempat komponen tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh pendidikan agama dan betapa strategisnya posisi guru agama dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan tersebut di atas. Dengan kata lain guru agama memiliki peranan yang besar dalam membina moralitas bangsa.

Pembinaan sumber daya manusia Hindu menjadi sangat penting di tengah pesatnya arus globalisasi dan modernisasi yang tidak hanya membawa dampak positif juga berdampak negatif bagi umat Hindu termasuk di Sulawesi Tenggara. Seperti dinyatakan Adiputra (2002:7), pendidikan (*guna widya*) adalah hal yang patut, harus dan wajib diprioritaskan oleh setiap umat, karena kebahagiaan, kesejahteraan dan suka-duka hidup ini ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki oleh setiap umat. Maha Rsi Canakya dalam bukunya Nitisastra III.18 mengatakan: "Asuhlah anak dengan memanjakannya sampai berumur lima tahun, berikanlah hukuman (pendidikan disiplin) selama sepuluh tahun berikutnya. Kalau ia sudah dewasa (16 tahun) didiklah dia sebagai teman" (Darmayasa, 1992:66).

Tujuan pendidikan menurut Swami Siwananda dalam *all About Hinduism* sebagaimana dikutip dalam Titib (2003:57) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mengantarkan seseorang menuju jalan yang benar dengan mewujudkan kebajikan, yang dapat memperbaiki karakternya sehingga mencapai kebebasan, kesempurnaan dan pengetahuan tentang Sang Diri (*atma*).

Senada dengan pendapat-pendapat di atas maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa latar belakang falsafah

pendidikan menurut Veda adalah untuk menjadikan umat manusia meningkat kualitas hidupnya, yaitu manusia yang memiliki kasih sayang dan kebijaksanaan. Pendidikan agama Hindu adalah upaya sadar dan terencana, menyiapkan peserta didik dalam mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Hindu dari sumber utamanya kitab suci, yaitu *Sruti*, *Smrti*, *Sila*, *Acara* dan *Atmanastusti* (Tim Penyusun, 2003:4). Menurut Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-XV, pendidikan agama Hindu adalah suatu upaya untuk membina pertumbuhan jiwa raga anak didik sesuai dengan ajaran agama Hindu yang disebut dengan *dharma* (PHDI, 1998:23). Dengan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan peserta didik (umat Hindu) memiliki kualitas hidup, *sraddha* dan *bhakti* yang lebih baik.

Jadi fungsi pendidikan agama dan keagamaan Hindu baik di sekolah maupun di pasraman adalah: (1) Penanaman nilai-nilai ajaran agama Hindu yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan hidup (*Moksartham Jagadhita*); (2) Pengembangan *Sradha* dan *Bhakti* terhadap Hyang Widhi (Tuhan); (3) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum; (4) Penyiapan kemampuan sikap mental siswa yang ingin melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi; (5) Mempersiapkan kematangan dan daya resistensi siswa dalam mengadaptasi diri terhadap lingkungan fisik dan sosial; (6) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari; dan (7) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif yang diakibatkan oleh pergaulan dunia luar.

Fungsi pendidikan agama Hindu tersebut di atas sesuai dengan tujuan pendidikan agama Hindu, yaitu bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan *Sradha* (iman) dan *Bhakti* (ketaqwaan) siswa terhadap Tuhan melalui pelatihan, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Hindu, sehingga menjadi insan Hindu yang “*darmika*” dan mampu mewujudkan cita-cita luhur “*Moksartham Jagadhita*” (Tim Penyusun, 2003:5). Fungsi dan tujuan pendidikan agama dan keagamaan Hindu inilah yang ingin ditanamkan kepada umat Hindu di Sulawesi

Tenggara yang tidak diperoleh secara utuh oleh peserta didik di sekolah-sekolah umum. Oleh karena itulah oleh pemuka-pemuka Hindu di Sulawesi Tenggara didirikan beberapa pasraman untuk mendidik dan membina umat Hindu khususnya para generasi muda Hindu di Sulawesi Tenggara.

Gambaran tentang keberadaan pasraman Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh dari dokumen Pembimas Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara (Ngakan Made Sudiana, S.Pd., M.M, tgl 12 Januari 2019). Pasraman-pasraman yang ada adalah pasraman Hindu non-formal, dan semuanya berstatus terdaftar.

Adapun nama pasraman, alamat, ketua pasraman, dan jumlah siswa, dapat dilihat pada tabel 66 di bawah.

Tabel 66. Data Tentang Pasraman Non-Formal Lingkup Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

No.	Nama Pasraman	Alamat	Ketua Pasraman	Jumlah Siswa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pasraman Prema Widya Santhi	Jl. Wayong -THR Komplek P2ID Kelurahan/Kecamatan Kadia, Kota Kendari	AKP Gusti Komang Sulastra, S.H., M.H.	160
2.	Pasraman Gayatri	Jl. Blok B Desa Tasahea Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur	Putu Eprianto, S.Pd.	75
3.	Pasraman Widya Dharma Saraswati	Blok D, Pura Penataran Amerta Yoga, Kel. Atula, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur	I Made Susila, S.Pd.	45
4.	Pasraman Dwitawana Saraswati	Jl. Blok G, Desa Mataiwoi, Kec. Loea, Kab. Kolaka Timur	Bambang Wisnawa, S.Ag.	124
5.	Pasraman Brahman Vedanta	Blok M Desa Mekar Jaya, Kec. Dangia, Kab. Kolaka Timur	I Dewa Putu Triyasa, S.Pd. SD.	58
6.	Pasraman Dharma Kerti	Jl. Blok B, Desa Putemata, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur	Wayan Sutaryana, S.Ag.	122
7.	Pasraman Asrama Giri	Jl. Bali, Desa Roko-Roko, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur	Ketut Julianto, S.Pd., M.Pd.	
8.	Pasraman Udaya Giri	Dusun II, Blok D, Desa Wia-Wia, Kec. Poli-Polia, Kab. Kolaka Timur	Nyoman Sumitriani, S.Ag.	
9.	Pasraman Dharma Prawerti	Jl. Poros Tandebura-Wowoli, Kel. Tandebura, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka	Ida Bagus Dermadhara, S.Ag.	290

10.	Pasraman Girindra Yoga	Jl. Poros peoho-Kukutio, Desa Peoho, Kec. Watubangga, Kabupaten	Wayan Kampsiasa, A.Md.	131
11.	Pasraman Yoga Nanda	Jl. Poros Rano Teta-Kukutio, Desa Rano Teta, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka	Dewa Gede Wana, S.Sos.	44
12.	Pasraman Satya Aji	Desa Puudongi, Kec. Polinggona, Kab. Kolaka	I Made Mastika, SH.	150
13.	Pasraman Werdhi Budaya	Jl. Poros Gunung Sari-Peoho, Desa Gunung Sari, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka	I Made Tinggal Kariasa, S.ST.	
14.	Pasraman Widya Dharma Santi	Desa Kukutio, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka	Sagung Kadek Karmiaty	
15.	Pasraman Widya Paramitha	Jl. Jend. A. Yani No.36X, Lt. 2 Praktek Dokter Agus, Kota Baubau	Ir. I Wayan Sarjana, M.Si.	50
16.	Pasraman Widya Bhakti	Ds. Gunung Sari, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara	I Dewa Ayu Satriawati, S.Ag.	22
17.	Pasraman Widya Shanti	Desa Bumi Lapero, Kec. Kulisusu Barat, Kab. Buton Utara	I Komang Sumerta	
18.	Pasraman Santhi Vidya	Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton	I Nengah Suciptyarya, S.Ag.	40
19.	Widya Laya Asram	Jl. Nangka No.9 Desa Siomanuru, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton	I Nengah Arianto, S.Ag.	72
20.	Pasraman Surya Genitri	Jl. Poros Desa Wapae, Samping Pura Desa Marga Yoga, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat	Putu Sulitra, S.Sos.H.	141
21.	Pasraman Dharma Widya Saraswati	Jl. Mangku Bumi, Desa Wulanga Jaya, Kec. Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat	Made Suarjana, S.Pd.H.	93
22.	Pasraman Surya Kencana	Desa Kasimpa Jaya, Kec. Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat	Putu Sudiartawan, S.Pd.H.	40
23.	Pasraman Wana Prasta	Jl. Poros Desa Labulu Bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna	Wayan Darsana	85
24.	Pasraman Catur Paramita	Desa Lamparinga, Rt./Rw. 03, Kecamatan Wiwirano, Kab. Konawe Utara	Putu Sudiana Jaya	115
25.	Pasraman Dharma Wedanta	Kel. Lamonae Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara	I Gusti Made Danayasa	40
26.	Pasraman Dharma Santi	Jl. Poros Desa Mekar Jaya (Komplek Pura Puseh Swastirat), Desa Mekar Jaya,	Ketut Sudiarta	26
27.	Pasraman Dharma Sastra	Desa Hialu Utama, Kec. Landawe, Kab. Konawe Utara	Made Medana, S.Pd.	62
28.	Pasraman Dharma Aksara	Jl. Citandwi Desa Alosika Kec. Abuki Kab. Konawe	I Nengah Sumendra, S.Ag.,M.Fil.H.	236

29.	Pasraman Widya Dharma Kertih	Desa Kasaeda Kec. Uepai Kab. Konawe	Sang Putu Suartawan	65
30.	Pasraman Jaya Kusuma	Jl. Boni, Desa Puasana-Ulubenua Kec. Amonggedo Kab. Konawe	Ida Bagus Putu Adyadnya, S.Pd.	147
31.	Pasraman Widya Dharma Sastra	Desa Ambopi Kec. Tonggauna, Kab. Konawe	I Wayan Warga, S.Ag.	60
32.	Pasraman Amerta Sari	Ds. Ambuulanu, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe	Arya Rai Dharmika, S.Ag	80
33.	Pasraman Jagadhita	Desa Adat Dwi Tunggal Bhuana, Kelurahan Mekar Sari, Kec. Tonggauna, Kab. Konawe.	Wayan Wardana	342
34.	Pasraman Widyananda	Blok G, Desa Sumberjaya Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan	Komang Agus Suartawan, SPd.H	212
35.	Pasraman Dharma Santi	Jl. Lapoa-Bombana, Desa Lapoa, Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan	Gusti Ketut Suwingin, S.Pd.	100
36.	Pasraman Saraswati	Desa Adat Ekasari, Desa Ranombayasa, Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan	I Ketut Danayasa, S.Ag.	142
37.	Pasraman Putra Saraswati	Jl. Ngurah Rai, Desa Lapoa Indah, Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan	. I Made Darta	24
38.	Pasraman Widya Dharma Bina Putra	Desa Wawobende Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan	Wayan Gawena, S.Ag	41
39.	Pasraman Widya Kumara	Jl. Poros Air Terjun MoramoDs. Sumbarsari kec. Moramo, Kab. Konawe	Ida Kade Metria	46
40.	Pasraman Tat Wamasi	Jl. UPT Amohola I, Desa Puuduria Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan	I Wayan Wedra	52
41.	Pasraman Sabha Kulam	Dusun 1, Desa Kondoano, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan	I Nyoman Suteja, S.Pd.	192
42.	Pasraman Sinar Sanga Saraswati	Desa Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan	Made Suprpta, S.Ag.	75
43.	Pasraman Tri Tunggal Wana Giri	Komplek Pura Desa Adat Tridanamulya, Desa Lalonggapu Kec. Landono,	I Nyoman Sukanada, A.Md.	131
44.	Pasraman Dharma Widya	Desa Jati Bali, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan	I Ketut Deni Mariawan, S.Ag	100
45.	Pasraman Dharma Gita	Desa Watumokala, Kec. Andoolo Barat, Kab. Konawe Selatan	. I Wayan Sukarja	48
46.	Pasraman Nirmala	Desa Aepodu, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan	Gusti Ayu Padmawati, S.Pd.	70
47.	Pasraman Jagadhita	Ds. Mata Upe-Bima Maroa, Kec. Andoolo Barat, Kab. Konawe Selatan	Ida Bagus Santika	28

48.	Pasraman Wana Sari	Desa Andoolo Utama- Silea Jaya, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan	I Ketut Mertayasa, S.Pd., M.Pd.	78
49.	Pasraman “Dharma Shanti”	Desa Adat Buana Jaya, Desa Pudaria Jaya, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan	Nyoman Yusudira, S.Pd.,M.Pd	36
50.	Pasraman “Dharma Kerti”	Desa Adat Tegal Sari, Desa Talumbinga, Kec. Landonu, Kab. Konawe Selatan	Kadek Mertayasa	45
51.	Pasraman Bali Dwipa	Pura Jagat Agung Desa Adayu Indah Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan	I Wayan Suarta	34
52.	Pasraman Saraswati Lambodi Jaya	Desa Lambodi Jaya, Kec. Lalembuu, Kab. Konawe Selatan	Ni Luh Kade Derisna, S.Pd.	
53.	Pasraman Wana Giri	Desa Punggawukawu, Kecamatan Benua, Kab. Konawe Selatan	I Wayan Windiana, S.Pd.	
54.	Pasraman Saraswati Jaya	SP1 Desa Anugrah, Kec. Lantari Jaya, Bombana	I Komang Suarta Dwipayana, S.Pd.	60
55.	Pasraman Yogiswara	SP3 Desa Marga Jaya, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana	I Nengah Mariantu, S.Si.	25

Dari tabel 66 di atas, terlihat bahwa telah ada 55 buah pasraman di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tersebar di beberapa tempat/lokasi di Sulawesi Tenggara, dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Dari data pada tabel 66 tersebut di atas, terlihat Pasraman Jagadhita yang berkedudukan di Desa Adat Dwi Tunggal Bhuana, Kelurahan Mekar Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe, paling banyak memiliki siswa, yakni 342 orang. Semua pasraman tersebut berstatus terdaftar kecuali Pasraman Werdhi Budaya yang masih dalam proses pengusulan (I Kedut Sudiarta, wawancara 14-1-2019). Dengan adanya beberapa pasraman ini diharapkan Pendidikan Keagamaan Hindu untuk umat Hindu di Sulawesi Tenggara dapat terlayani. Secara lengkap tentang keberadaan pasraman-pasraman yang ada di Sulawesi Tenggara terdapat dalam lampiran laporan ini.

Selanjutnya, khusus di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara diperoleh informasi tentang keberadaan pasraman pada tahun 2018 dari data Penyuluh Non-PNS (I Gede Suwardi, M., S.Si., tgl 13 Januari 2019), seperti pada tabel 67, sebagai berikut.

Tabel 67. Data Nama Lembaga Pendidikan Hindu (Pasraman)
Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara.

No.	Desa/Kecamatan	Pasraman	Pengelola (Ketua, Sekretarian, Bendahara)	Guru/Acharya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mekarjaya/ Langgikima	Dharma Shanti	1. Ketut Sudiarta 2. Komang Arta 3. Ketut Buki Ar- sana Putra	1. I Gede Arman, S.Pd M.Si. 2. Ni Ketut Kertiasih, S.Ag 3. I Gede Suwardi M, S.Si 4. Made Karmawan
2.	P a r i a m a / Langgikima	B e l u m ada		
3.	Tinondo In- dah/Oheo	Tri Dhar- ma	1. Komang Marta- yasa 2. Gede Budi yana 3. Made Sumarini	1. Putu Antara 2. Nengah Arsita 3. Nyoman Andri.
4.	Todolojiyo/ Oheo	Dharma Luhur	1. I Putu Widya Putra 2. I Komang Agus Saputra 3. Ni Kadek Okta- viani	1. Ni Nyoman Man- tab 2. Wayan Sukarata 3. Ketut Ariana
5.	P u u p i j a y a / Sawa	Dharma Bakti.	1. Ketut Pariadika 2. Ketut Sudiarta 3. Ni Luh Gede Jayanti.	1. Wayan Wartini, S.Pd. 2. Komang German- to, S.Pd. 3. Ni Nyoman Artin- ingsih.
6.	Lamparinga/ Wiwirano	C a t u r Paramita.	1. Putu Suidana Jaya 2. Kadek Sanlasih 3. Ketut Catur Sukermata	1. Ketut Tantra 2. Ketut Edi Karo 3. Kadek Seniasih 4. Ketut Warka.
7.	W a w o h e o / Wiwirano	Dharma Wedanta	1. Gusti Made Dana Yasa 2. Komang Rudi Ardika 3. Ketut Putra	1. Ketut Tanggal 2. Komang Kariasih 3. Komang Suwar- tini.
8.	Wacumulewe/ Wiwirano	B e l u m ada		
9.	Culambatu/ Wiwirano	Dharma Aksara	1. I Kadek Dartar 2. Komang Astawan 3. Ketut Sulasa	1. Wayan Sudana 2. Komang Sudarsana,SIK. 3. Wayan Sulasa, S.Pd.

10.	Hialu Kom- p l e k s / Landawe	D h a r m a Sastra	1. Made Medana, S.Pd. 2. I Wayan Sumar- dana, S.Pd 3. Putu Agus Ari- awan.	1. Made Suteja, S.Pd. 2. Made Medana, S.Pd. 3. I Wayan Semar- dana, S.Pd. 4. Komang Sudiana, S.Pd. 5. Gede Lanang Juli- ana, S.Pd. 6. Ketut Oka Dana.
11.	Tambakua/ Landawe	B e l u m ada		

Memperhatikan tabel di atas, tampak tiga Desa/Kecamatan yang belum memiliki lembaga pendidikan Hindu (Pasraman), yaitu Desa Pariama Kecamatan Langgikima, Desa Wacumulewe Kecamatan Wiwirano, dan Desa Tambakua Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Ini artinya bahwa umat Hindu khususnya generasi muda Hindu di tiga Desa/Kecamatan di Kabupaten Konawe belum mendapat pendidikan keagamaan secara non-formal untuk memperkaya wawasan umat Hindu tentang pendidikan keagamaan.

Penyuluh Agama Hindu

Penyuluh Agama baik Penyuluh Fungsional/PNS maupun Non PNS mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan YangMaha Esa. Keberadaan Penyuluh Agama di tengah-tengah masyarakat dinilai semakin penting belakangan ini. Salah satu tugas Penyuluh Agama dituntut mampu memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan agama Hindu serta mengembangkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik berdasarkan wilayah sasaran, maupun kelompok binaan masing-masing.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pembimas Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara (Ngakan Made Sudiana, S.Pd., M.M., tgl. 13 Januari 2019), bahwa Penyuluh Agama Hindu yang Non-PNS se-Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018, berjumlah 60 orang yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk jelasnya, sebaran Penyuluh Agama Hindu Non-PNS se-Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel 68 berikut.

Tabel 68. Data Sebaran Penyuluh Agama Hindu Non-PNS se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

No.	SATKER (Satuan Kerja) KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH	KETERAN- GAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kankemenag Kota Kendari	0	
2.	Kankemenag Kab. Konawe	10	
3.	Kankemenag Kab. Konawe Utara	3	
4.	Kankemenag Kab. Konawe Selatan	14	
5.	Kankemenag Kab. Kolaka	5	
6.	Kankemenag Kab. Kolaka Utara	0	
7.	Kankemenag Kab. Baubau	2	
8.	Kankemenag Kab. Buton	3	
9.	Kankemenag Kab. Buton Utara	2	
10.	Kankemenag Kab. Muna	1	
11.	Kankemenag Kab. Bombana	3	
12.	Kankemenag Kab. Wakatobi	0	
13.	Kankemenag Kab. Konawe Kepulauan	1	
14.	Kankemenag Kab. Kolaka Timur	11	
15.	Kankemenag Kab. Muna Barat	5	
16.	Kankemenag Kab. Buton Selatan	0	
17.	Kankemenag Kab. Buton Tengah.	0	
	JUMLAH	60	

Dari tabel di atas, terdapat lima wilayah yang belum memiliki Penyuluh Agama Hindu, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah. Padahal dengan sebaran penduduk (umat) Hindu yang demikian besar tentu membutuhkan penyuluh-penyuluh agama Hindu untuk meningkatkan pemahaman umat tentang ajaran agama Hindu. Namun demikian, berdasarkan data di Bimas Hindu Kanwil Depag Provinsi Sultra tahun 2017, umat Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terbantuan karena telah memiliki seorang penyuluh agama Hindu yang sudah berstatus PNS, atas nama I Nyoman Suweta, S.Ag, seperti terlihat pada tabel 69 berikut.

Tabel 69. Data Penyuluh Agama Hindu PNS Tahun 2017.

NO.	Nama	Tempat/ Tgl. Lahir	NIP	Pangkat/ Gol	TMT Gol.	Pendidi- kan	Wilayah binaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	I Nyoman Suweta, S.Ag.	Bali, 8-12- 1977	19771208 200312 1 001	Pembina, Gol. IV/a	1-10- 2016	S1 Agama Hindu	Kota Baubau

C. POTENSI, TANTANGAN, DAN SOLUSI

Peta topografi menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara umumnya memiliki permukaan tanah yang bergunung, bergelombang berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Dengan kondisi ini, sebagian besar masyarakat Sulawesi Tenggara bermata pencaharian dari sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan seluas 1.868.860 ha telah digunakan untuk usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40 derajat.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang melintasi hampir seluruh kabupaten/kota. Sungai-sungai tersebut pada umumnya potensial untuk dijadikan sebagai sumber energi, untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan irigasi. Daerah aliran sungai, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Konawe, melintasi Kabupaten Kolaka, dan Konawe. DAS tersebut seluas 7.150,68 km² dengan debit air rata-rata 200m³/detik. Bendungan Wawotobi yang menampung aliran sungai tersebut, mampu mengairi persawahan di daerah Konawe seluas 18.000 ha. Selain itu, masih dapat dijumpai banyak aliran sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan debit air yang besar sehingga berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti: Sungai Lasolo di Kabupaten Konawe, Sungai Roraya di Kabupaten Bombana (Kecamatan Rumbia, dan Poleang), Sungai Wandasa dan Sungai Kabangka Balano di Kabupaten Muna, Sungai Laeya di Kabupaten Kolaka, dan Sungai Sampolawa di Kabupaten Buton.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki perairan (laut) yang sangat luas. Luas perairan Sulawesi Tenggara diperkirakan

mencapai 110.000 km². Perairan tersebut, sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping memiliki bermacam-macam jenis ikan dan berbagai varietas biota, juga memiliki panorama laut yang sangat indah. Berbagai spesies ikan yang banyak ditangkap nelayan dari perairan laut Sulawesi Tenggara adalah: Cakalang, Teri, Layang, Kembang, Udang dan masih banyak lagi jenis ikan yang lain. Di samping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti: teripang, agar-agar (rumput laut), japing-japing (kerang mutiara), kerang lola (*trochus niloticus*), mutiara dan sebagainya.

Sulawesi Tenggara merupakan daerah wisata bahari. Di sebelah Tenggara terdapat Taman Nasional Wakatobi yang memiliki potensi sumberdaya alam laut yang bernilai tinggi baik jenis dan keunikannya, dengan panorama bawah laut. Taman nasional ini memiliki 25 buah gugusan terumbu karang dengan keliling pantai dari pulau-pulau karang sepanjang 600 km. Selain wisata bahari, Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki Wisata Budaya berupa Upacara Adat Mosehe Wonua (penyucian negeri), Upacara Adat Monahu Nda (upacara panen padi), Upacara Adat Motasu (upacara pembukaan ladang), Festifal Lolu Nggada, Festifal Mapae-pae, dan Festifal Teng Keno. Sedangkan Wisata Sejarah, berupa Benteng Keraton Buton, Makam Raja, Rumah Adat, Gua Sejarah Watuwulaa, Mesjid Agung, Petilesan Arung Palakkad dan Kampua (mata uang kerajaan Guwa).

Selain memiliki potensi pertanian dan perkebunan berupa kakao, kacang mede, kelapa, cengkeh, kopi, pinang, lada dan vanili, Sulawesi Tenggara juga memiliki potensi kehutanan, meliputi: kayu gelondongan, dan kayu gergajian. Potensi perikanan baik darat maupun laut, peternakan, serta pertambangan yang meliputi aspal, nikel, emas, marmer, batu setengah permata, onix, batu gamping, dan tanah liat.

Selain potensi alam, Sumber Daya Manusia Hindu juga menjadi potensi yang patut dijaga dan bahkan dikembangkan. Keberadaan umat Hindu di Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini memang memiliki potensi besar karena umat Hindu di Sultra bermukim di 13 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sultra, yaitu: Buton, Muna, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, Bombana, Buton Utara, Konawe Utara, Kolaka Timur,

Konawe Kepulauan, Muna Barat, Kendari, dan Baubau.

Secara ekonomi, berdasarkan hasil wawancara dengan I Nyoman Suidiana (Ketua PHDI Provinsi Sultra) dan I Nengah Suliarta (Ketua Stah Batara Guru) tanggal 10, 11, dan 12 Januari 2019, dinyatakan bahwa kehidupan umat Hindu di Sulawesi Tenggara rata-rata cukup baik, baik dan sangat baik. Bahkan ada umat Hindu yang telah banyak sebagai (1) pengusaha/pebisnis, seperti memiliki rumah sakit (dr. Dewa Putu Saputra, Sp. OG), memiliki rumah-rumah kos yang jumlahnya cukup banyak (Mayor Made Armika), memiliki penginapan, kamar-kamar kos, dan usaha cuci mobil (I Wayan Ardana), memiliki usaha tambak udang yang cukup luas, banyak umat yang telah memiliki toko seperti telpon seluler, toko elektronik (Gede Budi Hartawan), toko bangunan, toko/dagang “tugu/sanggah”, toko keperluan sehari-hari, usaha bengkel, dan sebagainya.

Umat Hindu yang tidak memiliki pendidikan tinggi, selain menekuni usaha di bidang pertanian (sawah dan ladang), juga ada yang berprofesi sebagai tukang bangunan rumah maupun tempat-tempat pemujaan seperti *Merajan* dan Pura. Bagi umat Hindu yang pendidikan cukup tinggi, mereka berprofesi selain sebagai dosen, dokter, guru, juga ada yang menjadi anggota dewan di tingkat Kabupaten dan Provinsi, serta ada yang menjadi anggota dan calon anggota DPD pusat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua PHDI Provinsi Sulawesi Tenggara (I Nyoman Suidiana, wawancara tgl. 14 Januari 2019), saat ini umat Hindu telah memiliki seorang dosen perempuan di Universitas Halu Oleo yang sudah menjadi Guru Besar bernama Prof. Dr. Ir. I Gusti Ayu K. Sutariati, M.Si, 8 (delapan) orang Doktor termasuk Ketua PHDI Provinsi Sulawesi Tenggara, puluhan sudah bergelar S2, dan sudah banyak yang menamatkan S1. Juga ada seorang dokter ahli kandungan bernama dr. Dewa Saputra, Sp. OG dan memiliki Rumah Sakit (RS), yaitu RS Dewi Sartika.

Guna membantu umat Hindu yang kurang mampu di Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut I Nyoman Suidiana selaku Ketua PHDI Provinsi Sulawesi Tenggara (wawancara tgl. 14-1-2019), bahwa PHDI Provinsi Sulawesi Selatan membentuk sebuah Lembaga Sosial bernama “Bhakti Manawa Wedanta

(BMW)” di bawah naungan PHDI yang diketuai oleh dr. Gusti Sudarmika. Lembaga ini bergerak selain memberikan bantuan sosial, juga beasiswa, bedah rumah, pengobatan gratis, dan sebagainya, yang anggarannya diperoleh dari para donatur.

UmatHindudiSulawesiTenggaramemilikibeberapalembaga keagamaan Hindu yang juga secara aktif melakukan pembinaan kepada umat Hindu baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik. Misalnya saja, Lembaga Penyiaran, secara berkala (periodik) memberikan pencerahan agama Hindu di TV, demikian juga dengan lembaga-lembaga keagamaan Hindu lainnya secara aktif melaksanakan pembinaan dan pencerahan ke masyarakat. Adapun lembaga keagamaan Hindu yang ada di Sulawesi Tenggara, seperti terlihat pada tabel 70 berikut.

Tabel 70. Data Lembaga Keagamaan Hindu di Provinsi Sultra

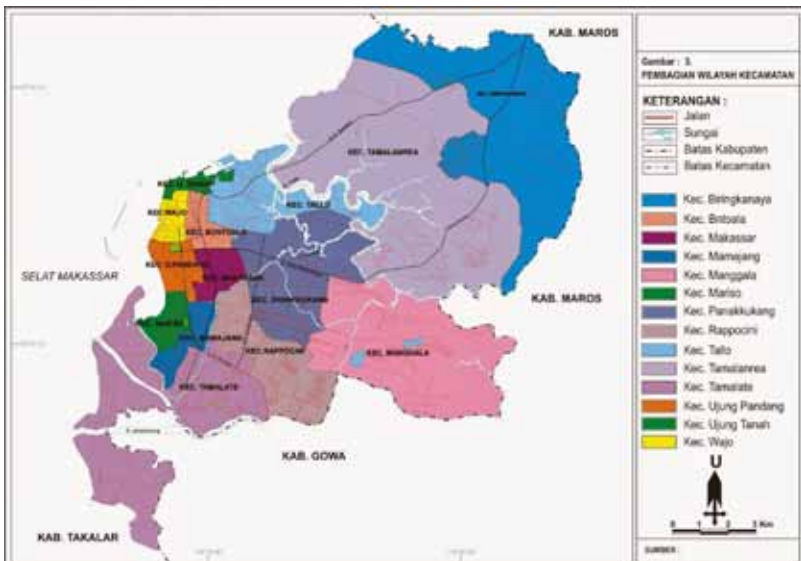
No.	Nama Lengkap Lembaga	Alamat Lembaga	Kab./ Kota	Telp.	Kode Jenis Lembaga	Pengurus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sultra	Jl. Cempaka Putih No. 19 Wua-Wua, Kendari.	Kendari	081293301362	Majelis Tertinggi Agama Hindu	Dr. Eng. I Nyoman Sudiana, S.Pd.,M.Si.
2.	Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Sultra	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	081341780954		Prof. Dr. Ir. I Gusti Ayu K. Sutariati, M.Si.
3.	Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Sultra	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	*081341780954	Lembaga PembinaanKeagamaan	Ngakan Made Sudiana, S.Pd.,MM.
4.	Badan Penyiaran Hindu (BPH) Sultra	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	0 8 1 1 4 0 9 5 5 / 085341653567	Keagamaan	I Nengah Suliarta, SE.,M. Fil.H.
5.	Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Sultra	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	0811401546	Keagamaan	Putu Budi Adnya, A.Md.
6.	Ikatan Cendikiawan Hindu (ICH) Sultra	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	082346281182	Keagamaan	Dr. I Wayan Page Yasa, S.Pd., M.Pd.
7.	Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia Sultra	Jl. Y. Wayong Komp. Pura, RT.01, RW.06, Kel. Kadia Kendari.	Kendari	085289526252	Keagamaan	Sudi Laksmiana, ST.
8.	Pimpinan Daerah (PD) Kesatuan Mahasiswa Hindu Indonesia (KMHD) Sultra	Jl. Budi Utomo, Lr. Hoga Rt. 003/Rw.007, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari	Kendari	082396562582	Keagamaan	Gede Eka Fandi Aprisal, S.Pd.

9.	Prajaniti Provinsi Sulawesi Tenggara	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	0811402636	Keagamaan	Dr. Dewa Putu Ar-dika Seputra, Sp. OG.
10.	KKG/MGMP PAH Provinsi Sulawesi Tenggara	Jl. Haeba Dalam Lorong Pandawa	Kendari	081341525250	P e n d i d i k a n Agama	I Putu Sudarmika, S.Pd.
11.	Bhakti Manawa Wedanta (BMW) Sultra	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	0816246814	Keagamaan	dr. Gusti Nyoman Sudarmika
12.	The Hindu Centre South of Sulawesi	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	081241485050	Keagamaan	Made Su-gamayasa, SH.
13.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dharmia Nitisastra PHDI Sultra	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	085240416899	Sosial Ke-agamaan	Agus Ariadi, SH.,MH.
14.	Badan IWUH Sultra	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	082187599057	Sosial Ke-agamaan	Wayan Sudi-arta, SE.,M. Fil.H.
15.	Yayasan Ganapati Jaya Kendari	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	085242076834	Sosial, Pendidik-an, Keagamaan	I Nengah Setiawan, S.Pd.
16.	Banjar Sindhu Mertha Kota Kendari	Komplek P2ID, Kel. Kadia, Kendari. Pura Penataran Agung Jagadhita Kendari	Kendari	082343065206	Sosial Kema-syara-katan, Ke-agamaan	Gusti Kade Sumertadana, A.Md.
17.	Satya Sai Group (SSG) Prov. Sultra	Desa Jatibali, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan	Konsel		Yayasan Ke-agamaan	
18.	ISCON Sultra	Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur	Koltim		Yayasan Ke-agamaan	
19.	Weda Posana Asram Kendari	Konda	Kendari	085230589848	Agni Hotra	Ida Pan-dita Agnijaya Shree Shree Sebali
20.	PHDI Kota Kendari	Jl. Cempaka Putih No. 19, Wua-Wua, Kendari	Kendari	085341795577	Keagamaan	Dr. I Made Sumadra

DINAMIKA UMAT HINDU DI MAKASSAR: Peran Umat Hindu dan Lembaga Umat dalam Kehidupan Masyarakat Multikultur

I Ketut Ardhana
Fransiska Dewi Setiowati Sunaryo

Makassar yang terletak di kawasan Indonesia Timur, merupakan sebuah pelabuhan penting yang sangat diperhitungkan oleh penguasa kolonial Belanda di era penjajahannya. Tidak hanya karena aspek geografis, tetapi juga aspek historis yang memperkenalkan tokoh pahlawan Hasanuddin yang dipandang sebagai “*ayam jantan dari Timur*” menjadi ikon sejarah penting bagi Makassar dalam catatan sejarah Indonesia.



Peta Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar dipandang sebagai sebuah pusat perkembangan ekonomi di Indonesia bagian timur misalnya Pare yang menghubungkan beberapa kawasan Indonesia Timur lainnya seperti Nunukan, Sebatik dan hingga Tawau ke Malaysia. Sebagai pusat perdagangan di bagian Indonesia Timur pada masa lalu, tidak mengherankan juga, jika pemerintah Belanda memanfaatkan posisi strategis Makassar sebagai pusat pemerintahan di zaman Indonesia Bagian Timur. Wilayah-wilayah yang termasuk bagian Indonesia Timur dikenal sebagai "*outer Indonesia*", sementara untuk Indonesia bagian Barat dikenal dengan "*inner Indonesia*" yang menunjukkan adanya perbedaan konsep bagi wilayah ini dalam perspektif Belanda di masa lalu.

Oleh karena itulah, tidaklah mengherankan jika dinamika umat Hindu yang dahulu kebanyakan dikembangkan oleh etnis Bali tampaknya tidak dapat terlepas dari konteks kesejarahan ini. Terlebih ketika Bali menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT), tampak dinamika umat Hindu yang diperankan oleh orang atau etnis Bali memiliki hubungan erat dengan konteks kesejarahan ini. Bahkan, Cokorda Gde Sukawati pernah menjadi Perdana Menteri Negara Indonesia Timur pada saat itu, sebagai salah satu orang Bali yang memiliki peran penting dalam dinamika sejarah politik Indonesia pada saat itu. Dengan adanya posisi yang pernah dijabat oleh seorang tokoh Bali ini, tidaklah mengherankan jika pengaruh dan strategi kebijakannya dianggap diperhitungkan dalam skala politik nasional di era penjajahan saat itu.

Namun pertanyaannya adalah bagaimana dinamika umat Hindu saat itu? Seberapa jauh kebijakan seorang tokoh Bali yang pernah memegang posisi strategis pada saat itu terhadap dinamika umat Hindu di Indonesia bagian Timur? Hingga saat ini, tidak banyak yang dapat diketahui dari perkembangan historis yang terjadi, terutama dalam kaitannya dengan dinamika umat Hindu yang kebanyakan terdiri dari orang Bali kala itu. Dalam catatan kesejarahan ditunjukkan bahwa orang atau etnis Bali dikenal sebagai etnis yang rajin dan memiliki fisik yang kuat bekerja, sehingga dalam sumber-sumber sejarah kolonial disebutkan, bahwa orang Bali memiliki harga yang tinggi sebagai budak-budak yang dianggap sebagai komoditas penting pada

masa kerajaan di masa kolonial pada saat itu. Kesan positif sebagai tenaga kerja yang rajin dan kuat secara fisik masih melekat, jika diperhatikan tentang bagaimana dinamika orang Bali sebagai tenaga transmigran yang berkembang kemudian setelah Indonesia merdeka. Stereotip orang Bali sebagai pekerja ulet, rajin dan berhasil di daerah yang baru tampaknya banyak menjadi pembahasan ketika studi-studi pengembangan wilayah dilakukan, melihat beberapa contoh di Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan.

Terlepas dari itu, sejarah juga mencatat bahwa dinamika isu yang berkembang di Kota Makassar berkaitan erat dengan perjalanan sejarah lembaga keagamaan yang ada di Indonesia pada masa lalu, di mana terdapat beberapa persoalan persaingan antara Muslim-Kristen-Hindu di kebanyakan daerah di luar Bali, terutama terjadi di Sulawesi Selatan. Antara tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an, terjadi gesekan-gesekan sosial politik antara Islam dan Kristen Toraja. Sebagaimana digambarkan oleh Martin Ramstedt (2004), pada periode itu muncul gejolak yang memang terjadi secara khusus di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu betapa pentingnya mendirikan sebuah bangunan suci yang kemudian dikenal dengan pura Giri Natha yang diharapkan dapat menyatukan berbagai pemahaman tentang Hindu di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena era tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an, tidaklah mengherankan jika perintis perjuangan umat Hindu yang ada di Sulawesi Selatan kebanyakan berasal dari angkatan yang pada saat itu disebut dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Menarik untuk dikemukakan bahwa sebagaimana dirujuk oleh Martin Ramstedt (2004), yang melihat tentang peranan dari Mangku Sutji salah seorang pemangku di Pura Giri Natha pada saat itu (1960-an) pindah ke Sulawesi Selatan yaitu beberapa saat setelah Soeharto berkuasa yang mengetahui kondisi berkaitan dengan relasi sosial keagamaan antara Hindu dan Muslim, dimana Hindu berada di tengah-tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam pada saat itu. Ketika pada awalnya tiba di Sulawesi Selatan sebagaimana dengan daerah-daerah lainnya di Nusantara, ia melihat bagaimana intensitas konflik

yang berlangsung sebagai akibat dinamika politik keagamaan yang terjadi antara tahun 1950 sampai dengan 1960-an.

Setelah situasi dan kondisi tenang, tepatnya setelah berakhirnya gerakan Darul Islam yang ditandai dengan tewasnya Kahar Muzakkar pada Februari tahun 1965, orang Bali mulai mengikuti program transmigrasi yang direncanakan pemerintah Indonesia ke wilayah Sulawesi Selatan. Ramstedt menambahkan, kebanyakan transmigran asal Bali yang menganut agama Hindu pindah dari Ujung Pandang atau Makassar menuju daerah Palopo yang secara etnisitas umumnya bervariasi, namun didominasi oleh Muslim Luwu. Memang terjadi gesekan-gesekan antara orang Bali dan orang Bugis. Walau hal ini berlangsung cukup lama, berbagai kebijakan dan upaya pemerintah daerah Sulawesi Selatan telah memperkuat relasi agama yang ada di wilayahnya untuk mengintegrasikan orang Bali dengan orang Luwu (Ramstedt, 2004: 186).

A. BUDAYA HINDU DI MAKASSAR

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Hindu tidak hanya terdapat di Bali, tetapi juga di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Pada masa lalu, bukti-bukti peninggalan Hindu dipusatkan hanya di Jawa, khususnya Jawa Timur, dan Bali. Namun, kini pembahasan Hindu tidak lagi di Jawa Timur dan Bali saja, tetapi sudah mencakup wilayah-wilayah lainnya di Indonesia pada umumnya. Banyak kantong-kantong (*Hindu enclaves*) yang berkembang di Indonesia terutama setelah diperkenalkannya program transmigrasi dimulai pada menjelang akhir Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, dan secara intensif dilaksanakan pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ini tidaklah berarti pemikiran program pemindahan penduduk tidak terjadi pada masa sebelumnya ketika Belanda menguasai Indonesia. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa intensitas program transmigrasi tampaknya semakin berkembang dilakukan pada masa Orde Baru pada tahun 1970an hingga tahun 1980an.

Agama Hindu belumlah banyak dikenal sebelum tahun 1950-an. Baru pada tahun 1959 agama Hindu diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Ini terjadi lebih kurang 14 tahun

setelah kemerdekaan Indonesia diraih pada 17 Agustus 1945. Sebagai sebuah agama baru yang diakui di Indonesia tampaknya belum mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun tradisi adat dan agama Hindu sebenarnya sudah lama berakar dalam tradisi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Budaya Hindu di Ujung Pandang atau Makassar baru berkembang pada tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan pendirian bangunan pura bernama Pura Giri Natha, satu-satunya pura Hindu di Makassar yang terletak dekat dengan barak tentara Nasional Indonesia (TNI) tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, di pusat Kota Makassar. Pura Giri Natha di Makassar dibangun pada tahun 1972. Pendirian pura ini bermula pada masa jabatan Walikota Makassar, Kolonel H. Daeng Patompo, yang awalnya merencanakan pembangunan pura di wilayah Panakukang. Rencana ini didukung oleh beberapa warga umat Hindu terutama yang bertugas di bidang Kepolisian. Saat itu sesungguhnya ada umat yang memiliki tanah di wilayah Panakukang, akan tetapi karena satu dan lain hal, Walikota Makassar kemudian mengusulkan agar pura didirikan di Ujung Pandang. Penentuan nama Pura Giri Natha di Makassar diputuskan melalui sebuah rapat atau forum yang disetujui secara bersama-sama oleh warga Hindu yang hadir kala itu.

Pendirian Pura ini juga tidak terlepas dari kerjasama antara pegawai-pegawai asal Bali yang bekerja di TNI yang ditugaskan di Ujung Pandang dan seorang Bali yang bertugas di bagian kantor Kepolisian. Tahun 1973, Pura Giri Natha mulai difungsikan sebagai tempat berlangsungnya acara ritual dan keagamaan Hindu. Kondisi ini diperkuat dengan hadirnya kekuatan tentara yang berada di barak-barak kemiliteran. Namun, pasca jatuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998, tampak hubungan keagamaan antara Hindu dan agama lainnya mengalami tantangan-tantangan yang kembali menimbulkan rasa tidak aman (Martin Ramstedt, 2004: 187).

Walau demikian, dipandang dari sudut kedekatan dengan budaya lokal, Marton Ramstedt (2004: 187) menyebutkan, banyak tokoh lokal tradisional mempunyai kedekatan dengan perkembangan Hinduisme di Sulawesi Selatan. Ia menyinggung tentang seorang ahli pengobatan tradisional bernama Nek Sando

yang juga dikenal sebagai seorang *Sando* dan seorang *todadema*, yang dipercaya sebagai pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Tator. Dalam kaitan ini, ia juga diberikan kesempatan mengikuti pelatihan pengobatan tradisional di Bali selama empat minggu, kemudian menjalani upacara pengesahan sebagai seorang pendeta atau *pinandita*, yang dikenal sebagai upacara *mewinten* (Martin Ramstedt, 2004: 187).

Informasi dari Nyoman Sumarya menyebutkan, bahwa piodalan atau pujawali yang dilaksanakan di Pura Giri Natha dilaksanakan pada setiap Purnama Kapat. Tugas sebagai *pengempon* pura dilakukan oleh semua warga atau umat Hindu yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Hal ini diperkuat dengan hadirnya sebuah banjar yaitu Banjar Hindu Dharma dengan Made Wena sebagai pemimpin atau *kelihan*-nya. Banjar Hindu Dharma ini memiliki sejumlah tempek antara lain : Tempek Ringkanaya, Tempek Sudiang, Tempek Tamalanrea, Tempek Panekukang, Tempek Cendrawasih, Tempek Pabaingbaing, Tempek Gowa. Adapun mereka yang dipercaya menjadi pemangku pura di antaranya adalah : Mangku Wayan Nendera, Mangku Sedana, Mangku Made Kartana, Mangku Gede Sudarta, Mangku Gusti Alit. Sebagai pendeta yang dikenal adalah Ida Pandita Shri Mpu Dharma Yajnya Samyoga.

Berikut dapat dilihat selengkapnya nama dan jumlah pura di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Makassar :

Tabel 71 Pura di Sulawesi Selatan

NO	KAB/ KOTA	NO	NAMA PURA	ALAMAT
I	LUWU TIMUR	1	Pura Agung Hita Bhuana	Desa Kertaraharja, Kec. Tomoni Timur
		2	Pura Merajapati	Desa Kertaraharja, Kec. Tomoni Timur
		3	Pura Tirta Empul	Desa Morgomulio, Kec. Tomoni Timur
		4	Pura Pucak Sari	Desa Balikaya, Kec. Tomoni Timur
		5	Pura Kayangan Jagad	Desa Kertaraharja, Kec. Tomoni Timur
		6	Pura Puseh	Desa Alambuana, Kec. Tomoni Timur
		7	Pura Dalem Prajapati	Desa Alambuana, Kec. Tomoni Timur
		8	Pura Desa	Desa Alambuana, Kec. Tomoni Timur
		10	Pura Bakung	Desa Cendana Hitam, Kec. Tomoni Timur
		11	Pura Pakis	Desa Cendana Hitam, Kec. Tomoni Timur

		12	Pura Bakung	Desa Wonosari, Kec. Tomoni Timur
		13	Pura Bhuana Sari	Desa Gunung Sari, Kec. Tomoni Timur
		14	Pura Tri Kayangan	Desa Solo, Kec. Angkona
		15	Pr Catur Dharma Kertyasa	Desa Solo, Kec. Angkona
		16	Pura Dalem Penataran	Desa Lamaeto, Kec. Angkona
		17	Pura Dalem	Desa Lamaeto, Kec. Angkona
		18	Pura Agung Amerta Sari	Desa Taripta, Kec. Angkona
		19	Pura Jawa Hindu	Desa Tawakua, Kec. Angkona
		20	Pura Pusering Jagad	Desa Lakawali, Kec. Malili
		21	Pura Jagad Kertiyasa	Desa Lakawali, Kec. Malili
		22	Pura Agung Giri	Desa Papuro Barat, Kec. Burau
		23	Pura Puseh	Desa Kalaena Kiri, Kec. Kalaena
		24	Pura Tri Dharma Natha	Desa Mantadulu, Kec. Angkona
		25	Pura Desa	Desa Angkona I, SP.II, Kec. Angkona
		26	Pura Praja Pati	Desa Kerta Raharja, Kec. Tommoni Timur
		27	Pura Dalem	Desa Kerta Raharja, Kec. Tommoni Timur
		28	Pura Dalem	Desa Lamaeto, Kec. Angkona
		30	Pura Praja Pati	Desa Balirejo, Kec. Angkona
		31	Pura Dalem	Desa Balirejo, Kec. Angkona
		32	Pura Dalem	Desa Lakawali, Kec. Malili
		33	Pura Praja Pati	Desa Papuro, Kec. Wotu
		34	Pura Praja Pati	Desa Kalaena Kiri, Kec. Angkona
		35	Pura Puseh	Desa Kalaena Kiri, Kec. Angkona
		36	Pura Dalem	Desa Mantadulu, Kec. Angkona
		37	Pura Praja Pati	Desa Mantadulu, Kec. Angkona
		38	Pura Dalem Penataran	Desa Wonosari, Kec. Tomoni Timur
		39	Pura Ulun Suwi	Desa Gunung Sari, Kec. Tomoni Timur
		40	Pura Jawa Hindu	Desa Tawakuwa, Kec. Angkona
		41	Pura Lembah Sari	Desa Lakawali, Kec. Malili
		42	Pura Praja Pati	Desa Lakawali, Kec. Malili
		43	Pura Penataran Peed	Desa Taripta, Kec. Angkona
		44	Pura Ulun Suwi	Desa Taripta, Kec. Angkona
II	LUWU UTARA	1	Pura Jagad Mertha	Desa Sumber Dadi, Kec. Bone - Bone
		2	Pura Merta Sari	Desa Sido Makmur, Kec. Bone - Bone
		3	Pura Pitha Dharma	Desa Tamuku, Kec. Bone - Bone
		4	Pura Jagat Menara Giri	Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju
		5	Pura Kusuma Murti	Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju
		7	Pura Jagad Natha	Desa Sukadamai, Kec. Sukamaju

		8 Pr Jagad Kerta Bhua- na Sari	Desa Sukaharapan, Kec. Sukamaju
		9 Pura Amerta Bhuaana	Desa Rawamangun, Kec. Sukamaju
		10 Pura Swadharna	Desa Uraso, Kec. Mappadeceng
		11 Pura Wana Natha	Desa Mekarjaya, Kec. Mappadeceng
		12 Pura Merta Sari	Desa Giri Kusuma, Kec. Mappadeceng
		13 Pura Agung Kertiyasa	Desa Putemata, Kec. Malangke
		14 Pura Tirta Agung	Desa Sumber Agung, Kec. Malangke
		15 Pura Widyasari	Desa Beringin Jaya, Kec. Baebunta
		16 Pura Merta Sari	Desa Mukti Jaya, Kec. Baebunta.
		18 Pura Jagad Karana	Desa Subur, Kec. Sukamaju
		19 Pura Pusuh Loka Sari	Desa Kapidi, Kec. Mappadeceng
		20 Pura Widya Karma	Ds Cendana Putih, Kec. Mapadeceng
		21 Pura Sri Jagadhita	Ds Cendana Puti I, Kec.Mappadeceng.
		22 Pura Prajapati	Ds Sido Makmur, Kec. Bone - Bone
		24 Pura Prajapati	Ds Kembang Makmur, Kec. Bone - Bone.
		25 Pura Prajapati	Desa Murtijaya, Kec. Sukamaju
		26 Pura Prajapati	Ds Cendana Putih I, Kec, Mapadeceng
		28 Pura Prajapati	Ds Cendana Putih, Kec Mapadeceng
		30 Pura Prajapati	Desa Uraso, Kec. Mappadeceng
		31 Pura Dalem	Desa Rawamangun, Kec. Sukamaju
		34 Pura Prajapati	Desa Sukaharapan, Kec. Sukamaju
		35 Pura Prajapati	Desa Minangan Tallu. Kec. Sukamaju
		36 Pura Nirmala Dharma.	Desa Minangan Tallu, Kec. Sukamaju
		39 Pura Prajapati	Desa Sukadamai, Kec. Sukamaju
		40 Pura Pusuh Peninjoan	Desa Rawamangun, Kec. Sukamaju
		41 Pura Desa	Desa Subur, Kec. Sukamaju
		42 Pura Puncak Sari	Desa Subur, Kec. Sukamaju
		43 Pura Jagad Natha	Desa Kalukku, Kec. Sukamaju
III	TANA TORAJA	1 Pura Lappan	Desa Batu Sura',Kec. Rembon
		2 Pura Pa'buaran	Desa Ranna, Kec. Makale Selatan
		3 Pura Pangleon	Desa To'Pao, Kec. Malembong.
		4 Pura Maliombomg	Desa Ratte, Kec. Malimbong Maleppe
		5 Pura Se'Seng	Desa Kedual, Kec. Malimbong Balepe'
		6 Pura To Leto'	Desa Buttu Lepong, Kec.
		7 Pura Assa' Tanduk	Desa Bone, Kec. Saluputi
		8 Pura Sali Bulo	Desa Pedakka, Kec. Sanggalangi'
		9 Pura Rose	Desa Padakka, Kec. Sanggalangi'
		10 Pura Sesean	Desa Padakka, Kec. Sanggalangi'
		11 Pura Se' Pon	Desa Maroson

		12	Pura Sitodo	Desa Maroson
		13	Pura Panggala	Desa Maroson
		14	Pura Bambalu	Desa Maroson
		15	Pura Tambunan Litak	Desa Tambunan, Kec. Makale Utara
		16	Pura To' Bambam Palesan	Desa To' Arra,
		17	Pura To' ria	Desa Abdulgani
		18	Pura Ban Nande	Desa Kampung Batu, Kec. Makale
		19	Pura Potok Tengan	Desa Pangrorean, Kec. Makende'
		20	Pura Telondo Batu	Desa Buttu,
		21	Pura To' Pao	Desa Batusura', Kec. Rembon
		22	Pura Simbuang	Desa Simbuang, Kec. Simbuang.
IV	PALOPO	1	Pura Mandira Taman Sari	Palopo
V	MAKASSAR	1	Pura Giri Natha	Jln P. Kemerdekaan, Km. 12 Makassar
		2	Pura Prajapati	Jln Antang Raya, Makassar

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pura yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan terbanyak berada di wilayah Luwu Timur sebanyak 44 pura, Luwu Utara 43 pura, sedangkan jumlah pura paling sedikit berada di wilayah Palopo satu pura dan Makassar dua buah bangunan pura. Pendirian pura di wilayah Makassar jumlahnya sangat sedikit disebabkan oleh sulitnya memperoleh ijin pendirian pura di wilayah ini.

Dalam piodalan yang berkaitan dengan pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa, disebutkan perayaan hari suci di pura biasanya dilakukan secara periodik baik berdasarkan atas *sasih*, *wuku* atau *pawukon* dan lain-lain. Adapun untuk *gegelaran* atau penyelesaian upacara *yadnya* di pura oleh *pemangku* baik dalam hal mengisi *jun* air untuk tirta, menempatkan dupa di halaman *palinggih*, mempersembahkan *prayascita* pada *palinggih* dan lain-lain dijabarkan dalam Lontar Kusuma Dewa. (Sejarahharirayahindu.blogspot.com/2011/11/pura.html)

Pelaksanaan Upacara Nyepi di Kota Makassar

Dalam melaksanakan hari raya agama seperti Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Makassar melaksanakan rangkaian upacara Nyepi yang dibagi dalam empat tahapan yakni *Melasti*, *Tawur Kesangan*, *Nyepi* dan *Ngembak Geni*. Dari tahun ke tahun,

umat Hindu di Makassar mengadakan upacara Melasti di Pantai Akkarna, Tanjung Bunga, Kecamatan Tumalla Sulawesi Selatan. Tujuan upacara Melasti ini adalah sebagai simbol pembersihan diri agar menjadi suci seperti lahir. Selain manusianya yang disucikan, alam, simbol arca sebagai perwujudan Tuhan juga disucikan. Manusia diharapkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam kegiatan Melasti biasanya diiringi tarian dan musik gamelan. Berbeda dari tahun sebelumnya, perayaan Nyepi Tahun Baru Caka 1941 diawali dengan acara Nunas Tirta atau mengambil air suci lalu dilanjutkan dengan upacara *nedungan* Ida Betara di Pura, kemudian Melasti, lalu persembahyangan atau Tawur Kesanga. Melasti yang dari tahun ke tahun biasanya digelar di pantai, pada tahun 2019 beralih lokasi ke pura karena bertepatan dengan tahun politik. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena biasanya prosesi diikuti oleh ribuan umat Hindu dari berbagai kota di Makassar, Gowa, Maros, Pangkep dan Takalar. Untuk tahun 2019, upacara Melasti di pura dilengkapi dengan kidung-kidung suci, iringan gamelan dan beragam tarian sakral seperti Tari Rejang Dewa, Tari Rejang Renteng, dan Tari Baris Gede. *Dharma wacana* dibawakan oleh Pembimas Hindu Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. (<http://beritakotaMakassar.fajar.co.id/berita/2019/03/05/hari-umat-hindu-gelar-upacara-melasti/>)

Dalam perayaan Nyepi Tahun 2019, rangkaian upacara diawali dengan berbagai kegiatan sosial misalnya pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah dan kegiatan bakti sosial lainnya di sekitar Pura Giri Natha. Kegiatan donor darah diikuti oleh sebagian umat Hindu yang ada di Kota Makassar. Tujuan dari kegiatan donor darah menjelang Hari Raya Nyepi ini adalah mewujudkan konsep Tri Hita Karana yakni mengharmoniskan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan. Kegiatan donor darah ini terwujud atas kerjasama DPP Peradaha Sulawesi Selatan, DPK Makassar, Panitia Dharma Santi dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kegiatan sosial lainnya seperti Peduli Lingkungan juga diikuti oleh warga di sekitar Pura Giri Natha dengan melakukan bersih-bersih lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini adalah men-

didik generasi muda umat Hindu agar peduli terhadap lingkungan khususnya anak-anak agar terbiasa membuang sampah pada tempatnya. (<http://inputrakyat.co.id/gelar-dharmasanti-nyepi-dan-open-house-ini-harapan-parisada-hindu-dharma-kota-Makassar/>)

Setelah Perayaan Nyepi Tahun Baru Baru Caka 1941, Umat Hindu di Makassar mengadakan kegiatan Dharma Santi Umat Hindu Kota Makassar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr yang memberi sambutan dengan mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi dan permohonan maaf atas kondisi Kota Makassar yang tidak dapat mewujudkan suasana Nyepi yang maksimal. Berbeda dari perayaan Nyepi di Bali yang mewajibkan seluruh penduduk tidak melakukan kegiatan di luar rumah, masyarakat umum di Makassar masih beraktivitas bebas.

B. PENDIDIKAN HINDU

Guru Agama Hindu

Jumlah guru agama Hindu yang ada Makassar pada tahun 2018 adalah sepuluh orang). Kuliah agama Hindu diberikan dalam satu (1) semester yang diakui oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Ramstedt (2004: 186), pelaksanaan pendidikan agama yang dilakukan di Kantor Wilayah Agama Sulawesi Selatan sebagian diikuti oleh beberapa mahasiswa dari Tanah Toraja atau yang dikenal dengan Tator, diikuti pula oleh mahasiswa dari Polmas dan Sidrap. Sementara kelompok masyarakat Muslim menghadiri berbagai kegiatan keagamaan di beberapa masjid yang ada di Sulawesi Selatan. Rastedt menambahkan, sejumlah kelompok Islam yang menganggap Hindu adalah animisme dan menganut kepercayaan politeisme tampaknya tidak mengganggu kegiatan yang dilakukan umat Hindu karena mereka sendiri juga sudah memiliki ranah untuk melaksanakan kegiatannya di Sulawesi Selatan (Rastedt, 2004: 186).

Salah satu hal yang perlu diperhatikan di Makassar adalah masalah penyediaan guru agama Hindu. Kadangkala dapat terjadi kasus misalnya, seorang guru berlatar belakang pendidikan fisika diharapkan mampu mengajarkan materi

pendidikan agama Hindu bagi para muridnya. Secara umum di wilayah Sulawesi Selatan, jumlah guru agama dari tahun ke tahun mulai menunjukkan adanya peningkatan meskipun masih kurang. Awalnya jumlah Guru Agama di Sulawesi Selatan sangat minim. Menurut data tahun 2010, jumlah siswa yang membutuhkan guru agama Hindu mencapai 30.000 orang yang tersebar di Kabupaten Sidrap, Toraja, Luwu Utara dan Timur, Wajo dan Kota Pare-pare serta Makassar, sementara tenaga pengajar atau guru agama Hindu di Kota Makassar hanya ada 10 orang. Untuk mengatasi hal tersebut PHDI mengadakan Pasraman sehingga siswa Hindu dapat belajar dan memperoleh nilai agama Hindu. Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan akan memberikan perhatian serius kepada permintaan pengangkatan guru agama Hindu ini dengan menanyakan kepada dinas pendidikan tentang penjabatan dan porsi guru agama di sekolah agar penempatannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, pemenuhan klasifikasi penentuan guru untuk agama Hindu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan sekolah, penjabatannya masih dalam pengaturan-pengaturan oleh dinas pendidikan (<https://Makassar.antaranews.com/berita/13580/phdi-sulsel-harapkan-penambahan-guru-agama-hindu>). Jumlah guru agama Hindu PNS di Makassar tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 72 Data Guru Agama Hindu PNS di Makassar Tahun 2018

No	Nama	Tempat Lahir	Sd	Kabupaten/ Kota
1	I Wayan Nentra, S.Sos	Anyar Sari	SD Ujung Pandang	Makassar
2	Sumartini, S.Pd	Gianyar	SD Kemala Bayangkari	Makassar
3	Ni Gst. Ayu Md Sari, S.Pd	Gianyar	SD Inp. Manuruki II	Makassar
4	Ni Lih Rencani, A.Ma	Bebetin	SD Inp. Daya	Makassar
5	Nyoman Kartini, A.Ma	Sidomakmur	SD Inp. Pampang II	Makassar
6	I Wayan Swardana, A.Ma	Bali	SD Neg. Sangir	Makassar
7	Ni Gs Ayu Kadek Kembar Triani	Jembrana	SD. Paccinang	Makassar
8	Cokorda Putrimas, A.Ma	Gianyar	SD Inp. Mallengkeri I	Makassar

Sumber : Bimas Hindu Makassar Tahun 2018

Untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Agama Hindu dan Kristen se-Kota Makassar berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti memberi bantuan berupa tunjangan Pembinaan Kesejahteraan Guru Sekolah Minggu setiap tahun. Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat menyerahkan bantuan bagi Guru Sekolah Minggu Kristen dan Hindu. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar dengan nomor 904/450.50/ tahun 2018 tentang pembentukan panitia peningkatan kesejahteraan Guru Sekolah Minggu Kristen dan Hindu se Kota Makassar. Penyerahan bantuan merupakan bentuk apresiasi Pemkot Makassar kepada para guru agama Kristen dan Hindu atas pengabdianannya dalam pembinaan mental spiritual masyarakat Kota Makassar serta diharapkan dapat meningkatkan semangat pengabdian guru dalam melayani masyarakat.

Peranan guru sangatlah penting dalam mendidik generasi Indonesia untuk menjadikan mereka lebih baik di masa depan. Penyerahan insentif tentunya akan memperbaiki dan meningkatkan sumber daya manusia serta kesejahteraan bagi guru tersebut, sehingga bermanfaat untuk pendidik maupun untuk anak didik. Bantuan insentif guru sekolah Minggu dan Hindu diberikan kepada 471 guru sekolah minggu dan 70 guru dari agama Hindu. Nilainya masing masing sebesar Rp.1.000.000 perorang. (<https://timurindonesia.com/2018/12/18/541-guru-sekolah-minggu-dan-hindu-Makassar-terima-insentif/>).

Pasraman di Makassar

Pasraman adalah lembaga pendidikan khusus bidang agama Hindu. Pada sekolah formal, agama Hindu diajarkan sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan di pasraman tidak sebatas ilmu pengetahuan, melainkan sebagai bentuk latihan disiplin spiritual dan latihan menata hidup yang baik. Kata pasraman berasal dari kata "*asrama*" (sering ditulis dan dibaca *ashram*) yang artinya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau pendidikan. Pendidikan pasraman menekankan pada disiplin diri, mengembangkan akhlak mulia dan sifat-sifat yang rajin, suka bekerja keras, pengekangan hawa nafsu dan gemar untuk menolong orang lain.

Pendidikan pasraman menjadi satu alternatif pendidikan

agama. Siswa yang tidak mendapatkan pendidikan agama di sekolah umum, bisa datang ke pasraman. Pendidikan Pasraman sangat penting bagi siswa Hindu di seluruh Indonesia. Kementerian Agama pun mengakomodasi Pendidikan Pasraman. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 56 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah mengakomodasi pendidikan agama dan keagamaan Hindu. Dalam KMA ini, pendidikan agama dan keagamaan Hindu disebut Pendidikan Pasraman.

Cikal bakal Pendidikan Pasraman telah diundangkan dalam PP No. 55 Tahun 2007. Bahkan, embrionya sudah ada dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Akan tetapi aturan pelaksanaan UU ini belum ada. Setelah tujuh tahun, Menteri Agama mengeluarkan aturan pelaksanaan melalui KMA tersebut. Pendidikan Pasraman dibagi dua yaitu Pasraman Formal dan Non Formal. Pasraman Formal meliputi: Pratama Widya Pasraman, Adi Widya Pasraman, Madyama Widya Pasraman, Utama Widya Pasraman; dan Maha Widya Pasraman. Sedangkan Pasraman Non Formal adalah pasraman yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Pesantian, Sad Dharma, Padepokan, Aguron-guron, Parampara, Guru Kula, dan bentuk lainnya yang sejenis. Pasraman Non formal diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.

Pasraman Non Formal dapat menyelenggarakan pendidikan kitab. Mereka dapat belajar dari satu kitab ke kitab yang lain. Hal ini dimungkinkan karena Pasraman Non Formal diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program. Ada Veda, Upanisad, Purana, Ramayana dan Mahabrata, dan seterusnya, tanpa batas usia dan tanpa batas waktu. Implikasi dari pendidikan pasraman adalah: kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, pembiayaan, dan program bagi siswa. Kebutuhan akan SDM terjadi karena secara kelembagaan pendidikan pasraman akan berkembang. Perkembangan ini tentunya harus dibarengi dengan pembiayaan seiring dengan penataan kelembagaan Pendidikan Pasraman. Implikasi berikutnya, anak-anak sejak dini akan mendapatkan pendidikan agama melalui program-program yang digelar oleh pasraman. (<http://phdi.or.id/artikel/pendidikan-pasraman-hindu>).

Untuk mencapai tujuan dari pendirian pasraman tersebut,

para guru pasraman di Makassar tak henti-hentinya memotivasi siswa-siswa Hindu. Pihak Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama sering datang langsung menyaksikan kegiatan siswa-siswa Hindu tersebut yang sangat antusias mengikuti pelajaran keagamaan yang diberikan. Para guru telah berupaya membina murid karena melalui pasraman ini mereka dapat mengetahui bakat dan kemampuan mereka seperti cipta lagu kreasi keagamaan.

Pasraman di Makassar dipimpin oleh Drs. Darmayasa, yang juga sebagai seorang dosen bidang kepariwisataan. Secara umum di wilayah Sulawesi Selatan ada beberapa pasraman yang didirikan untuk memberikan layanan pelajaran agama Hindu sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 73 Pasraman di Sulawesi Selatan

NO	NAMA PASRAMAN	ALAMAT	NAMA KETUA
1	Sarati Dharma	Morgomulio,Kec.Tommoni,Lutim	Wayan Astawa
2	Saraswati	Bone Pute,Kec.Burau, Lutim	Ida Bagus Kadek Tarka
3	Widya Dharma	Karambua,Kec.Wotu, Lutim	Wayan Sujanto, S.Pd.H
4	Bisma Sakti	Papuro, Kec.Wotu,Lutim	I Wayan Lomoniagara
5	Tri Dharma Santi Yoga	Kalaena Kiri,Kec.Kalaena, Lutim	Dewa Putu Mahendra
6	Sahita Dharma	Cendana Hitam, Kec.Tomoni Timur	I Putu Sudiana
7	Saraswati	Mantadulu,Kec.Angkona, Lutim	Anak Agung Bintara
8	Widya Dharma	Solo, Kec.Angkona, Lutim	I Ketut Nikantara
9	Dewi Gangga	Tawakua,Kec.Angkona,Lutim	Putu Swiasmayasa
10	Widya Paramita	Bali Rejo,Kec.Angkona,Lutim	I Dewa Gede Arbawa
11	Widya Dharma	Desa Kertaraharja	I Wayan Budayasa.
12	Karya Mudita	Lakawali, Kec. Malili	I Ketut Ranis
13	Dharma Satya Saraswati	Taripa, Kec,Angkona,Lutim	I Made Rai Susyanta
14	Widya Kerti	Sumber Agung,Kec.Kalaena	Made Dwija
15	Santi Dharma	Sidomakmur,Kec.Bone-Bone,Lutra	
16	Dewi Saraswati	Rawamangun,Kec.Sukamaju,Lutra	Made Sucita
17	Widya Bhakti	Sukadamai,Kec.Sukamaju,Lutra	I Made Suka Ar
18	Brahmacari	Mekarjaya,Kec.Mappadeceng,Lutra	I Wayan Kayan
19	Widya Saraswati	C. Putih III,Kec. Mappadeceng,Lutra	Wayan Nirta
20	Surya Dharma	C. Putih I,Kec.Mappadeceng,Lutra	I Ketut Suarsana
21	Dharma Asram Gayatri	Kapidi,Kec.Mappadeceng,Lutra	Ketut Artana
22	Rama Murti	Kapunna,Kec.Masamba,Lutra	I Ketut Sukarba
24	Dharma Bhakti	Putemata,Kec.Malangke,Lutra	Pan Luh Mastini

25	Widya Dharma	Beringin Jaya,Kec.Baebunta,Lutra	I Made Nendra
26	Widya Sastra	Giri Kusuma,Kec.Malangke Timur, Lutra	Made Witara
27	Jagaddhita	Lampuawa,Kec.Sukamaju,Lutra	Nyoman Nitro
28	Wiswa Dharma	Temuku,Kec.Bone-Bone,Lutra	I Gusti Made Jandem
29	Dharma Sastra	Desa Subur	
29	Dharma Suci	Uraso,Kec.Mappadeceng,Lutra	Nengah Reden
30	Sadhana Yoga	Sukamaju,Kec.Sukamaju	I Gursti Putu Arya Ariasa
32	Rante Tombang	Randang Batu, Makale Selatan	Rembon
33	Tanete Batu Sura'	Batusura,Kec.Saluputi,Tator	Pither Tumonglo
34	Pesanan Barra'	Manduru,Kec.Malimbong,Tator	Mathius Appulembang
35	Dewata	Rea,Kec.Simbuang,Tator	Sulaiman Bomba R
36	Parindingan	Pa'buaran,Kec.Makale Selatan	Yohanis Palngda
37	Mandira Taman Sari	Jl.Manggis,Kec.Bara,Wara Utara Plp.	I Ketut Darma
38	Parinyameng	Amparita,Kab.Sidrap	Soefarto.B, S.Ag
39	Widya Dharma G. Natha	Jln.P.Kemerdekaan 162 Makassar.	Drs. Darmayasa, M.Pd.

Sumber : Bimas Hindu Kota Makassar

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pasraman terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan berada di wilayah Luwu Timur sebanyak 16 pasraman, lalu diikuti di wilayah Luwu Utara 13 pasraman. Sedangkan di wilayah Palopo, Sidrap dan Makassar hanya ada satu buah pasraman.

Pasraman di kota Makassar biasanya berlokasi di sekitar pura dan dikenal juga dengan istilah sekolah minggu, sebagai contoh adalah pasraman di Pura Giri Natha (foto terlampir). SD, SMP dan SMA umum di Makassar masih banyak yang tidak memberikan pendidikan agama Hindu kepada siswanya. Oleh karena itu, pura menyediakan pelayanan pendidikan sekolah minggu yang memberikan pelajaran agama Hindu. Tidak mengherankan bila kemudian berdiri sejumlah yayasan sebagai penyelenggara pendidikan agama Hindu tersebut. Nilai agama Hindu yang dikeluarkan oleh sekolah minggu atau pasraman diakui oleh sekolah negeri. Hal ini tidak terlepas dari tercetusnya kerjasama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional yang mengeluarkan Surat Keputusan tentang pasraman agama. Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan Nasional tersebut menjamin bahwa nilai agama Hindu yang dikeluarkan oleh sekolah minggu atau pasraman untuk mengevaluasi murid-murid SD, SMP, SMA adalah sah dan

dapat digunakan sebagaimana mestinya.

C. POTENSI, TANTANGAN, DAN JALAN TENGAH

Tidak sedikit terjadi pernikahan antara orang Hindu dan orang lokal yang berbeda agama. Pernikahan ini biasanya diawali dengan proses penghinduan yang dikenal dengan *Upacara Sidiwedani*. Dengan proses upacara menjadi Hindu atau penghinduan ini maka diharapkan kedua mempelai mulai membina rumah tangga yang baru dibentuk dengan landasan-landasan ajaran Hindu seperti berdasarkan Kitab Bhagawadgita dan persyaratan lainnya yang dilakukan. Akan tetapi, tampaknya seringkali terjadi persoalan setelah mereka menempuh kehidupan berumah tangga, yaitu kurangnya pembinaan dari pihak suami atau istri tentang bagaimana menjadi umat Hindu yang baik. Bukannya tidak mungkin jika ada beberapa individu yang sudah masuk Hindu kemudian kembali menganut agama asalnya karena mereka membayangkan sulit dan kompleksnya menjadi umat Hindu, padahal ini terjadi karena kurangnya pembinaan terhadap mereka.

Masalah lain yang dihadapi umat di Makassar adalah mengenai data jumlah umat di wilayah tersebut. Saat ini diperkirakan terdapat sebanyak 240 KK (Kepala Keluarga) beragama Hindu di Makassar. Namun demikian, masih diragukan berapa jumlah pasti umat Hindu yang ada di Makassar. Ini disebabkan karena adanya kesimpangsiuran antara data dari Badan Statistik Makassar dan data yang dimiliki oleh PHDI Makassar. Oleh karena itu, kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mendata ulang jumlah riil penduduk beragama Hindu di kota ini. Sampai tulisan ini dibuat, umat masih berupaya melakukan pendataan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Hambatan lainnya, hingga saat ini umat Hindu merasakan kesulitan dalam membangun tempat ibadah seperti pura. Sejumlah pertemuan telah dilakukan dengan pihak pemerintah Kota Makassar, namun masih terjadi kendala yang berkaitan dengan pemberian izin pembangunan pura di beberapa tempat. Hingga kini, hanya ada satu pura Hindu di Kota Makassar yaitu Pura Giri Natha. Untuk itu, diperlukan penyamaan persepsi

dengan adanya keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia, sehingga keinginan mengadakan pembangunan pura Hindu di sebuah wilayah tidak mengalami kendala lagi di masa mendatang.

Sebagaimana halnya dengan wilayah lainnya di Indonesia apabila ada umat yang menikah dengan etnis selain etnis Bali biasanya mereka melapor kepada lembaga-lembaga keagamaan Hindu yang ada di Makassar. Apabila ada masalah kedukaan yang menimpa salah seorang warga Hindu yang berasal dari Bali, biasanya mereka melaksanakan pekerjaan ritual dan keagamaan dibantu oleh sesama warga Hindu di Makassar. Umat sudah memiliki *rong tiga*, dan apabila memungkinkan, mereka membawa jenazah orang yang meninggal itu ke wilayah asalnya di Bali. Bila jenazah tidak dipulangkan ke Bali, maka ritual keagamaan yang berkaitan dengan kremasi akan diselesaikan di sebuah krematorium milik bersama umat Hindu dan Kristen di Makassar.

Hingga saat ini, kreativitas dan inovasi kegiatan keumatan Hindu dilaksanakan oleh kelompok pemuda yang terangkum dalam kegiatan Peradah di Makassar. Di sisi lain, pemerintah daerah seperti Walikota Makassar juga turut mendukung masyarakat Hindu melalui bantuan renovasi pura. Beberapa lembaga umat Hindu lainnya juga berperan dalam menyokong kegiatan keumatan. Selain itu, peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga dirasakan sangat penting. Misalnya, apabila ada kegiatan Idul Fitri di Kota Makassar, beberapa tokoh umat Hindu akan diundang untuk menghadiri acara perayaannya bersama warga non Hindu lainnya di Makassar. Sebagai contoh adalah pelaksanaan *Open House* di rumah Gubernur Sulawesi Selatan dan Walikota Makassar. Tambahan pula, kegiatan perayaan Natal yang dilaksanakan sekali dalam setahun juga dihadiri oleh umat Hindu dan umat beragama lainnya di Kota Makassar.

Kegiatan umat Hindu di Makassar yang berkaitan dengan ritual dan upacara keagamaan seperti otonan dan pernikahan umumnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Kegiatan ini sangat menonjol sejak tahun 2006 di Kota Makassar. Namun demikian, bila ada warga yang tidak memiliki rumah mereka

dapat melaksanakan kegiatan ritual dan keagamaannya seperti otonan, satu bulan tujuh hari, di Pura Giri Natha. Dengan demikian dapat dikatakan betapa penting makna dan fungsi Pura Giri Natha dalam pelaksanaan kegiatan ritual dan upacara keagamaan di Kota Makassar.

Untuk kegiatan tertentu, warga Hindu setempat juga berinisiatif untuk mengumpulkan iuran namun tidak bersifat wajib dan permanen. Bila ada umat yang tidak membayar iuran, tidak akan menerima sanksi adat, sebab yang terpenting adalah menjaga kerukunan, kesolidan, dan kebersamaan, terlebih mereka merupakan minoritas di Makassar. Oleh karenanya, umat yang tidak menyumbang iuran juga tetap bisa berkontribusi dengan menyumbang tenaga bila ada kegiatan ritual atau upacara keagamaan tertentu.

Terhadap masyarakat non Hindu, umat se-Dharma di Makassar secara aktif juga senantiasa menjaga keharmonisan dan toleransi. Misalnya saja ketika bulan puasa, umat Hindu di Makassar membagi-bagikan takjil di depan Pura Giri Natha. Takjil dibagikan untuk umat muslim yang sedang menjalani Ibadah Puasa bertujuan untuk meningkatkan tali kasih antar sesama. Kegiatan bagi-bagi takjil ini telah dilaksanakan oleh pemeluk agama Hindu selama beberapa tahun terakhir. Pada bulan Ramadan tahun 2019 mereka membagikan 550 Takjil ke pengendara yang melintas di depan Pura Giri Natha Makassar. Dalam kegiatan itu, tak hanya umat Hindu Kota Makassar yang ikut membagikan takjil kepada pengguna jalan, turut serta juga mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin sebagai bentuk solidaritas mereka kepada sesama umat beragama. Kegiatan ini bekerjasama antara Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Makassar, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Makassar, serta Pemuda Hindu Kota Makassar (<https://www.liputan6.com/ramadan/read/3970393/umat-hindu-bagi-bagi-takjil-kepada-warga-muslim-Makassar>).

Kegiatan Umat Hindu di Makassar lainnya juga dapat dilihat dari Panitia Pesamuan Agung PHDI, dalam rangka Rapat Kerja Nasional PHDI Tahun 2018 audiensi dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Audiensi tersebut dihadiri oleh Pengurus Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Provinsi Sulawesi

Selatan, Peradaha Kota Makassar dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDHI) Sulawesi Selatan dan Pembimas Hindu Kementerian Agama RI. Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah menyampaikan pihaknya telah merancang pembangunan taman di kawasan *Central Point of Indonesia* (CPI) yang di dalamnya akan dibangun rumah ibadah berbagai agama termasuk pura untuk umat Hindu. Hal ini dimaksudkan agar di Makassar selalu tercipta kehidupan yang harmonis dan aman. Hal ini secara langsung maupun tidak juga akan berdampak terhadap investasi di kota itu sehingga dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, panitia Pesamuan Agung juga menyampaikan agar Gubernur Sulawesi Selatan mendukung kegiatan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (Pakemnas) yang akan diadakan tahun 2020. Kegiatan ini diharapkan akan mempromosikan kondisi Sulawesi Selatan karena akan dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah atau provinsi di Indonesia <http://phdi.or.id/berita/gubernur-sulsel-terima-audiensi-panitia-pesamuan-agung-phdi-tahun-2018>.

Lembaga Agama Hindu di Makassar

Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur hidup/kehidupan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dalam hidup beragama. Selain itu pengertian lembaga agama adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud memajukan kepentingan hidup beragama yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara umum, lembaga agama adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud untuk memajukan suatu kepentingan hidup beragama yang ada didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun lembaga agama Hindu di Kota Makassar yang memegang peranan penting sebagaimana disebutkan di atas antara lain Parisada Hindu Dharma (PHDI), Lembaga Dharma Gita (LPDG), Wanita Hindu Dharma (WHDI), Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDHI), dan PRAJANITI Kota Makassar. Data mengenai lembaga Hindu yang ada di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 74. Data Kelembagaan Agama Hindu Sulawesi Selatan
Tahun 2011

NO	KABUPATEN/ KOTA	LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN						
		PHDI	LPDG	WHDI	PERA DAH	KMHDI	PRAJA NITI	YAYA SAN
1	Tingkat Provinsi	1	1	1	1	1	1	-
2	Makassar	1	1	1	1	-	-	1
3	Sidrap	1	1	-	-	-	-	-
4	Tana Toraja	1	-	1	1	-	-	1
5	Palopo	1	1	1	1	1	-	-
6	Luwu Utara	1	1	1	1	-	-	1
7	Luwu Timur	1	1	1	1	-	-	1
8	Goa	1	-	-	-	-	-	-
9	Pinrang	1	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		9	7	7	6	2	1	5

Sumber : Bimas Hindu Kota Makassar Tahun 2011

Kegiatan lembaga agama Hindu yang rutin diadakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) rutin mengadakan kegiatan lembaga agama Hindu. Makassar pernah menjadi tuan rumah dari seminar pra Mahasabha di Hotel Grand City Makassar selama dua hari tanggal 5-6 Desember 2015. Seminar ini diselenggarakan oleh panitia Mahasabha berserta *Steering Committee* (SC) untuk mencari masukan dari parisada-parisada daerah demi kemajuan organisasi tertinggi agama Hindu ke depannya. Seminar ini diikuti sekitar 80 peserta yang merupakan perwakilan dari parisada provinsi se-Sulawesi (<http://phdi.or.id/berita/phdi-gelar-seminar-pra-mahasabha-xi-di-grand-city-Makassar>)

Penyuluh Agama Hindu di Makassar

Penyuluh agama diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui ajaran agama. Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya

Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah Penyuluh Agama digunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorar (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama. Penyuluh Agama Hindu Non PNS memiliki tugas sebagai berikut. melaksanakan penyuluhan agama dalam arti yang luas, yaitu pembimbingan dan penerangan di bidang agama Hindu; memberikan teladan kepada umat Hindu melalui tindakan, ucapan dan pikiran; sebagai perpanjangan tangan Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama dalam menyampaikan visi, misi, program dan kegiatan Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama; mengembangkan berbagai metode, materi dan media penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama; melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pembimas Hindu.

Penyuluh agama juga menjalankan beberapa fungsi, yakni fungsi informatif, yaitu sebagai tempat umat untuk memperoleh informasi tentang visi, misi, program dan kegiatan Ditjen Bimas Hindu, Kementerian Agama serta isu-isu aktual berkenaan dengan kehidupan keagamaan; fungsi edukatif, yaitu sebagai soko guru yang mendidik umat sesuai dengan kitab suci Weda dan Susastera Weda lainnya; fungsi konsultatif, yaitu sebagai tempat bertanya dan mengadu bagi umat dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah, khususnya masalah keagamaan; fungsi advokatif, yaitu memberikan pembelaan kepada kelompok sasarannya dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi, baik secara internal maupun eksternal (<http://bimashindusultra.blogspot.com/2017/01/apa-ya-tugas-dan-fungsi-penyuluh-agama.html>). Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah penyuluh Agama Hindu di Kota Makassar:

Tabel 75. Data Penyuluh Agama di Makassar

NO	NAMA	L/P	PENDI-DIKAN	LOKASI BINAAN	OBYEK BINAAN
1	Dewa Made Suji	L	SMA	Kota Makassar	Para Sarati banten
2	Gusti Ngurah Alit	L	SMA	Kota Makassar	Umat Hindu Kota Makassar
3	I Gede Sudarpa, SE	L	S1	Kota Makassar	Umat Hindu Tempek Goa

4	Malakka	L	S1	Kota Makassar	Remaja Hindu Alukta
5	Made Wena, ST	L	S1	Kota Makassar	Umat Hindu Biringkanaya
6	Putri Adnyani	P	SMA	Kota Makassar	Anak Usia Dini
7	I Made Dina	P	SMA	Kota Makassar	Umat Hindu anggota TNI POLRI
8	Gusti Putu Carmisuati	P	SMA	Kota Makassar	Umat hindu Tempek Cendrawasih
9	Komang Rinten	L	S1	Kota Makassar	Umat Hindu Tempek Toddopoli
10	Juliet Astiti Awighna	P	S1	Kota Makassar	Remaja Hindu Tingkat SMP
11	Ni Wayan Suartini	P	DIII	Kota Makassar	Wanita Hindu Kota Makassar
12	Ni Kadek Riza Diwyani	P	SMA	Kota Makassar	KMHDI

Sumber : Bimas Hindu Kota Makassar

Permasalahan keumatan lainnya di Sulawesi Selatan yang tidak kalah kompleks yakni terkait dengan nasib para penyuluh agama Hindu ini. Di tengah tugas dan fungsi yang sedemikian mulia, ada beberapa tantangan yang mereka hadapi, di antaranya : sarana dan prasarana sebagai penunjang para penyuluh, honor penyuluh sangat minim dibanding dengan tugas penyuluh yang wilayahnya sangat luas, kualitas setiap SDM juga menjadi tantangan sebab masih ada penyuluh yang belum mampu memberikan Dharma Wacana secara baik.

Untuk meningkatkan kualitas Penyuluh Agama Hindu berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu antara lain mengadakan Kegiatan orientasi Pembinaan dan Pengembangan Penyuluh Agama Hindu Non PNS. Kegiatan orientasi ini diikuti oleh para penyuluh agama Hindu Non PNS sebanyak 40 orang yang berasal dari enam kabupaten/kota yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Tana Toraja, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Materi orientasi meliputi Tugas Penyuluh dan Permasalahan keumatan, Teknik Dharma Wacana yang Efektif, Pengembangan Materi Bimbingan dan Penyuluhan, dan Pemanfaatan IT sebagai Media Penyuluhan.

Dalam memberikan Dharma Wacana, seorang penyuluh dituntut untuk memerhatikan sikap dan penampilan (pakaian, mimik, akting, santai, penguasaan materi) serta memiliki keyakinan yang mantap. Seorang penyuluh yang akan

memberikan bimbingan atau penyuluhan baik melalui konsultasi, dharma wacana atau dialog-dialog, harus dapat mengembangkan materi yang dibawakan. Karena itu seorang penyuluh harus membuat materi penyuluhan sebelum melakukan penyuluhan dengan menggunakan Teknologi Informasi (IT). Untuk itu, para penyuluh ini juga dibimbing untuk memanfaatkan teknologi informasi yang efektif sehingga pelaksanaan penyuluhan dapat terlaksana dengan tidak tergantung waktu dan tempat, cakupan sangat luas, pendistribusian yang cepat dan keragaman cara penyampaian. IT yang dapat dimanfaatkan bagi seorang penyuluh adalah internet atau mesin pencari informasi/materi penyuluhan serta media sosial seperti *line*, *whatsapp*, *facebook* dan lain sebagainya. Selain itu, penyuluh juga diajak berdiskusi untuk mendalami permasalahan keumatan pada masing-masing wilayah penyuluhan. ([http:// bimashindusulsel.blogspot.com/2016/06/orientasi-pembinaan-dan-pengembangan.html](http://bimashindusulsel.blogspot.com/2016/06/orientasi-pembinaan-dan-pengembangan.html))

Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu juga melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluh Agama Hindu Non PNS. Bimtek rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Penyelenggara Hindu Kementerian Agama. Masing-masing kabupaten di Sulawesi Selatan mengirim perwakilannya untuk mengikuti kegiatan Bimtek tersebut. Melalui Bimtek ini diharapkan para penyuluh memiliki strategi dalam melakukan penyuluhan. Ditegaskan bahwa senjata seorang penyuluh adalah pengetahuan. Penyuluh juga merupakan seorang pemimpin (pemimpin agama). Untuk itu, seorang penyuluh harus mempunyai perencanaan karena perencanaan adalah bagian dari strategi yang dilakukan sebagai salah satu upaya menciptakan penyuluh yang memiliki profesionalisme dan mampu berinovasi sehingga dapat menjadi pemimpin agama yang kharismatik. (<https://sulsel.kemenag.go.id/artikel-4744-penyuluh-agama-hindu-harus-profesional-berinovasi-dan-berkarismatik>)

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Ramstedt, Martin. 2004. "From Grooter Toradja to 'Toraja Raya': Emergence Ethnic Identity, expansionism and political struggle in Tana Toraja and Luwu', South Sulawesi", dalam *Martin Ramstedt, Hinduism in Modern Indonesia: A Minority religious between Local, National and Global Interest*. London and New York: Routledge Curzon.

Roth, Dick. 2004. "The Hinduization of Local Traditions in South Sulawesi", dalam *Martin Ramstedt, Hinduism in Modern Indonesia: A Minority religious between Local, National and Global Interest*. London and New York: Routledge Curzon.

Sumber Internet:

<https://nasional.kompas.com/read/2011/11/14/04524416/sulawesi.miliki.lebih.dari.4.222.jenis.flora>

<https://www.faanadanflora.com/hewan-endemik-pulau-sulawesi/>

<http://beritakotaMakassar.fajar.co.id/berita/2019/03/05/hari-umat-hindu-gelar-upacara-melasti/>

<http://inputrakyat.co.id/gelar-dharmasanti-nyepi-dan-open-house-ini-harapan-parisada-hindu-dharma-kota-Makassar/>

<http://phdi.or.id/berita/gubernur-sulsel-terima-audiensi-panitia-pesamuhan-agung-phdi-tahun-2018>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/pengertian-lembaga-agama-fungsi-tujuan-macam-macam-lembaga-agama-terlengkap.html>

<http://phdi.or.id/berita/phdi-gelar-seminar-pra-mahasabha-xi-di-grand-city-Makassar>

<https://Makassar.antaraneews.com/berita/13580/phdi-sulsel-harapkan-penambahan-guru-agama-hindu>

<https://timurindonesia.com/2018/12/18/541-guru-sekolah-minggu-dan-hindu-Makassar-terima-insentif/>

<http://phdi.or.id/artikel/pendidikan-pasraman-hindu>

<http://bimashindusultra.blogspot.com/2017/01/apa-ya-tugas-dan-fungsi-penyuluh-agama.html>

<http://bimashindusulsel.blogspot.com/2016/06/orientasi-pembinaan-dan-pengembangan.html>

<https://sulsel.kemenag.go.id/artikel-4744-penyuluh-agama-hindu-harus-profesional-berinovasidan-berkarismatik>

<Sejarahharirayahindu.blogspot.com/2011/11/pura.html>

<https://www.liputan6.com/ramadan/read/3970393/umat-hindu-bagi-bagi-takjil-kepada-warga-muslim-Makassar>

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	ALAMAT
1	I Wayan Suradnya	58	Penunggu Pura	Makassar
2	Pndt I Wayan Nentra,S.Ag	58	Pemangku Pura	Makassar
3	Simon Kendek Paranta	55	Pembimas Hindu	Makassar
4	Putu Arya	58	Pegawai Koperasi Giri Artha	Makassar
5	Ni Putu Susanti	55	Penunggu Pura	Makassar
6	Sri Rahayu	40	Pengunjung Pura	Mataram



Foto 28. Pura Giri Natha di Makassar (Dokumen milik peneliti)



Foto 29. Pintu Gapura Pura Giri Natha di Makassar (Dokumen milik Peneliti)

Foto 30. Pintu Masuk Pemedalan Pura Giri Natha di Makassar
(Dokumen milik Peneliti)



Foto 31. Patung Ganesa di halaman Pura Giri Natha



Foto 32. Koperasi Simpan Pinjam Giri Natha



Foto 33. Bale Wantilan Pura Giri Natha
Dokumentasi Milik Peneliti



Foto 34. Suasana Focus Group Discussion dengan tokoh Hindu di Kantor Dinas Agama Hindu di Makassar ((Dokumen milik peneliti)

Foto 35. Aula Pertemuan di Pura Giri Natha

**PETA POTENSI SOSIAL, BUDAYA, AGAMA,
PENDIDIKAN, EKONOMI, POLITIK
UMAT HINDU DI
NUSA TENGGARA BARAT**

**I Putu Gelgel
I Gusti Agung Paramita**



Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (23,51%).

Nusa Tenggara Barat terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9 °g 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut, sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian

3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m (www.ntbprov.go.id). Sungai-sungai di Nusa Tenggara Barat dikelompokkan ke dalam dua wilayah sungai, yaitu Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Lombok dan WS Sumbawa. WS Lombok terdiri atas 197 DAS dan WS Sumbawa 555 DAS.

Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° – 32,1° C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6° - 24,5°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan Nopember. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48 - 95 %.

A. KEBERADAAN UMAT DAN BUDAYA HINDU DI NUSA TENGGARA BARAT

Sejarah kedatangan masyarakat Bali ke Lombok memiliki beragam versi. Jika kita telisik literatur historis tentang kedatangan orang Bali ke Lombok dan keterangan masyarakat Hindu di Lombok perihal sejarah kedatangannya, terdapat perbedaan narasi historis yang substantif. Kendati demikian, justru diferensiasi pandangan historis ini menarik untuk disajikan dalam penelitian ini. Karena masyarakat Lombok memiliki alasan tersendiri soal perbedaan pemahaman sejarah tentang keberadaan umat Hindu di Lombok.

Awal kedatangan umat Hindu di Lombok diidentikkan dengan kedatangan seorang pendeta bernama Dang Hyang Nirartha. Keyakinan ini diperkuat dengan dugaan bahwa Dang Hyang Nirartha datang ke Lombok sekitar abad ke-15 dengan pengawalan dari perahu yang diberikan oleh Raja Gelgel.

Dang Hyang Nirartha disebut-sebut berangkat dari Pantai Kusamba menuju ke Lombok. Melintas ke Nusa Penida di bagian timur selat Badung. Saat itu permulaan musim barat, saat dimana tiupan angin dari barat menghidupkan layar perahu (Sastrodiwiryo, 2008). Kendati demikian, tidak semua tokoh Hindu di Lombok menyetujui prediksi historis ini. Seperti misalnya Bapak Metu Dahana meyakini jika umat Hindu sudah ada di 'Bumi Sasak' sebelum Dang Hyang Nirartha datang ke Lombok.

Sebagaimana diketahui, hubungan antara Lombok dan Bali memang sudah ada sejak zaman Gelgel. Namun, menurut Putra Agung (Agung, 2006) pada tahun 1640 Makasar merebut Lombok dari kekuasaan Gelgel, karena antara tahun 1633-1640 Kerajaan Gelgel mengalami kemunduran di bawah pemerintahan Dalem Dimade.

Hubungan politik antara Bali dan Lombok dilanjutkan oleh Karangasem dengan dua kerajaan besar yang ada di Lombok yakni akhir abad XVII yaitu Kerajaan Selaparang di Lombok Timur dan Kerajaan Pejanggik di Lombok Tengah. Hubungan ini dimulai ketika dua kerajaan tersebut mengalami kekacauan sehingga situasi ini dimanfaatkan oleh kerajaan Karangasem untuk mengintervensi. Menurut *Babad Lombok* intervensi ini bermula dari adanya konflik antara Patih Banjar Getas dengan Raja Selaparang. Raja Selaparang mengutus Banjar Getas pergi ke Bali untuk mencari mayang putih yang digunakan sebagai obat. Setelah banjar Getas pergi ke Bali, Raja menyuruh panggil istri Banjar Getas yang bernama Dyah Candra Kusuma ke istana untuk diperistri. Ketika banjar Getas kembali, ia sadar jika dirinya telah ditipu, karena itulah ia memberontak terhadap Raja Selaparang dan meminta bantuan kepada Raja Karangasem. Akhirnya kerajaan Selaparang dan Pejanggik dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Karangasem.

Perihal sejarah tentang sosok bernama Banjar Getas ini memang terdapat beragam versi. Dalam versi *Babad Selaparang* disebutkan bahwa Raja Selaparang meminta bantuan Raja Banjarmasin sehingga akhirnya Banjar Getas melarikan diri ke Pejanggik. Karena kecerdasannya ia diangkat menjadi adipati kerajaan oleh Raja Pejanggik Pembani Mas Meraja Kusuma. Hal ini menyebabkan hubungan Selaparang dan Pejanggik menjadi retak. Ketika ia mengabdikan diri di Kerajaan Pejanggik, terjadilah perselisihan antara Banjar Getas dan istrinya yang kedua bernama Lala Junti sehingga pada akhirnya ia diusir.

Dengan hati yang sedih ia pergi mengembara ke hutan Memenak, kemudian dari tempat itu ia berlayar ke Bali. Setelah ia sampai di Karangasem, ia menceritakan kepada Raja Karangasem tentang kekalahannya melawan Raja Selaparang dan memohon bantuan Raja Karangasem. Sejak saat itulah Raja Karangasem

berangsur-angsur menaklukkan Lombok.

Versi berbeda juga peneliti dapatkan di kalangan tokoh umat Hindu di Kota Mataram. Salah satunya adalah Bapak Made Metu Dahana yang juga gencar menulis buku tentang hubungan kebudayaan Bali dan Sasak, Lombok. Menariknya, versi lain hubungan antara Karangasem dan Lombok ini disampaikan untuk menepis tuduhan orang Bali di Lombok sebagai seorang penjajah. Stigma sebagai penjajah ini berdampak pada terbangunnya sikap sinisme orang Lombok terhadap pendatang dari Bali.

Menurut Metu Dahana, diceritakan Raja Selaparang memiliki istri yang konon sangat cantik. Raja Selaparang juga punya patih bernama Banjar Getas. Patih ini dianggap pintar dan sakti. Berbeda dengan versi Babad di atas, Banjar Getas justru diceritakan sebagai orang yang pandai melukis. Ia diperintahkan untuk melukis istri Raja Selaparang. Sayangnya, saat melukis, ada goresan tinta di bawah pusar istri Raja. Goresan ini pun diketahui oleh Raja Selaparang.

Raja pun marah besar. Ia berkeinginan untuk membunuh Banjar Getas. Namun karena Banjar Getas sangat sakti, Raja tidak berani melakukan tindakan tersebut. Akhirnya Raja Selaparang meminta bantuan ke Bali khususnya ke Karangasem. Raja meminta kepada penguasa di Karangasem agar membunuh Banjar Getas yang dituduh berbuat tidak senonoh dengan istrinya.

Karena sakti, Patih Banjar Getas pun mengetahui rencana Raja Selaparang yang meminta bantuan kepada Raja Karangasem. Begitu diketahui akan ada rombongan Raja Karangasem ke Lombok, Banjar Getas sudah bersiap. Ia pun pura-pura mincing di pesisir pantai. Singkat cerita datanglah rombongan dari Bali. Rombongan ini secara tidak sengaja bertemu dengan Banjar Getas yang pura-pura mincing. Salah satu rombongan mendekatinya dan bertanya tentang tali yang digunakan untuk mancing. Saat itu, Banjar Getas memberi tahu jika tali itu disebut ampen (cikal bakal nama Ampenan). Setelah menjawab, Banjar Getas pun balik bertanya kepada rombongan tersebut.

Rombongan pasukan dari Karangasem menceritakan maksud dan kedatangannya ke Lombok untuk mencari Banjar

Getas yang diceritakan tidak baik terhadap Raja Selaparang. Jadi pasukan Karangasem ditugaskan untuk membunuh Banjar Getas. Mendengar informasi tentang rencana pembunuhan dirinya, Banjar Getas pun menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang kecemburuan Raja Selaparang.

Akhirnya Raja Karangasem mencari informasi yang sebenarnya terkait dengan konflik antara Banjar Getas dan Raja Selaparang. Dari hasil berburu informasi tersebut, Raja banyak mendengar tentang kesalahan Raja Selaparang, bukan Banjar Getas. Lalu Raja bertanya kepada si nelayan (Banjar Getas yang menyamar) di mana Banjar Getas. Lalu si nelayan pun menjawab jujur bahwa dirinya adalah Banjar Getas yang dicari.

Setelah mengetahui Banjar Getas yang sebenarnya, Raja Karangasem pun mencari Raja Selaparang. Versi Lombok Timur dan Sasak, sampai di Selaparang ternyata raja sudah tidak ada. Menurut keyakinan raja sudah *moktah* atau moksa – atau menghilang dengan tidak meninggalkan badan kasarnya. Pada prinsipnya sejarah ini diwacanakan untuk membangun citra bahwa Raja Selaparang tidak pernah kalah perang. Akhirnya karena Raja dianggap moksa, maka dikuasailah Lombok oleh orang Bali. Lombok Barat juga dikuasai. Pada saat itulah menurut Metu Dahana, orang Bali mulai ada di Lombok. Versi ini memang dibuat dengan tidak membangun narasi kekalahan atau kemenangan.

Ini adalah salah satu bentuk strategi kultural para tokoh umat Hindu di Lombok untuk merajut kembali hubungan kekerabatan antara orang Lombok dan Bali. Melalui cerita versi ini, mereka sama-sama tidak merasa dikalahkan atau menjadi pemenang, begitu pula tidak ada yang merasa dijajah atau dituduh menjadi penjajah. Bahkan cerita ini sempat ditulis oleh Metu Dahana di Koran harian di Lombok – dan menurutnya tidak ada yang melakukan protes terhadap cerita yang ditulisnya itu. Dalam artian, baik orang Lombok maupun orang Bali sama-sama menerima cerita versi itu.

Tidak berakhir di Metu Dahana, narasumber lain yakni Mangku Gde Tapak, seorang Mangku Dalang dari Karangasem yang ditemui di Lingkungan Karang Kelebut, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram, pun memiliki

versi yang berbeda. Diceritakan Banjar Getas bertemu dengan Raja Karangasem dan mengetahui dirinya sedang dicari-cari. Saat pertemuan tersebut, Banjar Getas menyampaikan kepada Raja Karangasem bahwa sangat mudah membunuh orang yang bernama Banjar Getas. Namun, tidak ada manfaat dan keuntungan jika Raja Karangasem hanya bermaksud membunuh Banjar Getas di Lombok. Ibarat Raja memburu nyamuk yang tiada artinya.

Pada saat itu, Banjar Getas menyampaikan, alangkah baiknya Raja berhadapan dengan Raja Selaparang yang memiliki kekuasaan, daripada mengotori tangan membunuh Banjar Getas. Mendengar celoteh Banjar Getas, Raja Karangasem pun termenung dan membenarkan pernyataan Banjar Getas jika tiada berarti jika ke Lombok hanya bermaksud membunuh Banjar Getas. Provokasi yang disampaikan Banjar Getas berbuah perang antara Raja Karangasem dan Raja Selaparang. Kekalahan pun ada di pihak Selaparang. Jika dalam cerita sebelumnya dikatakan bahwa Raja Selaparang 'menghilang' tanpa jejak, dalam versi ini dipertegas bahwa Raja Selaparang terbunuh oleh Raja Karangasem.

Terbunuhnya Raja Selaparang membuka kesempatan untuk Banjar Getas *Ngadeg Nata* (naik tahta sebagai Raja). Namun Kesempatan tersebut tidak diambilnya dan meminta kepada Raja Karangasem agar menjadi Raja di Selaparang. Pada saat itulah, menurut versi ini, Raja Karangasem memerintah di Lombok. Raja mendapat dukungan penuh dari Banjar Getas untuk menjadi Raja di sana. Setelah itu ada pembagian wilayah, khusus untuk orang Bali berada di wilayah Lombok Barat, Kota Mataram, dan Lombok Timur.

Berdasarkan penelusuran informasi historis tersebut, bisa dijelaskan fase kedatangan orang Bali ke Lombok yakni *pertama* kedatangan Dang Hyang Nirartha, jauh sebelum Raja Karangasem. *Kedua*, tahapan ekspedisi Raja Karangasem ke Lombok. Ekspedisi ini memang tidak dilakukan seketika tetapi secara bertahap. Pada saat itu, Kerajaan Karangasem dan masyarakat Lombok membangun peradaban di Lombok. Terbukti Kota Mataram ini adalah peradaban yang dibangun bersama dengan warga Lombok, di Cakra misalnya, perkampungan itu

ditata dengan cukup bagus. Menurut Ketua PHDI Provinsi NTB, I Gde Mandra, itu semua adalah model yang dibangun oleh Raja Karangasem.

Ketiga, berangkat dari pemecahan Provinsi Sunda Kecil, dulu ibukotanya di Singaraja. Tahun 1958 Bali berpisah dengan NTB dan NTT dalam sistem pemerintahan. Tahun 1958 orang-orang Lombok belum bisa diharapkan memegang kendali birokrasi, banyak orang Bali menjadi pejabat di sini. Pada fase ini, kedatangan orang Bali ke Lombok karena keperluan tenaga-tenaga birokrasi.

Keempat, letusan dahsyat Gunung Agung pada tahun 1963. Pada saat itu banyak orang Bali yang kena dampak langsung dari letusan merantau ke luar Bali, salah satunya ke Lombok. Orang Bali yang dominan mengungsi ke Lombok adalah dari Kabupaten Karangasem dan Klungkung. Ini bisa dikatakan fase mengungsi lalu tinggal menetap di Lombok.

Terakhir, adalah perpindahan biasa saja, karena pekerjaan, ditugaskan oleh Negara di wilayah Lombok. Memang harus diakui, setiap fase kedatangan membawa kultur yang berbeda. Dari kedatangan-kedatangan ini sudah pasti akan terjadi akulturasi budaya, bahkan banyak sekali peradaban orang sasak dipengaruhi oleh orang Bali.

Bahkan di Lombok ada empat tingkatan warga, ada warga kelas satu: satu suku satu agama, sementara warga kelas dua; ada yang tidak satu suku tapi satu agama, lanjut warga kelas tiga bukan satu suku, bukan satu agama, seperti misalnya orang Kristen, China, terakhir warga kelas empat adalah orang Bali, bukan satu agama, tidak satu suku, dan pernah “menjajah.”

Umat Hindu Kini

Memang tidak mudah menelusuri data umat Hindu di Nusa Tenggara Barat, selain kantong-kantong (*enclave*) Hindu dari satu tempat ke tempat lainnya cukup jauh jaraknya, pendataan juga belum dilakukan secara lengkap, menyimak angka kelahiran dan kedatangan umat Hindu ke Nusa Tenggara Barat sangatlah dinamis. Tetapi peneliti mencoba mengorek data resmi dari Kantor Kementerian Agama Provinsi NTB. Peneliti mendapatkan data tentang keberadaan umat Hindu dari Lombok sampai ke

Sumbawa.

Berdasarkan data resmi dari Kantor Kementerian Agama Provinsi NTB tahun 2018, jumlah umat Hindu di NTB tercatat sebanyak 164.604 umat dengan rincian yakni di Kota Mataram sebanyak 68.752 orang umat, Kabupaten Lombok Utara 20.788, di Kabupaten Lombok Barat 45.085 orang, di Kabupaten Lombok Tengah 7.100 orang, Kabupaten Lombok Timur 1.196 orang, Kabupaten Sumbawa Barat 1.278, Kabupaten Sumbawa 18.602, Kabupaten Dompu 4.355, Kabupaten Bima 1.390, Kota Bima 1.058 orang umat.

Data statistik tersebut menunjukkan bahwa jumlah umat Hindu terbanyak berada di Kota Mataram, sedangkan jumlah terendah berada di Kota Bima. Berikut tabel data umat Hindu di Nusa Tenggara Barat.

Tabel 76: Jumlah Umat Hindu di Nusa Tenggara Barat

No.	Kab/ Kota	Jumlah Umat Hindu
1	Kota Mataram	68.752
2	Kabupaten Lombok Utara	20.788
3	Kabupaten Lombok Barat	45.085
4	Kabupaten Lombok Tengah	7.100
5	Kabupaten Lombok Timur	1.196
6	Sumbawa Barat	1.278
7	Sumbawa	18.602
8	Dompu	4.355
9	Kabupaten Bima	1.390
10	Kota Bima	1.058

Sumber: Kementerian Agama Provinsi NTB

Interaksi dengan Masyarakat Lokal

Derasnya arus migrasi penduduk ke Lombok, meniscayakan Lombok menjadi miniatur multikultur, multietnis, dan agama. Para pendatang dominan menetap di Kota-kota seperti halnya Mataram, Cakranegara, Ampenan, Praya dan Selong. Umat Islam yang ada di Kota ini juga bukanlah orang asli Lombok, melainkan para migran yang datang ke Lombok, bahkan mereka ada yang dari Bali.

Suku terbesar yang mendiami pulau Lombok adalah suku Sasak, terutama di Lombok Timur dan Tengah, serta sebagian

tempat di Lombok Barat. Mereka adalah kaum pribumi yang umumnya menganut agama Islam, karenanya, suku Sasak identik dengan Islam. Suku Sasak muslim terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok Muslim waktu Telu dan kelompok Muslim waktu lima.

Kelompok Muslim Waktu Telu adalah bentuk relasi yang sedemikian dalam antara Suku Sasak penganut Islam dan Suku Bali penganut Hindu di Lombok. Kedekatan hubungan antara Suku Sasak-Muslim yang menganut waktu telu dengan Suku Bali yang Hindu tercermin dalam ritual 'Perang Topat' yang berlangsung tiap tahun di Pura Lingsar Lombok Barat.

Warga mulai memadati pelataran Pura Lingsar saat musik tradisional *gendang beleq* berbunyi menyambut iring-iringan *kebon odeq* (kebun kecil) berisi hasil bumi dan *topat* (ketupat). Rombongan itu berkeliling bangunan Kemaliq di dalam kompleks Pura Lingsar. Ritual ini menandai perang topat akan segera dimulai. Warga yang sudah terbagi menjadi dua kubu, yaitu umat Islam dan umat Hindu, saling melempar ketupat yang sebelumnya sudah diarak. Seperti perang pada umumnya, mereka saling serang menggunakan ketupat. Ritual inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan perang topat.

Meski saling lempar, mereka tidak sedang bermusuhan. Justru sebaliknya, perang ini menjadi simbol perdamaian umat Islam dan Hindu di Lombok. Seusai perang, mereka membubarkan diri. Topat-topat yang sudah dilempar kemudian dipungut dan dibawa pulang oleh warga. Mereka percaya bahwa dengan menebar ketupat tersebut ke sawah atau ladang maka akan memberi kesuburan. Perang topat merupakan perang perdamaian antara umat Islam dan Hindu di Lombok yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Selain sebagai simbol keharmonisan antarumat beragama, perang topat pada zaman dahulu merupakan ritual meminta hujan bagi para petani di Lombok. Ketupat yang sudah dilempar dalam perang topat dipercaya warga sebagai pupuk di pertanian dan perkebunan. Oleh warga, ketupat tersebut disebar di sawah maupun digantungkan di pohon.

Selain suku Sasak yang Muslim, Pulau Lombok juga didiami oleh suku Bali, Sumbawa, Bima, Jawa, Arab dan Cina. Di

antara mereka, orang Bali yang sebagian besar berada di Lombok bagian Barat, terutama di Kecamatan Ampenan, Mataram, Cakranegara, dan Narmada yang sekarang tergabung ke dalam wilayah Kotamadya Mataram, serta sebagian Lombok Tengah. Mereka memiliki tanah sendiri – meskipun di Kota Mataram tanah-tanah yang dimiliki orang Bali sudah berkurang karena dijual. Sebagian besar orang Bali yang tinggal di Lombok ini adalah dari Karangasem.

Umumnya umat Hindu dari Bali menempati perkampungan perkampungan yang eksklusif, mengelompok dan diberi nama bahasa Bali. Bahkan nama-nama jalan juga terdapat tulisan dengan aksara Bali – seperti yang saat ini gencar dilakukan di Bali. Jika kita jalan-jalan di sekitaran perkampungan Bali, terdapat ciri khas tembok depan rumah yang berisikan *rong* untuk mempersembahkan sesajen. Ciri khusus perkampungan Bali adalah adanya sanggah atau pura keluarga di tiap rumah.

Hubungan antara orang Bali dan Lombok sebenarnya cukup baik. Mereka punya tradisi saling mengundang, saling *jotin* (menyuguhkan makanan untuk mempererat persaudaraan), saat-saat ada pelaksanaan upacara keagamaan. Di titik ini relasi orang Bali-Lombok sangat akrab, mereka tidak dipisahkan hanya karena perbedaan budaya, etnis dan agama. Bahkan ketika acara Mauludan, orang Bali di Lombok sering diundang untuk hadir. Konstelasi kerukunan ini sudah terbangun sangat lama di Lombok. Mereka bersatu padu, saling tolong menolong, ketika masing-masing ada upacara keagamaan.

Bahkan kalau dilihat di Desa Baturingggit, setiap bulan Agustus ada ritual khusus tiga agama bersama mengadakan ritual, Hindu, Islam dan Budha. Ritualnya di tengah hutan yang dinamakan Ruwahan. Ada kepercayaan bahwa ketika perang Selaparang dulu ada satu patih yang berhasil meloloskan diri. Keyakinan di sana itu tempat sebuah kerajaan, diyakini oleh pemeluk agama setiap bulan Agustus menghaturkan sesajen. Hanya saja hubungan harmonis ini dicemari oleh gerakan-gerakan permurnian agama. Tradisi yang sudah tumbuh berkembang sudah lama tersebut dianggap musrik oleh Islam garis keras. Padahal sudah berpuluh bahkan berates tahun tradisi itu merukunkan hubungan antarumat beragama di Lombok.

Situasi hubungan antarumat di Lombok saat ini tidaklah sebaik dahulu. Munculnya gerakan-gerakan agama garis keras yang membangun narasi-narasi perbedaan dan kebencian, mengganggu kerukunan umat beragama di Lombok, khususnya antara orang Bali yang Hindu dan Islam.

Tidak sedikit muncul provokasi-provokasi yang berawal dari perbedaan agama tersebut, seperti misalnya larangan menghidupkan pengeras suara ketika ada pelaksanaan upacara agama Hindu, larangan membunyikan gambelan ketika tradisi *nyongkol* melewati tempat ibadah Muslim, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa ini sangat berpengaruh pada pola hubungan antara umat Hindu dan masyarakat lokal di Lombok.

Berbeda dengan di Lombok, di Sumbawa hubungan antara orang Bali dan masyarakat lokal juga sangat baik – meskipun terdapat indikasi yang nyaris sama seperti yang terjadi di Lombok. Mereka saling menghormati antarsesama umat beragama. Memang, masyarakat di Sumbawa juga multietnis, agama dan kebudayaan. Harmonisasi hubungan antar etnis dan agama pun selalu dirawat dengan baik.

Aktivitas Adat

Adat masyarakat Bali di Lombok sangat beragam. Keberagaman ini disebabkan perbedaaan asal usul pendatang dari Bali. Seperti diketahui, di Bali dikenal istilah *Desa Mawacara* – setiap desa punya cara dan tradisinya sendiri yang berbeda dengan desa lainnya. Begitu pula yang terdapat di Lombok.

Namun dari keanekaragaman adat istiadat tersebut, peneliti mendapati beberapa jenis ‘adat’ orang Bali Hindu di Lombok. Adat orang Bali di Lombok bisa dilihat dalam pelaksanaan *pasidikaran* dan perkawinan. Adapun *pasidikaran* di Lombok tidak mengacu pada hubungan darah, tetapi lebih pada keterikatan kelompok masyarakat. Sampai saat ini konsep *pasidikaran* di Lombok masih sangat kuat, meskipun ada beberapa yang dianggap telah membatasi ruang gerak masyarakat yang mengikutinya. Sementara itu, perkawinan yang sesuai dengan adat orang Bali di Lombok adalah kawin lari. Adat kawin lari ini memang sangat khas, berbeda dengan tradisi di Bali. Justru tradisi *memadik* jarang dilakukan oleh orang Bali di Lombok.

Melalui kawin lari masyarakat Bali di Lombok menganggap ada nilai keberanian, kepahlawanan – berani mengambil harus berani bertanggung jawab, begitu pula berani meminta maaf kepada keluarga perempuan.

Rentetan perkawinan seperti yang terdapat di Pagesangan yakni *Pejati*, *Peradang*, *Pelepeh*, *Pakenan*, *Ledang* setelah itu baru mencari hari baik untuk dilaksanakannya upacara perkawinan. Di sini ada lima rentetan yang harus dilalui oleh keluarga laki-laki sebelum mereka benar-benar mendapatkan restu dari keluarga besar perempuan. Adapun kelima rentetan tersebut yakni:

1. *Pejati*: sebuah penyampaian awal kepada pihak keluarga perempuan tentang hubungan antara anak pihak laki-laki dan perempuan.
2. *Peradang*: Permohonan maaf kepada pihak keluarga perempuan karena anaknya akan dinikahi oleh anak dari pihak keluarga laki-laki.
3. *Pelepeh*: permohonan maaf kedua kepada keluarga perempuan tentang rencana pernikahan antara anak dari keluarga laki-laki dan perempuan.
4. *Pakenak*: permakluman yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki.
5. *Ledang*: dalam rentetan ini keluarga perempuan sudah memaklumi dan melepaskan anaknya untuk dinikahi. Menariknya di sini, sebelum *Ledang* keluarga laki-laki tidak diperkenankan meminta kopi atau makanan dalam bentuk apapun. Setelah *ledang* barulah pihak keluarga laki-laki mencari hari baik untuk pelaksanaan upacara *Manusa Yadnya*.

Dari rentetan ini bisa dikatakan bahwa orang Bali di Lombok sangat menghargai adat perkawinan terutama pihak keluarga perempuan. Sebelum benar-benar diambil dan dinikahi, pihak keluarga perempuan bisa ‘menguji’ tanggung jawab dan keberanian pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Setelah prosesi ini dikatakan selesai dan pihak keluarga perempuan sudah merasa yakin dengan keluarga laki-laki, barulah mereka melepaskan anak perempuannya. Ternyata adat ini tidak hanya dilaksanakan oleh orang Bali di Lombok, melainkan juga suku Sasak di sana.

Jika disimak betul, justru melalui mekanisme kawin lari ini, keluarga perempuan lebih merasa dihargai daripada perkawinan *memadik* di Bali. Di sinilah letak perbedaannya, jika di Bali kawin lari ini dilakukan ketika terjadi perbedaan kasta atau wangsa – yakni ketika anak laki-laki dari kasta yang lebih rendah mengambil perempuan dari kasta tinggi (*Triwangsa*). Perbedaan kasta inilah yang menyebabkan pihak keluarga laki-laki harus mengambil jalan kawin lari. Tetapi untuk di Lombok tidak ada persoalan kasta atau wangsa, melainkan harga diri seorang perempuan dan nilai kepahlawanan seorang laki-laki yang diperlukan.

Perlu diketahui, orang Bali di Lombok – khususnya yang datang sejak ekspedisi Karangasem, pantang melakukan perkawinan *nyentana*, sedangkan untuk perkawinan *pada gelahang* dalam tataran praktis sudah dilaksanakan. Yang menarik dari adat orang Bali di Lombok adalah *nyongkol*. Tradisi *nyongkol* dilaksanakan saat akan ada perkawinan. Pihak mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita dengan membawa iring-iringan. Salah satu yang menjadi ciri khas adalah busana adat dan tabuh kendang *beliq*. Adat *nyongkolan* ini tidak hanya dilaksanakan oleh orang Bali Lombok yang beragama Hindu, tetapi juga orang etnis Sasak yang beragama Islam. Jika kita melewati jalan di seputaran Lombok pada hari Minggu, akan menemukan adat *nyongkol* ini. Sangat heroik dan atraktif.

Ada perbedaan pandangan tentang asal usul adat *nyongkol* ini. Bagi orang Sasak, *nyongkol* adalah adat mereka sejak turun temurun, sementara orang Bali Lombok juga menganggap *nyongkol* adalah tradisi masyarakat Bali di Lombok. Justru orang Bali di Lombok turut serta membangun peradaban di Lombok sampai seperti sekarang ini. Tetapi yang pasti, antara orang Sasak dan Bali di Lombok sama-sama masih melaksanakan dan melestarikan adat *nyongkol* ini.

Selain *nyongkol*, umat Hindu di Lombok khususnya di Pagesangan punya adat yang menarik. Jika ada perempuan yang hamil di luar pernikahan, maka baik dari pihak *Purusa* maupun *Pradana* diberikan sanksi dengan tidak memberi hak waris kepada keturunannya. Bahkan hubungan tersebut tidak diakui di banjar dan keluarga.

Si anak seolah tidak memiliki lagi hak secara sosial dan keluarga. Ketika terjadi benturan maka adat yang menang. Banyak yang mengajukan ke formal, tapi tetap tidak bisa 'dimaafkan' secara adat. Bisa dikatakan, ini adalah 'wajah' lain dari adat umat Hindu di Lombok. Meskipun tidak semua umat Hindu di Lombok yang setuju dengan adat ini.

Adat masyarakat umat Hindu di Lombok juga tercermin melalui aktivitas *pasidikaran*. Bahkan adat *pasidikaran* ini bisa disebut khas bagi umat Hindu di Lombok. *Sidikara* adalah organisasi yang tanpa bentuk, tidak memiliki sekretaris dan bendahara. Ikatan *sidikara* ini tidak hanya didasarkan pada kesatuan keluarga, tetapi jangkauannya lebih luas. Orang yang tidak memiliki hubungan darah atau keluarga bisa mengikuti adat *sidikara* ini.

Tokoh umat Hindu di Cakranegara Mataram Lombok, Made Metu Dahana memberi informasi tentang prinsip dari *sidikara* ini yakni saling *rojong*, saling *tegen*, saling *parid* dan saling *sumbah*. Jika masyarakat sudah saling *sumbah*, maka mereka juga memiliki keterikatan saling *tegen*. Kalau hanya saling *rojong* dan *parid* maka mereka tidak akan saling *sumbah*. Memang tidak ada bentuk baku bagi ikatan komunal ini. Ibarat organisasi, *sidikara* ini tidak memiliki ketua dan sekretaris. Kelompok *sidikara* ini baik antarindividu satu maupun individu yang lainnya bisa berbeda-beda.

Bisa dikatakan *sidikara* adalah pranata sosial yang masih kuat di Lombok. Namun di internal umat Hindu sendiri, ada polarisasi pandangan tentang adat *sidikara* ini. Di satu sisi *sidikara* ini dianggap mampu mengikat individu satu dan lainnya dalam satu ikatan komunal yang tanpa bentuk, namun di sisi lain *sidikara* memiliki karakter mengikat dan mengekang masyarakat yang mengikutinya (wawancara dengan I Gusti Lanang Media).

Jenis *sidikara* di Lombok juga tidak tunggal, ada yang namanya *sidikara* subak. Ada juga *sidikara* yang sampai *ngerojong*, *sumbah* dan *marid*. Model-model *sidikara* di Lombok memang membingungkan, karena antar satu desa dan desa lainnya memiliki adat yang berbeda, begitu pula pemahaman yang berbeda tentang *sidikara* ini.

Nilai dalam *pasidikaran* yang paling dominan disebutkan ada

dua yakni pertama adalah persaudaraan. Jika dilihat sistem nilai dari *sidikara* ini memang bermanfaat untuk membangun sebuah ikatan komunal antar umat Hindu di Lombok. Melalui *sidikara* ini, masyarakat akan *wiring* (punya jiwa saling bela) antarsesama umat Hindu di Lombok. Pembelaan yang didasarkan pada persaudaraan ini dilakukan ketika umat Hindu yang *diajak sidikara* mengalami persoalan dengan pihak lain. Dalam semangat *wiring* mereka akan siap membela saudaranya tanpa melihat persoalan benar dan salah. Meskipun salah sekalipun, jiwa *wiring* ini tetap muncul dalam masyarakat.

Kedua adalah terbangunnya sikap jengah dan malu. Nilai-nilai ini yang membuat *sidikara* mempunyai suatu manfaat agar umat Hindu bisa melaksanakan agamanya dengan baik. Sebagai contoh dalam ajaran agama Hindu dilarang mencuri. Kalau dalam *sidikara* si pencuri ini *disepekang* – diasingkan dari desanya. Di sini *sidikara* hadir dengan wajah yang berbeda yakni bukan sesuatu yang menghambat kemajuan peradaban dan moralitas masyarakat, melainkan juga membangun nilai-nilai yang positif. Dalam konteks ini, memang mereka tetap bisa melakukan *sidikara* tanpa ada ikatan darah, tetapi karena memiliki kesatuan identitas Kehinduan. *Sidikara* pun tidak digunakan secara konservatif, tetapi menjadi basis nilai.

Selain *sidikara*, sistem organisasi desa juga terbentuk di Lombok. Struktur pengurus disebut dengan *prekangge* dan *penyarikan*. *Prekangge* ketua merangkap sebagai bendahara, sementara *penyarikan* sekretaris. Ada desa adat dan banjar adat, tempekan, di bawah tempekan ada *suluhan*. Awig-awig adat juga ada di Lombok, tapi tidak memiliki AD ART. Menariknya, ada kantong-kantong umat Hindu di Lombok yang memiliki pecalang setempat, mirip seperti di Bali. Pecalang ini akan hadir ketika ada pelaksanaan upacara atau ritual umat Hindu.

Pemilihan bendesa menggunakan sistim keturunan, kompetensi, dengan sistem musyawarah mufakat. Kalau tidak melaksanakan tugas, kena sanksi adat. Di Lombok eskalasi konfliknya tidak besar antara banjar. *Sangkepan* dilaksanakan pada satu bulan sekali. Adat umat Hindu di Lombok mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Hal ini tercermin melalui aktivitas sosialnya baik di banjar maupun di

desa.

Adopsi terhadap sistem sosial umat Hindu di Bali juga tampak di Pagutan, Mataram (wawancara dengan I Gde Mandra). Bahkan khusus untuk Pagutan menggunakan sistem pakaraman karena masyarakat mengurus tiga buah pura, seperti halnya di Bali. Adat mereka juga bisa dilihat ketika ada kematian. Kalau dalam satu lingkup banjar, secara otomatis mereka tidak perlu diundang, sementara dengan banjar lain mereka harus mengundang. Inilah salah satu bentuk kompleksitas adat umat Hindu di Lombok.

Berbeda wilayah banjar dan desa, berdampak pada perbedaan adat dan tradisi mereka. Bahkan dalam penyusunan anggaran dasar awig-awig, mereka sangat hati-hati karena perbedaan yang ada. Menariknya, mereka menunjukkan kemantapan beragama dalam dinamika internal yang dialami. Perbedaan kultur dan tradisi di internal umat Hindu justru menjadi kekayaan sendiri yang memiliki dampak secara positif. Hal ini juga cermin historis, bahwa kedatangan orang Bali di Lombok dari berbagai daerah di Bali, tidak ada dari satu daerah saja.

Panca Yadnya

Dasar pelaksanaan upacara yadnya baik di Lombok maupun Sumbawa Nusa Tenggara Barat adalah *Panca Yadnya* – lima jenis yadnya atau persembahan yang dilakukan oleh umat Hindu. Secara esensi pelaksanaan *Panca Yadnya* di Lombok didasarkan pada teks-teks sastra agama, namun dalam tataran praksis tetap mengadopsi adat dan budaya setempat. Perbedaan adat dan budaya di internal umat Hindu di Lombok inilah yang berdampak pada perbedaan ekspresi upacara dan ritual.

Tetapi secara umum, umat Hindu baik di Lombok maupun Sumbawa memiliki semangat beryadnya yang baik. Ini menunjukkan jika *sradha* dan *bhakti* umat Hindu di Lombok sangatlah kuat. Berikut ini akan dipaparkan pelaksanaan Panca Yadnya dalam aktivitas keagamaan umat Hindu di Lombok Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari *Dewa Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Manusa Yadnya*, *Bhuta Yadnya* dan *Rsi Yadnya*.

a. Dewa Yadnya

Pelaksanaan Dewa Yadnya di Lombok dilakukan secara rutin. Bahkan biasa dikatakan umat Hindu di Lombok setiap hari melaksanakan kegiatan beryadnya, salah satunya *yadnya sesa*. Yadnya yang dilaksanakan setiap hari di Lombok dibagi menjadi tiga yakni Pagi hari, siang hari dan sore hari.

Menariknya, umat Hindu khususnya di Pagesangan Kota Mataram, tidak menunggu datangnya Tilem dan Purnama dalam melaksanakan yadnya. Mereka rutin menghaturkan yadnya untuk memohon doa restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Itu dilaksanakannya di sanggah masing-masing umat Hindu. Mereka juga menghaturkan canang setiap hari – ini dilakukan oleh Kepala Keluarga beserta anak-anaknya. Jika kita lihat dari rutinitas beryadnya umat Hindu di Lombok sangatlah khidmat (wawancara dengan Wayan Wirata).

Sementara itu jika didasarkan pada sistem kewaktuan, khususnya perhitungan Kliwon – lima hari sekali umat Hindu melaksanakan upacara yadnya di Pura Penataran. Orang yang terlibat adalah seluruh warga banjar baik itu laki-laki maupun perempuan. Upacara yadnya dipimpin langsung oleh *Manggala* atau Pemangku setempat. Piranti upacara yang dipersembahkan selain canang, dupa dan *sekar*, juga *daksina* sebagai dasar *linggihan* dari *Bhatara-Bhatari*. Kehadiran umat dalam pelaksanaan yadnya di Penataran ini ditandai dengan diketuknya Kulkul. Ketika kulkul sudah berbunyi menandakan persembahyangan akan segera mulai.

Biasanya umat Hindu di Kota Mataram ketika mendengar suara kulkul, mereka langsung bergegas masuk ke *utamaning mandala* pura untuk melaksanakan persembahyangan. Mereka disatukan dalam tata norma tradisi yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun. Selama ini, masyarakat umat Hindu masih sangat taat dengan apa yang sudah dilaksanakan baik itu di banjar maupun di tingkat *tempekan*. Solidaritas antarumat Hindu tampak ketika mereka melaksanakan persembahyangan bersama.

Berbeda dengan persembahyangan saat Kliwon, pada Purwani Tilem dan Purnama umat Hindu di Mataram

melaksanakan persembahyangan di Pura Dalem masing-masing. Persembahyangan dilakukan oleh krama desa yang jangkauannya lebih luas. Contoh saja di Pagesangan ada 23 (dua puluh tiga) banjar dengan masing-masing membawa banten pejatian dipimpin oleh seorang Pedanda.

Selain di Pura Dalem, saat Purnama dan Tilem umat Hindu juga melaksanakan persembahyangan di Penataran Mumbul. Persembahyangan juga dipimpin oleh seorang Pedanda atau Sulinggih. Sementara di Pura Puseh dihaturkan peras daksina. Pelaksanaan pujawali atau ngodalin dilaksanakan setiap enam bulan sampai dengan satu tahun sekali. Sementara itu, saat hari Saraswati, Pagerwesi, Galungan dan Kuningan dilaksanakan secara kolektif di *sanggah*, *pemaksan*, maupun di Pura Puseh masing-masing.

Pelaksanaan Dewa Yadnya oleh masyarakat umat Hindu di Lombok Tengah juga tidak jauh berbeda dengan di Kota Mataram. Mengingat umat Hindu di Lombok hampir 95 persen berasal dari Bali. Pelaksanaan Dewa Yadnya di Pura-pura di Lombok Tengah dilakukan setiap tahun sekali berdasarkan *sasih* atau *pawukon* (wawancara dengan Mangku Murba).

Menariknya, di Lombok Tengah, keberadaan pura di samping dipergunakan untuk pemujaan – pada hari suci umat Hindu mendekati diri dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa – juga dipergunakan untuk tempat sekolah mingguan. Tidak hanya itu, pura juga menjadi sentrum aktivitas kultural umat Hindu di Lombok Tengah, seperti misalnya menari, belajar kekidungan, dan diskusi keagamaan. Pada masing-masing pura bahkan ada penjaganya. Para penjaga ini dibuatkan tempat di areal tempat suci tersebut.

b. Pitra Yadnya

Secara umum pemahaman masyarakat umat Hindu di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok tentang *Pitra Yadnya* relatif sama. Mereka memaknai *Pitra Yadnya* sebagai pelaksanaan upacara yadnya yang bertujuan untuk membersihkan, menyempurnakan dan mengangkat kedudukan arwah leluhur (pitara) sampai menuju alam *Surga* atau alam *Swah Loka*.

Upacara *Pitra Yadnya* juga bertujuan mengembalikan

unsur-unsur *Panca Maha Bhuta* ke muasalnya yakni Sang Hyang *Prakerti*. Di Bali, pengembalian unsur-unsur *Panca Maha Bhuta* ini dilaksanakan melalui prosesi *Ngaben* atau kremasi. Ada juga yang ditanam jika kematiannya dianggap tidak wajar. Tetapi ada juga yang jenazahnya diletakkan begitu saja di bawah pohon seperti tradisi masyarakat di Terunan.

Sementara untuk di Lombok, khususnya Lombok Barat pelaksanaan *Pitra Yadnya* dilakukan melalui proses *mendem sawa* minimal dua atau tiga tahun dengan asumsi agar Pitara bisa menemui *pertiwi*, memohon agar diberikan jalan yang baik. Selama *mendem sawa* ini, pihak keluarga atau kerabat saban harinya *Munjung* – sejenis menghaturkan jukut, nasi, dan bahan-bahan konsumsi yang dimasak oleh keluarga yang masih hidup. Bisa dikatakan, ini adalah bagian dari tradisi umat Hindu dalam pelaksanaan upacara *Pitra Yadnya*.

Tradisi yang menarik juga terdapat di Pagesangan. Berdasarkan wawancara dengan Wayan Wirata, seorang akademisi, tokoh masyarakat sekaligus tokoh Hindu di Pagesangan, apabila ada keluarga yang meninggal di luar rumah tanah pekarangan, maka mayatnya tidak boleh dibawa ke rumah atau ke desa. Alasannya, apabila mayatnya di bawa ke pekarangan desa atau rumah keluarga yang ditinggalkan, bisa menyebabkan pekarangan rumah atau desa *cuntaka* atau kotor.

Pelaksanaan pengabenannya menunggu hari baik, jika belum menemui hari baik maka mayat ini akan diinapkan di setra setempat. Tradisi ini memang tidak berlaku secara umum, hanya di daerah-daerah tertentu saja seperti di Pagesangan. Ini menunjukkan keanekaragaman kultural di internal umat Hindu di Lombok. Mereka memiliki perbedaan ekspresi secara kultural, namun esensinya adalah sama – didasarkan pada teks-teks sastra agama.

Di Lombok pengabenan secara kolektif atau massal belum banyak dilaksanakan. Umat Hindu di Lombok dianggap masih mampu secara ekonomi untuk melaksanakan upacara pengabenan. Namun bukan berarti upacara ngaben massal tidak pernah dilaksanakan di Lombok. Berdasarkan wawancara dengan Mangku Gde Tapak pengabenan massal pernah dilakukan di Setra Karangjengkong dipuput oleh Ida Pandita Mpu.

Sebelumnya juga pernah dipuput oleh Ida Pedanda. Apabila ada umat Hindu rantauan di Lombok yang meninggal, maka bisa diaben di Setra Karangjengkong ini. Biasanya mereka diaben di sini, abunya baru di bawa ke Bali. Hal ini dilakukan agar lebih praktis dan efisien. Jika pun diaben di Bali, juga akan menghabiskan anggaran yang lebih banyak. Bisa dikatakan, umat Hindu di Lombok sudah memiliki mekanisme ketika ada umat Hindu rantauan meninggal di Lombok, sehingga jenazahnya tidak perlu di bawa pulang ke daerah asalnya.

c. Manusa Yadnya

Pelaksanaan upacara *Manusa Yadnya* di Lombok hampir sama dengan umat Hindu di Bali. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan upacara ketika bayi berada di dalam kandungan, bayi dilahirkan, sampai pada upacara *pawiwahan* atau *widi widana*. Hanya saja, khusus untuk di Lombok, pelaksanaan upacara *magedong-gedongan* ketika bayi berumur enam bulan kalender, tidak dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu. Bahkan ada yang sama sekali tidak melaksanakannya.

Selain *magedong-gedongan*—dalam konteks Manusa Yadnya—dilaksanakan juga upacara *kepus puser*, *ngetelunin*, *ngotonin*, *metatah* dan *widi widana*. Khusus untuk di Lombok yang umat Hindunya sangat beragam secara kultural, tidak semua melaksanakan upacara tersebut. Seperti misalnya, ada umat Hindu yang tidak melaksanakan upacara *ngetelunin* atau tiga bulanan seperti yang dilaksanakan di Bali. Upacaranya dilaksanakan langsung saat bayi sudah satu oton. Hal ini dilakukan selain untuk efisiensi biaya dalam pelaksanaan upacara Manusa Yadnya, juga merupakan tradisi dan kepercayaan umat Hindu di Lombok.

Upacara *metatah* dan *pawiwahan* juga dilaksanakan di Lombok, meskipun tidak sama persis seperti di Bali. Umat Hindu di Lombok justru menganggap *pawiwahan* dengan cara *ngemaling* sebagai yang utama dari pada *memadik*. Mereka menganggap ada nilai kejantanan, keberanian dan kepahlawanan yang dimiliki oleh laki-laki yang ingin menikahi perempuan. Rentetannya pun panjang dari Pejati sampai dengan *Ledang* dan mencari hari baik (hal ini sudah dibahas dalam sub bab adat masyarakat umat Hindu di Lombok).

Bagi umat Hindu yang memiliki lahan pekarangan yang luas, mereka akan melaksanakan upacara *Pawiwahan* di rumahnya, begitu sebaliknya yang tidak memiliki pekarangan yang mencukupi, mereka menyewa gedung atau aula untuk pelaksanaan resepsi pernikahan. Biasanya ini dilakukan oleh pendatang Bali di Lombok yang tidak menetap.

d. Bhuta Yadnya

Umat Hindu di Lombok Nusa Tenggara Barat melaksanakan upacara *Bhuta Yadnya* dari yang skala terkecil sampai besar. Bhuta Yadnya dalam skala yang lebih kecil dilaksanakan setiap hari. Pada hari-hari tertentu seperti Tilem umat Hindu menghaturkan *segehan*.

Upacara *Bhuta Yadnya* dalam skala besar dilaksanakan pada saat Tawur Kesanga. Pecaruan dilakukan dari tingkat banjar, desa, kecamatan, bahkan provinsi. Di tingkat Banjar menggunakan caru *Eka Sata*, di tingkat *Desa Manca Sata*, sampai di tingkat Provinsi *Manca Kelud*. Tingkatan pecaruan yang dilakukan memang hampir sama dengan umat Hindu di Bali.

Saat Tawur Kesanga, umat Hindu di Lombok juga mengarak ogoh-ogoh yang dipusatkan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Ratusan ogoh-ogoh dipawaikan di tengah-tengah Kota Mataram. Pada tahun 2018 saja, terdata sebanyak 128 ogoh-ogoh yang diarak di Mataram. Ini salah satu bentuk ritual *nyomia* energi negatif sebelum melaksanakan Catur Brata Penyepian. Tidak hanya di Lombok, pawai ogoh-ogoh juga dilaksanakan oleh umat Hindu baik di Sumbawa maupun Sumbawa Barat.

Anak-anak muda Hindu di Sumbawa dan Sumbawa Barat secara berbaur membuat ogoh-ogoh dan mengaraknya sebagai wujud dari pelaksanaan Tawur Kesanga. Pemahaman umat Hindu di Nusa Tenggara Barat tentang pelaksanaan Tawur Kesanga hampir sama, yakni menetralsir energi negatif sebelum melaksanakan *brata penyepian*. Bentuk ogoh-ogoh yang dibuat juga hampir sama dengan ogoh-ogoh yang ada di Bali.

Pelaksanaan upacara Bhuta Yadnya dalam skala besar juga terlihat pasca Lombok diguncang gempa. Umat Hindu di Lombok menggelar upacara Prayascita Gumi Tawur Manca Kelud yang dipuput oleh lima orang Sulinggih pada September

2018 lalu.

Kelima Sulinggih yang memimpin upacara tersebut antara lain dari Peranda Siwa yakni Ida Pedanda Gede Putu Manis dari Griya Sepakek, Ida Perande Gede Kemenuh Aksa Bawa dari Griya Pagutan, dan Ida Peranda Gede Kerta Arsa dari Griya Pagesangan. Kemudian dari Peranda Budha dua orang yakni Ida Peranda Gede Dwija Gautama dari Griya Arong Arong dan Perabde Oka Dharma dari Griya Abian Tubuh.

Upacara Prayascita Gumi Tawur Manca Kelud itu sendiri diikuti ribuan umat Hindu yang datang dari seluruh pulau Lombok. Mengambil tempat di simpang empat Cakranegara Mataram, perempatan itu penuh sesak dari empat penjuru jalan. Dipilihnya Catus Pata itu sendiri diharapkan aura upacara yang dilaksanakan bisa menembus seluruh wilayah di Pulau Lombok. Upacara Prayascita Gumi itu bertujuan untuk memohon keselamatan, kerahayuan dan dirgayusa.

e. Rsi Yadnya

Berbicara tentang *Rsi Yadnya*, umat Hindu di Lombok sudah melakukannya, meskipun tidak rutin. *Rsi Yadnya* dilaksanakan menjelang hari Saraswati dan menjelang Nyepi. Pada saat itu umat Hindu menghaturkan sejenis *Rsi Bojana* untuk menghormati keberadaan orang suci dan perannya dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Selain itu, peran Sulinggih sangatlah penting untuk mendoakan keseimbangan baik *bhuana alit* maupun *bhuana agung*. Hal ini tampak saat umat Hindu di Lombok menggelar ritual *prayascita gumi* dengan melibatkan lima Sulinggih.

Pelaksanaan *Rsi Yadnya* juga dilakukan dengan cara berbakti dan menghormati keberadaan orang suci. Hal ini tercermin melalui pelaksanaan pawintenan pemangku yang pernah dilakukan secara massal. Sebagai manggala dalam pelaksanaan upacara tersebut yakni orang yang sudah *medwijati*, *diksa pariksa*, lahir kedua kali sebagai Siwa Sekala. Bisa dijelaskan di sini bahwa pelaksanaan Rsi Yadnya oleh umat Hindu di Lombok hampir sama dengan di Bali. Begitu juga pemahaman mereka tentang Rsi Yadnya yakni penghormatan terhadap para Rsi atau Pendeta.

Pola Hunian Dan Orientasi Pembangunan Sanggah/Pura Umat Hindu Di Lombok

Keberadaan umat Hindu di Lombok bisa dikatakan heterogen secara kultural, meskipun mereka adalah pendatang dari Bali. Hal ini tercermin dari pemahaman umat Hindu di Lombok berkaitan dengan pola hunian atau tempat tinggal. Pemahaman umat Hindu di Lombok tentang pola hunian sangatlah beragam, hal ini tergantung dari wilayah tempat tinggalnya. Apabila kita lihat di Lombok Barat, pola hunian umat Hindu memang tidak persis sama dengan Bali, tetapi ada beberapa kearifan lokal Bali yang diadopsi.

Misalnya saja dalam pembangunan tempat suci atau pura, umat Hindu di Lombok Tengah menggunakan acuan *utara* atau *kaje kangin*. Ruang di sebelah timur dimanfaatkan untuk membangun rumah dan di sebelah selatan dimanfaatkan untuk dapur. Di sini bisa dilihat bahwa utara masih menjadi orientasi kesucian bagi umat Hindu di Lombok, sama halnya dengan di Bali menggunakan gunung atau arah *kaje* sebagai orientasi kesucian.

Hal ini juga berlaku di Kota Mataram – tempat kantong-kantong umat Hindu di Lombok. Memang selama ini tidak ada aturan baik itu dari adat maupun pemerintah soal pola hunian masyarakat, namun sesuai dengan kepercayaan umat Hindu di Mataram, utara tetap menjadi orientasi kesucian khususnya dalam pembangunan *sanggah*, *merajan* atau *pura*, sementara untuk di posisi selatan digunakan sebagai rumah tempat tinggal, dan di tengah terdapat *karang luang* – ruang kosong (wawancara dengan Made Metu Dahan). Khusus untuk umat Hindu yang tinggal di perumahan di sekitar Kota Mataram, pola hunian disesuaikan dengan luas tanah. Pembangunan sanggah atau merajan juga tidak ideal, namun tetap menggunakan utara dan timur sebagai rujukan, meskipun *pamedalan* atau *pemesuan* menghadap ke barat. Sekali lagi, pola hunian seperti ini tidak terlepas dari persoalan lahan yang sangat sempit.

Pemahaman yang sama juga terdapat di kalangan umat Hindu di Lombok Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Nyoman Murba Widana, dijelaskan bahwa khusus di Lombok Tengah umat Hindu tidak memiliki aturan soal pola

hunian seperti halnya yang berlaku di Bali. Begitu pula dengan pemerintah kabupaten tidak pernah mengeluarkan aturan tentang pola hunian. Hal ini disebabkan oleh karakteristik umat Hindu di Lombok Tengah yang mayoritas pendatang dari Bali.

Umat Hindu pendatang di Lombok Tengah ini memiliki keterbatasan lahan pekarangan, sehingga tidak bisa menggunakan pola hunian yang sesuai dengan pola pemukiman tradisional Bali. Mereka cenderung lebih fleksibel dan rasional dalam mengelola tempat hunian, sebagaimana khas masyarakat pendatang.

Tidak hanya di pemukiman saja, tempat suci di Lombok tengah juga tidak menggunakan pola-pola penataan seperti halnya di Bali. Pura Kahyangan Jagat pun tidak menggunakan konsep *Tri Mandala*, seperti Pura Prajahita Praya hanya menggunakan konsep *Dwi Mandala* yang terdiri dari *mandala utama* dan *madya*. Keberadaan *madya mandala* ini sudah menjadi satu dengan *nista mandala* atau *mandala terluar*.

Tidak hanya di Pura Prajahita, Pura Prajaniti dan Pura Bhuana Nata Polres bahkan hanya memiliki satu *mandala* saja. Ini merupakan kenyataan di lapangan betapa sulitnya umat Hindu di Lombok Tengah untuk mendapatkan lahan dalam pembangunan pura. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih berpikir fleksibel dalam pendirian pura, tidak menggunakan pola-pola *mandala* yang ketat.

Meskipun demikian, orientasi kesucian dalam pembangunan pura tetap mengikuti sastra agama. Begitu pula pelaksanaan ritualnya yang terdiri dari *nyikut karang*, *ngeruak*, sampailah pada *mendem pedagingan*. Hal ini sesuai dengan karakteristik umat Hindu pendatang di Lombok Tengah yang ingin berpikir efektif efisien dalam penataan tempat hunian dan pembangunan pura.

B. PENDIDIKAN HINDU

Keberadaan Pasraman dan Sekolah Hindu

Selain infrastruktur keagamaan, peningkatan kapasitas pemahaman keagamaan umat Hindu di Lombok dilakukan melalui keberadaan perguruan tinggi Hindu dan pasraman-pasraman Hindu. Selama ini, akses pendidikan agama umat

Hindu di Lombok didapat melalui perguruan tinggi Hindu dan Pasraman. Perguruan tinggi Hindu yang mengalami kemajuan saat ini di Lombok yakni STAHN Gde Pudja Mataram.

Selain perguruan tinggi, umat Hindu di Lombok juga memiliki puluhan pasraman di masing-masing daerah. Data yang didapat di Bidang Bimas Hindu Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pasraman Hindu di NTB 39 pasraman. Masing-masing pasraman terdapat di beberapa daerah yakni di Lombok Barat 14 Pasraman, Lombok Utara 3, Lombok Tengah 2, Lombok Timur 2, Sumbawa Barat 1, Sumbawa 3, Dompu 2, dan Bima 1 Pasraman. Sementara untuk sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas masing-masing yakni Sekolah Dasar Dwijendra, Sekolah Dasar Saraswati dan Sekolah Menengah Atas Saraswati, Sekolah Menengah Atas Kertawisata. Pengelolaan untuk sekolah formal dilakukan oleh yayasan masing-masing.

Tabel 77: Jumlah Pasraman Hindu di Nusa Tenggara Barat

No.	Lokasi	Jumlah
1	Lombok Barat	14
2	Lombok Utara	3
3	Lombok Tengah	2
4	Lombok Timur	2
5	Sumbawa Barat	1
6	Sumbawa	3
7	Dompu	2
8	Bima	1
Jumlah		39

C. POTENSI, TANTANGAN, DAN JALAN TENGAH

Potensi Alam

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki panorama alam yang sangat indah, baik itu pegunungan maupun pantai. Tidak berlebihan jika sektor [pariwisata](#) menjadi salah satu andalan dari NTB. Di samping panorama wisata

yang indah-indah, komoditas tanaman pangan dan hortikultura banyak dikembangkan dan menguntungkan untuk diusahakan oleh masyarakat petani antara lain adalah: kedelai, kacang tanah, jagung kacang hijau, cabe, bawang merah, mangga, pisang dan nanas.

Di samping sembilan jenis komoditas unggulan daerah, komoditas hortikultura lain yang dapat dikembangkan di Nusa Tenggara Barat adalah kentang, wortel, apel, dan anggur. Sedangkan untuk perikanan, NTB membaginya menjadi 3 wilayah pengembangan perikanan, yaitu:

1. Pulau Lombok, dengan prioritas pada pengembangan budidaya laut dan perikanan air tawar, budidaya air payau (tambak), penangkapan perairan umum;
2. Pulau Sumbawa Bagian Barat prioritas pada pengembangan budidaya air payau (tambak), budidaya laut, penangkapan, perairan umum dan budidaya air tawar;
3. Pulau Sumbawa Bagian Timur dengan prioritas pada pengembangan penangkapan, budidaya air (tambak), budidaya laut, perairan umum, dan budidaya air tawar.

Sebagaimana diketahui, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah produsen dan pemasok utama ternak potong dan bibit untuk kebutuhan berbagai daerah di Indonesia. Daya dukung pengembangan agribisnis berbasis peternakan antara lain potensi ketersediaan ternak secara kualitas dan kuantitas, sumber daya lahan, dan pakan ternak, dukungan semua produksi, pola peliharaan secara kelompok, bebas beberapa penyakit menular serta masih terbukanya peluang pasar domestik dan ekspor.

Sapi NTB adalah jenis (ras) sapi Bali, yang termasuk komoditas unggulan NTB serta memiliki pasar domestik dan ekspor. Di sini menariknya, bahwa di NTB juga dikembangkan jenis sapi Bali. Di samping sapi dan kerbau, komoditas penunjang lainnya adalah babi, kambing, kuda, ayam, dan itik.

Potensi dan Hambatan Aktivitas Adat serta Keagamaan

Keberadaan umat Hindu di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok bisa dijelaskan dengan dua sisi – pertama berkaitan dengan potensi penguatan komunalitas, solidaritas, dan identitas ke-Hinduan, dan kedua hambatan eksternal – tingginya itensitas

konflik antarumat beragama, khususnya antara umat Hindu dan Islam.

Sisi yang pertama bisa dijelaskan dari aktivitas keagamaan yang dilaksanakan sangat berimplikasi pada penguatan solidaritas antarumat Hindu di Lombok. Tidak hanya solidaritas, di sana juga terjadi penguatan identitas ke-Hinduan. Persatuan umat Hindu bisa dikatakan semakin kuat. Mereka memiliki solidaritas yang baik ketika melaksanakan yadnya. Tindih terhadap identitas dirinya sebagai umat Hindu. Sikap militansi ini tumbuh seiring dengan dinamika eksternal yang dihadapi umat Hindu baik di Lombok maupun di Sumbawa.

Potensi secara internal juga bisa dilihat dari aktivitas gotong royong yang dilakukan umat Hindu ketika akan melaksanakan upacara ritual. Baik laki-laki maupun perempuan bersama-sama mejejaitan di Pura. Ini adalah bentuk pembelajaran, pemantapan Sradha bakti, menguatkan kultur dan tradisi umat Hindu di Lombok. Masyarakat juga lebih militan dan kuat pondasi keagamaan. Dalam rangka untuk penguatan identitas ke-Hinduan.

Umat Hindu di Lombok juga memiliki pura-pura besar yang menunjang peningkatan keyakinan umat Hindu. Keberadaan pura-pura besar tersebut menambah rasa percaya diri umat Hindu untuk mempertahankan agama yang telah dianut secara turun-temurun.

Tidak hanya itu, rata-rata umat Hindu di Lombok juga memiliki sanggah dan merajan yang cukup luas. Begitu juga keberadaan setra dan pura Dalem. Ketika ada umat Hindu yang meninggal, mereka juga sudah memiliki setra yang digunakan untuk upacara kematian. Artinya dalam hal melaksanakan upacara keagamaan dan peningkatan *Sraddha Bhakti*, umat Hindu di Lombok memiliki infrastruktur keagamaan yang telah memadai.

Namun di balik 'indahya' potensi keberadaan umat Hindu di Lombok, sejak beberapa tahun terakhir ini, umat Hindu di Lombok mengalami hambatan secara eksternal. Hubungan antarumat beragama yang dulu berjalan sangat harmonis, kini berubah menjadi penuh sentimentil dan kebencian. Adapun beberapa hambatan nyata yang dialami umat Hindu sesuai

dengan pemaparan para narasumber di FGD, dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Konflik dalam urusan keagamaan. Umat Hindu sering diatur dalam kegiatan-kegiatan keagamaan oleh umat lain – dalam hal ini Islam. Contoh kalau *ngaben*, tidak diperkenankan menggunakan gambelan ketika jam sembahyang umat Islam. Umat Hindu di Lombok tidak bebas menggunakan sarana ritualnya. Mereka harus menyesuaikan dengan jam-jam ibadah umat Islam di Lombok. Apalagi gambelan sekarang justru dianggap haram.
2. Pendirian tempat ibadah sangatlah sulit. Umat Hindu di Lombok pernah mengalami kesulitan dalam pendirian tempat ibadah. Ada beberapa kasus yang mengemuka yakni kasus Sangkariang di perbatasan Lombok Tengah dan Barat. Padahal sejak pendiriannya dihadiri oleh Gubernur NTB.
3. Soal sampah upakara. Kalau ada sampah canang dan sisa pecaruan, mereka merasa keberatan. Karena itu umat Hindu menyiasati dengan cara bersih-bersih ketika melaksanakan upacara Yadnya.
4. Tidak boleh menggunakan alat penguat suara. Bahkan penguat suara yang digunakan oleh umat Hindu diatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan umat Islam.
5. Kesulitan mendapatkan tanah kuburan di Praya. Padahal keberadaan setra sangat diharapkan oleh umat Hindu.
6. Sulitnya melaksanakan Utsawa Dharmagita, bahkan sempat gagal.
7. Ketika pura berada di tengah-tengah lingkungan agama lain, umat Hindu harus meminta ijin keramaian dan segala macamnya ketika akan melaksanakan kegiatan keagamaan. Seperti yang terjadi di Lombok Utara ketika umat melakukan pujawali, saat itu ramai karena persoalan pemugaran pura yang dikatakan tanpa ijin. Pura Pemaksan semeton banjar di sana dipugar oleh seorang dari Mataram. Ketika melaksanakan pujawali timbul keributan.
8. Ketika upacara *Nyongkol* melewati Mesjid tidak boleh membunyikan sesuatu. Mereka menganggap sudah ada kesepakatan, padahal menurut umat Hindu tidak

ada kesepakatan. Menurut tokoh-tokoh umat Hindu di Lombok, isu kesepakatan itu sengat dibuat supaya umat Hindu dikerdilkan dalam melaksanakan keagamaan.

9. Kegiatan *makekawin* mingguan sering mendapatkan protes. Umat Hindu mendapatkan teror secara psikologis. Ada desakan upacara agama atau pujawali harus sudah selesai pada jam 6 sore.
10. Ketika akan melasti, umat Hindu sangat kesulitan karena dihalang-halangi. Umat Hindu harus meminta ijin untuk melaksanakan upacara tersebut. Ini salah satu bentuk upaya menghambat umat Hindu dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

D. TOKOH-TOKOH HINDU

Tokoh Purnawirawan TNI

Lombok memiliki salah satu tokoh penting yang mendedikasikan hidupnya untuk perkembangan umat Hindu. Ia adalah Purnawirawan TNI AD Bapak Made Metu Dahana. Bapak Metu Dahana lahir di Kota Mataram pada tanggal 5 Oktober 1949. Saat ini ia tinggal di Jalan Selaparang, Gang Nenas Nomor 1 Cakranegara Mataram. Ketika bertemu dengan Bapak Metu Dahana, tampak beliau adalah seorang tokoh yang sangat konsisten dalam mendedikasikan dirinya untuk umat Hindu di Lombok.

Kehidupan masa kecil Bapak Metu Dahana sangat sederhana, bahkan ia menyebut dirinya sangat menderita. Pasalnya ia dilahirkan di dalam keluarga yang serba kekurangan. Ia sekolah di Sekolah Rakyat di Cakranegara tahun 1962, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Mataram tahun 1988. Pernah mengikuti ujian persamaan Sekolah Guru Bawah di Mataram. Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri di Mataram tahun 1970. Sembari sekolah, Metu Dahana membantu orang tua sebagai petani dan berjualan makanan ayam. Memang sejak kecil Metu Dahana dikenal pekerja keras – ia tidak pernah mengeluh atas nasib yang menimpanya. Sampai akhirnya, ia masuk dunia militer dan ditempa menjadi seorang pejuang yang tangguh. Bisa dikatakan, tradisi militer turut membentuk karakter diri Metu Dahana sampai saat ini.

Bapak Metu Dahana mengikuti pendidikan militer yaitu Sekolah Perwira Militer wajib di AKMIL Magelang Tahun 1986 dan sekolah peralihan perwira di Pusat Pendidikan Infantri Bandung tahun 1990. Ia juga sebagai rohaniawan Hindu di Dinas Rawatan Rohani Hindu Angkatan Darat di Jakarta. Metu Dahana juga menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Mataram tahun 2011.

Selain sebagai purnawirawan TNI, Metu Dahana juga pernah duduk di posisi penting dalam lembaga keumatan seperti Sabha Walaka Pusat dan pengurus Parisada Nusa Tenggara Barat. Selain sebagai seorang mantan pengurus lembaga keumatan, ia juga sebagai Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi di Mataram. Tidak hanya itu, Metu Dahana juga seorang penulis buku yang sangat produktif. Tercatat judul buku yang pernah ditulis yakni Pedoman Memimpin Dewa Yadnya, Siwaratri, Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan, Sistem Kawin Lari Adat Bali Lombok dan Filosofinya, Gegibungan Bali Lombok dan Filosofinya dan sebagainya.

Tokoh Budayawan/Pembaca Sastra & Dalang

Keberadaan budayawan, sekaligus Pembaca Sastra dan Dalang di Lombok sangatlah minim. Namun peneliti mendapat informasi bahwa ada seorang Mangku Dalang yang memiliki pengetahuan yang baik terhadap perkembangan umat Hindu di Lombok, termasuk sejarahnya yang berdasarkan pada sumber-sumber babad. Tokoh ini adalah Mangku I Gde Tapak.

Mencari Gde Tapak tidaklah sulit. Ia tinggal di Lingkungan Karang Kelebut, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara Mataram. Rumah Mangku Gde Tapak melewati gang kira-kira 100 meter dari jalan aspal. Mangku Tapak hidup sangat sederhana, lahan pekarangan rumahnya juga tampak sempit. Saat ditemui, ia mengenakan baju berwarna merah duduk di beranda rumahnya sambil mengunyah tembakau.

Mangku I Gde Tapak lahir di Rendang Kelor pada tanggal 31 Desember tahun 1949. Ia dikenal sebagai seorang budayawan yang punya keahlian membaca lontar. Berdasarkan hasil pembacaan lontar dan babad, ia memiliki pengetahuan sejarah yang baik tentang umat Hindu di Lombok. Termasuk kearifan

lokal dan mitos yang diyakini oleh umat Hindu di Lombok.

Sampai saat ini pun bahasa Bali halus khas Karangasem masih digunakan oleh Mangku Gde Tapak. Meskipun sangat lama tinggal di Lombok, kemampuan berbahasa Balinya sangat bagus. Tidak mengherankan memang, karena Mangku Gde Tapak juga adalah seorang Mangku Dalang.

Kehidupan masa kecil Mangku I Gde Tapak sangat menderita. Ia tidak memiliki orang tua – yatim piatu sejak kecil. Inilah yang memicu Mangku Gde Tapak untuk terus mencari keterampilan, termasuk membaca lontar. Selama ini kemampuan Gde Tapak dalam membaca Lontar dan Medharmagita digunakan untuk mendidik generasi muda umat Hindu di Lombok ketika mengikuti Utsawa Dharma Gita. Bahkan Gde Tapak sering menjadi pelatih di bidang itu. Selama ini Mang Gde Tapak memang tidak ikut dalam lembaga keumatan, tetapi ia tetap aktif membina sekaa-sekaa santi di wilayah Mataram.

Tokoh Pemuda Hindu/Pengusaha

Tokoh-tokoh pemuda Hindu di Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok bisa dikatakan sangat militan memperjuangkan identitas ke-Hinduannya. Hal ini tercermin melalui keikutsertaan mereka dalam berbagai organisasi kepemudaan berbasis Hindu. Salah satu pemuda Hindu di Lombok yang memiliki peran penting dalam bidang keumatan adalah Nyoman Widhiarsana, S.T.

Pria berkacamata ini lahir di Kota Mataram tanggal 8 Februari tahun 1981. Ia tinggal di Graha Permata Kota Blok C 9 Selaparang. Latar belakang pendidikan adalah teknik sipil. Sejak kecil Widhiarsana hidup di lingkungan keluarga Hindu Lombok. Ia menyebut dirinya pendiam dan hobi membaca buku. Aktivitas membaca buku terutama buku-buku Hindu memang sangat berpengaruh terhadap komitmennya dalam membangun pondasi keumatan khususnya generasi muda Hindu di Lombok.

Widhiarsana sekolah di SDN 12 Mataram, lalu melanjutkan ke SMPN 1 Mataram, SMA 5 Mataram dan Universitas Mataram dengan jurusan Teknik Sipil. Meskipun latar belakang pendidikan bukan yang berhubungan dengan Hindu secara langsung, namun sejak kuliah ia gencar dalam organisasi kepemudaan Hindu.

Bahkan sejak kuliah ia pernah menjabat sebagai Ketua KMHD (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Mataram pada tahun 2002.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua PD KMHDI Nusa Tenggara barat dari tahun 2003 sampai 2005, selanjutnya sebagai Presidium PP KMHDI pada tahun 2006-2008. Tidak hanya itu, Widhiarsana juga tercatat sebagai Sekretaris PHDI NTB dari tahun 2009-2014, Ketua DPP Peradah NTB tahun 2014-2018, Sekretaris DPD Prajaniti NTB tahun 2018, Anggota Badan Penyiaran Hindu PHDI Pusat, dan penyuluh Agama Hindu non PNS di Lombok. Sederetan keikutsertaan di dalam berbagai organisasi kepemudaan Hindu dan organisasi keumatan menunjukkan jika Widhiarsana memang memiliki peran besar dalam dinamika perkembangan umat Hindu di Nusa Tenggara Barat.

Selain sebagai seorang pemuda Hindu, Widhiarsana juga sebagai seorang pengusaha muda di Lombok. Bahkan ia masih menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Hindu Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah.

Tokoh Lembaga Umat/PHDI

Nusa Tenggara Barat memiliki banyak tokoh-tokoh yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan umat Hindu baik di Lombok maupun Sumbawa. Hal ini bisa dilihat dari perannya di lembaga-lembaga keumatan. Salah satunya adalah I Gde Mandra yang saat ini duduk sebagai Ketua PHDI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

I Gede Mandra lahir di Pagutan, Lombok Barat pada tanggal 5 Oktober 1955. Ia tinggal di jalan Bandasraya, Gang Ramayana Nomor 10 Mataram. Mandra memulai karier sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Jenjang pendidikan yang ia selesaikan yakni dari Sekolah Dasar sampai Magister.

Kehidupan masa kecil Mandra tidak jauh berbeda dengan tokoh Hindu lainnya di Lombok. Rata-rata, orang yang militan di dalam ranah keumatan, kehidupan masa kecilnya penuh penderitaan.

Sebagaimana diceritakan oleh Mandra bahwa sejak kecil ua dibesarkan dan disekolahkan oleh ibu angkatnya. Ibu angkat ini adalah saudara kandung dari ibunya. Ia menceritakan dirinya

hidup memprihatinkan. Sejak kecil ia harus dituntut mandiri. Sambil sekolah Mandra bertugas membantu orang tuanya untuk mencari penghidupan. Inilah yang membentuk jiwa dan karakter Mandra sampai bisa dipercaya menduduki posisi-posisi penting di lembaga keumatan.

Peran Mandra di lembaga keumatan bisa dikatakan cukup besar. Tercatat ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PHDI Kota Mataram. Pernah sebagai Wakil Ketua PHDI. Mandra juga dipercaya sebagai Ketua Desa Pakraman Pagutam Mataram. Saat ini ia masih menjabat sebagai Ketua PDI Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2014-2019.

Selain malang melintang di lembaga keumatan, Mandra juga dikenal sangat aktif dalam berbagai kegiatan keumatan. Saban ada hari-hari besar umat Hindu, begitu pula upacara besar umat Hindu, Gde Mandra selalu dipercaya menjadi panitia pelaksana. Ini menunjukkan bahwa Gde Mandra memiliki pengalaman yang sangat baik di bidang keumatan dan kegamaan. Meskipun sudah berumur, namun Gde Mandra tetap memiliki energi yang besar untuk mengurus umat Hindu di Nusa Tenggara Barat.

Tokoh di Bidang Hukum

Salah satu nama tokoh umat Hindu yang konsen di bidang hukum adalah Ida Made Santi Adnya, SH. M.H. Selama ini pengetahuan Santi Adnya tentang hukum sangat diperlukan untuk memperkuat kelembagaan umat Hindu khususnya organisasi keumatan di Lombok. Santi Adnya lahir di Mataram, tanggal 6 Juli 1967. Ia mengenyam Sekolah Dasar di SD Nomor 1 Monjok Mataram, lalu melanjutkan ke SMP 3 Mataram dan SMAK Kesuma Cakranegara. Santi Adnya memang dibesarkan dalam lingkungan umat Hindu di Mataram. Masa-masa kecil Santi Adnya juga di Kota Mataram. Setelah dewasa, Santi Adnya tertarik untuk belajar hukum. Ia pun kuliah Sarjana dan Magister Hukum di Universitas Mataram (UNRAM).

Selama ini Santi Adnya menjadi orang berpengaruh dalam bidang hukum. Selain pekerjaan sebagai seorang pengacara, ia juga aktif memberi advokasi kepada umat Hindu yang sedang menghadapi persoalan hukum. Reputasi Santi Adnya di bidang hukum tidak hanya diperhitungkan di tingkal lokal, tetap juga

nasional.

Santi Adnya juga aktif di lembaga-lembaga keumatan seperti PHDI Kota Mataram, dan sebagai Ketua Tim Advokasi PHDI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepedulianya terhadap keberadaan umat Hindu dan lembaga keumatan membuatnya selalu konsisten berada di garda terdepan untuk memberikan bantuan hukum. Saat ini Ida Made Santi Adnya tinggal di Jalan RS Kartini No 28 Monjok Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

Soegianto Sastrodiwiryo, 2008: *Perjalanan Dang Hyang Nirartha (Sebuah Dharmayatra dari Daha sampai Tambora)*, Yogyakarta : PT.BP.

A.A Gde Putra Agung 2006: *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber Internet :

www.ntbprov.go.id

LAMPIRAN

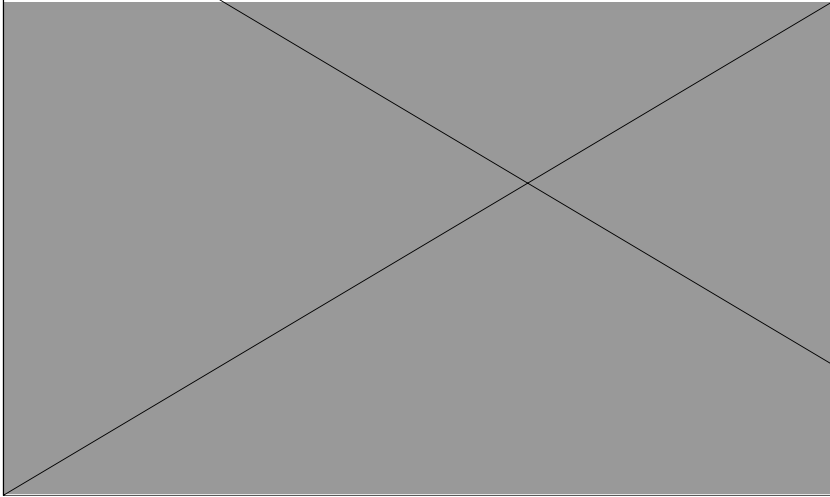


Foto 36. FGD yang diselenggarakan di STAHN Gde Pudja Mataram bersama para narasumber yang terdiri dari akademisi Hindu, advokat, pengurus Parisada, pengusaha, pemuda Hindu dsb.



Foto 37. Peneliti usai mewawancarai tokoh umat Hindu di Lombok Bapak. Made Metu Dahana.

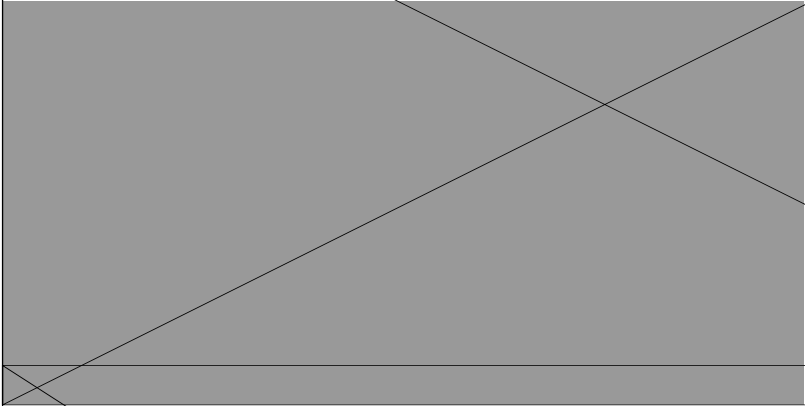


Foto 38. Peneliti saat wawancara dengan Ketua STAHN Gde
Pudja Mataram
Bapak Dr. I Nyoman Wijana, M.Si

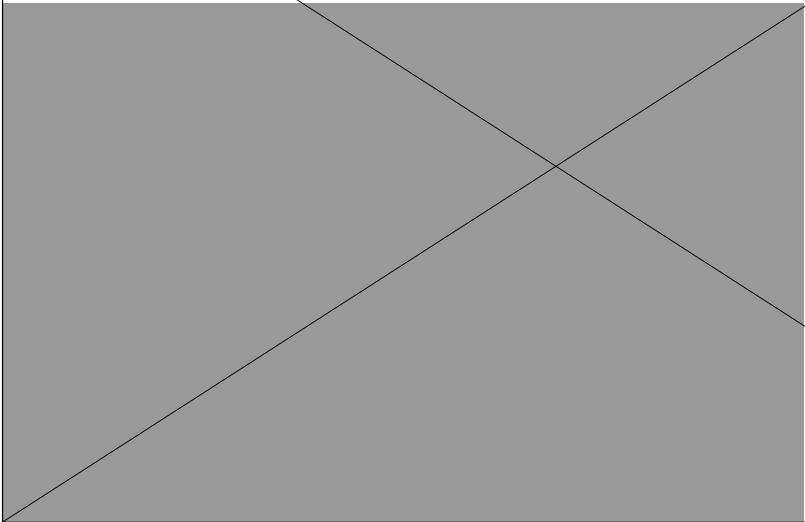


Foto 39. Peneliti saat wawancara dengan dua tokoh umat Hindu
di Lombok yakni Dr. Wayan Wirata dan Dr. I Nyoman Murba
Widana

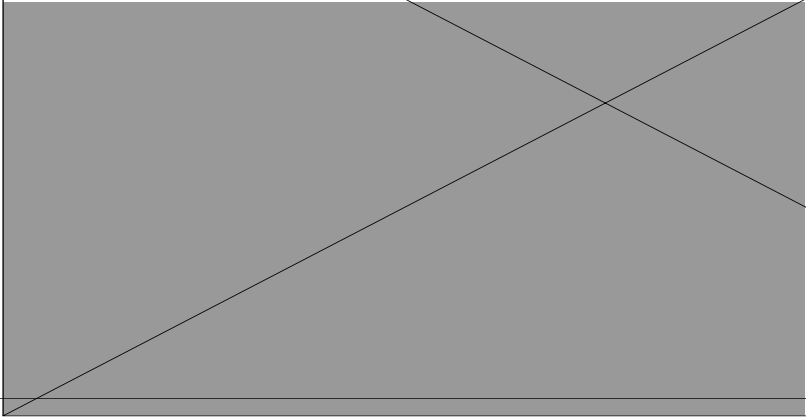


Foto 40. Peneliti saat mencari data di Kementerian Agama Kota Mataram

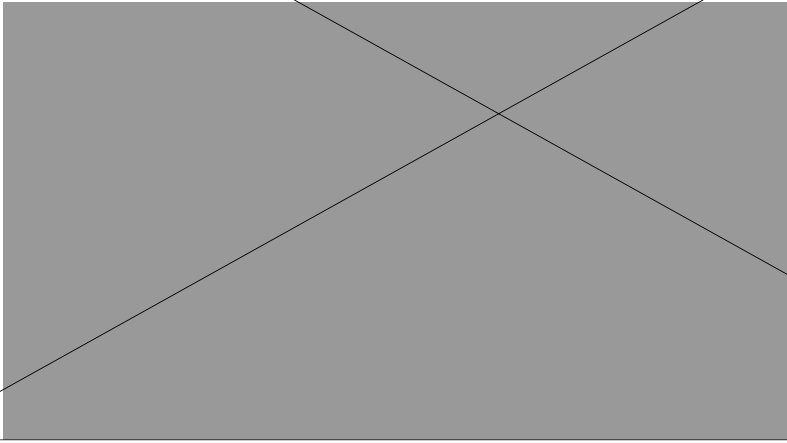


Foto 41. Peneliti saat wawancara dengan Mangku Gde Tapak, seorang penekun sastra Hindu.

DAFTAR INFORMAN

Nama : Ida Made Santi Adnya, SH, M.H
Tempat dan Tgl Lahir : Mataram, 6 Juli tahun 1967
Pekerjaan : Advokat
Pendidikan : Magister
Alamat : Jalan RA. Kartini No. 28 Monjok Mataram

Nama : Dr. I Gusti Lanang Media
Tempat dan Tgl Lahir : Mataram, 17 September 1959
Pekerjaan : Dosen
Pendidikan : Doktor (S3)
Alamat : Jalan Mayura No. 2 Mataram

Nama : drh. Nyoman Sembah, S.Ag, M.Si
Tempat dan Tgl Lahir : Buleleng, 8 Juli 1961
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Pendidikan : Magister (S2)
Alamat : Jalan Sakura I Blok G No. 92 BTN Sweta

Nama : Nyoman Widhiarsana, ST
Tempat dan Tgl Lahir : Mataram, 08 Februari 1981
Pekerjaan : Wiraswasta/Pengusaha Muda
Pendidikan : S1 Teknik Sipil
Alamat : Graha Permata Kota Blok CB 9

Nama : I Gede Renjana
Tempat dan Tgl Lahir : Cakranegara 17 Juli 1962
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Sarjana Ekonomi
Alamat : Jalan A. Yahi I/2 Sweta Cakranegara

Nama : Dr. I Nyoman Wijana, M.Si, M.Pd
Tempat dan Tgl Lahir : Bali 11 Agustus 1966
Pekerjaan : Dosen
Pendidikan : S3
Alamat : Jalan Melawai, Gang Mekarsari III No. 1
Gebang, Mataram.

Nama : I Gede Tapak
Tempat dan Tgl Lahir : Rendang Kelor, 31 Desember 1949
Pekerjaan : Mangku Dalang
Pendidikan : SMEP
Alamat : Lingkungan Karang kelebut, Keluهران
Cakra Selatan, Kecamatan Cakra Negara

Kota Mataram

Nama : Made Metu Dahana
Tempat dan Tgl Lahir : Mataram 5 Oktober 1949
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Pendidikan : S2
Alamat : Jalan Selaparang, Gang Nenas Nomor 1
Cakranegara Mataram

DINAMIKA AGAMA HINDU DI BALI DALAM KONTEKS LOKAL, NASIONAL, DAN GLOBAL

I Putu Gede Suwitha
I Wayan Sukayasa



Peta Provinsi Bali (google.com)

Sejarah pengakuan agama Hindu sebagai agama resmi di Indonesia cukup panjang dan berliku. Pada tanggal 26 Juni 1958 sejumlah organisasi pemerintah mengusulkan agar agama Hindu diletakkan sejajar dengan agama lainnya. Utusan-utusan sebelumnya selalu ditanya apakah agama Hindu punya nabi, punya kitab suci atau hanya dipeluk oleh orang Bali semata. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 1958, lima orang utusan agama Hindu menghadap Presiden Sukarno di Istana Tampak Siring (Bali). Beberapa orang di antaranya adalah Wayan Gede, Ida Bagus Doster, dan I Ketut Kandia. Mereka menyampaikan

aspirasi kepada Presiden agar Hindu diakui sebagai agama yang sah di Indonesia dan mengusulkan pembentukan Parisada (Gosa, 1986 : 19-21).

Agama Hindu menjalani perkembangan pesat setelah diakui oleh pemerintah dan dibentuknya majelis agama Hindu tahun 1959. Hal ini karena Hindu tidak saja mengajarkan ajaran-ajaran universal, tetapi juga sangat baik menerima perubahan. Hindu menerima segala perubahan dan mempergunakan alat, sarana yang baru, tetapi tidak menghilangkan inti-sari atau prinsip ajaran (Widya Dharma No. 8, 1984 : 30). Dalam prinsip-prinsip ideologi secara filosofi, agama sebagai ideologi harus terus dikembangkan. Agama Hindu yang datang dari India melalui Jawa dan sampai di Bali dalam bentuk ajaran yang sering disebut Ciwa Buddha. Pada zaman kerajaan-kerajaan di Bali setelah zaman Bali Kuno, kehidupan agama Hindu mendapat tempat yang paling atas. Pendeta Hindu mendapat posisi yang tinggi sebagai pendeta kerajaan atau Bhagawanta.

Perlu juga diketahui terjadi perbedaan konsep antara I Gusti Bagus Sugriwa dan Ida Bagus Mantra tentang nama Hindu. Menurut Sugriwa, kalau agama Hindu saja, tidak ada Bali, tidak sesuai dengan fakta sehari-hari bahwa Agama Bali dipeluk masyarakat Bali sebelum agama Hindu masuk ke Bali. Pelaksanaan agama Bali juga dipimpin oleh para Pendeta Bali seperti: Pemangku, Dukuh, Empu dan sebagainya (Sugriwa, 1968 : 29).

Sementara itu, menurut Ida Bagus Mantra, agama Hindu juga memasuki perkembangan yang meluas secara nasional. Hindu diakui sebagai agama yang sah di Indonesia salah satunya karena agama ini juga dianut oleh suku-suku lain di Indonesia tidak hanya suku Bali. Oleh karena itu menurut Ida Bagus Mantra, supaya tidak menimbulkan masalah, nama yang paling pas adalah agama Hindu. Pengertian agama Hindu atau Hindu Dharma mempunyai wawasan atau pengertian yang lebih luas, mencakup agama Hindu seluruh Indonesia, tanpa mengurangi identitas lainnya (Gosa, 1986 : 40).

Hubungan dengan India tidak dalam bidang seremonial saja, tetapi hubungan yang mengakar dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya agama. Menurut Suacana (wawancara),

bahasa Sansekerta adalah bahasa sebagai kunci untuk masuk kalau kita mendalami agama Hindu. Kita tidak bisa lepas dari India karena bahasa sansekerta berakar dari sana. Bahasa Sansekerta adalah bahasa Weda dan sekaligus bahasa ibu. Bahasa Bali tanpa kita sadari dasarnya adalah bahasa Sansekerta. Kita juga memuja Gangga setiap hari, menghafal Sansekerta dan menggunakan Weda dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan sejarah antara India dan Indonesia tampak jelas pada abad ke-4 ketika ada raja Hindu di Kalimantan Timur, Taruma Negara di Jawa Barat, dan Majapahit di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit runtuh diindikasikan karena melupakan Weda.

Masuknya Hindu ke Indonesia dibuktikan dengan adanya peninggalan kerajaan di Kutai, Kalimantan Timur, Kerajaan Taruma Negara di Jawa Barat, kemudian kerajaan lainnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, juga daerah-daerah lain maupun candi dengan paham Ciwa atau Ciwa Siddharta, (Rudia: 5) dari pertemuan Ciwa (Hindu) dengan kepercayaan asli Indonesia, atau Bali maka muncul 9 sekte di Bali (R. Goris, 1974: 12-27). Muncul beberapa naskah lontar tentang Siwa. Kemudian semua sekte disatukan oleh Empu Kuturan dengan pemujaan Tri Murti (Suraba, 2013: 99-108). Danghyang Nirartha setelah abad 14 merintis pemujaan kepada Siwa melalui bangunan suci Padmasana. Penyatuan sekte-sekte di Bali demikian luluh dan tampak sangat menyatu.

Ajaran Hindu Dharma Indonesia adalah Ciwa Sidantha yang khas Indonesia, namun tidak bisa dilepaskan dari sumbernya India (*Sruti* dan *Smerti*). Ajaran Hindu di Indonesia dewasa ini adalah ajaran Siwa yang menjiwai tradisi lokal (agama lokal) Indonesia seperti di Bali, Jawa, Kaharingan dan yang lain. Agama Hindu Indonesia adalah agama perpaduan, yang oleh Rudia Adiputra disebut anyaman atau rajutan. Perpaduan beberapa konsep ajaran Weda dan budaya lokal (tradisi). Dengan demikian tidak ada pola yang baku seperti agama lain katakanlah Islam dan Kristen.

Menurut pandangan tokoh Bhujangga Waisnawa, dr. Nyoman Sugita, S.P.A:

“kita tidak berhenti pada pengembangan agama Hindu di Bali. kehidupan agama Hindu sarat dengan upacara dan upakara

tanpa diketahui apa makna dan filosofinya. Bagaimana kita mengembangkan pemahaman tentang srada (filosofi), kemudian berubah perilaku kita sebagai umat beragama (etika, susila), ini harus seimbang (wawancara, 1-12-2018).

Menurut Nyoman Sugita, Desa Pakraman tidak harus membangun Kayangan Tiga secara megah. Puluhan milyar hanya untuk bangun fisik, belum lagi upacara. Pembangunan pura yang megah, dengan upacara dan upakara yang megah sama artinya meninggalkan beban yang berat kepada anak cucu. Apakah tidak sebaiknya dana pura untuk menyiapkan sumber daya manusia yang baik. Selanjutnya menurut Sugita, Tuhan ada dimana-mana dan Tuhan tidak berwujud (nirguna) (Sugita, tt : 34-35).

Oleh karena itu orientasi Hindu sebenarnya nasional dan global, Hindu Dharma, atau Hindu, bukan Hindu Bali. Bagaimana menyatukan atau mengintegrasikan umat Hindu nusantara supaya bisa bersinergi dengan umat Hindu Bali, India dan global. Bagaimana mensinergikan Bali, Jawa, Kaharingan, Toraja, India, tentu menegakkan payung Hindu. Tokoh-tokoh Hindu harus bisa bersinergi dalam payung besar Hindu Nusantara. Tokoh-tokoh Hindu Nusantara dari Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya harus bersatu dan diakomodasi oleh parisada.

Pemikiran dan pendidikan Hindu kiranya tidak hanya berorientasi ke India atau ke Bali, melainkan juga memberi ruang pada kreativitas dan budaya di Nusantara yang lahir dari pertemuan Hindu dengan kultur lokal di berbagai daerah. Namun seluruhnya tetap berpegang pada nilai-nilai kebajikan universal. Dengan demikian akan mendorong lahirnya generasi yang berpikiran terbuka, berkarakter, memiliki solidaritas, dan tentunya akan mendukung perkembangan Hindu ke depan. Terkait dengan cita-cita ini, tentu parisada memegang peranan signifikan. Sebagaimana disebutkan dalam Mahasaba I tahun 1964, bahwa salah satu tugas Parisada adalah menata, merumuskan dan mengembangkan kehidupan beragama menghadapi perubahan jaman (Kompilasi Dokumen 45 Th. Parisada).

Untuk menyatukan Hindu Nusantara perlu memperluas konsep agama yang lebih universal seperti: *Padmana Sana, Kayangan Jagat, Padma Buana. Padma Buana* Nusantara

melambangkan Tuhan ada di mana-mana. Ini sifat politis untuk mengembangkan agama Hindu. Padma Buana Nusantara termasuk kayangan jagat, ia meliputi nasional dan juga global, Tuhan ada di mana-mana (Wiana, wawancara 3-12-2018).

Padma Buana Nusantara yang ada di luar Bali seperti Pura Gunung Salak di Bogor, adalah pura untuk tempat pemujaan umum. Artinya tempat pemujaan umat dengan tidak membedakan asal-usul keluarganya, asal desa maupun profesinya. Pura ini sebagai tempat pemujaan untuk siapa saja di muka bumi ini. Berbeda dengan *Pura Swagina*, pura tempat pemujaan sesama profesi seperti Pura Melanting untuk para pedagang (Ketut Wiana).

Dalam konteks pengembangan agama Hindu ke depan, menurut Ida Rsi Putra (warta Bujangga Waisnawa, No. 9, 2018), seyogyanya umat Hindu tidak lagi “berenang dalam tradisi” tanpa mengkaji dan mendalami lebih lanjut. Oleh sebab tidak semua tradisi yang selama ini dijalankan sesuai dengan zamannya, apalagi dikaitkan dengan keuangan masyarakat. Ujung-ujungnya tentu memengaruhi kemajuan masyarakat. Selanjutnya menurut Rsi, diperlukan reformasi ritual dalam beragama. Bukan kita meninggalkan tradisi, tetapi merevitalisasi tradisi yang kita miliki. Bukan sekedar menyederhanakan tetapi memahami dan melaksanakan sesuai situasi dan kondisi saat ini. Agama yang harus ditradisikan, bukan tradisi yang diagamakan.

Suatu yang ironis terjadi atau dilakukan upacara besar di Pura Dasar Buana Gelgel – Klungkung. Menurut panitia, upacara ini dilakukan selama lebih dari sebulan meliputi seluruh warga Desa Adat Gelgel, upacara ini tidak pernah dilakukan selama kurang lebih 500 tahun dan terakhir dilakukan pada zaman Kerajaan Gelgel. Timbul pertanyaan, apa manfaatnya mengembalikan tradisi yang sudah tidak sesuai dengan zamannya (Bali Post, 1-12-2018).

Selanjutnya menurut Dr. Gde Suacana MSi, seorang intelektual Hindu, terkadang kita terjebak pada tradisi. Tradisi itu dilakukan ketika zaman agraris dahulu dan dilaksanakan secara kolektif. Contohnya *Ngaben Ngerit* di sebuah desa memerlukan durasi waktu sampai satu setengah bulan (45 hari). Tentu tradisi ini tidak sesuai lagi dengan zamannya, oleh karena itu sekarang

ada cara kremasi. Kremasi adalah upacara pembakaran mayat yang sudah ada dalam tradisi Hindu di India dan juga Buddha.

Berdasarkan tradisi Hindu di Bali, ada dua cara pengabenan yaitu dengan menggali lagi tulang-tulang untuk kemudian dibakar; dan menanam jenazah sampai hancur sementara yang dibakar adalah kayu simbol (simbolis). Masing-masing cara ini memiliki kelemahan. Kalau yang digali tentu secara higienis sangat berbahaya, sedangkan cara kedua membuat kuburan menjadi penuh. Untuk itulah jalan kremasi adalah salah satu jalan terbaik. Setiap desa adat dapat menyiapkan krematorium di kuburan masing-masing (wawancara, 11-1-2019).

Menghadapi suatu perubahan yang memang pasti terjadi, ajaran Hindu telah menyiapkan konsep-konsep berdasarkan ajaran sastra Hindu. Filosofi dan konsep Hindu mengenai perubahan dapat dicermati pada pustaka: *Bhuwana Kosa*, yang pada intinya berisi bahwa hidup ini adalah proses dan proses itu adalah perubahan. Memang ada perubahan yang menuju jalan *adharma*, tentu ini harus dihindari, namun, pada kenyataannya dari zaman ke zaman ada aspek hidup yang berubah menuju kebaikan. Selanjutnya menurut Wiana (2015: 205-206) menghadapi suatu perubahan yang pasti, perlu dilakukan sosialisasi untuk memahami yang benar. Sedangkan kajian-kajian yang cerdas dan bijak perlu dilakukan dalam rangka implementasinya sebab untuk menciptakan, memelihara, dan meniadakan sesuatu dengan benar dan tepat sesuai dengan kebutuhan zaman bukan perkara yang mudah. Dalam hal ini dibutuhkan keterpanggilan intelektual Hindu untuk mencurahkan ilmu dan pikirannya secara terpadu. Dengan demikian dinamika adat-istiadat budaya Hindu tidak berproses tanpa kendali. Apalagi semakin menjauh dari dasarnya yaitu sastra Hindu yang mengandung Sanatana Dharma.

A. EKONOMI HINDU

Apakah Hindu mempunyai sistem ekonomi atau dasar perekonomian yang dapat dikembangkan? Dasar ekonomi Hindu adalah *catur purusartha* yaitu: *Dharma*, *Artha*, *Kama*, dan *Moksa*), terutama *Artha*. Menurut ajaran Hindu: lakukanlah kewajiban mencari artha dengan sebaik-baiknya dengan dasar *Dharma* (kebenaran), moral dan etika dalam ajaran Hindu.

Setelah berhasil dalam bidang ekonomi, kekayaan dibagi 3 (tiga) sesuai dengan peruntukannya : untuk sosial-agama terutama *yadnya*, untuk kebutuhan harian, dan untuk modal usaha.

Dari aspek modal usaha, Hindu konsentrasi pada ekonomi dan bisnis, bukan *yadnya* dan ritual saja. Modal usaha harus dipupuk untuk mengembangkan ekonomi supaya lebih maju. Dengan ekonomi maju keluarga bisa terjamin sejahtera (lahir), bisa menempuh pendidikan. Ini kebutuhan harian makin penting di masa-masa perkembangan masyarakat Hindu yang modern. Dengan sejahtera (lahir), kebutuhan *yadnya* dapat semakin terpenuhi, adapunt tiga bentuk *yadnya* antara lain:

1. Non Materi (imateri): peningkatan iptek, keterampilan, pembentukan karakter, spiritual, termasuk peningkatan SDM.
2. Materi: memberikan dana punia dalam bentuk uang untuk kepentingan keagamaan. Jadi dana punia merupakan penghasilan yang sah, dana yang diperuntukkan untuk pengembangan agama.
3. Ritual: melakukan upacara dan upakara. Ritual ini bisa menyesuaikan dalam tingkatan: nista, madya, utama dan masing-masing dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. Untuk melakukan ritual, tidak boleh sampai berhutang, menjual warisan. Ritual sangat fleksibel dapat disesuaikan dengan kemampuan. (wawancara dengan Gde Rudia Adiputra).

Agama Hindu menggariskan bahwa tujuan hidup manusia adalah pemenuhan 4 (empat) tujuan hidup yang disebut Catur Purusartha yakni dharma (kebijakan), artha (keayaan), kama (keinginan, hasrat), dan moksha (bebas dari kehidupan). Dasar ekonomi Hindu lainnya adalah: Catur Warna. Catur warna yaitu Brahmana Karma, Ksatria Karma, Wesya Karma dan Sudra Karma yang kemudian melahirkan pembagian pekerjaan (*division of labour*), dalam masyarakat. Keempat pembagian tugas ini secara riil telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dalam menggerakkan ekonomi Hindu:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Brahmana Karma | : | mereka yang bergerak dalam profesi sebagai ahli agama dan guru. |
| Ksatria Karma | : | mereka yang bergerak dalam pemerintahan dan pertahanan. |

- Wesya Karma : mereka yang bergerak dalam perdagangan dan industri.
- Sudra Karma : mereka yang bergerak dalam pertanian, perkebunan, pertambangan dan pekerjaan lain.

Pada masa lalu ada kecenderungan masyarakat Hindu tidak terlalu fokus pada ekonomi, sehingga kelompok yang bergerak dalam bidang ekonomi dianggap kurang tinggi atau kurang berwibawa. Tetapi di masa-masa mendatang, seperti disebutkan di depan, bisnis dan ekonomi menjadi hal yang penting. Dalam catatan sejarah dapat kita ketahui dengan jelas bahwa kejatuhan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia—Majapahit bukan karena diserang oleh musuh-musuhnya dari luar, tetapi karena melupakan kehidupan perekonomian rakyatnya karena sibuk bertengkar dan berperang, sawah terlantar, dan sebagainya.

Karmapala yang merupakan keyakinan dan doktrin dapat juga dijadikan landasan bagi ekonomi Hindu. Karmapala mengharuskan ekonomi Hindu berlandaskan pada etika dan kebenaran. Dengan berlandaskan dan menjunjung tinggi kebenaran dan etika akan mendapatkan kepercayaan di kalangan bisnis. Cita-cita kehidupan menurut agama Hindu secara jelas dinyatakan dalam ungkapan “Moksaartham Jagatdhita” yang merupakan filsafah ekonomi bagi masyarakat Hindu, dalam arti kesejahteraan universal dan moksa.

Adapun persaingan dalam kegiatan ekonomi harus diterima sebagai kegiatan yang wajar dalam masyarakat. Persaingan merupakan perwujudan dari pekerjaan. Perolehan hasil (profit) dalam kegiatan ekonomi adalah suatu hal yang wajar. Nilai keuntungan sebanding dengan nilai kualitas pelayanan yang diberikan. Keuntungan adalah tiada lain juga karena yang berlandaskan etika ekonomi dan bisnis dengan kekuatan kebenaran dan nilai-nilai agama (Kiswardi, idem).

Catur Asrama (Brahmacari, Grehasta, Wanaprasta dan Biksuka) jangan dipahami secara sempit, tetapi harus dipahami secara mendalam dan kontekstual. Masa bertapa (wanaprasta), bukan di hutan, tetapi di sekolah dan belajar, sehingga mendapatkan pengalaman yang luas tentang ilmu pengetahuan dan dunia kerja. Artha itu penting, begitu juga Kama (keinginan),

tetapi harus didasari oleh dharma. Masih muda, belum cukup pengetahuan (Brahmacari) harus belajar mencari pengetahuan. Hindu juga mempunyai manajemen ekonomi yang merupakan penerapan dari ajaran kebenaran yang tersirat dalam pelinggih Taksu Geginan. Ajaran kebenaran yang tersirat didalamnya bahwa hidup harus bekerja atau bekerja untuk hidup. Umat diharapkan berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dalam hidupnya. Dengan kesejahteraan, umat dapat menjalankan dharma, berdharma memberikan pelayanan yang terus seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam konsep Taksu Geginan Ketut Wiana menyebut Pura Swagina (Wiana, 2007 : 60). Artinya, umat Hindu dituntut untuk tekun dan ulet mengisi waktu dengan bekerja, sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat dipergunakan untuk membantu diri sendiri dan disumbangkan kepada sesama. Bekerja harus diatur dan ditata dengan baik agar dalam perjalanan hidup dapat memberikan kebahagiaan, inilah yang disebut Management Ekonomi (Dharmawan, 2007: 88).

Gede Darmawan, seorang pebisnis dan pegiat spiritual Hindu mengajukan analisis SWOT dalam manajemen Hindu. Analisis SWOT ini meliputi atau melihat pertama kekuatan dan kelebihan (*strength*): umat Hindu jujur, taat aturan dan kekuatan gotong royong masih dapat dipelihara. Kelemahannya (*weaknees*) umat Hindu kurang memahami manajemen modern, kurang mempelajari ajaran-ajaran suci terutama yang berasal dari Weda. Kesempatan (*opportunity*) masih terbuka lebar terutama bagi generasi muda untuk melakukan kegiatan yang dimaksud bukan ritual saja, tetapi meningkatkan derajat hidup, bidang sosial-budaya, politik, dan ekonomi (Putu Setia, 1992: 206).

Sebagaimana disebutkan tadi, kehidupan manusia Hindu berjenjang yaitu Brahmacari, Grehasta, Wanaprasta, dan Bhiksuka. Dalam ekonomi berlaku juga penjenjangan. Pada umur tertentu sebaiknya sudah melakukan tahapan ekonomi yang berbeda yang disebut Triwarga. Jenjang Triwarga yaitu Darma, Artha, Kama. Pada tahap Darma, umat mendapat ilmu keterampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk menjalani hidup. Pada masa ini masih dalam pengawasan orang tua dan orang tua wajib membimbing, memberi bekal baik ilmu maupun keterampilan. Pada tahap

Artha, umat sudah mengamalkan ilmu dan keterampilan di dunia kenyaatan. Pada masa ini umat sudah diharapkan dapat mengumpulkan harta untuk bekal kehidupan selanjutnya. Artha dapat berupa dana (uang), benda, keterampilan dan kekuatan atau kekuasaan (Soemarsaid Moertono, 1969). Tahap terakhir adalah Kama, pada masa ini, umat sudah dapat menikmati hasil kerja dan pengalaman yang diperoleh dari penerapan ilmu dan keterampilan sebelumnya. Menikmati hasil kerja dengan kebanggaan dan ketekunan dalam bekerja, tetapi tidak bertentangan dengan dharma dan murni hasil pengalaman ilmu dan keterampilan.

Untuk mendorong kemandirian ekonomi tentunya dibutuhkan dukungan oleh pemimpin. Seorang pemimpin dalam Hindu (Rajarsi) juga harus aktif dalam memajukan ekonomi, bukan hanya pemerintahan. Tugas pemerintah sesungguhnya memajukan ekonomi masyarakat, sehingga negara maju. Selanjutnya menurut Wiana, seorang ksatria tidak hanya memimpin, tetapi membangun masyarakat sejahtera. Seorang ksatria harus mempunyai sifat *dhanan* yaitu mengupayakan keadaan ekonomi yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan ekonomi secara adil dan beradab sebagai dasar pembangunan hidup sejahtera lahir dan batin.

Konsep kemandirian ekonomi dalam masyarakat Hindu khususnya di Bali dapat dicapai melalui : Dana Punia (Badan Sosial); Desa Adat (LPD) dan Pariwisata; Desa Mandiri; dan Dana Punia. Dana punia memang tidak wajib, tetapi penting dan mulia (Sargedede, 2004: 32). Dana punia bukan saja untuk membangun fisik, tetapi juga dapat membantu sesama umat. Menurut Manguningrat, dana punia penting untuk mengelola dan mendanai pengembangan agama Hindu. Dalam mengelola dana, Manguningrat menyarankan umat Hindu *back to basic*, kembali kepada lingkungan, ekonomi sekitar dikembangkan. Upacara-upacara harus dicukupi secara mandiri tanpa bermewah-mewahan, sementara kelapa, buah-buahan, babi harus bisa dihasilkan sendiri (wawancara). Ketut Wiana juga menyarankan ekonomi Hindu dikembangkan lewat: pertanian, peternakan, dan perdagangan (Wiana, 2015: 24).

Selanjutnya perihal desa adat atau desa pakraman yang merupakan institusi lama yang sudah dikenal sebelum Majapahit masuk ke Bali, yaitu pada zaman Empu Kuturan. Pada kenyataannya, desa pakraman memiliki fokus kegiatan untuk menyelenggarakan agama, menata kewajiban hak anggota desa, menata tata guna wilayah berkaitan dengan mewujudkan hidup sejahtera (ekonomi), seperti pasar dan sekarang LPD (Lembaga Perkreditan milik Desa).

Salah satu fungsi desa adat atau desa pakraman adalah menopang agama Hindu. Fungsi ini telah berjalan dengan baik dari generasi ke generasi. Kehidupan agama dan budaya Hindu di Bali sulit dipisahkan dalam ruang lingkup desa adat. Desa adat terbilang mandiri dalam hal pengelolaan keuangan sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam bidang agama maupun ekonomi. Pendapatan desa adat selama ini antara lain berasal dari :

- a. Tanah Catu
- b. Pepeson wajib
- c. Sumbangan Sukarela (dana punia)
- d. Bantuan pemerintah
- e. LPD / Pasar / Pariwisata

Dana desa adat di kawasan pariwisata bisa mencapai jumlah yang besar didukung pula dengan bantuan pemerintah serta LPD yang semakin berkembang di daerah-daerah. Hendaknya dana yang dimiliki oleh desa adat dari LPD dan pariwisata tidak hanya untuk melaksanakan upacara besar, tetapi juga untuk meningkatkan SDM, karena hal ini akan ikut berdampak terhadap urusan-urusan agama (Budi Utama , Bali Post, 22-12-2018). Beberapa desa di Badung Selatan sudah maju karena pariwisata seperti Pecatu, Kutuh, Mengwi dan desa-desa lainnya termasuk di kawasan Ubud dan Sanur. Pengelolaan keuangan dari kemajuan pariwisata tersebut sudah diserahkan ke desa adat atau berbasis desa adat (Dharma Putra, 2017).

Setiap aktivitas keagamaan di Bali kini diikuti dengan berbagai keperluan upakara yang disebut banten. Banten adalah komponen yang sangat penting bagi masyarakat Hindu di Bali. Bahan keperluan banten seperti : buah-buahan, janur, bunga, kelapa selalu didatangkan dari luar Bali. Dahulu kebutuhan itu masih dapat dipenuhi oleh petani Bali, namun setelah berkurangnya

lahan, keperluan ini tak sedikit yang didatangkan dari luar Bali.

Ada kecenderungan di masyarakat untuk mempersembahkan buah-buahan dan tampilan banten yang “mewah”. Padahal kalau masyarakat mengetahui tattwa (ajaran) sebenarnya upacara tidak harus bermewah-mewah. Prinsip Yadnya sebenarnya tidak memberatkan, namun disesuaikan dengan kemampuan. Berdasarkan catatan I Wayan Gde Merta, dosen Universitas Hindu Indonesia (Bali Post, 23-12-2018) orang Hindu di Bali membutuhkan 38.000 ton “busung” dan 21.000 ton bunga setahun dan ini harus didatangkan dari luar Bali. Oleh karena itu, menurut I Gusti Agung Manguningrat, desa adat harus dapat memanfaatkan potensi desa, tanah-tanah kosong untuk ditanami bunga, kelapa, memelihara ternak, babi, ayam, itik untuk keperluan upakara. Hal ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemandirian desa (wawancara, 5-12-2018).

Mendatangkan kebutuhan upakara dari luar Bali tidak mendukung upaya mendorong ketahanan ekonomi Bali. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa buah-buahan untuk kebutuhan upakara harus dilestarikan. Masyarakat diharapkan memanfaatkan lahan-lahan pekarangan yang kosong untuk ditanami bahan-bahan upakara (banten). Kebutuhan ini sangat besar di Bali, sedapat mungkin dipenuhi terlebih dahulu dengan hasil pertanian lokal maupun hasil berkebun sendiri. Dengan demikian perputaran uang terjaga di wilayah Bali dan mendorong kemandirian desa. Perlu dibangun banyak koperasi dan UKM yang menjual alat-alat upakara, sehingga pemberdayaan secara menyeluruh dapat dicapai.

Pada dasarnya desa mandiri adalah desa yang mampu mengatasi ketergantungan dan mencukupi kebutuhan warga, baik dalam bidang upacara dan upakara maupun secara ekonomi dan politik. Desa dinas telah mendapatkan bantuan dana yang tidak sedikit dari pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan ini seyogyanya tidak hanya menysar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan SDM, termasuk dalam kaitannya untuk membantu menopang kemandirian umat Hindu. Secara khusus, implementasi Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat ke depan diharapkan dapat berdampak positif terhadap upaya ini.

B. POLITIK HINDU

Bagaimana Hindu berpolitik? Apakah perlu membuat partai Hindu ? Bagaimana aspirasi umat Hindu dapat disalurkan. Ini beberapa pertanyaan penting untuk menjawab politik Hindu. Mencermati Undang-Undang politik yang ada, tentu tidak memungkinkan membuat partai Hindu, karena adanya ambang batas parlemen (*electoral thershod*) yang besarnya 4,5 persen dari jumlah pemilih yang ada secara nasional. Jumlah pemilih sekarang sekitar 192.000.000 dan 4,5 persennya kira-kira 10.000.000. Bisakah partai Hindu mendapat suara 10.000.000? tentu tidak dan bahkan terkesan “bunuh diri”. Selain itu, partai Hindu akan berbentuk partai agama yang merupakan partai dengan politik identitas yang sebaiknya dihindari.

Menurut seorang ahli politik Jerman Karl W. Deutsch (1974), politik mempelajari interaksi manusia dalam mengalokasikan, memperoleh kekuasaan, kemampuan, dan pengaruh dalam berinteraksi dan bernegosiasi. Dalam konteks ini sejak lama para tokoh Hindu telah memperlihatkan kemampuan secara politik pada level nasional. Untuk masa sekarang, di era reformasi ini, posisi politik umat Hindu memang belum kuat dalam kaitannya dengan kepartaian. Namun demikian, kita bisa “menitipkan” aspirasi umat Hindu kepada wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, DPRD maupun DPD yang telah terpilih. Tentunya umat Hindu diwakili oleh Parisada harus melakukan komunikasi dua arah dengan para wakil rakyat. Hal ini memang belum pernah dilakukan selama ini. Parisada juga harus membawa konsep yang jelas, apa-apa yang perlu diperjuangkan di parlemen. Katakanlah seperti dana untuk pembiayaan pembinaan, sekolah-sekolah dan dana pembiayaan umat (wawancara dengan I Gde Rudia Adiputra). Parisada harus berkomunikasi dan bersinergi dengan wakil-wakil rakyat yang beragama Hindu baik yang ada di DRPD, DPR, dan DPD.

Menurut Dr. Gde Suacana, M.Si, seorang intelektual Hindu, politik Hindu, adalah upaya memperjuangkan nilai-nilai Hindu yang eksklusif dan toleran, tetapi tetap menunjukkan identitas atau jati diri seorang Hindu. Tidak latah membuat partai politik atau tidak mengerucut pada satu partai, tetapi partai nasionalis yang memperjuangkan Kebhinnekaan dan toleransi. Banyak hal

yang bisa kita perjuangkan seperti sekolah berbasis Hindu, juga data kependudukan yang merupakan *database* yang benar dan tidak dimanipulasi. Kenyataan di lapangan, jumlah umat Hindu seringkali tidak sesuai dengan kondisi riil. Selain itu, perjuangan untuk menguatkan umat secara internal juga harus mendapat sorotan. Internal umat Hindu di Nusantara belum kuat, ada banyak fraksi. Ada Hindu Indonesia, Hindu Bali atau Hindu India, ini kenyataannya. Friksi masalah pendeta, masalah kasta, masalah ngaben masih belum ada kesempatan dan kesatuan pandangan secara internal (wawancara, 1-12-2018).

Tujuan politik dalam Hindu adalah untuk mencapai masyarakat sejahtera yang dalam buku Arthashastra disebut dengan Catur Widya yang terdiri dari :

1. Anviksaki : menyatukan persepsi untuk menjadi cita-cita bersama.
2. Vedatry : membangun moral dan mental
3. Vartta : membangun basis ekonomi yang meliputi pertanian, peternakan dan perdagangan
4. Dauda niti : sistem manajemen yang mampu mensinergikan berbagai sumber

Ini harus dipahami oleh mereka yang ingin terjun dalam bidang politik baik sebagai eksekutif maupun sebagai legislatif (Wiana, 2015: 22-23).

Selanjutnya menurut Wiana, menjadi politisi tidaklah sekedar mengejar jabatan politik, tetapi mengupayakan kesejahteraan orang banyak. Bidang politik bukan peluang untuk mengais rejeki dan memperkaya diri. Pada hakekatnya politik adalah mengabdikan kepada rakyat. Hakekat kekuasaan adalah mengabdikan kepada yang dikuasai. Kalau boleh memberi contoh politisi zaman dahulu seperti Soekarno dan Hatta adalah teladan bagi politisi kini dalam hal mengabdikan kepada rakyat. Dalam konteks Hindu, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra adalah contoh ideal politisi Hindu yang menjalankan prinsip politik menurut Hindu (Ida Bagus Rahma dkk, 1987). Politik juga mengabdikan pada kepentingan publik. Pejabat publik akan mencapai kebahagiaan kalau dengan tulus ikhlas memperjuangkan kebenaran sebagai pengabdian. Rakyat itu sesungguhnya adalah atasan pejabat publik, jangan dibalik. Menyejahterakan rakyat adalah Dharma

bagi pejabat publik (Wiana, 2015 : 175-176).

Secara filosofi, agama dan politik mempunyai fungsi yang bertolak belakang. Paling tidak pendapat ini dilontarkan oleh Pandita Ida Rsi Waskita Sari (I Made Raka Santeria). Fungsi partai cenderung mengurus hal-hal yang menuju ke arah pertentangan atau perebutan kekuasaan, sementara agama sifatnya menyatukan. Umat Hindu harus mampu menjaga umatnya jangan sampai terpecah-belah. Menjaga persatuan bangsa adalah tugas umat khususnya umat Hindu, tujuan Hindu adalah persatuan (wawancara, 12 Desember 2018).

Menurut Dr. Wayan Surpha, M.Si, wadah politik Hindu adalah Parisada yang dapat meningkatkan aspirasi Hindu dan menjembatani antara umat dan tokoh-tokoh politik Hindu. Dasar politik Hindu sebenarnya adalah Niti Sastra yang kurang lebih berarti menata, untuk mencapai keseimbangan. Niti Sastra juga dimuat dalam beberapa kitab suci (Weda), Ithiasa, Purana, maupun kitab-kitab yang lain. Dalam Ramayana sangat populer diuraikan mengenai ajaran kepemimpinan yang disebut Astabrata. Uraian tentang Artabrata sebelumnya sudah termuat dalam Manava Dharma Sastra, tetapi tidak disebut Artabrata.

Menurut Dr. Wesna Astara seorang ahli budaya dan Hindu yang mendalami desa pakraman, lahirnya agama Hindu dalam arti diakui sebagai agama yang sejajar dengan agama-agama lain adalah proses perjuangan politik. Tokoh-tokoh agama dan politik pada tahun 1950 an seperti I Gusti Bagus Sugriwa, Wedastra Suyasa berhasil memperjuangkan agama Hindu dan selanjutnya membentuk Parisada tahun 1956. Ini adalah proses politik tingkat tinggi, untuk masa sekarang atau periode reformasi ini tentu Parisada dan tokoh-tokoh Hindu harus kordinasi dengan partai-partai politik yang ada untuk kepentingan Hindu. Salah satu yang bisa diperjuangkan oleh umat Hindu lewat DPR, DPRD, maupun DPD, misalnya penganggaran dalam APBN dan APBD untuk desa adat (Hindu) untuk sekolah, pasraman, pura dan yang lain.

Menurut Ketut Wiana tokoh Parisada, politik Hindu yang paling penting adalah gagasan. Gagasan (pemikiran) dibawa ke forum partai politik atau tokoh politik. Agama menjiwai sistem yang lain seperti sistem ekonomi maupun sistem politik, yang

nanti akan melahirkan masyarakat aman, damai dan sejahtera (*Menawa Dharma Sastra*).

Dari dahulu peran tokoh-tokoh politik lokal Bali yang mempunyai jaringan nasional sangat berarti. I Gusti Bagus Sugriwa, Ida Bagus Doster, Widastra Suyasa dan lainnya berhasil membangun Parisada, meyakinkan pemerintah Sukarno atau memperjuangkan pengakuan pemerintah terhadap agama Hindu yang pada waktu itu tahun 1950 an belum diakui sebagai agama.

Pada era Orde Baru, tokoh-tokoh Hindu khususnya dari Bali membangun kedekatan dengan pemerintah dan Hindu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Pada markas-markas kepolisian, kodam-kodam, kantor-kantor pemerintah, BUMN, dan perusahaan-perusahaan besar didirikan pura. Institut Hindu Dharma (IHD-sekarang UNHI) rencana akan ditransformasi menjadi institusi negeri oleh pemerintah, namun ditolak oleh beberapa pihak. Muncul riak-riak penolakan yang dilatarbelakangi oleh persoalan soroh, klan, masalah ekonomi dan kekuasaan. Pada era reformasi beberapa tokoh Hindu dekat dengan pemerintah baik sipil maupun militer. Tokoh-tokoh Hindu seperti Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas Hindu), lewat Kementerian Agama, banyak membantu dalam hal pendanaan untuk membangun sekolah-sekolah khususnya Perguruan Tinggi Hindu (wawancara dengan Ketut Wiana).

Politik Hindu itu cenderung sangat fleksibel dan dekat dengan pemerintah. Sebagai kelompok minoritas, ini adalah strategi tersendiri. Pada masa Orde Baru, kedekatan dengan pemerintah bukan semata-mata untuk mencari kekuasaan tetapi lebih merupakan strategi agar Hindu dapat berkembang. Oleh karena itu, penulis memandang penolakan atas “dinegerikannya” IHD adalah suatu kekeliruan, meski memang ada hal positif yang dapat diambil. Misalnya saja adanya kebebasan untuk membuka program studi baru yang diperlukan oleh umat tanpa persetujuan pemerintah. Kerugiannya, kita tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah terutama pembiayaan rutin sebagai perguruan tinggi negeri. Seperti halnya agama Islam, hampir di setiap provinsi terdapat Perguruan Tinggi Negeri, bahkan di beberapa provinsi terdapat lebih dari satu

perguruan tinggi. Berbeda dengan saudara kita yang beragama Kristen, mereka mempunyai yayasan pendidikan yang kuat dari segi dana.

Seperti yang dikatakan ahli hukum adat Dr. Wesna Astara, sinergi dengan pemerintah dan legislatif merupakan bagian dari upaya memengaruhi politik anggaran. Untuk itu, perlu dilakukan inventarisasi kebutuhan umat Hindu di setiap daerah sebagai dasar pengajuan anggaran atau bantuan. Guna mendukung upaya ini, harus dilakukan kolaborasi dengan tokoh-tokoh Hindu lokal, bukan hanya yang di Bali tetapi juga seluruh pelosok Indonesia yang memiliki kantong-kantong umat Hindu. Hal ini salah satunya untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan di setiap daerah dan tantangan serta cara mengatasi persoalan yang boleh jadi berbeda dan unik antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Parisada, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota diharapkan menyiapkan data terkait sensus umat Hindu di seluruh Indonesia. Tujuannya, untuk mengetahui jumlah riil umat Hindu. Kenyataannya kini, disengaja atau tidak, sering terjadi kesalahan data sensus umat Hindu di Indonesia yang memengaruhi kebijakan politik dan politik anggaran (Wesna Astara). Parisada juga diharapkan menyiapkan informasi perihal kantong-kantong umat Hindu di seluruh Indonesia berupa Purana. Purana ini berisi sejarah Hindu di beberapa provinsi di Indonesia, berikut masalah dan tantangannya.

Ketika terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) periode 2016-2021, Mayor Jendral TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, S.IP, telah menyampaikan *grand strategy* perkembangan Hindu ke depan. Salah satu yang digarisbawahi adalah pembangunan Sumber Daya Manusia Hindu di Indonesia. Wisnu Bawa Tenaya kemudian berupaya bekerjasama dengan berbagai stakeholder terkait untuk mewujudkan visi *grand strategy* tersebut. Salah satunya adalah membina umat Hindu dengan cara menerjunkan para penceramah-penceramah agama Hindu untuk melakukan safari dharma wacana pada setiap kegiatan umat di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar umat Hindu Indonesia memiliki kesiapan mental menghadapi era kompetisi global yang menurutnya semakin ketat.

C. WARGA, WARNA, SEMETON, DAN SULINGGIH

Pembahasan singkat tentang warga (soroh), warna, semeton, wangsa (kasta) sangat perlu, karena sering disalah-artikan terutama dalam masyarakat Bali. Hal ini tentu juga berimbas pada pemahaman masyarakat Hindu secara keseluruhan (nasional). Sebenarnya soroh dan yang sejenisnya dalam rangka membangun Hindu Indonesia (Hindu Nusantara) tidak begitu penting. Dengan mengedepankan soroh dan sejenisnya, tentu akan kesulitan bagi kita Hindu menempatkan umat Hindu di luar Bali. Misalnya saja, bagaimana menempatkan umat Hindu di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera—apalagi mereka yang baru masuk Hindu— ke dalam kategori soroh? Ini tentu menjadi suatu hambatan budaya tersendiri. Contohnya, saudara kita di Lombok Utara dari Suku Sasak-Bayan yang ingin menjadi Hindu, tetapi terhalang oleh hambatan budaya ini (harus masuk soroh mana atau kasta mana). Terlebih, menurut sejarah, Suku Sasak-Bayan berasal dari Jawa dan sampai sekarang para bangsawan Bayan masih bergelar Raden.

Dalam konteks dasar fundamental agama Hindu, ajaran-ajaran kepuustakaan Hindu sering menyebut istilah *warna*, bahkan dalam Manawa Dharma Sastra disebut *Catur Warna*, bukan kasta. Perubahan warna menjadi kasta atau *wangsa* juga berimplikasi pada sulinggih (pendeta) yang sepertinya “bertingkat.” Sesungguhnya dalam masyarakat Bali terdapat pembagian secara horizontal yang disebut warga (soroh), di mana warga yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari warga yang lain. Soroh menggambarkan hal yang inklusif dalam masyarakat Bali yang berkaitan dengan garis keturunan dari pihak laki-laki (Guermonprez, 2012 : 101). Menurut Wayan Geria, soroh merupakan kelompok kekerabatan (klan besar) atau disebut warga yang terdiri atas semua keturunan dari seorang nenek moyang yang diperhitungkan melalui garis keturunan sejenis. Nenek moyang dari suatu soroh sudah hidup berpuluh-puluh angkatan yang lalu, diambil dari tokoh leluhur yang keramat. Berpuluh-puluh ribu anggota soroh tersebar dalam wilayah yang luas, dalam panjangnya rentangan sejarah, dan sering tidak saling kenal kecuali melalui kegiatan ritual atau paruman (Geria, 2009: 126).

Selanjutnya menurut Geria, suatu soroh (warga) mempunyai beberapa fungsi seperti : menyelenggarakan kehidupan keagamaan, merupakan rangka bagi hubungan-hubungan dalam masyarakat dan juga terkadang menjadi dasar organisasi politik dan pertimbangan dalam mengatur perkawinan. Dalam konteks masyarakat Hindu di Bali, kesatuan soroh terikat oleh beberapa faktor seperti: (1) ikatan pura atau peninjau (2) ikatan mitologi (3) ikatan benda pusaka yang dikeramatkan (4) terikat oleh nama dan gelar (Geria, *ibid*).

Kedudukan manusia sesungguhnya tidak tetap, melainkan dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan dunia dan perkembangan kemampuan (intelektual) manusia. Secara sosiologis manusia mengalami mobilitas baik vertikal maupun horizontal. Dalam hal ini, Weda dan ajaran suci Weda menggambarkan kedudukan manusia di masyarakat bukan berdasarkan keturunan atau kelahiran, tetapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki seseorang. Zaman dahulu ketika kitab-kitab Weda itu sudah tidak dapat dimengerti atau sulit dimengerti, para Pandita (Brahmana) membuat tafsir-tafsir Weda yakni kitab-kitab Sutra (Penuntun), kitab Dharma Sastra (Hukum). Karena banyak orang tidak dapat lagi memahami Weda, maka para Pandita (Brahmana) mempunyai kesempatan luas untuk memperkokoh kedudukannya di mata rakyat lewat tafsir-tafsir yang menghegemoni. Ini membekas sampai saat ini. Menurut amatan penulis, dalam praktek keseharian sekarang di sebuah pura, seorang Pinandita (Pemangku) yang sudah di-*ekajati* terkadang merasa kikuk memerciki tirta kepada seseorang yang diketahui berkasta. Adalagi keganjilan lain bahwa seorang yang berkasta tidak mau diperciki tirta di sebuah pura oleh pemangku yang tak berkasta.

Sesungguhnya pembodohan kasta yang keliru telah banyak ditentang oleh orang-orang suci seperti Siddharta Gautama. Gautama mengatakan : dominasi orang terhadap orang lain adalah suatu kekeliruan. Tidak hanya kaum Brahmana yang mempunyai otoritas terhadap para dewa (Tuhan-red), tetapi semua umat adalah sama di hadapan Tuhan. Mahatma Gandhi menganggap kekeliruan kasta seperti susu sebelanga dicerderai dengan setitik noda.

Bhagawan Sri Satya Sri Baba mengatakan secara ringkas sebagai berikut :

“Di dunia ini hanya ada satu agama yang paling benar yaitu agama kasih; hanya ada satu kasta : umat manusia; hanya ada satu bahasa, bahasa kita”

(Saegede : 54)

Selanjutnya menurut Yajurweda XXV.5)

“Manusia berpengetahuan adalah kaum Brahmana,
Kaum pelindung (pemerintah) dinamakan Ksatria,
Kaum pedagang (ekonomi) dinamakan Waisya, kaum
Pekerja dinamakan Sudra”

Seorang Brahmana dijadikan melalui proses, bukan keturunan, sehingga orang yang lahir dari keluarga Brahmana, bisa saja ia bukan Brahmana bila tidak memiliki pengetahuan ke-Brahmana-an. Mungkin makna Weda di bawah ini telah menimbulkan kerancuan:

“Kepala adalah Brahmana
Bahu/lengan adalah Ksatria
Perut adalah Waisya
Kaki adalah Sudera”

Yajur Weda XXXI.11.

Sesungguhnya makna Weda di atas merujuk pada satu pribadi yang utuh pada manusia itu sendiri. Manusia itu harus bekerja (Sudra), meningkatkan usahanya (Waisya), bisa melindungi diri sendiri dan sesama (Ksatria) serta memiliki jiwa/sadar akan kerohanian (Brahmana). Inilah sesungguhnya kasta. Di bumi hanya ada satu kasta seperti yang disebutkan oleh Baba, yaitu kasta manusia (Sargede, 2005: 51-53).

Sistem kasta sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama Hindu. Agama Hindu hanya mengenal Catur Warna, yakni pembedaan berdasarkan profesi dan fungsi. Menurut wawancara dengan Dr. Gayatri, masalah jamak terjadi ketika adat dan agama menyatu. Padahal adat dan agama bisa dipisahkan dengan melihat fungsi dan identifikasi. Wangsa dan kasta pada dasarnya sangat bertentangan dengan ajaran Hindu.

I Gusti Ngurah Bagus, seorang antropolog dari Universitas

Udayana menyebut sistem kasta di Bali sangat ketat dan tertutup. Berbeda dengan di Jawa, juga dikenal strata dalam masyarakat, tetapi lebih fleksibel dan memungkinkan terjadi mobilitas sosial secara vertikal. Pembagian masyarakat yang ketat dan tertutup juga sampai pada mengkotak-kotakkan Pandita (Sulinggih). Ada Pandita dari soroh Brahmana, ada juga dari soroh yang lain. Sejak lama Pandita Brahmana menghegemoni Pandita lain, karena memegang tafsir keagamaan tunggal. Bahkan melarang lahirnya Pendeta dari Pasek (wawancara dengan Made Titib).

Pertentangan terbuka antara soroh, merembes soal Pandita merupakan fakta sejarah dalam perjalanan umat Hindu di Indonesia. Dalam Mahasaba 7 PHDI di Solo tahun 1996 terjadi pertentangan soal Sulinggih ini. Adanya keinginan masyarakat dan mendasar Parisada supaya menyamakan Sulinggih (Sarwa Sadaka), sebelumnya Pandita dari soroh Pasek tidak diakui dan tidak dibolehkan memuput Karya, terutama di Besakih. Tahun 2001 beberapa pedanda di Karangasem dari kelompok Brahmana tidak mau duduk bersama dengan Pandita Rsi atau Empu (Wiana, 2006: 9).

Sampai saat ini di Bali masih terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, terutama Tri Wangsa dan Pasek dan sampai pada soal sulinggih. Kelompok Pasek tidak mau mengikuti Sulinggih dari kelompok Brahmana. Dalam sejarah tahun 1950-an di Gianyar kelompok Pande menolak “*nunas tirta*” di Geria Brahmana. Pertentangan yang cukup menyita publik Bali baru-baru ini dimana kelompok Pasek memindahkan puranya dari Pura Dasar Gelgel. Pertentangan ini cukup mendasar dan harus menjadi perhatian Parisada, karena baru kali ini pertentangan sampai memicu pemindahan Pura. Pura kelompok Pasek dipindahkan dari Pura Dasar di Gelgel ke tempat yang baru di Punduk Dawa masih dalam wilayah Klungkung. Pertentangan ini dipicu oleh hegemoni Sulinggih dari Ida Pedanda (Brahmana) pada saat terjadi upacara di Pura Dasar Buana Gelgel. Menurut salah seorang informan, dahulu Pasek dihalang-halangi menjadi Pendeta. Sampai sekarang kalau pun Pandita Pasek *muput*, ia tidak boleh disejajarkan dengan Pandita Brahmana. Pandita Pasek masih dianggap lebih rendah dan ditempatkan lebih bawah.

Contoh lain adalah kasus kelompok Bendesa Mas yang lama

tidak pernah punya Pendeta. Setelah lebih dari 500 tahun, baru tahun 2018 kelompok (soroh) Bendesa Mas mempunyai seorang pendeta. Kasus yang paling anyar soal pandita juga terjadi di Gianyar. Tahun 2018, di Blahbatuh, Desa Pakraman Perangsada, seorang Pandita Mpu dari desa setempat dilarang atau ditolak *muput karya* oleh masyarakat. Timbul selebaran gelap bahwa masyarakat menolak Pandita Empu untuk *muput karya ngenteg linggih* yang rencananya akan diadakan pada bulan Maret 2019 (Radar Bali, 21-12-2018).

Pertentangan antara kelompok Triwangsa dan Jaba (Pasek) kemudian muncul dalam rapat Parisada. Dalam Mahasaba ke-9 di Jakarta Tahun 2006 Sulinggih ditolak menjadi Ketua Umum Parisada. Sebelumnya sejak Mahasaba I-VIII Sulinggih selalu menjadi Ketua Umum Parisada. Sulinggih yang dimaksud adalah Sulinggih yang bergelar Ida Pedanda dari Brahmana. Sulinggih dari Ida Pedanda ini sudah lama mendominasi perjalanan majelis agama Hindu ini. Alasan menolak sulinggih karena alasan praktis saja. Sulinggih kurang lincah memimpin organisasi besar. Selain itu, hal ini berpotensi merendahkan martabat sulinggih karena dinamika rapat organisasi sering berlangsung dalam suasana “panas” dan kadang tidak kondusif, pimpinan rapat bisa saja ditentang (atau dilecehkan) oleh peserta. Dalam Mahasaba ini muncul tuntutan supaya Ketua Umum adalah seorang profesional (seorang *walaka*). Dengan demikian, lebih lincah dan cepat dalam menjalankan roda organisasi. Begitu juga ketika koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah, cenderung tidak akan mengalami hambatan budaya.

Hambatan budaya ini dapat dijelaskan dengan terlebih dahulu menguraikan tiga jenis Sulinggih, yakni: Sulinggih sebagai Loka Palasraya dengan tugas *memuput karya*; Sulinggih sebagai Acarya (Guru Loka) yaitu pendidik, pengajar, penceramah; Sulinggih yang Ngraga atau menekuni ajaran spiritual. Sulinggih Loka Palasraya, bukan saja bertugas menyelesaikan upacara, tetapi lebih luas lagi yaitu memberi tuntunan rohani. Loka Pala Sraya artinya tempat bersandar atau perlindungan bagi masyarakat. Sulinggih Acarya (Guru Loka) atau *aquron-quron* atau *upadhyaya*, berfungsi sebagai guru yang dapat memberikan tuntunan kepada masyarakat untuk kebahagiaan hidup. Menjadi

seorang pendeta hendaknya mampu menguasai ajaran agama secara komprehensif. Penguasaan ajaran agama yang parsial dan wawasan yang sempit menjadikan seorang pendeta tidak mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini menyebabkan pendeta cenderung tertutup dan fanatik (Titib, dalam Suweta, 1999: 29).

Sulinggih jenis pertama dan ketiga tentu tidak maksimal kalau memimpin organisasi seperti Parisada. Mungkin sulinggih jenis kedua yang bisa atau dapat melakukan, tetapi tetap saja kordinasi dengan pihak-pihak terkait akan terhambat, oleh karena itu sekarang Parisada dijalankan oleh organisasi Walaka atau paruman walaka atas restu paruman Pandita. Pucuk pimpinan tertinggi tetap Pandita (Sulinggih), tetapi roda organisasi dijalankan oleh profesional (walaka).

Mengacu pada ketetapan Sabha Parisada Hindu Dharma II, No. V/1968, 4 Desember 1968, Pendeta atau Sulinggih meliputi : Pedanda, Bhujangga, Resi, Bhagawan, Sri Empu, dan Dukuh yang sudah disucikan oleh Guru Nabe. Dalam buku Seminar Kesatuan Tafsir (1993/1994) dijelaskan syarat-syarat seorang Walaba dapat didiksta (Diksita) adalah: (1) laki-laki yang sudah kawin dan yang *nyukla brahmacari* (2) wanita yang sudah kawin dan yang tidak kawin (kanya) (3) pasangan suami isteri (4) umur minimal 40 tahun (5) paham bahasa Kawi, Sansekerta, Indonesia, memiliki pengetahuan umum dan mendalami intisari agama (6) sehat lahir batin (7) berkelakuan baik tidak pernah tersangkut pidana (8) punya guru Nabe (9) tidak terikat dengan pekerjaan.

Mengapa nama sulinggih atau pendeta mempunyai nama yang berbeda-beda? Hal ini dipengaruhi oleh stratifikasi sosial yang ada di Bali seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, pembedaan nama tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang historis sekte-sekte yang pernah berkembang di Bali. Inilah yang menyebabkan adanya keanekaragaman pendeta yang pada prinsipnya mempunyai fungsi yang sama. I Gusti Ngurah Anom (1973: 2-4) seorang ahli arkeologi yang meneliti tentang genta Pendeta di Bali, menguraikan ada 6 jenis pendeta, yakni : Pedanda dari Brahmana, Rsi dari Golongan Ksatria, Bhagawan dari soroh Wisya, Empu dari soroh Pande, Dukuh dan Sengguhu dari soroh Sudra.

Pendeta Hindu di Bali mengikuti aturan-aturan kependetaan yang disebut dengan *sesana*. Menurut Gde Sura dkk., (1997/1998), ada dua jenis *sesana* yaitu : *siwa sesana* dan *mrtati sesana*. Kedua buku ini menguraikan tentang aturan (*sesana*) yang harus ditaati oleh pendeta antara lain: berpikir yang baik, sastraawan, ahli weda, dapat menguasai hawa-nafsu, taat melaksanakan brata, ahli bahasa, dan senior dalam umur. Fakta tentang pendeta yang berasal dari keluarga Brahmana yang tidak mau duduk bersama menyelesaikan upacara agama dengan pendeta dari keluarga luar Brahmana sampai sekarang masih dapat dicermati. Perbedaan persepsi inilah salah satu penyebab terjadinya konflik antara desa adat dengan Sampradaya, antara soroh dengan soroh yang lain. Demikian ini akan terus terjadi dan diharapkan masyarakat menyikapi dengan bijaksana.

Pengelompokan masyarakat Bali sebenarnya lebih pas atau lebih cocok dengan sebutan warga (klan) atau kekerabatan atau dalam bahasa Bali disebut soroh (kelompok). Penggolongan ini lebih bersifat egaliter dan demokratis. Pembagian masyarakat berdasarkan konsep Catur Warna sebenarnya lebih fungsional seperti dalam teori *Division of Labour* dari sosiolog Auguste Comte. Tetapi dalam perjalanan sejarah, Catur Warna berubah menjadi konsep kasta dan wangsa yang didasari atas kelahiran atau keturunan. Tingkatan yang tegas ini sebenarnya ada setelah Bali dikuasai oleh Majapahit sejak tahun 1343. Pada masa sebelum Majapahit, kasta tidak dikenal di Bali. Hal ini terbukti jika mencermati sosiologi masyarakat Bali Aga (Bali Pegunungan) yang tidak mengenal struktur masyarakat kasta.

Pengelompokan masyarakat Bali yang lebih egaliter sering disebut soroh atau semeton atau warga. Dalam Babad Catur Warga di Bali disebut Catur Soroh (Soebandi). Catur Warga menurut Soebandi memiliki Pedarman (Pelinggih) di Pura Dasar Gelgel. Catur Warga tersebut adalah: (1) Warga (soroh) Pasek (2) Warga Ksatria Dalem (3) Warga Brahmana, dan (4) Warga Pande. Sesungguhnya banyak warga atau soroh lain, tetapi mungkin merupakan bagian dari soroh (warga) yang disebutkan. Misalnya saja kita mengenal soroh Ksatria, ada soroh Bujangga, soroh Bendesa Mas dan sub soroh atau bagian soroh yang lain.

Penaklukan Bali oleh Gajah Mada tahun 1343 (Ginarsa, 1968:

1; M. Yamin, 1957 : 47-48) tidak hanya menurunkan derajat Bali dari kerajaan merdeka menjadi taklukan, tetapi juga dampaknya dalam bidang sosial-budaya, dalam hal ini lahir stratifikasi masyarakat Bali yang feudal. Sebelumnya masyarakat Bali sudah mengenal stratifikasi sosial, tetapi lebih egaliter dan lebih terbuka. Patih Gajah Mada kemudian menunjuk Sri Kresna Kepakisan (1352-1380) sebagai raja Bali dan beristana di Samprangan – Gianyar. Kresna Kepakisan sebenarnya seorang Brahmana Majapahit yang berasal dari Kediri. Kepakisan bersama 15 (lima belas) orang Arya, tiga orang Wesia dan prajurit kaula Jawa yang ikut menyertai raja baru ini membentuk kasta sendiri, yang di Bali kemudian berkembang menjadi wangsa.

Masyarakat Bali Hindu yang berasal dari Jawa tersusun atas empat wangsa yaitu : Brahmana, Ksatria, Wesia, dan Sudra. Sebagai penguasa (elite pemerintah), Kresna Kepakisan dan keturunannya menempati tingkat wangsa Ksatria yang tertinggi yang disebut Ksatria Dalem. Para Arya Jawa dan keturunannya menempati tingkat wangsa ksatria yang disebut Arya. Wangsa Wesia ditempati oleh keturunan Ton Kober, Tan Kaur, Tan Mundur, Wangsa Sudra ditempati oleh bekas prajurit Majapahit dan rakyat Jawa yang membaur dengan rakyat Bali asli.

Majapahit memerlukan 9 tahun untuk menaklukkan Bali, itupun dengan tipu daya. Sepertinya Bali sudah dipersiapkan sebagai pewaris kerajaan Majapahit, baik secara politik maupun ekonomi. Ketika Islam mulai bangkit di Nusantara abad 14-15, raja Majapahit mengirim pendeta Hindu, Nirartha, untuk mendampingi raja Bali pada waktu itu, Dalem Watuenggong. Tugas Pendeta Nirartha sebagai pendeta dan penasihat raja karena berpengalaman di Majapahit. Pendeta Nirartha kemudian membangun pura-pura di seluruh perairan Bali yang berfungsi sebagai “benteng” pertahanan untuk melindungi Bali secara politik-spiritual. Mubaliq-mubaliq Islam yang kemudian datang ke Bali untuk memperkenalkan agama baru diterima dengan baik dan diperlakukan sebagai teman (saudara) dan dilindungi. Raja menerapkan politik budaya dengan merangkul mubaliq-mubaliq dengan diplomasi tingkat tinggi. Pengalaman di Jawa yang menyebabkan terjadinya benturan fisik, sedangkan di Bali orang Islam diakui sebagai “warga” atau saudara yang diterima

dalam kehidupan kemasyarakatan. Pendekatan budaya ini sekarang menghasilkan Islam yang adaptif dan persaudaraan yang disebut ikatan *menyamabraya* atau *pesemetonan*.

Sementara itu, di sisi lain, perlawanan terhadap kekuasaan Majapahit di Bali terus terjadi dan kelompok masyarakat Bali yang tidak bisa menerima Majapahit mengungsi ke pegunungan Bali. Meskipun Majapahit merangkul beberapa tokoh Bali Aga seperti beberapa Bendesa dan Pasek tetapi perlawanan masih tetap ada, sehingga ada kategori Triwangsa dan Jaba Wangsa yang saling berlawanan. Dominasi Majapahit kemudian menimbulkan dualisme dalam pelapisan masyarakat Bali yaitu antara masyarakat Bali Hindu (wong Majapahit) dan Bali Aga (Bali asli). Masyarakat asli (Bali Aga) dianggap tidak memiliki sistem kewangsaan karena sudah diturunkan derajatnya (*dipetita*) menjadi rakyat biasa karena kalah perang. Sistem kewangsaan hanya berlaku untuk masyarakat Bali Hindu dengan dominasi bangsawan Jawa (Djlantik, 1937: 17-18).

Kresna Kepakisan diganti oleh putranya Agra Samprangan (hanya sebentar) dan seterusnya diganti oleh Dalem Ketut Ngelesir (1380-1400), yang memindahkan kratonnya ke Gelgel (Klungkung). Dalam Sejarah Bali, kerajaan Gelgel kemudian menjadi kerajaan besar yang berhubungan dengan VOC. Gelgel menguasai Lombok dan Blambangan, tetapi masih tetap dibawah Majapahit. Rupanya sejak periode Gelgel ini, stratifikasi masyarakat Bali berkembang makin rumit karena sudah menjadi wangsa (golongan) menyerupai kasta yang sangat tertutup. Tidak ada mobilitas vertikal sama sekali. Nantinya kerajaan Gelgel menganggap diri sebagai pelanjut kebesaran Majapahit, terutama dalam bidang pengayoman agama Hindu.

Perkembangan trah Ksatrya Dalem, keturunan langsung dari Kresna Kepakisan, dan persebaran keluarganya dari generasi ke generasi menunjukkan gelar atau identitas yang khas. Ksatrya (satria) Dalem adalah keturunan vertikal raja, memakai gelar I Dewa Agung (raja), I Dewa untuk laki-laki dan I Dewa Ayu untuk perempuan dan beberapa variannya tergantung dari isteri. Para Arya yang mengikuti Kresna Kepakisan (raja), yang kemudian diberi jabatan strategis diberi gelar I Gusti atau I Gusti Agung untuk laki-laki, I Gusti Ayu untuk perempuan beserta

variannya tergantung isteri. Para Waisya diberi gelar Gusi atau Si, yang nantinya menjadi Gusti, karena Gusi atau Si dianggap kurang tinggi.

Pemakaian gelar-gelar baru memperlihatkan kebijakan politik Gajah Mada dengan membentuk golongan bangsawan baru. Salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh jaminan kesetiaan pengabdian terhadap kekuasaan Majapahit. Strategi ini kemudian dilakukan oleh Belanda pada abad ke-20 tepatnya pada tahun 1920, dengan memberikan gelar baru bagi keturunan bangsawan dan Ksatria Dalem yang menjadi Regen (Bupati) di wilayah Bali dengan gelar baru Anak Agung atau Cokorda (Staatblad, 1920). Regen Badung, Tabanan, dan Klungkung memakai gelar Cokorda. Regen Jembrana, Buleleng, Bangli dan Gianyar memakai gelar Anak Agung. Regen Karangasem memakai gelar Anak Agung Agung. Kemudian beberapa raja bawahan seperti Ubud juga memakai gelar Cokorda dan Anak Agung. Gelar Dewa dan Gusti mulai ditinggalkan karena dianggap kurang tinggi.

Saat ini, kehidupan sosial masyarakat Bali masih menunjukkan sistem kasta. Dalam konteks pergaulan informal sehari-hari, ketika berinteraksi dengan orang yang baru dikenal, pertanyaan tentang status kewangsaan "*antuk linggih*" masih jamak muncul. Setelah status kewangsaan diketahui, biasanya akan terjadi penyerasian dalam berkomunikasi, misalnya saja dalam penggunaan bahasa. Sampai sekarang orang Bali masih mencari-cari legitimasi keturunan salah satu Arya dari Majapahit, Kediri, dan Jawa. Orang bangga dengan keturunan Majapahitnya. Wacana Ajeg Bali yang diekspos oleh Bali Post sesungguhnya juga mengesankan pada upaya menyanjung dan mempertahankan sistem kasta (Wijaya, 2012). Konflik Triwangsa *versus* Jaba Wangsa juga berpengaruh ke berbagai ranah seperti politik dan pendidikan, bahkan masih terasa hingga saat ini. Adapun perlawanan (kontra hegemoni) kelompok Jaba dimotori oleh kelompok Pasek yang terdiri dari 7 (tujuh) klan, sehingga dipelesetkan dengan nama "*seven up*".

Terlepas dari itu semua, kita seyogyanya bersatu padu terlebih sebagai minoritas yang masih memerlukan perjuangan bersama-sama demi keberlangsungan kehidupan keagamaan ke

depan. Masyarakat hendaknya menghindari perbedaan-perbedaan. Misalnya saja dalam konteks Sulinggih (Pandita). Semua Pandita dari kelompok manapun pada dasarnya berhak untuk menjalankan kewajibannya dalam melayani umat. Kelompok, soroh, warga, pesemetonan harus bersatu dibawah nama besar Hindu.

D. ALIRAN KEPERCAYAAN DAN SEKTE (SAMPRADAYA)

Menurut Widana (1994), harus dibedakan antara kepercayaan dan aliran kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur dari suatu agama atau kepercayaan kepada arwah nenek moyang, animisme dan lainnya sebelum agama masuk. Aliran kepercayaan atau aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah proses perjalanan suatu agama dalam gerak dan aktivitas yang dinamis melahirkan interpretasi baru atau interpretasi lain dan menamakan dirinya aliran kepercayaan. Aliran mana sesungguhnya masih bermuara pada agama tertentu. Namun keberadaannya seakan-akan lepas dari induk agamanya semula. Pemisahan ini karena memusatkan pada bagian tertentu dari agama, atau bisa dikeluarkan karena menyimpang atau menyalahgunakan ajaran agama, sehingga akhirnya menjadi aliran kepercayaan.

Lebih jauh menurut Widana (1994) apabila dilihat dari perspektif Ilmu Aliran kepercayaan dapat dikategorikan sebagai "agama", tetapi jika dirujuk pada Sradha, kenyataannya tidak lagi berpatokan pada teologi agama. Kepercayaan kepada agama didasari atas iman, sedangkan aliran kepercayaan lebih berdasarkan atas cipta, rasa, dan karsa (budaya). Aliran kepercayaan ini diurus oleh bagian dari Departemen atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ada beberapa kelompok aliran kepercayaan supaya tidak membingungkan. Kelompok tersebut adalah kelompok agama, kelompok budaya, dan kelompok sempalan. Aliran kepercayaan yang masuk dalam kelompok agama, namun dalam praktek keagamaan bersifat eksklusif yang menonjolkan salah satu ista dewata atau Dewa yang diinginkan ini yang disebut Sekte (Wiana, 1994). Menurut Goris, agama Hindu di Bali merupakan perpaduan dari 9 sekte yaitu: Siwa Sidhhanta, Pasupata (memuja Lingga), Bodha (Sogata), Brahmana, Resi, Sora (Surya), dan

Ganapatya (memuja Ganesha) (Goris, 1974: 12-21). Kesembilan sekte ini di Bali dipadukan oleh Empu Kuturan, tetapi tidak ada yang dihilangkan atau dilenyapkan. Sekte Siwa Siddhanta yang menonjol dan berkembang sampai saat ini. Menurut Widana mengutip dari lontar Sad Agama (Widana, 1994), Siwa sendiri terdiri dari 6 sekte yaitu Sambu, Brahma, Indra, Bayu, Wisnu dan Kala. Peneliti menemukan masih ada mereka yang menginginkan beragama Tirta (Wisnu).

Kelompok kedua adalah kelompok aliran kepercayaan yang masuk dalam kelompok budaya yang bersumber pada cipta, rasa, dan karsa. Pokok ajaran bisa juga didapat melalui inspirasi ajaran agama tertentu. Kelompok ini sering disebut “agama semu” seperti yang telah disebutkan di depan. Aliran kepercayaan ini tidak memenuhi syarat-syarat agama, seperti adanya kitab suci, nabi, tempat suci, hukum agama tau tata cara peribadatan. Sempalan atau kelompok sempalan adalah aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada mulanya berdasarkan kitab suci agama. Tetapi lama kelamaan semakin jauh dari agama dan bertentangan dengan kitab suci, inilah yang menjadi aliran sesat. Pokok ajaran dan penerapannya sangat bertentangan dengan suatu ajaran yang mula-mula dijadikan sumber. Suatu contoh adalah aliran kepercayaan “*kalki*” yang menobatkan pimpinannya sebagai “*awatara*”. Hal ini tidak saja merupakan penyimpangan, tetapi juga penghujatan terhadap keyakinan agama Hindu tentang konsep turunnya Tuhan ke dunia melalui apa yang disebut “*Awatara*” (Widana: 17-18) (Sudiana, 2009: 185). Memang tidak mudah untuk menentukan aliran kepercayaan sesat atau tidak, diperlukan penelitian yang mendalam oleh para ahli, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara kekuasaan, kekerasan, yang mengakibatkan terinjak-injaknya kebenaran.

Tatanan kehidupan beragama di Indonesia (Bali) sesungguhnya sudah berdasarkan kitab suci Weda. Namun menurut Ketut Wiana belum banyak dipakai dan dipahami oleh umat Hindu sendiri. Leluhur umat Hindu sejak masa lampau sudah mengembangkan sistem pembinaan yaitu dengan: pertahanan budaya, pengembangan budaya dan pengayaan budaya Hindu. Hal ini memungkinkan karena budaya Hindu bersifat terbuka, dialogis, selektif, dan dinamis. Tidak semua

perubahan keagamaan yang terjadi diributkan masyarakat. Dahulu penggunaan mantra Tri Sandya di Pura Agung Jagatnata Denpasar diributkan karena baru pertama dilakukan. Ini merupakan perluasan metode beragama menurut Weda. Perluasan metode beragama sepanjang berdasarkan Weda tetap dipertahankan. Kebijakan mengenai aliran kepercayaan, sekte, kelompok spiritual, aliran kanuragan jangan sampai memasung perkembangan kehidupan beragama Hindu yang memang mengenal banyak jalan mendalami spiritual Hindu berdasarkan Weda (Wiana, 1994: 112).

Menurut Wayan Jendra (dalam Suparta ed.: 93-94) dalam Bhagawad Gita diperkenankan mencari Tuhan dengan kemampuan kita sendiri, sebab setiap orang memiliki bakat dan kemampuan. Perlu ditekankan, “sepanjang tidak mengganggu orang lain”. Aliran kepercayaan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat akan muncul kalau gerakan aliran kepercayaan atau kebatinan dimulai dengan keinginan tidak baik. Kalau niat tidak baik, tentu disertai dengan kata-kata dan tindakan tidak baik.

Kelompok yang mirip dengan sekte atau aliran kepercayaan ialah suatu perguruan yang disebut kelompok spiritual. Ini mungkin yang paling pas disebut Sampradaya. Kelompok spiritual ini lahir untuk meningkatkan pemahaman agama yang telah ada dengan tatanan rohani yang lebih mendalam. Untuk mendapatkan pengalaman, mereka membentuk kelompok spiritual sekaligus dengan guru spiritualnya. Dalam hal ini semua aspek rohani agama yang dianutnya akan dibahas dan dilatih berdasarkan kitab suci Weda dan tradisi agama Hindu yang telah berjalan. Tradisi agama Hindu yang telah berjalan pembobotannya pada ritual dan serimonial telah berhasil memberikan rasa kebersamaan, kegembiraan, keindahan, rasa kegairahan beragama. Bagi mereka yang lebih dalam menyelami lautan rohani Hindu, tentu ingin mengembangkan metode beragama yang lebih luas yang terdapat dalam kitab Weda. Mahasaba VI Tahun 1991 PHDI memberi wadah untuk pengembangan bagi kelompok spiritual Hindu yang benar-benar mempelajari Weda (Wiana, dalam Suparta).

Sampradaya ialah kelompok yang mempelajari ajaran yaitu doktrin tertentu dalam agama Hindu yang oleh orang Barat

disebut sekte atau paksa (sayap dalam bahasan sansekerta). Monier Williams, seperti yang dikutip oleh Titib (2009: 109) menyebut bahwa sekte atau sampradaya dalam agama Hindu umumnya terdiri dari 5 (lima) sekte utama yakni (1) Siwa (penyembah Siwa), (2) Vaisnawa (penyembah Wisnu), (3) (penyembah Sakti), sebagai personifikasi dari kekuatan suci; (4) Ganapatya penyembah Ganesha, dan (5) Saura, penyembah surya. Masing-masing sekte atau sampradaya tersebut memiliki beberapa varian, yang berbeda-beda, tetapi tidak terlalu jauh. Menurut Suacana (wawancara), sampradaya hanya mempelajari satu aliran salah satu dari ista dewata. Berbeda dengan kelompok belajar agama yang berkembang di Bali seperti Sai Baba bisa mempelajari bermacam-macam aliran.

Menurut Sudirman (2009: 188) kesadaran dan semangat keberagaman Hindu di Indonesia sudah semakin maju. Hal ini antara lain ditandai dengan bertambahnya jumlah pemangku dan pinandita di seluruh Indonesia, bertambahnya para penekan spiritual atau sampradaya serta grup-grup belajar Weda lainnya. Guna mendukung kebangkitan dan semangat spiritual itu, Parisada juga harus rajin merumuskan dan menafsirkan ajaran yang diperlukan untuk memberikan pencerdasan dan pembinaan terhadap kelompok spiritual tersebut. Sampradaya di Bali sudah bisa bersinergi dengan tradisi yang telah berjalan di desa pakraman.

Aliran kepercayaan atau aliran kebatinan menurut I Gusti Ngurah Bagus sudah ada sejak zaman prasejarah, bahkan aliran ini merupakan awal terbentuknya agama-agama. Ngurah Bagus tidak membedakan aliran kepercayaan dengan aliran kebatinan. Menurut Drs. I Gde Sadia MM (wawancara, 21-12-2018), aliran kepercayaan atau aliran kebatinan bersifat duniawi, mencari "*kewisesaan*" atau kesaktian, sedangkan Sampradaya atau kelompok studi mencari *ke-widyatmika*-an (Tuhan). Dalam Hindu memang dikenal *bakti*, *sakti*, dan *mukti*. Bakti tentu kepada Tuhan, sedangkan sakti dan mukti untuk mencari kesaktian dan pemujaan pada kekuatan. Menurut Drs. I Gde Sura (mantan Ketua Parisada Bali), kecenderungan orang mengikuti aliran kepercayaan atau bahkan aliran sesat antara lain : disebabkan oleh daya tarik yang ditawarkan oleh gurunya, misalnya tentang

kesaktian atau kewisesaan (Gde Sura, dalam Suparta).

Aliran kepercayaan atau kebatinan yang menekankan pada kawisesaan atau kanuragan di Bali cukup banyak. Meskipun masuk dalam kelompok budaya, spiritnya juga bersumber pada salah satu sekte (Ista Dewata) kalau meminjam atau merujuk pada konsep Ketut Wiana. Beberapa contoh dapat disebutkan yakni, Bambu Kuning, Seruling Dewata, Sandi Murthi dan yang lainnya. Perguruan Bambu Kuning, meskipun identik dengan atau yang konotasinya semata-mata bela diri, tetapi sesungguhnya bersifat kerohanian. Bambu Kuning tergabung dalam aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Suparta ed. 1994: 125-126). Tujuan Bambu Kuning adalah mendekatkan diri pada Tuhan dengan segala manifestasinya.

Perguruan Sandhi Murti juga merupakan aliran kepercayaan kanuragan yang menekankan pada sakti dan kesaktian atau kawisesaan. Sakti atau kesaktian sebenarnya yang dikembangkan oleh Sandhi Murti berbasis pada ajaran Tantra (Siwa Bhairawa). Sakti merupakan Tuhan dalam bentuk Dewi atau Ibu atau Dewi Kemakmuran dengan berbagai sebutan seperti Dewi Durga, Dewi Saraswati, Dewi Sri, Dewi Uma, Dewi Kali. Kesaktian menurut Gayatri (2015) merupakan upaya untuk mengakumulasi kekuatan, kekuasaan, legitimasi melalui kepemimpinan, dan pengetahuan mistik. Dalam konsepsi kewisesaan guru, pedanda, pemangku di Bali, seorang yang dianggap memiliki kesaktian, seperti (Gayatri, 2015: 2-4).

Menurut I Gusti Made Tamba, Bhakti adalah pengabdian yang tulus ikhlas kepada Tuhan yaitu suatu jalan spiritual yang berdasarkan cinta kasih. Bhakti yoga sebagai jalan spiritual, terdiri dari kecintaan murni manusia kepada Tuhan, pelayanan, dan pengorbanan kepada Tuhan. Kecintaan timbal-balik Tuhan terhadap manusia dan persatuan bahagia diantara Tuhan dan manusia (Tamba: 163-164). Dengan demikian tidak boleh mencampur adukkan antara agama (Bhakti) dengan aliran kepercayaan (Sakti dan Murti). Aliran kepercayaan bagian dari budaya. Dengan mengikuti aliran kepercayaan diharapkan iman dan takwa melalui agama semakin melekat.

Membutuhkan waktu yang cukup lama hingga Sampradaya

mendapat tempat di Parisada, hal ini karena tokoh-tokoh Sampradaya banyak dari golongan Pasek, dan dikembangkan oleh Pasek. Memang persetujuan soal kasta dan Pendeta masuk ke bidang-bidang yang lain. Kelompok Hare Kresna, Sai Baba sempat juga ditolak. Zaman berganti, era reformasi dengan mengedepankan HAM sulit melarang kelompok-kelompok aliran dan semua dapat berlindung di Parisada.

Sampradaya menggerakkan agama Hindu dengan ceramah-ceramah, darma duta, membangun persatuan, mencetak buku-buku. Agama Hindu terutama di Bali yang menekankan upacara dan ritual, sudah mulai diisi dengan ceramah-ceramah, pendalaman agama yang diisi oleh Sampradaya. Tiap hari kita mengikuti persembahyangan di Pura, tetapi sangat jarang ada darmatula. Hal ini memang kurang dalam agama Hindu, berbeda dengan di Masjid tiap hari ada ceramah dan kotbah keagamaan. Sampradaya dengan aktivitas keagamaan dapat meningkatkan SDM umat Hindu. Sebaliknya Sampradaya juga diharapkan tidak mencela dan mendiskreditkan orang Bali.

Sampradaya juga akan membawa agama Hindu ke arah Jnana (ilmu pengetahuan), tidak hanya menekankan pada upacara dan ritual. Namun, perubahan yang dilakukan oleh Sampradaya sebisa mungkin tidak kontraproduktif terhadap kehidupan keagamaan di Bali. Weda telah menjiwai dan memberikan semangat kehidupan ritual agama Hindu. Dalam kehidupan beragama umat Hindu tidak berpedoman pada ayat-ayat secara arfiah, tetapi pada jiwa yang bersifat holistik.

Dalam pengembangan kehidupan beragama di Bali, simpul-simpul masyarakat Bali harus diperhatikan seperti : *sanggah, dadia, pedarman, kawitan, tempek*, banjar, dan desa adat. Semua simpul-simpul ini mengikat orang Hindu Bali. Masyarakat Hindu di Bali yang jumlahnya kecil, kalau dibagi lagi jadi kelompok-kelompok, sekte-sekte, aliran-aliran tentu akan pecah dan cerai berai bila tidak ada jalinan yang mengikat. Berbeda dengan India yang memiliki populasi umat hingga ratusan juta. Dahulu masyarakat Bali terpecah-pecah menjadi 9 sekte dan kemudian disatukan oleh Empu Kuturan hingga saat ini. Tentu harapannya ke depan tidak ada lagi perpecahan umat Hindu Bali ke dalam beraneka sekte.

E. PENDIDIKAN HINDU DAN PERANAN SEKOLAH HINDU

Pelaksanaan pendidikan agama Hindu di Bali mengalami pasang surut. Pendidikan formal yang pertama dalam bidang agama dirintis oleh Yayasan Pendidikan Dwijendra yang berhasil membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Guru Agama Hindu (PGAH). Yayasan Dwijendra didirikan pada tahun 1953 oleh I Wayan Reta bersama-sama Ida Bagus Wayan Gede, Ida Bagus Alit, I Putu Serangan, Pak Anom, I Ketut Mandra, dan I Nengah Tamu (Pak Tjilik). Pada awalnya didirikan SMP pada tahun 1953, disusul kemudian pada tahun 1959 didirikan PGAH B (Pendidikan Guru Agama Hindu Bali). Sumbangan Yayasan Dwijendra terhadap perkembangan dan pembaharuan Hindu, maupun dalam menegakkan pendidikan agama Hindu di Bali dapat dikatakan memiliki andil yang sangat besar. Yayasan Dwijendra tampil sebagai pelopor pelaksanaan dan pengembangan pendidikan yang bernafas agama Hindu. (Subagiasta, 2009 : 69-70).

Dalam bidang pendidikan tinggi, Parisada yang baru dibentuk tahun 1959 berhasil melahirkan Perguruan Tinggi Hindu Pertama melalui kerjasama dengan Yayasan Dwijendra. Dalam Pesamuan yang diadakan di Campuhan, Ubud, Parisada menghasilkan suatu keputusan besar yang sering disebut : Piagam Campuhan pada tanggal 17-23 Nopember 1961. Salah satu isi pokok Piagam Campuhan adalah kehendak mewujudkan Perguruan Tinggi Hindu. Perguruan Tinggi Hindu kemudian dapat dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1963 yang kemudian dikenal dengan nama Institut Hindu Dharma (IHD) yang sekarang menjadi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) (kompilasi Dokumen 45 tahun Parisada, 2010: 14-15).

Setelah Yayasan Dwijendra, pendidikan agama Hindu secara formal juga mendapat perhatian dari Yayasan Pendidikan Saraswati Denpasar yang berdiri sejak tahun 1947. Yayasan Pendidikan Saraswati dibawah figur ketuanya I Gusti Made Tamba terutama bergerak dalam menerjemahkan buku-buku agama Hindu. I Gusti Made Tamba bersama Pandit Sasri banyak menerjemahkan buku-buku Hindu yang berbahasa Sansekerta dan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ada 567 judul

buku agama dan filsafat Hindu diterjemahkan dan diterbitkan oleh Yayasan Saraswati Denpasar (Subagiasta, 2009: 73-74).

Pendidikan agama Hindu di Bali sebenarnya tidak terbatas hanya formal belaka seperti yang telah dirintis oleh kedua Yayasan tersebut. Pendidikan Agama Hindu secara luas juga menyangkut di luar sekolah (non formal). Pada mulanya agama Hindu di Bali berada dibawah pembinaan masing-masing kerajaan yang ada di Bali. setelah Indonesia merdeka, pendidikan keagamaan di ambil alih oleh organisasi-organisasi Hindu yang sudah aktif bergerak mendahului Parisada. Organisasi Hindu ini seperti Majelis Hinduisme, Paruman Para Pandita, Panti Agama Hindu Bali, Kumara Bhuwana, Hindu Bali Saba, dan yang lain. Tokoh-tokoh organisasi ini antara lain: I Gusti Ananda Kusuma, Ida Pedanda Made Kemenuh, Ida Pedanda Gde Ngenjung, I Wayan Bhadra, I Gusti Bagus Sugriwa, Wedastra Suyasa, Ida Bagus Mantra, I Ketut Kandia dan lainnya (Subagiarta, 2009: 88-114).

Pengertian pendidikan dapat dijelaskan berdasarkan sastra-sastra Hindu di antaranya dalam Silakrama, tentang *aguron-guron*. Menurut Sandika (204: 13), dalam Silakrama disebutkan:

“Aguron-guron adalah masa menuntut ilmu pengetahuan-kerohanian didalam sistem lapangan hidup kerohanian Hindu yang disebut Catur Asrama, yang berarti empat lapangan hidup berdasarkan petunjuk kerohanian yang terdiri dari : brahmacari, grekasta, wanaprasta, dan biksuka”

Aguron-guron atau *asewake guru* adalah suatu lapangan hidup atau *asram* yang merupakan masa hidup dalam menuntut ilmu pengetahuan dan memupuk pribadi kerohanian tinggi. Dalam masa brahmacari atau aguron-guron ini dipentingkan adalah dharma. Karena dharma merupakan pedoman hidup bagi setiap orang untuk berbuat kebajikan. Pendidikan agama Hindu juga diupayakan agar terlaksana dengan baik, berkesinambungan, sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam individu umat itu sendiri, interen umat beragama, serta antar umat beragama dalam mewujudkan kedamaian hidup. Pentingnya pendidikan agama Hindu disebutkan dalam kitab suci Weda, yang terjemahannya sebagai berikut:

“orang yang tidak mengenal suatu tempat bertanya
Kepada orang yang mengetahui. Ia meneruskan
Perjalanan dibimbing oleh orang yang tahu. Inilah
Manfaat pendidikan, ia menemukan jalan yang lurus”
(Titib, dalam Sandika, 2014: 15)

Kitab Chandogya Upanisad banyak menguraikan tentang proses pendidikan lewat cerita-cerita yang menarik, sehingga mudah dipahami. Cerita-cerita yang di dalamnya terdapat pola pembelajaran yang diterapkan oleh guru (*acharya*) kepada murid (*sisya*). Dalam hal ini guru mentransformasi pengetahuan rohani dan non rohani kepada murid (*sisya*). Pendidikan karakter Hindu menurut Subagiasta (2014: 33-37) meliputi: karakter jujur, adil, sopan, sabar, tulus dan yang lain sangat penting dalam membentuk manusia.

Seperti disebutkan di depan, pelaksanaan pendidikan agama Hindu di Bali mengalami pasang surut. Yayasan Dwijendra dan Saraswati mengalami kemunduran dalam hal pendidikan yang berbasis dan berkarakter Hindu. Kedua Yayasan ini menggeser orientasi pendidikan dan sepenuhnya menjadi pendidikan umum. Kemudian muncul PGAH Negeri Denpasar yang kemudian menjadi APGAH (Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu) yang sekarang menjadi IHD Negeri, melengkapi UNHI yang sebelumnya sudah ada.

Oleh karena itu untuk meningkatkan tumbuhnya kesadaran umat beragama dan menguatnya karakter Hindu, pemerintah daerah Bali didorong untuk memfasilitasi pembangunan sekolah-sekolah berbasis Hindu terutama dari tingkat PAUD sampai SMA. Hal ini terasa mendesak karena kita umat Hindu di seluruh Indonesia mengalami krisis guru agama Hindu. Sekolah-sekolah yang bernafas Hindu diharapkan segera terwujud untuk menggantikan Yayasan Dwijendra, Saraswati, terutama dalam peran meningkatkan pendidikan agama Hindu (Harian Nusa, 21-9-2018).

Pemerintah daerah Bali sepertinya kurang sigap dan tanggap akan kekurangan lembaga pendidikan Hindu ini. Justru pemerintah Kabupaten seperti Kabupaten Gianyar dan Buleleng sudah melangkah lebih maju. Kariasa Adnyana anggota Komisi III DPRD Bali dari pemilihan Buleleng mengharapkan pemerintah

Provinsi Bali mendirikan sekolah-sekolah Hindu dari tingkat SMP sampai SMA (Harian Nusa, 21-9-2018). Pemerintah Kabupaten Gianyar bahkan sudah membangun PAUD/TK Hindu Negeri di setiap Kecamatan. Ke depan pemerintah Kabupaten Gianyar akan membangun Sekolah Hindu dari tingkat SD sampai SMA (Bali Post, 17-12-2018).

Menurut Ketut Wiana, sekolah Hindu yang ada terutama tingkat SD sampai SMA belum cukup dan sangat kurang dengan kurikulum yang masih tidak jelas. Perkembangan pendidikan Hindu di Bali masih kalah dengan kondisi di beberapa kantong umat Hindu di Jawa. Misalnya saja di kota Malang, Jawa Timur, yang sudah memiliki SMP dan SMA yang khusus diperuntukkan bagi siswa-siswa beragama Hindu. Sekolah ini dikelola oleh Yayasan Trimurti (Ira, 2018: 66).

Nyoman Sugita, seorang dokter spesialis anak, saat ini sedang mendirikan Sekolah Tingkat Menengah (SLA) di Banyuwangi yang berbasis Hindu. Selain memberikan pendidikan agama, sekolah ini juga mengedepankan pendidikan karakter, di samping pengajaran ilmu pengetahuan secara umum. Sugita mengkritik desa adat di Bali yang cenderung hanya mengurus upacara dan pembangunan pura serba spektakuler, tetapi tidak pernah membuka Sekolah Hindu (wawancara, 2-12-2018).

Keberadaan Sekolah Hindu, terlebih Sekolah Tinggi Hindu, sangat penting bagi umat Hindu terutama di luar Bali. Setiap provinsi di Indonesia seyogyanya memiliki Sekolah Hindu baik negeri maupun swasta dan ini diharapkan menjadi program bersama pemerintah pusat (Bimas Hindu), DPR, DPD, Pemerintah Provinsi. Eksistensi agama Hindu di Nusantara, lengkap dengan tradisi dan kearifan lokal yang melingkupinya, akan bisa bertahan bila terdapat SDM Hindu yang cerdas di berbagai daerah. Salah satu cara untuk mencetak generasi Hindu yang berkualitas di daerah yakni melalui pendirian Sekolah Tinggi setara dengan Universitas. Sekolah Tinggi Hindu harus dibangun di wilayah-wilayah Nusantara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 56 Tahun 2014.

Adapun beberapa Sekolah Tinggi Hindu yang telah ada di luar Bali antara lain : STHD Klaten (Jawa Tengah), STAH Palangkaraya, STAH Kendari Sulawesi Tenggara, STAH Gde

Puja Mataram – NTB, STAH Santika Darma Malang, STAH Cabang Santika Darma Surabaya, STAH Cabang Santika Darma Banyuwangi, STAH Jakarta. Menurut Wayan Surpha (wawancara), sekolah-sekolah Hindu harus dibangun terus dari tingkat PAUD, SMP, SMA sampai Sekolah Tinggi. Kurikulum disusun dengan baik dan bermuatan Hindu. Sekolah didesain dengan cara-cara tersendiri, misalnya sistem pengajarannya dengan sistem pasraman, sehingga menjadi pasraman permanen. Beberapa desa di Bali seperti di Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung secara rutin mengadakan pasraman setiap hari Kamis. Pasraman diikuti oleh kelompok adat, pemuda, PKK, dan lainnya.

Menurut Ketut Wiana, Institut Hindu Dharma (Unhi sekarang) mengalami kemajuan sangat pesat pada era 1980-an sampai tahun 1990-an. Pada periode ini, rata-rata jumlah setiap kelas di atas 50 orang bahkan lebih. Penulis juga pernah mengajar di IHD tahun 1986-1987 dan menjumpai hal yang sama. Selanjutnya, Wiana juga menyatakan bahwa Sarjana IHD pada periode itu sangat berperan di masyarakat dan pemerintahan. Sarjana-sarjana IHD direkrut oleh instansi militer dan kepolisian untuk mengisi jabatan dalam bidang kerohanian. Demikian juga di beberapa instansi pemerintahan, bahkan banyak yang menjadi anggota DPR dan DPRD. Pengelola IHD pada waktu itu mampu bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun demikian, tidak jelas penyebabnya, sejak tahun 1990-an IHD mulai mengalami kemunduran. Berubahnya IHD menjadi Universitas Hindu (UNHI) karena animo masyarakat yang memilih IHD makin kecil. Padahal di masyarakat terjadi kegairahan dalam kehidupan spiritual dan keagamaan. Masyarakat antusias pergi ke pura, diskusi dan ceramah maupun dharma wacana di televisi semakin banyak. Fenomena ini tentunya harus ditangkap dan dijelaskan oleh para intelektual Hindu.

Transformasi dari IHD menjadi UNHI diharapkan mampu mengembalikan Pendidikan Tinggi keagamaan di Bali semakin maju dan kembali berperan seperti dahulu. UNHI lebih leluasa untuk membuka program-program studi baru yang dibutuhkan oleh umat Hindu tanpa perlu mendapat persetujuan dari pemerintah, asalkan umat mendukung. UNHI juga lebih banyak

dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional untuk mengembangkan jejaring dalam bidang akademis. Sarjana-sarjana UNHI sebaiknya dikirim ke luar negeri, tidak saja India, tetapi juga Eropa, Amerika, maupun Australia seperti yang dilakukan oleh universitas-universitas Islam di Indonesia.

Dalam wawancara dengan penulis, Ketut Wiana menambahkan, bila suatu saat nanti IHD negeri yang sekarang berubah menjadi UNHI negeri, tentu harus ada penekanan dan kekhasan dibanding dengan UNHI swasta. UNHI swasta diharapkan dapat membuka program-program studi yang langka yang tidak ada di Universitas Negeri. Kedua Perguruan Tinggi Hindu kebanggaan masyarakat Bali ini harus bersinergi, pendidikan Hindu tidak boleh pecah, tetapi saling mendukung.

Menurut Raka Santeri (wawancara), intelektual Hindu harus mampu bersaing dengan intelektual agama lain dan UNHI harus menjadi pelopornya. Kita harus belajar banyak dari intelektual atau gerakan-gerakan agama lain dan jangan malu untuk belajar dari mereka. Intelektual UNHI khususnya jangan malu tampil di forum-forum internasional dan menjadikan belajar sebagai tradisi. Lebih banyak belajar ke luar negeri di luar India untuk belajar sosiologi, filsafat dan ilmu pengetahuan lain. Filsafat Bali "*de ngaden awak bisa*" sebaiknya direvitalisasi. Intelektual UNHI khususnya harus berfungsi sebagai media untuk menyebarkan pembaharuan.

Sarjana-sarjana alumni UNHI khususnya dan intelektual Hindu pada umumnya harus mampu membawa pesan-pesan moral kebenaran dan kejujuran yang merupakan nilai khas karakter Hindu seperti yang dikatakan oleh Drs. I Gusti Agung Manguningrat dan Dr. I Ketut Subagiarta. Karakter Hindu harus ditonjolkan seperti kejujuran dan anti korupsi serta cinta damai. Indonesia kini masih menghadapi "budaya korupsi." Hindu harus bisa menyumbang dan memberikan contoh gerakan anti korupsi. Korupsi adalah musuh besar agama dan kejahatan yang luar biasa, sarjana Hindu harus bisa menangkalnya dan menjadikan sikap ini sebagai karakter Hindu. Tentunya umat Hindu di manapun sangat miris melihat beberapa oknum orang Hindu yang melakukan korupsi. Apabila memungkinkan, UNHI

dan IHDN mewajibkan pakta integritas dengan alumninya yang akan dilepas, bahwa kelak kalau sampai sarjana Hindu korupsi dan melakukan perbuatan tercela, gelar sarjananya akan dicabut.

Menurut Anggar Suhardana (dalam Putu Setia ed. 1992: 134-135) sistem pendidikan Hindu pada masa lalu seperti *Loka Pala Sraya* atau *Siswa Sisya* memang sudah tidak bisa dikembangkan lagi saat ini karena zaman dan lingkungan sudah berubah.

Dalam konsep yang berbeda, menurut Suacana (wawancara) sebenarnya sistem pasraman masih bisa direvitalisasi, di samping pendidikan formal yang telah ada. Sistem pendidikan pesantren yang dikembangkan oleh Islam sebenarnya meneruskan tradisi Hindu yakni asram. Satu perguruan (asram) yang terdiri dari beberapa murid berada di bawah asuhan seorang guru. Akhir-akhir ini secara sporadis memang sudah cukup banyak yang membuat pasraman kilat, desa adat pun juga mengadakan pesraman. Namun demikian, apa yang diajarkan masih bersifat permukaan, seperti belajar *majejahitan*, tetapi belum pernah ada yang secara konsisten menyentuh isi inti dari ajaran agama.

Untuk mengatasi stagnasi dalam pendidikan Hindu, yang tidak kalah penting dilakukan adalah pembenahan organisasi umat Hindu. Baik Parisada, desa adat, maupun yayasan-yayasan keagamaan, selainnya mampu memberikan dukungan terhadap program pembinaan dan pendidikan Hindu di seluruh Indonesia. Organisasi yang baik, modern, dan transparan akan mendukung perkembangan agama Hindu dan SDM Hindu. Seperti yang dikatakan oleh I Nyoman Sugita (wawancara), selain yayasan-yayasan dan Parisada, desa adat juga perlu dibenahi. Desa adat, dengan kemampuan ekonomi yang cenderung meningkat, seharusnya tidak hanya fokus membangun pura besar-besaran dan mengadakan upacara yang megah, tetapi juga memikirkan pendirian dan pengelolaan sekolah Hindu.

Anggar Suhardana menyatakan bahwa menurunnya peminat jurusan pendidikan tinggi agama Hindu salah satunya disebabkan oleh orientasi sebagian anak muda untuk bekerja sebagai pegawai negeri. Selain itu, proses pembelajaran di kampus Hindu juga harus ditingkatnya untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Untuk itu, mutu pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius (Anggar Suhardana, *ibid*).

Prof. Ngurah Bagus menekankan, menurunnya jumlah pemeluk Hindu di beberapa tempat seperti : Yogyakarta, Jawa Tengah, Maluku, NTB bukan semata-mata karena faktor politik keagamaan, tetapi faktor internal agama itu sendiri terutama dalam lingkungan pendidikan. Tidak stabilnya mutu pendidikan serta penguasaan para lulusan kampus Hindu terhadap agamanya menjadi catatan yang harus diperbaiki lagi. Hal ini sangat penting karena dapat membantu para pelajar (dan masyarakat secara umum) mencapai penghayatan dan kedalaman sehingga dapat membentuk keimanan / *srada* sebagai landasan dalam memaknai hidup (Bagas, 1992/1993: 17).

Menurut Gayatri, calon pendidik dan pembina umat harus menguasai dan menghayati fungsi dan perannya dengan baik. Hal tersebut karena jasa pelayanan spiritual dan ritual umat Hindu diproyeksikan akan semakin diperlukan ke depan. Contohnya, saat ini jumlah sulinggih masih dirasa kurang karena banyaknya permintaan umat. Untuk masa mendatang diperlukan lebih banyak sulinggih yang kompeten dan mampu berperan sebagai Loka Para Sraya (sebagai pendidik dan Pembina umat). Belum lagi keperluan atas sejumlah Darma Duta (penceramah agama). Memang di dalam Weda belum jelas disebutkan secara eksplisit tentang keberadaan Darma Duta. Namun, saat ini, ketika perkembangan agama Hindu meningkat pesat, para Darma Duta sangat diperlukan untuk menyebarkan agama Hindu (Dr. Gayatri, wawancara).

Berbagai yayasan, desa adat, dan Parisada harus terus berbenah sehingga dapat berjalan maksimal dalam mendukung perkembangan agama dan SDM Hindu. Introspeksi, evaluasi, dan kajian lebih lanjut diperlukan agar mampu menganalisa dan memahami letak kekurangan maupun hambatan selama ini. Demikian juga materi agama yang disajikan kepada umat Hindu harus jelas acuannya, sehingga dapat menyebarkan makna yang "benar," tidak hanya *gugon tuwon (mulo keto)*. Pengkajian materi-materi pembelajaran agama juga mesti dilakukan secara cermat dan objektif tak terkecuali dalam institusi-institusi seperti grup belajar dan sampradaya, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang tidak perlu. Banyak hal yang perlu dibenahi untuk menyongsong hari depan umat Hindu yang lebih maju (Anggar

Suhardana, dalam Putu Setia, 1992: 134-135).

F. IHD, UNHI, dan Pura Mahawidya Mandira

Institut Hindu Dharma (IHD, 3 Oktober 1963) yang kemudian dikembangkan menjadi Universitas Hindu Dharma Indonesia (UNHI, 19 Mei 1993) sesungguhnya adalah salah satu wujud dharma, yaitu wujud cita-cita ideal pendidikan tinggi untuk memberdayakan umat Hindu di Indonesia. Dharma adalah dasar iman dan jalan cerah untuk mencapai tujuan hidup. Dharma dijabarkan dalam tiga pilar ideologis. Pilar pertama disebut *satya*, yaitu kebenaran yang menjadikan penganutnya cerdas intelektual melalui proses pembelajaran *tattwa* yakni teologi dan atau filsafat Hindu; pilar kedua adalah *siwam* yang menjadikan penganutnya berkepribadian mulia melalui proses pembelajaran *susila* yakni etika dan politik Hindu; sementara pilar ketiga adalah *sundaram* yang menjadikan penganutnya terampil berkarya melalui proses pembelajaran *acara* (ritual, seni, dan ilmu-ilmu duniawi lainnya). Dengan pembelajaran itu, umat Hindu diharapkan memiliki pandangan dunia seperti yang diamanatkan dalam kitab *Bhagawad Gita: Dharma Ksetra Mama* (Radhakrishnan, 2009). Artinya, kewajibanku adalah menjalankan *dharma*. Manjalankan *dharma* adalah *yadnya*, yaitu cinta (*bhakti*) dan kerja profesional (*karma*) dengan penuh kearifan (*jnana*) atas nama dan demi Tuhan (*yoga*). Dengan pemahaman ini, jelaslah bahwa dharma merupakan hal pertama dan utama yang wajib dipahami oleh umat Hindu melalui proses pendidikan. Tanpa memahami dan mengamalkan dharma, umat Hindu tidak mungkin berbudaya unggul (cerdas intelektual, emosional, dan spiritual). Oleh karena itu, untuk ikut serta memajukan bangsa, para tokoh terpelajar Hindu di Indonesia kiranya terpanggil untuk menggali dan mengkonstruksi kembali unsur-unsur dharma secara sistemik menjadi sebuah materi pembelajaran menurut pola pikir dan kebutuhan zaman, serta mentransformasikannya melalui proses pendidikan tinggi.

Adapun tonggak kesejarahan bangkitnya pendidikan tinggi tentang dharma tercetus pada *rahina Sukra Paing Wara Sinta pananggal 9 sasih ke-5 tahun Saka 1883* (Selasa, tanggal 17 Nopember 1961) sampai pada hari Purnama, Kamis tanggal 23 Nopember

1961, ketika para tokoh (*sulinggih* dan *welaka*) agama Hindu yang diprakarsai oleh Majelis Agama Hindu yang bernama Parisada Hindu Bali (sekarang Parisada Hindu Dharma) mengadakan pertemuan yang disebut *Dharmasrama* di Campuhan, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Dari hasil paruman itu terbitlah keputusan yang dikenal dengan nama Piagam Campuhan Ubud. Pada bagian A, butir 2 dari piagam tersebut ditetapkan, antara lain bahwa “Mulai saat ini berhasrat membangun/mengadakan *asrama pangadyayan* (Perguruan Tinggi Agama) sebagai tempat untuk mempelajari *Dharma*”. Kemudian, atas dasar keputusan tersebut, pada tanggal 3 Oktober 1963, bertepatan dengan hari Purnama Kartika (sasih ke-4) lahirlah lembaga pendidikan tinggi agama Hindu yang diberi nama *Maha Widya Bhawana* atau Institut Hindu Dharma (Tim, 2016:ix). Dengan itu, dinyatakan bahwa IHD adalah *Hindu Centre*, yaitu pusat pendidikan tinggi Hindu di Indonesia, yakni tempat untuk mendidik generasi muda Hindu di Indonesia agar memiliki kualitas *ahamkara* (emosional), *buddhi* (intelektual), dan *citta* (spiritual) yang unggul. Kualitas unggul yang dicita-citakan itu adalah kualitas Hindu menurut prinsip kearifan *guna-widya* (*Nitisastra*, V:1), yaitu agar umat memiliki *guna* “karakter mulia” dan *widya* “ilmu pengetahuan duniawi maupun pengetahuan spiritual yang andal”. Dengan berbekalkan *guna-widya*, maka umat Hindu diharapkan memiliki orientasi holistik, belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu dan melakukan kewajiban hidup hari ini untuk masa depan yang berkualitas. Asumsinya bahwa melalui proses pembelajaran *guna-widya*, umat dapat bekerja secara profesional menurut *guna-karma* (karakter baik dan keahlian berkarya) (*Bhagawadgita*, III:28).

Berdirinya IHD sesungguhnya merupakan langkah awal mewujudkan generasi muda Hindu yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi sehingga dapat menjadi *sang sewaka dharma* (seorang abdi dharma) melalui sistem pendidikan modern. Harapannya, seperti telah disinggung sebelumnya, adalah untuk menghasilkan kader-kader intelektual Hindu yang memiliki kearifan berpikir *tri pramana* (empirik-logis-agamis) dalam menganalisis problem-problem keagamaan dan kebudayaan Hindu, seperti problem teologis, sosial-religius, moral, fungsi dan makna berbagai ragam bentuk ritual, serta tinggalan dan perkembangan

budaya Hindu. Dengan demikian, IHD adalah wujud langkah kebangkitan intelektual Hindu untuk mengatasi persoalan keagamaan. Para intelektual inilah yang bertugas menjawab tantangan zaman termasuk menjernihkan kesalahpahaman yang beredar tentang Hindu. Misalnya saja, pandangan tentang ajaran Hindu yang tidak jelas akar teologisnya, atau tuduhan bahwa Hindu bersifat klenik, dan sebagainya. Tak dapat dipungkiri, pemikiran seperti ini ikut memengaruhi goyahnya iman umat Hindu yang berakibat terhadap konversi agama.

Bila ditilik dari sejarah, guncangan iman umat Hindu telah berlangsung sejak zaman Majapahit dengan dua penyebab utama. Pertama, faktor internal berupa konflik elit kerajaan di Nusantara serta lemahnya pembinaan keagamaan untuk menguatkan iman umat, pemahaman yang sepenggal-sepenggal dan penyimpangan penafsiran, serta ritual yang rumit dan berat tanpa disertai penjelasan teologis yang memadai. Kedua, faktor eksternal, yakni adanya usaha sistematis berupa Islamisasi dan Kristenisasi umat Hindu di Indonesia melalui argumen tekstual (Sura, 10/2/19).

Ada sejumlah aktor intelektual Hindu yang menjadi pelopor pembangkit *dharma* dengan mendirikan pendidikan tinggi dengan nama Institut Hindu Dharma. Dalam akte pendirian Institut Hindu Dharma no 77 tertanggal 17 Maret 1964, dinyatakan bahwa yang berkedudukan selaku pendiri adalah I Gusti Bagus Oka dan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. *Dharmadyaksa* (rektor) pertamanya adalah dr. Ida Bagus Rai (menjabat sejak 3 Oktober 1963--tahun 1968). Pada awal berdirinya, IHD memiliki dua fakultas, yaitu (1) Fakultas Agama dan Kebudayaan, serta (2) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Biologi. Didirikannya Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan penguatan iman melalui pencerahan spiritual serta hubungan Agama Hindu dengan adat dan budaya yang mereka warisi. Dengan kata lain, masyarakat merasa perlu pusat wibawa ilmiah yang mampu memberi pencerahan agama, adat, dan budaya Hindu dengan sedapat mungkin mengacu teks yang menjadi sumber keyakinan Hindu. Dengan demikian, tokoh-tokoh Hindu berharap agar umat menjadi sadar bahwa agama, adat, dan budaya merupakan aset

adiluhung karena berlimpah kearifan lokal yang sesungguhnya memiliki sumber rujukan yang jelas, yaitu Weda.

Untuk itu haruslah ada usaha didaktis untuk mencetak kader-kader intelektual yang nantinya dapat menggali, melestarikan, dan mengembangkan aset itu. Kearifan lokal yang dikontestasikan dalam berbagai ragam karya budaya perlu diungkap dan ditransformasikan terus-menerus secara sistemik dengan bahasa dan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Masyarakat mesti disadarkan bahwa wawasan filosofis-religius, moral, dan budaya yang mereka warisi itu merupakan modal perikemanusiaan yang khas. Dan oleh karenanya, dengan modal kesadaran itu umat akan mampu berperan-serta aktif dalam kancah pembangunan nasional Indonesia. Sementara itu, didirikannya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru agama Hindu di SD, SMP, dan SMA yang waktu itu belum ada yang memiliki kewenangan formal. Secara khusus, jurusan Biologi dimaksudkan agar kepustakaan *Usada* (pengobatan tradisional Bali, seperti *Taru Pramana* dan *Aji Janantaka*) yang jumlahnya cukup banyak dapat dikaji secara ilmiah. Masyarakat perlu pula disadarkan bahwa alam Indonesia (khususnya alam Bali dan Jawa) kaya herbal, yaitu memiliki beraneka ragam tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat dan tradisi perawatan kesehatan dengan memanfaatkan ramuan tanaman herbal. Akan tetapi dalam perjalanannya, jurusan ini tidak berjalan sesuai harapan.

Tercatat pula bahwa pada awalnya IHD tidak memiliki sarana dan prasarana pembelajaran dan sumber daya yang memadai. Maka, untuk dapat menjalankan proses pembelajaran, IHD meminjam tempat penyelenggaraan pendidikan kepada Yayasan Pendidikan Dwijendra Denpasar di Jalan Kamboja (dari tahun 1963 sampai dengan 1978) yang ketika itu juga sedang giatnya menyelenggarakan pendidikan SD, SMP, dan SMA yang bernuansa agama dan budaya Hindu Bali (Dharmika, 2010: 3; Triguna, 12 - 2-2019).

Dari tahun 1978 kampus IHD dibangun secara bertahap di Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar di sebuah bidang tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali seluas 3 hektar. Seluruh bangunan (awal) dibiayai oleh Pemerintah Provinsi

Bali masa Prof. Dr. Ida Bagus Mantra sebagai Gubernur dan I Gusti Putu Raka sebagai Ketua DPRD Bali (Triguna, 12-2-2019). Bangunan ditata dengan sedapat mungkin mencerminkan pola *pangider* atau *padma* dalam tiga mandala, yaitu pola melingkar dalam tiga lapis areal dengan pusat orientasinya di tengah. Pintu gerbang kampus ada di bagian barat. Seluruh civitas datang dari arah barat menuju timur, yaitu ke dalam kampus. Hal ini dapat dimaknai pula sebagai pusat kiblat spiritual. Timur juga adalah arah kiblat Hindu, yaitu memuliakan matahari sebagai Sang Hyang Siwa Raditya (penerang dan energi bumi beserta segala isinya). Gedung rektorat ada di utara. Perpustakaan di bagian timur laut. Bagian timur direncanakan sebagai kebun *usada* yang karena berupa tanah sempadan sungai dapat dipandang sebagai *kanista mandala* (areal luar di dalam) kampus. Pada bagian selatan tengah sepenuhnya untuk aula dan gedung-gedung perkuliahan yang bersama gedung rektorat dan perpustakaan sebagai *madya mandala* (areal tengah). Pada bagian tenggara dibangun *pasraman* untuk pelatihan kerohanian. Bagian barat rencana diperuntukkan sebagai ruang kantin. Sementara bagian *utama mandala*, yaitu areal dalamnya adalah bagian tengah timur. Pada kawasan ini dibangun sebuah pura dengan pintu gerbang menghadap ke barat yang sisi luarnya adalah lapangan kampus.

Pembangunan pura di IHD dimulai dengan *Upacara Pangruak dan Mapulang Dasar* yang dilaksanakan tanggal 7 Oktober 1983. Bangunan pokoknya berupa bangunan *Padmasana*, yaitu bangunan suci untuk memuliakan Ida Sang Hyang Widhi. Bahan utama pura adalah batu kapur putih yang berasal dari Nusa Dua. Pada sudut-sudut area kampus dibangun *palinggih Pangraksa* menurut pola tata ruang bangunan Bali. Pada bagian timur laut adalah *Sriraksa* (pelindung kekayaan), yang kini populer dengan pelinggih Ratu Nyang. Sementara itu di tenggara dibangun palinggih *Ajiraksa* (pelindung ilmu). Area barat daya dibangun palinggih *Rudraraksa* (yang diyakini melindungi civitas *academica* agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib yang bersifat jahat). Pada barat laut dibangun *palinggih Kalaraksa* (pelindung civitas *academica* agar terhindar dari sifat malas atau suka mengabaikan waktu). *Istadewata* yang distanakan di sini populer dengan sebutan Sang Hyang Mrecu (Mretyu) Bhuwana

atau Kala Mretyu (Sang penguasa kematian).

Pura ini diresmikan dengan *Upacara Ngenteg Linggih* pada hari *Purnama Kapat, Wraspati Pon uku Landep* tahun Saka 1909 (8 Oktober 1987) dengan nama Pura Mahawidya Mandira Mahawidya Bhawana Institut Hindu Dharma (Dharmika, 2010: 4-6). Nama Pura Mahawidya Mandira memiliki makna sebagai tempat yang suci untuk memuja Sang Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai *Mahawidya* (sumber dan atau ilmu pengetahuan suci). Tuhan adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga Tuhan haruslah dijadikan pusat orientasi. Seluruh civitas academica IHD diwajibkan memahami dan mengamalkan makna pusat orientasi ini. Maka, sejak saat itu, di pura inilah dilakukan pelatihan atau praktek berketuhanan atau refleksi diri dalam berbagai bentuknya, seperti *dharma wacana* (ceramah keagamaan); *dharma tula* (diskusi keagamaan dan budaya); *dharma gita* (lagu-lagu kerohanian); yoga; *Upacara Upanayana*, yaitu upacara untuk melakukan inisiasi mahasiswa baru; upacara *Matur Piuning*, yaitu upacara mohon restu berbagai kegiatan kampus; *Upacara Majaya-jaya*, yaitu upacara pelepasan masa belajar mahasiswa; *Upacara Piodalan*, yaitu upacara peringatan hari jadi Pura Mahawidya Mandira; *upacara rerahinan*, yaitu upacara hari-hari suci, seperti kaliwon, purnama, tilem, Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Siwaratri.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, seperti yang diinfomasikan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna (12-2-19), IHD telah berhasil mencetak Sarjana Negara yang kemudian menjadi aparatur negara di lingkungan Kementerian Agama di Bali maupun di seluruh Indonesia. Banyak sulinggih terkenal dan populer lahir dari IHD. Dicatat pula, bahwa sebagian besar para Wamil, baik yang bertugas di AD, AL, AU dan Kepolisian merupakan alumni. Sebagian besar dosen dengan jabatan Guru Besar dan dosen senior di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar juga adalah alumni IHD. Lebih lanjut dikatakan, bahwa umumnya, tamatan IHD memiliki dan menguasai kompetensi dalam bidangnya, sehingga IHD menjadi institusi yang sangat populer, terlebih lagi setiap generasi IHD mengembangkan tradisi berkesenian sebagai atribut penting selain menguasai pengetahuan agama. Banyak mahasiswa yang berbakat seni, khususnya seni drama tradisional membuat

IHD menjadi populer. Jumlah mahasiswa yang semula hanya puluhan menjadi mencapai lebih dari 2000 orang dalam kurun waktu 1980-1990.

Setelah periode 1980-an, pamor IHD menurun karena faktor pragmatis. Triguna menuturkan, menurunnya pamor IHD karena sulitnya pengangkatan alumninya, baik di lingkungan pemerintah di Bali maupun di Kemenag Pusat dan Daerah, baik sebagai guru agama maupun pegawai lainnya. Kondisi ini diperparah dengan gagalnya pembentukan pengadilan agama Hindu yang diharapkan mengangkat alumni Fakultas Hukum Agama (Fakma). Maka, secara akumulatif membuat minat tamatan SMA untuk masuk ke IHD semakin lama semakin menurun dan akhirnya mengalami titik nadir di tahun 1990-an.

Keprihatian tersebutlah yang menjadi salah satu pemicu perubahan status IHD menjadi universitas. Gagasan besar ini dipelopori oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra melalui rapat para pendiri lainnya. Lalu, setelah mencapai kesepakatan, pelaksana teknis dilakukan oleh I Gusti Putu Raka, SH dan menugaskan I Gusti Ngurah Oka, SE yang waktu itu bertugas di Biro Umum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan belakangan pernah menjadi bendahara Yayasan Pendidikan Widya Kerti. Berkat kerja mereka keluarlah SK Mendikbud no. 7/D/O/1993 tertanggal 19 Mei 1993 tentang perubahan status Institut Hindu Dharma Denpasar menjadi Universitas Hindu Indonesia.

Tujuan perubahan status institut menjadi universitas, selain untuk mempertahankan ide awal, yaitu intelektualisasi sumber daya manusia Hindu, tetapi juga untuk memunculkan “gagasan baru” keilmuan Hindu yang lebih luas dan holistik, tidak hanya pada rumpun ilmu humaniora (sosial dan religi), tetapi juga di bidang ilmu kealaman (biologi, kesehatan) dan yang lainnya. Oleh karena itu, seperti dituturkan oleh Triguna, para pendiri UNHI meminta bantuan seorang intelektual Hindu, Prof. dr. IGN Nala, M.PH, seorang dokter yang menaruh perhatian besar terhadap sistem penyembuhan tradisional yang disebut usuda untuk menjadi rektor UNHI. Selama dua periode (1993-1997; 1998-2002) beliau memimpin UNHI dalam dinamikanya. UNHI dibangkitkan dengan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, penerbitan buku, dan pemberdayaan

mahasiswa untuk melakukan sosialisasi diri dalam berbagai kegiatan sosial-religius. Jumlah mahasiswa UNHI awalnya sangat memprihatinkan. Tercatat pada tahun 1996 mereka hanya berjumlah 6 orang, berangsur-angsur naik menjadi 37 orang (tahun 1998), 52 orang (tahun 2001). Dengan demikian, UNHI tidak mungkin membiayai diri dari dana SPP. Untuk menghidupi UNHI maka biaya operasional sepenuhnya dibantu oleh Yayasan Hindu Dharma yang ketika itu dipimpin oleh I Gusti Putu Raka, SH. yang juga adalah Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti (YPWK) dan Ketua DPRD Bali. Lebih lanjut Triguna menyatakan, walaupun UNHI kala itu sudah memiliki yayasan (yang kelahirannya belakangan setelah IHD berdiri), namun fungsi yayasan sebagai penyelenggara perguruan tinggi tidak optimal. Yayasan tidak mampu menghasilkan uang selain dari sumber SPP mahasiswa. Keterbatasan inilah yang menjadi penyebab sebagian gedung UNHI disewakan kepada Pemda Badung yang kebetulan waktu itu pusat pemerintahannya di Lumintang Denpasar dibakar massa. Implikasinya, ikon UNHI sebagai institusi pendidikan tinggi Hindu menjadi memudar di bawah bayang-bayang Pemda Badung. Perlu dicatat bawa niat baik Bupati Badung, I Gusti Bagus Alit Putra, dengan Sekdanya Ida Bagus Yudara Pidada memiliki peran penting dalam memperbaiki aset UNHI yang sebageian besar rusak berat karena tidak mampu dikelola menjadi bangunan yang layak pakai sebagai kantor dan kampus. Beberapa puluh karyawan Pemda Badung dikuliahkan di UNHI. Demikian pula karyawan Kota Madia Denpasar dan Provinsi Bali. Langkah strategis ini membuat UNHI lebih mampu berkiprah secara akademik.

Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Nala (2001), maka ditetapkanlah Prof. Dr. I Gusti Ngurah Gorda, MM., M.Si. seorang ilmuan idealis yang berpengalaman memimpin perguruan tinggi swasta (UNDIKNAS) dan memiliki jejaring kuat, sebagai rektor UNHI pada 6 Januari 2002. Dalam perjalanan kepemimpinannya beliau merasakan ada hambatan besar untuk memajukan UNHI, terutama karena soal dana pengelolaan yang tidak bisa didukung sebagaimana mestinya oleh pihak yayasan. Lalu dalam 2 tahun kepemimpinannya, dengan alasan sakit beliau pun mengundurkan diri. Pada masa kepemimpinan beliau

Program Pascasarjana (S2) Ilmu Agama dan Kebudayaan didirikan. Pendiriannya didasarkan atas Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 31191/D/T/2002 tertanggal 23 Oktober 2002 tentang Izin penyelenggaraan Strata Dua Ilmu Agama dan Kebudayaan. Direktur pertama Pascasarjana dipercayakan kepada Ida Bagus Yudha Triguna, setelah beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar Sosiologi Agama 6 Desember 2002.

Kepemimpinan Triguna yang visioner dan lincah, dengan menerapkan strategi *masewaka* 'jemput bola' yang bersifat kekerabatan dan patronase menjadikan Pascasarjana populer dalam waktu relatif singkat. Jumlah mahasiswa angkatan pertama (2002) menjadi sangat gemuk, sebanyak 74 orang. Sebagian di antara mereka adalah para sesepuh agama dan kebudayaan Hindu di Bali. Dalam kurun waktu (2002-2010) cita-cita besar meningkatkan kualitas intelek umat Hindu strata 2 terwujud dengan biaya kuliah relatif murah. Kerja sama akademik dilakukan dengan sejumlah perguruan tinggi sejenis dan lembaga terkait, baik di daerah Bali maupun di luar Bali membuahakan hasil gemilang. Yudha Triguna mencatat bahwa melalui budaya paternalistik dengan para tokoh agama, pemerintah, dan politikus, masyarakat didorong untuk kuliah di Pascasarjana UNHI. Tidak hanya itu, lewat strategi *ngipil-ipil* yakni menggalang dana dengan cara mengambil hati para donatur, gedung Pascasarjana pun segera terwujud. Untuk menjamin kualitas pembelajaran, Institusi ini memanfaatkan jasa para dosen senior antara lain dari Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Padjadjaran. Sesekali waktu juga mendatangkan dosen tamu. Melalui motivasi dan beasiswa, para dosen potensial UNHI dikuliahkan untuk meraih gelar Doktor. Dengan keberhasilan ini, maka kualitas pembelajaran pun menjadi semakin andal.

Dengan berlakunya undang-undang guru dan dosen yang mengharuskan guru Agama Hindu memiliki strata pendidikan minimal D4 atau S1 dan dosen minimal berpendidikan S2, maka UNHI mendapat peluang menjadi *agent of change*, yaitu menjadi guru bagi seluruh guru agama Hindu melalui program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ). Hal ini juga didukung oleh status akreditasi A yang dimiliki Program Studi Filsafat Agama.

Status inilah yang dijadikan dasar pemberian kewenangan kepada UNHI bersama Institut Hindu Dharma Denpasar untuk menjadi mitra Pemerintah (Ditjen Bimas Hindu) dalam melaksanakan peningkatan mutu kualifikasi tenaga pendidik Hindu yang jumlahnya 2.700 orang yang keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Triguna lanjut menuturkan, bahwa melalui itu, dosen UNHI pun mendapat kesempatan baik untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraannya.

Sementara itu, UNHI terus mengembangkan fakultas dengan prodi-prodi baru. Prodi usaha yang dianggap sebagai sekolah *balian* 'dukun Bali' diubah menjadi Fakultas Ayurveda agar nuansanya lebih akademik dengan Surat Keputusan Menteri no. 56 tahun 2008 tertanggal 2 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Menteri agama RI. M. Maftuh Basyuni. Beliau sekaligus memberi bantuan pembangunan gedung Fakultas Ayurveda dan diresmikan tanggal 8 Oktober 2008. SDM yang dimiliki fakultas ini, khususnya yang menekuni bidang ayurveda, yoga, bahasa sanskerta, dan filsafat diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya melalui program *shot chourse* selama 3 bulan di Dev Sanskreet University di Haridvar, India. Agar Fakultas Ayurveda dapat menjadi ikon UNHI dengan ciri global, maka dilakukan kerja sama internasional dengan menghadirkan Prof. Sharma dan Dr. Abhisek Joshi sebagai dosen tamu di Fakultas Ayurveda. Selain itu, pembangunan fisik UNHI pun terus berlanjut. Gedung Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA direnovasi, dilanjutkan dengan pembangunan gedung Fakultas Pendidikan dan Seni, Rektorat, Auditorium Widya Sabha, tata taman, parkir, ruang olah raga dan fasilitas lainnya, Sebagian besar biaya bangunan berasal dari bantuan Kemenag, Kemempora, dan Dikti. Sejalan dengan pembenahan fisik kampus, peningkatan kualitas serta regenerasi dosen dan staf kependidikan pun terus dilakukan. Seluruh upaya tersebut di atas telah berhasil mendongkrak kebangkitan UNHI yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya jumlah mahasiswa lebih dari 4000 orang dan diharapkan terus bertambah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I Wayan dkk. ed. 2009. *Dinamika Sosial Masyarakat Bali Dalam Lintasan Sejarah*. Denpasar : Fakultas Sastra UNUD.
- Bawa Atmadja, Luh Putu Sri Ariyani. 2018. *Filsafat Sejarah: Perspektif Agama Hindu dan Pemikiran Lainnya*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Dharmawan. 2007. *Konsepsi Sukses Umat Hindu*. Surabaya: Paramitha.
- Dharmika. Ida Bagus. *Karya Agung Memungkah, Ngenteglinggih lan Tawur Tabuh Gentuh Pura Maha Widya Mandira Unhi Denpasar*. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia.
- Gayatri Mantra. 2015. *Budaya Kanuragan Bali*. Penerbit: Buku Arti.
- Guermonprez, Jean Francois.2012. *Soroh Pande di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Goris, R. 1974. *Sekte-Sekte di Bali*. Jakarta: Bhratara.
- Gosa, I Made. 1986. *Peranan Parisada Hindu Dharma Dalam Perkembangan AgamaHindu di Bali : 1958 – 1985*. Skripsi belum diterbitkan. UNUD.
- Jiwa Atmadja.ed.1998. *Puspanjali: Persembahan Untuk Prof. Dr. Ida Bagus Mantra*. Denpasar: CV. Kayumas.
- Kajeng. I Nyoman. Dkk. 2000. *Saracamuscaya*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Putu Setia ed.1992. *Cendikiawan Hindu Bicara*. Jakarta: Yayasan Narada.
- PHDI Pusat. 2010. *Kompilasi 45 Tahun Parisada*. Jakarta: PHDI Pusat.
- Radhakrishnan. S. 2009. *Bhagawadgita*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Rudia Adiputra, I Gede. *Agama Hindu Bali / Indonesia*. Sebuah kertas Kerja, Tanpa Tahun.Ratnatha (tanpa tahun). *Babad Catur Warga "Soroh" di Bali*. Denpasar : Yayasan Damai Sejati.
- Sandika, I Ketut. 2014. *Membentuk Siswa Berkarakter Mulia*. Surabaya: Paramita.
- Sargede. 2004. *Kebangkitan Hindu*. Surabaya : Penerbit Paramita.
- Suaryana, I Nyoman. 1982. "Perkembangan Agama Hindu di Bali". *Skripsi yang belum diterbitkan*. UNUD. Suraba, I Wayan. 2013. *Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Supartha, Wayan (ed.). 1994. *Memahami Aliran Kepercayaan*. Denpasar: Bali Post.
- Subagiasta, I Ketut. 2009. *Reformasi AgamaHindu Dalam Perubahan Sosial di Bali 1950-1959*. Surabaya: Paramita.

- _____.2014. *Pendidikan Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Surpha, Wayan dkk. 2014. *Pendidikan Agama Hindu di Perguruan Tinggi*. Denpasar: Udayana University Press.
- Tamba, I Gusti Made (tanpa tahun). *Dasar-Dasar Agama Hindu*. Denpasar: Yayasan Saraswati
- Wiana, I Ketut. 2006. *Catur Warna, Karta, dan Wangsa*. Surabaya: Paramita.
- _____. 2007. *Tri Hita Karana menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.
- _____. 2015. *Berpolitik Menurut Hindu*. Surabaya: Penerbit Paramitha.
- Sugita, Guru Nyoman. 2018. *Gutik, Gutuk, Gatuk : Tuntunan Spiritual*. Denpasar : Yayasan Mustika Raung.
- Suweta, I Made. 1999. *Fungsi Pendeta Hindu Untuk Pembobotan Keimanan Dalam Masyarakat Bali Yang Berubah*. Denpasar : Program Pasca Sarjana S2. UNUD.
- ProvinsiTim. 2016. Laporan Rektor Universitas Hindu Indonesia. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia.
- _____.2017. Laporan Rektor Universitas Hindu Indonesia. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia.
- Triguna. 2018. “Peranan Umat Hindu Dalam Konteks Lokal, Nasional dan Global”. Denpasar:

SUMBER KORAN

- Bali Post 3 Juli 2015
- Bali Post 19 Maret 2018
- Bali Post 23 April 2018
- Bali Post 27 April 2018
- Bali Post 26 Oktober 2018
- Bali Post 28 Nopember 2018
- Bali Post 10 Desember 2018
- Bali Post 22 Desember 2018
- Bali Post 23 Desember 2018
- Bali Post 17 Desember 2018
- Radar Bali 21 Desember 2018
- Nusa Bali 21 September 2018
- Bali Post Majalah, Juni-Juli 2015
- Warta Bhujangga Waisnawa No. 9 Denpasar, 2018
- Bulletin FCHI, Edisi Desember 1992 – Januari 1993. Jakarta.

DAFTAR INFORMAN



No	Nama	Umur	Keterangan
1	Ida Rsi Waskita Sari (Walaka: Raka Santeri)	75	Pandita
2	Drs. I Ketut Wiana, S.Ag	75	Mantan Sekjen Parisada Pusat Mantan Dosen IHD Negeri Denpasar
3	Dr. I Gde Rudia Adiputra, MSI	64	Dosen IHD Negeri dan Ketua Parisada Badung
4	Drs. I GdeSadia, MM	63	Moncol Bendesa Mas, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana
5	Dr. Wayan Wesna Astara, SH,MH,MSI	60	Dosen Universitas Warmadewa, Intelektual Hindu
6	Drs. I Gst Agung Manguningrat	55	Kepala Dinas Agama Kabupaten Badung
7	Dr. I Wayan Surpha, MSI,SH	52	Dosen Agama Hindu Universitas Udayana
8	Dr. Gde Suacana MSi	52	Dosen Universitas Warmadewa, Pemerhati Agama Hindu
9	dr.I Nyoman Sugita, SPA	-	Dokter Spesialis Anak, Moncol Bhujangga Waisnawa
10	Dr. Ida Ayu Gayatri Mantra	40	Dosen Univ. Ngurah Rai Denpasar

**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
DAN BALISANI**

I Wayan Budi Utama

Pendahuluan

Suatu ketika penulis berkesempatan berbincang-bincang dengan I Gusti Putu Raka, SH mantan Ketua DPRD Bali dan juga mantan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi. Beliau adalah salah satu karib dari Alm. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang banyak jasanya dalam membangun fondasi bagi perkembangan agama dan budaya Hindu di Bali. Sekedar kilas balik bahwa awal tahun 1960-an Prof. Mantra beserta kawan-kawan berupaya mendirikan Fakultas Sastra UNUD, KOKAR yang sekarang menjadi ISI, dan IHD yang sekarang menjadi UNHI.

Dalam kurun 30 tahun berjalan, suasana kampus IHD pada saat kami berbincang dengan Bapak I Gusti Putu Raka sekitar awal tahun 1990 an itu memang cukup memprihatinkan. Jumlah mahasiswa yang minim sehingga secara operasional cukup menyulitkan bagi Yayasan Pendidikan Widya Kerthi untuk mendukung aktivitas Institut Hindu Dharma Denpasar (sebelum akhirnya diubah menjadi Universitas Hindu Indonesia). Prof. Mantra dan Pak Raka pada waktu itu tetap bertekad mempertahankan eksistensi Institut Hindu Dharma Denpasar. Menurut beliau ada tiga pilar penyangga agama dan budaya Hindu di Bali yang keberadaannya harus tetap dipertahankan jika ingin Bali ini tetap eksis dengan karakteristik kehinduannya yaitu Fakultas Sastra (UNUD), ISI (Seni) dan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan (IHD) Denpasar.

Para pemikir Bali di masa itu kemudian memutuskan mengubah Institut Hindu Dharma Denpasar menjadi Universitas Hindu Indonesia. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa

dengan merubah IHD menjadi Universitas Hindu, maka lebih besar peluang untuk membuka fakultas dan prodi non agama yang diharapkan mampu menunjang eksistensi prodi Ilmu Agama dan Kebudayaan. Maka sejak tahun 1993 berdirilah Universitas Hindu Indonesia Denpasar sebagai bentuk pengembangan dari Institut Hindu Dharma Denpasar dengan Rektor pertamanya Prof.dr. I Gusti Ngurah Nala, M.PH dengan Pola Ilmiah Pokok adalah Agama dan Budaya.

Suatu hal yang menarik untuk dicermati adalah mengapa para pemikir Bali di masa itu memandang bahwa tiga pilar berupa agama dan budaya, seni dan sastra sebagai pilar penting dalam mempertahankan dan mengembangkan Bali ke depan?

Jika dicermati kondisi masyarakat saat ini, gaya hidup modern dengan orientasi global hampir menguasai setiap aspek kehidupan manusia Bali. Berbagai etika, tradisi yang mengikat kelompok budaya sebelumnya menjadi goyah didesak oleh gaya hidup baru jaman modern. Gaya hidup modern sering kali dikaitkan dengan rasionalisasi, konsumtivisme, komersialisasi budaya lokal, yang pada ujungnya nanti menghancurkan budaya nasional.

Dalam sebuah artikelnya Fukuyama dengan meyakinkan mengatakan bahwa pasca perang Dingin dimana kapitalisme dan demokrasi liberal menjadi pemenangnya, merupakan puncak dan akhir peradaban dunia atau dengan kata lain sejarah telah berakhir. Tetapi akhir sejarah lebih dimaknai bahwa tidak akan ada kemajuan penting lebih lanjut dalam perkembangan yang mendasari prinsip-prinsip dan institusi-institusi, karena seluruh persoalan besar yang sesungguhnya telah terjawab (Ma'ruf, 2003: 8)

Apa yang disampaikan oleh Fukuyama mendapat tanggapan dari Huntington yang lebih menekankan bahwa peradaban sekarang lebih menuju pada pluralisme dari pada universalisme. Karena itu menurut Huntington, sumber fundamental dari konflik dalam dunia baru ini pada dasarnya tidak lagi ideologi atau ekonomi, melainkan budaya. Budaya akan memilah-milah manusia dan menjadi sumber konflik yang dominan (Huntington, 2003: 18). Sementara itu menurut

Lambang Triyono (1996) dalam menghadapi globalisasi, budaya lokal yang beraneka ragam, memberikan respon yang berbeda-beda, tergantung pada kualitas pengaruh globalisasi itu, serta soliditas dari budaya-budaya lokal itu (Parimarta, 2003: 34)

Di sisi lain para penganut paham postmodern berpendapat bahwa kontak budaya tidak mungkin dihindari di era global, sehingga akan terjadi pengaruh timbal balik dengan cara yang mendalam, sehingga terjadi fenomena yang disebut “glokalisasi” (globalisasi dan lokalisasi) budaya, di mana unsur lokal dan global saling bertukar dan dapat hidup bercampur menjadi satu. Di sini nampak bahwa penganut paham postmodern menolak adanya proyek-proyek global yang membawa sifat universalisme, tetapi ingin melihat, menghargai perbedaan, keunikan, sejarah dari bagian-bagian dunia.

Yang perlu dicatat dari kedua paham tersebut baik paham modern maupun postmodern adalah, akan selalu terjadi proses dialektika budaya dalam masyarakat (termasuk Bali). Oleh karena itu yang menjadi problem saat ini adalah bagaimana membuat manusia Bali memiliki ketahanan budaya dalam menghadapi budaya asing sehingga mereka tidak tercabut dari akar budaya, karena menghindarkan diri dari pergaulan budaya global sudah tak mungkin. Oleh karena itu, akan tergantung pada respon-respon dari budaya lokal terhadap pengaruh budaya Barat yang telah begitu kuat pengaruhnya di dunia. Menurut Huntington, respon-respon ini bisa mengambil salah satu, atau gabungan dari tiga bentuk:

- Dalam bentuk yang ekstrim, negara non barat dapat melakukan semacam isolasi, melindungi masyarakat mereka dari penetrasi atau korupsi yang dilakukan Barat, akibatnya ke luar dari keterlibatan dalam masyarakat global yang didominasi Barat.
- Berusaha ikut Barat dan menerima nilai-nilai dan lembaga-lembaganya.
- Alternatif ketiga adalah berusaha mengimbangi Barat dengan mengembangkan kekuatan-kekuatan (ekonomi dan militer) dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara non Barat lain sambil melestarikan lembaga-lembaga

dan nilai-nilai pribumi (Huntington, 2003; 51-51).

Salah satu alternatif yang ditawarkan di atas, nampaknya memberikan perhatian yang cukup serius terhadap masalah pelestarian lembaga-lembaga dan nilai-nilai pribumi (lokal). Bila penguatan dan pelestarian nilai-nilai lokal menjadi sebuah pilihan, bagaimana peran yang bisa dimainkan oleh Universitas Hindu Indonesia ?

Universitas Hindu Indonesia dan Penguatan Identitas Kehinduan melalui UBS

Universitas Hindu Indonesia merupakan pengembangan lebih lanjut dari Institut Hindu Dharma, yang didirikan oleh para “panglinsir” Bali berdasarkan keinginan luhur dan atas kesadaran kurangnya pembinaan terhadap umat Hindu dalam bidang agama dan budaya. Rintisan tentang berdirinya Institut Hindu Dharma dimulai pada hari Jumat Paing Wara Sinta, pinanggal 9 Sasih ke-5 tahun Caka 1883 atau pada tanggal 17 Nopember 1961. Para pemuka agama Hindu di Tanah Air, terutama yang berada di Bali telah mengadakan pertemuan yang disebut *Dharmacrama* bertempat di Campuhan Ubud, desa dan kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Bali. *Dharmacrama* dihadiri oleh para *Sulinggih* dan para *Walaka* berlangsung sampai hari Kemis Pon Wara Landep, bertepatan dengan hari Purnama Sasih ke-3 atau tanggal 23 Nopember 1961.

Dharmacrama yang diprakarsai oleh Majelis Agama Hindu, Parisada Dharma Hindu Bali menetapkan beberapa keputusan yang kemudian dikenal dengan nama “Piagam Campuhan”. Pada bagian A, butir II dari piagam tersebut ditetapkan antara lain “mulai saat ini berhasrat untuk membangun/mengadakan Acrama Pangadyayan (Perguruan Tinggi Agama) sebagai tempat untuk mempelajari Dharma”. Butir II Piagam Campuhan Ubud inilah merupakan titik tolak atau tonggak sejarah berdirinya Perguruan Tinggi Agama Hindu yang kemudian dikenal dengan nama *Maha Widya Bhawana* atau Institut Hindu Dharma. Cita-cita luhur dari Parisada Dharma Hindu Bali dapat diwujudkan dua tahun kemudian, yaitu pada tanggal 3 Oktober 1963 bertepatan

dengan hari Purnama Kartika (Purnama Sasih ke-4). Pada hari yang bersejarah ini lahirlah Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Hindu yang pertama di bumi Nusantara ini.

Sesuai dengan akta pendirian Institut Hindu Dharma yaitu Akte Notaris Nomor 77 Tertanggal 7 Maret 1964 bertindak sebagai pendiri dari Lembaga Pendidikan Tinggi ini adalah Bapak I Gusti Bagus Oka dan Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Perguruan Tinggi ini terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan surat keterangan surat terdaftar Menteri P.T.I.P. Nomor : 97/B-SWT/P.64, mengasuh dua Fakultas masing-masing: Fakultas Agama dan Kebudayaan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Biologi. Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, Fakultas Keguruan yang diharapkan untuk meneliti dan melestarikan lontar-lontar Usadha dan mengembangkannya dalam kehidupan modern, tidak dapat dikembangkan lagi.

Dalam perkembangan selanjutnya, sejak 19 Mei 1993 Institut Hindu Dharma dipimpin oleh Prof. Dr. I Gusti Ngurah Nala, M.PH, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75/D/0/1993 Institut Hindu Indonesia berubah menjadi Universitas Hindu Indonesia, dengan Pola Ilmiah Pokok adalah Agama Hindu dan Kebudayaan. Dengan Pola Ilmiah Pokok seperti tersebut Universitas Hindu Indonesia menjadi sangat penting artinya dalam perkembangan umat Hindu ke depan terutama dalam hal penguatan dan pelestarian nilai-nilai lokal.

Budaya Bali yang terwariskan sekarang merupakan interaksi antara tradisi kecil dengan tradisi besar yang membuahkan kebudayaan Bali tradisional yang bercirikan budaya ekspresif dengan dominannya nilai-nilai religius, estetika dan solidaritas. Proses interaksi terjadi secara akulturatif, dimana unsur-unsur asing diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa hilangnya kepribadian dasar kebudayaan lokal (Geria, 2000, 3). Kemampuan kebudayaan lokal untuk beradaptasi dengan kebudayaan luar inilah yang disebut dengan istilah Local Genius. Istilah ini untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Quarich Wales. Yang ia maksudkan dengan Local Genius adalah kemampuan

kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan (Quarich Wales dalam Noerhadi Magetsari,1986:56). Pertanyaan mendasar yang perlu disampaikan pada kesempatan ini adakah kemampuan yang disebut Local Genius itu masih kita miliki ? Situasi dan kondisi yang ada sangat jauh berbeda dengan rentang waktu yang cukup panjang. Namun ketahanan budaya seperti yang diperlihatkan oleh para leluhur sangat perlu dipertahankan dan dikembangkan manakala terjadi akulturasi budaya, lebih-lebih bila terjadi “perang peradaban” seperti yang diramalkan oleh Hamilton.

Mampukah Universitas Hindu Indonesia mengemban misi tersebut ? Sangat sulit dijawab. Mengingat sumber daya manusia yang tersedia masih sangat terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Sarana prasarana pendidikan terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar masih belum mendukung secara optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber-sumber dana, dan selama ini hanya mengandalkan dana sumbangan pendidikan mahasiswa. Sementara itu jumlah mahasiswa sangat terbatas, yang disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk menekuni studi-studi yang berbasis keagamaan. Di samping itu, kapitalisme juga menyebabkan orang cenderung menjadi individualistis, sehingga muncul kecenderungan privatisasi agama.

Akibat modernisasi, agama dipandang tidak lagi mampu mengintegrasikan kejamakan dunia ke dalam satu pandangan dunia yang bersifat menaungi dan menyeluruh, karena kapitalisme pasar telah berhasil menguasai kesadaran subjektif individu. Secara institusional, hal ini telah mengakibatkan terjadinya privatisasi agama. (Berger, 1992, dalam F.A.Halim,2002:84). Ketidakberdayaan otoritas institusi agama, telah melahirkan kebebasan dalam masyarakat untuk mengambil keputusan agama secara individual. Artinya, agama tidak lagi menjadi kebutuhan kolektif masyarakat, tetapi benar-benar telah menjadi agama individu.

Sebuah tantangan besar bagi Universitas Hindu Indonesia untuk mampu menjadikan agama sebagai sebuah kebutuhan

kollektif sehingga mampu memperkuat identitas kehinduan masyarakat Bali pada khususnya. Ke depan Agama Hindu diharapkan tidak hanya mampu menciptakan kesalehan individu tetapi sekaligus mampu menciptakan kesalehan sosial. Artinya Agama Hindu harus mampu membantu umat Hindu melepaskan diri dari keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan posisi Bali sebagai daerah wisata dan sekaligus pula sebagai daerah pergaulan budaya antar bangsa. Bila manusia-manusia Bali tidak memiliki ketahanan budaya maka kebudayaan Bali akan segera menjadi “mayat” perang peradaban seperti yang diramalkan Huntington. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai budaya harus dilakukan. Penguatan nilai budaya sebagai jati diri dan identitas diri paling tidak mencakup empat hal, yaitu : etika, estetika, persepsi dan sensibilitas (Kunto Wijoyo, 2002; 8).

Berangkat dari pemikiran Kunto Wijoyo tersebut di atas, bila dipergunakan untuk melihat kondisi bangsa ini, maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk membenahi beberapa persoalan yang berkaitan dengan itu. **Pertama** persoalan etika, nampak bahwa hal ini perlu menjadi perhatian semua orang terutama menyangkut etika politik, ekonomi. Kekerasan politik, korupsi yang semakin menjadi-jadi disebabkan oleh tidak diperhatikannya etika politik dan ekonomi. **Kedua** persepsi, termasuk di dalamnya adalah : nasionalisme, kesadaran sejarah, kesadaran agama, gender. Kesadaran terhadap agama terasa masih kurang , nampak dari penggunaan agama sebagai batu loncatan politik, agama cenderung menjadi persoalan privat sehingga nampak bagaikan “orang yang melakukan onani” – untuk kepuasan sendiri – tanpa peduli pada orang lain maupun lingkungannya. Yang **ketiga** adalah sensibilitas, menyangkut kepekaan sosial. Pengaruh kapitalisme, materialisme dan hedonime menyebabkan sesinsibilitas manusia semakin tumpul terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin banyak tempat-tempat suci dibangun, semakin banyak umat yang datang ke pura ketika piodalan, namun tak pernah muncul lembaga-lembaga yang mau memberikan bea siswa bagi

anak yang kurang mampu, semakin tingginya kasus-kasus bunuh diri, kasus perceraian. Persoalan **keempat** estetika, berkaitan dengan keindahan yang kemudian muncul dalam bentuk simbol budaya yang disebut seni. Seni religius nampak memang semakin digemari masyarakat seperti mabebasan, kidung dan sebagainya. Namun masih perlu ditingkatkan pada pemahaman makna dari sloka-sloka nyanyian religius itu.

Berangkat dari kondisi tersebut di atas maka sejak tahun 2010 Universitas Hindu Indonesia mulai melakukan sebuah kegiatan yang bernuansakan seni keagamaan yang dikemas dalam aktivitas Bali Sani. Menurut penggagas kegiatan ini Prof.Dr. IBG Yudha Triguna,MS yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Rektor UNHI dan sekaligus Dirjen Bimas Hindu Departemen Agama RI, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yang melandasi kegiatan Bali Sani yaitu:

1. UBS digagas untuk memeriahkan rangkaian upacara agama, mulai Bhatara melasti ke Segare Padanggalak, masupati Ratu Ayu lan Ratu Mas 3 nopember 2010, hingga untuk mengisi waktu Nyejer.
2. Penguatan komitmen cara Bali.
3. Unhi kalau besar harus didukung oleh masyarakat dengan cara membangun kerjasama dengan seniman, budayawan, sastrawan.
4. Pelaksanaan UBS didasari atas semangat ngayah.
5. Semua biaya bisa diminimalkan ketika kita mampu membangun jejaring di luar kampus.
6. UBS memiliki fungsi simbolik yang baik, ekspresif, kognitif, evaluatif dan konstruktif.
7. UBS harus dimanfaatkan untuk menguatkan rasa memiliki umat.

Pada tahun 2010 inilah dilakukan proses konsekrasi Barang dan Rangda yang ada di Pura Kampus UNHI saat ini.

Salah satu keunikan yang dimiliki Bali adalah seni budaya. Eksistensi seni budaya Bali terkait dengan agama Hindu yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk yang mendiami pulau kecil ini. Dapat dikatakan bahwa dalam seluruh aktivitas dan hasil karya seni budaya Bali tercium aroma agama Hindu. Dengan

kata lain bahwa dalam setiap proses kreatif yang menghasilkan karya seni budaya di Bali, selalu saja mendapat sentuhan agama Hindu sekecil apapun adanya. Hal ini secara nyata dapat diamati dalam seni pertunjukan, seni bangunan, ornamen di Bali, selalu ada sentuhan ritual. Inilah gambaran secara tradisional tentang seni budaya Bali. Namun zaman terus berubah dan proses kreatif dan hasil karya seni budaya Bali pun mengalami perubahan. Masuknya ideologi pasar menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan-perubahan mendasar dalam proses kreatif maupun hasil karya seni budaya Bali.

Mengapa agama Hindu selalu dihadirkan dalam proses kreatif seni budaya, dan apa perannya dalam proses itu? Bagaimanakah perubahan-perubahan yang terjadi akibat masuknya ideologi pasar dalam seni budaya Bali? Inilah yang menjadi inti pembahasan dalam tulisan ini.

Berdasarkan bukti-bukti kepurbakalaan yang ditemukan menunjukkan bahwa agama Hindu sudah berkembang di Bali sekitar abad ke 8 Masehi. Agama Hindu di Bali adalah hasil sinkritisme (perpaduan berbagai unsur agama menjadi kesatuan agama yang baru) aliran agama Hindu sekte Siwa dan aliran agama Buddha Mahayana berpadu dengan agama Bali asli yang memuat unsur-unsur kepercayaan Indonesia Kuna (Pandji,1985).

Dari temuan benda-benda prasejarah berupa alat-alat dari masa berburu dan mengumpulkan makan tingkat sederhana di Desa Sembiran, dan di tepi Danau Batur, serta tinggalan alat-alat dari masa bercocok tanam tersebar hampir di seluruh Bali, serta tinggalan-tinggalan dari masa perundagian seperti nekara perunggu di Pura Penataran Sasih Pejeng, memberi gambaran yang kuat bahwa kebudayaan Bali pada akhir masa prasejarah telah maju (Sutaba,1980).

Dasar-dasar kehidupan masyarakat Bali pada masa perundagian sebagai akhir masa prasejarah Bali, merupakan suatu landasan fundamental bagi perkembangan masyarakat Bali dalam memasuki masa sejarah yang ditandai dengan datangnya pengaruh agama Hindu. Dengan kondisi yang demikian masyarakat Bali mampu menyesuaikan diri secara selektif dan kreatif menerima pengaruh yang datang belakangan.

Masuknya pengaruh Hindu di Bali bukan saja mengantarkan Bali memasuki masa sejarah, juga membawa peradaban-peradaban baru dalam tata kemasyarakatan dan tata pemerintahan serta tata keagamaan. Kehadiran agama Hindu dengan karakternya yang penuh toleransi dan kemudian disambut masyarakat Bali dengan kepribadian yang fleksibel, selektif dan kreatif melahirkan bentuk kebudayaan Bali yang khas dan unik di kemudian hari.

Berbicara tentang kebudayaan khususnya seni, pikiran seolah terarah pada sesuatu yang indah. Manusia pada umumnya senang pada keindahan baik terhadap keindahan alam maupun keindahan seni. Keindahan alam adalah keharmonisan yang menakjubkan dari hukum-hukum alam, yang dibukakan untuk mereka yang mempunyai kemampuan untuk menerimanya. Keindahan seni adalah keindahan buatan atau hasil ciptaan manusia, yaitu buatan seorang (seniman) yang mempunyai bakat untuk menciptakan sesuatu yang indah, sebuah karya seni. Manusia memiliki sensibilitas estetis karena itu manusia tak dapat dilepaskan dari keindahan. Manusia membutuhkan keindahan dalam kesempurnaan (keutuhan) pribadinya. Tanpa estetika, manusia tidak lagi mempunyai perasaan dan semua kehidupan akan menjadi steril (Suru, 1983).

Begitu eratnya keterkaitan antara manusia dengan keindahan sehingga Petrarka dan Erasmus sebagaimana dikutip To Thi Anh, melihat bahwa manusia sebagai pusat segala sesuatu dan menandakan kemampuan manusia yang kreatif, rasional dan estetis. Hidup yang baik menurut mereka adalah hidup yang mengembangkan daya rasa manusia, kemampuan intelek dan estetikanya (Anh, 1984).

Suku Bali merupakan suatu kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaannya. Agama Hindu yang telah lama terintegrasi ke dalam kebudayaan Bali, merupakan suatu unsur yang memperkuat adanya kesadaran dan kesatuan itu. Di Bali perana agama saling berkaitan dengan kegiatan kebudayaan. Kegiatan seni budaya yang setiap waktu dilakukan oleh masyarakat Bali, tidak terlepas dari kehidupan keagamaan masyarakatnya. Di sinilah terlihat bahwa seni budaya itu sudah mempunyai karakter sendiri sebagai kebudayaan yang khas. Seni

budaya Bali sudah mengakar dalam kehidupan beragama yang menjiwai seluruh kegiatan seni budaya (Yoety,1985).

Berbicara tentang seni budaya Bali tak bisa lepas dari agama Hindu yang berkembang di Bali. Agama dan seni memiliki basis yang sama yaitu sama-sama mendasarkan pada rasa, oleh karenanya perpaduan anatara agama dan seni adalah sebuah keniscayaan. Terdapat empat jalan atau marga bagi umat Hindu untuk mengekspresikan rasa sujud kepada Hyang Widhi Wasa yang dikenal dengan istilah Catur Marga terdiri atas Jnana, Yoga, Bhakti, dan Karma Marga. Keempatnya bersifat holistik namun dalam praktik masing-masing umat memiliki kebebasan untuk lebih berkonsentrasi pada salah satu marga tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya. Masyarakat umumnya memilih jalan bhakti atau karma marga dalam mengekspresikan rasa sujudnya pada Hyang Widhi Wasa. Jalan inilah yang paling mudah teramati dalam praktik keberagamaan masyarakat Hindu di Bali. Jalan bhakti cocok bagi mereka yang mempunyai perasaan yang tajam atau emosional. Jalan bhakti ini memiliki keterkaitan dengan proses kreatif dan perkembangan seni budaya masyarakat Hindu di Bali. Bhakti artinya cinta kasih. Istilah bhakti di Bali lebih ditujukan untuk pernyataan cinta kepada sesuatu yang lebih dihormati misalnya Hyang Widhi Wasa, *bhatara-bhatari*, negara.

Ekspresi rasa bhakti ini bisa bermacam-macam, salah satu diantaranya adalah lahirnya berbagai bentuk karya seni. Mengapa bisa? Hal ini bisa dimaklumi bila dibandingkan dengan orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta selalu ingin memberikan yang terbaik atau terindah kepada yang dicintainya. Demikian pula halnya dengan para penganut bhakti marga dalam menunjukkan rasa bhaktinya kepada Hyang Widhi Wasa. Pura dihias dan diukir dengan indahnya, jauh lebih indah dari rumah tinggalnya. Makanan yang dipersembahkan sebagai sesaji (banten) lebih beragam dari makanan yang biasa dimakan. Semua dipersembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kepada Hyang Widhi Wasa. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa agama Hindu telah memberi warna serta jiwa kepada segala corak kesenian di Bali.

Agama Hindu juga memelihara kelangsungan per-

kembangan seni budaya Bali karena agama ikut berpartisipasi di dalam seni budaya Bali, dengan mengikatnya dalam berbagai bentuk mitologi dan sisucikan dalam bentuk upacara dan banten.

Seorang seniman kawakan dan sekaligus akademisi seni Prof Wayan Dibia, memberikan analisisnya tentang Bali Sani sebagai berikut:

1. UBS menjadi satu peristiwa budaya yang ditunggu masyarakat.
2. UBS ini adalah ruang pelestarian budaya khususnya tarian.
3. Lahirnya UU nomer 5 tahun 2017 kita mendapat suatu keharusan untuk ikut memajukan kebudayaan kita. Saya ingin mengkaitkan UBS dengan UU tersebut.
4. UBS walaupun digagas oleh Unhi tetapi menjadi bagian dari dinamika kehidupan budaya masyarakat secara luas.
5. UBS sudah berhasil menarik perhatian masyarakat. UBS telah berkontribusi positif terhadap eksistensi berbagai kesenian di Bali.
6. Loba bapang barong, jauk manik, pajegan yang ditampilkan mempunyai dampak cukup besar dalam membangun kegairah di kalangan generasi muda.
7. Festival Barong menjadi stimulant yang sangat besar bagi generasi muda untuk memompa diri agar bisa tampil juara di UBS.
8. Semakin tahun kunjungan semakin meningkat. Hal ini karena tingginya kualitas karya seni yang ditampilkan di UBS.
9. Penampilan seniman muda di daerah harus dilibatkan.
10. UBS ingin menjadi peristiwa budaya yang tidak ingin terkesan monoton.
11. UBS menjadikan kesenian sebagai kebudayaan. Hal ini patut dilestarikan dan dipertahankan.
12. Melakukan UBS di kantong seni budaya merupakan strategi yang jitu.
13. UBS perlu memperkokoh eksistensi dan jati dirinya. UBS harus mampu menjadikan dirinya yang berbeda dengan festival seni yang lain.
14. UBS adalah peristiwa budaya tahunan yang direncanakan secara matang.
15. Makna tema dan payung UBS juga perlu disosialisasikan.
16. UBS harus tetap mengacu pada Pola Ilmiah Pokok Unhi yakni Agama dan Kebudayaan.
17. UBS harus menampilkan ekspresi seni yang belum ditampilkan sebelumnya.
18. Mapang barong di UBS harus sesuai pakem.

19. Kualitas tema yang disajikan harus terus dikurasi, diseleksi, agar memiliki daya pikau.
20. Pertunjukkan yang bernuansa tutur, kesenian yang kocak, harus menjadi bagian di UBS. Selain menghibur ia harus mampu memberikan tutur yang mencerahkan.

Sementara itu ahli senia lainnya Dr. IA. Wimba Ruspawati, SST, M.Sn memberikan apresiasi tentang Utsawa Bali Sani bahwa UBS harus menyikapi wabah-wabah tari rejang yang berujung pada stardarisasi atau penyeragaman. Ini harus direspon dengan baik. Ini penting kita jadikan catatan, karena Bali sedang dilanda wabah tari rejang, yang justru menjadi ancaman terhadap Tari Rejang yang sudah ada. Dia juga merekomendasikan bahwa :

1. UBS harus memiliki semangat rekonstruksi terhadap tarian yang hampir punah.
2. UBS harus mampu berbaur dengan masyarakat.
3. UBS bagaikan pesta seni yang kedua, atau adiknya Pesta Kesenian Bali.
4. Materi-materi dalam UBS adalah tarian-tarian yang belum dipentaskan di PKB.

DR. Ida Bagus Dharmika.MA yang kemudian menggantikan Prof.DR. IBG Yudha Triguna,MS sebagai Rektor UNHI mencoba mencari terobosan agar beban biaya UBS tidak terlalu berat dengan memanfaatkan KKN Mahasiswa UNHI bekerjasama dengan masyarakat di lokasi KKN, menampilkan acara pembukaan UBS di lokasi KKN.

1. Pelaksanaan UBS ini berbarengan dengan KKN. Di sini mahasiswa ikut terlibat dalam UBS.
2. UBS mengangkat potensi-potensi alam, hal ini dibuktikan dengan tema UBS yang berorientasi pada alam.
3. UBS di Tampak Siring pernah dilaksanakan karena berhubungan dengan keberadaan pura dan sumber air. Tema diangkat sesuai potensi alam yang ada di Tampak Siring.
4. Muncul imajinasi, dalam seni dan agama kata kuncinya imajinasi dan kreatifitas.
5. UBS mengangkat kearifan lokal di masing-masing daerah dengan konsep ngider bhuawa. Tapi saat ini dilaksanakan

di Jayasabha.

6. UBS punya konsep filosofi tersendiri.
7. UBS punya maksud pengabdian untuk menunjukkan identitas kita sebagai lembaga pendidikan Hindu.

Dari paparan sekilas tersebut kiranya dapat dilihat di mana posisi Universitas Hindu Indonesia dalam upaya penguatan nilai-nilai budaya sebagai jati diri. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama dalam peningkatan kualifikasi dosen, fasilitas pembelajaran agar Universitas Hindu Indonesia dapat berperan lebih maksimal.

Agama adalah keyakinan yang bersumber pada ajaran-ajaran suci yang diwahyukan Tuhan untuk memberikan tuntunan bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia sehingga mampu mencapai kebahagiaan jasmani/duniawi dan kebahagiaan rohani/surgawi. Tujuan hidup tersebut menjadi penting untuk diketahui dan dipahami secara seksama sebab ia akan menjadi landasan utama umat manusia dalam berbagai aktivitasnya. Mengapakah harus berangkat dari landasan agama? Agama dalam bentuk apapun selalu muncul sebagai kebutuhan ideal umat manusia. Oleh karena itu peranan agama sangat menentukan dalam setiap kehidupan, dan tanpa agama manusia tidak akan hidup sempurna. Peranan agama menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia karena agama terkait dengan kebudayaan dalam masyarakat sehingga agama dan masyarakat saling mempengaruhi (Utama, 2006:2). Ini berarti ide tentang kesempurnaan hidup sangat tergantung kepada agama karena ajarannya yang diwahyukan oleh Tuhan haruslah dipercaya sedemikian rupa. Mengingat kebenaran agama yang adalah kebenaran wahyu sehingga di dalamnya tidak dibenarkan adanya dialog tentang keyakinan benar, tetapi kepercayaan (*religious*).

Agama berisi ajaran-ajaran tentang kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat (setelah mati). Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat bersangkutan, dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol dari tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai

dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Dalam hal ini agama sebagai sumber moral tidaklah mungkin mengandung kesalahan-kesalahan ataupun keburukan-keburukan yang dapat menyebabkan manusia (penganutnya) bertindak ke arah yang kontra produktif terhadap kesempurnaan hidupnya. Dengannya agama menjadi pedoman bagi seluruh nilai kesempurnaan hidup yang layak diperebutkan dan perjuangkan dalam segala lini kehidupan karena hanya dengan demikian agama benar-benar menjadi milik sebuah masyarakat. Ini sebabnya agama benar-benar dapat hidup dalam setiap hati masyarakat sebagai pembakar semangat sosial dan pewarna bagi keindahan kebudayaan suatu masyarakat yang layak disebut sebagai masyarakat beradab.

Akan tetapi ketika agama mengaktualisasi dalam kehidupan para pemeluknya maka keberagamaan terintegrasi ke dalam sistem nilai sosial budaya, dan wujud kebudayaan fisik yang kemudian bersentuhan melalui proses sosial dengan elemen-elemen sosial budaya lainnya. Secara sosiologis agama dalam realitas kehidupan akan bersentuhan pula dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat fisik-biologis, sosial, ekonomi, dan politik, maupun kebutuhan-kebutuhan integratif yang menyangkut hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu keinginan untuk hidup beradab, bermoral, tenteram, dan damai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberagamaan itu saling terkait antara hal-hal yang bersifat normatif dengan dimensi kehidupan yang bersifat praksis aktual, baik pada level individual maupun kolektif. Agama dalam hal ini memiliki posisi sentral terutama berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dalam praktiknya tidak jarang ditemukan saling berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Agama diharapkan mampu menjadi pendamai dalam paradoksal kehidupan nilai dan norma dalam tataran yang paling sublim karena selain agama manusia tidak lagi memiliki keyakinan tempat menyandarkan nilai kehidupan yang terakhir.

Seorang seniman Wayan Westa memberikan pandangannya tentang UBS UNHI sebagai berikut.

1. Pentas kesenian merupakan ruang katarsis orang Bali ketika menghadapi persoalan kehidupan.

2. UBS harus melakukan transformasi baru dan memiliki visi emas.
3. UBS harus mampu menjawab krisis sosial, patologi sosial yang dialami orang Bali.
4. UBS harus mampu memberi refilosofi kebudayaan dalam arti luas. Di sinilah peran perguruan tinggi Hindu khususnya Unhi.
5. Seni diperlukan untuk menjernihkan dan menyejukkan jiwa. Seni juga merupakan nutrisi jiwa.
6. Seni dan agama tugasnya menghaluskan libido reptil kita.
7. UBS merebut ruang-ruang komunulan dimana seniman mendapatkan sesuatu dalam jiwanya.
8. Kesenian kita selama ini hanya sebagai kelengkapan, penghiburan. Tugas seni harus jauh di atas itu.
9. UBS harus mampu menyadarkan jiwa, UBS menyajikan seni pembebasan.
10. Unhi harus mampu membangun seni yang menghaluskan indria.

Dengan demikian keberagaman bukanlah keterpisahan secara total antara sistem gagasan berupa ide-ide dan praktiknya dalam dunia empiris berupa pengalaman-pengalaman. Melainkan antara keduanya merupakan kesatuan ide dan praktik dalam bentuk pengabdian diri secara terus-menerus yang mengantarkan penganutnya kepada ketenangan dan kedamaian (hati). Mengingat fenomena keagamaan bukan semata-mata tentang ide yang normatif, tetapi juga menyangkut tindakan keagamaan dalam konteks sosial budaya. Malahan agama memperoleh arti dan maknanya yang tertinggi justru dalam praktiknya dan bukan hanya dalam pikiran karena berpikir tidak pernah eksis di dalam tradisi. Di dalamnya sistem tindakan mendapat nilai yang seluas-luasnya karena beragama berarti bertindak menurut agama dan bukan hanya berpikir dan berkata-kata menurut agama, apalagi tentang agama. Dalam hal ini tidak dapat dihindari haruslah diandaikan bahwa agama fungsional dalam sistem dan struktur berpikir dan bertindak manusia yang senantiasa menjaga integritas kepribadian penganutnya. Jadi, agama merupakan

faktor yang menentukan sistem dan struktur tindakan sosial dan kebudayaan dalam berbagai lapangan kehidupan manusia sehingga agama diharapkan mampu memecahkan persoalan hidup manusia dan kemanusiaan.

Peter L. Berger yang dikutip Nashir (1999) mengatakan bahwa masyarakat modern tidak begitu hirau lagi menjawab persoalan-persoalan metafisis tentang eksistensi diri manusia, asal mula kehidupan, makna dan tujuan hidup di jagat raya ini. Kecenderungan ini terjadi karena proses rasionalisasi yang menyertai modernitas telah menciptakan sekularisasi kesadaran yang memperlemah fungsi kanopi suci agama dari domain kehidupan para pemeluknya dan menciptakan suasana chaos, atau ketidakberartian hidup pada diri manusia modern.

Kecenderungan ini mengakibatkan manusia modern mengabaikan hal-hal yang bersifat sakral yang berfungsi sebagai faktor sublimasi dan pengokohan eksistensi dan misi kehidupan manusia yang bersifat luhur berubah dan digantikan oleh hal-hal yang serba rasional, sehingga terjadilah sekularisasi alam bathin manusia secara serius.

Kekhawatiran terhadap ancaman sekularisasi di Indonesia sebenarnya sempat dilontarkan oleh sosiolog Selo Soemarjan pada 8 Mei 1987 dalam sebuah seminar di Universitas Patimura. Ia memprediksikan bahwa pada tahun 2012 di Tanah Air kita akan tumbuh gejala sekularisme. Menurut Soemarjan dewasa ini perhatian kepada kemakmuran kebendaan atau uang begitu dominan. Tampak sekali, semakin dekat ke kota-kota besar maka semakin dekat pula kecenderungan itu. Sehingga apabila dalam lima repelita mendatang, tahun 2012, terus berkembang maka manusia Indonesia menjadi sekuler. Yakni menjadi manusia yang melulu berpikir ekonomi. Di lain pihak agama semakin tidak dijadikan unsur pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Nashir, 1999: XVI).

Bila mengaitkan gejala sekularisme tersebut dengan dinamika masyarakat Bali dewasa ini, perlu disimak beberapa fenomena yaitu telah terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat Bali secara signifikan. Manusia Bali tidak lagi dapat dikategorikan sebagai manusia yang polos, sabar, ramah serta

jujur. Kini manusia Bali telah dipersepsikan oleh outsider sebagai orang yang temperamental, egoistik, sensitif, dan cenderung menjadi human ekonomikus (Triguna, 2004: 1)

Bila diperhatikan pendapat kedua sosiolog tersebut nampak ada kesamaannya meskipun ruang lingkup pengamatannya berbeda. Soemarjan mengamati manusia Indonesia yang cenderung melulu berpikir ekonomi, sementara Triguna sendiri yang mengamati dinamika masyarakat Bali dewasa ini (kurang lebih 20 tahun setelah diprediksi oleh Soemarjan) memang menampakkan gejala bahwa manusia Bali telah menjadi human ekonomikus.

Gejala sekularisasi yang tumbuh bersamaan dengan rasionalisasi yang naif dalam praktiknya dapat mekar bersama dengan nilai-nilai kebendaan seperti materialisme, hedonisme, dan budaya inderawi lainnya. Batas kehadiran budaya inderawi itu kadang amat tipis, sehingga pada satu wajah sering muncul dalam gejala desakralisasi, dan pada kesempatan lainnya muncul dalam sekularisasi yang naif dan pragmatis sehingga benar-benar berwajah sekularisme.

Namun demikian betapapun kuatnya tekanan budaya inderawi tersebut, umat Hindu di Bali yang hidup dalam kehidupan modern yang bercorak duniawi, agama tetap tumbuh menjadi kekuatan profetik sehingga senantiasa terdapat supremasi nilai-nilai luhur keagamaan dalam setiap gerak kehidupannya.

Gejala positif keberagaman dan perkembangan pemikiran keagamaan yang lebih peduli pada pencerahan kehidupan manusia, kini juga dihadapkan pada gejala formalisme agama dan politisasi agama. Gejala formalisme agama nampak pada kecenderungan yang terlampau kuat untuk menampilkan bentuk-bentuk verbal atau formal dari ajaran agama. Tidak jarang terjadi reduksi terhadap substansi ajaran agama sehingga yang terjadi malah pendangkalan ajaran agama. Munculnya gerakan-gerakan untuk menghapuskan upacara keagamaan di Bali mungkin dapat dijadikan contoh.

Sementara itu formalisme agama di satu sisi memang membuka cakrawala pemikiran umat Hindu di Bali untuk lebih

menekuni ajaran-ajaran kitab suci (ada kecenderungan untuk selalu mencari rujukan dalam kitab Weda terhadap segala aktifitas keagamaan), namun di sisi lainnya hal ini tidak akan pernah memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi genius lokal yang selama ini telah terbukti mampu mempertahankan Bali ketika berhubungan dengan pengaruh dari luar. Bila menengok ke belakang tentang dinamika budaya dan agama di Bali akan nampak jelas bahwa agama Hindu yang dianut di Bali adalah sebuah akulturasi dari genius lokal dan pengaruh yang datang dari India.

Hindu sebagai agama tertua di Indonesia berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat pemeluknya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi telah merubah tata pergaulan dunia yang bergerak ke arah keterbukaan. Pergaulan lintas budaya, lintas agama telah menyebabkan dinamika dalam kehidupan budaya dan agama. Semakin intensnya pergaulan lintas agama dan budaya tersebut, menyebabkan terjadinya interaksi antar agama Hindu di Indonesia (termasuk Bali) dengan agama Hindu di India. Interaksi tersebut sebenarnya telah terjadi pada permulaan abad masehi dan menjadi lebih intens lagi saat ini, terutama dengan banyaknya orang-orang Hindu Indonesia yang pergi ke India serta banyaknya kunjungan tokoh-tokoh spiritual dari India ke Indonesia dan Bali.

Hindu Bali, Hindu Nusantara dan Hindu India yang kita lihat saat ini adalah hasil sebuah proses dialektika yang sangat panjang. Pertemuan antara tradisi Veda (Arya) dengan budaya lembah sungai Sindhu (Dravida) melahirkan Hindu di India (R.C. Majumdar, 1998: 19). Pertemuan antara bentuk-bentuk kepercayaan Indonesia dengan Agama Hindu yang datang dari India telah menghasilkan agama Hindu Indonesia. Proses interaksi terjadi secara akulturatif, dimana unsur-unsur asing diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa hilangnya kepribadian dasar kebudayaan lokal (Geria, 2000). Kemampuan kebudayaan lokal untuk beradaptasi dengan kebudayaan luar inilah yang disebut dengan istilah Local Genius. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Quarich Wales untuk mendeskripsikan kemampuan kebudayaan setempat (Indonesia) dalam

menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan (dalam Noerhadi Magetsari, 1986). Oleh karena itu masuknya unsur India sebaiknya dianggap sebagai zat penyubur yang menumbuhkan Hindu Indonesia yang tetap memperlihatkan kekhasannya (FDK.Bosch,1983; Harjati Soebadio, 1983; Soekmono, 1984). Artinya, kebudayaan Indonesia (Bali) ketika terjadinya proses akulturasi dengan kebudayaan India (Hindu) telah berada dalam posisi yang cukup kuat sehingga mampu beradaptasi dan tidak terjadi dominasi. Bukti-bukti tentang hal itu antara lain :

- ⊙ Kepercayaan tentang gunung dan laut sebagai alam roh
- ⊙ Kepercayaan adanya alam nyata dan tidak nyata
- ⊙ Adanya kepercayaan bahwa setelah mati, ada kehidupan lain dan akan menjelma kembali
- ⊙ Adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau leluhur yang dapat dimintai pertolongan (Pemda Bali, 1988)

Bila dicermati proses dialektis antara agama Hindu di India dengan agama Hindu di Nusantara khususnya Bali, maka harus ditelaah pada aspek *tattwanya*, sebab *susila* dan *upacara* adalah pengejawantahan dari *tattwa* itu sendiri.

Dasar agama adalah keyakinan akan adanya Kuasa atas segala yang ada ini. Dalam ajaran agama Kuasa itu dipanggil Tuhan, Yang Widhi Wasa, Brahman dan sebagainya. Dalam Saivastattva, Ia dipanggil Bhatara Siva, Sang Hyang Widhi Wasa dan sebagainya. Siva dan sebagainya itu Esa adanya, mempunyai banyak nama dan meliputi segala.

*Indram mitram agnim ahur atho divyah sasuparno garutman
Ekam sad vipra bahudha vadanti agnim yaman matarisvanam ahuh.*
(Rg Veda I.164.46)

Mereka menyebut Indra, Mitra, Varuna, Agni dan Dia yang bercahaya yaitu Garutman yang bersayap elok.

Satu Itu (Tuhan) orang bijaksana menyebut dengan berbagai cara:

Agni, Yama, Matarisvam.
Tad evagnis tad adityas tad vayus tad u candramah
Tad eva sukran tad brahma ta apah sa prajapatih

(Yajur Veda 32.1)

Agni adalah Itu
Aditya adalah Itu
Vayu adalah itu
Candrama adalah itu
Sukra adalah itu
Apah adalah itu
Ia adalah Prajapati

Dalam Sivastattva di Bali yang memuat Sivastava terdapat pula ajaran Ketuhanan yang dasarnya sama dengan Veda seperti tersebut di atas.

*Om nama sivaya sarvaya
Deva devaya vai namah
Rudyaya bhuvanesaya
Siva rupaya vai namah.*

Om, hormat kepada Siva, kepada Sarva,
Hormat kepada dewanya dewa
Kepada Rudra raja alam semesta
Hormat kepada Dia yang mukanya manis.

Tvam sivah tvam mahadevah
Isvarah paramesvarah
Brahma visnuca rudrasca
Purusah prakrtih tatha

Engkau adalah Siva, Mahadeva,
Isvara, Paramesvara,
Brahma, Visnu, dan Rudra,
Pun pula Purusa dan Prakrti.

Tvam kalas tvam yamo mrtyur
Varunas tvam, kuverakah
Indrah suryah sasangasca
Graha naksatra tarakah

Engkau adalah Kala, Yama, Mrtyu,
Engkau adalah Varuna, Kubera,

Indra, Surya dan Bulan
Planet, Naksatra dan Bintang-bintang
(Sura, 2001)

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan kesamaan asensi, kesamaan azas antara ajaran Ketuhanan dalam Veda dan Sivattva.

Tuhan adalah Yang Kuasa atas segala dan menyatu dengan segala yang ada.

Om bhur bhuvah svah
Om adalah bhur bhuvah svah

Om narayana evedam sarvam
Om Narayana adalah semua yang ada ini

Sarvam khalu idam brahman
Semuanya semua yang ada ini adalah Brahman

Kalimat-kalimat Veda dan Upanisad di atas menyatakan bahwa Yang Esa dalam Semua, Semua dalam Yang Esa. Dengan demikian Tuhan menyatu dengan segala yang ada.

Yatra visvam bhavatyekam idam
(Yajur Veda, 32.8)

Padanya semua yang ada ini menjadi satu.

Dalam Sivattva di Bali, ajaran tersebut dirumuskan dalam sebuah kalimat :

Ekatva anekatva svalaksana bhata
(Jnanasiddhanta 8)

Sifat Bhata Siva adalah Eka dan Aneka

Ajaran Dewata Nawa Sanga pada pangider-ider adalah penjabaran ajaran Sivattva. Pada pangider-ider itu Siva adalah : Isvara di Timur, Mahesvara di Tenggara, Brahma di Selatan, Rudra di Tenggara, Mahadeva di Barat, Sangkara di Barat Laut, Visnu di Utara, Sambhu di Timur Laut, Siva di Tengah. Ekatva anekatva yang merupakan ajaran ketuhanan agama Hindu di

Bali direalisasikan dalam tata pelaksanaan hidup beragama Hindu, sehingga memunculkan berbagai bentuk pemujaan, berbagai bentuk banten, pengastawa dan rerahinan (Sura, 2001). Dari proses dialektis ini memunculkan Mantram Tri Sandhya, Pelinggih Padmasana dan berbagai bentuk upakara/upacara yadnya.

Dari kutipan-kutipan di atas nampaknya semakin jelas benang merah antara Hindu Bali, Hindu Nusantara dan Hindu India. Nampak bahwa telah terjadi proses dialektis antara Hindu dengan budaya Nusantara dibantu oleh adanya Local Genius. Secara substantif terdapat persamaan antara Hindu India dengan Hindu Nusantara. Dalam pelaksanaan hidup sehari-hari sangat tergantung oleh banyak faktor seperti budaya dan lingkungan alamnya.

Yang terpenting dari proses dialektis itu adalah agar substansi agama dapat diwujudkan dalam menata tingkah laku pribadi dan masyarakat lebih-lebih lagi dalam kehidupan masyarakat pluralis. Substansi agama yaitu inti dari ajaran agama itu sendiri, yang keberadaannya di balik bentuk formalnya. Substansi dan misi agama akan menjadi aktual ketika agama tampil dalam bentuk yang nyata, bisa dikenali manusia dan lebih jauh lagi adalah dengan bentuk itu substansi agama menjadi fungsional dan operasional (Sufyanto, 2002). Ajaran agama baru menjadi pola tindakan, jika telah dilaksanakan sebagai disiplin, karena agama adalah praktek dan disiplin diri (Triguna, 2003).

Dalam rumusan yang lain hakikat agama bukan mutlak bersifat pribadi, melainkan mengandung pula sesuatu yang bersifat publik. Dengan rumusan-rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa beragama yang baik, tidak hanya menekankan kesalehan pribadi, tetapi yang lebih penting adalah bertumpu pada kesalehan sosial (Atmadja, 2003).

Bersamaan dengan tumbuhnya keinginan manusia untuk hidup semakin memiliki rasa aman, nyaman, ketentraman, kebahagiaan, keselamatan serta jaminan ontologis yang penuh kepastian sebagai akibat dari nestapa manusia yang secara eksistensial tak bisa lepas dari ketidakberdayaan, ketidakpastian dan kelangkaan (O'Dea, 1985: 9) menjelang abad 21 semakin

tumbuh kesadaran umat manusia untuk mencari tempat berteduh di bawah kanopi suci agama. Setelah sekian lama manusia mendewakan rasio namun ternyata tak jua mampu memecahkan segala persoalan manusia, maka kini saatnya dilakukan penyeimbangan antara rasio dengan rasa melalui ajaran agama. Kini semakin banyak orang yang berusaha mencari ketentrangan dan kedamaian lewat ajaran-ajaran agama atau spiritual. Pengabdian-pengabdian dharma (Sewaka Dharma) semakin bertumbuh, semakin banyak orang yang mampu memberikan Dharma Wacana di media elektronik, kursus-kursus keagamaan semakin banyak peminatnya, penataran calon pinandita semakin banyak, dapat dijadikan indikasi bahwa disamping memenuhi kebutuhan duniawi manusia Bali khususnya saat ini semakin banyak yang ingin menjadi pengabdian Dharma (Sewaka Dharma)

Eksistensi seni budaya Bali harus diakui sangat terkait dengan agama Hindu. Salah satu faktor penting keterkaitan antara agama Hindu dengan seni budaya Bali adalah adanya proses konsekrasi terhadap seni budaya tersebut. Konsekrasi yang dimaksud adalah proses menjadikan seni budaya itu sesuatu yang suci dengan cara pamelaspas, pamarisudhan, pawintenan, dan sejenisnya. Dengan kata lain konsekrasi adalah suatu proses mensucikan ataupun memberikan urip/hidup dan kekuatan kepada sesuatu (seni budaya). Ditinjau dari proses konsekrasi itu tidak mengubah bentuk, tetapi ia menjadi sesuatu yang lain ditinjau dari segi nilai terutama bagi mereka yang mempercayainya; seolah-olah realitas itu berubah menjadi sesuatu realitas yang maha sakti atau sakral. Jadi pada hakikatnya apa yang dianggap atau disebut sakral itu bergantung kepada sikap, perlakuan dan rasa seseorang terhadap wujud dan keadaan sesuatu itu.

Sebagai contoh konsekrasi dalam seni ornamen yang biasanya dilakukan oleh seorang Sangging. Dalam prasasti Sangging disebutkan sebagai berikut.

'Kawruhakena de Sang Citrakara, yang sira anurat gagambaran, angreka wong-wongan, lwirnia, angreka wimbaning watek dewata, wenang sira asuci rumutukel, kelapa 1, sasri, arta wilang nista masya utama, lima-lima dening amilang: 5555, limang ketengan,

limang puluh, limang kupang, limang iwu, mwanng aja angurangi ratusnia, pisang satangkep, burat wangi, lenge wangi, tadah sukla, dupa malepus, toya anyar, wus samangkana, laju amusti, lumaku anugraha ring para batara, saha mantra : Om dewa-dewi maha sidi, yadnya kunang kala midi, laksmi sidasca dirgayu, nirwigna ya suka wredisca. Laju angagem panglakan, saha mantra : Om param Brahma ya nama. Raris angreka akarepta wenang'.

Yang angukir idep:

Sang Hyang Citragotra dewataning tatah, Sang Hyang Punggung dewataning pangotok, Bhagawan Anggasti dewataning kayu, Sang Hyang Indra dewataning lang ukiran, ma: Om Saraswati bijo namah. Mwanng yan manarawang, ma : Om Sraswati sidi butulis namah swaha. Yan ngapenin, ma: Om nur urip, cahya urip, kita satuhuk, iti pangurip gawana Sang Citrakara.

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut.

Patut diketahui oleh Sang Citrakara (Sangging), apabila mereka membuat lukisan, membuat patung, demikian juga membuat arca para dewa, patut ia melaksanakan Upacara Pensucian terlebih dahulu, dengan sesajian berupa : *daksina genep, baas kulak, adeng bebek 1, benang atukel, nyuh 1, sesari, jinah manista, madya, utama, dengan jumlah : 5555, limang ketengan, limang dasaan, limang atusan, limang ewuan, dan ditambah wijia ratus: pisang aijas, sedah, ambengan, jambe banjangan, canang pangrawos, burat wangi, lengis miik, tadah sukla, dupa, yeh anyar.* Selanjutnya memusatkan pikiran, mohon anugrah ke hadapan Ida Bhatara dengan mantram : Om Dewa Dewi Maha Sidi, yadnya kunang kala midi, Laksmi sadisca dirgayu nirwigna ya suka wredisca. Lalu memegang panglakan dengan mantra: *Om Param Brahma ya namah.* Selanjutnya mengukir bentuk apapun boleh. Tatkala mengukir berdoa: Sang Hyang Citragotra, Dewa *tatah, Sang Hyang Punggung Dewa pengotok, Bhagawan Agastia dewa dari kayu, Sang Hyang Indra dewa dari ukir-ukiran.* Mantra : *Om Saraswati bijo namah, manarawang : Om Saraswati sidi batulis namah swaha.* Jika *ngapenin Om Nur urip, urip kita satuhuk, iti pangurip gawene Sang Citrakara'.*

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa proses pembuatan ornamen, lukisan, segala bentuk ukiran dilalui melalui proses ritual dengan maksud agar hasil kreatif tersebut memiliki taksu atau jiwa, atau dengan kata lain selalu melalui proses konsekrasi. Seorang Sangging atau seniman semestinya melalui proses *pawintenan* sebelum membuat karya seni, terlebih

lagi bila karya dimaksud akan digunakan untuk kepentingan agama.

Demikian pula halnya dengan bangunan-bangunan, harus dilakukan upacara *pamelaspas* yang pada hakikatnya bertujuan memberikan *urip* kepada bangunan dimaksud. Dengan demikian setelah dilakukannya upacara *pamelaspas* tersebut, bangunan tersebut sudah dianggap hidup atau berjiwa.

Proses pengalihan pengetahuan dan keterampilan dalam seni budaya Bali pada mulanya dilakukan secara tradisional. Artinya seorang seniman biasanya memiliki beberapa orang asisten yang bertugas membantunya menyelesaikan sebuah karya seni. Sebuah ukiran misalnya dibuat sketsanya oleh seorang seniman kemudian dalam pengerjaan selanjutnya dia dibantu oleh para asistennya. Hal ini juga berlaku dalam proses pembuatan lukisan. Hal ini adalah model pembelajaran secara tradisional. Semakin banyak karya tersebut direproduksi semakin membanggakan bagi seorang seniman. Tak ada istilah hak patent dalam hal ini. Karya tersebut diakui sebagai milik bersama.

Perkembangan belakangan menunjukkan bahwa semangat individualisme semakin menyeruak di tengah komunitas seni di Bali. Karya-karya individu lebih dihargai dan menjadi hak milik personal. Lebih-lebih lagi setelah karya dimaksud dipatenkan. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan dimaksud adalah ekonomi. Karya seni budaya Bali tidak lagi sekadar komoditi yang dipersembahkan untuk kepentingan agama dan seni, tetapi telah menjadi komoditi yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Secara tradisional karya seni budaya Bali pada umumnya diabdikan untuk kepentingan agama Hindu. Pura dihias dengan berbagai ragam seni ornamen, arsitektur pura dibuat demikian agungnya sebagai bentuk ungkapan rasa bhakti kepada Hyang Widhi. Perkembangan belakangan menunjukkan bahwa perhitungan secara ekonomis mulai mewarnai proses kreatif dan karya seni, meskipun harus diakui bahwa masih ada proses kreatif dan karya seni yang memang untuk seni itu sendiri ataupun untuk kepentingan agama Hindu. Gejala-gejala ini menunjukkan terjadinya transformasi kebudayaan pada masyarakat Bali. Transformasi budaya sebenarnya terjadi

sepanjang zaman, berlangsung terus hingga saat ini. Yang membedakannya adanya kecepatan proses dimaksud. Saat ini, proses transformasi budaya berjalan demikian cepatnya (Hoed,2008). Dengan demikian, masyarakat Bali saat ini dapat dikatakan terdiri atas tiga lapis budaya yaitu kebudayaan daerah/ lokal/suku bangsa, kebudayaan nasional, dan kebudayaan global. Dua lapisan terakhir sangat dominan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan masuknya kebudayaan internasional ke Bali terjadilah berbagai persaingan, benturan, adaptasi kebudayaan internasional dengan kebudayaan lokal, nasional, atau sebaliknya

Masuknya ideologi pasar telah menyebabkan terjadinya komodifikasi atau komersialisasi seni budaya Bali. Mungkin kita bisa meminjam istilah yang digunakan oleh Marx yaitu telah terjadi *fetishization* dalam seni budaya Bali. *Fetishization* seni dalam hal ini yang dimaksud adalah bahwa komoditas memiliki semacam kekuatan dan daya tarik terhadap individu yang hidup dalam relasi produksi kapitalis. Marx menjelaskan bahwa komoditas menjadi seperti itu disebabkan karena kita melupakan relasi sosial yang menciptakan komoditas seperti apa dia sekarang (Tester,2003).

Fenomena menunjukkan bahwa produksi massal karya seni budaya Bali untuk memenuhi kebutuhan pasar semakin menjadi-jadi. Kegiatan produksi dilandaskan pada perhitungan ekonomi baik waktu pengerjaan, ukuran, serta bahan-bahan yang digunakan. Keterlibatan tenaga kerja yang dibayar murah untuk proses produksi massal sangat tampak pada daerah-daerah sentra produksi barang-barang seni di Bali. Akhirnya sebagian besar masyarakat Bali kini hanya sebagai tukang seni untuk memproduksi kerajinan atau barang-barang seni dari pemilik modal.

Paparan di atas menunjukkan bahwa terjadi kontestasi dalam seni budaya Bali antara dua ideologi yaitu tradisonalisme yang mendasari proses kreatif dan produksi seni pada otoritas agama melawan ideologi pasar yang mendasarkan proses kreatif dan produksi seni pada kapital dan kebutuhan pasar. Sesuatu yang menarik untuk diikuti perkembangannya kemudian. Beberapa

pertanyaan menarik yang kemudia muncul adalah apakah seni budaya Bali oleh pengaruh budaya internasional, mampu eksis karena kemampuannya untuk menyeleksi pengaruh yang data, atau mampu menempatkan dirinya pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang pasar dengan tetap melandasi proses kreatif berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Di sinilah peran penting Universitas Hindu Indonesia melalui kegiatan UBS menyeimbangkan antara perkembangan rasional manusia Bali dengan ketajaman hati nurani melalui aktivitas seni budaya. Keseimbangan ini harus selalu menjadi pertimbangan bagi para pengambil keputusan di UNHI agar aktivitas akademik dan seni budaya berjalan selaras. Hal ini disampaikan oleh akademisi UNHI yaitu Prof.DR. I Putu Gelgel,SH,MH sebagai berikut.

1. UBS harus dilihat dari dua segi yakni kelemahan dan kelebihanannya.
2. Kelebihan UBS adalah bentuk pelestarian budaya. UBS juga sudah ditunggu-tunggu oleh generasi muda.
3. Kelemahan secara internal pelaksanaan UBS ini memerlukan biaya yang besar.
4. Jangan sampai pengeluaran UBS menghambat aktivitas akademik yang lain.

Harapannya tentu agar proses kreatif para seniman UBS dalam menghasilkan karya seni, tetap mempertahankan nilai-nilai sosio-religijs serta mampu menangkap peluang ekonomi sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas seni budaya Bali.

Modal budaya menjadi sangat penting artinya bila Bali ingin berkembang pesat sebagaimana yang dilakukan oleh Korea Selatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Huntington (2006) menyatakan bahwa budaya menjadi modal penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pernyataan ini didasarkan atas hasil penelitian yang dilakukannya dengan membandingkan antara Korea Selatan dan Ghana. Dua negara ini pada sekitar tahun 1960 an memiliki PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita yang

setara; porsi ekonomi mereka yang serupa di antara produk, manufaktur dan jasa primer; serta berlimpahnya ekspor produk primer, dengan Korea Selatan memproduksi sejumlah kecil barang manufaktur. Setelah tiga puluh tahun berjalan ternyata Korea Selatan maju sangat pesat meninggalkan Ghana. Kondisi Indonesia barangkali pada sekitar tahun 60-an hampir sama dengan Korea Selatan dan Ghana. Kini Indonesia berada dalam posisi antara Korea Selatan dan Ghana. Jika melihat kondisi kedua negara tersebut (Ghana dan Korea Selatan), Indonesia sebenarnya memiliki kelebihan berupa kekayaan alam yang melimpah. Tentu ada yang keliru dalam sistem pengelolaan kekayaan atau modal yang dimiliki sehingga sampai saat ini kekayaan alam yang dimiliki itu ternyata belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Mungkin juga karena sistem pemerintahan dan pola kepemimpinan yang diterapkan kurang memberikan dorongan untuk tumbuhnya motivasi berprestasi bagi rakyat Indonesia. Tidak ada maksud dalam tulisan ini untuk mencari kambing hitam yang menyebabkan Indonesia mengalami kondisi seperti ini, tetapi harus dilakukan introspeksi untuk memperbaiki kesalahan yang telah lalu dengan harapan bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dimasa depan.

Indonesia sebagai sebuah negara dengan status negara sedang berkembang, faktor kepemimpinan memegang peranan penting dalam memajukan masyarakat. Pola kepemimpinan yang tepat diyakini memberikan kontribusi positif mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganut faham paterernalistik yang sangat mengidolakan dan meniru perilaku pemimpinnya. Merujuk pada pandangan Huntington, dari hasil pengamatannya tentang perkembangan antara Korea Selatan dan Ghana, faktor budaya sangat memberikan pengaruh untuk mengantarkan Korea menjadi lebih maju dibanding dengan Ghana. Pertanyaan yang menarik bisa muncul jika melihat kondisi Indonesia yang konon memiliki budaya adi luhung mengapa masih tertinggal jauh jika dibanding dengan perkembangan yang telah dicapai oleh Korea Selatan. Jika berangkat dari tesis yang disampaikan oleh Huntington tersebut di atas, jika ingin mencapai kemajuan yang lebih signifikan, maka modal budaya

menjadi unsur penting dalam sistem politik, ekonomi, serta sistem sosial lainnya.

Menurut Bourdieu sebagaimana dikutip Cabin (2005) bahwa dalam masyarakat selalu ada hal-hal yang dominan dan yang didominasi, dan di dalam perbedaan inilah terletak prinsip dasar organisasi sosial. Oleh karena itulah Bourdieu tidak melihat masyarakat sebagai piramida atau seperti tangga tetapi masyarakat dipandang sebagai sebuah ruang perbedaan-perbedaan. Ruang sosial ini terorganisasi di sekeliling dua dimensi volume global sumber daya yang dipegang, dan pembagiannya antara modal ekonomi (kekayaan, gaji, penghasilan) dengan modal kultural (pengetahuan, ijazah, tata cara yang baik). Akan terjadi "pertarungan" antara keduanya yang menurut Bourdieu akan menghasilkan "champ'atau arena. Akan ada arena para seniman, birokrat, ilmuwan, pengusaha serta arena-arena lainnya. Arena-arena permainan ini akan menjadi tempat persaingan dan pergulatan, dan setiap arena memiliki aturannya sendiri dimana pada masing-masing arena akan terjadi dominasi antara modal ekonomi, modal kultural, ataupun modal sosial. Setiap individu bisa dimasukkan dalam arena dimaksud tetapi tidak akan memiliki urutan (*rangking*) yang sama dalam setiap arena. Sebagai contoh seorang dosen akan berada dalam posisi yang didominasi di kalangan industrial dalam arena kekuasaan; namun mereka mungkin dominan dalam kaitannya dengan seniman (Cabin,2005:229; Ritzer,2004: 522). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kesuksesan seseorang dalam masyarakat tergantung pada kemampuannya untuk memainkan modal sosial, modal kultural, dan modal ekonomi yang dimilikinya jika ingin menjadi aktor yang mendominasi arena.

Berangkat dari pemikiran Bourdieu dan Huntington di atas kiranya dapat dipahami bahwasanya modal kultural ,disamping juga modal sosial dan modal ekonomi menjadi sangat penting artinya bagi seorang pemimpin sehingga mampu menjadi pemain dominan dalam arena-arena yang ada dalam masyarakat sehingga dengan demikian mampu menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wirosardjono, 2007; Gorda, 1996; Kartodirdjo, 1986; Mangunharjana,1984;

Kartono, 1983). Untuk lebih memfokuskan perhatian terhadap modal budaya perlu ada sebuah batasan yang jelas tentang budaya yang dimaksudkan dalam pembahasan ini mengingat demikian banyaknya batasan-batasan tentang budaya tersebut. Budaya dalam kesempatan ini didefinisikan sebagai nilai-nilai, sikap, kepercayaan, orientasi, dan praduga mendasar yang lazim di antara orang-orang dalam suatu masyarakat (Huntington, 2006:XV). Sementara itu Fukuyama (2002) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma informal pemberi teladan yang digunakan bersama di antara anggota-anggota sebuah kelompok yang memungkinkan mereka bekerjasama. Norma-norma yang menghasilkan modal sosial, harus secara substantif mengikutsertakan kebajikan, seperti mengatakan kebenaran, kewajiban-kewajiban yang ditunaikan secara timbal balik.

Penutup.

Berdasarkan paparan di atas kiranya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. *Pertama*, perkembangan seni budaya Bali berakar dari zaman prasejarah atau masa perundagian yang tumbuh dari budaya asli Bali. Setelah masuknya pengaruh Hindu dan Buddha terjadilah proses siskritisme. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi pengembangan USB agar modal budaya yang dimiliki Bali tetap berkembang di tengah-tengah arus globalisasi. *Kedua*, proses kreatif para seniman Bali dilandasi oleh rasa bhakti dengan maksud mempersembahkan yang terbaik kepada yang dicintai dalam hal ini Hyang Widhi dan bhatarabhatari. Selalu terjadi proses konsekrasi seni agar seni budaya Bali memiliki taksu. UBS memulainya dengan acara ngerehang barong dan rangda agar memiliki taksu yang kuat. Keunikan dan keluhuran karya seni budaya Bali terjadi karena adanya proses konsekrasi baik terhadap seniman, alat-alat, serta karya seni budaya tersebut melalui ritual agama Hindu. *Ketiga*, budaya Bali tak bisa lepas dari percaturan budaya nasional dan internasional yang menyebabkan terjadinya komodifikasi seni budaya Bali. UBS dimaksudkan agar terjadi proses kreatif agar seni budaya Bali tetap rohnya sebagai bentuk bhakti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2005. *Kitab Suci Agama-Agama*. Jakarta : Teraju.
- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Abdullah, M. Yatimin. 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Abdullah, Taufik (ed). 2006. *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Ali, Muhammad. 2003. *Teologi Pluralis-Multikultural : Menghargai Kemajemukan Menjalani Kebersamaan*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Anh, To Thi. 1984. *Nilai Budaya Timur dan Barat, Konflik atau Harmoni*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1982. *Kebudayaan Bali dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, editor Koentjaraningrat. Jakarta : Djambatan.
- Cabin, Philippe. 2005. *Di Balik Panggung Dominasi, Sosiologi ala Pierre Bourdieu dalam Giddens, Anthony, Daniel Bell, Michel Forse.etc.* 2005. *Sosiologi, Sejarah dan Berbagai Pemikirannya* oleh Giddens, Anthony, Daniel Bell, Michel Forse.etc. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Capra, Fritjof. 2007. *The Turning Point. Titik Balik Peradaban, Sain, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta : Penerbit Jejak.
- Field, John. 2003. *Modal Sosial*. Bantul : Kreasi Wacana.
- Fudyartanto. 2003. *Psikologi Kepribadian Timur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Gorda, 1996. *Etika Hindu dan Prilaku Organisasi*. Denpasar: Widya Kriya Gematama
- Grondona, Mariano. 2006. *Tipologi Budaya Pembangunan Ekonomi, dalam Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Editor Laurence E. Harrison dan Samuel P.Hantington. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Huntington, Samuel P. 2006. *Kebangkitan Peran Budaya. Bagaimana*

Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia. Jakarta : LP3ES

- Harrison, Lawrence E. 2006. *Mengapa Budaya Penting, dalam Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Editor Laurence E. Harrison dan Samuel P.Hantington. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Hoed, Benny H. 2008. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia.
- Kadjeng, I Nyoman,dkk.1996/1997. *Sarasamuccaya*. Denpasar : Pemda Tingkat I Bali.
- Kartodihardjo, Sartono, 1986, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Kartono, Kartini, 1983, *Pemimpin dan Kepemimpinan: apakah pemimpin abnormal itu?*, Jakarta: Rajawali.
- Kimball, Charles. 2002. *Kala Agama Jadi Bencana*. Bandung : Mizan
- King, Richard. 2001. *Agama, Orientalisme, dan Postkolonialisme : Sebuah Kajian tentang Perselingkuhan Antara Rasionalitas dan Mistik*. Qalam : Yogyakarta
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : PT Gramedia
- Landes, David. 2006. Hampir Semua Perbedaan Berasal dari Budaya, dalam *Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Editor Laurence E. Harrison dan Samuel P.Hantington. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Mangunhardjana, AM.SJ. 1984. *Kepemimpinan*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- PGAHN 6 TahunSingaraja. 1971. *Niti Sastra Dalam Bentuk Kakawin*. Denpasar: Pemda Tingkat I Bali.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia Yang Berlari Menari "Tuhan-Tuhan" Digital*. Jakarta : PT Grasindo Widiarsana Indonesia.
- Pandji, IGBN. 1983. *Seni Sakral dalam hubungannya dengan Agama Hindu*. Denpasar : Institut Hindu Dharma.
- Pudja, G. & Tjok Rai Sudharta. 1996. *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Weda Smrti Compedium Hukum Hindu*. Jakarta : Hanuman Sakti.
- Putra, I Gusti Agung Gde. Tt. *Hubungan Kesenian Bali dengan Agama Hindu*.
- Rama, Swami. 1984. *Perenial Psychology of The Bhagavad Gita*. Pennsylvania : Himalayan International Institut



- Rama, Swami. 2005. *Hidup dengan Para Rsi Himalaya*. Surabaya : Paramita
- Ramsted, Martin (ed). 2003. *Hinduism In Modern Indonesia (A minority Religion Between Local, National and Global Interest)*. London & New York : Routledge Curzon.
- Ritzer, George – Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Preanada Media.
- Roberts, Tyler T. 2002. *Spiritualitas Posreligius: Pendekatan Hermeneutis Transfigurasi Agama dalam Praksis Filsafat Nietzsche*. Yogyakarta : Qalam
- Robertson, Roland. 1980. *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*. Jakarta : Rajawali
- Sindhunata (ed). 1999. *Mengenang YB Mangunwijaya : Pergulatan Intelektual dalam Era Kegelisahan*. Yogyakarta: Kanisius
- Sindhunata (ed). 2000. *Membuka Masa Depan Anak-anak Kita, Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius
- Sindhunata. 2006. *Kambing Hitam, Teori Rene Girard*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suru, I Made. 1983. *Manusia dan Keindahan dalam Manusia dan Budaya, Kumpulan Essay Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sutaba, I Made. 1980. *Prasejarah Bali*. Denpasar : Yayasan Purbakala Bali.
- Tester, Keith. 2003. *Media, Budaya, dan Moralitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Transkripsi Lontar Prasasti Sangging, koleksi Ida Rsi Bhujangga Citrakara, Br.Kawan Bangli.
- Utama, I Wayan Budi. 2008. *Modal Budaya dan Modal Sosial dalam Kepemimpinan : Telaah Isi Kakawin Niti Sastra dalam Dharma Smrti, Jurnal Ilmu Agama & Kebudayaan*. Denpasar : Program Magister Ilmu Agama & Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia.
- Weber, Max. 2002. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: IRCiSoD
- . 2006. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirosardjono, Soetjipto. 2007. *Simbol Budaya dan Teladan Pemimpin, Refleksi Kultural*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Yoety, Oka A. 1985. *Komersialisasi Seni Budaya Dalam Pariwisata*. Bandung : Angkasa.

BADAN PENYIARAN HINDU

Seiring dengan berkembangnya agama Hindu di Nusantara, dibutuhkan suatu upaya khusus untuk mempererat jalinan komunikasi antarumat di seluruh daerah sekaligus menyebarluaskan ajaran-ajaran agama baik kepada umat Hindu maupun masyarakat secara luas. Untuk itulah Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat membentuk Badan Penyiaran Hindu (BPH). Berdasarkan Keputusan Pengurus Harian PHDI Tahun 2018 tentang Pengurus BPH PHDI Pusat Masa Bhakti 2018-2023, setidaknya ada enam tugas dan tanggungjawab pokok BPH yang harus dijalankan oleh para pengurusnya.

Pertama adalah menyiapkan konsep, strategi, dan kebijakan untuk menyebarluaskan keindahan falsafah, nilai-nilai, dan ajaran Weda melalui berbagai media. Hal ini adalah usaha untuk mengkomunikasikan kepada khalayak luas mengenai agama Hindu, termasuk juga sebagai edukasi bagi umat se-Dharma di Nusantara. Untuk bisa meraih publik lebih luas, terutama generasi muda, BPH tidak hanya merancang strategi publikasi di media konvensional, tetapi juga merambah ke digital termasuk bergerak di media sosial.

Kedua, BPH memegang amanah untuk senantiasa memberi inspirasi kepada masyarakat dengan cara menginformasikan dan mendiseminasikan nilai-nilai ajaran Hindu baik dari sisi spiritual, kemanusiaan, maupun penghargaan kepada budaya lokal. Selaras dengan tugas sebelumnya, BPH diniatkan sebagai lembaga yang secara aktif menyebarluaskan khasanah budaya dan agama Hindu yang bukan hanya memiliki keunikan berupa kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam penyebaran informasi ini, salah satu prinsip dasar yang dipegang BPH adalah melakukan penyiaran yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan materi siaran yang menyejukkan. Keseluruhan tugas ini dijalankan baik dalam kegiatan kelembagaan maupun secara personal oleh para

pengurusnya. BPH juga diharapkan mampu mendorong umat Hindu untuk ikut bersama-sama melakukan misi ini secara mandiri.

Secara khusus, BPH juga bertugas melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penyiaran publik dan media elektronik serta digital. Tugas keempat adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Hindu di bidang publikasi dan penyiaran. BPH diharapkan berdiri di daerah-daerah di Indonesia terutama yang memiliki kantong-kantong umat Hindu. Oleh karenanya, BPH Pusat juga bertugas untuk melakukan koordinasi dengan Badan Penyiaran Hindu di daerah demi meningkatkan sinergitas. Terakhir, sebagaimana institusi lainnya, berdasarkan SK tersebut di atas, BPH diwajibkan membuat laporan berkala sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada Pengurus Harian PHDI Pusat. Laporan ini menjadi catatan penting untuk evaluasi sekaligus dokumentasi lembaga yang bisa menjadi bahan kajian tersendiri ke depan.

Keseluruhan tugas tersebut direalisasikan dalam wujud program-program yang dirumuskan dalam bingkai *Sad Dharma* atau Enam Kewajiban Dharma yang meliputi: Darmatula, Dharmawacana, Dharmagīta, Dharmayatra, Dharmasadhana, dan Dharmasanti. Mengutip dokumen hasil Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) BPH tahun 2019, citra yang hendak dibangun melalui program-program BPH antara lain:

“Hindu dengan Veda-nya adalah pengetahuan yang alamiah sekaligus ilmiah, universal, dan indah; Hindu dengan Veda-nya adalah pengetahuan yang berimbang dan menyatu antara pengetahuan spiritual (*para vidya*) dan pengetahuan materi (*apara vidya*); Hindu dengan Veda-nya adalah ajaran yang humanis dan menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan; Hindu dengan Veda-nya memberi penghargaan tinggi pada warna-warni perbedaan dan kearifan budaya Nusantara, serta menjadikannya sebagai kekayaan yang mempersatukan NKRI yang Pancasila.”

Untuk menciptakan citra yang kuat, BPH membuat strategi penyiaran, antara lain bernama *ATOM* (*A Topic One Month*). Satu topik ajaran suci Hindu akan dibahas secara khusus selama satu

bulan. Topik khusus ini akan diwarnai juga dengan informasi lainnya yang disesuaikan dengan momentum tertentu di setiap bulannya.

Sejak pertama kali pendiriannya, BPH bercita-cita dapat menghasilkan karya-karya pewartaan yang kredibel, kritis, menyejukkan, menginspirasi, sekaligus mampu meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap kemanusiaan, lingkungan, bangsa, dan negara. Selain itu BPH juga berupaya menghasilkan karya-karya pewartaan yang memotivasi dan meningkatkan kemauan warga Hindu mempelajari ajaran-ajaran dalam pustaka suci Weda. BPH juga menjadi wahana yang strategis untuk mewartakan *bhisama* maupun keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia yang dipandang perlu diketahui warga Hindu. Pada saat yang bersamaan, BPH pun melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap berita-berita yang berkaitan dengan siaran Hindu dan kearifan lokal serta berkontribusi dalam perdebatan atau diskursus yang dipandang menyimpang dari ajaran pustaka suci Weda.

Untuk menjaga kualitas pewartaan BPH, disusunlah kode etik penyiaran BPH sebagai landasan yang harus dihormati oleh para Pengurus BPH dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyiaran yang diselenggarakan oleh BPH. Kode Etik Penyiaran BPH dibuat dan diberlakukan karena BPH memiliki tanggung jawab sosial terhadap publik. Selain mengatur perihal penyiaran, kode etik ini juga menegaskan sikap dasar BPH yang menghormati heterogenitas dalam interpretasi terhadap ajaran Hindu. BPH mengakomoda dan menghormati kearifan lokal di Nusantara serta keberadaan berbagai sampradaya atau sekte. Penyiaran Hindu yang dilakukan BPH berpihak pada kelompok rentan antara lain kaum difabel, anak-anak, kelompok-kelompok marjinal, termasuk menjunjung tinggi martabat perempuan. Kode etik BPH juga menekankan upaya menghindari materi penyiaran yang terkait langsung dengan politik praktis atau kampanye politik. Bidang politik tetap mendapat ruang, walaupun hanya sebatas dalam kaitannya dengan nilai-nilai moral dan ajaran etika politik yang berlandaskan Dharma.

Adapun program-program umum BPH yang telah dirumuskan dalam Rakornas 2019 antara lain : melanjutkan

kerja sama siaran dengan stasiun televisi dan radio; Menjajagi dan mengadakan kerja sama dengan stasiun televisi lainnya; mengadakan *casting* untuk *host*, *tallent* dan narasumber; memfasilitasi masyarakat dan/atau bekerja sama dengan organisasi- organisasi/lembaga keagamaan Hindu untuk membuat sanggar teater; melakukan koordinasi dengan Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI untuk sinkronisasi program kerja; Menetapkan tema siaran selama satu tahun; mnyelenggarakan berbagai kegiatan kreatif dan kompetitif yang melibatkan masyarakat dalam melakukan siaran dengan menggunakan media sosial; mengaktifkan akun media sosial BPH Pusat untuk memublikasikan semua kegiatan BPH yang sudah dilakukan di seluruh Indonesia; mengadakan pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kompetensi warga hindu untuk menjadi dharmapracaraka; melakukan pelatihan *broadcasting*; mengadakan pelatihan *effective public speaking*; menggelar pelatihan seni peran untuk para *tallent* dan *host*; menyelenggarakan sayembara untuk penyusunan *scenario*, *esay*, *flayer*, *video documenter*; mendirikan *production house*; mendirikan sanggar teater; meningkatkan koordinasi antar-BPH baik BPH Pusat dan BPH Daerah; serta mengadakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk mendukung program-program BPH melalui penyaluran dana *corporare social responsibility* (CSR).

Dalam perjalanannya, BPH juga mengharapkan sinergi dan bantuan dari berbagai pihak untuk turut menyukseskan program-program kerja tersebut di atas. Harapan ini salah satunya tertutang dalam poin rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakornas BPH tahun 2019. BPH merekomendasikan agar ke depan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia dapat memberikan bantuan operasional secara rutin setiap tahun kepada BPH Pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Dirjen Bimas Hindu juga diharapkan dapat turut serta bersama pengurus BPH Pusat dan Daerah menyelenggarakan Rakornas secara rutin., yang teknis penyelenggaraannya dilakukan bersama dengan BPH Pusat. Perihal peningkatan kualitas SDM BPH, Dirjen Bimas Hindu seyogyanya dapat memfasilitasi atau membantu penyelenggaraan berbagai workshop atau pelatihan. Kerja sama dengan TVRI dan stasiun televisi swasta

juga diharapkan dapat didukung oleh Dirjen Bimas Hindu sehingga tiap televisi dapat menyediakan maupun menambah jam tayang program Mimbar Agama Hindu. Selain itu, guna menyikapi tantangan zaman, BPH bercita-cita untuk membuat aplikasi (*mobile app*) yang memuat konten-konten pengetahuan agama Hindu. Sasaran dari produk ini adalah generasi milenial dan generasi Z yang ke depan bisa lebih mudah mengakses ilmu pengetahuan seputar ajaran pustaka suci Weda.

